



Enabling Energy Transformation: Repositioning for The Future

Mengaktifkan Transformasi Energi: Repositioning untuk Masa Depan





Enabling Energy Transformation: Repositioning for The Future

Mengaktifkan Transformasi Energi: Repositioning untuk Masa Depan

Pertamina Trans Kontinental (PTK) terus berusaha menjalankan operasi bisnis dengan senantiasa menerapkan prinsip tata kelola yang baik, kerja sama yang harmonis dengan pemangku kepentingan serta menjaga kelestarian alam. Hal ini seiring dengan komitmen dalam merealisasikan program pengembangan usaha yang dilaksanakan secara konsisten sehingga makin mengokohkan posisi PTK dengan membaiknya kinerja operasional maupun keuangan di tengah kondisi perekonomian yang menantang.

Pertamina Trans Kontinental (PTK) is committed to run business operations by always adapting the good governance principles, harmonious cooperation with stakeholders and preserve the environment conservation. This commitment is in line with the commitment to drive business development programs, which has been carried out consistently thereby strengthening PTK's position with improved operational and financial performance as well as amidst the challenging economic conditions.

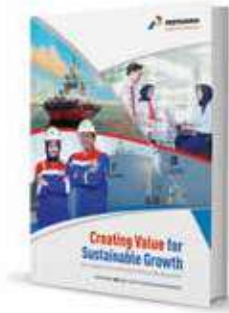
Kesinambungan Tema Laporan Tahunan

Annual Report Theme Consistency



2021

Mengaktifkan Transformasi Energi: Repositioning untuk Masa Depan



2020

Menciptakan Nilai untuk Pertumbuhan Berkelanjutan



2019

Digitalisasi Proses Bisnis dan Penguatan SDM



2018

Membangun Integrasi, Melampaui Tantangan

Kesinambungan tema laporan tahunan PT Pertamina Trans Kontinental dalam 4 tahun terakhir menjadi gambaran singkat perjalanan kinerja Perusahaan yang senantiasa berupaya untuk maju dan meningkat dari tahun sebelumnya.

Dalam laporan tahunan tahun 2018, tema memberikan gambaran kesinambungan kinerja Perusahaan dengan **"Membangun Integrasi, Melampaui Tantangan"** dalam hal ini menggambarkan bagaimana Perseroan dengan bermodalkan SDM yang Profesional, Handal dan Terpercaya melakukan integrasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Di tahun 2019, langkah lebih maju dengan memfokuskan kembali untuk mendorong tujuan dengan **"Digitalisasi Proses Bisnis dan Penguatan SDM"** untuk memanfaatkan tantangan dan peluang yang sangat besar dari revolusi digital guna memastikan bahwa PTK dapat terus menciptakan nilai-nilai terbaik di masa depan. Di tahun 2020, meskipun dunia mengalami tantangan berat dengan pandemi Covid-19 PTK tetap konsisten dengan semangat dan profesionalisme untuk mencapai target dan tujuan, mengokohkan usaha dan **"Menciptakan Nilai untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"**. Di tahun 2021 dengan mengangkat tema **"Mengaktifkan Transformasi Energi: Repositioning untuk Masa Depan"** memberikan gambaran umum tentang perubahan besar yang dialami perusahaan dari sisi bidang usaha, menyikapi efisiensi dan kinerja optimal di masa depan yang penuh perubahan.

PT Pertamina Trans Kontinental's Annual Report theme continuity in the last 4 years illustrates a brief overview of the Company's performance journey that constantly strives to advance and improve from the previous year.

In 2018, the theme presents a description of the continuity of the company's performance through **"Building Integration, Beyond Challenges"** in this case, the theme illustrates how the company supported with professional, reliable, and trusted human resource drives integration for the future sustainability. In 2019, a step forward by refocusing on driving goals with **"Digitalization of Businesses Process and Strengthening HR"** to take advantage of challenges and opportunities of the digital revolution to be sure that PTK can continue to create the best values at future. In 2020, despite the world is experiencing tough challenges during the Covid-19 pandemic, PTK remains consistent with passion and professionalism to achieve targets and goals, to solidify the business and **"Creating Value for Continuous Growth"**. In 2021 with the theme **"Activating Energy Transformation: Repositioning for the Future"** provides an overview of the major changes the company has experienced in terms of the business sector, addressing efficiency and optimal performance in a changing future.

Tentang Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental

About PT Pertamina Trans Kontinental Annual Report

PT Pertamina Trans Kontinental atau disebut "PTK" dan "Perusahaan" atau "Perseroan", menyajikan Laporan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang memuat informasi kinerja keuangan dan hasil usaha berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik. Dalam Laporan Tahunan PTK juga menyertakan Laporan Keberlanjutan.

Laporan tahunan ini juga memuat informasi-informasi yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan yang bukan merupakan pernyataan data historis yang pada umumnya menggunakan kata seperti "percaya", "mengharapkan", "mengantisipasi", "memperkirakan", "memproyeksikan" atau kata-kata serupa lainnya, dan dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang dapat bersifat pandangan ke depan (*forward looking statement*) sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku.

Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut termasuk yang disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik dan sosial di Indonesia.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Indonesia, sedangkan "Dollar AS atau USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika. Kecuali jika disebutkan lain, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Jl. Kramat Raya No. 29, Jakarta Pusat 10450
Tel : (+6221) 31923005
Faks : (+6221) 3106804

Laporan Tahunan Pertamina Trans Kontinental 2021 juga dapat dilihat dan diunduh pada:
www.ptk-shipping.com

PT Pertamina Trans Kontinental, or "PTK" or "the Company", is presenting The Annual Report ended on December 31, 2021 which contains information about the financial performance and the results of operations based on the Financial Statements audited by a Public Accounting Firm. The Annual Report of PTK also contains a Sustainability Report.

This annual report also contains information on projections, plans, strategies, and objectives that are not statements of historical data, which generally uses words such as "believe", "expect", "anticipate", "estimate", "projected" or other similar words, and can be categorized as statements that may be forward looking statement as defined by the existing regulations.

Statements containing the foresight contain risks and uncertainty of the results and events which may differ materially from what is expected and mentioned in the statement including those caused by changes in the economic environment, political and social in Indonesia.

The mention of the currency unit "Rupiah" or "Rp" or "IDR" refers to the official currency of Indonesia, while "US Dollars" or "USD" refers to the official currency of the United States. Unless otherwise stated, all financial information presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

For further information please contact:
Jl. Kramat Raya No. 29, Central Jakarta 10450
Phone : (+6221) 31923005
Fax : (+6221) 3106804

Pertamina Trans Kontinental Annual Report 2021 can also viewed and downloaded in:
www.ptk-shipping.com

Daftar Isi

Table of Contents

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan Annual Report Theme Consistency	2	Logo Perusahaan Company Logo	41
Tentang Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental About PT Pertamina Trans Kontinental Annual Report	3	Jejak Langkah Perusahaan Company Milestone	42
Daftar Isi Table of Contents	4	Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan Vision, Mission and Corporate Value	44
Capaian 2021 Achievement in 2021	7	Bidang Usaha Line of Business	46
IKHTISAR KINERJA Performance Highlights	9	Bisnis Utama dan Produk Usaha Core Business and Business Products	50
Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlight	10	Struktur Organisasi Perusahaan Corporate Organizational Structure	55
Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Operasional Business and Operation Performance Highlights	14	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	56
Ikhtisar Saham dan Obligasi Stocks and Bonds Highlights	15	Profil Direksi Board of Directors Profile	65
Ikhtisar Dividen Dividend Summary	15	Profil Pejabat Perusahaan Executives Profile	71
Ikhtisar Kinerja Lainnya Other Performance Summary	15	Sumber Daya Manusia Human Resources	78
LAPORAN MANAJEMEN Management Report	17	Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure	82
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	19	Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi Subsidiary and/or Associated Company	83
Laporan Direksi Board of Directors Report	27	Pemegang Saham dan Informasi Kepemilikan Saham Shareholders and Shares Ownership Information	85
Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk Laporan Tahunan 2021 Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2021 Annual Report	32	Kronologi Pencatatan Saham Shares Listing Chronology	87
Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2021 Statement of Responsibility from Board of Directors for 2021 Annual Report	33	Kronologi Pencatatan Efek dan Obligasi Securities and Bonds Listing Chronology	87
PROFIL PERUSAHAAN Company Profile	35	Jaringan Wilayah Operasi Operational Area	88
Identitas Perusahaan Company Identity	36	Nama & Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Name & Address of Supporting Institution and/or Profession	90
Sejarah Singkat Perusahaan Corporate Brief History	38	Daftar Alamat Kantor Office Address	91
		Informasi pada Website Perusahaan Information On Official Website	94
		Penghargaan Tahun 2021 Awards in 2021	96
		Peristiwa Penting Tahun 2021 2021 Events Highlights	98



FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Business Function Support

101

Sumber Daya Manusia

Human Resources

102

Teknologi Informasi

Information Technology

128

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

143

Tinjauan Ekonomi Global

Global Economic Overview

144

Tinjauan Perekonomian Nasional dan Industri

Overview of the National Economy and Industry

148

Sinergi Bisnis Perusahaan – Group Pertamina

Company Business Synergy – Pertamina Group

150

Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

152

Rencana Strategis 2022–2027

Strategic Plan 2022–2027

167

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

172

Tinjauan Keuangan

Financial Review

176

Analisis Posisi Keuangan

Financial Position Analysis

177

Analisis Laba Rugi

Profit and Loss Analysis

182

Analisis Arus Kas

Cash Flow Analysis

185

Analisis Rasio Keuangan

Financial Ratio Analysis

188

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Ability to Pay Debt and Accounts Receivable Collectability Level

189

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Ability to Pay Long-Term Debt

189

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Accounts Receivable Collectable Level

190

Struktur Modal dan Kebijakan Atas Struktur Modal

Capital Structure and Policy on Capital Structure

190

Kebijakan Struktur Modal

Capital Structure Policy

191

Kontribusi Kepada Negara

Contribution to The Nation

191

Key Performance Indicator dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Key Performance Indicator (KPI) and Company Health Level

192

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 Serta Proyeksi Tahun 2022

Comparison Between 2021 Target and Realization and The 2022 Projection

195

Investasi Barang Modal

Capital Goods Investment

202

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment On Capital Expenditure Investment

205

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Subsequent Material information and Facts After The Date of The Accountant's Report

205

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

206

Program Kepemilikan Saham Bagi Manajemen (MSOP) dan Pekerja (ESOP)

Management and Employee Stock Option Plan

206

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

206

Buy Back Saham dan Buy Back Obligasi

Buy Back Shares and Buy Back Bonds

207

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Material Information Containing Conflict of Interest and/or Affiliated Party Transaction

207

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary Event

210

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir	211	Audit Eksternal	371
Changes in Accounting Policies Implemented by the Company in the Current Fiscal Year		External Audit	
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan	213	Manajemen Risiko	375
Changes In Laws and Regulations That Are Significant to the Company		Risk Management	
Informasi Kelangsungan Usaha	214	Sistem Pengendalian Internal	392
Business Continuity Information		Internal Control System	
TATA KELOLA PERUSAHAAN	217	Permasalahan Hukum	402
Good Corporate Governance		Litigation	
Tata Kelola Perusahaan	218	Akses Informasi Perusahaan	404
Corporate Governance		Access to Company Information	
Rapat Umum Pemegang Saham	236	Kode Etik	409
General Meeting of Shareholders		Code of Conduct	
Dewan Komisaris	246	Whistleblowing System	420
Board of Commissioners		Whistleblowing System	
Direksi	273	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	429
Board of Directors		Inventory Management for Goods and Services Procurement	
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	293	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	441
Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment		Corporate Social Responsibility	
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	298	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	442
Board of Commissioners and Board Of Directors Remuneration Policy		Corporate Social Responsibility	
Organ Pendukung Dewan Komisaris	306	Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil	451
Supporting Organs of The Board of Commissioners		Social Responsibility Related to Fair Operations	
Sekretaris Dewan Komisaris	306	Tanggung Jawab Sosial Terkait Penerapan HAM	453
Secretary to Board of Commissioners		Social Responsibility in The Implementation of Human Rights	
Komite Audit	310	Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup	454
Audit Committee		Social Responsibility for The Environment	
Komite Investasi dan Risiko Usaha	328	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat	462
Investment and Business Risk Committee		Social Responsibility to The Community	
Komite Remunerasi dan Nominasi	340	Tanggung Jawab Sosial Terkait K3	472
Remuneration and Nomination Committee		Social Responsibility Related to HSSE	
Sekretaris Perusahaan	341	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan	486
Corporate Secretary		Social Responsibility to Customers	
Unit Audit Internal	353	LAPORAN KEUANGAN AUDIT	495
Internal Audit Unit		Audited Financial Audit	

Capaian 2021

Achievement in 2021



83.281 hari

REALISASI COMMISSION DAYS YTD

Desember 2021 tercapai 83.281 hari atau 104,15% dari target 79.964 hari kapal *existing* yang ditargetkan pada RKAP Revisi YTD Desember 2021.

Realization of Commission Days YTD December 2021 reached 83,281 days or 104.15% of the target of 79,964 existing ship days targeted in the Revised RKAP YTD December 2021.



82.883 hari

REALISASI COMMERCIAL DAYS YTD

Desember 2021 sebesar 82.883 hari (99,02%) dari 83.700 hari kapal *existing* yang ditargetkan pada RKAP Revisi YTD Desember 2021.

Realization of Commercial Days YTD December 2021 amounted to 82,883 days (99.02%) of the 83,700 existing ship days targeted in the Revised RKAP YTD December 2021.



22.661 call

REALISASI CALL KEAGENAN TANKER

tercapai 22.661 call, lebih tinggi 1,51% dari target yang telah ditetapkan sebesar 22.324 Call.

Tanker Agency call realization reached 22,661 calls, 1.51% higher from the target of 22,324 calls.



Rp7.801,86 miliar

TOTAL ASET

tercatat Rp7.801,86 Miliar atau naik 30,11% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.996,35 Miliar.

Fixed Assets was recorded at Rp7,801.86 billion, increased by 30.11% compared to Rp5,996.35 billion in 2020.



Rp3.449,11 miliar

JUMLAH EKUITAS

mengalami kenaikan 35,63% atau tercatat sebesar Rp3.449,11 Miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 2.579,60 Miliar.

Total Equity increased by 35.63% or booked at Rp3.449,11 Billion compared to Rp2.579,60 Billion in 2020.



100%

REALISASI GCG COMPLIANCE

sampai dengan Desember 2021 – 100% dari target 98%

Realization of GCG Compliance until December 2021 – 100% of the 98% target.





Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights

Secara umum, strategi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan dengan baik dan telah mendorong peningkatan kinerja Perseroan di 2021.

In most cases, the company's strategy was well prepared and implemented and drove the company's performance in 2021

Ikhtisar Kinerja Keuangan

Financial Performance Highlights

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statement of Financial Position

Rp Juta Rp Million	2021	2020	2019	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan Increase/ Decrease	
						Selisih Difference	%
Aset Lancar Current Assets	3.373.379	2.160.035	1.778.646	1.513.600	1.187.840	1.213.344	56,17%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	4.428.482	3.836.315	2.954.877	2.939.580	2.699.512	592.167	15,44%
Jumlah Aset Total Assets	7.801.861	5.996.350	4.733.523	4.453.180	3.888.352	1.805.511	30,11%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.133.013	2.320.665	1.351.807	1.266.095	1.250.799	812.348	35,00%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.219.734	1.096.086	1.039.575	1.120.806	806.580	123.648	11,28%
Jumlah Liabilitas Total Liability	4.352.747	3.416.751	2.391.382	2.386.901	2.057.378	935.996	27,39%
Ekuitas Equity	3.449.114	2.579.599	2.342.141	2.066.279	1.830.973	869.515	33,71%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities & Equity	7.801.861	5.996.350	4.733.523	4.453.180	3.888.352	1.805.511	30,11%
Kurs Nilai Tukar Akhir Tahun Per 1 USD Exchange Rate per 1 USD	14.278,00	14.105,01	13.901,01	14.481,00	13.384,00	145	1,03%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Rp Juta Rp Million	2021	2020	2019	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan Increase/ Decrease	
						Selisih Difference	%
Pendapatan usaha Revenue	3.800.987	3.058.197	2.539.806	2.050.272	1.779.411	742.790	24,29%
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(2.688.852)	(2.181.550)	(1.859.832)	(1.399.856)	(1.331.380)	(507.302)	23,25%
Laba bruto Gross profit	1.112.135	876.647	679.974	650.416	448.031	235.488	26,86%
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	642.240	483.930	374.161	326.775	235.881	158.310	32,71%



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Rp Juta Rp Million	2021	2020	2019	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan Increase/ Decrease	
						Selisih Difference	%
Laba tahun berjalan Profit for the year	530.539	423.377	294.998	279.092	182.984	107.162	25,31%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	546.066	413.733	275.862	235.306	167.300	132.333	31,99%
EBITDA	1.111.055	823.547	634.089	591.697	412.617	287.508	34,91%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:							
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	530.539	423.377	294.998	279.092	182.984	107.162	25,31%
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Total comprehensive income attributable to:							
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	546.066	413.733	275.862	235.306	167.300	132.333	31,99%

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flow

Rp Juta Rp Million	2021	2020	2019	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan Increase/ Decrease	
						Selisih Difference	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	1.299.240	604.669	427.195	210.646	186.204	694.571	114,87%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(660.338)	(733.156)	(130.796)	(285.324)	(444.723)	72.818	(9,93%)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(30.896)	55.534	(130.282)	218.553	242.069	(86.430)	(155,63%)
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate on cash and cash equivalents	2.677	10.938	(12.427)	25.977	(1.956)	(8.261)	(75,53%)

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flow

Rp Juta Rp Million	2021	2020	2019	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan Increase/ Decrease	
						Selisih Difference	%
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas Increase (decrease) of net cash and cash equivalents	610.683	(62.015)	153.690	169.852	(18.406)	672.698	(1.084,73%)
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of year	652.483	714.498	560.808	390.956	409.362	(62.015)	(8,68%)
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of year	1.263.166	652.483	714.498	560.808	390.956	610.683	93,59%

Rasio Keuangan (%)

Financial Ratio (%)

	Satuan Units	2021	2020	2019	2018	2017
RASIO LIKUIDITAS Liquidity Ratio						
Rasio Kas Cash Ratio	%	40,32	28,12	52,90	44,36	31,25
Rasio Lancar Current Ratio	%	107,67	95,92	131,58	119,55	91,39
RASIO SOLVABILITAS Solvency Ratio						
Rasio Jumlah Modal Sendiri terhadap Total Aset Ratio of Total Own Capital to Total Assets	%	44,21	43,02	49,48	46,40	47,09
KOLEKTIBILITAS PIUTANG Accounts Receivable Collectability						
Rata-rata Periode Penagihan Piutang Average Accounts Receivable Collection Period	Hari Days	72,41	117,69	84,59	93,89	98,44
RASIO PROFITABILITAS Profitability Ratio						
Ratios Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return to Equity (ROE) Ratio	%	18,18	19,64	14,41	15,62	11,10%
Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	%	14,59	13,73	13,57	13,42	10,85
Marjin Laba Operasi (OPM) Operating Profit Margin (OPM)	%	17,20	18,26	14,13	20,57	13,54



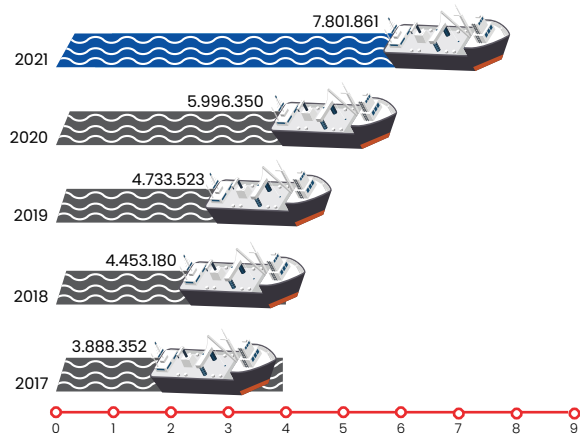
Rasio Keuangan (%)

Financial Ratio (%)

	Satuan Units	2021	2020	2019	2018	2017
Marjin Laba Bersih (NPM) Net Profit Margin (NPM)	%	13,96	13,84	10,64	13,61	10,28
RASIO AKTIVITAS Activity Ratio						
Rasio Perputaran Persediaan Inventory Turnover Ratio	Hari Days	0,01	-	-	-	0,07
Perputaran Jumlah Aset Total Asset Turnover	%	48,72	50,98	60,14	46,98	48,92

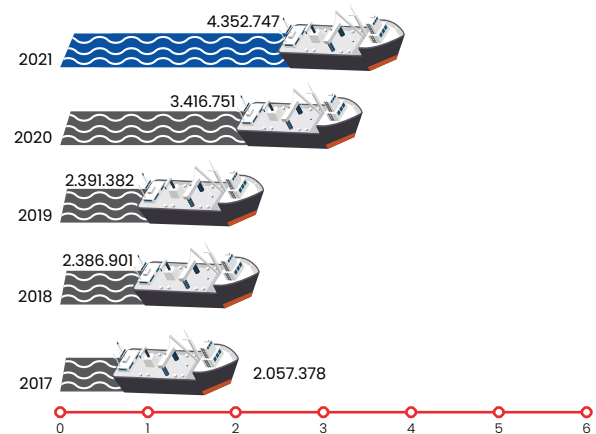
Jumlah Aset (Rp Juta)

Total Assets (Rp Million)



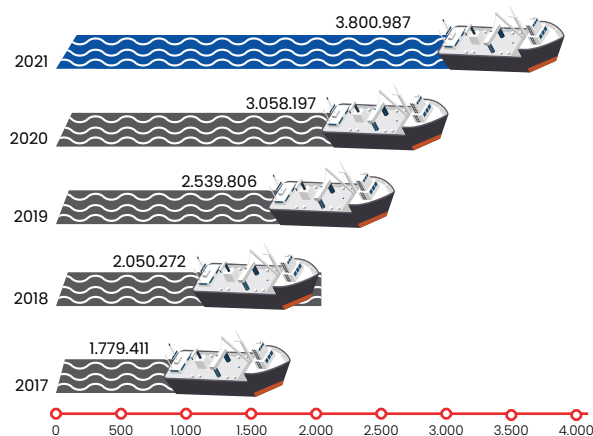
Jumlah Liabilitas (Rp Juta)

Total Liabilities (Rp Million)



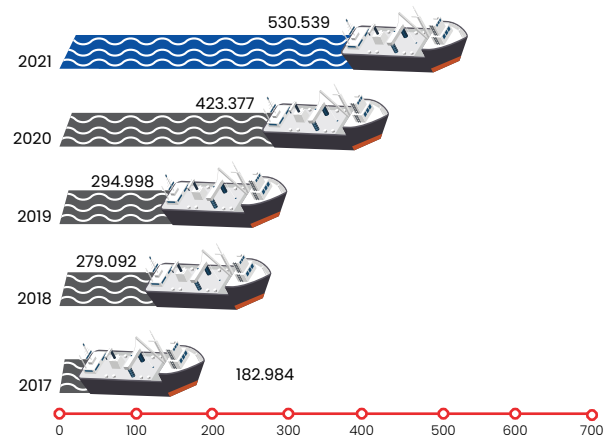
Pendapatan Usaha (Rp Juta)

Total Revenue (Rp Million)



Labatahun Berjalan (Rp Juta)

Profit for The Year (Rp Million)



Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Operasi

Business and Operation Performance Highlights

Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Operasional

Business and Operational Performance Highlight

	Satuan Units	2021	2020	2019	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan Increase/ Decrease	
							Selisih Difference	%
NOA	Kejadian Case	1	-	-	-	-	1	N/A
Fatalitas / Fatalities		1	-	-	-	-	1	N/A
Tumpahan Minyak Oil Spills		-	-	-	-	-	-	-
TRIR Total		0,12	0,14	-	0,34	-	-	-
Jam Kerja Selamat Safe Working Hours		6.326.040*	7.178.840	6.271.064	5.905.976	5.333.160	-	-
Sumber Daya Manusia / Human Resource								
Pekerja <i>Permanent</i> Permanent Employee	Orang Person	599	376	346	367	366	223	59,31%
Pekerja <i>Temporary</i> Temporary Employee		50	44	40	84	55	6	13,64%
Pekerja <i>Outsourcing</i> Outsourced Employees		564	478	282	222	188	86	17,99%
Eksplorasi Kapal / Ship Exploitation Activities								
Jumlah Armada Kapal Milik Amount of Owned Ships	Unit	344	125	84	67	54	219	175,20%
Jumlah <i>Operation Days</i> Kapal Milik dan <i>Brokerage</i> Total Operation Days of Own Vessels and Brokerage	Hari Days	90.651	43.907	29.476	21.694	16.275	46.744	106,46%
<i>Commission Days</i> Kapal Milik Commission Days of Own Vessels	Hari Days	83.281	36.646	23.015	19.559	13.604	46.635	127,26%
Volume Angkut COA COA Freight Volume	kl	660.761	721.546	754.003	780.511	834.363	(60.785)	(8,42%)
Jasa Maritim/Marine Service								
Jumlah <i>Call</i> Keagenan Tanker Pusat dan Cabang Total Tanker Agency Call Head and Branch Offices	call	22.661	16.163	2.364	1.669	2.163	6.498	40,20%
Jumlah <i>Call</i> Administrasi Pelabuhan Khusus Total Administration Call of Specific Port		-	-	-	24	278	-	-
Jasa Operasi Kepelabuhanan – Diversifikasi Usaha (Rp juta)/ Port Operations Service – Business Diversification (Rp juta)								
Pendapatan Segmen Jasa Operasi Kepelabuhanan Port Operations Service Segment Income	Rp juta Rp million	1.863.867	1.742.349	1.382.443	766.970	735.995	121.518	6,97%

* Dari kasus fatality 27 Maret 2021/ from fatality case on March 27, 2021.



Ikhtisar Saham dan Obligasi

Stocks and Bonds Highlights

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, PTK tidak melakukan aksi korporasi terkait penawaran saham umum maupun penerbitan efek lainnya. Oleh karena itu, PTK tidak memiliki informasi terkait ikhtisar saham dan/atau efek lainnya.

As of December 31, 2021, PTK has not executed any corporate action related to shares public offering or other securities issuance. Therefore, PTK does not disclose any information related to shares and/or other securities highlights.

Ikhtisar Dividen

Dividend Summary

Pada tahun 2021 PTK memberikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp9,94 miliar.

In 2021 PTK will pay dividends to shareholders of Rp9.94 billion.

Ikhtisar Kinerja Lainnya

Other Performance Summary

Kinerja Lainnya

Other Performance

Uraian Description	2021	2020	2019	2018
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN Company's Soundness Level	88,50 (AA) SEHAT/ HEALTHY	90,00 (AA) SEHAT/ HEALTHY	91,00 (AA) SEHAT/ HEALTHY	94,37 (AA) SEHAT/ HEALTHY
SKOR GCG GCG Score	79,50 BAIK / GOOD (BPKP)	81,94 BAIK / GOOD Self Assessment	77,73 BAIK / GOOD (BPKP)	80,06 BAIK / GOOD Self Assessment





Laporan Manajemen

Management Report

Terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, khususnya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang berdampak terhadap kinerja Perseroan dengan hasil dari implementasi kebijakan-kebijakan strategis telah memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Perseroan.

Continue to increase the effectiveness of its supervision of the company's strategies, especially in the face of changes in the business environment that affect the company's performance with result of implementing the strategic policies has had a positive impact on the company's performance



AMIR HAMZAH
Komisaris Utama
President Commissioner



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Izinkan kami mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan Pengawasan dalam laporan tahunan Perusahaan tahun 2021 yang akan menjadi bagian dalam pelaporan manajemen atas kinerja Perusahaan di sepanjang tahun 2021, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Commissioners, allow us to present our report in the Company's 2021 annual report, which will be part of the management's reporting on the Company's performance throughout 2021, particularly in the implementation of supervisory and advisory duties to the Board of Directors.

Pengawasan Dewan Komisaris Atas Kebijakan Strategis Direksi

Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa strategi Perusahaan telah dijalankan dengan efektif. Mekanisme pengawasan khususnya dilakukan melalui rapat gabungan dan rapat Pembahasan masalah strategis, serta berbagai evaluasi dan arahan, khususnya terkait dengan penyusunan dan monitoring pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perusahaan, Dewan Komisaris juga melakukan kunjungan kerja ke region, baik khusus mengenai kinerja, maupun

Supervision of The Board of Commissioners on The Strategic Policy of The Board of Directors

The Board of Commissioners always ensures that the Company's strategy has been implemented effectively. The supervisory mechanism is specifically carried out through joint meetings and discussion meetings on strategic issues, as well as various evaluations and directions, particularly related to the preparation and monitoring of the implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP). In supervising the implementation of the Company's strategy, the Board of Commissioners also conducts working visits to branches, both specifically

kunjungan dalam rangka kegiatan tertentu.

Beberapa pembahasan yang bersifat strategis pada tahun 2021 yang telah dilakukan antara lain pembahasan mengenai tindakan-tindakan Direksi yang berdasarkan ketentuan memerlukan persetujuan/rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap implementasi strategi Perusahaan, khususnya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang berdampak terhadap kinerja Perusahaan.

Dalam memberikan arahan kepada direksi, Dewan Komisaris menggunakan beberapa mekanisme antara lain melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, rapat pembahasan permasalahan strategis serta mekanisme evaluasi, arahan, tanggapan dan persetujuan. Rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi pada tahun 2021, telah dilaksanakan 36 (tiga puluh enam) kali. Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai kinerja Perusahaan, laporan masing-masing Direktorat, tindak lanjut rapat sebelumnya, serta beberapa agenda lainnya.

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Dalam melaksanakan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai hal, khususnya pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan dan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam RKAP. Dewan Komisaris menyadari bahwa pencapaian KPI dan target RKAP

regarding performance, as well as visits in the context of certain activities.

Several strategic discussions in the year 2021 that have been implemented include discussions on the actions of the Board of Directors which, based on the provisions, require approval/recommendation from the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners continues to strive to improve the effectiveness of supervision on the implementation of the Company's strategy, particularly in anticipating changes in the business environment that have an impact on the Company's performance.

In providing direction to the Board of Directors, the Board of Commissioners uses several mechanisms, including through joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, Strategic Issues Discussion meetings as well as evaluation, direction, response, and approval mechanisms. In 2021 joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been conducted 36 (thirty-six) times. In the meeting, discussed among others, the company's performance, reports of each Directorate, follow-up to previous meetings, and several other agendas were discussed.

Assessment on Performance of The Board of Directors

In carrying out the performance appraisal of the Board of Directors, the Board of Commissioners considers various things, in particular the achievement of the Company's *Key Performance Indicators* (KPI) and the achievement of targets set in RKAP. The Board of Commissioners realizes that the



dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, sehingga menjadi salah satu hal yang juga menjadi pertimbangan Dewan Komisaris.

Sepanjang 2021, Perseroan Perusahaan mampu memaksimalkan pendapatan dengan capaian sebesar Rp3,80 triliun. Jumlah tersebut meningkat 24,29% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,06 triliun, serta mampu meningkatkan pencapaian laba bersih menjadi Rp530,54 miliar pada tahun 2021 meningkat 25,31% dari Rp423,38 miliar pada tahun 2020

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas hasil kinerja Direksi yang telah berhasil menjalankan pengurusan Perusahaan maupun usaha Perusahaan dengan baik di tahun 2021. Dewan Komisaris mendorong Direksi agar melakukan evaluasi terhadap kinerja yang tidak mencapai target RKAP 2021. Terhadap keseluruhan pencapaian kinerja PTK tahun 2021, Dewan Komisaris menilai usaha-usaha yang telah dilakukan Direksi sepanjang tahun 2021 untuk melakukan perbaikan dalam meningkatkan seluruh kinerja perusahaan sudah baik, untuk itu Dewan Komisaris memberikan apresiasi. Namun demikian Direksi masih perlu meningkatkan kerja keras untuk melakukan semua perbaikan guna mencapai kinerja yang lebih baik.

Pandangan Dewan Komisaris Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Pada tahun 2021, operasi perusahaan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran Covid -19 yang menyebar ke berbagai Negara termasuk Indonesia. Efek

achievement of KPI and RKAP targets is influenced by economic conditions, so that it becomes one of the things that is also considered by the Board of Commissioners.

Throughout 2021, the Company's was able to maximize revenue by achieving Rp3.80 trillion. This figure increased by 24.29% compared to Rp3.06 trillion in 2020 and was able to increase the achievement of net profit to Rp530.54 billion in 2021, increased by 25.31% from Rp423.38 billion in 2020.

The Board of Commissioners expresses its appreciation for the results of the performance of the Board of Directors who have successfully carried out management of the Company and business appropriately in 2021. The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to evaluate performance that did not achieve the 2021 RKAP target. Regarding the overall achievement of PTK performance in 2021, the Board of Commissioners assesses the efforts that have been made by the Board of Directors throughout 2021 to be improved in improving the overall performance of the company have been good, for which the Board of Commissioners gives appreciation. However, the Board of Directors still needs to increase their hard work to make all improvements to achieve higher performance.

The Board of Commissioners' View on The Business Prospects Developed by The Board of Directors

In 2021, the company's operations have been and may continue to be affected by the spread of Covid-19 which has spread to various countries including Indonesia. The future

masa depan dari virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Perusahaan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Perusahaan. Oleh karenanya, kebijakan efisiensi dan percepatan produktivitas merupakan langkah yang tepat agar Perusahaan tetap mampu mencetak laba sesuai target. Untuk itu, Direksi diharapkan agar meningkatkan peran dan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, terutama pengawasan penggunaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa. Kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasional Perusahaan perlu lebih ditingkatkan.

Perlu dicermati bahwa kondisi eksternal yang berubah setiap saat dapat menimbulkan gejolak pada perekonomian global sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu, Direksi diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dengan kecukupan kajian risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta memperhatikan kondisi Perusahaan.

Direksi telah menyusun prospek usaha yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022. Penyusunan RKAP 2022 telah melalui kajian komprehensif dari unit-unit kerja, berdasarkan asumsi-asumsi dasar makro ekonomi, dan asumsi lainnya yang sudah melalui perhitungan yang cermat bersama dengan Holding dan Subholding. Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas rancangan RKAP 2022 dan menyampaikan arahan secara tertulis kepada Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa tanggapan dan persetujuan mengenai usulan RKAP PTK tahun 2022 dan telah disampaikan

effects of the Covid-19 virus on Indonesia and the Company cannot be determined at this time. A significant increase in the number of Covid-19 infections or a prolonged spread could affect Indonesia and the Company. Therefore, efficiency policies and productivity acceleration are the right steps so that the Company is still able to print profits according to the target. To that end, the Board of Directors is expected to increase the role and function of the Internal Control Unit (SPI) in supporting the achievement of company goals, especially monitoring the use of the budget, the process of procurement of goods and services. The principles of Good Corporate Governance as the foundation of the Company's operations need to be improved further.

The uncertainty of external conditions shall be concerned that may cause turmoil in the global economy that will affect the achievement of the pre-determined targets. For this reason, the Board of Directors is expected to prioritize the prudential in decision making with the adequacy of risk assessment both quantitatively and qualitatively and considering the Company's condition.

The Board of Directors has prepared business prospects as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2022. The preparation of the 2022 RKAP has passed comprehensive study of work units, based on basic macroeconomic assumptions, and other assumptions that have passed careful calculations with Holding and Subholding. The Board of Commissioners has reviewed the RKAP 2022 draft and submitted written directions to the Board of Directors. Furthermore, the Board of Commissioners has provided several responses and approvals regarding the 2022 RKAP PTK proposal and has been submitted to the Board of Directors for later submission to



kepada Direksi untuk kemudian diajukan ke RUPS Pengesahan RKAP.

Pandangan atas Implementasi Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS)

Perusahaan meyakini bahwa dengan semakin meningkatnya implementasi GCG, maka dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan yang akan meningkatkan nilai tambah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Perusahaan secara berkala melakukan revidi dan revisi terhadap beberapa pedoman untuk disesuaikan dengan perubahan bisnis dan ketentuan yang berlaku. Sebagai komitmen dalam menegakkan standar etika perusahaan, setiap tahun seluruh insan PTK diwajibkan untuk menyatakan kesanggupan menaati dan melaksanakan setiap butir *Code of Conduct*, yang diwujudkan dalam suatu pernyataan kepatuhan secara tertulis yang ditandatangani oleh setiap insan PTK.

Dewan Komisaris memberikan arahan bahwa masih diperlukan sosialisasi tentang seluk-beluk dan mekanisme WBS kepada seluruh *Stakeholders* sehingga kepedulian *Stakeholders* untuk menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang dapat merugikan PTK semakin meningkat.

Penilaian Atas Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan tugas lainnya, dan untuk memastikan kecukupan dan efektivitas mekanisme kontrol risiko internal dan eksternal, Dewan Komisaris

the GMS for the Ratification of the RKAP.

View on Whistleblowing System (WBS) Management Implementation

The Company believes that with the increasing of GCG implementation, the company's reputation and stakeholder trust will improve which will increase positive added value both in short and long term.

The Company periodically reviews and revises several guidelines to be adapted to business changes and applicable regulations. As a commitment to upholding the company's ethical standards, every year all PTK personnel are required to state their ability to comply with and implement each point of the Code of Conduct, which is manifested in a written compliance statement signed by every PTK employee.

The Board of Commissioners provides direction that it is still necessary to disseminate information about the ins and outs of the WBS mechanism to all stakeholders thereby the stakeholders' awareness to submit report of violation indication that may threat PTK will increase.

Performance Appraisal of The Board of Commissioners' Committees

In carrying out its supervisory function and other duties, and to ensure the adequacy and effectiveness of internal and external risk control mechanisms, the Board of Commissioners is assisted by 2 (two) supporting committees,

dibantu oleh 2 (dua) komite pendukung, yaitu Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit dan Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, semakin efektif dan efisien, sesuai program Kerja Komite Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2021, Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 5 kali, melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan dan tugas lainnya, antara lain:

1. Memonitor dan mengevaluasi proses penyelesaian dan proses audit laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaan tahun buku 2021.
2. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan tugas internal audit
3. Melakukan evaluasi untuk penunjukan eksternal auditor yang akan diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.
4. Melakukan evaluasi dan memonitor atas laporan Direksi tentang progres pelaksanaan arahan RUPS.

Selama tahun 2021, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah membantu Dewan Komisaris dalam memberikan masukan kepada Direksi terkait kebijakan manajemen risiko, antisipasi, serta penanganannya. Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melaksanakan rapat sebanyak 5 kali. Sepanjang tahun 2021, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melaksanakan

namely the Audit Committee and the Investment and Business Risk Committee.

The Board of Commissioners considers that the Audit Committee and the Investment and Business Risk Committee have carried out their duties and responsibilities well, more effectively and efficiently, in accordance with the 2021 Committee Work program which has been approved by the Board of Commissioners.

Throughout 2021, the Audit Committee has assisted the Board of Commissioners in supervising and identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners in accordance with the principles of good governance. The Audit Committee has held 5 meetings, carried out the annual work plan and budget and other tasks, including:

1. Monitor and evaluate the completion and audit process of the company's financial accountability report for the 2021 financial year.
2. Evaluate the effectiveness of the implementation of internal audit tasks
3. Evaluate the appointment of an external auditor who will be proposed by the Board of Commissioners to the GMS to audit the 2021 Financial Statements.
4. Evaluate and monitor the report of the Board of Directors regarding the progress of implementing the GMS directives.

Throughout 2021, the Investment and Business Risk Committee has assisted the Board of Commissioners in providing input to the Board of Directors regarding risk management policies, anticipation and handling. The Investment and Business Risk Committee has held 5 meetings. Throughout 2021, the Investment and Business Risk Committee has carried out the following activities:



beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan *monitoring* pengelolaan risiko,
2. Melaksanakan evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan GCG,
3. Mengevaluasi pemetaan risiko dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris,
4. Melakukan evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan arahan RUPS di bidang Manajemen Risiko,
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

Apresiasi

Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Direksi dan seluruh pekerja PTK atas kerja keras dan dedikasinya kepada Perusahaan.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh mitra strategis PTK atas kerja sama yang baik selama ini. Kami juga berterima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan selama ini sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

1. Evaluate and monitor risk management,
2. Carry out evaluation and monitoring of GCG implementation,
3. Evaluating Risk mapping in relation to the implementation of the duties of the Board of Commissioners,
4. Evaluating and monitoring the implementation of the GMS directives in the field of Risk Management and GCG,
5. Carry out other tasks requested by the Board of Commissioners.

Appreciation

Finally, on behalf of the Board of Commissioners, we would like to extend our deepest gratitude to the Board of Directors and all employees of the Company for their hard work and dedication to the Company.

We also thank all of PTK's strategic partners for the good cooperation so far. We also would like to thank the shareholders for the trust and support given so far that the Board of Commissioners can carry out their duties and responsibilities properly.

Jakarta, Juni 2022/June 2022

Atas Nama Dewan Komisaris/On behalf of Board of Commissioners

PT Pertamina Trans Kontinental

AMIR HAMZAH
Komisaris Utama
President Commissioner



NEPOS MT PAKPAHAN
Direktur Utama
President Director



Laporan Direksi

Board of Directors Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

PTK berhasil melewati tahun 2021 yang penuh tantangan dan tetap mampu mempertahankan kinerja dengan baik. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Tahunan yang menggambarkan pencapaian kinerja Perusahaan tahun 2021, serta berbagai upaya Manajemen yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021.

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,,

PTK managed to pass the challenging year of 2021 and managed to maintain good performance. On this occasion, please allow us to submit an Annual Report that describes the Company's performance achievements in 2021, as well as various Management efforts that have been carried out throughout 2021.

Dinamika bisnis yang terus berlanjut seiring dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia, mengharuskan PTK berbenah diri dan bertransformasi untuk mempertahankan capaian kinerja agar tetap positif di tahun 2021 serta meraih pertumbuhan di masa mendatang. Segenap unsur Manajemen dan Pekerja serta semua lini memahami visi misi serta tujuan perusahaan untuk dapat bergerak bersama melakukan perubahan memberikan pelayanan yang terintegrasi.

Business dynamics that continue in line with the Covid-19 pandemic that hit the world, require PTK to improve and transform to maintain positive performance in 2021 and achieve future growth. All elements of Management and Employees as well as all lines understand the company's vision, mission, and goals to be able to move together to make changes to provide integrated services.

Kondisi Makro Ekonomi

Perekonomian global di tahun 2021 berangsur mengalami pemulihan walaupun pandemi Covid-19 masih berlanjut di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik sejak awal tahun 2021. Sejalan dengan roda pergerakan

Macro Economic Conditions

The global economy in 2021 is gradually experiencing a recovery despite the Covid-19 pandemic prolonged in many countries worldwide, including Indonesia. Indonesia's economic growth has continued to improve since early of 2021. In line with the positive

makroekonomi Indonesia yang positif, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh hingga 3,69 persen, atau lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi -2,07 persen dengan tingkat inflasi 1,87%. Tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2021 mencapai Rp16,9 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta. Kondisi ini tentunya berdampak positif pada pertumbuhan industri sehingga dapat menetapkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

Implementasi Strategi Serta kinerja tahun 2021

Sebagai upaya untuk memantapkan posisi Perusahaan dalam peta industri di Indonesia, PTK telah menerapkan strategi bisnis yang komprehensif mencakup rangkaian program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyokong pertumbuhan usaha sekaligus memperkuat lini operasional Perusahaan, di antara program tersebut terdapat program kerja utama Tahun 2021 yaitu melakukan penambahan jumlah armada dan pengembangan kegiatan *dredging*, *logistic base*, *fresh water supply*, *crewing agent* serta keagenan.

Melalui berbagai penetapan dan penerapan berbagai kebijakan strategis, secara umum dapat kami sampaikan bahwa kinerja PTK terus bertumbuh dan meningkat secara berkelanjutan. Peningkatan kinerja telah dilakukan dengan perbaikan-perbaikan baik secara manajerial maupun operasional.

Melalui pengelolaan segmen bisnis *shipping*, *marine services* dan *logistic services* selama tahun 2021 PTK telah merealisasikan pendapatan usaha sebesar Rp3,80 triliun, jumlah tersebut meningkat 24,29%

pace of Indonesia's macroeconomic, the Central Statistics Agency (BPS) noted that the Indonesian economy cumulatively throughout 2021 managed to grow positively up to 3.69 percent, or better than 2020 which experienced contraction -2.07 percent with an inflation rate of 1.87%. The level of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) in 2021 reached Rp16.9 trillion and GDP per capita achieved Rp62.2 million. This condition certainly has a positive impact on industrial growth thereby was capable to set higher achievements compared to 2020.

Strategy Implementation And Performance In 2021

As an effort to strengthen the Company's position in the industrial map in Indonesia, PTK has implemented a comprehensive business strategy that includes a series of programs and activities that are effective and efficient in supporting business growth while strengthening the Company's operational lines, among these programs are the 2021 main work program, namely adding number of fleets and development of dredging activities, logistics base, fresh water supply, crewing agents, and agencies.

Through various determinations and implementation of various strategic policies, in general we can convey that PTK's performance continues to grow and improve in a sustainable manner. Performance improvements have been made with improvements both managerially and operationally.

Through the management of the shipping, marine services and logistics services business segments during 2021 PTK has realized operating revenues of Rp3.80 trillion, this figure increased by 24.29% compared to Rp3.06



dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp3,06 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya jasa maritim yang tumbuh 37,10% atau setara dengan Rp454,04 miliar dari Rp1,22 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,67 triliun pada tahun 2021. Keberhasilan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah aset Perseroan yang tercatat sebesar Rp7,80 triliun. Nilai aset tersebut mengalami kenaikan sebesar 30,11% dari tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp5,99 triliun.

Di sisi perolehan laba, Perusahaan berhasil mencatatkan peningkatan laba tahun berjalan sebesar 25,31% dari Rp423,38 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp530,54 miliar pada tahun 2021.

Prospek Usaha

Perkembangan ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan penguatan dalam beberapa indikator utama hingga akhir 2021, serta prediksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2022 akan naik pada kisaran 5,6% memberikan kepercayaan diri bagi manajemen untuk menetapkan prospek usaha yang bersifat progresif dengan berbagai perbaikan dan penyesuaian terhadap kondisi pasar. PTK optimis akan dapat mengembangkan prospek usaha yang lebih optimal di tahun yang akan datang. Dengan demikian, mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal, Perusahaan akan mampu mencapai kinerja pertumbuhan yang lebih baik.

Implementasi GCG

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan PTK terus mengalami kemajuan yang berarti dari waktu ke waktu. PTK sangat meyakini

trillion in 2020. This increase was mainly driven by the increase in maritime services which grew 37.10% or equivalent to Rp454.04 billion from Rp1.22 trillion in 2020 to Rp1.67 trillion in 2021. This success resulted in an increase in the total assets of the Company which was recorded at Rp7.80 trillion. The value of these assets has increased by 30.11% from 2020 which was recorded at Rp5.99 trillion.

On the profit side, the Company managed to record a 25.31% increase in profit for the year from Rp423.38 billion in 2020 to Rp530.54 billion in 2021.

Business Prospect

The growth of Indonesian economy which continues to show strengthening in several key indicators until the end of 2021, as well as predictions of economic growth based on data from the Ministry of Finance in 2022 will grow around 5.6% provide confidence for management to set a progressive business prospect with various improvements and adjustments to market conditions. PTK is optimistic that it will be able to develop more optimal business prospects in the coming year. However, considering various internal and external factors, the Company will be able to achieve better growth performance.

GCG Implementation

The implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles carried out by PTK continues to make significant progress from time to time. PTK strongly believes that

bahwa implementasi prinsip GCG bukanlah sekedar upaya Perusahaan untuk menaati aturan yang berlaku, tapi lebih dari itu bahwa dengan mengimplementasikan prinsip GCG secara baik dan benar, maka keberhasilan dan keberlanjutan Perusahaan di masa-masa mendatang akan lebih terjamin.

Segenap manajemen PTK memegang komitmen penuh untuk menerapkan GCG secara konsisten dan maksimal dalam implementasinya. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut penegakan prinsip akuntabilitas, tanggung jawab mandat dan implementasi pedoman serta mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dalam rangka melindungi kepentingan Perusahaan dan pemegang saham.

PTK juga terus meningkatkan kualitas struktur dan organ GCG yang dimilikinya. Walau masih belum sempurna, namun seluruh proses bisnis dan operasional yang dijalankan PTK selalu diselaraskan dengan prinsip GCG. Tujuannya agar PTK dapat selalu menaati aturan yang berlaku juga untuk mengurangi risiko yang dihadapi Perusahaan di kemudian hari.

Tanggung Jawab Sosial

PTK berkomitmen agar kegiatan operasional perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar sehingga masyarakat sekitar dapat lebih sejahtera dan mandiri. Terciptanya masyarakat di sekitar wilayah operasi yang sejahtera dan mandiri serta lingkungan yang lestari akan menempatkan perusahaan menjadi warga masyarakat yang baik (*good corporate citizen*) dan meraih keuntungan yang langgeng.

PTK telah memiliki strategi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Kepedulian perusahaan

the implementation of GCG principles is not only the Company's efforts to comply with applicable rules, but more than that by implementing GCG principles properly and correctly, the Company's future success and sustainability will be more guaranteed.

All PTK's management are fully committed to implement GCG consistently and optimally. One of the main topics in corporate governance concerns the enforcement of the principle of accountability, mandate responsibility and implementation of guidelines and mechanisms to ensure good behavior to protect the interests of the Company and shareholders.

PTK also continues to improve its GCG structures and organs quality. Although still imperfect, all business and operational processes carried out by PTK are always aligned with GCG principles. The goal is that PTK can always comply with prevailing regulations as well to mitigate the risks faced by the Company in the future.

Social Responsibility

PTK is committed that the company's operational activities have positive impact on the surrounding community so that the surrounding community can be more prosperous and independent. The creation of a prosperous and independent community around the operating area and a sustainable environment will place the company into a good corporate citizen and achieve lasting profits.

PTK already has strategy to implement social and environmental responsibility (CSR). The company's concern for CSR is based on



terhadap CSR didasari oleh tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Line*, meliputi *Profit*, *People*, dan *Planet*. Ketiganya harus berjalan sinergis dan berkesinambungan, yaitu: *Profit*, perusahaan berorientasi keuntungan ekonomi; *People*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia; *Planet*, perusahaan diharuskan untuk peduli terhadap lingkungan hidup berkelanjutan.

Apresiasi

Atas semua pencapaian yang telah diraih, Direksi menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para karyawan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Mitra Usaha, Pemasok, Pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya atas segala dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Pada masa mendatang, kami berusaha untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan jasa terbaik sehingga Perusahaan dapat mencapai visi Menjadi Perusahaan Jasa Maritim yang Terintegrasi Dengan Skala Global pada Tahun 2026 serta memberikan nilai kepada Para Pemangku Kepentingan.

Terima Kasih.

three basic principles known as the Triple Bottom Line, including Profit, People, and Planet. All three must run synergistically and sustainably, namely: Profit, an economic profit-oriented company; People, companies must have a concern for human welfare; Planet, companies are required to care about a sustainable environment.

Appreciation

For all the achievements that have been achieved, the Board of Directors expresses appreciation for the dedication and hard work shown by the employees. We also thank the Shareholders, Board of Commissioners, Business Partners, Suppliers, Customers, and other stakeholders for all the support and trust that has been given. In the future, we strive to continuously improve our performance and provide the best services so that the Company can achieve the vision of Becoming an Integrated Maritime Services Company with a Global Scale in 2026 and provides value to the Stakeholders.

Thank you.

Jakarta, Juni 2022/June 2022
Atas Nama Direksi/ On behalf of Board of Directors
PT Pertamina Trans Kontinental

NEPOS MT PAKPAHAN

Direktur Utama

President Director

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk Laporan Tahunan 2021

Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2021 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Jakarta, Juni 2022

We, the undersigned, declare that all information in the 2021 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statements of the Company.

Jakarta, June 2022

DEWAN KOMISARIS PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

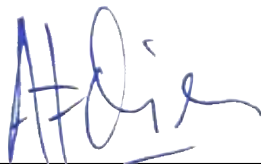
PT Pertamina Trans Kontinental Board of Commissioners



AMIR HAMZAH

Komisaris Utama/ President Commissioner

28 Mei 2021 – 31 Desember 2021



ACHMAD FACHRUDDIN

Komisaris/ Commissioner

1 Januari 2021 – 31 Januari 2021



ANDI SAIFUL HAQ

Komisaris/ Commissioner

1 Januari 2021 – 31 Desember 2021



IVAN AIRLANGGA EP

Komisaris/ Commissioner

1 Januari 2021 – 12 November 2021



KHALID ZABIDI

Komisaris/ Commissioner

12 November 2021 – 31 Desember 2021



AGUSTINUS BENSIK LOMBAN

Komisaris/ Commissioner

9 Desember 2021 – 31 Desember 2021



Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2021

Statement of Responsibility from Board of Directors for 2021 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Jakarta, Juni 2022

We, the undersigned, declare that all information in the 2021 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statements of the Company.

Jakarta, June 2022

DIREKSI PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

PT Pertamina Trans Kontinental Board of Directors

NEPOS MT PAKPAHAN

Direktur Utama

President Director

1 Januari 2021 - Desember 2021

HADI PURNOMO

Direktur Operasi

Director of Operation

1 Januari 2021 - 31 Desember 2021

ARSONO KUSWARDANU

Direktur Pemasaran

Director of Marketing

1 Januari 2021 - 31 Desember 2021

AZWANI

Direktur Keuangan & SDM

Director of Finance & HR

1 Januari 2021 - 1 September 2021

AFAN AFTORY

Direktur Keuangan & SDM

Director of Finance & HR

1 September 2021 - 31 Desember 2021





Profil Perusahaan

Company Profile

Kunci keberhasilan usaha adalah adanya keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari capaian-capaian baik dari sisi kinerja operasional maupun keuangan yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

The key to business success is long-term business sustainability. This is indicated from the operational and financial performance achievements, which is increasing every year.



Identitas Perusahaan

Company Identity

	Nama Perusahaan Company Name	PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL	
	Nama Singkat Common Name	PTK	
	Alamat Kantor Office Address	Jl. Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat 10450	
	Telepon Phone	(+6221) 31923005	
	Faksimile	(+6221) 3106804	
	E-mail	ptkpusat@ptk-shipping.com	
	Website	www.ptk-shipping.com	
	Bidang Usaha Line of Business	Jasa pelayaran, jasa maritim dan jasa logistik	Shipping, maritime and logistic services
	Status Perusahaan Company Status	Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Subsidiary of State-Owned Enterprise (SOEs)
	Tanggal Berdiri Establishment Date	9 September 1969	September 9, 1969
	Tanggal Beroperasi Operations Date	9 September 1969	September 9, 1969
	Dasar Hukum Pendirian Usaha Legal Business of Establishment	- Akta No 3 Tanggal 9 September 1969 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Tan Thong Kie, di Jakarta. - Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA yang disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, nama PT Pertamina Tongkang berubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. - Deed No. 3 dated September 9, 1969 drafted by and before Notary Tan Thong Kie in Jakarta. - Deed No. 012 dated October 26, 2011 by Notary Dewantari Handayani, MPA approved under the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Decree No: AHU-58581.AH.01.01 Year 2011 dated November 29, 2011, the name alteration of PT Pertamina Tongkang into PT Pertamina Trans Kontinental.	

Modal Dasar Authorized Capital	Rp2.000.000.819.000,- Terbagi atas 2.000.000 lembar saham seri A dengan masing-masing bernilai Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,-	Rp2,000,000,819,000,- Divided into 2,000,000 Series A shares with par value of Rp1,000,000 and 819 Series B Shares with par value of Rp1,000.
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH Subscribed and Fully Paid-in Capital	Rp693.708.819.000,- Terbagi atas 693.708 lembar saham seri A dengan nominal masing-masing Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,-	Rp693,708,819,000,- Divided into 2,000,000 Series A shares with par value of Rp1,000,000 and 819 Series B shares with par value of Rp1,000.
NPWP	01.000.501-5.051.000	
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) Business Registry	8120110071176	
SKDP	78/27.IBU.1/31.71.04.1004/071.562 /e/2017 (Berlaku sampai dengan 06 September 2022)	78/27.IBU.1/31.71.04.1004/071.562 /e/2017 (Valid until September 6, 2022)
SIUPAL	BXXV-1203/AL 58	
SKPP	PEM-00094/WPJ.07/KP.01032005	
KANTOR LAYANAN Office Network	• 1 Kantor Pusat • 3 Kantor Marketing Business & Operation Area • 10 Kantor Marketing Area	• 1 Head Office • 3 Kantor Marketing Business & Operation Area • 10 Marketing Area Office
JUMLAH PEKERJA Total Employees	• 1.213 Pekerja di tahun 2021 • 898 Pekerja di tahun 2020 • 668 Pekerja di tahun 2019 • 673 Pekerja di tahun 2018 • 609 Pekerja di tahun 2017	• 1,213 Employees in 2021 • 898 Employees in 2020 • 668 Employees in 2019 • 673 Employees in 2018 • 609 Employees in 2017
PEMEGANG SAHAM Shareholder	• PT Pertamina International Shipping 99,999% • PT Pertamina Pedeve Indonesia 0,001%	
SERIKAT PEKERJA Trade Union	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Pertamina Trans Kontinental (SPSI PTK)	

Perubahan Nama Perusahaan

Name Alteration

Perusahaan ini semula bernama PT Pertamina Tongkang yang berdiri pada 9 September 1969. Pada tahun 2011, Perusahaan mengalami perubahan nama menjadi PT Pertamina Trans Kontinental sesuai Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA. Akta tersebut disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

The Company was formerly named PT Pertamina Tongkang and established on September 9, 1969. In 2011, the Company had its name altered into PT Pertamina Trans Kontinental according to Deed No. 012 dated October 26, 2011 by Notary Dewantari Handayani, MPA. The Deed was approved under Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia Decree No. AHU-58581.AH.01.02 year 2011 dated November 29, 2011.

Sejarah Singkat Perusahaan

Corporate Brief History

SAILING BEYOND

Selain mengoptimalkan sumber daya yang ada, PTK sebagai bagian dari Grup Pertamina juga senantiasa memanfaatkan peluang dan sinergi yang terjalin di dalamnya saat menjalankan aktivitas bisnis dan operasional sehari-hari.

Besides optimizing available resources, PTK as part of Pertamina Group continues to utilize opportunities and synergies interwoven in it while running business activity and daily operation.

Perusahaan ini semula bernama PT Pertamina Tongkang yang berdiri pada 9 September 1969 di Jakarta yang menjalankan usaha di bidang industri jasa maritim. Perusahaan ini berfungsi memberikan dukungan bagi aktivitas PT Pertamina (Persero) dengan tiga kegiatan strategis yaitu:

- Pengadaan distribusi bahan bakar ke semua pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang tidak dapat terjangkau

The Company was formerly named PT Pertamina Tongkang and established on September 9, 1969 in Jakarta engaging maritime service industry. The Company is functioned to support activities of PT Pertamina (Persero) in three strategic activities, as follows:

- Provision of fuel distribution to all ports in the Indonesian territory that cannot be reached by tanker ship;



OND ORDER



- oleh kapal tanker;
- Pengadaan transportasi maritim bagi Pertamina Logistik untuk pengembangan proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- Bertindak sebagai *General Agent* dan *Handling Agent* bagi kapal – kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang disewakan.

Pada awalnya peranan PTK masih sebagai sebatas unit bisnis yang diperbantukan pada aktivitas pengembangan PT Pertamina (Persero). Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1974 Perusahaan menerima tambahan armada kapal sejenis *supply vessel*. Hal ini untuk melayani dan mendukung pelaksanaan eksplorasi pengeboran minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai dan juga keperluan produksi.

Empat tahun kemudian Perusahaan memperluas layanan jasa pada Perusahaan

- Provision of maritime transport for Pertamina Logistik for the development of projects spread across the Indonesian territory;
- Acting as a General Agent and Handling Agent for chartered-out tanker ships owned by PT Pertamina (Persero).

In the beginning, PTK under the name of PT Pertamina Tongkang was assisted to the development activities of PT Pertamina (Persero). To support operations, in 1974 the Company received additional fleet of supply vessel-type ships to serve and support the implementation of offshore oil and gas drilling exploration and also production requirements.

Four years later, the Company expanded its services to other companies, following the

lain, menyusul selesainya program konstruksi depot bahan bakar baru di belahan timur dan tengah Indonesia. Selanjutnya, Perusahaan mengubah model bisnisnya untuk tujuan mencari keuntungan dan fokus kepada aktivitas lepas pantai dengan menyediakan layanan:

- Membantu eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai.
- Menjadi *Handling Agent* dari penyewa kapal milik PT Pertamina (Persero) dan kapal pihak ketiga.

Pada tahun 1988 Perusahaan melakukan penyesuaian izin dari semula izin bisnis sebagai Perusahaan pelayaran yang spesifik di bidang lepas pantai sesuai Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 (Penataan Ulang dan Pengusaha dari Transportasi Laut), menjadi Perusahaan pelayaran dengan SIUPP No.3.XXX-256/ AL.58. Penyesuaian perizinan diikuti penerbitan SIUPAL BXXV-1203/AL 58 pada tanggal 26 Maret 2002 oleh Direktorat Umum Komunikasi Kelautan Departemen Perhubungan.

Kian luasnya pelayanan dan jasa yang diberikan, menjadikan Perusahaan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya perubahan nama dari PT Pertamina Tongkang menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. Perubahan nama berlaku efektif 29 November 2011 sesuai dengan Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU- 58581. AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

completion of the new fuel depot construction program in the eastern and central regions of Indonesia. The Company altered its business model with the purpose of gaining profit and focusing in offshore activities by providing the following services:

- Assisting offshore oil and gas exploration
- Becoming a Handling Agent for charterers of vessels owned by PT Pertamina (Persero) and third parties.

In 1988, the Company aligned its licensing from the business license as a shipping company with specification in the offshore sector in accordance with Government Regulation No. 17 of 1988 (Sea Transport Organization and Business) to a shipping Company with SIUPP No. 3.XXX-256/AL.58. The licensing alignment was followed by the issuance of SIUPAL No. BXXV-1203/AL 58 on 26 March 2002 by the General Directorate of Sea Communications of the Department of Transportation.

The expanding provided services urged the Company to make several changes, including the name change from PT Pertamina Tongkang to PT Pertamina Trans Kontinental. The name change was effective from 29 November 2011 in accordance with Deed No. 012 of 26 October 2011 by Notary Dewantari Handayani, MPA, which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No: AHU-58581.AH.01.02 of 2011 of 29 November 2011.



Logo Perusahaan

Company Logo



Logo Perusahaan telah disahkan berdasarkan PEDOMAN STANDARISASI IDENTITAS PERUSAHAAN, NOMOR: REVISI: PDM-001/G0000/2011- S0 dan berlaku sejak 22 Desember 2011.

The company logo has been ratified based on the COMPANY IDENTITY STANDARIZATION GUIDELINES, NUMBER: REVISION: PDM-001/G0000/2011-S0 valid since 22 December 2011.

Warna Merah

Mencerminkan insan Pertamina Trans Kontinental yang pekerja keras, berani, dan rajin serta mampu melawan tantangan.

Red Color

Reflects the Pertamina Trans Kontinental personnel who are hard workers, courageous, and diligent as well as capable of facing challenges.

Simbol Anak Panah

Melambangkan aspirasi organisasi Perusahaan untuk senantiasa bergerak ke depan, maju dan progresif. Ketiga elemen melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk Negara Indonesia. Simbol tersebut terlihat seperti monogram huruf "P" yang merupakan huruf pertama "PERTAMINA".

"Arrow" Symbol

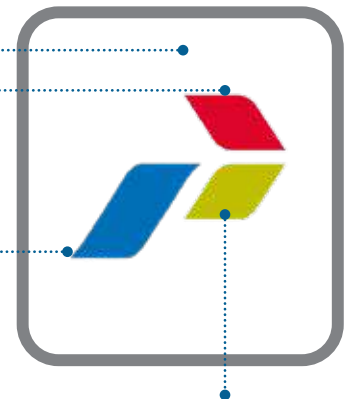
The "Arrow" symbol represents the Company's organizational aspiration to continuously move forward, be advanced and progressive. The three elements symbolize islands in various scales, which the shape of the Republic of Indonesia. The Symbol appears as a monogram of the letter "P", which is the first letter in "PERTAMINA".

Warna Biru

Mencerminkan sisi organisasi yang andal, dapat dipercaya, serta bertanggung jawab. Penekanannya lebih kepada kekuatan dan kewibawaan Perusahaan.

Blue Color

Reflects an organizational aspect that is reliable, trustworthy, and responsible. The emphasis is on corporate strength and charisma.



Warna Hijau

Mencerminkan sumber energi yang ramah lingkungan dan sebuah organisasi yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

Green Color

Reflects environmentally-friendly energy source and an organization with concern for its surrounding environment.

Kata "TRANS" dan "KONTINENTAL"

TRANS berdasarkan kamus berarti melalui, melewati. KONTINENTAL berdasarkan kamus berarti benua. Jadi Pertamina Trans Kontinental adalah Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang core bisnisnya menunjang kegiatan usaha induknya di bidang *oil & gas* dimana siap untuk menjadi Perusahaan Bisnis Pelayaran dan Jasa Maritim Kelas Dunia.

Kata "PERTAMINA"

Merupakan nama dari PT Pertamina (Persero) dan bukan merupakan singkatan atau akronim dan tulisannya harus berwarna hitam kecuali ditentukan lain.

"TRANS" and "KONTINENTAL" Terms

TRANS Based on the dictionary, means pass through. Meaning of KONTINENTAL, based on the dictionary is a continent. Pertamina Trans Kontinental is a Subsidiary of PT Pertamina (Persero) with core business to support business activity of the parent company in oil & gas sector and ready to become a world-class Shipping and Marine Service Company.

"PERTAMINA" Terms

The name of PT Pertamina (Persero) and not an abbreviation or acronym and the fontype shall be black unless stated otherwise.

Company Milestone

Established under the name of PT Pertamina
Tongkang on 9 September 1969 in Jakarta.



Penambahan armada kapal untuk melayani dan memenuhi eksplorasi pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai.

Addition of vessel fleet to serve and fulfill offshore oil and gas drilling exploration.

Perubahan orientasi bisnis dengan
melebarkan sayap untuk melayani
Perusahaan lain di luar Pertamina.

Changing the business orientation to a commercial company by expanding its wings to serve other companies.

Pendirian Anak Perusahaan
PT Peteka Karya Samudera.

Establishment of the PT Peteka Karya Samudera subsidiary.



Pendirian Anak Perusahaan
PT Peteka Karya Gapura.

Establishment of the PT Peteka Karya Gapura subsidiary.



Peningkatan pangsa pasar di Offshore melalui investasi 4 kapal AHTS.

Increasing the Offshore Support Vessels market by adding 4 AHTS-type owned ships.

Perubahan nama menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. Penetapan visi misi menjadi Perusahaan bisnis pelayaran dan jasa maritim kelas dunia.

Name alteration into PT Pertamina Trans Kontinental. Establishment of the vision and mission to be a world class shipping business and maritime services company.

Direktorat Umum Komunikasi Kelautan
dengan peraturannya telah
mengeluarkan SIUPAL B.XV-1203/ AL.58 pada
tanggal 26 Maret 2002 untuk PTK

The Directorate General of Sea Communications with the new regulation issued SIUPAL B.XV-1203/AL.58 on 26 March 2002 for PTK.

Pendirian Anak Perusahaan
PT Peteka Karya Jala.

Establishment of the
PT Peteka Karya Jala as subsidiary.



- Perubahan izin bisnis sebagai Perusahaan di bidang lepas pantai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988
- Pendirian Anak Perusahaan PT Peteka Karya Tirta.
- Revision of the Company's business permit in the offshore sector based on Government Regulation No. 17 of 1988
- Establishment of the PT Peteka Karya Tirta as subsidiary.



2013



Perubahan kepemilikan saham menjadi: 99,999% saham milik PT Pertamina (Persero), 0,001% milik PT Pertamina Training & Consulting.

The shares ownership of the Company changed to: 99.999% of shares owned by PT Pertamina (Persero), 0.001% of shares owned by PT Pertamina Training & Consulting.

2014



Pembentukan Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) pada tanggal 26 September 2014 yang bernama PT Trans Yeong Maritime (TYM). Kepemilikan saham Perusahaan menjadi sebesar 51%.

Establishment of the Joint Venture on 26 September 2014 under the name of PT Trans Yeong Maritime (TYM). Shares ownership of the Company became 51%.

2015



Implementasi *turnaround strategy Reborn, Revitalization, Expansion* (RRE)

Initiation of the Reborn, Revitalization, Expansion (RRE) policy.

2016



Go International Bersandarnya Kapal MT Transko Aries di pelabuhan Vopak Terminal Singapura.

Go International with the Docking of MT Transko Aries Ship at the Vopak Port of Singapore.

2021

- Pengalihan kepemilikan saham dari PT Pertamina (Persero) ke PT Pertamina International Shipping (Sub Holding Integrated Marine Logistics)
- Penggabungan fungsi Marine Pertamina dengan PTK
- Pengalihan Kapal Pertamina dan penambahan lini bisnis baru
- *Spin off* PT Peteka Karya Tirta menjadi Anak Usaha PT Pertamina Internasional Shipping.

- Transfer of share ownership from PT Pertamina (Persero) to PT Pertamina International Shipping (Sub Holding Integrated Marine Logistics)
- Merger of Pertamina's Marine functions with PTK
- Transfer of Pertamina Ships and the addition of new business lines
- Spin off PT Peteka Karya Tirta to become a subsidiary of PT Pertamina International Shipping.

2020

- Implementasi SAP di kapal PTK.
- *Branding* Transko pada setiap Kapal PTK.
- SAP implementation on PTK ships.
- Transko branding on each PTK ship.

2019

- Memiliki kapal *Harbour Tug Dual Fuel* Pertama di Indonesia Transko Rajawali.
- Pencanaan visi dan misi baru PTK
- Having the first Harbour Tug Dual Fuel vessel in Indonesia, Transko Rajawali
- Revised PTK vision and mission

2018

Pengelolaan dan Pengembangan *Shorebase* Tanjung Batu
Tanjung Batu Shorebase Management and Development.

2017

- Peluncuran *Dashboard Monitoring System*:
 - *Ship Arrival and Departure Information System*,
 - *Marine Service Application*

Perubahan kepemilikan saham menjadi: 99,999% saham milik PT Pertamina (Persero), 0,001% milik PT Pertamina Dana Ventura

- The launch of the Dashboard Monitoring System:
- Ship Arrival and Departure Information System
 - Marine Service Application

The shares ownership of the Company changed to: 99.999% of shares owned by PT Pertamina (Persero), 0.001% of shares owned by PT Pertamina Dana Ventura.

Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Value

Penetapan Visi dan Misi yang kini berlaku telah mendapatkan persetujuan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pertamina Trans Kontinental secara sirkuler tanggal 18 November 2019 tentang Perubahan Visi dan Misi dan Persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2019. Maka berlaku efektif sejak keputusan tersebut, Visi dan Misi Perusahaan kami adalah sebagai berikut:

Stipulation of current Vision and Mission has been ratified by the Board of Directors under PT Pertamina Trans Kontinental Circular Decree of the Board of Directors of PT Pertamina Trans Kontinental dated 18 November 2019 concerning Changes in Vision and Mission and Approval of the Board of Commissioners on 27 November 2019. The change is effective since date of the decree, Vision and Mission are as follows:



VISI Vision

Menjadi Perusahaan Jasa Maritim yang Terintegrasi Dengan Skala Global pada Tahun 2026.

To be an Integrated Maritime Service Company on Global Scale in 2026.



MISI Mission

Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE, Kehandalan Operasional dan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan dalam bidang:

- 1. Penyediaan jasa pelayaran sektor energi;**
- 2. Penyediaan layanan maritim;**
- 3. Penyediaan jasa logistik.**

Carrying out business activities oriented to HSE aspects, operational reliability and prioritizing customer satisfaction in the fields of:

1. Providing shipping services in the energy sector;
2. Providing maritime services;
3. Providing logistics services.

Perubahan visi tersebut merupakan tonggak Perusahaan yang harus ditegakkan segenap Insan PTK. Maka untuk mewujudkan PTK sebagai Perusahaan Jasa Maritim yang Terintegrasi dengan Skala Global pada Tahun 2026 diperlukan langkah-langkah strategis yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE;
2. Meningkatkan kehandalan operasional;
3. Mengutamakan kepuasan pelanggan dalam Penyediaan jasa pelayaran sektor energi, layanan maritim dan jasa logistik.

The change of vision has become a milestone of the Company to be uphold by all of PTK's people. To realize PTK as an Integrated Maritime Service Company on Global Scale in 2026, the strategic initiatives have been prepared, as follows:

1. Carrying out business activities oriented to HSE aspects;
2. Increasing operational reliability;
3. Prioritizing customer satisfaction in shipping service provision for energy sector, maritime services and logistics services.



Nilai-Nilai Utama Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial (*social welfare*), penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta, dibutuhkan transformasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dimana salah satunya melalui penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pertamina Trans Kontinental mengadopsi dan mengoptimalkan nilai-nilai Perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip AKHLAK yang telah disahkan melalui SK Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental No. Kpts - 1344/PTK0000/2021 - S0.

Corporate Values

To actualize the role of State-Owned Enterprises as economic growth engines, social welfare accelerators, job providers, and talent providers, it is necessary to transform the Human Resources of State-Owned Enterprises, through the determination of Core Values of the Human Resources as identity and the glue of work culture that supports sustainable performance improvement. Therefore, Pertamina Trans Kontinental adopts and optimizes company values based on the AKHLAK principles that have been ratified through the President Director of PT Pertamina Trans Kontinental No. Kpts - 1344/PTK0000/2021 - S0.



AMANAH (Trustworthy)

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given.



KOMPETEN (Competent)

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continues learning and capability improvement.



HARMONIS (Harmonious)

Saling peduli dan menghargai perbedaan
Mutual care and value diversity.



LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Dedicated and prioritize the interest of the National and Country.



ADAPTIF (Adaptive)

Terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan
Continuously innovating and enthusiast in driving and facing the change.



KOLABORATIF (Collaborative)

Membangun kerja sama yang sinergis
Build synergistic cooperation.

Bidang Usaha

Line of Business

Selain mengoptimalkan sumber daya yang ada, PTK sebagai bagian dari Grup Pertamina juga senantiasa memanfaatkan peluang dan sinergi yang terjalin di dalamnya saat menjalankan aktivitas bisnis dan operasional sehari-hari.

In addition to optimizing existing resources, PTK as part of the Pertamina Group also always takes advantage of the opportunities and synergies that exist in it when carrying out business activities and daily operations.



JASA PELAYARAN Shipping Service

Kegiatan usaha PTK di bidang jasa pelayaran adalah sebagai berikut:

- Usaha-usaha dalam bidang pengangkutan hasil industri pertambangan dan umum;
- Usaha dalam bidang pengangkutan laut antar pelabuhan serta jasa penunjangnya, baik dalam maupun luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal serta jasa penunjangnya;
- Usaha di bidang pelayaran/pengangkutan khusus peralatan dan kebutuhan

PTK business activities in shipping service are:

- Business in the transport of mining and general industry products sector
- Business in the inter-port sea transport as well as supporting services, whether domestic or overseas, performed permanently and regularly and/or impermanent and irregular shipping using all types of vessels and supporting services sector
- Business in the specific shipping/freight of oil and gas drilling equipment and needs, coal cargo, liquid and gas cargo, as well as



pengeboran migas, muatan batu bara, muatan cair dan gas serta kargo umum lainnya;

- Menjalankan usaha penunjang bidang pelayaran;
- Usaha di bidang jasa manajemen kapal/ *ship management services (ship crewing, ship operator, ship maintenance)*;
- Menjalankan usaha penyewaan kapal (*ship chartering & brokerage*);
- Menjalankan usaha keagenan kapal (*ship agencies*);
- *STS Provider*
- *Dockyard*
- *Ship Vetting*
- Usaha *salvage* dan penundaan kapal;
- Jasa pemeliharaan peralatan pelayaran (navigasi).

other general cargo

- Conducting the shipping sector supporting business
- Business in the ship management services sector (ship crewing, ship operator, ship maintenance)
- Conducting the ship charter business (ship chartering & brokerage)
- Conducting the ship agency business (ship agencies)
- *STS Provider*
- *Dockyard*
- *Ship Vetting*
- Ship salvaging and Tug business
- Navigation equipment maintenance services (navigation)



JASA MARITIM

Maritime Service

Kegiatan usaha PTK di bidang jasa maritim adalah sebagai berikut:

- Manajemen & Operasional Pelabuhan
- Izin dan Lisensi Kepelabuhanan
- Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, tapi tidak terbatas pada kapal *tanker*, *supply vessel*, tongkang, kapal tunda dan RIB;
- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan general cargo;
- Penanganan Tumpahan Minyak di Perairan
- Melaksanakan *bunker service* berupa pengisian dan/ atau pendistribusian BBM untuk kapal baik di laut maupun di darat;
- Melakukan jasa pengolahan dan penyediaan air untuk keperluan kapal dan industri;
- Melaksanakan kegiatan distribusi dan *supply* bahan bakar dan air untuk kebutuhan kapal-kapal, depot-depot dan industri;
- Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal serta penyediaan suku cadang kapal dan alat transportasi lainnya;
- Melakukan jasa perencanaan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung dan konstruksi-konstruksi bangunan di lepas pantai dan di bawah air beserta peralatannya;
- Jasa *tank cleaning* dan pengelolaan limbah (*sludge*);
- Melakukan usaha jasa bongkar muat barang di kapal;

PTK Business activities in maritime service are:

- Port Management & Operations
- Port Permits and Licenses
- Purchasing and selling of transportation and/or logistic equipment including spare-parts but are not limited in tankers, supply vessels, barge, tug boat, and RIB
- Liquid, gas and general cargo transport and storing business
- Handling of Oil Spills in Waters
- Providing bunker services including fuel oil refilling and/or distribution for vessels, whether on or offshore
- Conducting water processing and supply services for vessels and industry needs
- Conducting fuel and water distribution and supply activities for vessels, depots, and industry needs
- Conducting the ship manufacturing and repair business as well as provision of spare parts for ships and other means of transportation
- Conducting the business of planning, construction, repair, and maintenance services for vessels, flotation devices, and construction of offshore and underwater constructs and their equipment
- Tank cleaning and waste management (*sludge*) services
- Ship loading and unloading services
- Port Activities and Special Port Administration
- Ports and Special Ports Administration



- Melakukan usaha bidang kepelabuhanan dan administrasi pelabuhan khusus;
 - Jasa pemeliharaan fasilitas pelabuhan;
 - Mooring Master dan POAC
 - Jasa *Recognize Security Organization* (RSO);
 - Survei kelautan mengenai arus dan kedalaman laut (*Hydrografi Oceanography* dan Pemetaan/HOP);
 - Konstruksi bawah air berupa pemasangan dan pemeliharaan pipa dan kabel bawah laut dan lain-lain;
 - Jasa pengerukan dan reklamasi pantai;
 - Jasa perawatan pekerjaan minyak dan gas bawah air;
 - Jasa penyelaman dan pekerjaan bawah air.
- services
 - Mooring Master and POAC
 - Recognized Security Organization (RSO) services
 - Maritime Survey on Ocean Stream and depth (Hydrographic and Oceanographic Prediction/HOP)
 - Underwater construction service as submarine pipe and cable installation and maintenance and other services
 - Seabed dredging and beach reclamation service
 - Subsea oil and gas project maintenance service
 - Subsea diving and project services.



JASA LOGISTIK

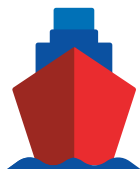
Logistic Service

Kegiatan usaha PTK di bidang jasa logistik adalah sebagai berikut:

- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan *general cargo*;
- Jasa ekspor impor barang dan jasa pengurusan dokumen ekspor impor (*customs clearance*);
- Mengadakan usaha di bidang *Freight Forwarding*, tidak terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman, dan pendistribusian barang;
- Ship Chandler
- Penyewaan alat-alat berat dan atau peralatan kerja serta produksi;
- Melakukan kegiatan usaha penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang serta usaha lainnya (*logistic base*);
- Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran.

PTK Business activities in logistic service are:

- Conducting the liquid, gas, and general cargo transportation and storing business;
- Export, import, and customs clearance services
- Freight Forwarding business, not limited to logistics, delivery, and distribution services
- Ship Chandler
- Heavy equipment and/or production equipment rental
- Storage, warehouse, logistics and distribution services of various commodities and other services (logistics base)
- Building and office rental and management services



Bisnis Utama dan Produk Usaha

Core Business and Business Products

Penyediaan Kapal

PTK memiliki bisnis inti penyedia kapal sebagai armada operasional, yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan penyewa guna mendukung kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai dan darat seperti PT Pertamina (Persero), perusahaan migas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan lainnya.

Charter & Brokerage

Aktivitas bisnis melalui *charter and brokerage* dilakukan atas permintaan pelanggan, untuk memenuhi kebutuhan jenis kapal yang tidak dimiliki oleh PTK. *Charter and Brokerage* dilakukan dengan cara menyewa kapal sesuai dengan permintaan.

Keagenan Kapal

PTK menyediakan layanan keagenan kapal sebagai Agen Umum (*General Agent*) atau Agen Penanganan (*Handling Agent*) untuk kapal yang berlabuh di semua pelabuhan di Indonesia. Sebagai keagenan kapal, maka tugas utama Perusahaan adalah mewakili pemilik/ *principal* dalam memenuhi persyaratan atau kewajiban bagi kapal yang tiba di Indonesia. Selama periode pelaporan PTK telah melaksanakan keagenan kapal yang meliputi Agen Umum atau Agen Penanganan. Perusahaan menjadi Agen Penanganan di semua pelabuhan di Indonesia serta pelabuhan umum atau *port* tertentu. Jasa yang diberikan mencakup penyediaan *crew*, penanganan *bunker*, penyediaan air dan kegiatan lain yang berhubungan dengan agen.

Jasa *shipping agent* yang diberikan PTK melayani:

Vessel Provider

PTK has the core business as a provider of vessels as an operational fleet, used in fulfilling the needs of charterers to support the offshore and onshore oil exploration activities, such as PT Pertamina (Persero), Contractors of Cooperation Contract (KKKS) oil and gas companies, and others.

Charter & Brokerage

Business activities through charter and brokerage are conducted on the basis of customer demand to meet the needs for types of vessels not owned by PTK. Charter and Brokerage is performed by chartering vessels according to demand.

Vessel Agency

Agent (GA) or Handling Agent (HA) for ships docking at all ports in Indonesia. As a ship agency, then the main duty of the Company is to represent the owner/principal in meeting the requirements or obligations for ships arriving in Indonesia. In the reporting period, PTK has performed ship agency which included General Agency and Handling Agency. The Company acts as a Handling Agent in all ports in Indonesia, whether general ports or special ports. The services provided include crew supply, bunker management, water provision, and agent-relevant activities

The shipping agent services provided by PTK:



- *In/out clearance* kapal di pelabuhan;
- Mengurus perizinan yang berkaitan dengan keimigrasian atau perhubungan laut;
- Menyiapkan fasilitas darat maupun laut;
- Layanan untuk awak dan kapal;
- Penyelesaian kewajiban keuangan (pencairan).

Tanggung jawab PTK sebagai *shipping agent*:

- Memastikan kelancaran kapal operasional di pelabuhan;
- Menyelesaikan kewajiban finansial;
- Menyampaikan laporan realisasi kunjungan kapal-kapal di pelabuhan Indonesia.

Pemanduan Kapal

Dalam bidang usaha ini telah melaksanakan Jasa Pelayanan Pemanduan Kapal di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Pertamina.

Pengelolaan Pelabuhan

PTK melalui Anak Perusahaan PT Peteka Karya Samudera melaksanakan jasa Administrasi Pelabuhan Khusus (Pelsus) di enam belas lokasi Terminal Khusus (Tersus) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Perseroan di bidang ini meliputi:

- Pelaksanaan administrasi pada layanan pelabuhan yang meliputi labuh, tambat, pandu, tunda (di luar wilayah kerja PT Pelindo) sebagai delegasi PT Pertamina (Persero), dimana pekerjaan Perseroan atas nama PT Pertamina (Persero);
- Membuat laporan secara periodik terkait penyelesaian pekerjaannya, Perusahaan bertanggung jawab kepada PT Pertamina (Persero);
- Mengurus perizinan;
- Mengelola administrasi pelabuhan khusus.

- *In/out clearance* of ships at the port;
- Managing permits relating to immigration or sea transportation;
- Preparing onshore and/offshore facility;
- Services for crew and vessel;
- Financial liability settlement (disbursement)

PTK responsibilities as a shipping agent:

- Ensuring the ease of operational ships at the port;
- Settling financial liability;
- Submitting the report for the visits of ships at Indonesian ports.

Pilotage Services

In this business field, the Company has carried out ship scout services at Pertamina's Special Purposes Terminal (Tersus) and Private Interest Terminal (TUKS).

Port Management

PTK through its subsidiary PT Peteka Karya Samudera implements Special Port (Pelsus) Administration services in sixteen locations of Special Purposes Terminal (Tersus) Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK) Migas – Contractors of Cooperation Contract (KKKS).

The scope of the Company's duties and responsibilities in this sector includes:

- Conducting the administration of port services, which include anchoring, mooring, guidance, tug (outside the PT Pelindo operational areas) as a delegate of PT Pertamina (Persero) where the Company acts on behalf of PT Pertamina (Persero);
- Preparing periodic reports relevant to job completion, the Company is responsible to PT Pertamina (Persero);
- Permits handling;
- Managing special port administration. In this

Dalam hal ini Perseroan hanya mengelola pelabuhan khusus KKKS dan JOB;

- Melakukan penagihan jasa pelabuhan kepada Agen;
- Melakukan penyeteroran jasa pelabuhan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah;
- Membuat laporan kegiatan kepelabuhanan kepada PT Pertamina (Persero), BP Migas, Kantor Pelabuhan/ Administrasi Pelabuhan;
- Membantu pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kepelabuhanan di Pelabuhan Khusus KKKS dan JOB.

Bunker Agent

Bunker agent merupakan fasilitas yang disediakan PTK untuk jasa pengiriman bahan bakar minyak untuk kapal atau tanker.

Offshore & Onshore Logistic Base

PTK menawarkan jasa pelayanan yang terintegrasi dalam *offshore & onshore logistic base*, yang terdapat di Batam dan Tanjung Batu, Balikpapan yang meliputi:

Batam

- Gudang penyimpanan seluas 45,28 hektar;
- Pengiriman kargo dan jasa kargo administrasi;
- Perbaikan dan pembersihan kargo dengan fasilitas lengkap;
- Menyediakan layanan pasokan air bersih, pasokan bahan bakar gas dan jasa lainnya;
- Persewaan gedung kantor di Batam di Jalan Yos Sudarso Batu Ampar Pulau Batam terdiri dari tiga lantai untuk kebutuhan kantor, dengan fasilitas pendingin ruangan/AC, area parkir, keamanan 24 jam, 50 saluran telepon dan dilengkapi dengan sistem PABX. Selain itu, memiliki 350 KVA generator listrik dengan lokasi strategis di kargo jalur utama dan pelabuhan Batu Ambar.
- Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi:

case, the Company only manages KKKS and JOB special ports;

- Conducting the collection for port services to the Agent;
- Conducting the Port Services deposit to PT Pertamina (Persero) and the Government;
- Composing reports of port activities to PT Pertamina (Persero), BP Migas, Port/Port Administration Office;
- Assisting management relevant to port administration at KKKS and JOB Special Ports.

Bunker Agent

Bunker agent is a facility provided by PTK for the transport of fuel oil for vessels or tankers services.

Offshore & Onshore Logistic Base

PTK offers integrated services in the offshore & onshore logistics base, which are located in Batam and Tanjung Batu, Balikpapan which include:

Batam

- 45.28 ha storage warehouse;
- Cargo shipping and cargo administration services;
- Cargo repair and cleaning with full facilities;
- Providing clean water supply, gas fuel supply, and other services;
- Office building rental located at Yos Sudarso Street, Batu Ampar–Batam Island comprising of 3 floors for office needs, equipped with facilities of Air Conditioner (AC), parking lot, 24 hours security, 50 phone lines, and PABX system facilities. Additionally, the building also has a 350 KVA electricity generator with a strategic location at primary cargo route and Batu Ambar port.
- Equipment and infrastructure support includes:



- o Lalu lintas dermaga;
- o Peralatan derek (*crane*) dengan kapasitas 50 tons ph, American crane kapasitas 75 ton, crane Todano kapasitas 20 ton, derek petty bone, carrylift kapasitas 20 ton, forklift kapasitas 3 dan 5 ton, prime over setinggi 40 feet, dan trailer caps setinggi 40 feet.

Tanjung Batu, Balik Papan

Peteka Shorebase Tanjung Batu (PTSB) berlokasi di lahan milik Pertamina seluas 49 Ha di Tanjung Batu, Balikpapan.

PTSB menyediakan fasilitas logistik untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan migas yang beroperasi di Kalimantan dan Sulawesi melalui penyediaan *one stop logistic services* berupa :

- Penyediaan fasilitas tempat penyimpanan (*open yard, warehouse, dan tangki*)
- Fasilitas sandar kapal (*jetty terbesar yang memiliki Panjang 200 meter*)
- Kegiatan cargo handling dan transportasi, penyediaan kantor dan akomodasi.
- Penyediaan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB)
- Penyediaan jasa *waste management*, dan jasa-jasa pendukung lainnya.
- Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi :
 - o Fasilitas Jetty 200 m, 88 m, 65 m, 107 m dan 2-3 m.
 - o Fasilitas RORO 2x250 ton LCTs
 - o Fasilitas *Speedboat Jetty*

Recognized Security Organization (RSO)

PTK ditunjuk sebagai RSO sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KI. 93/1/15-04 yang telah diperbaharui sampai dengan saat ini. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Direksi RSO untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi ISPS Code di Indonesia.

- o Harbor traffic
- o Crane with 50 tons ph capacity, American Crane with 75 tons capacity, Todano Crane with 20 tons capacity, petty bone crane, carrylift with 20 tons capacity, forklift with 3 and 5 tons capacity, 40-feet prime over, and 40-feet trailer caps.

Tanjung Batu, Flip the Board

Peteka Shorebase Tanjung Batu (PTSB) is located on 49 hectares of land owned by Pertamina in Tanjung Batu, Balikpapan.

PTSB provides logistics facilities to support operational activities of oil and gas companies operating in Kalimantan and Sulawesi through the provision of one stop logistics services in form of:

- Provision of storage facilities (*open yard, warehouse, and tank*)
- Ship docking facilities (*the largest jetty with a length of 200 meters*)
- Cargo handling and transportation activities, office provision and accommodation.
- Provision of Bonded Logistics Center (PLB) facilities
- Provision of waste management services, and other supporting services.
- Equipment and infrastructure supports, including:
 - o Jetty facilities 200 m, 88 m, 65 m, 107 m and 2-3 m.
 - o RORO facility 2x250 ton LCTs
 - o Speedboat Jetty facilities

Recognized Security Organization (RSO)

The Company was appointed as RSO since 2004 based on the Director General of Sea Transportation Decree No. KI. 93/1/15-04 which has been updated until now. This is the realization of the commitment of the RSO Board of Directors to participate in ISPS Code implementation in Indonesia.

RSO merupakan konsultan dalam bidang keamanan yang memberikan saran atau menyediakan bantuan dalam bidang operasional kapal dan fasilitas pelabuhan, meliputi:

- Melaksanakan Kegiatan Sertifikasi ISPS Code untuk kapal (ISSC) dan Fasilitas Pelabuhan (SoCPF).
- Melaksanakan atau menyelesaikan Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSA).
- Membantu dalam menyiapkan rencana keamanan fasilitas pelabuhan (PFSP).

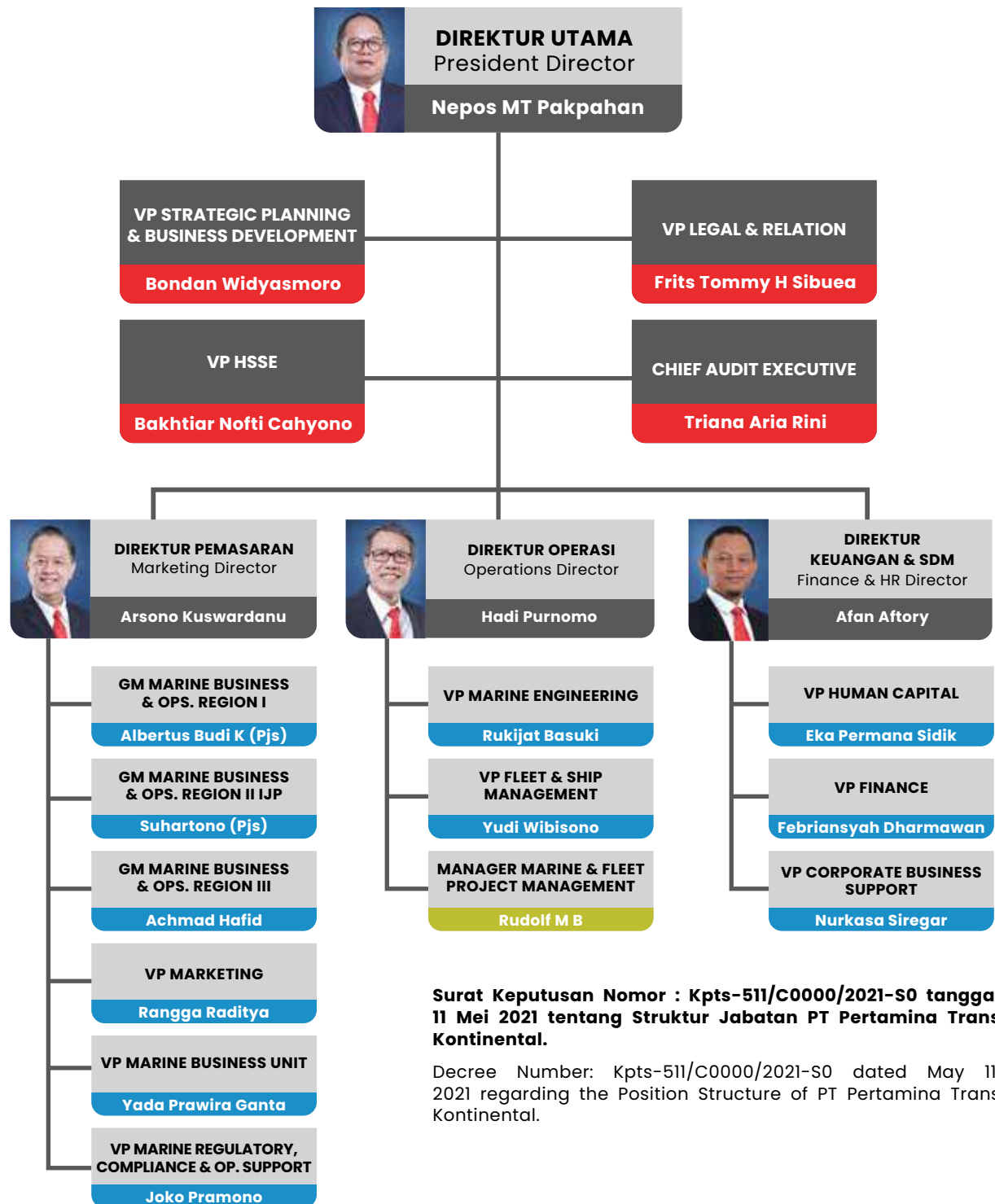
RSO is a security sector consultant that provides suggestion or assistance in vessel operations and ports facilities, including:

- Organizing activities of ISPS Code Certification for vessels (ISSC) and Ports Facilities (SoCPF).
- Conducting and completing the Ports Facilities Security Assessment (PFSA).
- Assisting in the preparation of the Ports Facilities Security Plan (PFSP).



Struktur Organisasi Perusahaan

Corporate Organizational Structure



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



**AMIR HAMZAH****Komisaris Utama**
President Commissioner**Data Pribadi**

Berusia 63 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor. Lahir di Malang, 24 Agustus 1958.

Personal Data

63 years old. Indonesian citizen, domiciled in Bogor. born in Malang, August 24, 1958.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 28 Mei 2021, berdasarkan Akta No. 22 tanggal 31 Mei 2021.

Position and Appointment Decree

Served as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since May 28, 2021, based on Deed No. 22 on 31 May 2021.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Ilmu Tanah di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1981, serta beragam Pendidikan non formal bidang Perminyakan, HSE, Perkapalan dan Manajemen dari dalam dan luar negeri.

Education

Obtained his Bachelor's Degree in Soil Science at Brawijaya University, Malang in 1981, as well as various non-formal educations in the fields of Petroleum, HSE, Shipping and Management from within and outside the country.

Perjalanan Karir

Lebih dari 35 Tahun berpengalaman di bidang energi, khususnya Minyak dan Gas Bumi. Jabatan strategis: (1) Direktur Muda Konsultan Exsa International, (2) Superintendent HSE & Eksternal ARCO Bali North, (3) Manajer HSE BP Indonesia, (4) Kepala Divisi Eksternal BPMIGAS, (5) VP Rep SKKMIGAS di Pertamina Hulu Energi, Total Indonesia dan ConocoPhillips, (6) Kepala Divisi Penunjang Operasi SKKMIGAS, (7) Tenaga Ahli SKKMIGAS dan (8) Direktur Pengembangan Bisnis HCI. Mendapatkan penghargaan Tingkat Dunia dalam ARCO

Career Experience

More than 35 years of experience in the energy sector, especially Oil and Gas. Strategic positions: (1) Young Director Consultant Exsa International, (2) Superintendent HSE & External ARCO Bali North, (3) Manager HSE BP Indonesia, (4) Head of External Division of BPMIGAS, (5) VP Rep SKKMIGAS at Pertamina Hulu Energi, Total Indonesia and ConocoPhillips. (6) Head of SKKMIGAS Operational Support Division and (7) SKKMIGAS Experts. Received World Class awards in the ARCO Environmental Awards in 1994 and ARCO President Awards for The Best

Environmental Awards pada tahun 1994 dan ARCO President Awards for The Best Safety Performance. Tahun 2001 mendapatkan Nominator 10 Besar untuk penerima Helios Awards pada BP Worldwide/International, London, UK. Ditingkat Nasional, Tahun 2008 mendapatkan Penghargaan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Safety Performance. In 2001 he was awarded the Top 10 Nominees for the recipients of the Helios Awards at BP Worldwide/International, London, UK. At the National level, in 2008 he received an Award from the Minister of Energy and Mineral Resources.

Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



ANDI SAIFUL HAQ

Komisaris
Commissioner

Data Pribadi

Berusia 46 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan pada 12 Mei 1975.

Personal Data

46 years old. Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Soppeng, South Sulawesi on May 12, 1975

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 11 September 2020, berdasarkan Akta No.23 tanggal 23 September 2020.

Position and Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since September 11, 2020, according to Deed No. 23 dated September 23, 2020.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Teknik Sipil di Universitas Hasanuddin Makassar, Pasca Sarjana Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung dan Cranfield University Inggris tahun 2007, serta Pasca Sarjana Hubungan Internasional di Departemen Ilmu Politik Justus Liebig University Giessen, Jerman tahun 2008.

Education

Graduated Civil Engineering Degree at Hasanuddin University Makassar, Master's Degree in Defense Studies from Bandung Institute of Technology and Cranfield University UK in 2007, and Doctoral's Degree in International Relations from Department of Political Science Justus Liebig University Giessen, Germany in 2008.

Perjalanan Karir

- 2008–2011 Konsultan Program untuk Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh
- 2008–2011 Program Officer untuk Perdamaian dan Demokratisasi Aceh di Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia.
- 2011–2013 Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta.

Career Experience

- 2008 – 2011 Program Consultant for the Commission on Disappearances and Violence (KontraS) Aceh
- 2008 – 2011 Program Officer for Peace and Democratization of Aceh at Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia.
- 2011 – 2013 Lecturer at the Department of International Relations, Paramadina University, Jakarta.

-
- 2013–Sekarang Direktur di Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta.

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT INTRANS (Institute for Transformation Studies)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

- 2013 – Currently Director at the Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta.

Concurrent Position

Currently he also serves as Commissioner of PT INTRANS (Institute for Transformation Studies)

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.

**KHALID ZABIDI****Komisaris**
Commissioner**Data Pribadi**

Berusia 47 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Bogor, 20 September 1974.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 12 November 2021, berdasarkan Akta No. 16 tanggal 23 November 2021.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 – Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1999. Yang bersangkutan menyelesaikan Magister Manajemen S2 – Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2003. Pada tahun 1999, beliau mengikuti Fellowship Programme Communication Studies di Nanyang Technological University Singapore.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak November 2021.

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Sejabat dan Direktur Utama di PT Tamaca.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Personal Data

47 years old. Indonesian Citizen, dimiciled in Jakarta. Born in Bogor, September 20, 1974.

Position and Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since November 12, 2021 according to Deed No. 16 dated November 23, 2021.

Education

Obtained Bachelor's Degree in Fine Arts and Design from Bandung Institute of Technology in 1999. Obtained Master's Degree in Management – Art and Design from Bandung Institute of Technology in 2003. And Communication Studies from Nanyang Technological University Singapore in 1999.

Career Experience

Served as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since November 2021.

Concurrent Position

Currently he also serves as Commissioner at PT Sejabat and President Director at PT Tamaca.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



AGUSTINUS BENSIK LOMBOAN

Komisaris
Commissioner

Data Pribadi

Berusia 57 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Balikpapan, 07 Agustus 1964.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 09 Desember 2021, berdasarkan Akta No. 41 tanggal 24 Desember 2021.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1 – Teknik Mesin di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1988. Yang bersangkutan menyelesaikan Magister Manajemen S2 – Keuangan di Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta pada tahun 1995.

Perjalanan Karir

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak Desember 2021.

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Glory Kasih Indonesia dan Direktur di PT Tiga Kawa Mitra.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Personal Data

57 years old. Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born in Balikpapan, 07 August 1964.

Position and Appointment Decree

Served as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since December 9, 2021, Based on Deed No. 41 on December 24, 2021.

Education

Obtained Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Trisakti University, Jakarta in 1988. Obtained Master's Degree in Management in Finance from Indonusa Esa Unggul University, Jakarta in 1995.

Career Experience

Served as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since December 2021.

Concurrent Position

Currently he also serves as Commissioner at PT Glory Kasih Indonesia and Director at PT Tiga Kawa Mitra.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Profil Dewan Komisaris yang Pernah Menjabat Pada Tahun 2021

Profile of Board of Commissioners serving in 2021



IVAN AIRLANGGA EP

Komisaris

Commissioner

(22 November 2018 – 12 November 2021)

Data Pribadi

Berusia 58 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor. Lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1963.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 22 November 2018, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 14 Desember 2018 dan berakhir masa jabatannya berdasarkan Akta No. 16 tanggal 23 November 2021.

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan Teknik Kimia di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada tahun 1988.

Perjalanan Karir

- Refinery Planning & Optimization Manager, Refinery Unit VI- Balongan periode 2010–2012
- Operation Excellence Manager PT Pertamina (Persero) periode 2012 – 2013.
- Direktur Operasi Produksi PT Pertamina (Persero) periode 2013 – 2017.
- VP Process & Facility PT Pertamina (Persero) periode 2017 – 2018.
- Senior Vice President Business Dev & Perform Excellence PT Pertamina (Persero) periode 2018– 2019.

Rangkap Jabatan

Saat menjabat, beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Personal Data

58 years old. Indonesian Citizen domiciled in Bogor. Born in Surabaya on December 31, 1963.

Position and Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since November 22, 2018 according to Deed No. 1 dated December 14, 2018 and ended his term of office based on Deed No. 16 dated November 23, 2021.

Education

Earned Bachelor's degree of Chemical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya in 1988.

Career Experience

- Refinery Planning & Optimization Manager, Refinery Unit VI- Balongan 2010–2012
- Operation Excellence Manager PT Pertamina (Persero) for 2012 – 2013 period.
- Production Operations Director PT Pertamina (Persero) for 2013 – 2017 period.
- VP Process & Facility PT Pertamina (Persero) for 2017 – 2018 period.
- Senior Vice President Business Dev & Perform Excellence PT Pertamina (Persero) for the period 2018–2019.

Concurrent Position

He was not serving in any concurrent position at any company during his term of office.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



ACHMAD FACHRUDDIN

Komisaris

Commissioner

(31 Januari 2018–31 Januari 2021)

Data Pribadi

Berusia 46 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor. Lahir di Jakarta pada 10 Mei 1975.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 31 Januari 2018, berdasarkan Akta No. 15 tanggal 14 Februari 2018 dan berakhir masa jabatannya pada 31 Januari 2021 sesuai dengan periode jabatan berdasarkan Akta No. 15 tanggal 14 Februari 2018 tersebut.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Sosial dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada tahun 2002.

Perjalanan Karir

- Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Washthex Indonesia periode 2009–2017,
- Sebagai analis PT Media Track periode 2010–2015,
- Sebagai Direktur PT Media Fakta Nusantara periode 2014–2017.

Rangkap Jabatan

Saat menjabat, beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Personal Data

46 years old. Indonesian Citizen domiciled in Bogor. Born in Jakarta on May 10, 1975

Position and Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since January 31, 2018 according to Deed No. 15 dated February 14, 2018 and ends his term of office on January 31, 2021 in accordance with the term of office based on Deed No. 15 on February 14, 2018.

Education

Earned Bachelor's degree of Social Science from Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) in 2002.

Career Experience

- Previously was appointed as Commissioner at PT Washthex Indonesia for 2009–2017 period,
- Analyst at PT Media Track for 2010–2015 period,
- Director at PT Media Fakta Nusantara for 2014–2017 period.

Concurrent Position

He was not serving in any concurrent position at any company during his term of office.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Profil Direksi

Board of Directors Profile





NEPOS MT PAKPAHAN

Direktur Utama
President Director

Data Pribadi

Berusia 58 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Laguboti, Sumatera Utara pada 8 November 1963.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental sejak tanggal 15 Juli 2019, berdasarkan Akta No.5 tanggal 17 Juli 2019.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya pada tahun 1989 dan gelar Master-MBA Teknik dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2001.

Perjalanan Karir

Pernah menjabat sebagai VP HSSE Upstream PT Pertamina (Persero) periode 2017 – 2019.

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Personal Data

58 years old. Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta. Born in Laguboti, North Sumatera on November 8, 1963.

Position and Appointment Decree

Appointed as President Director of PT Pertamina Trans Kontinental since July 15, 2019, based on Deed No. 5 dated July 17, 2019.

Education

Obtained Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Universitas Brawijaya in 1989 and Master's Degree – MBA of Engineering from Universitas Jenderal Soedirman in 2001.

Career Experience

Previously, he was assigned as VP HSSE Upstream at PT Pertamina (Persero) for 2017 – 2019 period.

Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.

**HADI PURNOMO****Direktur Operasi**
Operation Director**Data Pribadi**

Berusia 56 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi. Lahir di Surakarta, Pada tanggal 31 Agustus 1965.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Operasi sejak tanggal 2 April 2019, berdasarkan Akta No.9 tanggal 24 April 2019.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991 dan gelar Sarjana Manajemen Transport dari STIE Kampus Ungu pada tahun 2007.

Perjalanan Karir

- Manager Strategic Planning PT Pertamina (Persero) periode Januari 2013 – Mei 2017.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) periode Mei 2017 – April 2019.

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Personal Data

56 years old. Indonesian Citizen, domiciled in Bekasi. Born in Surakarta on August 31, 1965.

Position and Appointment Decree

Appointed as Operations Director since April 12, 2019 according to Deed No. 9 dated April 24, 2019.

Education

Earned Bachelor's degree of Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1991 and Bachelor's degree of Transport Management from STIE Kampus Ungu in 2007.

Career Experience

- Manager Strategic Planning PT Pertamina (Persero) for January 2013 – May 2017 period.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) for May 2017 – April 2019.

Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



ARSONO KUSWARDANU

Direktur Pemasaran
Marketing Director

Data Pribadi

Berusia 55 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Surabaya pada 1 November 1966.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina Trans Kontinental sejak tanggal 20 Juni 2019, berdasarkan Akta No. 4 tanggal 12 Juli 2019.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Indonesia pada tahun 1996.

Perjalanan Karir

- Product Services Account Division Head PT Pertamina Patra Niaga periode Maret 2017 – Maret 2019.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) periode April 2019 – Juni 2019.

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Personal Data

55 years old. Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta. Born in Surabaya on November 1, 1966.

Position and Appointment Decree

Appointed as Marketing Director of PT Pertamina Trans Kontinental since June 20, 2019 according to Deed No. 4 dated July 12, 2019.

Education

Earned Bachelor's degree of Architectural Engineering from Institut Teknologi Indonesia in 1996.

Career Experience

- Product Services Account Division Head PT Pertamina Patra Niaga for March 2017 – March 2019 period.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) for April 2019 – June 2019 period.

Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders. lainnya.

**AFAN AFTORY**

Direktur Keuangan & SDM
Finance & HR Director

Data Pribadi

Berusia 45 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta, 19 Juni 1976.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Pertamina Trans Kontinental sejak 1 September 2021 berdasarkan Akta No. 5 tanggal 17 September 2021

Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan S1-Ekonomi Akuntansi di Universitas Borobudur pada tahun 1997, Magister Manajemen di Universitas Satyagama pada tahun 1999 dan Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) di Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Perjalanan Karir

Bergabung dengan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2009. Sejumlah jabatan penting yang pernah dicapai adalah sebagai Vice President Finance PT Pertamina Lubricants dari Maret 2019 hingga Agustus 2020, Vice President Financial Reporting & Accounting HO di PT Pertamina (Persero) dari Agustus 2020 hingga Agustus 2021, dan menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT Pertamina Trans Kontinental sejak 1 September 2021.

Rangkap Jabatan

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Personal Data

45 years old. Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta, 19 June 1976.

Position and Appointment Decree

Appointed as Finance & HR Director since September 1, 2021 according to Deed No. 5 dated September 17, 2021

Education

Obtained Bachelor's Degree in Accounting Economics from Borobudur University in 1997, Master's Degree in Management from Satyagama University in 1999 and Professional Accountant Education (PPAK) at University of Indonesia in 2004.

Career Experience

Joined PT Pertamina (Persero) since 2009. A number of important positions he has achieved are as Vice President Finance at PT Pertamina Lubricants from March 2019 to August 2020, Vice President Financial Reporting & Accounting HO at PT Pertamina (Persero) from August 2020 to August 2021, and has served as Finance and HR Director of PT Pertamina Trans Kontinental since September 1, 2021.

Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders. lainnya.

Profil Direksi yang Pernah Menjabat Pada Tahun 2021

Profile of Board of Directors serving in 2021



AZWANI

Direktur Keuangan dan SDM

Finance and HR Director

(29 Mei 2020 – 1 September 2021)

Data Pribadi

Berusia 56 tahun. Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Sigli, Aceh pada 30 April 1965.

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM PT Pertamina Trans Kontinental sejak tanggal 8 Mei 2018, berdasarkan Akta No. 39 tanggal 18 Mei 2018 dan berakhir masa jabatannya berdasarkan Akta No. 05 tanggal 17 September 2021.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Banda Aceh pada tahun 1989 dan gelar Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1999.

Perjalanan Karir

- Quantity Accounting Manager PT Pertamina (Persero) periode 2013–2014
- Direktur Keuangan dan Umum PT Pertamina Retail periode 2014 – 2018
- Direktur Keuangan dan Bisnis PT Pertamina Retail periode 2018 – 2020

Rangkap Jabatan

Saat menjabat, beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Personal Data

56 years. Indonesian Citizen domiciled in Jakarta. Born in Sigli, Aceh on April 30, 1965.

Position and Appointment Decree

Appointed as HR & Finance Director of PT Pertamina Trans Kontinental since May 8, 2018 according to Deed No. 39 dated May 18, 2018 and ended his term of office based on Deed No. 05 September 17, 2021.

Education

Earned Bachelor's degree of Economic Accounting from Banda Aceh in 1989 and Master of Management Study degree from Universitas Sumatera Utara in 1999.

Career Experience

- Quantity Accounting Manager PT Pertamina (Persero) for 2013 – 2014 period.
- Finance and General Director PT Pertamina (Persero) for 2014 – 2018 period.
- Finance and Business Director PT Pertamina Retail for 2018 – 2020 period.

Concurrent Position

He was not serving in any concurrent position at any company during his term of office.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Profil Pejabat Perusahaan

Executives Profile

1

VP Dibawah Direktur Utama VP Under President Director



BAKHTIAR NOFTI CAHYONO

VP HSSE

Lahir di Lamongan, pada tanggal 26 November 1982 dan berdomisili di Balikpapan. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2005. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Sr.Analyst HSSE Planning, MS & RM di PT PHKT Kalimantan.

Born in Lamongan on November 26, 1982 and domiciled in Balikpapan. He obtained Bachelor's Degree in Environmental Engineering from Bandung Institute of Technology in 2005. Previously he served as Sr Analyst HSSE Planning, MS & RM at PT PHKT Kalimantan.



BONDAN WIDYASMORO

VP SPBD

Lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Desember 1977 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma pada tahun 2011 dan Pasca Sarjana Ekonomi Lalu Lintas Laut dari Rotterdam School of Management Erasmus University Belanda pada tahun 2013. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Manager Marine Strategic Planning di PT Pertamina (Persero).

Born in Jakarta on December 24, 1977 and domiciled in Jakarta. He obtained Bachelor's Degree in Informatics Engineering from Gunadarma University in 2011 and Master's Degree in Marine Traffic Economics from Rotterdam School of Management at Erasmus University in the Netherlands in 2013. Previously, he served as Manager of Marine Strategic Planning at PT Pertamina (Persero).



FRITS TOMMY H SIBUEA

VP Legal & Relation

Lahir di Pekanbaru, pada 2 Juni 1968 dan berdomisili di Tangerang Selatan. Beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung, pada tahun 1993 dan Master of Public Relations dari Bond University Australia, pada tahun 1999. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Manager Relations di PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur

Born in Pekanbaru on June 2, 1968 and domiciled in South Tangerang. He obtained Bachelor's Degree in Communication Science from Padjadjaran University, Bandung, in 1993 and Master of Public Relations from Bond University Australia, in 1999. Previously, he served as Manager of Relations at PT Pertamina Hulu East Kalimantan.



TRIANA ARIA RINI

Chief Audit Executive

Lahir di Jakarta, pada 23 Januari 1968 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta, pada tahun 1996. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai VP Operation.

Born in Jakarta on January 23, 1968 and domiciled in Jakarta. Obtained Bachelor's Degree in Management Economics from the University of Prof. Dr. Moestopo Jakarta, in 1996. Previously she served as VP Operations.



2

VP Dibawah Direktur Keuangan SDM

VP Under Finance and HR Director

**EKA PERMANA SIDIK****VP Human Capital**

Lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Juli 1976 dan berdomisili di Tangerang. Beliau meraih gelar Sarjana Hubungan International dari Universitas Jayabaya pada tahun 1999 dan Magister Manajemen Pemasaran dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 2010. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Manager HR Operations PIEP Indonesia.

Born in Jakarta on July 27, 1976 and domiciled in Tangerang. He obtained Bachelor's Degree in International Relations from Jayabaya University in 1999 and a Master's Degree in Marketing Management from Prasetya Mulya School of Management, Jakarta in 2010. Previously, he served as Manager of HR Operations at PIEP Indonesia.

**FEBRIANSYAH DHARMAWAN****VP Finance**

Lahir di Palembang, pada 17 Februari 1977 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2001 dan Magister Ekonomi Manajemen dari Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Asset Finance Manager PT Pertamina (Persero).

Born in Palembang on February 17, 1977 and domiciled in Jakarta. He obtained Bachelor of Economics in Accounting from Sriwijaya University in 2001 and Master of Management Economics from Diponegoro University in 2015. Previously he served as Asset Finance Manager of PT Pertamina (Persero).

2

VP Dibawah Direktur Keuangan SDM

VP Under Finance and HR Director

**NURKASA SIREGAR****VP Corporate Business Support**

Lahir di Jakarta, pada 23 April 1966 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Krisna Dwipayana dan Magister Manajemen Transport dari Universitas Trisakti pada tahun 2013. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai President Director pada anak perusahaan PTK yaitu PT Trans Yeong Maritime (TYM).

Born in Jakarta on April 23, 1966 and domiciled in Jakarta. He obtained Bachelor's Degree in Public Administration from Krisna Dwipayana University and Master's Degree in Transport Management from Trisakti University in 2013. Previously, he served as President Director of PTK's subsidiary, PT Trans Yeong Maritime (TYM).



3

VP Dibawah Direktur Operasi VP Under Operations Director



RUKIJAT BASUKI

VP Marine Engineering

Lahir di Malang, pada 24 September 1967 dan berdomisili di Bekasi. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya, pada tahun 1991. Sebelumnya menjabat sebagai Manager Marine Facilities & Infrastructure PT Pertamina (Persero).

Born in Malang on September 24, 1967 and domiciled in Bekasi. He earned Bachelor's Degree in Civil Engineering from Brawijaya University, in 1991. Previously served as Manager of Marine Facilities & Infrastructure of PT Pertamina (Persero).



YUDI WIBISONO

VP Fleet & Ship Management

Lahir di Bandung, pada 11 Juli 1982 dan berdomisili di Bandung. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2006 dan S2 Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Manager Asset Management PT Pertamina (Persero).

Born in Bandung on July 11, 1982 and domiciled in Bandung. He earned Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology, in 2006 and Master's Degree in Chemical Engineering from Bandung Institute of Technology, in 2013. Previously served as Asset Management Manager at PT Pertamina (Persero).

4

VP Dibawah Direktur Pemasaran

VP Under Marketing Director



RANGGA RADITYA

VP Marketing

Lahir di Cilacap, pada 21 April 1979 dan berdomisili di Bandung. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2003 dan Pasca Sarjana Teknik Industri dari Universitas Indonesia pada tahun 2008 dan Pasca Sarjana Business Administration dari Rotterdam School of Management Erasmus University Belanda pada tahun 2012. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Region Manager Marine I PT Pertamina (Persero).

Born in Cilacap on April 21, 1979 and domiciled in Bandung. He obtained Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology in 2003 and Master's Degree in Industrial Engineering from University of Indonesia in 2008 and Master's Degree in Business Administration from Rotterdam School of Management at Erasmus University in the Netherlands in 2012. Previously, he served as Region Manager Marine I PT Pertamina (Persero).



YADA PRAWIRA GANTA

VP Marine Business Unit

Lahir di Jakarta, pada 03 Maret 1982 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti pada tahun 2006 dan Pasca Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Region Manager Marine V PT Pertamina (Persero).

Born in Jakarta on March 3, 1982 and domiciled in Jakarta. He earned Bachelor's Degree in Industrial Engineering from Trisakti University in 2006 and a Master's Degree in Business Administration from Gadjah Mada University Yogyakarta in 2013. Previously, he served as Region Manager Marine V of PT Pertamina (Persero).

**JOKO PRAMONO**

VP Marine Regulatory, Compliance & Operation Support

Lahir di Banyuwangi, pada 27 September 1971 dan berdomisili di Bekasi. Beliau meraih gelar Advance Diploma in Maritime Transportation dan Ahli Nautika Tingkat II dari Singapore Polytechnic. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai VP Operation.

Born in Banyuwangi on September 27, 1971 and domiciled in Bekasi. He obtained Advanced Diploma Degree in Maritime Transportation and Tier II Nautical Expert from Singapore Polytechnic. Previously he served as VP Operations.

**ACHMAD HAFID**

GM Marine Business & Operation Region III

Lahir di Malang, pada 19 Maret 1968 dan berdomisili di Bekasi. Beliau meraih gelar Diploma Teknik Kimia dari Universitas Malang pada tahun 1990. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Region Manager Marine III PT Pertamina (Persero).

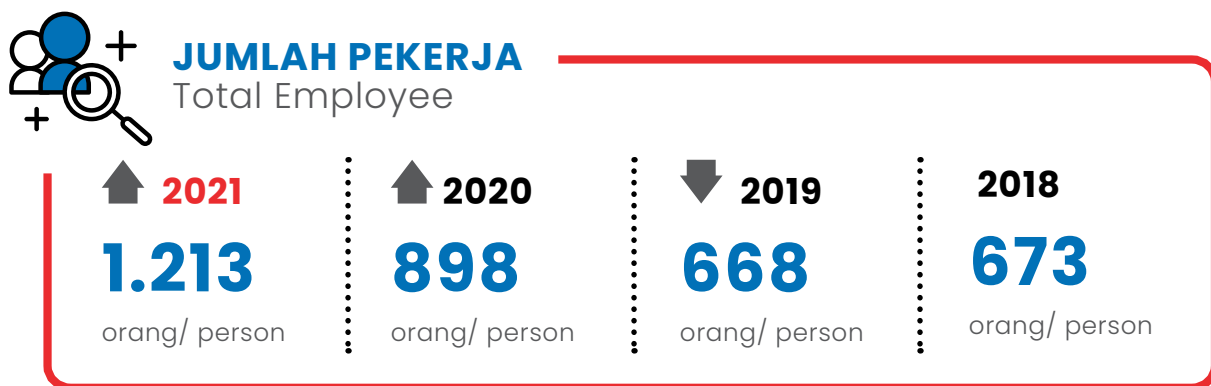
Born in Malang on March 19, 1968 and domiciled in Bekasi. He earned Diploma Degree in Chemical Engineering from University of Malang in 1990. Previously, he served as Region Manager Marine III of PT Pertamina (Persero).

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Sejalan dengan peralihan kegiatan *marine services* dari PT Pertamina (Persero) ke PTK pada tahun 2021, peralihan terkait tidak hanya terbatas pada kegiatan bisnis melainkan juga pekerja perbantuan PT Pertamina (Persero) yang sebelumnya mengelola kegiatan operasional *marine services*. Penambahan sejumlah 233 pekerja perbantuan secara bertahap dari bulan Juli-Agustus 2021 dilakukan untuk meningkatkan *operational excellence* dan menjalankan struktur organisasi PTK yang baru sesuai Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts 511/C0000/2021-S0 tanggal 11 Mei 2021 perihal Struktur Organisasi BOD-1 dibawah PT Pertamina Trans Kontinental.

In line with the transition of marine services activities from PT Pertamina (Persero) to PTK in 2021, the related transition is not only limited to business activities but also PT Pertamina (Persero) assisted workers who previously managed marine services operational activities. The gradual addition of 233 auxiliary workers from July-August 2021 was carried out to improve operational excellence and implement the new PTK organizational structure in accordance with the President Director's Decree No. Kpts 511/C0000/2021-S0 dated May 11, 2021 regarding the BOD-1 Organizational Structure under PT Pertamina Trans Kontinental.



Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition by Education Level

Pendidikan Education		2021	2020	2019
Pasca Sarjana	Post Graduate	76	57	56
Sarjana	Undergraduate	472	328	346
Diploma	Diploma	276	133	113
SMA*	Senior High School	327	319	142
Lain-lain (Ijasah Laut)	Others (Marine Diploma)	62	61	11

* Termasuk Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) Kantor Pusat dan Kantor Region

* Including Supporting Service Workers (TKJP) Head Office and Regional Offices



Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

Usia Age		2021	2020	2019
<20 tahun	<20 years	7	7	3
21-30 tahun	21-30 years	370	257	174
31-40 tahun	31-40 years	440	303	203
41-50 tahun	41-50 years	303	239	189
51-55 tahun	51-55 years	77	76	81
>55 tahun	>55 years	16	16	18

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Employee Composition by Organization Level

Level Organisasi Position		2021	2020	2019
Non-Staff	Non-Staff	564	478	282
Staff	Staff	395	258	228
Asisten Manager	Manager Assistant	156	94	95
Manager	Manager	76	52	47
Eksekutif	Executive	22	16	16

Komposisi Pekerja Berdasarkan Gender

Employee Composition by Gender

Gender		2021	2020	2019
Laki-laki	Male	1.009	733	519
Perempuan	Female	204	165	149

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Status Status		2021	2020	2019
Pekerja Tetap /PWTT	Permanent Employees	599	376	346
Pekerja Kontrak PWT	Contract Employees	50	44	40
Pekerja Tidak Tetap/TKJP	Non-Permanent Employees	564	478	282

Program Pengembangan Pekerja

Employee Development Program

Program Pengembangan Pekerja Employee Development Program

Deskripsi Description		2021	2020	2019
Jumlah Pelatihan	Total Training	43	42	65
Peserta	Participant	1012	1.029	613
Biaya	Cost	Rp1.596.931.287	Rp2.276.909.689	Rp2.391.594.795

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan *leadership skill*, berikut adalah program pelatihan yang diikuti oleh pekerja di tingkat managerial:

In order to develop competency and leadership skill, the following is a training programs participated by level employees:

Training untuk Jabatan Managerial Training for Managerial Position

Nama Program/Training/ Seminar Name of Program/ Training/Seminar	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Jabatan Position	Jumlah Peserta Total Participants	Pelaksana Provider	Lokasi Location
<i>Procurement & Purchasing Management</i>	26 Maret 2021	Manager Procurement	1	PT Tempo Inti Media Harian	Jakarta (Online)
Integrasi Logistik untuk Meningkatkan Produktivitas Pelabuhan Logistics Integration to Increase Port Productivity	31 Maret 2021	Direktur JV, VP Marketing, dan Manager di Fungsi Marketing JV Director, VP Marketing, and Manager in Marketing Function	10	ABUPI	Jakarta (Online)
<i>Project Management</i>	5 – 6 April 2021	VP Marketing, dan Manager di Fungsi Marketing VP Marketing, and Manager in Marketing Function	7	PT Kenawaenergi	Jakarta (Online)
<i>Extracting Value From Successful Holding Implementation</i>	15 – 18 Juni 2021	VP Finance	1	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
<i>Building The Future Ready Organization</i>	22 – 25 Juni 2021	Vice President	8	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
TKDN	30 Juni – 2 Juli 2021	Manager Procurement	1	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
Awareness SUPREME	13 Agustus 2021	VP dan Manager Technical Fleet & Management,	11	HSE TC	Jakarta (Online)
<i>Marine Terminal Management & Self Assesment</i>	30 – 31 Agustus 2021	Manager HSSE Regulation & System Management	1	PT Kenawaenergi	Jakarta (Online)



Training untuk Jabatan Managerial Training for Managerial Position

Nama Program/Training/ Seminar Name of Program/ Training/Seminar	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Jabatan Position	Jumlah Peserta Total Participants	Pelaksana Provider	Lokasi Location
Peningkatan Kompetensi Satuan Pengendalian Internal Auditor Dalam Mencegah Penyalahgunaan Aset dan Rekayasa Laporan Keuangan Improving the Competence of the Internal Auditor's Control Unit in Preventing Misappropriation of Assets and Engineering Financial Statements	2 September 2021	VP dan Manager di Fungsi Internal Audit VP and Manager in Internal Audit Function	2	Lembaga Pusat Studi Informasi (LPSI)	Jakarta (Online)
Certified Risk Associate (CRA)	25 – 26 September 2021	Chief Audit Executive	1	PT Utama Hanriz Indonesia	Jakarta (Online)
Internal Auditor ISM Code	17 – 19 Oktober dan 01 – 03 November 2021	VP Fleet & Ship Management dan Manager dibawahnya serta Manager HSSE	5	BKI Academy	Jakarta (Online)
Business Judgment Rule: Corporate Action or Corruption?	26 – 28 Oktober 2021	VP MRCOS, VP Finance, dan CAE	3	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
Executive Insight Leadership Series	2 – 4 November 2021	VP Legal & Relation, VP MRCOS, VP Marine Business Unit	3	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
Seminar Nasional Internal Audit/ National Internal Audit Seminar	1 – 2 Desember 2021	Chief Audit Executive dan Manager di bawahnya	2	Yayasan Pendidikan Internal Audit	Jakarta (Online)
Internal Audit ISPS Code	8 – 10 Desember 2021	VP MRCOS, Manager Marine Compliance & Stakeholder Management, Head of Port & Fleet Security	3	BKI Academy	Jakarta (Online)
DPA ISM Code Code	15 – 17 Desember 2021	Manager HSSE Regulation & System Management	1	BKI Academy	Jakarta (Online)

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan & Unit Audit Internal di sepanjang tahun 2021, dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini.

Education and/or Training of The Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Information on the education and/or training of members of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary & Internal Audit Unit throughout 2021, can be seen in the Good Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure





Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Subsidiary and/or Associated Company



PT PETEKA KARYA SAMUDERA

TAHUN PENDIRIAN Establishment Year	10 Februari 1986 Akta pendirian No. 48 tanggal 10 Februari 1986 dibuat dihadapan NY Yetty Taher S.H	February 10, 1986 Deed No. 48 of February 10, 1986 drafted before Mrs. Yetty Taher, S.H.,
KEGIATAN USAHA Business Activity	• Badan usaha pelabuhan meliputi <i>port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water</i> • <i>Logistic service</i> meliputi fasilitas <i>warehouse & open storage</i> • <i>Pilotage service and port management</i>	• Port business entities include port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water • Logistic service includes warehouse & open storage • Pilotage service and port management
KEPEMILIKAN Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,753% Peteka Karya Gapura 0,247%	Pertamina Trans Kontinental 99.753% Peteka Karya Gapura 0.247%
JUMLAH ASET BERSIH (Rp juta) Total Assets (Rp million)	Rp7.536.882.794	Rp7.536.882.794
STATUS OPERASIONAL Operational Status	Beroperasi sejak 10 Februari 1986	Operating since February 10, 1986
ALAMAT Address	Jl. Raya Pelabuhan, Kabil Batam – Kepri Telepon: +62 – 778 – 711543, 711126 Faksimile: +62 – 778 – 711842 Homepage: www.pekaes-bup.com	Jl. Raya Pelabuhan, Kabil Batam – Kepri Phone: +62 – 778 – 711543, 711126 Facsimile: +62 – 778 – 711842 Homepage: www.pekaes-bup.com



PT PETEKA KARYA JALA

TAHUN PENDIRIAN Establishment Year	6 November 1991 Akta Pendirian No. 62 tanggal 6 November 1991, dibuat dihadapan Sinta Susikto, SH.	November 6, 1991 Deed No. 62 of November 6, 1991, drafted before Sinta Susikto, SH.
KEGIATAN USAHA Business Activity	Pengerukan, Port Engineering, Teknik Bawah Laut, dan Jasa dan Perdagangan	Dredging, Port Engineering, Underwater Engineering, and Services and Trading
KEPEMILIKAN Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,17% Peteka Karya Tirta 0,83%	Pertamina Trans Kontinental 99.17% Peteka Karya Tirta 0.83%
JUMLAH ASET (Rp juta) Total Assets (Rp million)	Rp173.206.356.486	Rp173.206.356.486
STATUS OPERASIONAL Operational Status	Beroperasi sejak 6 November 1991	Operating since November 6, 1991
ALAMAT Address	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok – Jakarta Utara Telepon: +62 – 21 – 29615165 Faksimile: +62 – 21 – 29615166	PT Pertamina Trans Kontinental Building Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok – Jakarta Utara Phone: +62 – 21 – 29615165 Facsimile: +62 – 21 – 29615166



PT PETEKA KARYA GAPURA

TAHUN PENDIRIAN Establishment Year	5 Juni 1987 Akta Pendirian No. 20 tanggal 5 Juni 1987, dibuat di hadapan Notaris Yudo Paripurno, SH dengan nama awal "PT Peteka Karya Samudera" dan diubah berdasarkan risalah rapat yang telah diaktakan dengan No. 68 pada 21 Januari 1988 menjadi PT Peteka Karya Gapura.	June 5, 1987 Deed No. 20 of 5 June 1987, drafted before Notary Yudo Paripurno, SH, with the initial name "PT Peteka Karya Samudera" and had its name altered under minutes of meeting enactment in Deed no. 68 dated January 21, 1988 into PT Peteka Karya Gapura.
KEGIATAN USAHA Business Activity	Jasa Angkutan, <i>Ship Management, Crewing</i> , Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Jasa Perdagangan dan Kegiatan Usaha yang terkait dan/atau menunjang kegiatan usaha di bidang Jasa Pelayaran, Jasa Angkutan dan Jasa Logistic.	Transportation Services, Ship Management, Crewing, Manpower Supply Services, Trade Services, and Business Activities relevant to and/or supporting the activities in Shipping Services, Transportation Services, and Logistics Services sectors.
KEPEMILIKAN Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,98% Peteka Karya Jala 0,02%	Pertamina Trans Kontinental 99.98% Peteka Karya Jala 0.02%
JUMLAH ASET (Rp juta) Total Assets (Rp million)	Rp300.958.726.759	Rp300.958.726.759
STATUS OPERASIONAL Operational Status	Beroperasi sejak 5 Juni 1987	Operating since June 5, 1987
ALAMAT Address	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok - Jakarta Utara Telepon: +62 - 21 - 65307030 Faksimile: +62 - 21 - 6510030 Homepage: www.pেকে.com	PT Pertamina Trans Kontinental Building Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok - Jakarta Utara Phone: +62 - 21 - 65307030 Facsimile: +62 - 21 - 6510030 Homepage: www.pেকে.com



PT TRANS YEONG MARITIME

TAHUN PENDIRIAN Establishment Year	16 September 2014 Akta Pendirian No. 41 tanggal 16 September 2014, dibuat dihadapan Dewantari Handayani, SH, MPA	September 16, 2014 Deed No. 41 of 16 September 2014, drafted before Dewantari Handayani, SH, MPA.
KEGIATAN USAHA Business Activity	Jasa pelayanan kepelabuhan laut	Sea port services
KEPEMILIKAN Ownership	Pertamina Trans Kontinental 51,00% Tong Yeong Tug, Co. Ltd 49,00%	Pertamina Trans Kontinental 51.00% Tong Yeong Tug, Co. Ltd 49.00%
JUMLAH ASET (Rp juta) Total Assets (Rp million)	Rp328.491.000.000	Rp328.491.000.000
STATUS OPERASIONAL Operational Status	Beroperasi sejak 16 September 2014	Operating since September 16, 2014
ALAMAT Address	Gedung Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Armada Perkapalan Lt. 2 Jl. Yos Sudarso Kav 2015 Sunter, Jakarta Utara, 14350 Telepon: +62 21 6530 7032 Faksimile: +62 21 651 6375 Homepage: www.tym-shipping.com	Pertamina Trans Kontinental Building Area Logistik Armada Perkapalan Lt. 2 Jl. Yos Sudarso Kav 2015 Sunter, Jakarta Utara, 14350 Phone: +62 21 6530 7032 Facsimile: +62 21 651 6375 Homepage: www.tym-shipping.com



Pemegang Saham dan Informasi Kepemilikan Saham

Shareholders & Shares Ownership Information

Pemegang saham Perusahaan per 31 Desember 2021 adalah PT Pertamina International Shipping (PIS) dengan jumlah kepemilikan saham 99,999%. dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham 0,001%.

The Company's Shareholders as of December 31, 2021 are PT Pertamina International Shipping with ownership of 99,999% and PT Pertamina Pedeve Indonesia with ownership of 0,001%.

PT Pertamina Pedeve Indonesia menjadi pemegang saham PT Pertamina Trans Kontinental, berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 13 Desember 2017 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat PT Pertamina Trans Kontinental No. 4 tanggal 8 Januari 2018. PT Pertamina Pedeve Indonesia menjadi pemegang saham PT Pertamina Trans Kontinental setelah rapat menyetujui pengambilalihan saham dari PT Pertamina Training & Consulting.

PT Pertamina Pedeve Indonesia becomes the shareholder of PT Pertamina Trans Kontinental, based on The Circular GMS Resolution dated December 13, 2017, which has been stated in the Deed of Decision of the Decree outside the Meeting of PT Pertamina Trans Kontinental No. 4 dated January 8, 2018. PT Pertamina Pedeve Indonesia becomes a shareholder of PT Pertamina Trans Kontinental after the meeting approved the takeover of shares from PT Pertamina Training & Consulting.

Kepemilikan Saham Pertamina Trans Kontinental Per 31 Desember 2021

Pertamina Trans Kontinental Shares Ownership as of December 31, 2021

Keterangan Description	Jumlah Lembar Number of sheets	%	Jumlah (Rp) Total (Rp)
PT Pertamina International Shipping			
Saham Seri A/ Series A Shares	693.698	99,999	693.698.000.000
Saham Seri B/ Series B Shares	819		819.000
PT Pertamina Pedeve Indonesia Tbk			
Saham Seri A/ Series A Shares	10	0,001	10.000.000
Jumlah / Total	694.527	100,00	693.708.819.000

20 Pemegang Saham Terbesar dan Persentase Kepemilikannya

Pertamina Trans Kontinental memiliki 2 pemegang saham yakni PT Pertamina International Shipping dengan kepemilikan 99,999% dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan kepemilikan 0,001%.

Top 20 Shareholders and Ownership Percentage

Pertamina Trans Kontinental has 2 shareholders, which are PT Pertamina International Shipping (PIS) with 99.999% ownership and PT Pertamina Pedeve Indonesia with 0.001% ownership.



Struktur Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemegang saham pengendali PT Pertamina Trans Kontinental adalah PT Pertamina International Shipping, yang sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero).

Pemegang Saham Yang Memiliki 5% Atau Lebih Saham

PT Pertamina International Shipping dengan komposisi sebesar 99,999%.

Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Saham Masing-masing Kurang dari 5%

PT Pertamina Trans Kontinental belum mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia sehingga tidak memiliki Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

Majority and Controlling Shareholders

The controlling shareholder of PT Pertamina Trans Kontinental is PT Pertamina International Shipping, whose shares are owned by PT Pertamina (Persero).

Shareholders with 5% or Higher Shares

PT Pertamina International Shipping (PIS) with 99.999% composition.

Board of Directors and Board of Commissioners Ownership

The Board of Commissioners and Board of Directors do not have direct and non-direct ownership in the Company.

Public Shareholders with Less Than 5% Ownership

PT Pertamina Trans Kontinental has not listed its shares at Indonesia Stock Exchange, therefore, the Company does not have any public shareholders with less than 5% ownership.



Kronologi Pencatatan Saham

Shares Listing Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham. Laporan ini tidak menyertakan informasi terkait kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku, tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*) jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*) dan nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan maupun didaftarkan.

As end of December 31, 2021, the Company did not have a chronology for the listing of shares. This report does not include information relevant to shares listing chronology (including private placement) and/or shares listing from the beginning of the issuance until the end of the fiscal year, shares listing year, total shares, shares par value, and shares offering price for each corporate action, total shares outstanding after the corporate action, and name of stock exchange where the Company's shares are listed

Kronologi Pencatatan Efek dan Obligasi

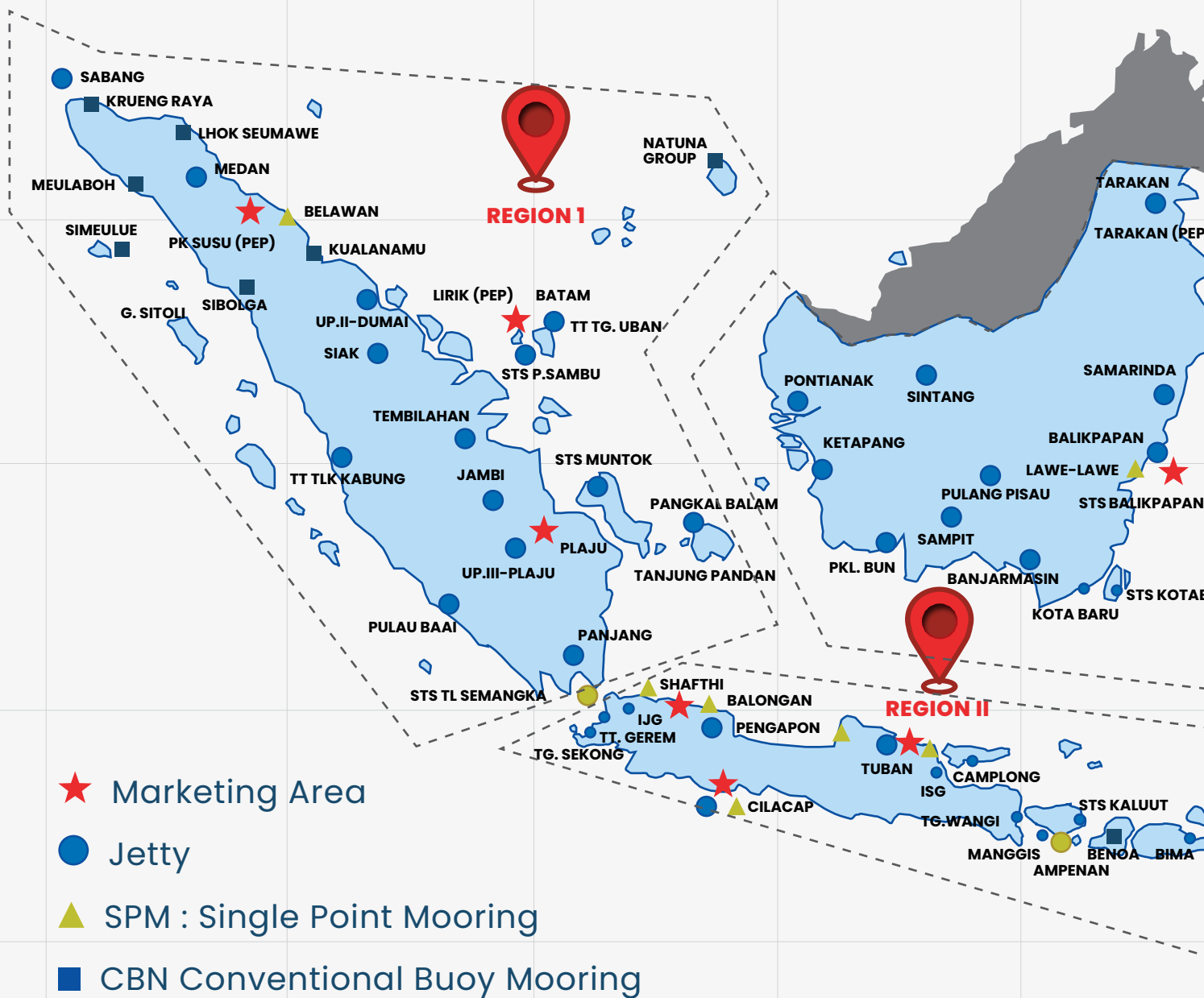
Securities And Bonds Listing Chronology

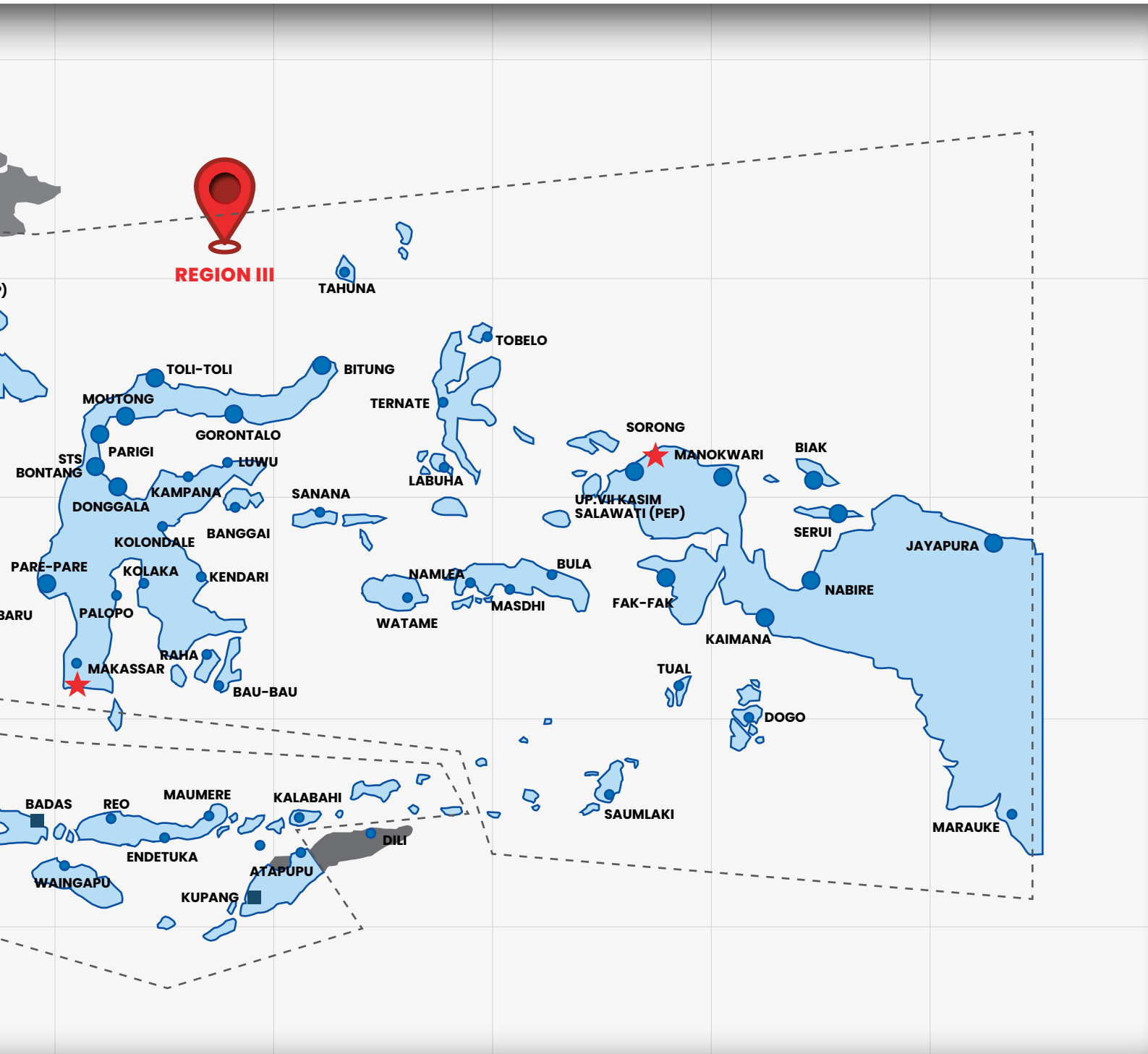
Selama periode pelaporan, PTK tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya. Laporan ini tidak menyajikan informasi terkait kronologi pencatatan efek lainnya, meliputi nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek.

During the reporting period, PTK did not have any share listing chronology. This report does not present information related to other share listing chronology, including the name, year of listing, interest rate/yield, maturity date, value, or name of other stock exchanges where securities are listed, and securities ratings.

Jaringan Wilayah Operasi

Operational Area





Nama & Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Name & Address Of Supporting Institution and/or Profession

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920 - INDONESIA

T: +62 21 50992901 / 31192901

F: +62 21 52905555 / 52905050

www.pwc.com/id

Jasa: Kantor Akuntan Publik

PENASEHAT HUKUM

Legal Advisor

Kantor Hukum Hakim dan Rekan

Rukan Permata Senayan Unit B19 Jalan

Tentara Pelajar No. 5

Patal Senayan, Jakarta

Telp: 021 579 40690

Faks: 021 579 41144

Email: wisjnu@hakimdanrekan.com

Website: www.hakimdanrekan.com

Jasa: Penasehat Hukum

Hendri J. Pandiangan Partners Law

Graha Chantia 2nd Floor Jl. Bangka Raya No.

6 Jakarta Selatan

Telp: 021 7179 4448

Faks: 021 7179 4449

Email: hjplawoffice@gmail.com

Website: www.hjplawoffice.com

Jasa: Penasehat Hukum

NOTARIS

Notary

Dewantari Handayani S.H., MPA.

Jl. Pondok Pinang Raya No 3, Pondok Pinang
Jakarta Selatan, 12310

Telp: 021 765 1859, 751 4828

Faks: 021 765 1859, 751 4828

Email: dewantari@notaris-jakarta.com

Jasa: Notaris

Rismalena Kasri, SH

Prosperity Tower Lt.9, District 8, SCBD Lot 28 Jl.

Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telp: 021 50 3000 29

Email: rismalena@dnet.net.id

Jasa: Notaris



Daftar Alamat Kantor

Office Address

KANTOR MARKETING BUSINESS & OPERATION REGION

Marketing Business & Operation Region Office

REGION I

Kantor Pertamina MOR I

Jl. Yos Sudarso No. 8-10 Medan

REGION II

Gedung Pertamina MOR V

Jl. Jagir Wonokromo No. 88, Surabaya

REGION III

PT. Pertamina Trans Kontinental (Ex.Kantor
Pertamina Patraniaga)

Jl. Longikis No.119 Kel.Mekar Sari. Kec.Balikpapan
Tengah. Kota Balikpapan – Kalimantan Timur
76123

KANTOR MARKETING AREA

Marketing Area Office

Balikpapan

Jl. Yos Sudarso No.1 Komp. Pertamina PO BOX 432

Balikpapan

Phone: (0542) 734693, 515663

Fax: (0542) 423766

Email: Cabang. Balikpapan.PTK@pertamina.com

Makassar

Jl. Ahmad Saleh No. 4 Kel. Losari,

Kec. Ujung Pandang

Makassar-Sulawesi Selatan

Phone: (0411) 873683

Fax: (0411) 873683

Email: Cabang. Makassar.PTK@pertamina.com

Surabaya

Jl. Perak Timur 260 Perak Surabaya

Phone: (031) 3282057,3299112

Fax (031) 3299113

Email: Cabang. Surabaya.PTK@pertamina.com

Batam

Jl. Raya Pelabuhan Kabil

Batam 29435

Phone: (0778) 711741 – 42

Fax: (0778) 711263, 711136

Email: Cabang. Batam.PTK@pertamina.com

Plaju-Palembang

Jl. Beringin No. 70 Plaju Palembang,

Sumatra Selatan

Phone: (0711) 595473, 595376, 595475, 596474

Fax: (0711) 542367, 542377

Email: Cabang. Plaju.PTK@pertamina.com

Belawan

Jl. Minyak No. 1 Lingkungan I Kel. Belawan I,

Kec. Medan

Belawan Medan

Phone: (061) 6943464

Fax: (061) 694241-45

Email: Cabang. Belawan.PTK@pertamina.com

Dumai

Jl. Sultan Syarif Kasim No. 262. Kode Pos 28811

Dumai-Riau

Phone: (0765) 443981,38370

Fax: (0765) 35173

Email: Cabang. Dumai.PTK@pertamina.com

Cilacap

Jl. Tongkol No.20 Cilacap Selatan Cilacap –

Jawa Tengah 53211

Phone: (0282) 521852

Fax: (0282) 521852

Email: Cabang. Cilacap.PTK@pertamina.com

Sorong-Papua

Jl. Yos Sudarso No. 78 Komperta Lido Sorong –
Papua

Phone: (0951) 322294, 329502, 329503

Fax: (0951) 322729

Email: Cabang. Sorong.PTK@pertamina.com

Tanjung Priok

Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area
Logistic Pertamina

Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok,
Jakarta Utara

Phone: (021) 65307028, 65307026, 65307029

Fax: (021) 65307035

Email: Cabang.Priok.PTK@pertamina.com

PORT AREA**Port Area Balikpapan**

- Kota Baru

Gedung PT Pertamina (Persero) UPMS V

Jl. Pertamina RT.21

Ds. Semayap Kec Pulau Laut Utara

Kab. Kotabaru – Kalimantan Selatan

Phone (0518) 23256

- Kuala Semboja

Kuala Semboja RT.003

Kel. Senipah, Kec. Samboja

Kab. Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur

Phone: (0542) 535137

- Samarinda

Jl. Dr. Sutomo 40 Kel. Sanga-Sanga Dalam

Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara

Kalimantan Timur

Phone: (0541) 671300

Fax: (0541) 671487

- Tanjung Santan

Komp. Chevron Santan Terminal RT. XI

Desa Semangko, Kec. Marang Kayu

Kab. Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur

Phone: (0542) 548275

Fax: (0542) 548278

- Tarakan

Jl. Kesuma Bangsa RT.04 RW.03

Kel. Lungkas Ujung

Kec. Tarakan Timur

Tarakan – Kalimantan Timur

Port Area Batam

- Pulau Sambu

Pertamina Pulau sambu RT. 01 /RW. 06

Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang

Batam

- Tarempa

Ds. Payamaran RT.07 RW 01 Kec. Palmatak

Kab. Kepri Anabas – Kepri

- Tanjung Uban

Jl. Hang Tuah No.24

RT. 001/RW.007, Kel. Tanjung Uban

Kec. Bintan Utara

Kab. Bintan – Kepri

Port Area Makassar

- Bau-Bau

Jl. Dayanu Ikhsanuddin Km. 8 Kel. Sulla,

Kec. Betoambari Bau-Bau, Sulawesi Utara

- Kolonodale

Jl. Wolter Mongonsidi No. 25

Kolonodale – Sulawesi Tengah

Phone: (0518) 21624

Port Area Belawan

- Arun Lhokseumawe

2nd Floor Marine Offline PT. Arun NGL Blang

Lancang,

Lhokseumawe NAD

Phone: (0645) 654248

Fax: (0645) 654165

Email: ptkarun@ptk-shipping.com

Port Area Dumai

- Sei Pakning

Gd. Marine Jasra Pertamina (Persero)

UPMS II Jl. Jend. Sudirman Sei Pakning 28761

Phone: (0766) 91112

Fax: (0766) 91112

Email: ptkdumai@ptk-shipping.com



Port Area Cilacap

- Semarang
Mangunharjo RT. 002 RW 003 Kel.
Mangunharjo,
Kec. Tugu Semarang

Port Area Sorong

- Bintuni
Bintuni – Babo
Irian Jaya Barat
- Bula – Seram Timur
Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Bula
Jl. Lumba – Lumba RT. 002/01
Kel. Bula, Seram Timur
- Wayame
Jl. Ir. M Putuhena Rt.006/RW.03
Ds. Wayame Kec. Teluk Ambon
Ambon –Maluku
Phone: (0911) 310087
Fax: (0911) 346155

Port Area Tanjung Priok

- Merak
Jl. Pulorida Kav. M 90–92 Tanjung Sekong
Merak, Banten
Phone: (0254) 571617, 571178
Fax: (0254) 571617
- Balongan
Jl. Kerang A8 Komplek Pertamina EP
Balongan – Indramayu
Phone: (0234) 4288888
Email: ptkbalongan@ptk-shipping.com

- Cirebon
Jl. Sawo 1 C No. 46A
Komperta Klayan – Cirebon
Phone: (0231) 211691
Fax: (0231) 211691
Email: ptkcirebon@ptk-shipping.com

Port Area Surabaya

- Tuban
Jl. Tanjung Awar – awar No 10 RT.02 RT.01
Dusun Boro, Ds Tasik Harjo Kec. Jenu, Tuban
- Gresik
Jl. Yos Sudarso No.01 RT.002 RW.004
Kel. Bedilan Gresik Jawa Timur
Phone : (031) 3282057
- Telaga Biru
Jl. Raya Pelabuhan No. 60
Bangkalan, Madura
Phone: (031) 3071229
- Situbondo
Jl. Raya Pelabuhan No. 1
Kalbut, Situbondo
Phone: (0338) 675141
- Tanjung Wangi
Jl. Raya Situbondo No 8A
Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
Phone: (031)3282057
Fax: (031)3299113

Port Area Plaju–Palembang

- Jambi
Jl. Yos Sudarso No. 36 Kasang, Jambi
Phone: (0741) 31623
Fax: (0741) 7552186
Email: ptkjambi@ptk-shipping.com

Informasi pada Website Perusahaan

Information On Official Website

Informasi terkait PTK yang dimuat pada website Perusahaan (<http://www.ptk-shipping.com/id/>) antara lain sebagai berikut:

Information related to PTK are presented on our official website (<http://www.ptk-shipping.com/id/>), as follows:

PTK Shipping

- Tentang PTK Shipping
- Visi dan Misi
- Manajemen
- Tata Nilai
- Penghargaan dan Sertifikasi
- Health, Safety, Security and Environment
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PTK Shipping

- About PTK Shipping
- Vision and Mission
- Management
- Values
- Awards and Certifications
- Health, Safety, Security and Environment
- Corporate Social Responsibility

Armada

- Anchor Handling Tug Supply
- Gas Carrier
- Tanker
- Tug Boat & Oil Barges
- Harbour Tug
- SPOB
- Utility Vessel

Fleet

- Anchor Handling Tug Supply
- Gas Carrier
- Tanker
- Tug Boat & Oil Barges
- Harbour Tug
- SPOB
- Utility Vessel

Bisnis Utama

- Ship Operator
- Charter & Broker
- Shipping Agent
- Port Management
- Bunker Agent
- Offshore & Onshore Logistic Base
- Recognized Security Organization
- Hydro-Oceanography & Mapping

Business Activity

- Ship Operator
- Charter & Broker
- Shipping Agent
- Port Management
- Bunker Agent
- Offshore & Onshore Logistic Base
- Recognized Security Organization
- Hydro-Oceanography & Mapping

Berita

- Berita dan Agenda
- Video dan Televisi

News

- Event and News
- Video and Television



Investor

- Our Shareholder
- Annual & Sustainability Report

PTK Clean

- Tentang PTK Clean
- Apa yang Perlu Dilaporkan
- Pembuatan Laporan

GCG

- Board Manual
- Pedoman Code of Conduct
- Pedoman Code of Corporate Governance
- Pedoman Gratifikasi
- Pedoman Conflict of Interest
- Pedoman Gratifikasi Fungsi Pengendalian Gratifikasi
- Pedoman Whistleblowing System

Kontak

- Kontak Kami
- Cabang
- Anak Perusahaan

Investor

- Our Shareholder
- Annual & Sustainability Report

PTK Clean

- Tentang PTK Clean
- Apa yang Perlu Dilaporkan
- Pembuatan Laporan

GCG

- Board Manual
- Code of Conduct Guideline
- Code of Corporate Governance Guideline
- Gratification Guideline
- Conflict of Interest Guideline
- Gratification Guideline Anti-Gratification Function
- Whistleblowing System Guideline

Contact

- Contact Us
- Branches
- Subsidiary

Penghargaan Tahun 2021

Awards In 2021

Penghargaan yang diterima Perusahaan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The awards received by the Company during 2021 are as follows:



Nama Award: TJSL & CSR Award 2021

Kategori: Prominent Shipping, Maritime and Logistic Services Company on Supporting TJSL on Environment Pilar

Award Name: TJSL & CSR Award 2021

Category: Prominent Shipping, Maritime and Logistic Services Company on Supporting TJSL on Environment Pilar



Nama Award: BUMN Branding Marketing Award 2021

Kategori: The Best CMO Leadership Teamwork

Award Name: BUMN Branding Marketing Award 2021

Category: The Best CMO Leadership Teamwork



Nama Award: BUMN Branding Marketing Award 2021

Kategori: Predikat Silver untuk Global Brand Marketing Strategy

Award Name: BUMN Branding Marketing Award 2021

Category: Silver Predicate for Global Brand Marketing Strategy



Nama Award: BUMN Branding Marketing Award 2021

Kategori: Predikat Gold untuk International Recognition

Award Name: BUMN Branding Marketing Award 2021

Category: Gold Predicate for International Recognition



Nama Award: BUMN Marketeers Award 2021

Kategori: Perusahaan Paling Menjanjikan

Award Name: BUMN Marketeers Award 2021

Category: Most Promising Companies



Nama Award: Anugerah BUMN Award 2021

Kategori: 3 Besar BUMN Terbaik Kategori Strategi Bertahan dan Bertumbuh

Award Name: Anugerah BUMN Award 2021

Category: The Top 3 Best SOEs in the Strategy for Survival and Growth



Nama Award: Anugerah BUMN Award 2021

Kategori: The Best CEO Driving Execution

Award Name: Anugerah BUMN Award 2021

Category: The Best CEO Driving Execution

Peristiwa Penting Tahun 2021

2021 Events Highlights



24 Januari 2021 : CSR PTK Peduli – Bencana Gempa Sulawesi Barat

January 24, 2021 : CSR PTK Peduli – West Sulawesi Earthquake Disaster



5 Februari 2021 : Sinergi PHE OSES dan PKJ dalam Pekerjaan Underwater Work Service

February 5, 2021: Synergy of PHE OSES and PKJ in Underwater Work Service



1 Maret 2021 : Launching Ceremony Harbour Tug 3200HP "Transko Dara 3207"

March 1, 2021: Launching Ceremony Harbor Tug 3200HP "Transko Dara 3207"



22 – 23 Maret 2021 : PODA dan Launching Rigid Bouyant Boat

22 – 23 March 2021 : PODA and Rigid Bouyant Boat Launching



April : PT Pertamina Trans Kontinental Raih Dua Penghargaan di Anugerah BUMN 2021 yaitu The Best CEO Driving Execution kepada Direktur Utama PTK dan Kategori Strategi Bertahan Tumbuh Terbaik

April : PT Pertamina Trans Kontinental Wins Two Awards at the 2021 BUMN Award, namely The Best CEO Driving Execution to the President Director of PTK and Best Survival Growing Strategy Category



16 April 2021 : PTK, PKJ dan CRBCI Garap Proyek Pengerukan dan Reklamasi di Indonesia

16 April 2021 : PTK, PKJ and CRBCI Work on Dredging and Reclamation Projects in Indonesia



30 April 2021 : PT Peteka Karya Samudera Kantongi Izin Hubla untuk Menanggulangi Pencemaran

April 30, 2021 : PT Peteka Karya Samudera Pockets Hubla Permit to Combat Pollution



2 Juni 2021 : RUPST Tahun Buku 2020 PT Pertamina Trans Kontinental

2 June 2021 : PT Pertamina Trans Kontinental AGMS for Financial Year 2020



9 Juni 2021 : PTK meraih Award Kategori Perusahaan Paling Menjanjikan pada BUMN Marketeers Awards 2021

June 9, 2021: PTK won the Most Promising Company Category Award at the BUMN Marketeers Awards 2021



Oktober 2021 : PTK Meraih Award Kategori Prominent Shipping, Maritime and Logistic Services Company on Supporting TJSL on Environment Pilar pada TJSL & CSR Award 2021

October 2021 : PTK Wins Award for Prominent Shipping, Maritime and Logistic Services Company on Supporting TJSL on Environment Pillar of TJSL & CSR Award 2021



15 Desember 2021: PTK meraih 3 Award pada BUMN Branding Marketing Award 2021

December 15, 2021: PTK won 3 Awards at the BUMN Branding Marketing Award 2021



Desember 2021 : PTK mendapatkan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh TUV Nord Indonesia

December 2021 : PTK received ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification by TUV Nord Indonesia





Fungsi Penunjang Bisnis

Business Function Support

Keberhasilan yang telah dicapai Perseroan juga tercermin dari upaya Perseroan dalam menghadapi kendala/tantangan dalam menjalankan usaha.

The company's success is also reflected in the efforts taken in facing the constraints / challenges that arose in running the business

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Profil dan Komposisi Pekerja

Hingga 31 Desember 2021, jumlah pekerja PTK mencapai 1213 orang, tumbuh 35% dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 898 orang. Peningkatan ini telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sejalan dengan peralihan kegiatan marine services dari PT Pertamina (Persero) ke PTK pada tahun 2021, peralihan terkait tidak hanya terbatas pada kegiatan bisnis melainkan juga pekerja perbantuan PT Pertamina (Persero) yang sebelumnya mengelola kegiatan operasional marine services. Berikut adalah komposisi pekerja berdasarkan level jabatan, pendidikan, tingkat usia, status kepegawaian dan jenis kelamin.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Jabatan

Dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi kerja, pekerja PTK telah dibagi menjadi menjadi beberapa jenjang jabatan mulai dari *Non-Staff*, *Staff*, Asisten Manager, Manager dan Eksekutif. Adapun komposisi pekerja berdasarkan kelompok jabatan dapat terlihat dari tabel berikut:

Employee Profile And Composition

As of December 31, 2021, total employees of PTK reached 1213 people, increased by 35% compared to 898 people in 2020. This increase has been adjusted to the development of needs in line with the transition of marine services activities from PT Pertamina (Persero) to PTK in 2021, related transitions are not only limited to business activities but also assisted workers of PT Pertamina (Persero) who previously managed marine services operational activities. The following is the composition of workers based on position level, education, age level, employment status and gender.

Employee Composition Based on Position Level

In creating effectiveness and efficiency of the implementation of work functions, PTK employees have been divided into several position level starting from Non-Staff, Staff, Assistant Manager, Manager, Executive. The employee based on position groups is tabulated below:

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition by Position Level

Jabatan Position		2021	2020	2019
Eksekutif	Executive	22	16	16
Manager	Manager	76	52	47
Asisten Manager	Assistant Manager	156	94	95
Staff + Crew Laut	Staff + Marine Crew	395	258	228
Non Staf	Non Staff	564	478	282



Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan komposisi pekerja Pertamina Trans Kontinental terbesar adalah Sarjana S1 sebanyak 472 orang. Disusul kemudian adalah pekerja dengan latar belakang pendidikan Diploma sebanyak 276 orang.

Employess Composition by Education Level

The composition of the educational background of PTK employees is dominated by Bachelor's–Master's Degree education level (45%) followed by Diploma Degree level and equivalent (23%), Senior High School (27%) and employees with special educational background for marine workers (5%).

Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition by Education Level

Pendidikan Education		2021	2020	2019
Pasca Sarjana	Post Graduate	76	57	56
Sarjana	Undergraduate	472	328	346
Diploma	Diploma	276	133	113
SMA*	Senior High School	327	319	142
Lain-lain (Ijazah Laut)	Others (Marine Diploma)	62	61	11

* Termasuk Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) Kantor Pusat dan Kantor Region

* Including Supporting Service Workers (TKJP) Head Office and Regional Offices

Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia komposisi pekerja Pertamina Trans Kontinental terbesar adalah berusia 31-40 tahun sebanyak 440 orang. Disusul kemudian adalah pekerja berusia 41-50 tahun sebanyak 303 orang.

Employess Composition by Age

Based on the age composition of Pertamina Trans Kontinental, the largest employee is aged 31-40 years with 440 people. Followed by 303 workers aged 41-50 years.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

Usia Age		2021	2020	2019
<20 tahun	<20 years	7	7	3
21-30 tahun	21-30 years	370	257	174
31-40 tahun	31-40 years	440	303	203
41-50 tahun	41-50 years	303	239	189
51-55 tahun	51-55 years	77	76	81
>55 tahun	>55 years	16	16	18

Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin pekerja PTK didominasi oleh pekerja laki-laki dengan jumlah 1009 orang (83%) dan perempuan 204 orang (16%). PTK senantiasa berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja inklusif serta memberi kesempatan yang sama berbasis meritokrasi sehingga meningkatkan *talent diversity* perusahaan.

Employess Composition by Gender

Based on gender, PTK employees are dominated by male employee with total of 1009 people (83%) and 204 women (16%). PTK always strives to create an inclusive work environment and provide equal opportunities based on meritocracy so as to increase the company's talent diversity.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender		2021	2020	2019
Laki-laki	Male	1.009	733	519
Perempuan	Female	204	165	149

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian komposisi pekerja PTK dibagi menjadi Pekerja Tetap, Pekerja Tidak Tetap (Pekerja Waktu Tertentu dan Pekerja Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP)). Jumlah Pekerja Tetap pada tahun

Employes Composition Employment Status

Based on employment status, the composition of PTK employees is divided into Permanent Workers, Non-Permanent Employees (Specific Time Workers and Supporting Service Employees (TKJP)). The number of permanent



2021 sebanyak 599 orang, sedangkan pekerja tidak tetap (PWT) sebanyak 50 orang serta pekerja TKJP sebanyak 564.

employees in 2021 is 599 people, while temporary employees (PWT) are 50 people and TKJP employees are 564.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Status Status		2021	2020	2019
Pekerja Tetap / PWTT	Permanent Employees	599	376	346
Pekerja Kontrak / PWT	Contract Employees	50	44	40
Pekerja Tidak Tetap	Non-Permanent Employees	564	478	282

Rekrutmen Pekerja

Rekrutmen pekerja baru berfungsi untuk melakukan regenerasi serta memberikan keseimbangan komposisi pekerja. PTK menyusun program rekrutmen yang komprehensif serta memerhatikan faktor lainnya agar jumlah peker yang ada dapat memengaruhi efisiensi kinerja Perseroan.

PTK menjunjung tinggi asas kesetaraan kesempatan dalam proses rekrutmen tanpa adanya unsur diskriminasi. Oleh karenanya rekrutmen pekerja PTK dilakukan secara terbuka bagi siapapun. Untuk mendapatkan calon pekerja yang berkualitas terbaik. PTK melakukan rekrutmen secara internal dan eksternal.

Employee Recruitment

New employee recruitment functions to regenerate and provide a balance of employee composition. PTK compiles a comprehensive recruitment program and considering other factors so that the number of existing employees can affect the efficiency of the Company's performance.

PTK upholds equal opportunity principle in the recruitment process without any element of discrimination. Therefore, employee recruitment in PTK is available to anyone. To recruit prospective employees with high quality, PTK conducts recruitment internally and externally.

Komposisi Pekerja Baru PT Pertamina Trans Kontinental

Composition of New Employees of PT Pertamina Trans Kontinental

Jenis Kelamin Gender		2021	2020	2019
Laki-laki	Male	0	36	5
Perempuan	Female	0	14	2
Total	Total	0	50	7

Tingkat Turnover Pekerja

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat *turnover* pekerja sehingga tidak berpengaruh terhadap jalannya operasi Perusahaan. Berikut ini kami sajikan statistik komparatif dalam tiga tahun terakhir:

Employee Turn Over Rate

Throughout 2021, there was no employee turnover so that it did not have a significant effect on the Company's operations. In the following we present comparative statistics in the last three years:

Jumlah Turnover Pekerja

Employee Turnover Rate

Keterangan Description		2021	2020	2019
Jumlah Pekerja	Total Employees	1.213	898	668
Pekerja Mengundurkan Diri	Resigned Employees	0	5	3
Turnover Pekerja (%)	Employees Turnover	0	0,56%	0,45%

Pengembangan Kompetensi Pekerja

Pemetaan Kebutuhan Pengembangan SDM

Dalam pengembangan kompetensi Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh manajemen dan pekerja berdasarkan kebutuhan jenjang jabatan. Selama tahun 2021 beragam pelatihan dan sertifikasi telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan tertentu, sesuai kompetensi yang diperlukan masing-masing pekerja.

Berikut adalah pemetaan kebutuhan *training* berdasarkan level jabatan dan realisasi selama tahun 2021:

Employee Competency Development

Mapping Human Resources Development Needs

In competency development, the Company provides equal opportunities to all employees based on the needs of the position level and the needs and challenges of the Company going forward. During 2021, various trainings and certifications have been carried out to meet the needs of certain skills, according to the competencies required by each worker.

The following is a mapping of training needs based on position level and realization during 2021:

Training Berdasarkan Level Jabatan dan Realisasi Selama Tahun 2021

Training Based on Position Level and Realization During 2021

Level Level	Rencana Plan	Realisasi Realization	Tujuan Objection
Eksekutif/ Executive	8 pelatihan / training	15 pelatihan / training	Meningkatkan Knowledge dan Kompetensi Develop Knowledge and Competence
Manager/Setara/ Equal	15 pelatihan / training	17 pelatihan / training	Meningkatkan Knowledge dan Kompetensi Develop Knowledge and Competence
Sr.Analyst/Sr. Officer/Setara / Equal	25 pelatihan / training	41 pelatihan / training	Meningkatkan Knowledge dan Kompetensi Develop Knowledge and Competence
Analyst/Officer/ Setara/ Equal	30 pelatihan / training	41 pelatihan / training	Meningkatkan Knowledge dan Kompetensi Develop Knowledge and Competence
Jr.Analyst/Jr. Officer/Setara/ Equal	35 pelatihan / training	42 pelatihan / training	Meningkatkan Knowledge dan Kompetensi Develop Knowledge and Competence



Pelatihan dan Pengembangan

Secara berkesinambungan Perusahaan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pekerja Perseroan mewujudkannya dengan menyelenggarakan pelatihan bagi para pekerja. Perusahaan menyelenggarakan 2 jenis program pengembangan pekerja yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pekerja yang memiliki kompetensi, kemampuan serta *know-how* untuk menampilkan kinerja yang mendukung pencapaian strategi perusahaan.

1. Program Pengembangan General (*General Program*).

Program ini ditujukan kepada seluruh Pekerja PTK dan berfokus pada pengembangan kompetensi dan keahlian pekerja guna memenuhi gap kompetensi pekerja di jabatannya saat ini.

2. Program Pengembangan Talent (*Talent Development*).

Program ini ditujukan kepada para *Talent/Successor* dan pekerja baru PTK dengan tujuan:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pada *talent/successor* dalam rangka menyiapkan pada *talent/successor* agar dapat menampilkan kinerja yang optimal pada jabatan yang lebih tinggi (*Talent Readiness*).
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pekerja baru agar menjadi *early professional* di bidangnya serta mengidentifikasi pekerja potensial yang akan dimasukkan ke dalam *talent acceleration pool*.

Technical Training Program

Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan dengan *scope* kegiatan sebagai berikut:

Training and Development

On an ongoing basis, the Company continues to improve the competence and capabilities of employees. The company makes this happen by organizing training for workers. The company organizes 2 types of worker development programs that aim to ensure the availability of workers who have the competence, ability and know-how to display performance that supports the achievement of the company's strategy.

1. General Development Program

The program is aimed at all CAR workers and focuses on developing employee competencies and expertise to meet the competency gap of workers in their current positions.

2. Talent Development Program

This program is aimed at *Talent/Successor* and new PTK employees with the aim of:

- a. Develop and enhance competencies in *talent/successors* in order to prepare *talent/successors* in order to display optimal performance in higher positions (*Talent Readiness*).
- b. Develop and improve the competence of new workers to become early professionals in their fields and identify potential workers who will be included in the talent acceleration pool.

Technical Training Program

Technical competency development is carried out with *scope* of activities as follows:

1. Terpenuhinya <i>crew</i> secara jumlah dan sertifikasi (COC, COP) sesuai dengan regulasi serta ketepatan waktu pemenuhannya. • Pemberdayaan <i>crew</i> PWTT • <i>Sourcing</i> melalui <i>crew Agent</i> dengan mengutamakan sinergi bersama Anak Perusahaan yang bergerak dalam bisnis <i>crew agent</i>. Merekrut pelaut-pelaut dengan mensyaratkan terpenuhinya sertifikasi sesuai regulasi serta kecakapan yang dibutuhkan dengan dituangkan ke dalam kontrak <i>crew agent</i>. 2. Penyiapan kader-kader pelaut yang terbaik untuk operasional kapal dan pemenuhan <i>talent management</i> darat dengan <i>background shipping</i> sesuai <i>core</i> bisnis perusahaan di masa yang akan datang. 3. Mempertahankan pelaut dengan memberikan sistem remunerasi menarik yang bersaing dengan industri pelayaran sejenis. • Pemberian Bonus <i>Performance Crew</i> • Pemberian kompensasi <i>overstay</i> awak kapal akibat kebijakan pencegahan COVID-19	1. Fulfillment of crew in number and certification (COC, COP) in accordance with regulations and timeliness of fulfillment. • Empowerment of the PWTT crew • Sourcing through Crew Agents by prioritizing synergies with subsidiaries engaged in the crew agent business. Recruiting seafarers by requiring the fulfillment of certification in accordance with the regulations and the skills needed by disclosing in a crew agent contract. 2. Preparation of the best Seaman cadres for ship operations and fulfillment of ground talent management with <i>Shipping</i> background in accordance with the company's core business in the future. 3. Retain sailors with provide an attractive remuneration system that competes with similar shipping industries. • Payment of Crew Performance Bonus • Disbursement of <i>overstay</i> compensation for the vessels crew following the COVID-19 prevention policy.

Training Lainnya/ Realisasi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan *leadership skill*, jabatan managerial telah mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan, di antaranya:

Other Trainings

In order to develop competency and leadership skill, the managerial position has been participated in trainings and educations, among others:

Training untuk Jabatan Managerial

Training for Managerial Position

Nama Program/ Training/ Seminar Name of Program/ Training/Seminar	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Jabatan Position	Jumlah Peserta Total Participants	Pelaksana Organizer	Lokasi Location
Procurement & Purchasing Management	26 Maret 2021	Manager Procurement	1	PT Tempo Inti Media Harian	Jakarta (Online)
Integrasi Logistik untuk Meningkatkan Produktivitas Pelabuhan	31 Maret 2021	Direktur JV, VP Marketing, dan Manager di Fungsi Marketing	10	ABUPI	Jakarta (Online)



Training untuk Jabatan Managerial

Training for Managerial Position

Nama Program/ Training/ Seminar Name of Program/ Training/Seminar	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Jabatan Position	Jumlah Peserta Total Participants	Pelaksana Organizer	Lokasi Location
Project Management	5 – 6 April 2021	VP Marketing, dan Manager di Fungsi Marketing	7	PT Kenawaenergi	Jakarta (Online)
Extracting Value From Successful Holding Implementation	15 – 18 Juni 2021	VP Finance	1	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
Building The Future Ready Organization	22 – 25 Juni 2021	Vice President	8	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
TKDN	30 Juni – 2 Juli 2021	Manager Procurement	1	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
Awareness SUPREME	13 Agustus 2021	VP dan Manager Technical Fleet & Management,	11	HSE TC	Jakarta (Online)
Marine Terminal Management & Self Assesment	30 – 31 Agustus 2021	Manager HSSE Regulation & System Management	1	PT Kenawaenergi	Jakarta (Online)
Peningkatan Kompetensi Satuan Pengendalian Internal Auditor Dalam Mencegah Penyalahgunaan Aset dan Rekayasa Laporan Keuangan	2 September 2021	VP dan Manager di Fungsi Internal Audit	2	Lembaga Pusat Studi Informasi (LPSI)	Jakarta (Online)
Certified Risk Associate (CRA)	25 – 26 September 2021	Chief Audit Executive	1	PT Utama Hanriz Indonesia	Jakarta (Online)
Internal Auditor ISM Code	17 – 19 Oktober dan 01 – 03 November 2021	VP Flee & Ship Management dan Manager dibawahnya serta Manager HSSE	5	BKI Academy	Jakarta (Online)
Business Judgment Rule: Corporate Action or Corruption?	26 – 28 Oktober 2021	VP MRCOS, VP Finance, dan CAE	3	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
Executive Insight Leadership Series	2 – 4 November 2021	VP Legal & Relation, VP MRCOS, VP Marine Business Unit	3	PT Pertamina Training & Consulting	Jakarta (Online)
Seminar Nasional Internal Audit	1 – 2 Desember 2021	Chief Audit Executive dan Manager di bawahnya	2	Yayasan Pendidikan Internal Audit	Jakarta (Online)

Training untuk Jabatan Managerial

Training for Managerial Position

Nama Program/ Training/ Seminar Name of Program/ Training/Seminar	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Jabatan Position	Jumlah Peserta Total Participants	Pelaksana Organizer	Lokasi Location
Internal Audit ISPS Code	8 – 10 Desember 2021	VP MRCOS, Manager Marine Compliance & Stakeholder Management, Head of Port & Fleet Security	3	BKI Academy	Jakarta (Online)
DPA ISM Code Code	15 – 17 Desember 2021	Manager HSSE Regulation & System Management	1	BKI Academy	Jakarta (Online)

Biaya Program Pengembangan Pekerja 2021

Berikut adalah jumlah pelatihan, peserta serta biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan hingga akhir tahun 2021:

2021 Worker Development Program Costs

The following is the number of training, participants and costs incurred by the Company until the end of 2021:

Program Pengembangan Pekerja

Employee Development Program

Keterangan Description		2021	2020	2019
Jumlah Pelatihan	Total Training	43	42	65
Peserta	Participant	1012	1029	613
Biaya	Budget	Rp1.596.931.287	Rp2.276.909.689	Rp2.391.594.795

Sistem Program Pengembangan Pekerja

Pengelolaan atau pembinaan SDM PTK menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki SDM yang andal. Dalam hal pembinaan SDM, perusahaan telah menyiapkan:

1. Sistem *career path* pekerja, pembuatan *career path* tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pencarian dan

Employees Development Program

System Management or coaching of PTK human resources is a form of long-term investment for the Company. This aims to ensure that the company has reliable HR. In terms of HR development, the company has prepared:

1. Employee career path system, the creation of career paths aims to accelerate the process of searching and selecting



pemilihan kandidat dalam proses *Succession Planning* serta tersedianya pemimpin dan pekerja berkualitas;

2. Sistem *talent pool* sebagai salah satu alat pembinaan;
3. *Talent Management System*, merupakan *Strategic Initiative* fungsi HR. PTK telah mempersiapkan pembuatan penyusunan *Talent Management System*.

Career Path

Dalam rangka mendorong tercapainya *high performance organization*, Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap jabatan telah diisi oleh pekerja yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Evaluasi penempatan pekerja (*placement*) pada prinsipnya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen pekerja melalui proses *Job Person Mapping* (JPM) serta PRL Pribadi yang merupakan refleksi dari *exposure*, pengalaman dan kapasitas pekerja.

Perusahaan menyadari bahwa mengingat besarnya organisasi, jumlah jabatan dan populasi pekerja, serta mempertimbangkan bahwa penempatan pekerja dalam implementasi RPSDM merupakan perubahan yang sangat mendasar dibandingkan proses penempatan sebelumnya. Dengan demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kondisi yang belum ideal, dimana tidak semua jabatan dapat diisi oleh pekerja yang sesuai/tidak ada gap dalam kapasitas dan kapabilitasnya.

Talent Pool

Sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap implementasi *talent management*, maka salah satu langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan memetakan pekerja yang masuk sebagai *Talent Pool*. *Talent Pool* adalah kelompok pekerja yang diidentifikasi sebagai talenta terbaik yang

candidates in the *Succession Planning* process as well as the availability of qualified leaders and workers;

2. *The talent pool system as a coaching tool*;
3. *Talent Management System, a Strategic Initiative for HR function. PTK has prepared the preparation of the Talent Management System.*

Career Path

In order to encourage the achievement of high performance organizations, the Company conducts evaluations to ensure that every position has been filled by employees who have the appropriate capacity and capabilities. Evaluation of placement of workers (*placement*) in principle is done by considering the results of the assessment of workers through the process of *Job Person Mapping* (JPM) as well as *Personal PRL* which is a reflection of the *exposure*, experience and capacity of employees.

The company realizes that given the size of the organization, the number of positions and the worker's population, and considers that the placement of workers in the implementation of RPSDM becomes a very fundamental change compared to the previous assignment process. Thus in practice there are still conditions that are not yet ideal, where not all positions can be filled by employees who are suitable/there are no gaps in their capacity and capabilities.

Talent Pool

As a manifestation of the company's commitment to the implementation of *talent management*, one of the first steps taken is to identify and map workers who enter the *Talent Pool*. *Talent Pool* is a group of workers who are identified as the best talent that meets the performance criteria/performance values

memenuhi kriteria *performance*/nilai kinerja dan potensi/ kompetensi yang dipersyaratkan Perusahaan.

Pada prinsipnya *Talent Pool* digunakan perubahan untuk dasar penetapan *successor* list jabatan di PTK dan AP serta dasar penetapan program pengembangan pekerja. Saat ini kami sedang membuat *system talent pool* bekerja sama dengan Fungsi *Information Technology*. Tujuan sistem tersebut agar alat bantu baik Tim *Management* dan Direksi dalam program pengembangan pekerja dan mempercepat keputusan dalam pergerakan pekerja secara tepat (kompetensi).

and potential/competencies required by the Company.

In principle, Talent Pool is used to change the basis for determining the successor list of positions in CAR and the AP and the basis for establishing employee development programs. Currently we are making a talent pool system in collaboration with the Information Technology Function. Purpose of the system is to assist both the Management Team and Directors in the employee development program and speed-up the decisions in the accurate workers (competence) movement.

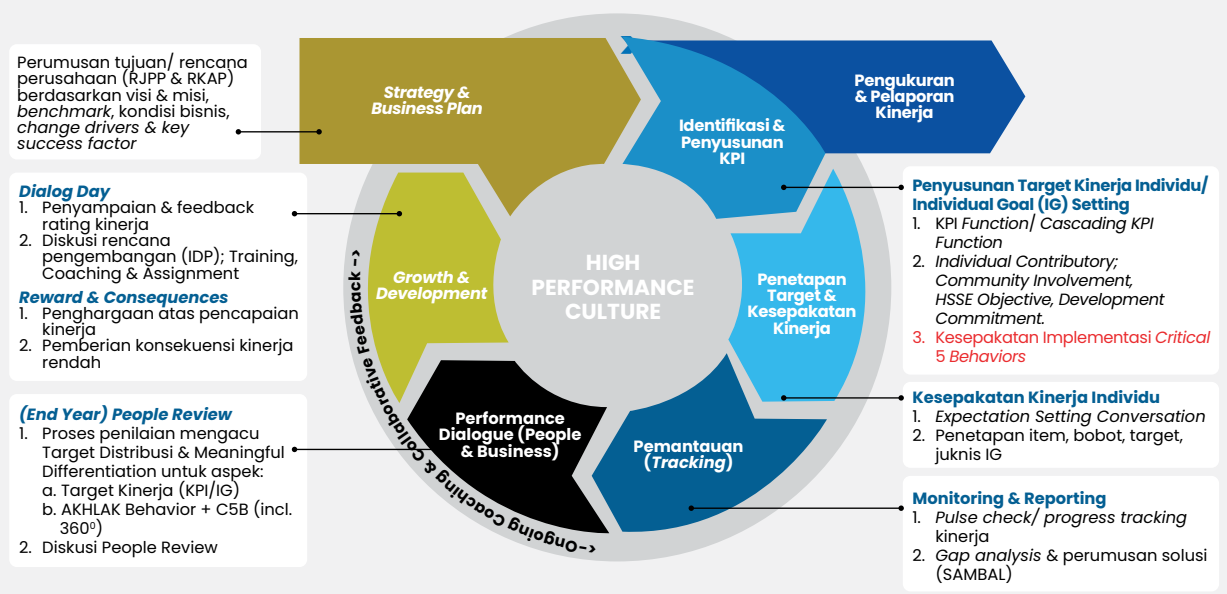
Pengelolaan Kinerja Individu

Individual Performance Management

Pengelolaan Kinerja Individu dalam Performance Management System

Pengelolaan Kinerja Individu dalam Performance Management System

End-to-end Process Siklus Pengelolaan Kinerja Individu related to Performance Management System (PMS Cycle)





Pengelolaan kinerja individu merupakan suatu siklus dari *performance management system* (PMS) yang dimulai dari proses identifikasi & penyusunan *key performance indicator* (KPI)/ *Individual Goal* (IG) *setting* hingga proses *dialog day* dengan tujuan untuk membentuk *high performance culture* yang mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Tahapan penilaian kinerja individu dilakukan 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun melalui *Mid-Year People Review* (MYPR) yang dilakukan pada pertengahan tahun dan juga *End-Year People Review* (EYPR) yang dilakukan pada akhir tahun.

Proses pengelolaan kinerja individu dilakukan melalui aplikasi *people review online* yang dapat diakses seluruh Perwira melalui intra Pertamina (I-AM). PTK secara resmi Go Live menggunakan aplikasi ini terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021. Penggunaan aplikasi *people review online* telah memudahkan proses penetapan IG *Setting, monitoring & reporting*, proses diskusi & kalibrasi saat MYPR maupun EYPR, serta proses *dialog day*.

Penilaian kinerja individu mengacu pada target distribusi dan *meaningful differentiation* untuk aspek: (1) target kinerja (KPI/IG) dan (2) perilaku nilai budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan *Critical 5 Behavior* (termasuk penilaian 360°), juga atas pencapaian kinerja di luar Sasaran Kerja yang dituangkan dalam *rating/nilai 1 s/d 8*, yang sebarannya pada suatu kelompok penilaian *evaluee* melalui komparasi nilai yang dibahas di jenjang/ kelompok diskusi *People Review* atau diskusi Kalibrasi. Proses diskusi kalibrasi ini dilakukan bersama dengan pimpinan fungsi sebagai evaluator dan dipimpin oleh seorang Chairman.

Individual performance management is a cycle of the performance management system (PMS) starting from the identification & preparation of Key Performance Indicator (KPI)/Individual Goal (IG) settings to the day dialogue process with the aim of forming a high performance culture that supports the achievement of the company's strategic goals. The individual performance appraisal stage is carried out 2 (two) times in a 1 (one) year period through the Mid-Year People Review (MYPR) which is conducted in the middle of the year and also the End-Year People Review (EYPR) which is conducted at the end of the year.

The individual performance management process is carried out through an online people review application that can be accessed by all officers via intra-Pertamina (I-AM). PTK Go Live officially uses this application starting on December 15, 2021. The use of the online people review application has facilitated the process of determining IG Settings, monitoring & reporting, discussion & calibration processes during MYPR and EYPR, as well as the dialogue day process.

Individual performance assessment refers to the distribution target and meaningful differentiation for aspects: (1) performance targets (KPI/IG) and (2) AKHLAK cultural values behavior (Many, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) and Critical 5 Behavior (including 360° assessment), as well as for the achievement of performance outside the Work Goals as outlined in the rating/value 1 to 8, which are distributed to an e-value assessment group through a comparison of values discussed in the People Review level/discussion group or Calibration discussion. This calibration discussion process is carried out together with the function leader as an evaluator and is led by a Chairman.

Adapun ringkasan hasil penilaian kinerja individu pada periode EYPR tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini, dengan sebaran persentase didominasi oleh nilai kinerja 6-7 (53%) dan nilai kinerja 5 (40%) dari total 606 pekerja.

The summary of the results of individual performance assessments in the 2021 EYPR period can be seen in the following table, with the percentage distribution dominated by performance scores of 6-7 (53%) and performance scores of 5 (40%) of a total of 606 workers.

Uraian Description		Jumlah Pekerja Total Employee	Persentase Percentage
Nilai kinerja 6-7 (diatas rata-rata target pencapaian)	Performance rating 6-7 (above the average target achievement)	323	53%
Nilai kinerja 5	Performance rating 5	242	40%
Nilai kinerja 3-4	Performance rating 3-4	40	7%
Nilai kinerja 2	Performance rating 1-2	1	0%
Total Pekerja	Total Employee	606	100%

Program Kesejahteraan dan Remunerasi

Program kesejahteraan dan sistem remunerasi diberikan dan dievaluasi secara berkala oleh Fungsi *Human Capital* PTK. Program tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan persaingan industri sejenis dan regulasi yang berlaku. Selain itu pemberian program kesejahteraan dan remunerasi yang kompetitif diharapkan untuk dapat meningkatkan performa kinerja pekerja dan perusahaan secara menyeluruh. PTK berkomitmen untuk melaksanakan program kesejahteraan dan sistem remunerasi secara adil dan merata. Berikut adalah rincian komponen remunerasi yang diterima oleh pekerja:

Welfare Program And Remuneration

Welfare program and remuneration system are provided and evaluated regularly by Human Capital Function at PTK. The program is done by considering competition with similar industry and prevailing regulation. In addition, the provision of competitive welfare program and remuneration is expected to increase performance of the workers and Company comprehensively. PTK is committed to perform the welfare program and remuneration system fairly and equally. Detail remuneration component received by the employees are as follows:

**Komponen Remunerasi Pekerja PTK**

PTK Employees Remuneration Component

Komponen Remunerasi & Benefit Benefit Remuneration & Benefit Component	Status Pekerja Employee Status		Periode Kalkulasi Calculation Period			Tipe Type	
	Staf Staff	Non-Staf Non-Staff	Harian Daily	Bulanan Monthly	Tahunan Annually	Fix Fix	Variabel Variable
REMUNERASI / REMUNERATION							
Gaji Pokok/ Basic Salary	✓	✓		✓		✓	
Tunjangan/ Allowance	✓	✓	✓			✓	
Lembur/ Overtime	✓	✓	✓				✓
BENEFIT LAINNYA / OTHER BENEFITS							
Tunjangan Hari Raya / Religious Holiday	✓	✓			✓	✓	
Fas. Istirahat Tahunan / Annual Leave Facility	✓				✓	✓	
Bonus	✓	✓			✓		✓
Insentif / Incentive	✓	✓			✓		✓
BPJS							
Ketenagakerjaan	✓	✓		✓		✓	
Kesehatan	✓	✓		✓		✓	
Pensiun	✓	✓		✓		✓	

Anggaran Biaya

Berikut rincian biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk kesejahteraan pekerjanya:

Budget Allocation

Detail budget allocated by the Company for employee welfare is as follows:

Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan untuk Kesejahteraan Pekerja (dalam Rupiah Penuh)

Budget Allocation of the Company for Employee Welfare (in Full Rupiah)

Keterangan Description		2021	2020	2019
Gaji Pekerja	Employee Salary	63.085.377.197	59.146.551.189	60.553.049.650
Tunjangan pekerja	Employee Allowance	27.476.864.691	38.564.891.670	17.888.737.151
Program Pensiun Pekerja	Employee Retirement Program	5.397.046.769	6.784.788.901	1.620.788.382
Bonus & Penghargaan	Bonuses and Rewards	0	28.592.037.887	30.312.027.549
Jumlah	Total	95.959.288.657	133.088.269.647	110.374.602.732

Program Pensiun

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja yang telah mendedikasikan diri kepada Perusahaan, PTK memberikan program pensiun. Program pensiun tersebut terdiri dari dua program, yaitu:

1. Program pensiun diberikan kepada para pekerja yang diangkat pada usia minimum 18 (delapan belas) tahun dengan diikutsertakan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kepada para pekerja dengan status Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang telah mencapai usia minimum 46 (empat puluh enam) tahun pada tahun anggaran berjalan dengan masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun dapat diberikan uang panjar Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) sebesar 10% yang akan diperhitungkan pada saat PHK atau mencapai usia MPPK (55 tahun). PAP 10% dapat dibayarkan kepada pekerja jika hasil perhitungan PAP 10% lebih kecil atau sama dengan perhitungan penghargaan Masa Kerja. Tabel kecil terhitung pada saat pengajuan panjar PAP 10% setelah dikurangi hutang-hutangnya (jika ada).
2. Program pelatihan persiapan masa purna karya diberikan sebagai persiapan pengelolaan mental pekerja dalam menghadapi masa-masa pensiun. Selain itu pada program pelatihan tersebut juga diberikan pengarahan mengenai kegiatan wirausaha, sehingga para pekerja pensiun yang ingin melanjutkan berkarya di bidang lain mendapatkan modal dasar yang tepat.

Untuk pekerja yang pensiun, Perusahaan menyiapkan dua program, yaitu Dana Pensiun Pertamina (DPP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri (DPLK Tugu Mandiri). Adapun besaran iuran/persentase Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri

Retirement Program

As manifestation of responsibility to employees who have dedicated themselves to the Company, PTK provides a pension program. The pension program comprising of two programs, as follows:

1. The pension program is given to employees who are appointed at the minimum age of 18 (eighteen) years and are included in the Financial Institution Pension Fund (DPLK) program. To workers with an Unspecified Time Employee (PWTT) status who have reached the minimum age of 46 (fortysix) years old in the current fiscal year with a minimum service period of 15 (fifteen) years, an up-to-date reward for service (PAP) of 10% can be given which will be calculated at the time of layoff or reaching the age of MPPK (55 years). 10% PAP can be paid to employees if the 10% PAP calculation results are less than or equal to the calculation of service tenure. Small table calculated at the time of submission of a 10% PAP deposit after deducting the debts (if any).
2. Retirement preparation training programs are provided as preparation for the mental management of employees in facing retirement. In addition, the training program is also given guidance on entrepreneurial activities there by the retired workers who seek to continue working in other fields will acquire the appropriate capital.

For retired employees, the Company prepares two programs, namely the Pertamina Pension Fund (DPP) and the Tugu Mandiri Financial Institution Pension Fund (DPLK Tugu Mandiri). The amount of contribution/percentage of the Tugu Mandiri Financial Institution Pension Fund is 5%



adalah sebesar 5% kontribusi dari Perusahaan, dan sebesar 5% kontribusi dari pekerja. Besaran manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina dengan iuran per bulan 7,5% dari PHDP (Penghasilan Dana Pensiun) terdiri dari Perusahaan 5,5% dan Pekerja 2%.

Program Penghargaan

PTK memiliki program penghargaan khusus bagi pekerja yang telah menempuh masa kerja selama 10, 15, 20, 25, 30, 35 tahun. Program penghargaan merupakan pengakuan dan ungkapan terima kasih kepada pekerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atas pengabdian dan prestasi yang telah dicapai. Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) dengan beberapa jenjang waktu pengabdian sebagai berikut:

Program Penghargaan Pekerja Tahun 2021

Employee Reward Program 2021

Masa Kerja Years of Service	Jumlah Pekerja Penerima Penghargaan Lencana/ Peniti Number of Workers Recipient of Badges/Safety Pins
20 tahun/ years	13 Pekerja/Employee

Bagi pekerja yang telah berulang tahun dinas lebih dari 20 tahun ke atas di tahun 2021, diberikan peniti emas dengan memperhitungkan peniti emas yang diperoleh sebelumnya.

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pekerja. Oleh karena itu PTK berupaya memperhatikan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi seluruh pekerja. Diantaranya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai. Fasilitas yang diberikan oleh PTK kepada pekerja adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Koperasi Pertamina Trans Kontinental sebagai sarana usaha yang menyediakan tidak hanya kegiatan

of the contribution from the Company, and 5% of the contribution from the employees. The amount of defined benefits managed by the Pertamina Pension Fund with a monthly contribution of 7.5% of PHDP (Pension Fund Income) consists of 5.5% Companies and 2% Workers.

Reward Program

In accordance with PTB PTK 2021-2023 has a special award program for employees who have worked for 20 years. The reward program is an acknowledgment and expression of gratitude to employees in accordance with the criteria set for their dedication and achievements. The company provides the Service Anniversary (UTD) award with several levels of service time as follows:

For employees whose service years are more than 20 years and above in 2021, they will be given gold pins by taking into account the gold pins previously obtained.

Working environment becomes a factor that influence performance of an employees. Therefore PTK seeks to concern on a comfortable and conducive work environment for all employees. Among them by providing adequate supporting facilities. The facilities provided by PTK to employees are as follows:

1. Establishment of Pertamina Trans Kontinental Cooperative as a business facility that provides not only conventional

koperasi konvensional namun juga mencakup penyediaan barang dan jasa umum yang dibutuhkan oleh Perusahaan;

2. Penyediaan ruang menyusui bagi para pekerja perempuan di lantai 2. Penyediaan ruang ini diharapkan untuk membantu para pekerja perempuan dalam menyediakan nutrisi terbaik kepada anaknya;
3. Pembentukan komunitas olahraga, seperti bulu tangkis, voli, futsal, tenis meja, dan basket. Komunitas ini diharapkan dapat menyalurkan hobi dari para pekerja setelah selesainya jam kerja.

cooperative activities but also includes the provision of general goods and services required by the Company;

2. Provision of nursery room for female employees on the second floor. Provision of this space is expected to facilitate female employees in providing the best nutrition for their children;
3. The establishment of sports communities, such as badminton, volleyball, futsal, table tennis and basketball. This community is expected to channel the hobbies of the workers after the end of the working hours.

Survei Kepuasan Pekerja

PTK secara rutin melakukan survei setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kepuasan pekerja terhadap kebijakan yang secara langsung mengatur hak dan kewajibannya didalam perusahaan. Survei Kepuasan Pekerja (SKP) dilakukan dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner secara online melalui *broadcast* Pertamina Trans Kontinental.

Berdasarkan *Internal Customer Satisfaction* (ICS) Survey Fungsi Human Capital yang telah dilakukan, nilai kepuasan pekerja Fungsi Human Capital pada Tahun 2021 adalah sebesar 3.62 (dari target 4.0). Yang menjadi catatan utama kepada Fungsi Human Capital yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan informasi terkait ketentuan dan prosedur tentang program pengembangan pekerja.
2. Layanan Fungsi HC kepada pekerja belum optimal sehingga tingkat kepuasan pekerja terhadap fungsi HC Operation belum optimal.

Employee Satisfaction Survey

PTK conducts an annual survey to measure the employee satisfaction level to the policies that directly governs their rights and obligations within the company. The Employee Satisfaction Survey (SKK) was conducted using the online questionnaire distribution method via the Pertamina Trans Kontinental broadcast.

Based on *Internal Customer Satisfaction* (ICS), the HR & GA Function Survey has been conducted, the employee satisfaction score in HR & GA Function in 2020 achieved 3.5 (from target of 3.8). The main concern to HR & GA Function is as follows:

1. Clarity of information related to provisions and procedures about worker development programs.
2. HRO & GA function services to workers was less optimal so that the level of worker satisfaction the HRO & GA function was less optimal.



Kedua catatan utama tersebut secara bertahap ditindaklanjuti untuk perbaikan sebagai berikut:

1. Fungsi HC Strategic merencanakan skema pengembangan jenjang karir pekerja dalam bentuk kebijakan.
2. Fungsi HC Operation akan memperbaiki kualitas layanan ditahun 2021.

Kebijakan Pengelolaan SDM

Langkah-langkah inovatif yang diambil dalam upaya penguatan SDM di tahun 2021, tetap sejalan dengan kebijakan Perusahaan di bidang pengelolaan SDM. Kami memandang bahwa SDM merupakan salah satu elemen terpenting yang akan memutar roda perusahaan terus berjalan karena manusialah penggerak utama suatu organisasi.

Keberhasilan atau kesuksesan Perusahaan dalam menjalankan bisnis sangat erat kaitannya dengan peran SDM yang secara terus-menerus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mendorong serta meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan yang senantiasa melakukan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang memadai dan kompetensi organisasi yang sejalan dengan kegiatan bisnis akan memungkinkan pertumbuhan pada bisnis Perusahaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Guna memenuhi tuntutan tersebut, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) secara konsisten dan kontinu dari tahun ke tahun menyiapkan kader-kader yang berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan. Kami bersyukur bahwa berbagai upaya yang kami lakukan di tahun 2021 telah ikut memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menciptakan kinerja positif serta berbagai prestasi yang telah diraih.

The two main concerns have been gradually followed up for improvement as follows:

1. The strategic HR function plans a schema development of career paths for employees form of policy.
2. HRO & GA function will improve quality service in 2021.

HR Management Policy

Innovative steps taken in an effort to strengthen HR in 2021, remain in line with the Company's policies in the field of HR management. We view that HR is one of the most important elements that will keep the company running because humans are the main driver of an organization.

The success or achievement of the Company in running its business is closely related to the role of human resources, whose capacity is continuously enhanced in order to be able to encourage and improve company performance. Therefore, the Company, which continues to improve the quality and competence of adequate human resources and organizational competence that is in line with business activities, will enable growth in the Company's business in a sustainable and sustainable manner.

In order to meet these demands, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) has consistently and continuously prepared qualified cadres from year to year to fulfill needs. We are grateful that the various efforts we made in 2021 have contributed very significantly in creating positive performance and various achievements that have been achieved.

Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam melakukan pengelolaan SDM, Fungsi Human Capital memiliki visi menjadi partner strategis bisnis dalam pengelolaan nilai sumber daya manusia dalam penyediaan jasa maritim. Hal ini dituangkan melalui langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengembangkan program dan kebijakan SDM selaras dengan fokus bisnis perusahaan.
2. Membangun fundamental organisasi yang kokoh dan mengembangkan talenta berkompetensi di bidang jasa maritim.
3. Menyediakan sistem layanan dan informasi SDM yang handal untuk mendukung visi bisnis yang berkelanjutan.
4. Menjadi katalis dan promotor dalam menciptakan budaya kerja yang produktif, sehat, aman dan kolaboratif.

Strategi ini ditopang oleh 3 pilar pengelolaan SDM yaitu :

1. **Human Capital Operational Excellence**

- Memberikan layanan operasional Fungsi SDM yang optimal dan cepat tanggap kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan.
- Mempercepat digitalisasi sistem Fungsi SDM untuk mendukung pengambilan keputusan akurat dan cepat.
- Memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas dalam mengimplementasikan strategi bisnis perusahaan.

2. **Sustainable Organization**

- Membangun struktur organisasi komprehensif dan lincah sesuai dengan visi bisnis jangka panjang perusahaan.
- Mengelola standar remunerasi dan benefit yang kompetitif.

Human Resources Management Strategy

In managing human resources, the Human Capital Function has vision to become a strategic business partner in managing the value of human resources in the provision of maritime services. This is stated through the following strategic steps:

1. Develop HR programs and policies in line with the company's business focus.
2. Building strong organizational fundamentals and developing competent talents in the maritime services sector.
3. Provide a reliable HR information and service system to support a sustainable business vision.
4. Become a catalyst and promoter in creating a productive, healthy, safe and collaborative work culture.

This strategy is supported by 3 pillars of HR management, namely:

1. **Human Capital Operational Excellence**

- Provide optimal and responsive HR Function operational services to all employees and stakeholders.
- Accelerate the digitization of the HR Function system to support accurate and fast decision making.
- Ensure the availability of human resources who have the capability to implement the company's business strategy.

2. **Sustainable Organization**

- Build a comprehensive and agile organizational structure in accordance with the company's long-term business vision.
- Manage competitive remuneration



- Mengembangkan talenta melalui program pemenuhan kompetensi pekerja.
- Melakukan pemetaan dan perencanaan karier pekerja untuk ketahanan organisasi dengan perspektif bisnis global.

3. *Productive Culture*

- Mengembangkan budaya kolaboratif antar fungsi untuk integrasi produktivitas perusahaan.
- Memastikan kebaruan sistem tata kerja sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan.
- Menjalin hubungan baik dan memerhatikan aspirasi pekerja dalam upaya pencapaian produktivitas.
- Mengelola budaya kerja yang aman, sehat dan anti diskriminasi untuk kenyamanan dalam bekerja.

Strategi dan pilar pengelolaan SDM ini merupakan bagian dari akselerasi pengembangan SDM kelas dunia yang profesional dan kompeten sesuai tata nilai AKHLAK. Hal ini selaras dengan kultur produktif melalui pengembangan budaya belajar dan sistem tata kerja dengan memperhatikan penerapan nilai HSSE. Digitalisasi dan optimalisasi proses bisnis pengelolaan SDM yang terintegrasi secara bertahap terus ditingkatkan sebagai komitmen terus menerus untuk perwujudan visi bisnis PTK kedepan.

Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia

Manajemen SDM di Perusahaan kami dibangun mulai dari penataan struktur organisasi yang ramping dan kokoh. Berikut merupakan Struktur Organisasi Divisi Sumber Daya Manusia PT Pertamina Trans Kontinental:

and benefit standards.

- Developing talents through employee competency fulfillment programs.
- Mapping and planning employee careers for organizational resilience with a global business perspective.

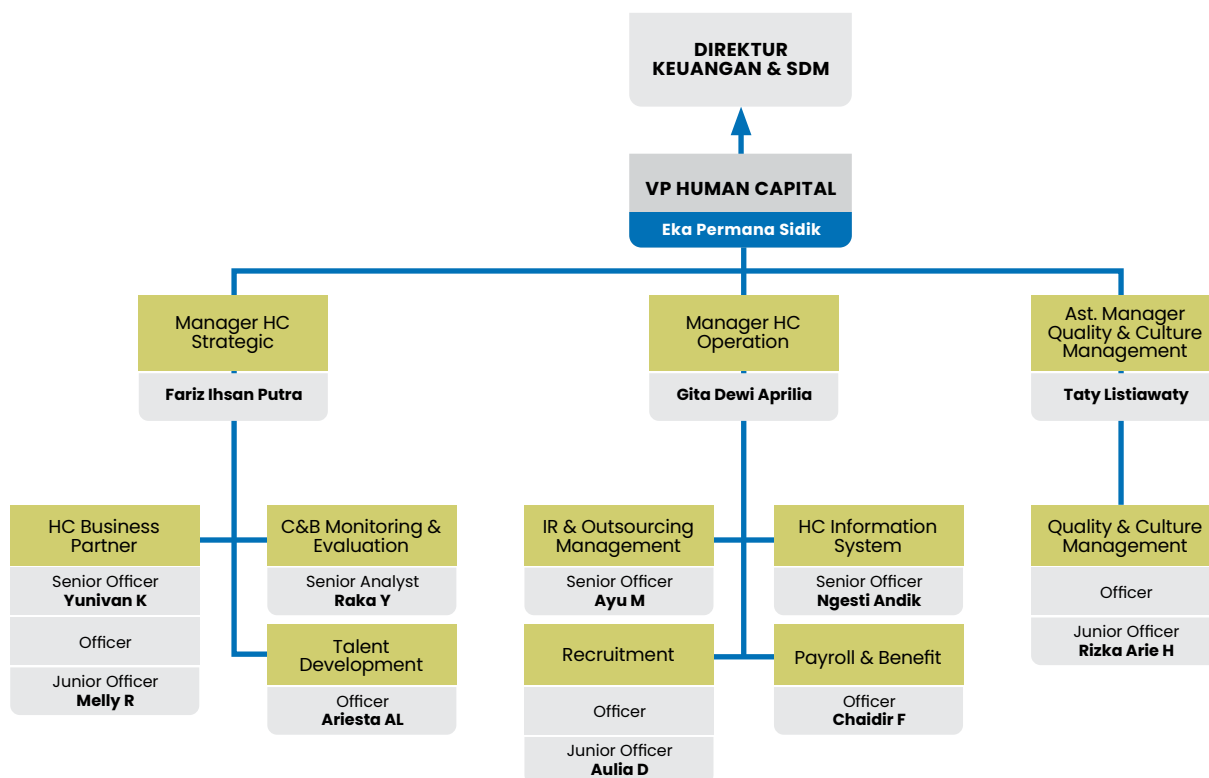
3. *Productive Culture*

- Develop a collaborative culture between functions for the integration of company productivity.
- Ensuring the new work system is in accordance with the company's business development.
- Maintain good relations and pay attention to the aspirations of workers in an effort to achieve productivity.
- Manage a work culture that is safe, healthy and anti-discrimination for comfort in work.

The strategy and pillars of HR management are part of accelerating the development of world-class human resources who are professional and competent in accordance with the AKHLAK values. This is in line with a productive culture through the development of a learning culture and work system by taking into account the application of HSSE values. The digitization and optimization of integrated HR management business processes are gradually being improved as a continuous commitment to realizing the future PTK business vision.

Human Resources Organizational Structure

HR management in our company is built from structuring a lean and strong organizational structure. Here we present the Organizational Structure of the Human Resources Division in PT Pertamina Trans Kontinental::



Fungsi dan Ruang Lingkup Divisi Human Capital

Divisi *Human Capital* (HC) merupakan pelaku utama dalam kegiatan pengelolaan SDM yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, yang dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan fungsi-fungsi yang ada. Pada prinsipnya, penetapan kebijakan pengelolaan SDM merupakan tanggung jawab Divisi HR. Namun mengingat operasional Perusahaan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, dinilai perlu untuk mendelegasikan tugas dan tanggung jawab tersebut secara berjenjang berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku.

Functions and Scope Human Capital Division

The Human Capital (HC) Division is the main actor in HR management activities who are responsible for carrying out their duties optimally. The goal is to create quality human resources capable of providing added value to the Company, which in its implementation always coordinates with existing functions. In principle, the determination of HR management policies is the responsibility of the Human Capital Function. With respect to the Company's operations which are spread across almost all parts of Indonesia, it is deemed necessary to delegate these duties and responsibilities in stages based on the prevailing organizational provisions.



Berikut di bawah ini merupakan Fungsi dan ruang lingkup tugas Divisi HC PT Pertamina Trans Kontinental:

Analisis Organisasi

Analisis/kajian organisasi dilakukan berdasarkan strategi dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Lingkup kajian meliputi wewenang dalam penyusunan struktur organisasi, uraian jabatan, jumlah formasi, kompetensi dan golongan jabatan. Perusahaan bertanggung jawab dalam menetapkan pedoman dan sistem penyusunan organisasi dan kelengkapannya, melakukan kajian organisasi, formasi maksimal, dan golongan jabatan serta menetapkan struktur organisasi dan kelengkapannya untuk seluruh level.

Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Tenaga Kerja

Lingkup perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga kerja adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga kerja di setiap tingkat yang meliputi identifikasi kebutuhan dan inventarisasi ketersediaan tenaga kerja, identifikasi permanen dan non-permanen (*seasonal*), identifikasi kegiatan *core* dan *non-core*, status hubungan kerja, penyelenggaraan rekrutmen, serta seleksi dan pengisian jabatan.

Pengelolaan Kinerja Pekerja

Lingkup pengelolaan kinerja pekerja adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab penetapan pedoman dan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang digunakan. Kantor Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan pedoman SMK, sementara Region bertanggung jawab dalam menjabarkan SMK agar dapat diimplementasikan di lingkungannya. Anak

The following is the scope of the PTK Human Capital Function:

Organizational Analysis

Organizational analysis/study is carried out based on the organization's strategy and objectives as outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP). The scope of the study includes the authority in the preparation of the organization structure, job descriptions, number of formations, competencies and class positions. The company is responsible to formulate the guidelines and organizational structure system and its completeness, conducting organizational studies, optimum formation, and class positions as well as determining the organizational structure and completeness for all levels.

Manpower Planning and Procurement

The scope of planning for manpower requirements and procurement is to regulate authority and responsibility for planning the needs and procurement of manpower at each level which includes identification of needs and inventory of labor availability, identification of permanent and nonpermanent (*seasonal*), identification of core activities and non-core, employment status, recruitment, selection and filling of positions.

Employee Performance Management

Scope of employee performance management is to regulate authority and responsibility for setting guidelines and the Performance Management System (SMK) used. The Head Office has the authority and responsibility in setting the SMK guidelines, while the Branch Office is responsible for describing SMK to be implemented in its environment. Subsidiaries

Perusahaan bersama-sama melaksanakan pedoman SMK sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pengembangan Karir

Lingkup pengembangan karier pekerja yang diatur dalam pedoman ini meliputi wewenang dan tanggung jawab dalam penetapan pedoman dan sistem pengembangan karier, pelaksanaan promosi, mutasi, rotasi dan suksesi serta penugasan pekerja dalam rangka perbantuan dan *assessment center*.

Pembelajaran

Lingkup pembelajaran adalah mengatur kewenangan dan tanggung jawab penetapan pedoman, *Training Need Analysis* (TNA), pelaksanaan program pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta internalisasi dan pengembangan budaya Perusahaan.

Pengupahan dan Benefit

Lingkup pengupahan dan benefit adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab dalam penetapan pedoman, kebijakan serta program pengupahan dan benefit, pelaksanaan pemberian upah, tunjangan dan kompensasi, penghargaan, fasilitas, pemberian benefit kesehatan, dan jaminan hari tua.

Pengelolaan Hubungan Industrial

Lingkup pengelolaan hubungan industrial adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan hubungan industrial, hubungan dengan instansi terkait bidang ketenagakerjaan, hubungan dengan Serikat Pekerja, penyelesaian masalah hubungan industrial.

then altogether implement the SMK guidelines according to the stipulated provisions.

Career Development

Scope of employee career development as stipulated in this guideline includes authority and responsibility in establishing career development guidelines and systems, implementing promotions, transfers, rotations and successions as well as the assignment of workers in the context of assistance and assessment centers.

Learning

The scope of learning is to regulate authority and responsibility for setting guidelines, *Training Need Analysis* (TNA), implementing learning programs, evaluating learning, and internalizing and developing corporate culture.

Wages and Benefits

Scope of wages and benefits is to regulate authority and responsibility in determining wage and benefit guidelines, policies and programs, the implementation of wages, allowances and compensation, awards, facilities, provision of health benefits, and old age security.

Industrial Relations Management

Scope of industrial relations management is to regulate authority and responsibility in establishing industrial relations policies, relations with related agencies in manpower aspect, relations with trade unions, and to solve industrial relations problems.



Profil Kepala Unit SDM

Profil kepala Unit SDM telah disajikan pada Profil Pejabat, bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

Rekrutmen Pekerja

Di Tahun 2021 berdasarkan Faksimile Resmi dari PT Pertamina (Persero) No. R-098/C00000/2020-S8 tentang Rekrutmen Pertamina Group Tahun 2020, dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Perusahaan yang terdampak oleh *Triple Shock* (penurunan harga minyak dunia, volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah, dan penurunan *demand*) serta efek dari pandemi COVID-19 semua rencana rekrutmen pada tahun 2020 ditunda/*freeze* sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, kecuali untuk rekrutmen kebutuhan proyek strategis nasional yang tidak dapat ditunda karena sudah menjadi bagian dari tahapan / *timeline* proyek. Sehubungan belum terdapatnya ketentuan baru terkait hal tersebut, maka hingga tahun 2021 rekrutmen masih ditiadakan.

Hal ini juga diberlakukan kepada Anak Perusahaan dan *Joint Venture* PT Pertamina Trans Kontinental, dimana ketentuan tersebut tertuang pada Surat VP HR & GA PTK No. 060/E2000/2021-S0 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Rekrutmen Pekerja di Lingkungan Anak Perusahaan/*Joint Venture* PT Pertamina Trans Kontinental.

Roadmap dan Rencana Ke Depan

Peta jalan pengembangan SDM mengacu kepada visi PTK 2026 menjadi perusahaan global yang kompetitif pada lini bisnisnya. Secara bertahap, berikut fokus Fungsi *Human Capital* secara bertahap :

Profile of HR Unit Head

Profile of the HR Unit has head been presented in the Executive Officers Profile, Company Profile chapter, this Annual Report.

Workers Recruitment

In 2021 based on the Official Fax from PT Pertamina (Persero) No. R-098/C00000/2020-S8 regarding the 2020 Pertamina Group Recruitment, taking into account the Company's financial performance that was affected by the triple shock (decreased world oil prices, volatility in the Rupiah exchange rate, and decreased demand) as well as the effects of the COVID-19 pandemic all recruitment plans in 2020 are postponed/*freeze* until further notice, except for the recruitment of national strategic project needs which cannot be postponed because they are already part of the project stage/*timeline*. In connection with the absence of new provisions related to this matter, until 2021 recruitment will still be abolished.

This also applies to the Subsidiary and Joint Venture PT Pertamina Trans Kontinental, where the provisions are stated in the VP HR & GA PTK Letter No. 060/E2000/2021-S0 dated March 8, 2021 regarding Postponement of Recruitment of Workers in the Subsidiary/*Joint Venture* PT Pertamina Trans Kontinental.

CAR Development Roadmap

The HR development roadmap refers to PTK's 2026 vision to become a global company that is competitive in its business lines. Gradually, the following is the focus of the Human Capital Function in stages

- **2022 : Strengthening Fundamentals**

Fokus Fungsi *Human Capital* dalam melakukan penetapan organisasi sesuai dengan klasterisasi bisnis PTK Group beserta konsekuensi variabel kelengkapannya (matriks RASCI dan uraian jabatan) akan menjadi perhatian pada tahun 2022. Penyelarasan kebijakan remunerasi untuk memenuhi sisi *compliance* standar Pertamina dan penguatan matriks kompetensi akan dilanjutkan agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan bisnis.

- **2023: Productivity & Culture Enhancement**

Peningkatan produktivitas melalui pendekatan kultur yang tepat akan didorong oleh pengembangan penerapan sistem pengelolaan SDM yang lebih baik. *Tool Human Capital Analytics* dan *Career Mapping* akan menjadi sentral perbaikan berkesinambungan yang sehubungan dengan *performance* organisasi dan pengelolaan talenta. Hal ini ditopang juga oleh kampanye intensif terkait kultur kolaboratif antar fungsi untuk mempertinggi resultan pencapaian perusahaan.

- **2024: Talent Readiness & Strategic Partner**

Untuk mempersiapkan pekerja PTK dalam menghadapi perluasan bisnis perusahaan, akan dilakukan pengukuran kompetensi secara bertahap untuk dapat memantau tingkat kompetensi pekerja. Hasil *assessment* akan menjadi material penyesuaian matriks kompetensi. Melalui usaha penyempurnaan layanan berupa penguatan sistem operasional SDM, pemberdayaan *human capital tools*, serta menjadi *culture champion*, diharapkan manajemen Fungsi Human Capital dapat

- **2022 : Strengthening Fundamentals**

The focus of the Human Capital Function in determining the organization in accordance with the PTK Group's business clustering along with the consequences of its variable completeness (RASCI matrix and job descriptions) will be a concern in 2022. Alignment of remuneration policies to meet Pertamina's standard compliance side and strengthening of the competency matrix will continue to be in line with business needs and challenges.

- **2023: Productivity & Culture Enhancement**

Increased productivity through an appropriate cultural approach will be driven by the development of a better HR management system. Human Capital Analytics and Career Mapping tools will be central to continuous improvement in relation to organizational performance and talent management. This is also supported by an intensive campaign related to a collaborative culture between functions to enhance the resultant achievements of the company.

- **2024: Talent Readiness & Strategic Partner**

To prepare PTK workers to face the company's business expansion, competency measurements will be carried out in stages to monitor the competency level of workers. The results of the assessment will be used as a competency matrix adjustment material. Through efforts to improve services in the form of strengthening the HR operational system, empowering human capital tools, and becoming a culture champion, it is hoped that the management of the



proaktif dalam memberikan *insight* dan solusi atas tantangan yang dihadapi perusahaan.

- **2025: Center of Excellence**

Melalui perkembangan inkremental pada tahun-tahun sebelumnya praktek SDM PTK diharapkan menjadi *center of excellence* sebagai pusat keunggulan pengelolaan SDM di SH IML maupun di Pertamina Group. Selaras dengan perkembangan dan rencana bisnis PTK, evaluasi struktur organisasi perusahaan akan kembali dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

- **2026: Ready for Global Challenges**

Kelincahan organisasi harus dapat mengimbangi laju bisnis perusahaan yang sedang dalam masa perluasan jangkauan bisnis. Fungsi Human Capital berencana akan melakukan *improvement* organisasi untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait hal ini. Sebagai perusahaan global, struktur remunerasi & benefit akan tetap dijaga kompetitif dan menjadi salah satu strategi penting dalam *employee retention*. Pembaharuan fundamental matriks kompetensi dan *career mapping* untuk ketahanan organisasi dalam tantangan global akan menjadi perhatian utama dalam menyambut tantangan bisnis global.

Human Capital Function can be proactive in providing insight and solutions to the challenges faced by the company.

- **2025: Center of Excellence**

Through incremental developments in previous years, the HR practice of PTK is expected to become a center of excellence as a center of excellence in HR management in SH IML and in the Pertamina Group. In line with the development and business plan of PTK, an evaluation of the company's organizational structure will be carried out again to improve the effectiveness and efficiency of the organization.

- **2026: Ready for Global Challenges**

Organizational agility must be able to keep up with the pace of the company's business which is in a period of expanding its business reach. The Human Capital function plans to carry out organizational improvements to overcome problems that arise in this regard. As a global company, the remuneration & benefit structure will remain competitive and become one of the important strategies in employee retention. The fundamental renewal of the competency matrix and career mapping for organizational resilience in global challenges will be a major concern in welcoming global business challenges.

Teknologi Informasi

Information Technology

Kinerja TI Tahun 2021

Kinerja TI PTK dapat dilihat melalui berbagai pencapaian program strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, kinerja pengembangan TI PTK tahun 2021 sesuai dengan program strategis Perusahaan. Berikut ini adalah daftar aplikasi yang dikembangkan di tahun 2021:

IT Performance in 2021

IT performance of PTK can be seen through various strategic program achievements that have been set. In general, the PTK IT development performance in 2021 is in accordance with the Company's strategic program. The list of applications developed in 2021 is as follows:

Daftar Aplikasi yang Dikembangkan di Tahun 2021

List of Applications Developed in 2021

Nama Aplikasi Application Name	Fungsi Function	Deskripsi Description	Status Status	Dasar Pembuatan Aplikasi Basic Application Development
ICONS (Integrated Contract System) Versi 2	Legal	Aplikasi ICONS merupakan suatu aplikasi yang berfungsi untuk <i>monitoring</i> proses <i>review</i> kontrak secara <i>online</i> , proses <i>approval</i> , penyimpanan data-data kontrak (<i>archiving</i>), dan <i>reminder</i> kontrak kerja yang akan habis masa berlakunya. The ICONS application is application that functions to monitor online contract review processes, approval processes, storage of contract data (<i>archiving</i>), and reminders of work contracts that will expire.	<i>Running</i>	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi legal 124/ FI000/2020-SO Application letter requesting legal function application 124/ FI000/2020-SO
BAGUS (Bank Guarantee System)	Treasury	Merupakan aplikasi dari Fungsi Treasury yang bertujuan untuk: 1. Memudahkan tim Treasury & Financing untuk melakukan kegiatan <i>monitoring</i> dan <i>tracking</i> terhadap seluruh kegiatan dan <i>deadline</i> bank garansi untuk pembangunan kapal tertentu. Dapat dilakukan secara online dan real time. 2. Sebagai <i>Early Warning</i> atas jangka waktu bank garansi pembangunan kapal sehingga dapat meminimalisir potensi risiko kerugian karena tidak ter - cover jaminan atas progress pembangunan kapal akibat garansi <i>Expired</i>	<i>Running</i>	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. 148/ E1300/2021-S0 Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. 148/ E1300/2021-S0



Daftar Aplikasi yang Dikembangkan di Tahun 2021

List of Applications Developed in 2021

Nama Aplikasi Application Name	Fungsi Function	Deskripsi Description	Status Status	Dasar Pembuatan Aplikasi Basic Application Development
		Application of the Treasury Function which aims to: 1. Facilitate the Treasury & Financing team to carry out monitoring and tracking activities for all activities and bank guarantee deadlines for the construction of certain ships. Can be done online and in real time. 2. As an Early Warning for the period of bank guarantee for ship construction so as to minimize the potential risk of loss because there is no guarantee for the progress of ship construction due to the Expired guarantee.		
E-Learning PTK	HCS	Aplikasi e-learning memberikan kemudahan pada fungsi HR dan pekerja antara lain: a. Mengelola file terkait <i>Training</i> dan <i>Transko Academy</i> (Shasy, POLS, dan atau War Room) b. Eliminasi kebutuhan ruang penyimpanan <i>hardcopy</i>. c. Mempermudah proses absensi dan pemberian <i>feedback</i> dari peserta. d. Membuat sistem yang dapat mencetak sertifikat secara otomatis.	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. 155//E2100/2021-S0 Application letter requesting related function application. 155//E2100/2021-S0

Daftar Aplikasi yang Dikembangkan di Tahun 2021

List of Applications Developed in 2021

Nama Aplikasi Application Name	Fungsi Function	Deskripsi Description	Status Status	Dasar Pembuatan Aplikasi Basic Application Development
		The e-learning application provides convenience for HR functions and workers, including: - Manage files related to Training and Transko Academy (Shasy, POLS, and/or War Room) - Eliminate the need for hardcopy storage space. - Facilitate the attendance process and provide feedback from participants. - Create a system that can print certificates automatically.		
Ecommerce Ship Chandler	Marine Agency	Aplikasi Shipchandler adalah aplikasi yang bertujuan untuk: - Memfasilitasi PIC Kapal milik PIS dalam membeli Bahan Jatah Makan dan membuat pengajuan penambahan budget kapal - Memfasilitasi Fungsi <i>Crewing</i> milik PIS dalam mengelola daftar dan budget bulanan Kapal milik PIS - Memfasilitasi supplier Bahan Jatah Makan dalam mendaftarkan perusahaan dan produknya sebagai mitra penyedia Bahan Jatah Makan kapal (Vendor) milik PIS - Memfasilitasi Vendor dalam mengelola status order yang diterima - Memfasilitasi pekerja PT Pertamina Trans Kontinental dan PT Peteka Karya Gapura dalam membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan The Shipchandler app is an app that aims to: - Facilitate the PIC of PIS's Vessels in purchasing Food Ration Materials and make proposals for additional ship budgets - Facilitate PIS's Crewing Function in managing the list and monthly budget of PIS Vessels - Facilitate suppliers of Food Ration Materials in registering companies and their products as partners in providing Food Ration Materials for PIS ships (Vendors) - Facilitate Vendors in managing the status of orders received - Facilitate the workers of PT Pertamina Trans Kontinental and PT Peteka Karya Gapura in making Minutes of the Handover of Work	<i>Not Running</i>	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. Application letter requesting related function application.



Daftar Aplikasi yang Dikembangkan di Tahun 2021

List of Applications Developed in 2021

Nama Aplikasi Application Name	Fungsi Function	Deskripsi Description	Status Status	Dasar Pembuatan Aplikasi Basic Application Development
KaryaOne	HCO	Aplikasi Karyaone adalah aplikasi yang bertujuan untuk pengelolaan data dan informasi dapat menyeluruh, terintegrasi, dan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat terhadap tenaga kerja jasa penunjang (TKJP) di lingkungan PTK The Karyaone application is an application that aims to manage data and information so that it can be comprehensive, integrated, and produce fast and accurate information for supporting service workers (TKJP) in the PTK environment.	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. 235/PTK3120/2021-S0 Application letter requesting related function application. 235/PTK3120/2021-S0
Procurement Information System (PROMISE)	Procurement	Aplikasi Promise adalah aplikasi yang bertujuan untuk: 1. Mempermudah tim Procurement untuk melakukan kegiatan <i>monitoring</i> dan <i>tracking</i> terhadap seluruh vendor/partner dalam melakukan kegiatan pengadaan barang /jasa. Dapat dilakukan secara online dan <i>real time</i> 2. Mempermudah seluruh pekerja yang terlibat dalam proses pengadaan dalam melakukan <i>monitoring</i> terhadap seluruh proses pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya 3. Mempermudah tim Procurement dalam melakukan penilaian terhadap vendor/partner yang sudah menjadi rekanan perusahaan karena aplikasi ini mempunyai fitur yang sangat menuntut vendor/partner untuk terus melakukan update serta <i>monitoring</i> terhadap tanggung jawabnya dalam menyediakan dan mengirimkan barang/jasa Promise application is the application that aims to: 1. Facilitate the Procurement team to carry out monitoring and tracking activities for all vendors/partners in carrying out goods/services procurement activities. Can be done online and in real time	Running	Surat permohonan permintaan aplikasi fungsi terkait. 278/E2300/2021-S0 Application letter requesting related function application. 278/E2300/2021-S0

Daftar Aplikasi yang Dikembangkan di Tahun 2021

List of Applications Developed in 2021

Nama Aplikasi Application Name	Fungsi Function	Deskripsi Description	Status Status	Dasar Pembuatan Aplikasi Basic Application Development
		2. Facilitate all workers involved in the procurement process to monitor the entire procurement process for which they are responsible 3. Facilitate the Procurement team in evaluating vendors/partners who have become company partners because this application has features that are very demanding of vendors/partners to continue to update and monitor their responsibilities in providing and delivering goods/services		

Pada tahun 2021, fokus di bidang TI PTK adalah pada proses digitalisasi secara menyeluruh di hampir semua fungsi atau unit bisnis khususnya adalah pada fungsi HSSE atau SMR. Berikut ini adalah beberapa kegiatan dan pencapaian fungsi IT pada fungsi HSSE/SMR PT PTK tahun 2021.

In 2021, the focus in PTK IT field will be on the overall digitalization process in almost all functions or business units, especially in the HSSE or SMR function. The following are some of the activities and achievements of the IT function in the PT PTK HSSE/SMR function in 2021

Tata Kelola TI

Kami memiliki tata kelola IT pada 5 (lima) bidang terkait, yaitu *IT Policy*, *IT Architecture*, *IT Infrastructure*, *IT Business Application Needs* dan *IT Investment & Prioritisasi*. Adapun kelima bidang tersebut dikelola oleh pihak-pihak yang melakukan perancangan, pengesahan, pengembangan, *monitoring*, *enforcement*.

Pada tahun 2021, prioritas *Strategic Alignment* merupakan tugas Fungsi IT, setelah pada tahun sebelumnya menitikberatkan pada prioritas *Agile Business Process*. Target Akhir dari *tag line Strategic Alignment* adalah "*Pursuing the Corporate Competitive Advantage through Rapid Business Decision Making*".

IT Governance

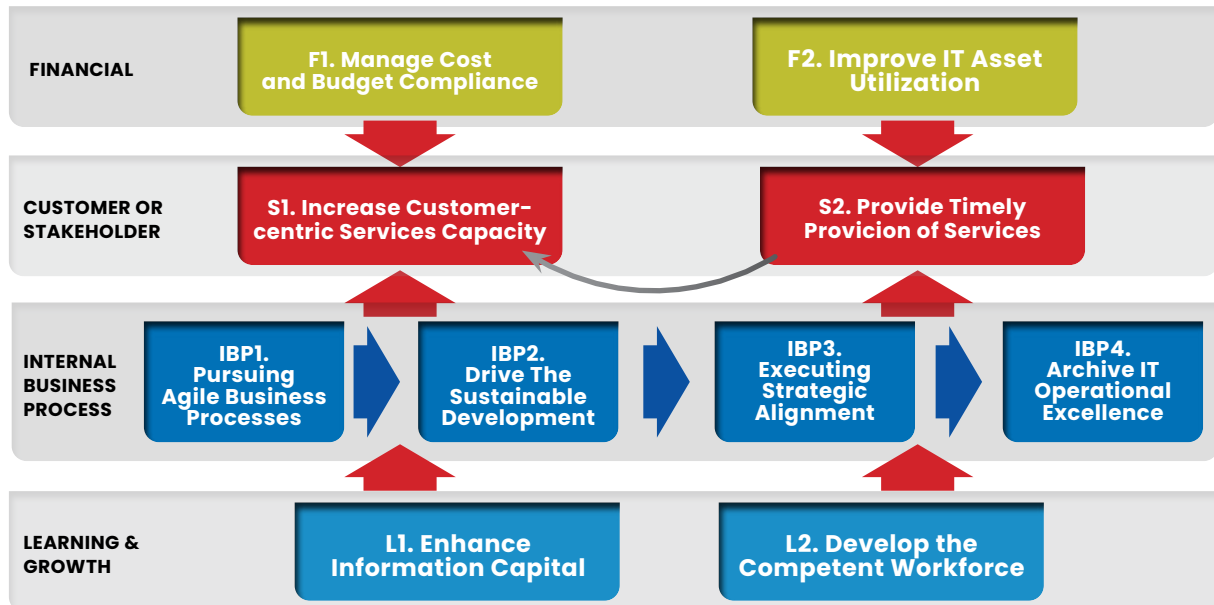
We have designed IT governance in 5 (five) related fields, such as the *IT Policy*, *IT Architecture*, *IT Infrastructure*, *IT Business Application Needs* and *IT Investment & Priority*. These five fields are managed by parties who carry out the design, endorsement, development, monitoring and enforcement.

In 2021, the priority of *Strategic Alignment* is the task of the IT Function, after focusing on the *Agile Business Process* priority in the previous year. The Final Target of the *Strategic Alignment tag line* is "*Pursuing the Corporate Competitive Advantage through Rapid Business Decision Making*".

Gambaran IT *Strategy Maps* 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

An overview of the 2021 IT *Strategy Maps* can be seen in the following image:

IT STRATEGY MAP PTK 2021



Pada gambar tersebut, untuk perspektif Financial, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu:

- F.1. *Manage Cost and Budget Compliance*
- F.2. *Improve IT Asset Utilization*

Pada perspektif *Customer or Stakeholders*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu:

- S.1. *Increase Customer-Centric Services Capacity*
- S.2. *Provide Timely Provision of Services*

Pada perspektif *Internal Business Process*, terdapat 4 (empat) *Strategic Objectives*, diantaranya adalah:

- IBP.1. *Strive for Reliable Infrastructure*
- IBP.1. *Developing Resource Consolidation*
- IBP.1. *Preparing Data Classification*
- IBP.1. *Pursuing Agile Business Processes*
- IBP.2. *Drive the Sustainable Development.*
- IBP.3. *Executing Strategic Alignment.*
- IBP.4. *Achieve IT Operational Excellence*

In this figure, based on Financial perspective, there are 2 (two) *Strategic Objectives*, as follows:

- F.1. *Manage Cost and Budget Compliance*
- F.2. *Improve IT Asset Utilization*

From the perspective of the Customer or Stakeholders, there are 2 (two) *Strategic Objectives*, as follows:

- S.1. *Increase Customer-Centric Services Capacity*
- S.2. *Provide Timely Provision of Services*

From the perspective of the Internal Business Process, there are 3 (three) *Strategic Objectives*, including:

- IBP.1. *Strive for Reliable Infrastructure*
- IBP.1. *Developing Resource Consolidation*
- IBP.1. *Preparing Data Classification*
- IBP.1. *Pursuing Agile Business Processes*
- IBP.2. *Drive the Sustainable Development.*
- IBP.3. *Executing Strategic Alignment.*
- IBP.4. *Achieve IT Operational Excellence*

Pada perspektif *Learning and Growth*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, diantaranya adalah:

- L.1. Enhance Informational Capital
- L.2. Develop the Competence Workforce

Keempat perspektif organisasi tersebut untuk selanjutnya didefinisikan dalam rangka membentuk suatu *linkage* antara *Strategic Objectives* pada *IT Strategy Maps* PTK 2021. Sebagai contoh, kondisi pada tahun sebelumnya memberikan porsi kepada Fungsi IT sebagai *knowledge workforce unit* mengarah pada *strategic workforce unit*, untuk mendukung kegiatan bisnis PTK, sehingga *Financial Perspective* diletakkan pada posisi teratas dari susunan 4 *Organizational Perspectives*. Beberapa faktor Financial seperti *Cost, Budget and Assets* merupakan obyek yang perlu dikelola dengan baik demi keberlangsungan layanan IT bagi organisasi atau perusahaan.

Pengelolaan faktor-faktor Financial yang baik, memberikan jaminan bagi Fungsi IT PTK untuk memberikan layanan terbaiknya bagi *Customer or Stakeholders*. Fungsi IT PTK berupaya untuk memberikan layanan kepada para pengguna jasanya, yaitu karyawan pada Kantor Pusat, Kantor Region dan Anak Perusahaan, dengan sebaik-baiknya. Fungsi IT PTK memiliki pandangan untuk dapat memberikan kapasitas layanan yang terukur, terkontrol dan terencana dengan orientasi kepada *Customer or Stakeholders*.

Dalam rangka memberikan layanan kepada *Customer or Stakeholders*, Fungsi IT melaksanakan proses bisnis internal (*Internal Business Process*), yang tertuang dalam 6 (enam) area kerja Fungsi IT, yaitu Infrastruktur TI, Penyelarasan Strategi TI, Manajemen Proses Bisnis, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Aplikasi dan Manajemen Layanan TI. Untuk memastikan proses bisnis internal dapat berjalan dengan baik, maka Fungsi

From the perspective of *Learning and Growth*, there are 2 (two) *Strategic Objectives*, including:

- L.1. Enhance Informational Capital
- L.2. Develop the Competence Workforce

The four organizational perspectives will be further defined in order to form a linkage between the *Strategic Objectives* on the *IT Strategy Maps* PTK 2021. For example, the conditions in the previous year gave a portion to the IT Function as a *knowledge workforce unit* leading to a *strategic workforce unit*, to support PTK business activities, so that *Financial Perspective* is placed at the top of the list of 4 *Organizational Perspectives*. Several financial factors such as *Cost, Budget and Assets* are objects that need to be managed properly for the continuity of IT services for the organization or company.

Good management of financial factors provides assurance for the IT function of PTK to provide the best service for customers or stakeholders. The IT function of PTK strives to provide services to its service users, namely employees at the Head Office, Branch Offices and Subsidiaries, as well as possible. The IT function of PTK has a view to be able to provide measurable, controlled and planned service capacity with an orientation to the *Customer or Stakeholders*.

In order to provide services to *Customers or Stakeholders*, the IT Function carries out internal business processes, which are contained in 6 (six) work areas of the IT Function, namely IT Infrastructure, IT Strategy Alignment, Business Process Management, Knowledge Management, Application Management and IT Service Management. To ensure that internal business processes can run well, the IT Function requires literacy skills to be adaptive to the times and



IT memerlukan kemampuan literasi untuk adaptif terhadap perkembangan zaman dan perubahan bisnis terkait bidang usaha PTK. Fungsi IT memerlukan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang kerjanya dan mampu melakukan eksploitasi informasi yang dimiliki sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi atau perusahaan serta dalam rangka mencapai pertumbuhan (*Growth*) dan pembelajaran (*Learning*) yang positif.

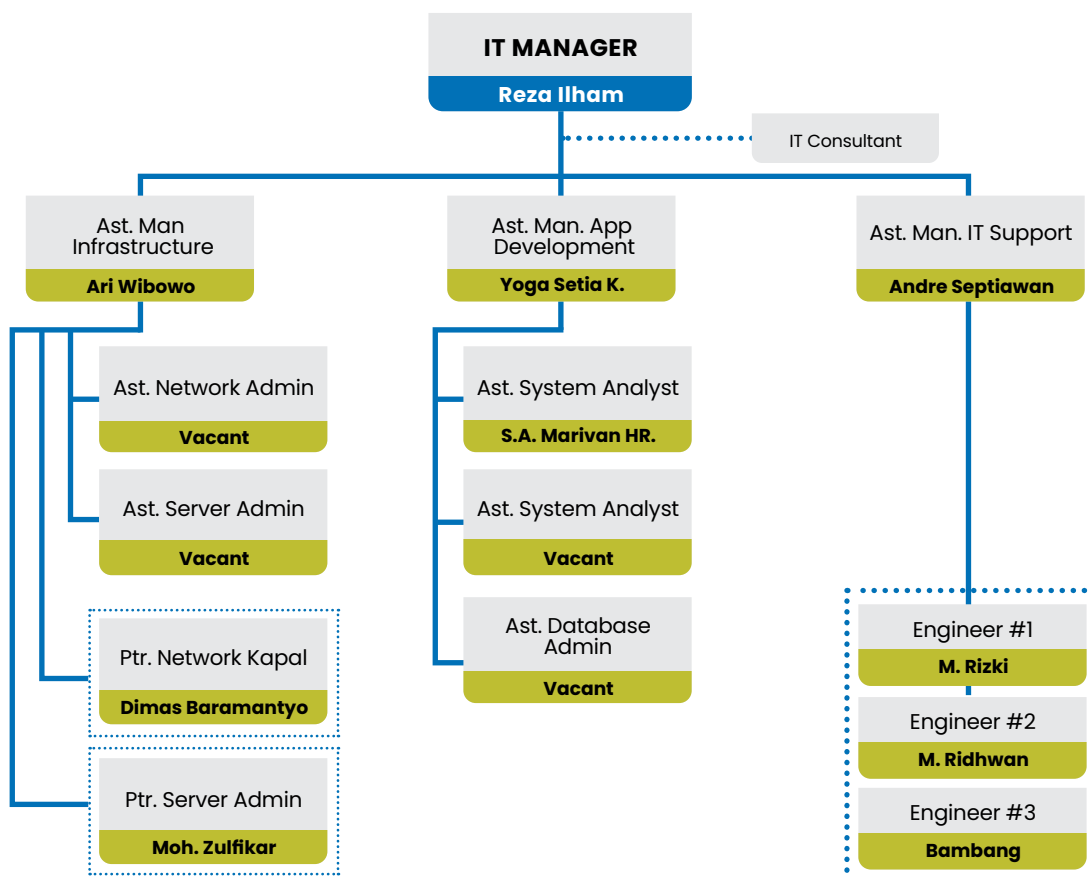
business changes related to the PTK business field. The IT function requires human resources who are competent in their field of work and able to exploit the information they have as much as possible for the benefit of the organization or company and in order to achieve positive growth and learning.

Struktur Organisasi TI

Struktur Organisasi TI di PTK terbagi menjadi tiga lapisan: *Operational Level*, *Knowledge Level* dan *Strategic Level*. Tingkatan dalam tiga lapisan tersebut menunjukkan peran dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi guna mendukung proses bisnis sebagaimana dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

IT Organizational Structure

The IT organization structure in PTK is divided into three layers: Operational Level, Knowledge Level and Strategic Level. The levels in the three layers indicate the roles and responsibilities of each function to support business processes as can be seen in the chart below:



TUGAS POKOK TI

1. Mengelola perencanaan, pemilihan teknologi, pengembangan infrastruktur jaringan sesuai dengan strategi Perusahaan.
2. Mengelola perencanaan, pemilihan teknologi, pengembangan infrastruktur sarana pendukung operasi Perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan standar industri;
3. Menetapkan kebijakan pengelolaan sekaligus melaksanakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan serta sarana pendukungnya;
4. Menetapkan kebijakan peningkatan kinerja, kapasitas maupun kapabilitas infrastruktur jaringan dan sarana pendukungnya untuk mendukung kelangsungan produk layanan dan untuk kesiapan meraih potensi pasar;
5. Mengelola penyediaan layanan produk jaringan telekomunikasi baru sesuai komitmen kepada pelanggan, baik kualitas maupun waktu pemenuhan;
6. Memastikan koordinasi kerja antara bidang di bawah Unit Bisnis maupun lintas bidang berjalan secara efektif sesuai proses bisnis Perusahaan serta sistem dan prosedur (Sisdur) yang ditetapkan;
7. Mengkoordinasikan hasil kerja setiap bidang organisasi di lingkungan bidang infrastruktur dan *data center* serta menetapkan tindak lanjut pembinaan yang diperlukan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi unit organisasi terakit.

IT MAIN DUTIES

1. Manage planning, technology selection, network infrastructure development in accordance with the Company's strategy.
2. Manage the planning, technology selection, infrastructure development for supporting the Company's operations as a whole in accordance with industry standards;
3. To establish management policies as well as to carry out operation and maintenance of network infrastructure and supporting facilities;
4. Establish policies to improve the performance, capacity and capability of network infrastructure and supporting facilities to support the continuity of service products and readiness to reach market potential;
5. Manage the provision of new telecommunication network product services according to commitments to customers, both quality and fulfillment time;
6. Ensure that work coordination between the fields under the Business Unit and across fields runs effectively in accordance with the Company's business processes and established systems and procedures (Sisdur);
7. Coordinating the work results of each field of the organization in the infrastructure and data center fields and determining the follow-up guidance needed to help solve problems faced by the related organizational unit;

Belanja TI Tahun 2021

Manajemen menetapkan kebijakan belanja TI tahun 2021 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan strategis dari rencana kerja perusahaan jangka pendek. Untuk itu sasaran kebutuhan belanja TI dibagi

IT Expenditures For 2021

The Management has stipulated IT Expenditure policy in 2020 that is adjusted based on needs and strategic planning of the company's short-term work plan. Therefore, the IT spending targets are divided into three



menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

a. IT Support

Pembelanaan dibidang operasional bisnis TI meliputi CAPEX dan OPEX yaitu sewa peralatan TI melalui *seat management*, pengadaan perangkat pendukung TI, perbaikan perangkat TI dan lisensi *enterprise agreement* dengan total nilai sebesar 10,3 miliar rupiah.

b. IT Development

Pembelanaan bidang *IT application development* meliputi pengadaan layanan SMS gateway, lisensi developer, UID SAP, template aplikasi, *tools development*, dsb. dengan total nilai sebesar 7,9 miliar rupiah.

c. IT Infrastructure

Pembelanaan bidang IT infrastructure meliputi CAPEX dan OPEX yaitu pengadaan cloud storage, UPS Managable, Cyber Security network, Managed service network dan SAP dengan total nilai sebesar 17,7 miliar rupiah.

parts, namely as follows:

a. IT Support

Expenditures in IT business operations include CAPEX and OPEX, namely IT equipment rental through *seat management*, procurement of IT support equipment, IT equipment repairs and enterprise license agreements with a total value of 10.3 billion rupiah.

b. IT Development

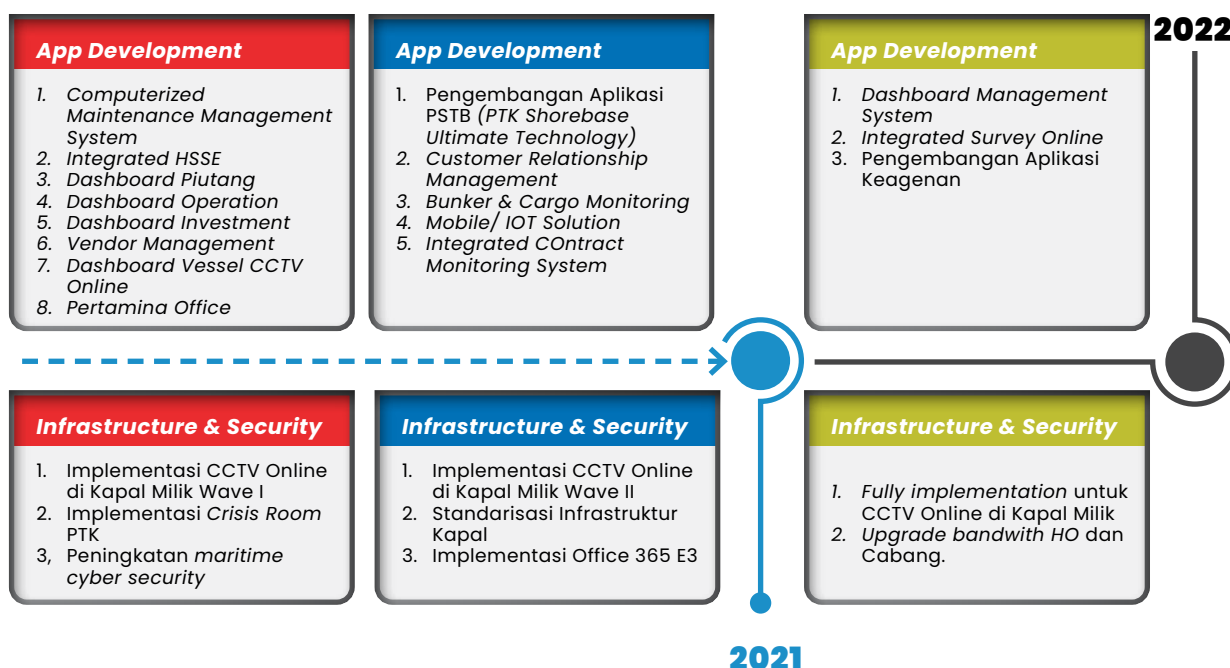
IT application development expenditure includes the provision of SMS gateway services, developer licenses, SAP UID, application templates, development tools, etc. with a total value of 7.9 billion rupiah.

c. IT Infrastructure

IT infrastructure spending includes CAPEX and OPEX, namely the procurement of cloud storage, UPS Manageable, Cyber Security network, Managed service network and SAP with a total value of 17.7 billion rupiah.

Road Map Digitalisasi TI

IT Digitalization Road Map

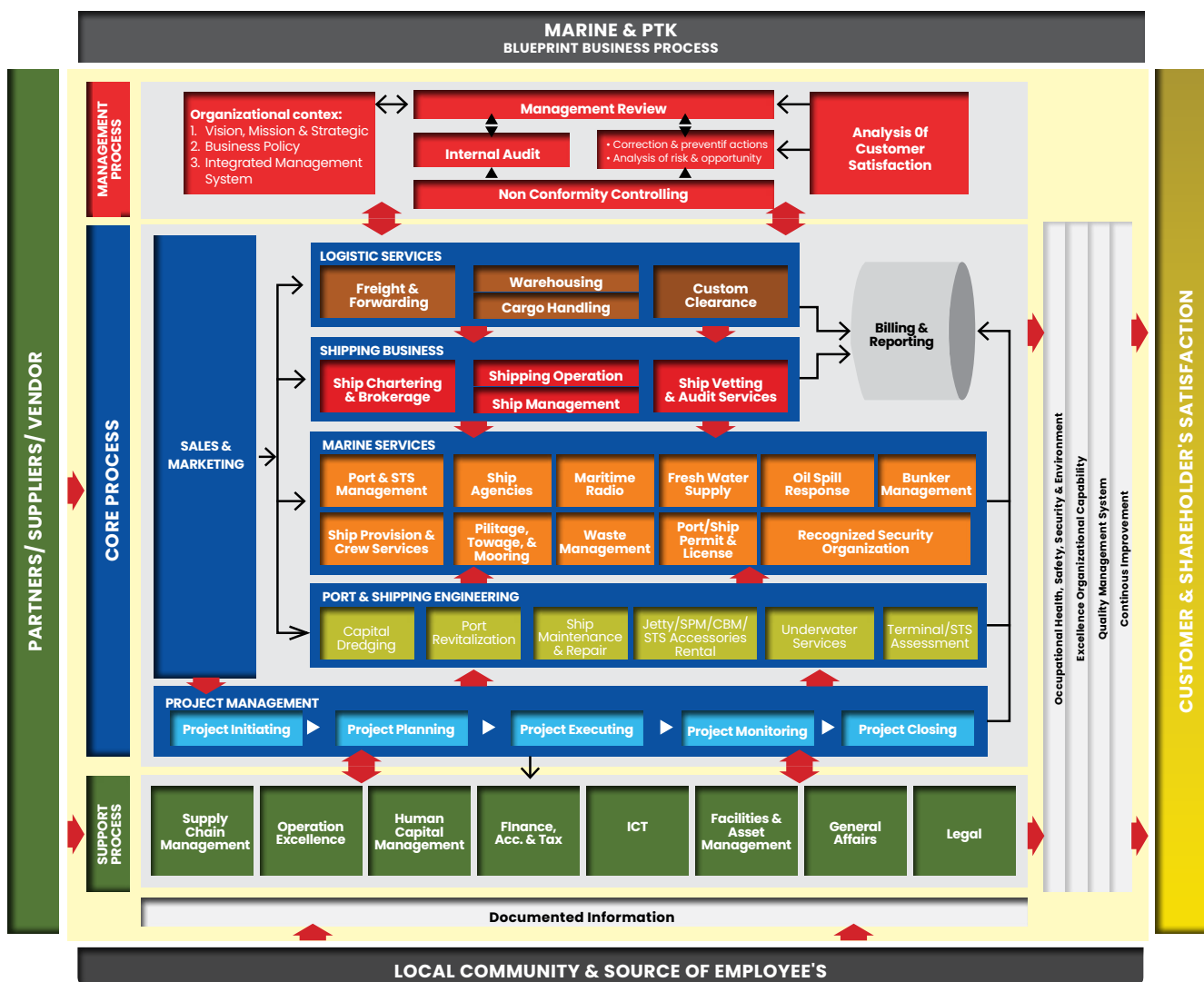


Strategi TI Ke Depan

Berdasarkan *blueprint* proses bisnis Perusahaan dan *Road Map* Digitalisasi Teknologi Informasi *multi years* bahwa untuk tahun 2021 program pengembangan TI berfokus kepada:

IT Strategy Outlook

Based on the company's business process Blueprint and the Multi-year Information Technology Digitalization Road Map, for 2021 the IT development program focus on:





Program Pengembangan TI Tahun 2022

IT Development Program In 2022

Program Pengembangan TI Tahun 2022

IT Development Program in 2022

Program	Keterangan Description		Target Pelaksanaan Implementation Targetn
Aplikasi PROVE (Procedure Informative System)	Aplikasi PROVE merupakan suatu aplikasi untuk menyimpan dan <i>monitoring</i> permintaan dokumen Sistem Tata Kerja (Pedoman, TKO, TKI, TKPA), Surat Keputusan (SK) dan Surat Perintah (SP) dari fungsi peminta secara online	PROVE application is an application for storing and monitoring requests for Work System documents (Guidelines, TKO, TKI, TKPA), Decision Letters (SK) and Orders (SP) from the requesting function online	TW 1
Aplikasi MOMO (Marine Online Management Operation)	Aplikasi Momo merupakan suatu aplikasi untuk mempermudah proses pengurusan perizinan / regulasi pelabuhan dari awal <i>request</i> dari <i>user port</i> , monitoring status pembuatan sampai upload hasil sertifikatnya ke dalam satu aplikasi yang terintegrasi.	Momo application is an application to simplify the process of managing port licensing/regulations from the initial request from the user port, monitoring the status of manufacture to uploading the certificate results into one integrated application.	TW 1
Aplikasi TRACE (Telusur Rencana Aksi, Cepat, & Efisien)	TRACE merupakan alat yang dipergunakan untuk mencatat & memantau aksi lanjut dari beragam kegiatan, seperti audit, hasil pemantauan, rapat dll. TRACE membantu memastikan kemajuan tindak lanjut tersebut hingga secara tuntas selesai, sekaligus memudahkan para Penanggung Jawab tindak lanjut mendokumentasikan bukti pelaksanaannya.	TRACE is a tool used to record & monitor follow-up actions of various activities, such as audits, monitoring results, meetings etc. TRACE helps ensure the progress of the follow-up until it is completely completed, while making it easier for those in charge of follow-up to document evidence of its implementation.	TW 1
Integrated Vessel Monitoring (INVENT)	Aplikasi yang memudahkan pengguna dalam melakukan monitoring dan pengumpulan data terkait <i>Charter Rate, Commercial Day, Commission Day, Operation Fays, Ship Condition, Ship Location, Realization revenue</i> , etc tiap bulannya dalam kegiatan <i>Shipping Activities</i>	An application to facilitate users to monitor and collect data related to Charter Rate, Commercial Day, Commission Day, Operation Fays, Ship Condition, Ship Location, Realization revenue, etc every month in Shipping Activities	TW 2

Program Pengembangan TI Tahun 2022

IT Development Program in 2022

Program	Keterangan Description		Target Pelaksanaan Implementation Targetn
Bunker Operation System (BOS) Versi 2	Aplikasi yang memudahkan pengguna kapal milik dan <i>charter</i> dalam melakukan proses pelaporan dan <i>monitoring</i> kegiatan operasional (<i>bunker</i>) kapal Harbour Tug berbasis web.	An application to facilitate users of owned and chartered vessels to carry out the process of reporting and monitoring web-based Harbor Tug vessel operational activities (bunkers).	TW 2
Implementasi P-Office	Aplikasi P-Office merupakan Sistem korespondensi digital PERTAMINA yang terintegrasi dengan Digital signature baik PSrE maupun Non PSrE (Pertamina Sign). Memudahkan <i>flow</i> penyusunan, peninjauan dan proses persetujuan serta pengiriman surat baik secara internal maupun external	The P-Office application is a PERTAMINA digital correspondence system that is integrated with Digital signatures for both PSrE and Non PSrE (Pertamina Sign). Facilitate the flow of preparation, review and approval process as well as sending letters both internally and externally	TW2
PESUT Versi 2	Optimasi aplikasi Kegiatan Shorebase di PSTB (PTK Shorebase Tanjung Batu) mulai dari kontrak, operasi dan <i>cost control</i>	Optimization of application for Shorebase Activities at PSTB (PTK Shorebase Tanjung Batu) starting from contracts, operations and cost control	TW 2
SIMONTANA Versi 2	Aplikasi Simontana merupakan aplikasi yang memudahkan pengguna dalam melakukan <i>reporting</i> dan memonitoring terkait inspeksi atas dan bawah laut sarana tambat Pertamina. Tujuan aplikasi ini yaitu: a. Meningkatkan efisiensi proses input inspeksi sarana tambat atas dan bawah air mulai proses awal sampai terciptanya Laporan <i>Checklist Underwater Services and Inspection Maintenance (IM)</i> b. <i>Database</i> sarana tambat yang terintegrasi c. Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak khususnya Diver dalam membuat laporan hasil inspeksi d. Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak terkait dalam <i>monitoring</i> inspeksi sarana tambat atas dan bawah air	The Simontana application is an application that makes it easier for users to report and monitor related to above and below sea inspections of Pertamina's mooring facilities. The purpose of this application are: a. Improve the efficiency of the input process for the inspection of upper and underwater mooring facilities from the initial process to the creation of the Underwater Services and Inspection Maintenance (IM) Checklist Report b. Integrated mooring facilities database c. Providing convenience for parties, especially Divers, in making inspection reports d. Provide convenience for related parties in monitoring the inspection of upper and underwater mooring facilities	TW 3



Program Pengembangan TI Tahun 2022

IT Development Program in 2022

Program	Keterangan Description		Target Pelaksanaan Implementation Targetn
BONUS (Bundling Online Useful System)	Aplikasi untuk transaksi Bundling R&P dan C&T sehingga kegiatan penerbitan Billing & Collection PTK dapat lebih cepat	Application for Bundling R&P and C&T transactions so that the issuance of PTK Billing & Collection activities can be expedite	TW 3
I-RING (Investasi Monitoring)	Aplikasi Monitoring Investasi Mulai dari Tahap Pengusulan, Monitoring dan Project Closing	Investment Monitoring Application Starting from the Stage of Proposal, Monitoring and Project Closing	TW 4
HSSE Tools (PRECISE, V&V, dll)	IT Tools untuk kegiatan HSSE (Regulations, Permits, dll)	IT Tools untuk kegiatan HSSE (Regulations, Permits, dll)	TW 4
Dashboard Management Versi 2	Monitoring seluruh laporan kinerja perusahaan yang dapat dikonsumsi kapan pun dan dimanapun secara <i>real time</i> oleh Tim <i>Management</i> dan Direksi dengan menggunakan platform Power Bi	IT Tools for HSSE activities (Regulations, Permits, etc.) Monitoring all company performance reports that can be consumed anytime and anywhere in real time by the Management Team and Directors using the Power Bi platform	TW 4
Research for New Technology	Kegiatan pelatihan, tutorial dan pendidikan untuk teknologi terbaru yang sedang berkembang kepada seluruh anggota tim	Training activities, tutorials and education for the latest developing technology to all team members	TW 4





Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri yang telah dilakukan, Perseroan telah menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang diperlukan, terutama untuk pengembangan infrastruktur dan investasi jangka panjang yang strategis.

Based on economic and industrial analysis, the company has established the necessary strategic policies, especially for strategic long-term infrastructure and investment development.

Tinjauan Ekonomi Global

Global Economic Overview

Perekonomian global sepanjang tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan seiring dengan proses pemulihan global akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, meskipun perbaikannya tidak merata antarnegara di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali meningkat seiring penyebaran varian delta dan Omicron di sejumlah negara. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang berlangsung lebih cepat dibandingkan negara lainnya. Di AS, perbaikan ekonomi diperkirakan semakin kuat, sejalan dengan proses vaksinasi yang berjalan lancar dan tambahan stimulus fiskal yang lebih besar. Di Tiongkok, pemulihan ekonomi yang lebih tinggi ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan global.

The global economic growth was recovering throughout 2021 in line with the global recovery process due to the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, despite the improvement was uneven among countries amid the global financial market uncertainty which was further increasing along with the spread of delta and Omicron variants in several countries. This development was mainly driven by the economic recovery of the United States (US) and China which was faster than other countries. In the US, economic recovery was predicted to be even stronger, in line with the smooth vaccination process and greater fiscal stimulus. In China, the higher economic recovery was supported by improvement in domestic and global demand.

Pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi didorong oleh sejumlah faktor antara lain (a) kenaikan kasus infeksi COVID-19 global pasca reopening aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh berbagai negara, (b) dampak penyebaran varian Delta, (c) munculnya varian Omicron sebagai *variant of concern (VOC)* baru, dan (d) disrupsi yang terjadi pada rantai pasok global. Kondisi ini dikonfirmasi oleh beberapa leading indicator ekonomi di sejumlah negara utama seperti *Purchasing Managers' Index (PMI)* dan penjualan ritel yang melandai meski masih berada di zona pertumbuhan positif. Secara umum, hal ini mencerminkan aktivitas investasi dan konsumsi masih cukup ekspansif sehingga mendukung perbaikan kinerja

The greater global economic recovery was driven by several factors, including (a) the increase in global COVID-19 infection cases after the reopening of economic and social activities carried out by various countries, (b) the impact of the spread of the Delta variant, (c) the emergence of the Omicron variant as a new variant of concern (VOC), and (d) disruptions to global supply chains. This condition is confirmed by several leading economic indicators in some major countries, such as the Purchasing Managers' Index (PMI) and retail sales, which are sloping even though they are still in the positive growth zone. In general, this reflects that investment and consumption activities are still quite expansive,



ekspor negara berkembang yang lebih tinggi, termasuk Indonesia.

Aktivitas investasi yang diproksikan dengan PMI Komposit selama Triwulan IV Tahun 2021 menunjukkan bahwa seluruh negara – negara utama berada di zona ekspansi ($PMI > 50$) pada posisi terkini. Khusus India, ekspansi pada aktivitas investasi di bulan November 2021 merupakan yang paling tinggi sejak Januari 2012, didukung oleh membaiknya aspek kesehatan di India, tercermin dari akselerasi program vaksinasi. Dari sisi *demand*, lonjakan pesanan baru didorong oleh permintaan dari perusahaan – perusahaan yang sedang melakukan *restocking* di tengah menurunnya persediaan *finished goods* menjelang akhir tahun.

Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan dan *volatilitas yield* UST masih berlangsung seiring dengan lebih baiknya

thus supporting higher export performance of developing countries, including Indonesia.

Investment activity proxied by Composite PMI during Quarter IV 2021 indicated that all major countries are in the expansion zone ($PMI > 50$) at their current position. Specifically for India, the expansion in investment activity in November 2021 was the highest since January 2012, supported by improving health aspects in India, as reflected by the acceleration of the vaccination program. From the demand side, the surge in new orders was driven by requests from companies that were doing restocking amid declining finished goods inventories towards end of the year.

Meanwhile, financial market uncertainty and volatility in UST yields persisted in line with the stronger economic recovery in

perbaikan ekonomi di Amerika Serikat dan persepsi pasar terhadap arah kebijakan *The Fed*. Perkembangan ini berpengaruh terhadap aliran modal masuk ke sebagian besar negara berkembang yang lebih rendah, dan berdampak pada tekanan mata uang di berbagai negara tersebut, termasuk Indonesia.

the United States and market perceptions of the direction of the Fed's policy. These developments resulted in lower capital inflows to most developing countries, and resulted in currency pressures in many of these countries, including Indonesia.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Global Economic Growth Projection

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Global Economic Growth Projection

(Real GDP, Percent Change)	2020	Projections	
		2021	2022
World Output	-3.1	5.9	4.9
Advance Economies	-4.5	5.2	4.5
United States	-3.4	6.0	5.2
Euro Area	-6.3	5.0	4.3
Germany	-4.6	3.1	4.6
France	-8.0	6.3	3.9
Italy	-8.9	5.8	4.2
Spain	-10.8	5.7	6.4
Japan	-4.6	2.4	3.2
United Kingdom	-9.8	6.8	5.0
Canada	-5.3	5.7	4.9
Other Advanced Economies 3/	-1.9	4.6	3.7
Emerging Market and Developing Economies	-2.1	6.4	5.1
Emerging and Developing Adia	-0.8	7.2	6.3
China	2.3	8.0	5.6
India 4/	-7.3	9.5	8.5
ASEAN- 5 5/	-3.4	2.9	5.8
Emerging and Developing Europe	-2.0	6.0	3.6
Russia	-3.0	4.7	2.9
Latin America and the Caribbean	-7.0	6.3	3.0

**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global**

Global Economic Growth Projection

(Real GDP, Percent Change)	2020	Projections	
		2021	2022
Brazil	-4.1	5.2	1.5
Mexico	-8.3	6.2	4.0
Middle East and Centrak Asia	-2.8	3.1	4.1
Saudi Arabia	-4.1	2.8	4.8
Sub Saharan Africa	-1.7	3.7	3.8
Nigeria	-1.8	2.6	2.7
South Africa	-6.4	5.0	2.2
Emerging Market and Middle Income Economies	-2.3	6.7	5.1
Low-Income Developing Countries	0.1	3.0	5.3
World Trade Volume (Goods and Services) 6/	-8.2	9.7	6.7
Advanced Economies	-9.4	8.0	6.6
Emerging Market and Developing Economies	-5.2	11.6	5.8

Sumber: World Economic Outlook (WEO) IMF, October 2021

Source: World Economic Outlook (WEO) IMF, October 2021

Dengan perkembangan tersebut, IMF melalui *World Economic Outlook* (WEO) pada Oktober 2021, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2021 akan tumbuh 5,9% *year-on-year/yoy* (revisi ke bawah sebesar 0,1% dari proyeksi IMF yang dirilis pada WEO Juli 2021).

Considering these developments, IMF through the *World Economic Outlook* (WEO) in October 2021, projected that world economic growth in 2021 will grow 5.9% *year-on-year/yoy* (a downward revision of 0.1% from the IMF projection released at WEO July 2021).

Aktivitas Produksi dan Konsumsi di hampir seluruh negara tujuan ekspor utama terpantau masih mampu mempertahankan kinerjanya di level positif, salah satunya didorong oleh *seasonal effect* (perayaan Natal dan Tahun Baru). Meskipun begitu, adanya varian Omicron yang lebih menular menimbulkan kekhawatiran dunia akan terhambatnya kembali rantai pasokan sehingga berdampak pada perlambatan pemulihan kondisi ekonomi global.

Production and consumption activities in almost all major export destination countries were observed to be able to maintain their positive performance, one of which was driven by seasonal effect (Christmas and New Year celebrations). However, the outbreak of Omicron, the more contagious variant, has raised global concerns that supply chains will be again disrupted, resulting a slowdown in the global economic recovery.

Tinjauan Perekonomian Nasional dan Industri

Overview of The National Economy And Industry

Perekonomian Indonesia turut mengalami kenaikan pertumbuhan imbas perbaikan ekonomi global. Pada Triwulan IV Tahun 2021, perekonomian diperkirakan akan kembali tumbuh positif. Leading indicator ekonomi domestik dari sisi produksi seperti indikator PMI Manufaktur masih berada pada zona ekspansi. Sementara dari sisi konsumsi, indikator Keyakinan Konsumen dan penjualan ritel terus membaik. Kinerja ekspor dan impor juga mencatatkan pertumbuhan double digit yaitu 42,62% pada November 2021. Perkembangan tersebut diperkirakan mampu membawa ekonomi domestik tumbuh dalam kisaran 3,7 – 4,5% di tahun 2021.

The Indonesian economy also experienced an increase in growth due to the improvement in global economy. In the fourth quarter of 2021, the economy is expected to return to positive growth. Leading indicators of the domestic economy from the production side, such as the Manufacturing PMI indicator, are still in the expansion zone. On the consumption side, indicators for Consumer Confidence and retail sales continued to improve. Export and import performance also recorded double digit growth of 42.62% in November 2021. This development is estimated to be able to bring the domestic economy to grow in the range of 3.7 – 4.5% in 2021.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% (yoy). Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga.

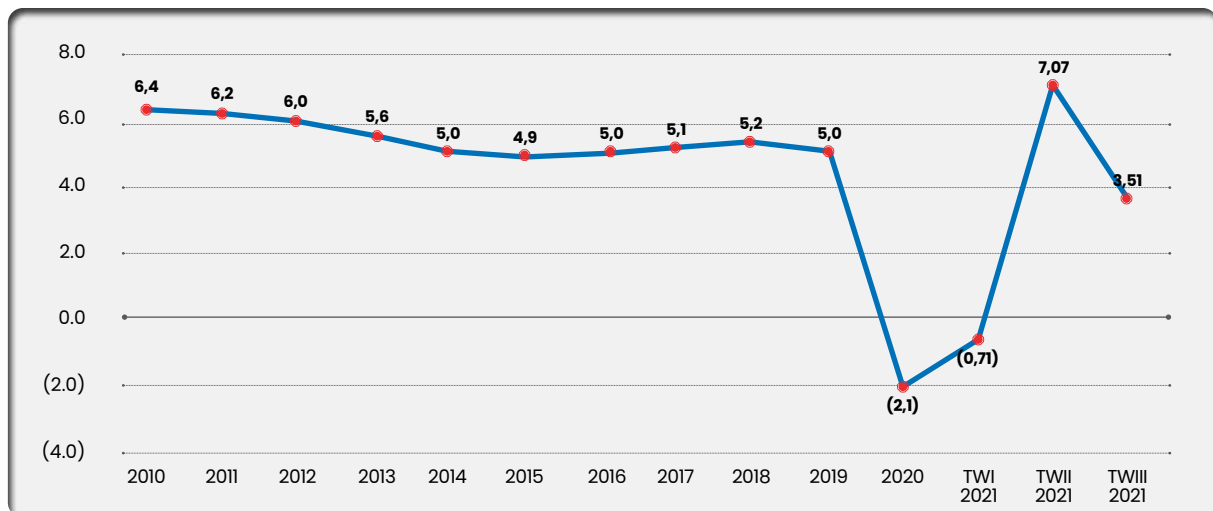
Sementara nilai tukar Rupiah sukses mencatat penguatan di perdagangan terakhir 2021 melawan dolar Amerika Serikat (AS). Di penutupan perdagangan, rupiah berada di level Rp14.250/US\$, menguat 0,11% di pasar spot. Sementara sepanjang tahun 2021, rupiah hanya melemah 1,36% melawan dolar AS.

Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), CPI inflation was recorded at 1.87% (yoy) in 2021, an increase compared to 1.68% (yoy) CPI inflation in 2020. The low inflation in 2021 is influenced by a weak domestic demand as a result of Covid-19 pandemic, adequate supply, and policy synergy between Bank Indonesia and the Government both at the central and regional levels in maintaining price stability.

Meanwhile, Rupiah exchange rate successfully recorded a strengthening in the last trade in 2021 against the United States (US) dollar. At the trading closing, rupiah was at the level of Rp14,250/US\$, strengthening by 0.11% in the spot market. Meanwhile, throughout 2021, rupiah only weakened 1.36% against the US dollar.



GRAFIK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Indonesian Economic Growth Chart



Sumber: BPS, diolah/ Source: BPS, processed.

Data yang dirilis dari Negeri Tiongkok menunjukkan sektor manufaktur mempercepat ekspansi yang meredakan kecemasan akan pelambatan ekonomi China. Ekspansi sektor manufaktur China tentunya memberikan sentimen positif, sebab merupakan mitra dagang utama Indonesia. Perekonomian China yang berputar lebih cepat akan meningkatkan impor dari Indonesia. Apalagi, China merupakan salah satu konsumen terbesar komoditas ekspor andalan Indonesia, yakni minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan batu bara.

Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga, seiring dengan fungsi intermediasi yang membaik. Perbaikan didorong terkendalinya pandemi, pulihnya mobilitas dan meningkatnya kegiatan perekonomian. Namun demikian, munculnya varian Omicron tetap perlu diwaspadai.

Data released from China showed the manufacturing sector was accelerating expansion which eased fears of a slowing Chinese economy. The expansion of China's manufacturing sector certainly gives a positive sentiment, because China is Indonesia's main trading partner. China's economy that is rolling faster will increase imports from Indonesia. Moreover, China is one of the largest consumers of Indonesia's mainstay export commodities, namely crude palm oil (CPO) and coal.

The Financial Services Authority assesses that the stability of the financial services sector is maintained, in line with the improving intermediation function. The improvement was driven by the control of the pandemic, restoration of mobility and increased economic activity. However, the emergence of Omicron variant still needs to be watched out for.

Sinergi Bisnis Perusahaan - Group Pertamina

Company Business Synergy – Pertamina Group

Salah satu langkah strategis yang dilakukan PTK adalah membangun sinergi dengan anak Perusahaan PT Pertamina (Persero). Sinergi dimaksudkan untuk memberikan peluang bekerja sama sehingga dapat meningkatkan kinerja masing-masing Anak Perusahaan dan memperkuat bisnis Pertamina Group.

One of the strategic steps applied by PTK is to build synergies with subsidiary of PT Pertamina (Persero). The synergy is aimed to provide an opportunity to cooperate and improve performance of each Subsidiary as well as strengthen the Pertamina Group business.

Sinergi yang terbangun akan mendorong PTK dan seluruh AP Pertamina dapat memanfaatkan fasilitas yang sama sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Efisiensi mendorong kinerja PTK dan AP Pertamina lain menjadi lebih baik, sehingga akan mengoptimalkan pencapaian Pendapatan maupun Laba Usaha, serta mendukung pengembangan usaha. Selama tahun 2021 PTK telah membangun sinergi dengan sejumlah Anak Perusahaan Pertamina.

The developed synergy will encourage PTK and all subsidiaries of Pertamina in using the same facilities to improve efficiency. The efficiency will encourage performance of PTK and other subsidiaries of Pertamina to be better, to optimize Revenues and Operating Profit achievement, as well as support business development. In 2021, PTK has build synergy with some subsidiaries of Pertamina.

Sinergi Antar Pertamina Group

Synergy Among Pertamina Group

<i>Trading Partner</i>	Pendapatan Operasi (2021) Operating Income (2021)	Pendapatan Operasi (2020) Operating Income (2020)
PT Pertamina (Persero)	1.453.849	289.378
PT Pertamina Hulu Energi	138.773	-
PT Pertamina Gas Negara	137.994	25.471
PT Patra Niaga	510.323	2.090
PT Pertamina EP	6.616	-
PT Pertamina Geothermal Energy	208	-
Pertamina Drilling Service Indonesia	214	-
PT Pertamina Lubricant	1.022	1
PT Pertamina Bina Medika	-	2.847
PT Tugu Pratama Indonesia	-	7.967



Sinergi Antar Pertamina Group

Synergy Among Pertamina Group

<i>Trading Partner</i>	Pendapatan Operasi (2021) Operating Income (2021)	Pendapatan Operasi (2020) Operating Income (2020)
PT Pertamina Pedeve Indonesia	-	-
PT Pertamina Training & Consulting	479	2.828
PT Pertamina Retail	181.739	-
PT Patra Jasa	-	980
PT Elnusa	-	-
PT EP Cepu	248	-
PT Pertamina Shipping	1.028.322	-
PT Pertamina Hulu Indonesia	138.773	-
PT Nusantara Regas	12.471	-
PIMD	401	-
PT Kilang Pertamina Internasional	297.124	187
PT Peteka Karya Tirta	4.577	3.635
PT Peteka Karya Samudera	371	211.112
PT Peteka Karya Gapura	75	354.829
PT Peteka Karya Jala	106	40.521
PT Patra Badak Arun Solusi	106	265
Jumlah	3.913.789	14.521

Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

PT Pertamina Trans Kontinental awalnya didirikan dengan nama PT Pertamina Tongkang. PT Pertamina Tongkang bergerak di bidang pelayaran khusus industri (*industrial carrier*) dengan jasa:

1. Melaksanakan angkutan BBM ke daerah-daerah yang tidak dapat atau tidak ekonomis dilayani oleh kapal tanker;
2. Melaksanakan angkutan logistik keperluan proyek Pertamina; dan
3. Sebagai general agent/handling agent terhadap kapal-kapal tanker/charter Pertamina.

Nama Perusahaan berubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental pada tanggal 14 September 2011 berdasarkan Akta No. 012 Tanggal 26 Oktober 2011 Tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Pertamina Tongkang, Notaris Dewantari Handayani, S.H.MPA, dengan bernafaskan new brand, new vessels, new spirit untuk bertransformasi dan mencapai visi menjadi perusahaan pelayaran dan jasa maritim kelas dunia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan No.7 tanggal 3 Juli 2013 pasal 3, Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang jasa pelayaran, jasa maritim, dan jasa logistik, baik di dalam maupun luar negeri. Jasa Perseroan juga termasuk kegiatan usaha lain terkait usaha di ketiga bidang tersebut.

Kinerja Operasional Per Segmen Usaha

Secara umum, perusahaan memiliki tiga segmen usaha, yaitu: 1) Kegiatan pengangkutan, 2) Jasa maritim, dan 3) Jasa operasi kepelabuhan.

PT Pertamina Trans Kontinental was initially established under the name PT Pertamina Tongkang. PT Pertamina Tongkang engaged in the industrial carrier sector with the following:

1. Conducting fuel oil freight to areas which are unavailable to or uneconomical for tanker ship service;
2. Conducting the logistics freight for Pertamina project requirements;
3. Acting as general agent/handling agent of Pertamina tanker/charter ships.

Name of the Company was changed to PT Pertamina Trans Kontinental on September 14, 2011 based on Deed No. 012 of October 26, 2011 on PT Pertamina Tongkang Statement of Decision Outside of the Meeting, Notary Dewantari Handayani, S. H. MPA., with the themes of new brand, new vessels, new spirit, to transform and achieve the vision to be a world class shipping and maritime services company.

Based on the Articles of Association of the Company No. 7 of July 3, 2013 article 3, the Company runs business activities in the sectors of shipping services, maritime services, and logistics services, both at home and abroad. The Company's services also include other business activities related to the three fields.

Operational Performance Per Business Segment

In general, the Company has three business segments, as follows: 1) Ship Exploitation, 2) Maritime Service, and 3) Port operations service.



Segmen Kegiatan Pengangkutan

Perusahaan memiliki *core business* sebagai penyedia kapal dan memberikan jasa operasional kapal, baik kapal milik maupun *brokerage*, dengan sistem sewa berjangka (*time charter*) dengan durasi sewa minimal antara 2-10 tahun, sewa jangka pendek (*spot charter*) berdurasi kurang dari 1 tahun, *Bare Boat Charter* dan sistem muatan (*cost of affreightment*), yaitu sistem sewa berdasarkan pada volume muatan.

Perusahaan melakukan sewa-menyewa kapal bekerja sama dengan Pihak ke-tiga untuk berbagai jenis kapal penunjang kegiatan migas dan kapal sarana pelabuhan. Kegiatan Charter Brokerage (*Back-to-Back*) terdiri dari *Back-to-Back Charter Non-COA (time charter)* dan *Back-to-Back Charter COA*.

Ship Exploitation Segment

The Company's core business is ship provider and ship operations services, whether owned or brokerage, with a time charter system and a minimum charter duration of 2-10 years, spot charter with the duration of less than 1 year, and a cost of affreightment system, which is a charter system based on cargo volume.

The Company commences a ship leasing in cooperation with third parties for various supporting vessels for oil and gas activity and port facility vessels. The Charter Brokerage (*Back-to-Back*) activity consists of *Back-to-Back Charter Non-COA (time charter)* and *Back-to-Back Charter COA*.

Produktivitas Segmen Eksploitasi Kapal

Pada tahun 2021, realisasi *commission days* kapal milik PTK meningkat 127,26% menjadi 83.281 hari dari 36.646 hari pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan armada kapal milik yang sudah siap beroperasi. Pada tahun 2021, jumlah kapal milik bertambah sebanyak 219 kapal menjadi 344 kapal atau meningkat 175,20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Operation days kapal tahun 2021 turut meningkat 106,46% menjadi 90.651 hari dari 43.907 hari pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya jumlah *operation days* kapal milik yang tumbuh sebesar 143,31% atau setara dengan 48.818 hari. Sementara itu, *operation days* kapal *back-to-back* menurun 21,07% dari 9.842 hari menjadi 7.768 hari sepanjang tahun 2021.

Productivity of the Ship Exploitation Segment

In 2021, realization of commission days for PTK owned vessels increased 127.26% to 83,281 days from 36,646 days in the previous year. This increase was mainly due to addition of a fleet of owned vessels that were ready to operate. In 2021, the number of owned vessels will increase by 219 vessels to 344 vessels or an increase of 175.20% compared to the previous year.

In 2021, ship operation days also increased by 106.46% to 90,651 days from 43,907 days in the previous year. This increase was driven by the increase in the number of owned vessels operation days, which grew by 143.31%, or equivalent of 48,818 days. Meanwhile, throughout 2021 back-to-back vessel operation days decreased by 21.07% from 9,842 days to 7,768 days.

Produktivitas Segmen Eksploitasi Kapal

Productivity of Ship Exploitation Segment

Uraian Description		Satuan Units	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
			%	Selisih Difference			
ARMADA KAPAL MILIK/ OWNED SHIPS							
Jumlah Armada Kapal Milik	Total Owned Ships	Unit	175,20%	219	344	125	84
Commisson Days Kapal Milik	Commission Days of Owned Ships	Hari Days	127,26%	46.635	83.281	36.646	23.015
Kapal Milik Existing	Existing Vessels	Hari Days	27,27%	8.436	39.371	30.935	22.663
New Vessels	New Vessels	Hari Days	668,87%	38.199	43.910	5,711	352
Operation Days Kapal Milik	Operation Days of Owned Ships	Hari Days	143,31%	48.818	82.883	34.065	21.156
Kapal Milik Existing	Existing Vessels	Hari Days	34,39%	10.007	39.108	29.101	20.840
New Vessels	New Vessels	Hari Days	841,80%	39.127	43.775	4.648	316
Muatan Diangkut (Kapal Milik) Loads	Loads Transported (Owned Ship)	KL	-19,97%	-82.044	328.765	410.809	423.342

**Produktivitas Segmen Eksploitasi Kapal**

Productivity of Ship Exploitation Segment

Uraian Description		Satuan Units	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
			%	Selisih Difference			
KAPAL BACK-TO-BACK/ BACK-TO-BACK CHARTERED SHIPS							
Jumlah Kapal Back-to-Back	Total Back-to-Back Ships	Unit	-32,43%	-12	25	37	28
Operation Days Back-to-Back	Operation Days Back-to-Back	Hari Days	-21,07%	-2074	7.768	9.842	8.320
Kantor Pusat	Head Office	Hari Days	-47,24%	-719	803	1.522	2.074
Region	Region		-16,29%	-1355	6.965	8.320	6.246
Muatan Diangkut (Back-to-Back)	Loads Transported (Back-to-Back)	KL	6,84%	21259	331.996	310.737	330.661
Jumlah Operation Days Kapal Milik dan Back-to-Back	Total Operation Days of Owned ships and Back-to-back	Hari Days	106,46%	46744	90.651	43.907	29.151
Volume Angkut COA	COA Freight Volume	KL	-8,42%	-60785	660.761	721.546	754.003

Sementara itu volume angkut *Contract of Affreightment* (COA) juga mengalami penurunan sebesar 8,42% atau setara dengan 60.785 KL menjadi 660.761 KL pada tahun 2021. Penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya muatan yang diangkut kapal milik sebesar 19,97% atau setara dengan 82.044 KL menjadi 328.765 KL pada tahun 2021. Meskipun demikian, Volume Angkut *Contract of Affreightment* (COA) yang diangkut kapal *back-to-back* mengalami kenaikan sebesar 6,84% atau 21.259 KL menjadi 331.996 KL pada tahun 2021.

Meanwhile, the transport volume of *Contract of Affair* (COA) also decreased by 8.42% or equivalent to 60,785 KL to 660,761 KL in 2021. This decrease was caused by a decrease in cargo carried by vessels by 19.97% or it is equivalent to 82,044 KL to 328,765 KL in 2021. However, the *Contract of Affreightment* (COA) volume transported by back-to-back vessels increased by 6.84% or 21,259 KL to 331,996 KL in 2021.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Eksploitasi Kapal

Pada tahun 2021, pendapatan dari jasa Kapal Milik mengalami kenaikan 4,64% atau setara dengan Rp46,89 miliar dari Rp1,01 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,06 triliun pada tahun 2021. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya jumlah kapal Perseroan menjadi 344 unit pada tahun 2021 dari semula 125 unit.

Vessel Exploitation Segment Revenue and Profitability

In 2021, revenue from owned vessels increased by 4.64% or equivalent to Rp46.89 billion from Rp1.01 trillion in 2020 to Rp1.06 trillion in 2021. This increase was in line with the increase in the number of the Company's vessels to 344 units in 2021 from the original 125 units.

Naiknya pendapatan usaha selain disebabkan oleh kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan mutu layanan sehingga dapat menjaga kepercayaan pelanggan, terdapat juga faktor utama yaitu peningkatan kapasitas penggunaan Kapal Milik (Segmen Eksploitasi Kapal). Namun, kenaikan ini diiringi kenaikan beban pokok kapal milik yang lebih besar sehingga mengakibatkan laba operasi Kapal Milik menurun sebesar 53,39% atau setara dengan Rp206,60 miliar. Penggunaan kapal sewa mengalami peningkatan diikuti dengan kenaikan laba operasi kapal sewa. Penggunaan Kapal Sewa (*Back-to-Back Charter*) meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 1731,23% dari Rp17,14 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp313,80 miliar.

The increase in operating revenues is not only due to the Company's ability to maintain service quality so as to maintain customer trust, there is also a major factor, namely an increase in the capacity to use Owned Vessels (Ship Exploitation Segment). However, this increase was accompanied by a larger increase in the cost of owned vessels, resulting in a decrease in operating profit of Owned Vessels by 53.39% or equivalent to Rp206.60 billion. The use of chartered vessels has increased followed by an increase in operating profit of chartered vessels. In 2021, the use of Back-to-Back Charters increased significantly by 1731.23% from Rp17.14 billion in 2020 to Rp313.80 billion.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Eksploitasi Kapal (dalam jutaan Rupiah)

Revenue and Profitability of Ship Exploitation (in million Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Pendapatan Kapal Milik	Own-Vessels Revenue	4,64%	46.892	1,056,503	1.009.611	906.832
Pendapatan <i>Back-to-back Charter</i>	Back-to-back Charter Revenue	1731,23%	296.663	313.799	17.136	20.442
Jumlah Pendapatan Segmen Eksploitasi kapal	Total Revenues from Ships Exploitation Segment	33,46%	343.555	1.370.302	1.026.747	927.274
Beban Pokok Kapal Milik	Own-Vessels Cost of Revenue	40,71%	253.491	876.152	622.661	622.516
Beban Pokok <i>Back-to-back Charter</i>	Back-to-Back Charter Cost of Revenue	981,91%	29.035	31.992	2.957	-
Jumlah Beban Pokok Segmen Eksploitasi Kapal	Total Cost of Revenues from Ships Exploitation Segment	45,16%	282.526	908.144	625.618	622.516
Laba Operasi Kapal Milik	Own-Vessels Operating Income	-53,39%	-206.599	180.351	386.950	284.316
Laba Operasi <i>Charter & Brokerage dan Contract of Affreightment (COA)</i>	Charter & Broekrage and Contract of Affreightment (COA) Operating Income	1887,50%	267.628	281.807	14.179	20.442
Profitabilitas Segmen Eksploitasi Kapal	Profitability of Ships Exploitation Segment	15,21%	61.029	462.158	401.129	304.758



Profitabilitas segmen eksploitasi kapal mengalami kenaikan 15,21% dari Rp401,13 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp462,16 miliar pada tahun 2021.

Jasa Maritim

PT Pertamina Trans Kontinental menyediakan layanan jasa maritim atau keagenan di seluruh pelabuhan di Indonesia, baik sebagai pelabuhan umum (keagenan umum) maupun di pelabuhan khusus Pertamina (keagenan kapal-kapal *tanker charter*/milik Pertamina).

Layanan yang disediakan mencakup: (1) pengurusan perizinan: *inout clearance (formality)*; (2) menyiapkan kebutuhan kapal dan *crew (crew supply, bunker handling, water supply)*, (3) menyiapkan kebutuhan kapal dan *crew*, membuat perhitungan dan mempertanggungjawabkan jasa layanan kapal, dan (4) pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Produktivitas Segmen Jasa Maritim

Segmen jasa maritim terdiri atas keagenan tanker dan umum. Pada tahun 2021, layanan keagenan tanker mengalami kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah call keagenan tanker yang meningkat 40,20% pada tahun 2021 menjadi 22.661 call dari 16.163 call pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah call keagenan tanker region sebesar 40,44%.

Layanan keagenan umum juga menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2021. Adapun rincian dari kinerja keagenan tanker dan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Profitability of the ship exploitation segment has increased by 15.21% from Rp401.13 billion in 2020 to Rp462.16 billion in 2021

Maritime Services

PT Pertamina Trans Kontinental provides agency services at all Indonesian ports, whether as general ports (general agency) or Pertamina special ports (agency of Pertamina charter/owned tanker ships).

The provided services include: (1) permit administration: *in-out clearance (formality)*, (2) preparing the needs of ship and crew (*crew supply, bunker handling, water supply*), (3) preparing the needs of ship and crew, making ship service calculations and accountability, and (4) preparing Import Declaration (PIB) and Export Declaration (PEB) documents.

Productivity of Maritime Services Segment

The maritime services segment consists of tanker and general agencies. In 2021, tanker agency services experienced better performance than the previous year. This indicated from the number of tanker agency calls, which increased by 40.20% in 2021 to 22,661 calls from 16,163 calls in 2020. This increase was due to the increase in the number of branch offices' tanker agency calls by 40.44%.

General agency services also demonstrated good performance in 2021. Details information on tanker and general agency performance can be seen in the following table:

Produktivitas Segmen Jasa Maritim

Productivity of Maritime Services Segment

Uraian Description		Satuan Units	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020
			%	Selisih Difference		
Keagenan Tanker/ Tanker Agency						
Charter Call Bosowa	Charter Call Bosowa	call	-12,50%	-6	42	48
Keagenan Tanker Region	Branch Office Tanker Agency	call	40,44%	6513	22.619	16.106
Keagenan Tanker Pihak ketiga	Third party Tanker Agency	call	10,58%	210	2.194	1.984
Jumlah Call Keagenan Kapal C/M Pertamina di Pel. Pertamina	Total Agency Call of Pertamina C/M Ship in Pertamina Port	call	44,63%	6303	20.425	14.122
Jumlah Call Keagenan Tanker	Number of Tanker Agency Call	call	40,28%	6507	22.661	16.154
Keagenan Umum/ General Agency						
Bunker Service	Bunker Service	call	-54,67%	-7.035	5.833	12.868
Custom Clearance	Custom Clearance	set	-35,48%	-11	20	31
Handling Fee	Handling Fee	kru	28,37%	59	267	208

Pendapatan Segmen Jasa Maritim

Perusahaan mencatat pendapatan dari jasa maritim atau keagenan naik sebesar 37,10% dari Rp1,22 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,68 triliun pada tahun 2021, kenaikan ini disebabkan oleh kinerja pusat yang terealisasi di atas target yang ditetapkan yaitu 20.425 call atau tercapai 105,39%. Kinerja region juga tercatat melebihi target yakni 2.194 call dari target yang ditetapkan sebesar 1.670 call atau tercapai 105,39%.

Maritime Services Segment Revenue

The Company booked revenue from maritime or agency services increased by 37.10% from Rp1.22 trillion in 2020 to Rp1.68 trillion in 2021, the increase was due to the headquarter performance which was realized above the set target of 20,425 calls or achieved 105.39%. pPrformance of the branch offices was recorded exceeding the target achieveing 2,194 calls from the 1,670 calls targeted or achieved 105.39%.

**Pendapatan Segmen Jasa Maritim (dalam jutaan Rupiah)**

Profitability of Maritime Service Segment (in millions of Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Jumlah Pendapatan Segmen Jasa Maritim	Total Revenues from Maritime Service Segment	37,10%	454.041	1.677.943	1.223.902	1.382.443
Jumlah Beban Pokok Segmen Jasa Maritim	Total Cost of Revenues from Maritime Service Segment	30,99%	286.865	1.212.424	925.559	1.124.348
Profitabilitas Segmen Jasa Maritim	Profitability of Maritime Service Segment	56,03%	167.176	465.519	298.343	258.095

Pendapatan segmen jasa maritim mengalami kenaikan 56,03% atau sebesar Rp167,18 miliar dari Rp298,34 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp465,52 miliar pada tahun 2021.

The profitability of the maritime services segment increased by 56.03% or Rp16.18 billion from Rp298.34 billion in 2020 to Rp465.52 billion in 2021.

Jasa Operasi Kepelabuhanan - Diversifikasi Usaha

Kegiatan operasi kepelabuhanan meliputi kegiatan; (1) Administrasi Pelabuhan Khusus, (2) *Recognized Security Organization* (RSO), dan (3) *Hydrography, Oceanography* dan Pemetaan (HOP), meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

1. *Labour supply/crewing agent*
2. Layanan *bunker service agency*, yaitu berupa pengisian dan/atau pendistribusian BBM untuk kapal, baik di laut maupun di darat.
3. Melakukan jasa pengolahan dan penyediaan air (fresh water supply) untuk keperluan kapal
4. Melakukan usaha jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal
5. Jasa pengerukan dan reklamasi pantai
6. Jasa ekspor import barang dan jasa pengurusan dokumen ekspor import (*customs clearance*).
7. Mengadakan usaha di bidang *international freight forwarding*, termasuk tetapi tidak

Port Operation Services – Business Diversification

Port operation activities includes following activities; (1) Special Port Administration, (2) *Recognized Security Organization* (RSO), and (3) *Hydrography, Oceanography and Mapping* (HOP). Performance of port operation services is as follows:

1. Labour Supply/Crewing Agent.
2. Bunker Service Agency, providing Fuel recharge and/or distribution for ships onshore and offshore.
3. Fresh water supply and management service for ship and industrial needs.
4. Ships loading and unloading business activities.
5. Beach excavation and reclamation services.
6. Good and service export and import services including export import custom clearance
7. Business in *international freight forwarding*, including but not limited on cargo transportation, delivery and distribution.

terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman dan pendistribusian barang.

8. Pengelolaan pelabuhan umum dan *logistic base*
9. Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran.
10. Layanan inspeksi pipa bawah laut dimana pekerjaan survei untuk memeriksa kondisi *existing* pipa bawah laut meliputi bentangan, posisi, tekanan dan parameter teknis lainnya sesuai dengan desain yang ditetapkan.
11. Trading yang meliputi kegiatan pengadaan barang kebutuhan APD, PRF (*Pneumatic Rubber Render*), *freight forwarding*.

8. General Port and Logistic base management.

9. Building and office rental and management services.
10. Submarine pipeline inspection service where the survey project supports submarine pipeline existing condition including spread, position, pressure and other technical parameters based on stipulated design.
11. Trading activities including APD, PRF (*Pneumatic Rubber Vender*), *Freight Forwarding*.

Produktivitas Diversifikasi Usaha – Region

Rincian area per region adalah sebagai berikut:

- Region I Sumatera
- Region II Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
- Region III Kalimantan, Sulawesi, dan Papua

Kegiatan serta kinerja operasional serta diversifikasi usaha yang dilaksanakan oleh region selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Business Diversification Productivity – Region

The details of area per region are as follows:

- Region I Sumatera
- Region II Java, Bali and Nusa Tenggara
- Region III Kalimantan, Sulawesi and Papua

Activities and operational performance as well as business diversification carried out by the region during 2021 are as follows:

Kinerja Usaha oleh Region

Business Performance by Region

Uraian Description	Satuan Units	Pencapaian Achievement	2021			
		%	Region I	Region II	Region III	Total
Jumlah Kapal Milik Total Owned Ships	Unit	128,00%	44	35	17	96
Operation Days Kapal Milik Operation Days Owned Ships	Hari Days	131,12%	14.171	11.666	13.493	39.330
Jumlah Kapal <i>Back to Back</i> Total Back to Back Ships	Unit	100,00%	7	-	23	30
Operation Days <i>Back to Back</i> Operation Days Back to Back	Hari Days	78,10%	1.824	-	5.412	7.236
Jumlah muatan COA diangkut Total COA cargo transported	KL	80,38%	422.278.619	-	-	422.278.619

**Kinerja Usaha oleh Region**
Business Performance by Region

Uraian Description	Satuan Units	Pencapaian Achievement	2021			
		%	Region I	Region II	Region III	Total
Persentase Kelebihan <i>Transportation Loss Rata-rata</i> Average Transportation Loss Excess Percentage	%	100,00%	1	-	-	1
Kasus Keterlambatan <i>Delay Cases</i>	Kali Times	N/A	-	-	-	-
Jumlah Call Keagenan Non Pertamina Total Non-Pertamina Agency Calls	Call	148,44%	481	1.514	426	2.421
Jumlah Call Keagenan Kapal C/M PERTAMINA Total PERTAMINA C/M Ship Agency Calls	Call	131,87%	5.662	7.806	6.847	20.315
Jumlah Call Keagenan Umum Total General Agency Calls	Call	126,31%	2.716	1.517	1.600	5.833
<i>Custom Clearance</i>	Call	83,33%	-	20	-	20
<i>Handling Crew</i>	Crew	178,00%	11	252	4	267
Jumlah Call Adm. Pelabuhan Khusus Total Adm. Special Port Calls	Call	N/A	-	-	-	-
Jumlah <i>Supply Oil Bunker</i> TNI AL Total Oil Supply Bunker TNI AL	Liter	203,20%	23.019	52.941.338	4.790.020	57.574.377
Jumlah <i>Supply Air Kapal</i> Total Ship Water Supply	M ³	96,28%	7.076	7.809	112.495	127.380
ISPS Code (Pelatihan) ISPS Code (Training)	Event	N/A	-	-	-	-

**Produktivitas Diversifikasi
Usaha – Anak Perusahaan**

Sampai dengan akhir periode pelaporan Perusahaan memiliki tiga anak perusahaan:

1. Peteka Karya Gapura
2. Peteka Karya Samudera
3. Peteka Karya Jala

Selain anak perusahaan tersebut, Perusahaan juga memiliki satu perusahaan patungan (*joint venture*), yaitu PT Trans Yeong Maritime yang kepemilikan sahamnya terbagi antara PT Pertamina Trans Kontinental sebesar 51% dan Tong Yeong Tug, Co., Ltd. sebesar 49%.

**Productivity of Business
Diversification – Subsidiaries**

As end of the reporting period, the Company has three subsidiaries, as follos:

1. Peteka Karya Gapura
2. Peteka Karya Samudera
3. Peteka Karya Jala

In addition to these subsidiaries, the Company also has a joint venture company, namely PT Trans Yeong Maritime, whose share ownership is divided between PT Pertamina Trans Kontinental at 51% and Tong Yeong Tug, Co., Ltd. at 49%.

Kinerja bisnis kegiatan diversifikasi anak perusahaan selama 2021 adalah sebagai berikut:

Business performance of the subsidiary diversification activities in 2021 is as follows:

Kinerja Bisnis Kegiatan Diversifikasi Anak Perusahaan

Business Performance of the Subsidiary Diversification Activities

Uraian Description	Satuan Units	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
PT PETEKA KARYA SAMUDERA						
Cover Storage - Lease	m2	0,00%	0	8.283	8.283	8.129
Open Storage - Lease	m2	10,09%	842	9.185	8.343	21.703
Cargo Handling	R/T	22,58%	343.302	1.863.867	1.520.565	1.752.854
Fasilitas Dermaga Dock Facilities	hari days	-25,02%	-388	1.163	1.551	1.648
Jumlah Call Kapal Total Ship Call	call	58,09%	1.027	2.795	1.768	1.989
Jumlah Supply Air ke Kapal Total Water Supply to the Ship	ton	-89,92%	-15.940	1.787	17.727	22.789
PT PETEKA KARYA GAPURA						
SDM yang Dikelola Managed HR	crew	8,23%	518	6.814	6.296	4.984
PT PETEKA KARYA JALA						
General Trading	PO		(180)	233	413	348
Pengerukan Dredging	ports	0,00%	0	4	4	3
PT TRANS YEONG MARITIME						
Jumlah Kapal Operasi Total Operating Vesels	unit	0,00%	0	8	8	8
Operation Days of Owned Fleet	hari days	7,26%	186	2.749	2.563	2.900

PT Peteka Karya Samudera

PT Peteka Karya Samudera (“PKS”) bergerak dibidang kepelabuhanan yang meliputi kegiatan bongkar muat dan sewa pergudangan serta *cargo handling*.

Pada 2021 jumlah pergudangan yang disewakan adalah seluas 8.283 m², sama dengan tahun 2020. Jumlah *cargo handling* telah tertangani

PT Peteka Karya Samudera

PT Peteka Karya Samudera (“PKS”) is engaged in the port sector, which includes loading and unloading activities and warehousing leases as well as *cargo handling*.

In 2021, the number of warehouses for lease is 8,283 m², same as 2020. Total *cargo handling* that was handled achieved 1,863,867 R/T,



sebesar 1.863.867 R/T, mengalami peningkatan 22,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1.520.565 R/T.

Jumlah pemakaian fasilitas dermaga pada 2021 mencapai 1.163 hari, atau mengalami penurunan 25,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1.551 hari. Penurunan ini didorong oleh terdampak dari tidak diperpanjangnya kontrak kegiatan bongkar batu bara milik PT Ecogreen Oleochemicals dan menurunnya kunjungan kapal untuk kegiatan bunker BBM dan Air. Jumlah call pemanduan kapal mencapai 2.795 call, mengalami peningkatan 58,09% dari tahun 2020.

Adapun jumlah *supply* air ke kapal pada tahun 2021 tercatat sebesar 1.787 ton atau turun 89,92%. Penurunan ini disebabkan menurunnya kunjungan kapal untuk *bunker* BBM dan Air.

PT Peteka Karya Gapura

PT Peteka Karya Gapura ("PKG") bergerak di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari *crew* Kapal PTK dan JAPOM Pertamina. Pada tahun 2021, pasokan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 8,23% atau setara dengan personel menjadi 6.814 personel dari semula 6.296 personel pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat penambahan kapal di PTK sehingga PKG pemenuhan *crew* untuk kapal-kapal *small craft* PTK, kemudian adanya pengelolaan TKJP Marine Dockyard Sorong dan TKJP Marine di MOR III yang sebelumnya tidak dikelola oleh PKG serta pengelolaan Keagenan Charter Kapal Domestik (KCKD) PTK di seluruh lokasi Marine Region.

PT Peteka Karya Jala

PT Peteka Karya Jala ("PKJ") bergerak di bidang pengerukan (*dredging*) dan *general trading*. Perusahaan telah melakukan pengerukan

increased by 22.58% compared to the previous year of 1,520,565 R/T.

Total dock facilities usage in 2021 reached 1,163 days, or decreased by 25.02% compared to the previous year of 1,551 days. This decrease was driven by the impact of the non-extension of the coal unloading activity contract owned by PT Ecogreen Oleochemicals and the decrease in ship visits for fuel and water bunker activities. Total ship guidance calls reached 2,795 calls, increased by 58.09% from 2020.

Meanwhile, total water supply to ships in 2021 was recorded at 1,787 tons or decreased by 89.92%. This decrease was due to a decrease in ship visits for fuel and water bunkers.

PT Peteka Karya Gapura

PT Peteka Karya Gapura ("PKG") is engaged in the manpower sector, which consists of PTK Ship Crew and JAPOM Pertamina. In 2021, the labor supply has increased by 8.23% or the equivalent of personnel to 6,814 personnel from the original 6,296 personnel in 2020. This increase is due to the addition of ships in PTK so that PKG crew fulfillment for small craft PTK vessels, then there is the management of TKJP Marine Dockyard Sorong and TKJP Marine at MOR III which were not previously managed by PKG as well as management of the PTK Domestic Ship Charter Agency (KCKD) in all Marine Region locations.

PT Peteka Karya Jala

PT Peteka Karya Jala ("PKJ") is engaged in dredging and general trading. The Company has carried out 4 (four) dredging work spots

pada tahun 2021 sebanyak 4 (empat) spot pekerjaan pengerukan, yaitu Pengerukan Cilacap Area 70 dan CIB, Pengerukan RDMP RU V Balikpapan, Pengerukan Terminal BBM Bula dan Pengerukan di area PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

PT Trans Yeong Maritime

PT Trans Yeong Maritime ("TYM") merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara PT Pertamina Trans Kontinental dengan Tong Yeong Tug, Co., Ltd., dari Korea. TYM bergerak dibidang perkapalan. Pada tahun 2021 jumlah *own fleet* Perusahaan sebanyak 8 unit.

Adapun *operation days of owned fleet* pada tahun 2021 sebesar 2.749 meningkat 7,26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 2.563 hari. Peningkatan ini disebabkan karena:

1. Tahun 2021 Perusahaan mampu meniadakan *docking* (tidak ada *docking*).
2. Aktif melakukan improvement di pemeliharaan kapal dengan pengoptimalan PMS (*Preventive Maintenance System*).
3. Menyediakan minimum *spare part* dan *critical spare part*.
4. Melakukan pengaturan ulang crew management untuk meminimalkan dampak Covid-19.
5. Memaksimalkan layanan konsumen sehingga meningkatkan *customer satisfaction* indeks melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pengguna jasa.

Pendapatan Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan - Diversifikasi Usaha

Pendapatan dari jasa operasi kepelabuhan mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan segmen lainnya. Pada tahun 2021, jasa operasi kepelabuhan

dredging in 2021, such as Cilacap Area 70 and CIB Dredging, RU V Balikpapan RDMP Dredging, Bula Fuel Terminal Dredging and Dredging in the PT Pertamina Hulu East Kalimantan (PHKT) area.

PT Trans Yeong Maritime

PT Trans Yeong Maritime ("TYM") is a joint venture between PT Pertamina Trans Kontinental with Tong Yeong Tug, Co., Ltd. from Korea. TYM is engaged in shipping. In 2021, the number of the Company's own fleets is 8 units.

Operation days of the owned fleets in 2021 achieved 2,749 increased by 7.26% compared to 2,563 days in previous year. The increased was driven by:

1. In 2021 the Company is able to eliminate docking (no docking).
2. Actively make improvements in ship maintenance by optimizing PMS (*Preventive Maintenance System*).
3. Provide minimum spare parts and critical spare parts.
4. Rearrange crew management to minimize the impact of Covid-19.
5. Maximizing customer service so as to increase the customer satisfaction index through good communication and coordination with service users.

Port Operations Services Segment Income - Business Diversification

Revenues from port operation services recorded the highest growth compared to other segments. In 2021, port operation services generated revenue of Rp1.38 trillion



menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,38 triliun atau turun 12,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama didorong oleh pengalihan kegiatan bisnis jasa *Port Operation Service* kepada anak usaha PTK yakni PT Peteka Karya Samudera.

Selain itu, pertumbuhan ini juga tak lepas dari penambahan bisnis baru STS FAME di Balikpapan. PT Pertamina Trans Kontinental mendapatkan penugasan dari PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan Jasa Pengelolaan Floating Storage FAME di Balikpapan. FAME (*Fatty, Acid, Methyl, Ester*) merupakan salah satu varian bahan bakar terbarukan berbahan baku lemak hewani maupun nabati. Pemerintah melalui Pertamina memiliki program untuk mulai mendistribusikan bahan bakar FAME tersebut.

Profitabilitas Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan – Diversifikasi Usaha

Profitabilitas segmen jasa kepelabuhan mengalami penurunan karena turunnya pendapatan dari segmen jasa ini.

or decreased by 12.69% compared to the previous year. This decrease was mainly driven by the transfer of Port Operation Service business activities to PT Peteka Karya Samudra, a subsidiary of PTK.

In addition, this growth is also related to the addition of the new STS FAME business in Balikpapan. PT Pertamina Trans Kontinental received an assignment from PT Pertamina (Persero) to carry out Floating Storage FAME Management Services in Balikpapan. FAME (*Fatty, Acid, Methyl, Ester*) is a renewable fuel variant made from animal and vegetable fats as raw material. The government through Pertamina has a program to start distributing the FAME fuel.

Profitability of Port Operations Services Segment – Business Diversification

Profitability of the port services segment increases with the increase in revenue from this service segment.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan – Diversifikasi (jutaan Rupiah)

Profitability of Port operation Service Segment – Business Diversification (in million Rupiah)

Uraian Description	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
	%	Selisih Difference			
Pendapatan Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan Revenues from Port Operations Service Segment	-12,69%	-42.283	290.973	333.256	230.089
Beban Pokok Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan Cost of Revenues from Port Operations Service Segment	-6,76%	-16.271	224.295	240.566	112.969
Profitabilitas Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan Profitability of Port Operations Service Segment	-28,06%	-26.012	66.678	92.690	117.120

Seiring dengan menurunnya pendapatan yang diterima segmen jasa operasi kepelabuhan, profitabilitas atau laba kotor segmen ini turut mengalami penurunan sebesar 28,06% atau setara dengan Rp26,01 miliar menjadi Rp66,68 miliar pada tahun 2021.

Along with the increase in revenue recorded by the port operation services segment, the profitability or gross profit of this segment also increased by 28.06% or equivalent to Rp26.01 billion to Rp66.68 billion in 2021.

Profitabilitas Perusahaan per segmen usaha pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

The Company's profitability per business segment in 2021 is presented in the following table:

Tabel Profitabilitas Perusahaan Per Segmen Tahun 2021

Table of Company's Profitability by Segment in 2021

Segmen Usaha Business Segment	Realisasi Pendapatan Revenue Realization (Rp Juta/ Rp Million)	Profitabilitas Profitability (Rp Juta/ Rp Million)	Kontribusi Terhadap Pendapatan Usaha (%) Contribution to Operating Income (%)
Shipping Activities	1.851.164	576.695	48,70
Marine Services	1.652.735	473.065	43,48
Logistic Services	297.088	62.375	7,82
Total	3.800.987	1.112.135	100,00



Rencana Strategis 2022 - 2027

Strategic Plan 2022-2027

Adanya pandemi Covid-19 berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja perusahaan pada sektor energi, termasuk Perusahaan dengan bidang usaha industri pelayaran dan jasa maritim. Beberapa *key issues* tren global dan tren domestik akibat Pandemi Covid-19 yang akan mempengaruhi industri pelayaran dan jasa maritim, diantaranya:

- Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak negara menerapkan berbagai macam pembatasan terkait lepas sandar kapal ataupun proses pergantian awak kapal.
- Digitalisasi industri maritim membutuhkan infrastruktur tambahan demi mendukung tren *e-commerce* yang terus berkembang.
- Pengembangan teknologi *logistic* digital melalui program pendampingan dan peningkatan integrasi data lebih ditingkatkan daripada akses pendanaan.
- Di Indonesia, diperkirakan kebutuhan energi akan kembali normal di tahun 2022. Kebutuhan bahan bakar minyak diproyeksikan akan tetap tumbuh meskipun dengan rata-rata pertumbuhan yang lebih lambat.

Selain pandemi, meningkatnya *issue* terkait energi terbarukan juga turut mempengaruhi industri pelayaran dan jasa maritim. Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain yang disertai dengan rencana peraturan terkait pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) menggunakan perusahaan pelayaran dan asuransi Indonesia mempengaruhi jasa keagenan kapal. Hal ini disebabkan industri perkapalan domestik belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kenaikan permintaan yang timbul akibat peraturan baru tersebut, sehingga keagenan kapal impor mengalami penurunan.

The Covid-19 pandemic outbreak has a direct and indirect impacts on the performance of companies in the energy sector, including companies in the shipping and maritime services industry. Several key issues are global trends and domestic trends due to the Covid-19 pandemic which will affect the shipping and maritime services industry, including:

- The Covid-19 pandemic has caused many countries to impose various kinds of restrictions regarding ship docking or the process of changing crew members.
- The digitalization of the maritime industry requires additional infrastructure to support the growing trend of *e-commerce*.
- Development of digital logistics technology through mentoring programs and increased data integration is more enhanced than access to funding.
- In Indonesia, it is estimated that energy demand will return to normal in 2022. The demand for fuel oil is projected to continue to grow although at a slower average growth rate.

Apart from the pandemic, the increasing issues related to renewable energy also affected the shipping industry and maritime services. Government policies related to the use of biofuels as other fuels accompanied by regulatory plans related to the transportation of CPO (*Crude Palm Oil*) using Indonesian shipping and insurance companies affect ship agency services. This is because the domestic shipping industry does not yet have sufficient capacity to handle the increase in demand arising from the new regulation, thereby the agency for imported vessels has decreased.

Sasaran Strategis Perusahaan Secara Umum

General Strategic Objectives of the Company

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang selaras dengan tema strategis perusahaan yaitu pertumbuhan agresif dengan layanan dan operasional terbaik, maka ditetapkan sasaran strategis perusahaan secara umum adalah sebagai berikut:

In order to realize the vision, mission and strategic objectives that are in line with the company's strategic theme, namely aggressive growth with the best service and operations, the company's general strategic goals are set as follows:



1 **PENDAPATAN: tren pertumbuhan 20% sepanjang tahun 2021-2026 (tahun 2020 diabaikan karena pandemi Covid-19), dengan proyeksi pencapaian pada tahun 2026 senilai Rp10,2 triliun.**

INCOME: 20% growth trend throughout 2021-2026 (ignored 2020 due to the Covid-19 pandemic), with a projected achievement in 2026 of Rp10.2 trillion.

2 **EBITDA: tren pertumbuhan 19% sepanjang tahun 2021-2026 (tahun 2020 diabaikan karena pandemi Covid-19), dengan proyeksi pencapaian pada tahun 2026 senilai Rp2,22 triliun.**

EBITDA: 19% growth trend throughout 2021-2026 (ignored 2020 due to the Covid-19 pandemic), with a projected achievement in 2026 of Rp2.22 trillion.

3 **Laba Bersih: tren pertumbuhan 26% pada tahun 2021-2026 (tahun 2020 diabaikan karena pandemi Covid-19), dengan proyeksi pencapaian pada tahun 2026 mencapai Rp1,32 triliun.**

Net Profit: 26% growth trend in 2021-2026 (ignored 2020 due to the Covid-19 pandemic), with the projected achievement in 2026 reaching Rp1.32 trillion.



Strategi Perusahaan

Demi mewujudkan sasaran strategis di atas, maka pengembangan strategi korporat Perusahaan diarahkan sebagai berikut:

1. Jasa Pelayaran

- a. Meningkatkan *operational excellence* yang mengutamakan aspek K3LL, kompetensi awak kapal, dan *standard Service Level Agreement* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- b. Penambahan jenis dan jumlah armada kapal milik untuk melayani segmen industri minyak & gas melalui sinergi grup Pertamina dan kemitraan strategis.
- c. Diversifikasi basis pelanggan dalam lingkup grup Pertamina, KKKS, dan pasar potensial di sektor migas dan maritim.
- d. Efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan kapal melalui program perawatan armada kapal secara terintegrasi antara pengawas (*superintendent*), awak kapal, galangan kapal, dan vendor dengan optimalisasi sistem informasi digital *Planned Maintenance System*.
- e. Pemantauan dan pembaruan sertifikat laik laut kapal (*seaworthiness*) untuk menjaga serta mencapai target hari operasi kapal.
- f. Divestasi kapal milik yang sudah tidak produktif dan fokus pada operasional kapal dengan prospektus pasar yang lebih menguntungkan.

2. Jasa Maritim

- a. Meningkatkan kualitas jasa keagenan kapal agar lebih cepat, efektif, dan efisien dengan tarif kompetitif melalui optimalisasi sistem informasi pada aspek pelayanan administrasi, suplai kebutuhan logistik kapal, serta penyelesaian *disbursement*.
- b. Mengembangkan kompetensi SDM dan menambah aset produksi dalam

Company Strategy

To achieve strategic objectives mentioned above, the company's corporate strategic development is aligned as follows:

1. Shipping Services

- a. Increasing *operational excellence* that prioritizes OHSE aspects, crew competence, and standard Service Level Agreements to meet customer needs.
- b. Adding the types and numbers of owned vessels to serve the oil & gas industry segment through the Pertamina group synergy and strategic partnerships
- c. Diversification of the customer base within the Pertamina group, KKKS, and potential markets in the oil and gas and maritime sectors.
- d. Efficiency of ship operation and maintenance costs through an integrated fleet maintenance program between supervisors (*superintendents*), ship crews, shipyards, and vendors by optimizing the Planned Maintenance System digital information system.
- e. Monitoring and renewing the ship's seaworthiness certificate to maintain and achieve the target day of the ship's operation.
- f. Divestment of unproductive owned vessels and focus on ship operations with a more profitable market prospectus.

2. Maritime Services

- a. Improve quality of ship agency services to be faster, more effective, and efficient at competitive rates through optimization of information systems on aspects of administrative services, supply of ship logistics needs, and settlement of disbursements.
- b. Developing HR competencies and adding production assets in the maritime service

bisnis jasa maritim seperti pengerukan alur pelayaran, pemeliharaan sarfas pelabuhan, teknik bawah air, suplai air baku untuk kapal & industri, penyediaan awak kapal, *ship management*, *waste management*, dan *bunker handling*.

- c. Menambah jumlah pelabuhan dalam bisnis *port operation services* melalui kegiatan *Recognized Security Organization* dan penerapan *ISPS Code*.

3. Jasa Logistik

- a. Menambah area kerja bidang kepelabuhanan melalui kemitraan dengan pemilik pelabuhan, khususnya pelabuhan strategis dengan aktivitas pelayaran yang sibuk dan frekuensi bongkar-muat yang tinggi.
- b. Membangun *logistic shorebase* yang berdekatan dengan wilayah eksplorasi blok migas lepas pantai Pertamina dan KKKS sebagai *one-stop services logistic shorebase* berstandar internasional.
- c. Menambah infrastruktur, aset produksi, dan peningkatan kompetensi SDM untuk kegiatan badan usaha pelabuhan (*freight forwarding*, *cargodoring*, *stevedoring*).

4. Digitalisasi

- a. Digitalisasi di seluruh mata rantai bisnis (*end to end*) untuk menunjang produktivitas dan kecepatan pengambilan keputusan.
- b. Meningkatkan maritime *cyber security awareness* pada awak kapal dan operator untuk keamanan pertukaran informasi elektronik.

5. Finansial

- a. Meningkatkan kelancaran arus kas perusahaan melalui restrukturisasi

business such as dredging shipping lanes, maintaining port infrastructure, underwater engineering, raw water supply for vessels & industry, provision of ship crews, ship management, waste management, and bunker handling.

- c. Increase the number of ports in the port operation services business through the activities of the Recognized Security Organization and the application of the ISPS Code.

3. Logistics Services

- a. Increase the work area in the port sector through partnerships with port owners, especially strategic ports with busy shipping activities and a high loading and unloading frequency.
- b. Build a logistics shorebase adjacent to the exploration area of Pertamina and KKKS offshore oil and gas blocks as a one-stop logistics shorebase service with international standard.
- c. Adding infrastructure, production assets, and increasing the competence of human resources for port business entity activities (*freight forwarding*, *cargodoring*, *stevedoring*).

4. Digitization

- a. Digitalization throughout the business chain (*end to end*) to support productivity and speed of decision making.
- b. Increase maritime *cyber security awareness* among crew members and operators for the security of electronic information exchange.

5. Financial

- a. Improve the smooth flow of company cash flow through restructuring of



skema pinjaman dari eksternal.

- b. Mendapatkan sumber pendanaan melalui mitra strategis untuk investasi kapal dan proyek lainnya melalui skema pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tingkat suku bunga pinjaman yang terjangkau.
- c. Percepatan perolehan piutang macet untuk menjaga arus kas perusahaan.

6. Organisasi dan Manajemen Portofolio

- a. Transformasi budaya organisasi yang *agile* dan kompetitif guna menghadapi dunia persaingan yang VUCA.
- b. Mengembangkan organisasi serta *workforce planning* yang mendukung perkembangan bisnis yang selaras dengan arah bisnis induk perusahaan.
- c. Meningkatkan *Strategic People Development & Management*.
- d. Optimalisasi portofolio Anak Perusahaan.

7. Citra Perusahaan

- a. Penerapan GCG seluruh pekerja untuk komitmen integritas, kepatuhan terhadap hukum, hubungan & lingkungan kerja, serta konflik kepentingan sesuai Tata Nilai AKHLAK.
- b. Memperluas *customer referral & social awareness* melalui penggunaan brand "Transko" sebagai identitas perusahaan dalam kegiatan bisnis korporat dan sosial perusahaan pada *platform* multimedia.
- c. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan komunitas melalui program CSR dan edukasi.

external loan schemes.

- b. Obtain funding sources through strategic partners for ship investment and other projects through short-term, mediumterm, and long-term financing schemes with affordable loan interest rates.
- c. Accelerate the acquisition of bad debts to maintain the company's cash flow.

6. Organization and Portfolio Management

- a. Agile and competitive organizational culture transformation in order to face the competitive world that is VUCA.
- b. Developing an organization and workforce planning that supports business development with the direction of the parent company business.
- c. Improve Strategic People Development & Management.
- d. Optimization of the portfolio of the Subsidiaries.

7. Corporate Image

- a. Implementation of GCG for all employees for commitment to integrity, compliance with law, relationships & work environment, as well as conflicts of interest in accordance with the 6C & AKHLAK Values
- b. Expanding customer referrals & social awareness through the use of the "Transko" brand as a corporate identity in corporate and corporate social business activities on a multimedia platform.
- c. Take an active role in community and community development activities through CSR and education programs.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Persaingan Pasar dan Kompetitor

Seiring dengan visi PT Pertamina Trans Kontinental, layanan yang diberikan terbagi menjadi 3 segmen bisnis, yaitu kegiatan penyediaan jasa pelayaran sektor energi, penyediaan jasa layanan maritim, dan penyediaan jasa logistik. Karakteristik pasar untuk kegiatan pelayaran sebagai penunjang kegiatan migas pada tahun 2021 terdapat beberapa kompetitor besar terutama pada kegiatan di sektor *upstream* dimana jenis armada yang PTK miliki masih terbatas, sehingga dari ± 500 unit kapal yang beroperasi di SH *Upstream* hanya didapatkan 11 kontrak dengan komposisi 5 unit kapal milik dan 6 unit kapal B2B.

Persaingan dalam industri ini juga ditentukan oleh beberapa variabel, namun pengaruh paling besar dari sisi teknis adalah kesesuaian spesifikasi kapal dengan permintaan *customer* serta dari sisi komersial adalah kesesuaian harga penawaran dengan pagu anggaran *customer*. Tingkat persaingan dari kedua variabel tersebut bersifat moderat mengarah kepada tinggi.

Persaingan Pasar Jasa Maritim dan Jasa Logistik

Kegiatan keagenan *tanker* dan pengelolaan administrasi pelabuhan khusus menguntungkan bagi PTK, karena karakteristik pasar bersifat monopoli karena adanya penunjukan khusus dari *captive customer* PT Pertamina (Persero) beserta afiliasinya. Kegiatan jasa maritim lainnya yaitu keagenan umum, penyedia air bersih untuk kapal dan industri dan pengerukan bersifat pasar bebas

Market Competition and Competitors

In line with PT Pertamina Trans Kontinental vision, the services provided are classified into 3 business segments, such as provision of shipping services in the energy sector, maritime services, and logistics services. Market characteristics for shipping activities to support oil and gas activities in 2021 noted some big competitors, especially in the upstream sector where the type of fleet that PTK has is still limited, so that from ± 500 vessels operating in SH Upstream, only 11 contracts were obtained with a composition of 5 units. owned vessels and 6 units of B2B vessels.

Competition in this industry is also determined by several variables, however the most significant influence from the technical side is suitability of the vessel's specifications with customer requests and from the commercial side is the suitability of the offer price with the customer's budget platform. Level of competition from the two variables is moderate to high.

Maritime Services and Logistics Services Market Competition

Tanker agency activities and special port administration management are profitable for PTK as the market characteristic is monopoly due to the special appointment of the captive customer of PT Pertamina (Persero) and its affiliated companies. Other maritime service activities, such as general agency, clean water provider for vessels and industry and dredging are free market in nature with many



dengan jumlah pemain yang besar sehingga tingkat persaingan tinggi.

Untuk kegiatan jasa logistik antara lain *freight forwarding, custom clearance, bunker agent*, pengelolaan pelabuhan dan pergudangan juga merupakan pasar bebas dengan banyak pemain besar sehingga tingkat persaingan tinggi.

Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan

Pada pertengahan tahun 2021, PT Pertamina Trans Kontinental melakukan *branding* menjadi New PTK dimana hal tersebut juga merubah pola pendekatan yang sebelumnya hanya terbagi menjadi *captive* dan *non captive*, menjadi per *key account* sebagai *counterpart* untuk tiap *subholding* yang ada di Pertamina Group. Dari sisi pemasaran masih mengedepankan *customer satisfaction*, dimana hubungan baik dengan *existing customer* terus dijaga dan *new customer* mulai dijalin. Untuk pemenuhan kebutuhan kapal, PTK masih menggunakan skema kapal baru untuk kegiatan jangka panjang yang terencana, pembelian *second hand* untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang yang tidak terencana maupun menggunakan kapal *back to back*.

Sesuai dengan visi New PTK untuk menjadi perusahaan jasa maritim terintegrasi dengan skala global pada tahun 2026, maka kami

players thereby the competition level is high.

For logistics service activities, including freight forwarding, custom clearance, bunker agents, port management and warehousing, and also a free market with many big players thereby the competition level is high.

Market Segments and Competition Landscape

In mid-2021, PT Pertamina Trans Kontinental did a branding into New PTK where it also changed the approach pattern which was previously only divided into captive and non-captive, to a per key account as a counterpart for each subholding in the Pertamina Group. From a marketing perspective, customer satisfaction is still being the priority, where good relations with existing customers are maintained and new customers are being established. To meet the vessels needs, PTK still uses new ship scheme for planned long-term activities, purchasing second hand to meet unplanned long-term needs or using back to back vessels.

Pursuant to New PTK's vision to become an integrated maritime service company on a global scale by 2026, we are trying to rebrand

berusaha melakukan *rebranding* di mata *customer* menjadi perusahaan yang bukan hanya menyediakan jasa penyediaan kapal untuk mendukung sektor energi, namun juga menjadi perusahaan yang menyediakan layanan jasa maritim dan juga jasa logistik.

Pangsa Pasar

Sejak tahun 2021, PTK menyediakan layanan jasa kepelabuhanan, jasa *marine*, dan jasa konstruksi secara *end-to-end* melalui skema *bundling* kepada *Subholding* C&T dan R&P. Selain untuk kegiatan *bundling*, untuk pekerjaan yang bersifat kondisionil/non-rutin pada *Subholding* C&T dan R&P juga difasilitasi dengan skema kontrak *unbundling*.

Di luar dari penyediaan kapal untuk captive market, secara umum PT Pertamina Trans Kontinental juga menyediakan kapal pendukung untuk terminal non-pertamina serta kapal *tanker/carrier* kecil untuk industri lain. Total armada yang dimiliki oleh PTK di dalam melayani pasar secara detail adalah sebagai berikut:

182

Marine Service Support Vessels

7

Offshore Support Vessels

Dari total 344 armada yang dimiliki oleh PTK tersebut, tersebar diseluruh wilayah operasi PTK dan terutilisasi di Pertamina (Persero) dan afiliasi beserta K3S.

Strategi Pemasaran

Mengacu kepada visi dan misi perusahaan untuk pengembangan bisnis jangka panjang dalam menghadapi persaingan di sektor bisnis pelayaran dan maritim, PTK telah menyusun strategi untuk pencapaian target pertumbuhan perusahaan yaitu sebagai berikut:

in the eyes of our customers to become a company that not only provides ship supply services to support the energy sector, but also becomes a company that provides maritime services and services. also logistics services.

Market Share

Since 2021, PTK provided port services, marine services, and construction services on an end-to-end basis through a bundling scheme to C&T and R&P Subholdings. In addition to bundling activities, conditional/non-routine work in *Subholding* C&T and R&P is also facilitated by an unbundling contract scheme.

Apart from provision of vessels for the captive market, in general PT Pertamina Trans Kontinental also provides support vessels for non-pertamina terminals as well as small tankers/carriers for other industries. The total fleet owned by PTK in serving the market in detail is as follows:

21

Oil and Gas Carriers

134

KKR

Of the total 344 fleets owned by PTK, they are spread throughout the PTK operating area and are utilized by Pertamina (Persero) and its affiliates and K3S.

Marketing Strategy

Referring to the company's vision and mission for long-term business development in the face of competition in the shipping and maritime business sector, PTK has developed strategiesto achieve the company's growth targets, as follows:



1. PTK menangani sebagian besar kegiatan keagenan kapal dalam grup Pertamina dan harus menargetkan pasar non-captive seperti keagenan kapal industri yang membutuhkan TUKS/TERSUS untuk beroperasi.
 2. Operasi STS menghadirkan potensi pasar di luar FAME STS yang saat ini ditangani oleh PTK, peluangnya sebagian besar terletak di sekitar terminal komoditas.
 3. PTK menyediakan *Freshwater Supply Showcase*.
 4. Melayani pemeriksaan kapal untuk menghadirkan peluang pasar internal yang terbatas, namun untuk memperluas lebih jauh.
 5. Menyediakan Terminal *Bunker* di Indonesia terkonsentrasi di Jawa, meskipun peluang besar di sekitar Selat Malaka dan Indonesia Timur.
 6. PTK sudah memberikan layanan OSR yang kompetitif dibandingkan *competitor* lain dan dapat mengakses pasar yang lebih luas.
 7. Untuk lebih mengembangkan usaha, selain peningkatan kapasitas, PTK juga meningkatkan kapabilitas dalam hal standar dan kualifikasi global yang diperlukan.
 8. PTK merencanakan untuk memiliki lebih banyak aset *dredging* untuk dapat menambah kapasitas dalam pelayanan dredging dan menargetkan pasar regional yang lebih besar.
 9. PTK mengamankan pangsa pasar dalam grup Pertamina, dengan tujuan inspeksi dan pemeliharaan pelabuhan.
 10. Meningkatkan volume usaha pengadaan APD & material kapal untuk kegiatan perdagangan umum.
1. PTK handles most of the ship agency activities within the Pertamina group and must target non-captive markets such as industrial ship agencies that require TUKS/TERSUS to operate.
 2. STS operations present market potential outside of FAME STS which is currently handled by PTK, most of which are located around commodity terminals.
 3. PTK provides Freshwater Supply Showcase.
 4. Serves ship inspection to present limited internal market opportunities, but to expand further.
 5. Provides Terminal Bunkers in Indonesia is concentrated in Java, although there are great opportunities around the Straits of Malacca and Eastern Indonesia.
 6. PTK has provided competitive OSR services compared to other competitors and can access a wider market.
 7. To further develop the business, in addition to capacity building, CAR also increases capabilities in terms of the required global standards and qualifications.
 8. PTK plans to have more dredging assets in order to increase capacity in dredging services and target a larger regional market.
 9. PTK secures market share within the Pertamina group, with the aim of port inspection and maintenance.
 10. Increase the business volume of procurement of PPE & ship materials for general trading activities.

Tinjauan Keuangan

Financial Review



Pembahasan kinerja keuangan komprehensif disampaikan dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers).

The following discussion of comprehensive financial performance is presented with a reference to the Consolidated Financial Statements of PT Pertamina Trans Kontinental which ended on December 31, 2021 and 2020 and was audited by a Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers).

Hasil audit Laporan Keuangan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2021 menghasilkan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian, posisi keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar

The audit process of the PT Pertamina Trans Kontinental Financial Statements 2021 generated an opinion that the accompanying consolidated financial statements has been presented fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian



Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.

Financial Accounting Standards. The Financial Statements is prepared according to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) applied in Indonesia.

Analisis Posisi Keuangan

Jumlah aset Perseroan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp7,80 triliun atau meningkat 30,11% dari tahun sebelumnya. Jumlah liabilitas Perseroan turut naik 27,39% menjadi Rp4,35triliun pada tahun 2021.

Financial Position Analysis

In 2021, the Company booked total assets of Rp7.80 trillion or increased by 30.11% from the previous year. The total liabilities of the Company also increased 27.39% to Rp4.35 trillion in 2021.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (jutaan Rupiah) Consolidated Statement of Financial Position (in million Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Aset Lancar	Current Assets	56,17%	1.213.344	3.373.379	2.160.035	1.778.646
Aset Tidak Lancar	Non-Current Assets	15,44%	592.167	4.428.482	3.836.315	2.954.877
Jumlah Aset	Total Assets	30,11%	1.805.511	7.801.861	5.996.350	4.733.523
Liabilitas Jangka Pendek	Short Term Liabilities	35,00%	812.348	3.133.013	2.320.665	1.351.807
Liabilitas Jangka Panjang	Long Term Liabilities	11,28%	123.648	1.219.734	1.096.086	1.039.575
Jumlah Liabilitas	Total Liability	27,39%	935.996	4.352.747	3.416.751	2.391.382
Ekuitas	Equity	33,71%	869.515	3.449.114	2.579.599	2.342.141
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Total Liabilities & Equity	30,11%	1.805.511	7.801.861	5.996.350	4.733.523
Kurs Nilai Tukar Akhir Tahun Per 1 USD	Exchange Rate per 1 USD	1,16%	164	14.278,00	14.105,01	13.901,01

Aset

Jumlah aset Perusahaan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp7,80 triliun, meningkat 30,11% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,99 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset lancar Perusahaan sebesar 56,17% atau setara dengan Rp1,21 triliun.

Asset

As of December 31, 2021 the Company recorded total assets Rp7.80 trillion, increased by 30.11% if compared to the previous year which amounted to Rp5.99 trillion. This increase was mainly due to the increase in the Company's non-current assets by 56.17% or equivalent to Rp1.21 trillion.

Aset (jutaan Rupiah)
Assets (in million Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Kas dan setara kas	Cash and cash equivalents	93,62%	610.885	1.263.166	652.483	714.498
Kas yang dibatasi penggunaannya	Restricted cash	0,68%	4	592	588	588
Piutang usaha	Trade receivables	80,79%	505.550	1.131.308	625.758	311.114
Pihak berelasi	Related parties	95,54%	493.011	1.009.051	516.040	86.504
Pihak ketiga	Third parties	11,43%	12.539	122.257	109.718	409.445
Aset kontrak	Contract Assets	6,34%	50.876	853.320	802.444	168.697
Pihak berelasi	Related parties	13,80%	86.266	711.387	625.121	
Pihak ketiga	Third parties	-19,96%	-35.390	141.933	177.323	
Piutang sewa pembiayaan	Finance lease receivables	1,22%	252	20.876	20.624	20.325
Persediaan	Inventories	-90,37%	-610	65	675	594
Piutang lain-lain	Other receivables	7.061,63%	6.073	6.159	86	
Pajak dibayar di muka - pajak lain-lain	Prepaid taxes – other taxes	12,30%	1.944	17.752	15.808	42.136
Uang muka dan biaya dibayar di muka	Advances and prepayments	92,79%	38.572	80.141	41.569	24.745
Aset Lancar	Current Assets	56,17%	1.213.344	3.373.379	2.160.035	1.778.646
Aset Tetap	Fixed Assets	14,64%	515.198	4.035.264	3.520.066	2.750.120
Aset hak-guna	Useful Assets	223,10%	125.677	182.009	56.332	
Aset pajak tangguhan	Deferred tax assets	28,32%	12.212	55.327	43.115	33.564
Piutang sewa pembiayaan	Finance lease receivables	-32,52%	-20.118	41.753	61.871	81.301
Penyertaan saham	Investment in shares	-25,92%	-2.099	5.999	8.098	598
Investasi pada ventura bersama	Investment in a joint venture	13,73%	10.218	84.643	74.425	73.083
Taksiran pengembalian pajak	Estimated tax refund	-96,83%	-66.611	2.179	68.790	13.161
Pajak dibayar di muka - pajak lain-lain	Prepaid taxes – other taxes	N/A	15.810	15.810	0	0
Aset lain-lain	Other Assets	51,96%	1.880	5.498	3.618	3.050
Aset Tidak Lancar	Non-Current Assets	15,44%	592.167	4.428.482	3.836.315	2.954.877
Jumlah Aset	Total Assets	30,11%	1.805.511	7.801.861	5.996.350	4.733.523

**Aset Lancar**

Aset lancar PTK tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 56,17% menjadi Rp3,37 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,16 triliun. Peningkatan ini didorong oleh naiknya kas dan setara kas serta naiknya piutang usaha khususnya dari pihak berelasi.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar perusahaan meningkat 15,44% atau sebesar Rp592,17 miliar dari Rp3,84 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,43 triliun pada tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tetap PTK.

Current Assets

In 2021, total assets of PTK increased by 56.17% to Rp3.37 trillion compared to 2020 which amounted to Rp2.16 trillion. This increase was driven by an increase in cash and cash equivalents and an increase in trade receivables, especially from related parties.

Non-Current Assets

The company's non-current assets increased by 15.44% or Rp592.17 billion from Rp3.84 trillion in 2020 to Rp4.43 trillion in 2021. This increase was mainly due to the increase in PTK's fixed assets.

Liabilitas

Hingga 31 Desember 2021, jumlah liabilitas Perusahaan mengalami kenaikan 27,39% menjadi Rp4,35 triliun. Liabilitas jangka pendek Perusahaan meningkat sebesar Rp812,35 miliar menjadi Rp3,13 triliun. Adapun liabilitas jangka panjang Perusahaan meningkat sebesar Rp123,65 miliar menjadi Rp1,22 triliun.

Liabilities

As of December 31, 2021, total liabilities increased by 27.39% to Rp4.35 trillion. Current liabilities increased by Rp812.35 billion to Rp3.13 trillion. The Company's non-current liabilities increased by Rp123.65 billion to Rp1.22 trillion.

Liabilitas (jutaan Rupiah)
Liabilities (in million Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Utang usaha	Trade payables	34,76%	224.518	870.487	645.969	486.041
Pihak berelasi	Related parties	40,11%	183.214	639.972	456.758	306.478
Pihak ketiga	Third parties	21,83%	41.304	230.515	189.211	179.563
Biaya masih harus dibayar	Accrued expenses	36,54%	419.080	1.566.119	1.147.039	562.353
Liabilitas kontrak	Contract Liabilities	22,82%	26.282	141.453	115.171	64.808
Pihak berelasi	Related parties	51,151,43%	53.709	53.814	105	-
Pihak ketiga	Third parties	-23,84%	-27.427	87.639	115.066	64.808
Utang pajak	Taxes payable	306,53%	62.639	83.074	20.435	12.864
Pajak penghasilan	Income tax	456,95%	28.879	35.199	6.320	6.667
Pajak lain-lain	Other taxes	239,18%	33.760	47.875	14.115	6.197

Liabilitas (jutaan Rupiah)
 Liabilities (in million Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Utang dividen	Dividend payable	N/A	9.937	9.937	0	0
Bagian jangka pendek atas liabilitas sewa	The current portion of the lease obligations	730,17%	198.043	225.166	27.123	-
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	The short term portion of the long term loan	-35,12%	-128.151	236.777	364.928	200.225
Liabilitas Jangka Pendek	Current Liabilities	35,00%	812.348	3.133.013	2.320.665	1.351.807
Liabilitas Sewa	Lease Liabilities	44,45%	15.021	48.815	33.794	-
Pinjaman jangka panjang	Long term loan	13,21%	116.721	1.000.607	883.886	878.268
Liabilitas imbalan pasca kerja	Post-employment benefits liability	-4,53%	-8.090	170.312	178.402	161.307
Liabilitas pajak tangguhan	Deferred tax liability	-100,00%	-4	0	4	-
Liabilitas Jangka Panjang	Non-Current Liabilities	11,28%	123.648	1.219.734	1.096.086	1.039.575
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	27,39%	935.996	4.352.747	3.416.751	2.391.382

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perusahaan pada akhir tahun 2021 sebesar Rp3,13 triliun, meningkat 35,00% atau sebesar Rp812,35 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan karena naiknya biaya yang masih harus dibayar yang cukup signifikan sebesar Rp419,08 miliar dan utang usaha khususnya terhadap pihak berelasi sebesar 34,76% menjadi Rp870,49 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan 11,28% dari Rp1,10 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,22 triliun pada tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan karena bertambahnya pinjaman jangka panjang Perseroan menjadi Rp1,00 triliun.

Current Liabilities

As end of 2021, the Company's short-term liabilities amounted to Rp3.13 trillion, increased by 35.00% or Rp812.35 billion. This increase was mainly due to a significant increase in accrued expenses by Rp419.08 billion and trade payables, particularly to related parties, by 34.76% to Rp870.49 billion.

Non-Current Liabilities

The Company's non-current liabilities increased by 11.28% from Rp1.10 trillion in 2020 to Rp1.22 trillion in 2021. This increase was mainly due to the increase in the Company's long-term loans to Rp1.00 trillion.



Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3,45 triliun atau naik 33,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya saldo laba Perusahaan tahun lalu dan tahun berjalan.

Equity

As of December 31, 2021 the Company booked total equity of Rp3.45 trillion or increased by 33.71% compared to the previous year. This increase was driven by the increase in the Company's retained earnings last year and the current year.

Ekuitas (jutaan Rupiah)
Equity (in million Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/ Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Modal saham	Share capital	59,45%	412.437	1.106.146	693.709	693.709
Tambahan modal disetor	Additional paid in capital	(2.635,03%)	(79.051)	(76.051)	3.000	3.000
Rugi komprehensif lain	Other comprehensive loss	(13,26%)	15.527	(101.555)	(117.082)	(107.656)
Saldo laba:	Retain earning:					
Ditentukan penggunaannya	Appropriated	0,00%	0	75.943	75.943	75.943
Belum ditentukan penggunaannya	Unappropriated	27,06%	520.602	2.444.631	1.924.029	1.676.927
Jumlah Ekuitas	Total Equity	33,66%	868.356	3.449.114	2.579.599	2.342.141

Analisis Laba Rugi

Perseroan mencatat kenaikan pendapatan sebesar 24,29% menjadi Rp3,80 triliun pada tahun 2021. Seiring dengan hal tersebut, laba tahun berjalan mengalami kenaikan 25,31% dari Rp423,37 miliar pada tahun 2020, menjadi Rp530,54 miliar pada tahun 2021. Adapun jumlah penghasilan komprehensif Perseroan turut tumbuh 31,99% menjadi Rp546,07 miliar pada tahun 2021.

Profit and Loss Analysis

The Company recorded an increase in revenue of 24.29% to Rp3.80 trillion in 2021. Along with this, profit for the year increased by 25.31% from Rp423.37 billion in 2020, to Rp530.54 billion in 2021. The total comprehensive income of the Company also grew by 31.99% to Rp546.07 billion in 2021.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (jutaan Rupiah) Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Pendapatan usaha	Revenue	24,29%	742.790	3.800.987	3.058.197	2.539.806
Beban pokok pendapatan	Cost of revenue	23,25%	507.302	(2.688.852)	(2.181.550)	(1.859.832)
Laba bruto	Gross profit	26,86%	235.488	1.112.135	876.647	679.974
Beban umum dan administrasi	General and administrative expenses	44,04%	140.089	(458.185)	(318.096)	(288.144)
(Beban)/ keuntungan lain-lain, bersih	Other income/ (expenses), net	-194,76%	52.498	25.543	(26.955)	35.303
Pendapatan keuangan	Finance income	-56,24%	(8.478)	6.597	15.075	8.406
Beban keuangan	Finance costs	-7,96%	4.688	(54.172)	(58.860)	(72.965)
Bagian atas laba bersih ventura bersama	Share in profit of a joint venture	25,86%	5.762	28.045	22.283	30.402
Beban pajak final	Final tax expenses	-32,26%	8.441	(17.723)	(26.164)	(18.816)
Laba sebelum pajak penghasilan	Profit before income tax	32,71%	158.310	642.240	483.930	374.161
Beban pajak penghasilan	Income tax expenses	84,47%	-51.148	(111.701)	(60.553)	(79.163)
Laba tahun berjalan	Profit for the year	25,31%	107.162	530.539	423.377	294.998
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	Remeasurement of liabilities defined benefit plan	-330,69%	35.536	24.790	(10.746)	(21.942)

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian** (jutaan Rupiah)
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in million Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Pajak penghasilan terkait	Related income tax	-175,74%	(1.949)	(840)	1.109	2.806
Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain	Changes in fair value of equity instruments through other comprehensive income	120.228,57%	(8.416)	(8.423)	(7)	0
Jumlah rugi komprehensif lain setelah pajak	Total other comprehensive loss net of tax	-261,00%	25.171	15.527	(9.637)	(19.136)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	Total comprehensive income for the year	31,99%	132.333	546.066	413.733	275.862
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:						
Pemilik entitas induk	Owners of the parent entity	25,31%	107.162	530.539	423.377	294.998
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Total comprehensive income for the year attributable to:						
Pemilik entitas induk	Owners of the parent entity	25,31%	107.162	530.539	413.733	275.862

Pendapatan Usaha

Pada tahun 2021, pendapatan usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp3,80 triliun. Jumlah tersebut meningkat 24,29% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,06 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya jasa maritim yang tumbuh 33,01% atau setara dengan Rp425,40 miliar dari Rp1,29 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,71 triliun pada tahun 2021.

Laba Kotor dan Beban Pokok Pendapatan

Perusahaan mencatat kenaikan laba kotor sebesar 26,86% atau setara dengan Rp235,49 miliar dari Rp876,65 miliar pada tahun

Operating Revenues

In 2021, the Company's operating revenues were recorded at Rp3.80 trillion. The figure increased by 24.29% compared to Rp3.06 trillion booked in 2020. This increase was mainly driven by the increase in maritime services which grew 33.01% or equivalent to Rp425.40 billion from Rp1.29 trillion in 2020 to Rp1.71 trillion in 2021.

Gross Profit and Cost of Revenues

The Company recorded an increase in gross profit of 26.86% or equivalent to Rp235.49 billion from Rp876.65 billion in 2020 to Rp1.11

2020 menjadi Rp1,11 triliun pada tahun 2021. Peningkatan ini tak lepas dari tumbuhnya pendapatan usaha Perseroan.

Beriringan dengan hal tersebut, beban pokok pendapatan turut meningkat 23,25% atau setara dengan Rp507,30 miliar menjadi Rp2,69 triliun pada tahun 2021.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha Perusahaan. Perusahaan mencatatkan kenaikan laba tahun berjalan sebesar 25,31% dari Rp423,38 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp530,54 miliar pada tahun 2021.

trillion in 2021. This increase was related to the growth in the Company's operating revenues.

Consequently, cost of revenue also increased by 23.25% or equivalent to Rp507.30 billion to Rp2.69 trillion in 2021.

Current Year Profit

The Company's profit for the year increased in line with the increase in the Company's operating revenues. The Company recorded an increase in profit for the year of 25.31% from Rp423.38 billion in 2020 to Rp530.54 billion in 2021.



ANALISIS ARUS KAS

Kas dan setara kas PTK pada akhir tahun 2021 meningkat 93,59% dari Rp652,48 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,26 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh arus kas dari aktivitas operasi. Perusahaan yang dilakukan untuk bertahan sekaligus meningkatkan bisnis Perusahaan. Saldo akhir kas yang tersedia akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, kebutuhan investasi, dan pembayaran angsuran pinjaman bank.

CASH FLOW ANALYSIS

PTK's cash and cash equivalents at the end of 2021 increased by 93.59% from Rp652.48 billion in 2020 to Rp1.26 trillion. This increase was mainly driven by cash flows from operating activities. Companies that are carried out to survive while increasing the Company's business. The ending balance of available cash will be used for working capital needs, investment needs, and bank loan installment payments.

Laporan Arus Kas Konsolidasian (jutaan Rupiah) Consolidated Statement of Cash Flows (in million Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Penerimaan kas dari pelanggan	Cash receipts from customers	31,01%	766.656	3.239.063	2.472.407	2.711.218
Pembayaran kas kepada pemasok untuk beban operasi	Cash paid to suppliers for operating expenses	2,81%	42.413	(1.549.391)	(1.506.978)	(2.005.579)
Pembayaran kepada karyawan	Cash payments to employees	4,74%	(10.704)	(236.337)	(225.633)	(204.493)
Pembayaran beban keuangan	Payment of financial expenses	-11,91%	6.292	(46.548)	(52.840)	0
Pembayaran pajak final	Final tax payment	-32,26%	8.441	(17.723)	(26.164)	0
Penerimaan kas dari pendapatan keuangan	Cash receipts from financial income	-56,24%	(8.478)	6.597	15.075	0
Pembayaran atas beban pajak penghasilan badan	Payment of corporate income tax expense	35,43%	(25.223)	(96.421)	(71.198)	(73.951)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	Net cash flow obtained from operating activities	114,87%	694.571	1.299.240	604.669	427.195
Penerimaan dividen dari ventura bersama	Receipt of dividends from joint ventures	-14,87%	-3.114	17.827	20.941	12.386
Penerimaan piutang pembiayaan	Received from lease receivables	3,84%	735	19.866	19.131	29.537
Perolehan aset tetap	Acquisition of fixed assets	4,30%	-33.258	(806.486)	(773.228)	(172.719)

Laporan Arus Kas Konsolidasian (jutaan Rupiah)
Consolidated Statement of Cash Flows (in million Rupiah)

Uraian Description		Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
		%	Selisih Difference			
Penyertaan saham	Share investment	N/A	(4.814)	4.814	0	0
Arus kas keluar bersih dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali	Net cash outflows from restructuring transactions between entities under common control	N/A	(11.531)	11.531	0	0
Kompensasi atas pembatalan aset dalam penyelesaian	Compensation for asset cancellations in progress	N/A	124.800	124.800	0	0
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	Net cash flow used for investing activities	-9,93%	72.818	(660.338)	(733.156)	(130.796)
Penerimaan pinjaman	Proceeds from loans	20,12%	77.361	461.875	384.514	227.653
Pembayaran pinjaman	Loans payment	91,94%	(228.478)	(476.998)	(248.520)	(357.935)
Pembayaran dividen	Dividend Payments	100,00%	2	0	(2)	-
Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa	Payment for lease liability interest expense	26,62%	(1.603)	(7.624)	(6.021)	-
Pembayaran liabilitas sewa	Payment of lease obligations	-89,05%	66.288	(8.149)	(74.437)	-
Arus kas bersih (digunakan)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	Net cash flows (used)/provided from financing activities	-155,63%	(86.430)	(30.896)	55.534	(130.282)
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-75,53%	-8.261	2.677	(10.938)	(12.427)
Kenaikan neto kas dan setara kas	Net increase in cash and cash equivalents	-1084,73%	672.698	610.683	(62.015)	153.690
Kas dan setara kas awal tahun	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	-8,68%	-62.015	652.483	714.498	560.808
Kas dan setara kas akhir tahun	Cash and cash equivalents at the end of the year	93,59%	610.683	1.263.166	652.483	714.498



Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2021 sebesar Rp1,30 triliun atau meningkat 114,87% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp604,67 miliar. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya penerimaan operasional atas kegiatan *Bundling Unbundling C&T* dan R&P.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 9,93% dari Rp733,16 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp660,34 miliar pada tahun 2021. Penurunan ini dikarenakan pembayaran investasi di tahun 2021 merupakan pembayaran sisa *carry over* atas pembelian investasi tahun sebelumnya serta terkendalanya proses penagihan Galangan atas *dispute* perhitungan denda.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, perusahaan menggunakan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp30,90 miliar. Sedangkan tahun 2020 perusahaan memperoleh kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp55,53 miliar. Penurunan ini terutama dikarenakan terdapat pembayaran pelunasan dipercepat atas pembiayaan Galangan DBN di Bank BSI serta pelunasan fasilitas Notional Polling PT PKG.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash flows acquired from operating activities in 2021 achieved Rp1.30 trillion or increased 114.87% compared to Rp604,67 billion in 2020. This increase was driven by the increase in operational revenues from *Bundling Unbundling C&T* and R&P activities.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash flow used for investing activities decreased by 9.93% from Rp733.16 billion in 2020 to Rp660.34 billion in 2021. This decrease was due to the investment payment in 2021 being the remaining carry over payment for the previous year's investment purchases, as well as the problem with the Shipyard collection process for the dispute over the calculation of fines.

Cash Flows from Financing Activities

Net cash flow from financing activities in 2021 decreased compared to 2020. In 2021, the company used net cash for financing activities of Rp30.90 billion. Meanwhile, in 2020 the company obtained net cash from funding activities of Rp55.53 billion. This decrease was mainly due to an accelerated settlement of the financing of the DBN Shipyard at Bank BSI and the settlement of PT PKG's Notional Polling facility.

Analisis Rasio Keuangan

Berikut adalah rasio keuangan Perusahaan dalam lima tahun terakhir:

Financial Ratio Analysis

The Company's financial ratio for the last five years is as follows:

Analisis Rasio Keuangan

Financial Ratios Analysis

Uraian Description		Satuan Units	2021	2020	2019	2018	2017
Rasio Likuiditas / Liquidity Ratios							
Rasio Kas	Cash Ratio	%	40,32	28,12	52,90	44,36	31,25
Rasio Lancar	Current Ratio	%	107,67	95,92	131,58	119,55	91,39
Rasio Solvabilitas / Solvability Ratios							
Rasio Jumlah Modal Sendiri terhadap Total Aset	Total Asset Equity to Total Assets	%	44,21	43,02	49,48	46,40	47,09
Kolektibilitas Piutang / Accounts Receivable Collectibility							
Rata-rata Periode Penagihan Piutang	Average Collection Periods (ACP)	hari	72,41	117,69	84,59	93,89	98,44
Rasio Profitabilitas / Profitability Ratios							
Ratios Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)	Return on Equity	%	18,18	19,64	14,41	15,62	11,10
Imbalan Investasi (ROI)	Return on Investment	%	14,59	13,73	13,57	13,42	10,85
Marjin Laba Operasi (OPM)	Operating Profit Marjin (OPM)	%	17,20	18,26	14,13	20,57	13,54
Marjin Laba Bersih (NPM)	Net Profit Marjin (NPM)	%	13,96	13,84	10,64	13,61	10,28
Rasio Aktivitas / Activity Ratios							
Ratios Perputaran Persediaan	Inventory Turn Over (ITO)	hari	-	-	-	-	0,07
Perputaran Jumlah Aset	Total Assets Turn Over (TATO)	%	50,47	50,98	60,14	46,98	48,92



Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek pada tahun 2021 Perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat rasio lancar dan rasio kas. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Hal ini juga mencerminkan perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan operasional harian dengan baik.

Kemampuan Perusahaan membayar utang jangka pendek dapat dilihat antara lain dari rasio lancar yang meningkat dari 95,92% pada tahun 2020 menjadi 107,67% pada tahun 2021. Kemudian rasio kas yang meningkat dari 28,12% pada tahun 2020 menjadi 40,32% pada tahun 2021. Hal ini tak lepas dari pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang mempengaruhi *cashflow* perusahaan terutama dari kegiatan operasi. Manajemen juga telah melaksanakan strategi dalam menjaga stabilitas utang jangka pendek melalui pengelolaan aset lancar maupun kas Perusahaan untuk memastikan terjaminnya pembayaran utang yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Kemampuan Perusahaan membayar utang jangka panjang tercermin pada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas Perusahaan terdiri dari rasio total modal sendiri terhadap total aset. Pada tahun 2021 rasio total modal sendiri terhadap total aset Perusahaan meningkat dari 43,02% pada tahun 2020 menjadi 44,21%. Peningkatan rasio ini disebabkan karena penambahan aset yang

Ability to Pay Debt and Accounts Receivable Collectability Level

In 2021, the Company's ability to Pay Short-Term Debt has a fairly good level of liquidity. This can be seen from the current ratio and cash ratio. A good liquidity level reflects that the company has no difficulty in paying off its short-term obligations. This also reflects that the company can carry out daily operational activities appropriately.

The Company's ability to pay short-term debt can be seen, among others, from the current ratio which increased from 95.92% in 2020 to 107.67% in 2021. Then the cash ratio increased from 28.12% in 2020 to 40.32% in 2021. This cannot be separated from the recovery after the COVID-19 pandemic that affected the company's cashflow, especially from operating activities. Management has also implemented a strategy to maintain short-term debt stability through the management of the Company's current assets and cash to ensure guaranteed repayment of debt maturing in the next 12 months.

Ability to Pay Long-Term Debt

The Company's ability to pay its long-term debt is reflected in its solvency ratio. The Company's solvency ratio consists of the ratio of total equity to total assets. In 2021 the ratio of the Company's total equity to total assets will increase from 43.02% in 2020 to 44.21%. The increase in this ratio was due to the addition of assets financed from own capital, not long-term debt to improve the company's

dibiayai dari modal sendiri, bukan utang jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang digunakan untuk mengukur periode waktu yang diperlukan Perusahaan untuk menagih piutang menjadi kas sejak selesainya pekerjaan/jasa dilakukan. Tingkat kolektibilitas piutang terdiri dari *average collection* periode (rata-rata periode penagihan). Rata-rata periode penagihan piutang Perusahaan pada tahun 2021 adalah sebanyak 72,41 hari, lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 117,69 hari. Hal ini dikarenakan pengguna jasa *shipping* telah menyesuaikan pembayaran sesuai dengan *cashflow*-nya.

Struktur Modal dan Kebijakan Atas Struktur Modal

Struktur Modal menggambarkan pembiayaan permanen yang terdiri atas utang dan modal sendiri. Perusahaan harus berupaya memiliki alternatif pendanaan yang efisien, salah satunya dengan memiliki struktur modal yang optimal.

Struktur modal Perusahaan pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

operational efficiency.

Accounts Receivable Collectable Level

The collectibility level of receivables is used to measure the period of time required by the Company to collect receivables into cash since the completion of work/services performed. The collectibility level of receivables consists of the average collection period (average collection period). The Company's average receivable collection period in 2021 is 72.41 days, faster than in 2020 which was 117.69 days. This is because shipping service users have adjusted their payments according to their cashflow.

Capital Structure and Policy on Capital Structure

Capital structure describes permanent financing consisting of debt and equity. Companies must strive to have efficient funding alternatives, one of which is by having an optimal capital structure.

The Company's capital structure in the last 3 (three) years can be seen in the following table:

**Struktur Modal** (dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Capital Structure (in millions of Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	2021	%	2020	%	2019	%
Liabilitas / Liabilities	4.352.747	55,79%	3.416.751	56,98%	2.391.382	50,52%
Ekuitas / Equity	3.449.114	44,21%	2.579.599	43,02%	2.342.141	49,48%
Aset / Assets	7.801.861	100,00%	5.996.350	100,00%	4.733.523	100,00%

Struktur modal perusahaan sedikit mengalami perubahan seiring dengan peningkatan aset yang dibiayai oleh liabilitas. Hingga akhir tahun 2021 komposisi aset Perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas sebesar 44,21%, menurun dari semula 43,02% pada tahun 2020.

Company's capital structure slightly changed in line with the increase in assets financed by liabilities. Until the end of 2021 the composition of the Company's assets financed by equity was 44.21%, a decrease from 43.02% in 2020.

Kebijakan Struktur Modal

Perusahaan terus berupaya mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis, profitabilitas, serta mempertahankan kepercayaan investor, deposan, pelanggan, dan pasar.

Capital Structure Policy

The Company continues to strive to maintain a strong capital position to support business growth, profitability, and maintain the confidence of investors, depositors, customers and the market.

Kontribusi Kepada Negara

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan pencerminan kenegaraan di bidang perpajakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, PTK berkomitmen dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak.

Contributions to The Country

Responsibility on tax payment obligation becomes a reflection of nationalism in taxation field for the national development. Therefore, PTK is committed to fulfill the obligation to pay taxes, as a taxpayer and as a tax collector.

Tahun 2021, PTK sebagai Wajib Pajak telah memberikan kontribusi Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban PPh Badan.

In 2021, PTK as a Taxpayer has contributed to the Company in fulfilling the Corporate Income Tax obligations.

Kontribusi Pajak PTK (jutaan Rupiah)
Tax Contribution (Corporate Income Tax)

Uraian Description	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease		2021	2020	2019
	%	Selisih Difference			
Pajak Kini Current Tax	84,47%	51.148	(111.701)	(67.505)	(72.900)

Key Performance Indicator (KPI) dan Tingkat Kesehatan Perusahaan

Key Performance Indikator (KPI) PTK sesuai Kontrak Manajemen antara Direksi dan Komisaris Perusahaan dengan Pemegang Saham menetapkan 6 Perspektif sebagai berikut:

1. *Economic and Social Value*
2. *Business Model Innovation*
3. *Technology Leadership*
4. *Energize Investment*
5. *Unleash Talent*
6. *Boundary KPI*

Realisasi KPI tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Realisasi KPI tahun 2021

KPI Realization in 2021

Uraian Description	2021
<i>Economic and Social Value</i>	49,40%
<i>Business Model Innovation</i>	19,42%
<i>Technology Leadership</i>	3,30%
<i>Energize Investment</i>	24,4%
<i>Unleash Talent</i>	6,60%
<i>Boundary KPI</i>	-4,00%
<i>Total</i>	98,76%

Key Performance Indicator (KPI) and Company Health Level

Key Performance Indicators (KPI) of PTK in accordance with the Management Contract between the Board of Directors and Commissioners of the Company and the Shareholders set 6 Perspectives as follows:

1. *Economic and Social Value*
2. *Business Model Innovation*
3. *Technology Leadership*
4. *Energize Investment*
5. *Unleash Talent*
6. *Boundary KPI*

KPI realization in 2021 as shown in the following table:



Tingkat Kesehatan Perusahaan

Total Nilai Kinerja Perusahaan pada tahun 2021 sebesar 88,50 dengan klasifikasi SEHAT (AA) lebih rendah dari RKAP yang sebesar 92,00 (AA). Hal ini terutama disebabkan karena nilai kinerja pertumbuhan dan operasional tahun 2021 yang tercatat lebih rendah dibandingkan dengan RKAP.

Berikut gambaran penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari aspek yang dinilai:

Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level

Uraian Description		2021		2020	
		Pencapaian Achievement	Nilai Value	Pencapaian Achievement	Nilai Value
I. Kinerja Keuangan/ Financial Performance					
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)	Return on Equity (ROE)	18,18%	20,00	19,64%	20,00
Imbalan Investasi (ROI)	Return on Investment (ROI)	14,59%	15,00	13,73%	15,00
Marjin Laba Operasi (OPM)	Operating Profit Margin (OPM)	17,20%	3,00	18,26%	2,00
Marjin Laba Bersih (NPM)	Net Profit Margin (NPM)	13,96%	3,00	13,84%	2,00
Rasio Kas	Cash Ratio	40,32%	5,00	28,12%	5,00
Rasio Lancar	Current Ratio	107,67%	4,00	95,92%	3,00
Periode Penagihan Piutang	Collection Period (CP)	72,41 hari	1,00	117,67 hari	1,00
Perputaran Persediaan	Inventory Turn Over	0,00 hari	0,00	0,00 hari	0,00
Perputaran Total Aset	Total Assets Turn Over	50,47%	3,00	50,98%	2,00
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset	Ratio of Total Equity of Acompany to Total Assets	44,21%	7,00	43,02%	7,00
Time Interest Earned Ratio (TIER)	Time Interest Earned Ratio (TIER)	20,51	3,00	15,59	3,00
Nilai Kinerja Keuangan (NKK)	Value of Financial Performance (NKK)	63,00		63,00	
NKK Setelah diproporsionalkan	NKK After being proportioned	66,00			
Klasifikasi Tingkat Kinerja Keuangan	Classification of Financial Performance	Sehat		Sehat	
II. Kinerja Pertumbuhan / Growth Performance					
Assets Productivity Growth (ASPG)	Aset Productivity Growth (ASPG)	(6,66)	0,00	2,69%	1,00
Sales Growth (SALG)	Sales Growth (SALG)	24,29	2,00	10,32%	2,00

Company Soundness Level

The total Company Performance Value in 2021 is 88.50 with the HEALTHY (AA) classification lower than the RKAP of 92.00 (AA). This was mainly due to the lower value of growth and operating performance in 2021 compared to the RKAP.

The following is an overview of the Company's Health Level assessment from the assessed aspects:

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Soundness Level

Uraian Description		2021		2020	
		Pencapaian Achievement	Nilai Value	Pencapaian Achievement	Nilai Value
Net Profit Margin Growth (NPMG)	Net Profit Margin Growth (NPMG)	0,82	0,50	12,909	2,00
Sales to Total Assets Growth (STAG)	Sales to Total Assets Growth (STAG)	(4,47)	0,00	(12,92%)	0,00
Net Profit Growth (NPG)	Net Profit Growth (NPG)	25,31	2,00	43,52%	2,00
Nilai Kinerja Pertumbuhan (NKP)	Value of Growth Performance	4,50		7,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Pertumbuhan	Classification Level of Growth Performance	Kurang Tumbuh		Tumbuh Sedang	
III. Kinerja Operasi/ Operational Performance					
Commission Days	Commission Days	101,49	3,00	104,04%	5,00
HSSE	HSSE	105,00	5,00	105,00%	5,00
Nilai Kinerja Operasi (NKO)	Value of Operational Performance	8,00		10,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Operasi	Classification Level of Operational Performance	Tumbuh Sedang		Tumbuh Tinggi	
IV. Nilai Kinerja Administrasi/ Administration Performance					
Laporan Keuangan Perusahaan Bulanan	Company's Monthly Financial Reports	7 hari kalender	2,00	7 hari kalender	2,00
Laporan Manajemen Perusahaan Bulanan	Company's Monthly Management Report	≤12 hari kalender	2,00	≤16 hari kalender	2,00
Laporan Keuangan Tahunan Audited	Audited Annual Financial Report	Januari	3,00	Januari	3,00
Rancangan RKAP	RKAP Draft	Juli	3,00	Juli	3,00
Nilai Kinerja Administrasi (NKA)	Value of Administrative Performance	10,00		10,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Administrasi	Classification Level of Administrative Performance	Tertib		Tertib	
Kinerja Keuangan	Financial Performance	66,00		63,00	
Kinerja Pertumbuhan	Growth Performance	4,50		7,00	
Kinerja Operasional	Operational Performance	8,00		10,00	
Kinerja Administrasi	Administration Performance	10,00		10,00	
Total Nilai Kinerja Perusahaan	Total value of Company Performance	88,50		90,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Perusahaan	Classification Level of Company Performance	AA SEHAT		AA SEHAT	



Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 Serta Proyeksi Tahun 2022

Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Operasional

Beberapa indikator operasional menunjukkan pencapaian melampaui target 2021 seperti jumlah *commission days*, *call keagenan/agency call*, serta *charter & brokerage*. Adapun indikator yang belum tercapai adalah jumlah *commercial days* dan COA. Perusahaan juga telah menetapkan target untuk tahun mendatang sebagai berikut:

Comparison Between 2021 Target and Realization and The 2022 Projection

Comparison Between Target, Realization and Operational Projection

Several operational indicators show the achievement of exceeding the 2021 target, such as the number of operation days, Contract of Affair (COA), and business diversification. The indicators that have not been reached are the number of commission days, operation days, COA, and charters & brokerage. The company has also set targets for the following year:

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Operasional (dalam Ribuan Rp) Comparisons between Target, Realization, and Operational Projections (in Rp thousand)

Uraian Description	Satuan Units	Target Target 2021	Realisasi Realization 2021	Pencapaian Achievement 2021	Proyeksi Projection 2022
<i>Commission days</i>	hari	79.964	83.281	104,15%	109.820
<i>Commercial Days</i>	hari	83.700	82.883	99,02%	121.135
<i>Call Keagenan/ Agency Call</i>	call	1.670	2.194	131,39%	28.780
<i>Charter & Brokerage</i>	hari	19.380	20.425	105,39%	26.754
<i>Contract of Affreightment (COA)</i>	KL	1.000.000	660.761	66,08%	700.000

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Keuangan

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan

Pada tahun 2021 jumlah aset Perseroan terealisasi sebesar Rp8,28 triliun atau 126,80% terhadap target yang telah ditetapkan sebesar Rp6,53 triliun. Jumlah liabilitas Perseroan sebesar Rp4,83 triliun atau 132,29% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3,65 triliun. Adapun jumlah ekuitas Perseroan tercatat

Comparison between Financial Targets, Realizations and Projections

Comparison between Financial Targets, Realizations, and Projected Positions

In 2021, the Company's total assets were realized at Rp8.28 trillion or 126.80% of the set target of Rp6.53 trillion. The Company's total liabilities amounted to Rp4.83 trillion or 132.29% of the set target of Rp3.65 trillion. The Company's total equity was recorded at Rp3.45 trillion or 119.83% of the set target of

sebesar Rp3,45 triliun atau 119,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,88 triliun. Adapun Perusahaan telah menetapkan target untuk satu tahun mendatang sebagai berikut:

Rp2.88 trillion. The Company has set targets for the coming year as follows:

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan (dalam Jutaan Rp)
Comparisons between Target, Realization, and financial Projections (in thousand Rupiah)

Uraian Description		Target Target 2021	Realisasi Realization 2021	Pencapaian Achievement 2021	Proyeksi Proyeksi 2022
Jumlah Aset	Total Assets	6.527.512	7.801.861	119,52%	8.768.398
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	3.650.208	4.352.747	119,25%	4.682.461
Jumlah Ekuitas	Total Equity	2.877.304	3.449.114	119,87%	4.085.937

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi

Pada tahun 2021, pendapatan usaha Perseroan tercapai 84,30% atau terealisasi Rp3,78 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp4,49 triliun. Sedangkan laba tahun berjalan tercapai 102,19% atau terealisasi Rp526,82 miliar. Adapun Perseroan telah menetapkan target satu tahun mendatang untuk pendapatan usaha sebesar Rp5,27 triliun dan laba tahun berjalan sebesar Rp559,24 miliar

Comparison between Target, Realized and Projected Profit and Loss

In 2021, the Company's operating revenues reached 84.30% or realized Rp3.78 trillion from the targeted Rp4.49 trillion. Meanwhile, the profit for the year reached 102.19% or Rp526.82 billion was realized. The Company has set a target for the coming year for operating revenues of Rp5.27 trillion and profit for the year of Rp559.24 billion.

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi (dalam Jutaan Rp)
Comparisons between Target, Realization, and Profit or Loss Projections (in million Rupiah)

Uraian Description		Target Target 2021	Realisasi Realization 2021	Pencapaian Achievement 2021	Proyeksi Proyeksi 2022
Pendapatan usaha	Revenue	4.488.093	3.800.987	84,69%	5.278.874
Beban pokok pendapatan	Cost of revenue	(3.101.147)	(2.688.852)	86,71%	(3.472.477)
Laba kotor	Gross profit	1.386.947	1.112.135	80,19%	1.806.397
Laba sebelum pajak penghasilan	Profit before income tax	660.921	642.640	97,23%	694.312
Beban pajak penghasilan	Income tax expenses	(145.403)	(111.701)	76,82%	(135.067)
Laba tahun berjalan	Profit for the year	515.518	530.539	102,91%	559.244



Realisasi Pemasaran

PT Pertamina Trans Kontinental merupakan Anak Perusahaan PT Pertamina International Shipping yang bergerak di bidang Pelayaran dan Jasa Maritim. PT Pertamina Trans Kontinental memiliki 3 region, 3 (tiga) Anak Perusahaan dan 1 (satu) Perusahaan Patungan dengan kegiatan usaha meliputi:

Marketing Realization

PT Pertamina Trans Kontinental is a subsidiary of PT Pertamina International Shipping which is engaged in Shipping and Maritime Services. PT Pertamina Trans Kontinental has 3 regions, 3 (three) Subsidiaries and 1 (one) Joint Venture with business activities including:

Segmen Bisnis Business Segment	Lingkup Bisnis Business Scope	Deskripsi Deskripsi	
<i>Shopping Activities</i>	Utilisasi Kapal Milik Utilization of Owned Vessels	Mencakup kegiatan: a. Transportir BBM, produk olahan kimia dan gas cair menggunakan kapal tanker, tug & barge dan SPOB. Kegiatan bisnis ini dilakukan menggunakan skema kontrak sewa kapal (<i>time charter dan spot charter</i>) dan <i>contract of affreightment</i> (COA). b. Kapal <i>harbour tug, mooring boat</i> dan <i>small marine craft</i> untuk menunjang operasional sarana pelabuhan, membantu masuk-keluar kapal tanker di area pelabuhan/TBBM dan navigasi di area marine. c. <i>Offshore supply vessel</i> (AHTS, Utility vessel/MPV) untuk mendukung kegiatan transportasi logistik di area lepas pantai.	Includes activities: a. Transport fuel, chemical processed products and liquefied gas using tankers, tug & barges and SPOB. This business activity is carried out using a ship charter contract scheme (time charter and spot charter) and a contract of affreightment (COA). b. Harbor tugs, mooring boats and small marine craft to support the operation of port facilities, assisting the entry and exit of tankers in the port area/TBBM and navigation in the marine area. c. Offshore supply vessel (AHTS, Utility vessel/MPV) to support logistics transportation activities in offshore areas.
	Utilisasi kapal <i>back-to-back</i> Back-to-back vessel utilization	Jasa pengangkut muatan BBM yang menggunakan basis perhitungan tarif angkut per jumlah muatan melalui pengoperasian kapal milik PTK dan/ atau kapal milik pihak ketiga secara <i>back-to-back</i> .	PTK leases and markets ships belonging to third parties to PTK customers/employers, by calculating the income margin as a ship brokerage.
	Jasa transportir BBM dengan sistem COA Fuel transportation service with COA system	PTK melalui Region dan Anak Perusahaan (PT Peteka Karya gapura) mengelola kapal milik Pertamina dari sisi pengoperasian kapal (<i>ship management</i>) termasuk <i>maintenance dan repair</i> .	Fuel carrier services that use the basis of calculating freight rates per total cargo through the back-to-back operation of ships owned by PTK and/or vessels owned by third parties.

Segmen Bisnis Business Segment	Lingkup Bisnis Business Scope	Deskripsi Deskripsi	
	Pengelolaan kapal non-milik Managemen of non owned vessels	PTK melalui Region dan Anak Perusahaan (PT Peteka Karya Gapura) mengelola kapal milik Pertamina dari sisi pengoperasian kapal (<i>ship management</i>) termasuk <i>maintenance</i> dan <i>repair</i> .	PTK through its Branch and Subsidiary (PT Peteka Karya Gapura) manages Pertamina's ships from the ship operation side (<i>ship management</i>) including <i>maintenance</i> and <i>repair</i> .
Marine Services	Jasa keagenan kapal Ship agency services	Mencakup kegiatan: - Keagenan kapal tanker milik PTK dan <i>tanker charter</i> milik Pertamina. - Pengurusan perizinan masuk dan keluar kapal di pelabuhan (<i>inward & outward clearance</i>) - Pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor & Ekspor barang (PIB & PEB) - Menyiapkan kebutuhan kapal dan <i>handling crew</i> - Mempertanggungjawabkan jasa layanan kapal.	Includes activities: - PTK's tanker agency and Pertamina's tanker charter. - Management of ship entry and exit permits at the port (<i>inward & outward clearance</i>) - Processing of Import & Export Declaration documents (PIB & PEB) - Prepare ship and handling crew needs - Account for ship services.
	Port Operation Services	Mencakup kegiatan: - Pengurusan administrasi Pelabuhan Khusus - Kegiatan <i>Recognized Security organization</i> dan ISPS Code di pelabuhan	Includes activities: - Special Port administration - Recognized Security organization and ISPS Code activities at the port
	Pengelolaan kapal non-milik Management of non owned vessels	PTK melalui Region dan Anak Perusahaan (PT Peteka Karya Gapura) mengelola kapal milik Pertamina dari sisi penyediaan awak kapal (<i>Crewing</i>)	PTK through its Branch and Subsidiary (PT Peteka Karya Gapura) manages Pertamina's ships from the crewing side.
	Bisnis jasa marine lain yang dijalankan oleh Region & Anak Perusahaan PTK Other marine service businesses run by PTK Branch & Subsidiaries	- Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Marine (JAPOM) dan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) di lingkungan Pertamina oleh PT Peteka Karya Gapura (AP PTK) - Revitalisasi sarana tambat milik Pertamina oleh PT Peteka Karya Jala (AP PTK) - Pengelolaan Limbah di Pelabuhan melalui AP PT Peteka Karya Tirta (AP PTK) - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal oleh AP PT Peteka Karya Samudera (AP PTK)	- Provision of marine operational support services (JAPOM) and labor (<i>labor supply</i>) within Pertamina by PT Peteka Karya Gapura (AP PTK) - Revitalization of Pertamina's mooring facilities by PT Peteka Karya Jala (AR PTK) - Waste Management at Ports through AP PT Peteka Karya Tirta (AR PTK) - Provision of and/or ship delay services by AP PT Peteka Karya Samudera (AP PTK)



Segmen Bisnis Business Segment	Lingkup Bisnis Business Scope	Deskripsi Deskripsi	
Logistics	Badan usaha Pelabuhan Port business entities	Jasa keagenan yang mengurus penerimaan, penyimpanan, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterima ke tangan penerima (<i>freight forwarding</i>) oleh PT Peteka Karya Samudera (AP PTK)	Agency services that take care of receiving, storing, packing, measuring, weighing, handling document completion, issuing transportation documents, calculating transportation costs, insurance claims by sending these goods until they are received into the hands of the recipient (<i>freight forwarding</i>) by PT Peteka Karya Samudera (AP PTK)
		Jasa membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/ truk ke dalam kapal (<i>stavedoring</i>) oleh PT Peteka Karya Samudera (AP PTK)	Services of unloading goods from the ship to the dock/ barge/truck or loading goods from the dock/ barge/truck onto the ship (<i>stavedoring</i>) by PT Peteka Karya Samudera (AP PTK)
		Jasa pemindahan barang setelah di bongkar dari kapal di dermaga ke gudang atau tempat penumpukan (<i>cargodoring</i>) oleh PT Peteka Karya Samudera (AP PTK)	Services for moving goods after being unloaded from ships at the dock to warehouses or <i>cargodoring</i> by PT Peteka Karya Samudera (AP PTK)
		Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk labuh-tambat kapal, bongkar-muat barang & peti kemas	Provision and/or jetty services for mooring, loading/unloading goods & containers
		Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal	Provision and/or ship delay services
	Pengelolaan Logistik Logistics Management	• Pengelolaan air baku untuk kebutuhan kapal dan industri oleh PT Peteka Karya Tirta (APPTK). • Penyediaan Tenaga Kerja (<i>Man Power</i>) untuk kebutuhan di lingkungan PTK Group dan di luar PTK Group. • <i>Bunker agent & bunker handling</i>. • Pengelolaan <i>Logistic Base</i> terpadu	• Management of raw water for ship and industrial needs by PT Peteka Karya Tirta (APPTK). • Provision of Manpower (<i>Man Power</i>) for the needs of the PTK Group and outside the PTK Group. • Bunker agent & bunker handling. • Integrated Logistic Base Management

Sejalan dengan target PT Pertamina (Persero) sebagai *Parent Company* untuk menjadi *Asian Energy Champion* di tahun 2025, PTK juga menetapkan target untuk menjadi Perusahaan Jasa Maritim yang Terintegrasi dengan Skala Global pada Tahun 2026. Sebagai bagian dalam mencapai target tersebut dalam menjalankan bisnisnya PTK menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang meliputi *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence* dan *Fairness* (TARIF) serta prinsip kehati-hatian (*prudent*) berdasarkan analisis manajemen risiko.

Dengan tema strategisnya "*Aggressive Growth with Safe & Excellent Services*" memberikan layanan terbaik secara berkelas dunia kepada *stakeholder*-nya, akan memberikan energi positif bagi Perusahaan dalam menghadapi tantangan dan pencapaian target tahun 2021. Program kerja utama Tahun 2021 yaitu melakukan penambahan jumlah armada dan pengembangan diversifikasi usaha (*dredging, logistic base, fresh water supply, crewing agent dan keagenan*) dengan target Laba Bersih Tahun 2021 (RKAP Revisi) sebesar Rp512,52 miliar melalui pencapaian Revenue yang diperkirakan sebesar Rp4,49 triliun. PTK memiliki strategi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dengan memperbesar pasar *existing* dan pengembangan usaha baru. PTK telah dan terus berupaya menjadi perusahaan yang sehat, baik dari aspek keuangan maupun pertumbuhan, dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan secara konsolidasi sebesar 20% dengan target pendapatan secara konsolidasi sebesar Rp10,218 triliun dan target laba bersih sebesar Rp1,32 triliun pada tahun 2026.

In line with target of PT Pertamina (Persero) as the Parent Company to become an Asian Energy Champion in 2025, PTK also has set the target to become a Global Integrated Maritime Services Company by 2026. As part of the target achievement in running its business, PTK applies the principles Good Corporate Governance which includes Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness (TARIF) and prudent principles based on risk management analysis.

With its strategic theme "*Aggressive Growth with Safe & Excellent Services*" providing the best world-class services to its stakeholders, will provide positive energy for the Company in facing challenges and achieving targets in 2021. The main work program in 2021 is to increase the number of fleets and develop business diversification (*dredging, logistics base, fresh water supply, crewing agent and agency*) with a 2021 Net Profit target (Revised RKAP) of Rp512.52 billion through the achievement of an estimated Revenue of Rp4.49 trillion.

1. Growth by expanding existing markets and developing new businesses
PTK has been and continues to strive to be a healthy company, both in terms of finance and growth, with an average consolidated revenue growth of 20% with a consolidated revenue target of Rp10.218 trillion and a net profit target of Rp1.32 trillion in 2026.



2. Customer focus

Perbaikan terus menerus berfokus pada kepuasan pelanggan dan layanan jasa maritim terpadu (*one-stop maritime services provider*)

3. Operational Excellence & Services

Menjadi perusahaan pelayaran dan jasa maritim yang memberikan kehandalan operasi dan standard layanan tinggi kepada pelanggan:

- Memprioritaskan aspek kualitas, kesehatan, keselamatan keamanan dan lindung lingkungan (*quality, health, safety, security and environment – QHSSE*) dalam operasional Perusahaan dengan target *zero number of accident & zero oil spill*;
- Menyediakan armada yang handal termasuk kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan standar yang berlaku;
- Pemasaran kapal secara penuh sesuai target perusahaan;
- Pengelolaan operasi secara efektif & efisien;
- Memastikan 90% dari piutang tahun berjalan dapat terbayar.

4. Human & Information Technology Capital

- Sumber daya manusia kompeten & handal yang sesuai dengan tata nilai AKHLAK;
- Digitalisasi dan optimalisasi proses bisnis yang terintegrasi untuk kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan.

5. Menciptakan Sinergi

- Membangun kemitraan antar entitas grup Pertamina;
- Membangun kemitraan antar entitas nasional (BUMN dan swasta nasional).

Sementara rencana strategi peningkatan *commission days* kapal milik di antaranya:

2. Customer focus

Continuous improvement focusing on customer satisfaction and integrated maritime services (*one-stop maritime services provider*)

3. Operational Excellence & Services

To become a shipping and maritime services company that provides reliable operations and high service standards to customers:

- Prioritizing aspects of quality, health, safety, security and environmental protection (*quality, health, safety, security and environment – QHSSE*) in the Company's operations with a target of zero number of accidents & zero oil spill;
- Providing a reliable fleet including compliance with all applicable regulations and standards;
- Fully ship marketing according to company targets;
- Effective & efficient operation management;
- Ensuring 90% of the current year's receivables can be paid.

4. Human & Information Technology Capital

- Competent & reliable human resources in accordance with the moral values;
- Digitization and optimization of integrated business processes for speed and accuracy of decision making.

5. Creating Synergy

- Building partnerships between Pertamina group entities;
- Building partnerships between national entities (BUMN and national private).

Meanwhile, the strategic plans for increasing the *commission days* of owned vessels include:

- a. Peningkatan *Planned Maintenance System* untuk meningkatkan kinerja kapal milik.
- b. Pelaksanaan *docking repair* maksimal 25 hari.
- c. Penerapan *self maintenance* kapal yang melibatkan *crew* di kapal cargo.
- d. Menjaga *regulation compliance* dan *customer requirement*.
- e. Peningkatan kompetensi *crew* kapal melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Penerapan *reward & punishment*.
- g. Peningkatan percepatan pengadaan barang dan jasa.

- a. Improved *Planned Maintenance System* to improve the performance of owned vessels.
- b. The *docking repair* is a maximum of 25 days.
- c. Implementation of ship *self maintenance* involving *crew* on cargo ships.
- d. Maintain *regulation compliance* and *customer requirements*.
- e. Increasing the competence of the ship's *crew* through appropriate trainings.
- f. Application of *reward & punishment*.
- g. Increased acceleration of the procurement of goods and services.

Investasi Barang Modal

Realisasi investasi tahun 2021 tercapai sebesar USD37.752 (ribu), atau 78,29% dari RKAP tahun 2021 yang ditargetkan sebesar USD48.218 (ribu) atau setara Rp703,98 miliar.

Realisasi Investasi Tahun 2021

Total Investasi pada RKAP 2021 adalah USD48.218 (ribu) yang terdiri dari Investasi *Business Development* sebesar USD47.341 (ribu) dan *Non-Business Development* sebesar USD878 (ribu). Realisasi Pembayaran Proyek Investasi Tahun 2021:

- Bulan Januari 2021 pembayaran 1 Unit *Fighting Craft Big* sebesar USD 79 ribu dan pembayaran 4 unit *Fighting Craft Small* sebesar USD 275 ribu.
- Bulan Februari 2021 pembayaran 4 unit *Fighting Craft Big* sebesar USD 308 ribu, pembayaran 1 unit *Fighting Craft Small* sebesar USD 68 ribu, dan pembayaran 12 (dua belas) unit Harbour Tug sebesar USD 7.486 ribu.
- Bulan Maret 2021 pembayaran 3 Unit Harbour Tug 3200 HP sebesar USD 3.441 ribu, pembayaran 9 unit RBB Oil Combat sebesar USD 1.254 ribu, pembayaran 3

Capital Goods Investment

Investment realization in 2021 reached USD37,752 (thousand), or 78.29% of the 2021 RKAP which was targeted at USD48,218 (thousand) or equivalent to Rp703.98 billion.

Investment Realization in 2021

Total Investment in RKAP 2021 is USD48,218 (thousand) consisting of Business Development Investment of USD47,341 (thousand) and Non-Business Development of USD878 (thousand). Realization of Investment Project Payments in 2020:

- In January 2021 payment of 1 Unit of Fighting Craft Big in the amount of USD 79 thousand and payment of 4 units of Fighting Craft Small in the amount of USD 275 thousand.
- In February 2021 payment of 4 units of Fighting Craft Big in the amount of USD 308 thousand, payment of 1 unit of Fighting Craft Small in the amount of USD 68 thousand, and payment of 12 (twelve) units of Harbor Tug in the amount of USD 7,486 thousand.
- In March 2021 payment of 3 units of Harbor Tug 3200 HP amounting to USD 3,441 thousand, payment of 9 units of RBB Oil Combat amounting to USD 1,254 thousand,



- unit RBB Passenger sebesar USD 503 ribu, dan pembayaran 6 unit RBB Oil Combat sebesar USD 868 ribu.
- Bulan April 2021 pembayaran 6 unit RBB Oil Combat 7 meter sebesar USD 827 ribu, 3 unit RBB Oil Combat 9 meter sebesar USD 649 ribu, pembayaran RBB Oil Combat 7 meter sebesar USD 137 ribu, pembayaran RBB passenger sebesar USD 79 ribu, dan Pembayaran 1 Lot Heavy Equipment PSTB sebesar USD 78 ribu.
 - Bulan Mei 2021 pembayaran 3 Unit Harbour Tug 3200 HP sebesar 2.341 ribu, pembayaran 16 Unit RBB Oil Combat sebesar USD 795 ribu, pembayaran 5 Unit RBB Oil Combat sebesar USD 349 ribu dan pembayaran 3 unit RBB penumpang sebesar USD 535 ribu.
 - Bulan Juni 2021 pembayaran 1 Lot Heavy Equipment USD 1.046 ribu, pembayaran 20 Unit RBB Oil Combat sebesar USD 0,3 ribu, pembayaran 16 Unit RBB Oil Combat sebesar USD 3,0 ribu, pembayaran 12 Unit Harbour Tug sebesar USD 1.549 ribu, pembayaran 5 Unit RBB Oil Combat sebesar USD 0,3 ribu, pembayaran 3 Unit RBB Passenger sebesar USD 108 ribu, dan pembayaran 5 unit RBB LDPE sebesar USD 201 ribu.
 - Bulan Juli 2021 pembayaran 5 Unit Harbour Tug 3200 HP sebesar USD 2.174 ribu, pembayaran 20 Unit RBB Oil Combat sebesar USD 136 ribu, pembayaran cooling tower AC sebesar USD 11 ribu, dan pengadaan 1 Unit Backhoe Barge sebesar USD 53 ribu.
 - Bulan Agustus 2021 pembayaran 23 Aluminium Boat sebesar USD 380 ribu, 20 RBB Oil Combat sebesar USD 967 ribu dan pembayaran 5 Harbour Tug sebesar USD 801 ribu.
 - Bulan September 2021 pembayaran 9 *Fighting Craft (big)* sebesar USD 305 ribu, 6 *Fighting Craft (small)* sebesar USD 66 ribu, payment of 3 units of RBB Passenger amounting to USD 503 thousand, and payment of 6 units of RBB Oil Combat amounting to USD 868 thousand.
 - In April 2021 payments for 6 units of RBB Oil Combat 7 meters for USD 827 thousand, 3 units for RBB Oil Combat 9 meters for USD 649 thousand, payment for RBB Oil Combat 7 meters for USD 137 thousand, payment for RBB passenger for USD 79 thousand, and Payment 1 Lot of PSTB Heavy Equipment amounting to USD 78 thousand.
 - In May 2021 payment of 3 Units of Harbor Tug 3200 HP in the amount of 2,341 thousand, payment of 16 Units of RBB Oil Combat of USD 795 thousand, payment of 5 Units of RBB Oil Combat of USD 349 thousand and payment of 3 units of RBB Passenger in the amount of USD 535 thousand.
 - In June 2021 payment of 1 Lot Heavy Equipment USD 1,046 thousand, payment of 20 Units of RBB Oil Combat of USD 0.3 thousand, payment of 16 Units of RBB Oil Combat of USD 3.0 thousand, payment of 12 Harbor Tug units of USD 1,549 thousand, payment of 5 units of RBB Oil Combat amounting to USD 0.3 thousand, payment of 3 units of RBB Passenger amounting to USD 108 thousand, and payment of 5 units of RBB LDPE amounting to USD 201 thousand.
 - In July 2021 payment of 5 Units of Harbor Tug 3200 HP in the amount of USD 2,174 thousand, payment of 20 Units of RBB Oil Combat in the amount of USD 136 thousand, payment for AC cooling tower in the amount of USD 11 thousand, and procurement of 1 Unit Backhoe Barge in the amount of USD 53 thousand.
 - In August 2021, payments for 23 Aluminum Boats amounting to USD 380 thousand, 20 RBB Oil Combat in the amount of USD 967 thousand and payments for 5 Harbor Tugs in the amount of USD 801 thousand.
 - In September 2021, payment of 9 Fighting

20 RBB Oil Combat sebesar USD 279 ribu dan pembayaran 5 Harbour Tug sebesar USD 1.775 ribu.

- Bulan Oktober 2021 pembayaran 9 Fighting Craft (big) sebesar USD 28 ribu, 5 RBB Oil Combat sebesar USD 424 ribu, 1 Lot Heavy Equipment PSTB sebesar USD 3.271 ribu dan pembayaran 5 Harbour Tug sebesar USD 40 ribu.
- Bulan November 2021 pembayaran 12 Harbour Tug 3,200 HP (Phase 3) sebesar USD 183ribu, 5 Harbour Tug 3,200 HP (Phase 2.1) sebesar USD 22 ribu, pengadaan 1 Backhoe Barge AP PKJ sebesar USD 199 ribu dan pengadaan digitalisasi PTK sebesar USD 302 ribu.
- Bulan Desember 2021 pembayaran 12 Harbour Tug 3,200 HP (Phase 3) sebesar USD 1.600 ribu, 6 Harbour Tug 3,200 HP (Phase 2.2) sebesar USD 723 ribu, 9 Fighting Craft (Big) sebesar USD 16 ribu, 1 Alumunium Boat sebesar USD 15 ribu, 5 Harbour Tug 3,200 HP (Phase 2.1) sebesar USD 286 ribu, pengadaan 1 Kapal Keruk (secondhand) AP PKJ sebesar USD 90 ribu, pengadaan digitalisasi PTK sebesar USD 347 ribu dan penyertaan modal PTK untuk pembentukan SPV sebesar USD 336 ribu.

Crafts (big) of USD 305 thousand, 6 Fighting Craft (small) of USD 66 thousand, 20 RBB Oil Combat of USD 279 thousand and payment of 5 Harbor Tugs of USD 1,775 thousand.

- In October 2021, payment of 9 Fighting Craft (big) of USD 28 thousand, 5 RBB Oil Combat of USD 424 thousand, 1 Lot of PSTB Heavy Equipment of USD 3,271 thousand and payment of 5 Harbor Tugs of USD 40 thousand.
- In November 2021 payment for 12 Harbor Tugs 3,200 HP (Phase 3) for USD 183 thousand, 5 Harbor Tugs for 3,200 HP (Phase 2.1) for USD 22 thousand, procurement of 1 Backhoe Barge AP PKJ for USD 199 thousand and procurement of PTK digitization for USD 302 thousand.
- In December 2021 payment of 12 Harbor Tugs 3,200 HP (Phase 3) for USD 1,600 thousand, 6 Harbor Tugs for 3,200 HP (Phase 2.2) for USD 723 thousand, 9 Fighting Craft (Big) for USD 16 thousand, 1 Aluminum Boat for USD 15 thousand, 5 Harbor Tugs 3,200 HP (Phase 2.1) of USD 286 thousand, procurement of 1 AP PKJ dredger of USD 90 thousand, procurement of PTK digitization of USD 347 thousand and PTK capital participation for the formation of SPV of USD 336 thousand.



Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment on Capital Expenditure Investment

Sepanjang 2021, Perusahaan tidak melakukan ikatan material atas investasi barang modal. Dengan demikian, pembahasan ini tidak dapat mengungkapkan nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi & langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Throughout 2021, the Company did not make material commitments for capital expenditure investments. Thus, this discussion cannot reveal the names of the parties entering into the ties, the purpose of the ties, the source of funds expected to fulfill the ties, the currency to be denominated & the steps the company plans to take to protect the risks from foreign currency positions. which is related.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Subsequent Material Information and Facts After The Date of The Accountant's Report

Setelah tanggal 31 Desember 2021, terdapat penurunan kondisi ekonomi sebagai akibat wabah Covid-19, yang sangat mempengaruhi diantaranya permintaan atas barang dan jasa. Manajemen telah menilai dampak dari kejadian ini terhadap kegiatan operasional Grup dan meyakini bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan yang perlu diperhitungkan dalam jangka pendek walaupun dampak jangka panjang sulit untuk diprediksi saat ini. Manajemen akan terus memonitor hal ini dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa depan.

After December 31, 2021, there was declined in economic conditions as a result of the Covid-19 outbreak, which greatly affects the demand for goods and services. Management has assessed the impact of this incident on the Group's operations and believes that there is no significant negative impact that needs to be taken into account in the short term although the long term impact is difficult to predict at this time. Management will continue to monitor this matter and take necessary steps to address the associated risks and uncertainties associated with it in the future.

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Pada tahun 2021 PTK memberikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp9,94 miliar.

In 2021 PTK pay dividends to shareholders of Rp9.94 billion.

Program Kepemilikan Saham Bagi Manajemen (MSOP) dan Pekerja (ESOP)

Management and Employee Stock Option Plan

Selama tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan/atau *Employee Stock Option Program* (ESOP).

Throughout 2021, the Company does not offer any management and or employee stock option plan (MSOP/ ESOP).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds From Public Offering

PT Pertamina Trans Kontinental adalah perseroan terbatas tertutup dan sampai dengan akhir tahun 2021 tidak pernah mencatatkan saham di bursa manapun. Oleh karena itu, laporan ini tidak menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

PT Pertamina Trans Kontinental is a closed limited liability company and as end of 2021 it has never listed shares on any stock exchange. Therefore, this report does not convey information related to the actual use of proceeds from the public offering.



Buy Back Saham dan Buy Back Obligasi

Buy Back Shares and Buy Back Bonds

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham maupun obligasi dari pihak lain. Dengan demikian Laporan ini tidak menampilkan informasi terkait tujuan pembelian kembali saham maupun obligasi, dan sumber dana yang digunakan untuk membeli kembali saham maupun obligasi.

As end of 2021, the Company did not buy back shares or bonds from other parties. Therefore, this report does not display information related to the purpose of buying back shares or bonds, and the source of funds used to buy back stocks and bonds.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Material Information Containing Conflict of Interest and/or Affiliated Party Transaction

Berdasarkan Peraturan OJK No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi yang mengandung benturan kepentingan ditentukan oleh pemegang saham independen. Sesuai ketentuan tersebut Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu. Sampai dengan akhir tahun 2021 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris maupun Direksi.

Pursuant to OJK Regulation No. IX.E.I regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Specific Transactions, transactions containing conflicts of interest are determined by independent shareholders. Pursuant to these provisions Independent Shareholders are shareholders who do not have a Conflict of Interest in connection with a particular transaction and /or are not an Affiliate of a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or a major shareholder who has a Conflict of Interest over a particular Transaction. Until the end of 2021 there were no transactions that contained conflicts of interest with the Board of Commissioners and Board of Directors.

Dalam operasionalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (catatan) seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hubungan, sifat, serta saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

In its operations, the Company conducts transactions with related parties. All transactions with related parties have been disclosed in the Annual Report and Financial Statements (notes) as defined in PSAK 7: Disclosure of Related Parties. Relationship, nature, and account/transaction balance with related parties are as follows:

Pihak Berelasi, Sifat Hubungan dan Transaksi

Related Parties, Nature of Relationship and Transaction

Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction	
PT Pertamina (Persero)	Induk dengan Anak Perusahaan Parent and Subsidiary	Kapal Milik, Keagenan & Diversifikasi Usaha	Milik Ship, Agency & Business Diversification
PT Pertamina Hulu Indonesia	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kapal Milik	Owned Ship
PT Pertamina Hulu Energi	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kapal Milik & Keagenan	Ship Owned & Agency
PT Pertamina Retail	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	BBM Operasional	Operational BBM
PT Pertamina Gas	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kapal Milik, Back-to-Back TC & Diversifikasi Usaha	Milik Ship, Back-to-Back TC & Business Diversification
PT Pertamina Shipping	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kapal Milik	Owned Ship
PT Nusantara Regas	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Keagenan	Agency
PT Elnusa	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kapal Milik & Charter Broker	Kapal Milik & Charter Broker
PT Pertamina Patra Niaga	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Keagenan Umum & Diversifikasi Usaha	Owned Ship & Charter Broker
PT Tugu Pratama Indonesia	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Asuransi dan Sewa Kendaraan	General Agency & Business Diversification
PT Pertamina Lubricant	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Diversifikasi Usaha, Back-to-Back TC, Pelumas Umum	General Agency, Backto-Back TC & Business Diversification
PT Pertamina EP	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Keagenan Umum, Back-to-Back TC & Diversifikasi Usaha	Keagenan Umum, Back-to-Back TC & Diversifikasi Usaha
PT Pertamina Drilling Service Indonesia	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Keagenan Umum	General Agency
PT Patra Jasa	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Perjalanan Dinas / Travel	Official Travel/Travel

**Pihak Berelasi, Sifat Hubungan dan Transaksi**

Related Parties, Nature of Relationship and Transaction

Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction	
PT Pertamina Bina Medika	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kesehatan	Health
PT Pertamina Training & Consulting	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Pelatihan & Rekrutmen	Training & Recruitment

Berikut ini adalah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi:

The following are balances and transactions with related parties:

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (dalam Ribuan Rp)

Balances and Transactions with Related Parties (in million Rupiah)

Uraian Description		2021	2021
PENDAPATAN USAHA / OPERATING REVENUES			
PT Pertamina (Persero)	PT Pertamina (Persero)	64.129	179.778
PT Pertamina International Shipping	PT Pertamina International Shipping	64.129	179.778
PT Pertamina Patra Niaga	PT Pertamina Patra Niaga	64.129	179.778
PT Kilang Pertamina International	PT Kilang Pertamina International	64.129	179.778
PT Pertamina Retail	PT Pertamina Retail	64.129	179.778
PT Perta Arun Gas	PT Perta Arun Gas	64.129	179.778
PT Pertamina Hulu Energi OSES	PT Pertamina Hulu Energi OSES	64.129	179.778
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	64.129	179.778
PT Pertamina Hulu Mahakam	PT Pertamina Hulu Mahakam	64.129	179.778
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	64.129	179.778
PT Peteka Karya Tirta	PT Peteka Karya Tirta	64.129	179.778
PT Nusantara Regas	PT Nusantara Regas	64.129	179.778
PT PGN LNG Indonesia	PT PGN LNG Indonesia	64.129	179.778
PT Pertamina Hulu Energi WMO	PT Pertamina Hulu Energi WMO	64.129	179.778
PT Pertamina EP	PT Pertamina EP	64.129	179.778
PHSS	PHSS	64.129	179.778
PT Pertamina Hulu Energi JM	PT Pertamina Hulu Energi JM	64.129	179.778
PT Pertamina Gas	PT Pertamina Gas	64.129	179.778
PT Pertamina Hulu Energi NSO	PT Pertamina Hulu Energi NSO	64.129	179.778
PT Elnusa Tbk.	PT Elnusa Tbk.	64.129	179.778
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	Others (each under Rp2,000)	64.129	179.778
Jumlah	Total	64.129	179.778
Persentase dari Jumlah Pendapatan	Percentage from Total Revenues	64.129	179.778

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (dalam Ribuan Rp)
Balances and Transactions with Related Parties (in million Rupiah)

Uraian Description		2021	2021
BEBAN POKOK PENDAPATAN/ COST OF REVENUES			
PT Pertamina (Persero)	PT Pertamina (Persero)	289.378	188.371
PT Pertamina Patra Niaga	PT Pertamina Patra Niaga	133.167	4.478
PT Perta Arun Gas	PT Perta Arun Gas	25.471	11.724
PT Peteka Karya Tirta	PT Peteka Karya Tirta	3.623	0
PT Pertamina Lubricants	PT Pertamina Lubricants	6.809	9.569
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	855	27.759
PT Pertamedika	PT Pertamedika	0	2.143
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	Others (each under Rp2,000)	4.542	1.324
Jumlah	Total	463.845	245.368
Persentase dari Jumlah beban pokok pendapatan	Percentage of Total Cost of Revenue	17,25%	11,25%

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary Event

Selama tahun 2021, tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

During 2021, there was no financial information containing extraordinary and rare events.



Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Changes In Accounting Policies Implemented by The Company In The Current Fiscal Year

Standar dan interpretasi baru/revisi lain yang berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis (Definisi Bisnis)"
- Amendemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19.
- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 110 "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 111 "Akuntansi Wa'd"
- Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 13 "Properti Investasi"
- PSAK 48 "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 66 "Pengaturan Bersama"
- ISAK 16 "Pengaturan Jasa Konsesi"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial

Other new/revised standards and interpretations applicable for financial years beginning on or after January 1, 2021 are as follows:

- Amendments to PSAK 22 "Business Combination (Business Definition)"
- Amendments to PSAK 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" regarding the interest rate benchmark reform phase 2
- Amendments to PSAK 60 "Financial Instruments: Disclosures" regarding the interest rate benchmark reform phase 2
- Amendment to PSAK 62 "Insurance Contracts" regarding the interest rate reference reform phase 2
- Amendments to PSAK 71 "Financial Instruments" regarding the interest rate benchmark reform phase 2
- Amendment to PSAK 73 "Leases" regarding interest rate benchmark reform phase 2
- Amendment to PSAK 73 "Leases" regarding lease concessions related to COVID-19.
- PSAK 112 "Accounting for Waqf"
- Annual adjustment of PSAK 110 "Accounting for Sukuk"
- Annual adjustment of PSAK 111 "Accounting Wa'd"
- 2021 annual adjustments to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"
- PSAK 13 "Investment Properties"
- PSAK 48 "Impairment of Assets Value"
- PSAK 66 "Joint Arrangements"
- ISAK 16 "Concession Service Arrangements"

The implementation of these standards did not result in substantial changes to the

terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis (Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan)”
- Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak”
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 “Sewa”
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 69 “Agrikultur”

Efektif 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang kewajiban diklasifikasikan antara lancar dan tidak lancar
- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang pengungkapan kebijakan akuntansi
- Amendemen PSAK 16 “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” tentang definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal
- Amendemen PSAK 107 “Akuntansi Ijarah” tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad ijarah.

Group's accounting policies and did not have a material impact on the consolidated financial statements for the current or prior year.

The new standards, amendments and interpretations that have been published, but are effective for the financial year beginning January 1, 2022 are as follows:

Effective January 1, 2022:

- Amendments to PSAK 22 “Business Combinations (Reference to the Conceptual Framework for Financial Reporting)”
- Amendments to PSAK 57 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts – Cost of Fulfilling Contracts”
- Annual adjustment of PSAK 71 “Financial Instruments”
- Annual adjustment of PSAK 73 “Leases”
- Annual adjustments to PSAK 69 “Agriculture”

Effective January 1, 2023:

- Amendments to PSAK 1 “Presentation of Financial Statements” regarding liabilities classified between current and non-current
- Amendments to PSAK 1 “Presentation of Financial Statements” regarding disclosure of accounting policies
- Amendments to PSAK 16 “Fixed Assets” regarding the proceeds before the intensified use
- Amendments to PSAK 25 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” regarding the definition of accounting estimates
- Amendments to PSAK 46 “Income Taxes” regarding deferred taxes related to assets and liabilities arising from single transactions
- Amendments to PSAK 107 “Accounting for Ijarah” regarding the recognition, measurement, presentation and disclosure of ijarah contracts.

**Efektif 1 Januari 2025:**

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi" tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 – informasi komparatif.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mengevaluasi dampak dari penerapan standar dan interpretasi diatas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Effective January 1, 2025:

- PSAK 74 "Insurance Contract"
- Amendments to PSAK 74 "Insurance Contracts" regarding the initial application of PSAK 74 and PSAK 71 – comparative information.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the Group is still evaluating the impact of the adoption of the above standards and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Changes In Laws and Regulations That are Significant To The Company

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan pada tahun 2021.

There is no change in laws and regulation with significant impact to the Company in 2020.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Kelangsungan usaha PTK secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perusahaan telah melakukan tinjauan untuk menetapkan asumsi-asumsi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha berdasarkan kinerja historis dan analisis kemampuan Perseroan

Sepanjang tahun 2021, PTK memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan PTK yang SEHAT dan kinerja positif sepanjang tahun. Adapun kendala yang timbul hingga memengaruhi pencapaian target Perusahaan tidak sampai mengganggu kinerja operasional dan kinerja keuangan sehingga PTK dapat melaksanakan seluruh kewajibannya.

The continuity of the PTK business is generally influenced by various factors, both internal and external. The Company has conducted reviews to determine assumptions that may affect the going concern of its business based on historical performance and analysis of the Company's capabilities.

Throughout 2021, PTK ensures that nothing has a significant effect on the Company's business continuity. This can be seen from the HEALTHY PTK financial condition and positive performance throughout the year. As for the obstacles that arise, which affect the achievement of the Company's targets, do not interfere with operational performance and financial performance so that the PTK can carry out all of its obligations.

Asesmen Manajemen Atas Hal-hal Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Manajemen menilai bahwa PTK memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelangsungan usaha Perusahaan akan dapat terjamin dengan baik dan berkelanjutan. Manajemen menilai dengan kinerja keuangan yang positif dari tahun ke tahun memberikan prospek dan jaminan positif terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan ke depan. Selain itu, Perusahaan juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Management's Assessment on Issues with Potential Significant Impacts on the Company's Business Continuity

Management considers that PTK has better growth potential. The condition indicates that the Company's business continuity will be good and sustainable. The management assesses that positive financial performance every year provides positive prospects and guarantees for the company's business sustainability going forward.



aktivitas operasional serta fungsi pendukung bisnis lainnya. Dengan berbagai strategi dan upaya yang dilakukan, PTK berkeyakinan dapat terus menjaga kelangsungan usaha serta meningkatkan kontribusi kepada PT Pertamina (Persero).

Asumsi yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan Asesmen

Asumsi yang menjadi dasar manajemen dalam meyakini kelangsungan usaha PTK di antaranya adalah kinerja dan kondisi keuangan PTK yang sehat; kepuasan pelanggan masih dipertahankan; terkait perkara pengadilan, gugatan hukum, atau masalah serupa dikelola dapat diselesaikan dengan baik; serta opini audit dari auditor yang memiliki reputasi.

In addition, the Company also continues to improve the quality of Human Resources (HR), operational activities and other business support functions. With various strategies and efforts made, PTK believes it can continue to maintain business continuity and increase its contribution to PT Pertamina (Persero).

Assumptions Applied by Management in The Assessment

The assumptions as basis of the management in ensuring continuity of the PTK business include PTK's healthy performance and financial condition; well-maintained customer satisfaction; related to legal cases, lawsuits, or similar matters managed can be resolved properly; as well as the audit opinion from a reputable auditor.



total cost saving dari biaya sewa kapal non-milik Pertamina pada tahun 2019 adalah sebesar Rp7.660.800.000/Tahun. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar **Rp7.783.146.900/Tahun.**

total cost saving from the rental fee for non-Pertamina-owned vessels in 2019 is Rp7,660,800,000 / year. Meanwhile, in 2020 the amount of Rp7,783,146,900/Year.

Rp31.296.853.620,20

Efisiensi bunker pada tahun 2020 adalah Rp31.296.853.620,20 dibanding tahun 2019 Rp14.624.999.090.

Bunker efficiency in 2020 achieved Rp31,296,853,620.20 compared to Rp14,624,999,090 in 2019.



374 call

Jumlah call kapal Konsinyasi adalah 374 call dan kapal Supplier 147 call selama tahun 2020.

The number of consignment vessels calls achieved 374 calls and Supplier ships 147 calls in 2020.



1.135.600.339 liter

Total throughput FAME selama 2020 adalah penerimaan sebesar 1.135.600.339 liter dan penyaluran sebesar 1.114.787.260 liter.

Total throughput FAME in 2020 booked revenue of 1,135,600,339 liters and distribution of 1,114,787,260 liters.

Dari total 137 unit yang akan dibayar dan pengadaan second hand (2nd hand) PTK (Harbour Tug 1 unit, Moor 1 unit, Aluminium Boat 1 unit, Fire 1 unit, Rigid Buoy 14 unit, Pilot Boat 3 unit, SPSHB 2 unit, Harbour 1 unit (2nd hand), Crew 1 unit, Desember 2020 PTK telah 36 unit kapal baru.





Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Seluruh proses bisnis di Perusahaan wajib memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Kami percaya bahwa dengan penerapan GCG maka peningkatan kinerja Perseroan secara berkelanjutan dapat terwujud.

All business processes in the company must follow the principles of Good Corporate Governance (GCG). We believe that by adopting GCG, sustainable improvements in the company's performance can be realized.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

PTK dituntut untuk dapat berkompetisi, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Perusahaan terus melakukan perbaikan agar dapat menciptakan dan meningkatkan keunggulan kompetitif-nya. Selain itu, PTK juga terus melakukan peningkatan dalam pengelolaan perusahaan. Dengan adanya pengelolaan perusahaan yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan dari pelanggan maupun stakeholder lainnya.

PTK meyakini bahwa perusahaan dapat tumbuh besar karena adanya kepercayaan yang tinggi dari seluruh stakeholder. Oleh karena itu, PTK selalu berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan perusahaan secara baik.

Perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan cara yang dapat dipertanggung-jawabkan yang mencerminkan perhatian kepada seluruh *Stakeholders*. Untuk mendukung hal tersebut, Perusahaan perlu untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Prinsip GCG). Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Prinsip-prinsip GCG di Perusahaan adalah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran (*Fairness*). Penerapan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan tercermin dalam beberapa hal berikut ini:

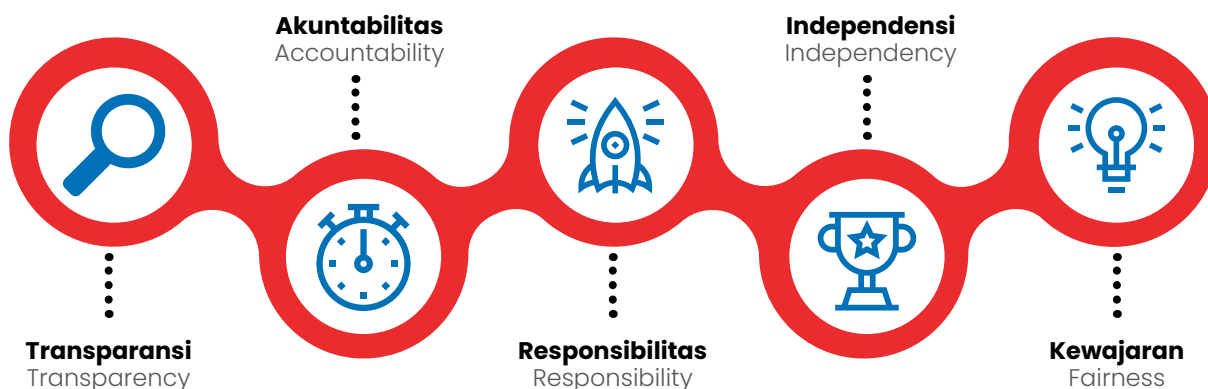
PTK is required to be able to compete, both in the domestic market and in the international market. The company continues to make improvements to create and enhance its competitive advantage. In addition, PTK also continues to make improvements in the management of the company. The good corporate management will certainly increase the trust of customers and other stakeholders.

PTK believes that the company can grow big driven by the deep trust from all stakeholders. Therefore, PTK is always committed to continuously improving and increasing the management of the company properly.

The Company conducts business activities in an accountable manner that reflects concern for all Stakeholders. To support this, the Company needs to formulate and apply the principles of good corporate management (GCG Principles). The implementation of GCG principles is very necessary, so that the Company can survive and be resilient in the face of increasingly fierce competition.

The GCG principles in the Company are Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. Implementation of GCG principles in the Company is reflected in the following points:

PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE



Prinsip GCG GCG Principles	Implementasi Implementation
 Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Openness in carrying out the decision-making process, and openness in disclosing material and relevant information about the company.
 Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Clarity of function, implementation, and accountability of organs so that the company's management is carried out effectively.
 Responsibilitas Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Conformity in the management of the company to the laws and regulations and sound corporate principles.
 Independensi Independency	Keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. A situation where the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles.
 Kewajaran Fairness	Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and laws and regulations.

Dasar Hukum Penerapan GCG

Secara umum implementasi GCG PTK mengacu kepada kaidah dan praktik yang dianut secara universal oleh korporasi global. Secara khusus penerapan GCG PTK mengacu pada ketentuan hukum-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan internal Perusahaan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi.
- Peraturan Menteri BUMN No. 01 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/ MBU/2014.
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 07 tanggal 3 Juli 2013.
- Pedoman *Code of Conduct*, No.A-002/ F1000/2019-S0 Revisi Ke 00.
- Tata Kerja Organisasi Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) No. B-001/ PTK0320/2021-S8.
- Pedoman *Code of Corporate Governance* Pertamina Trans Kontinental No.A-003/ F1000/2019-S0 Revisi Ke 00.
- Pedoman Gratifikasi, Penolakan & Penerimaan Hadiah/ Cenderamata, Hiburan (*Entertainment*), No. PDM-005/ F0000/2015-S0 Revisi - 1.
- Pedoman Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan No. A-001/PTK0320/2021-S0
- Pedoman Konflik Kepentingan/ *Conflict of Interest*, No. PDM-004/F0000/2015-S0 Revisi -1.

GCG Regulatory Framework

In general, the implementation of PTK GCG refers to the universal rules of practice that are universally adopted by global corporations. Specifically the implementation of PTK GCG refers to the provisions of applicable laws and internal company regulations as follows:

- Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Information Disclosure.
- Minister of SOEs Regulation No. 01 of 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs which has been amended by SOE Ministerial Regulation No. PER09/MBU/2014.
- Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
- Articles of Association Number 07 dated July 3, 2013.
- Code of Conduct Guidelines, No. A-002/ F1000/2019-S0 Revision 00.
- Whistleblowing System (WBS) Management Organization SOP No.B-001/PTK0320/2021-S8.
- Pertamina Trans Kontinental Code of Corporate Governance Guideline No. A-003/F1000/2019-S0 Revision 00.
- Gratification, Refusal & Acceptance of Gift/ Souvenir, Entertainment Guidelines, No.A-003/F1000/2019-S0 Revisi Ke 00.
- Guidelines for the Management of Anti-Bribery Management System No. A-001/ PTK0320/2021-S0.
- Conflict of Interest, No. PDM-004/ F0000/2015-S0 Revision 01.



- Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), No. 007/ M00000/2017-S0 Revisi Ke 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006.
- OECD *Principles of Corporate Governance* Tahun 2004.
- *The Asean Corporate Governance Scorecard* Tahun 2012.
- Guidelines on the Obligation to Submit State Officials Assets Report (LHKPN), No. 007/M00000/2017-S0 Revision-02.
- The Republic of Indonesia Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets.
- The Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption
- Indonesia General GCG Guidelines 2006.
- OECD Principles of Corporate Governance 2004.
- ASEAN Corporate Governance Scorecard 2012 .

Melalui penerapan *best practice* GCG, PTK berupaya memberikan nilai lebih kepada pemangku kepentingan diantaranya melalui sikap dan perilaku yang sejalan dengan budaya Perusahaan, memberikan pelayanan yang *excellent*, menjamin akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal serta menciptakan iklim usaha yang sehat demi keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Tujuan Penerapan GCG

Dalam penerapan GCG PTK memiliki tujuan yaitu memaksimalkan nilai Perusahaan dan terlaksananya pengelolaan secara profesional serta mandiri, menciptakan proses pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Through the implementation of GCG best practices, PTK seeks to provide added value to stakeholders including attitudes and behaviors that are in line with company culture, provide excellent services, ensure accountability through internal control systems and create a healthy business climate in the Company's business sustainability.

GCG Implementation Objectives

The GCG implementation has objectives of maximizing the Corporate values and realizing professional as well as independent management. Other objectives are focused in creating a decision-making process by all of the Company's structures based on high moral value, compliance to laws and regulations, as well as in supporting the embodiment of corporate social responsibility (CSR) in all stakeholders.

Pemegang Saham

Memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham

- Pertamina Trans Kontinental dituntut memberikan dukungan pelayanan kepada aktivitas usaha PT Pertamina International Shipping sebagai Pemegang Saham.
- Pertamina Trans Kontinental dituntut senantiasa memiliki kinerja yang baik, sehat dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan laba dan memberikan kontribusi berupa dividen kepada Pemegang Saham.

Pelanggan & Mitra Kerja

Menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra kerja

- Pertamina Trans Kontinental dituntut memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan guna menjaga kepercayaan pelanggan.
- Pertamina Trans Kontinental dituntut menjaga hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan para mitra kerja guna menjaga kepercayaan para mitra kerja.

Pekerja

Menjadi Tempat Kerja Terpercaya Dimata Pekerja

Pertamina Trans Kontinental memiliki tanggung jawab membangun hubungan kemitraan dengan pekerja, dengan menjadi tempat kerja yang ideal bagi profesional yang berinvestasi untuk pengembangan karir, dan memastikan lingkungan kerja yang kondusif bagi pekerja.

Shareholders

Providing added value to Shareholders

- Pertamina Trans Kontinental is expected to support any services to business activities of PT Pertamina (Persero) as a Shareholder.
- Pertamina Trans Kontinental is expected to continuously achieve good, sound, and sustainable performance, as well as generate profit and contribute in the form of dividend to the Shareholders.

Customers & Business Partners

Maintaining trust from the customers and business partners

- Pertamina Trans Kontinental is expected to provide the best services to customers to uphold the customers' trust.
- Pertamina Trans Kontinental is expected to maintain mutually-benefitted cooperations with business partners to uphold the customers' trust.

Employees

Becoming a Trustworthy Workplace for Employees

Pertamina Trans Kontinental is responsible for building partnerships with employees, by being an ideal workplace for professional who are investing in career development, and ensuring a conducive environment for employees.



Pemangku Kepentingan Lain

Menjaga Keseimbangan Kepentingan dari Pemangku Kepentingan Lainnya

Pertamina Trans Kontinental harus menjaga keseimbangan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan praktik pengelolaan yang sehat.

Otoritas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Aktivitas Usaha yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup

Sebagai Perusahaan jasa yang memiliki kegiatan usaha di bidang pelayaran, maritim dan logistik, Pertamina Trans Kontinental harus menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh kesadaran untuk mengelola dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan terhadap lingkungan hidup.

Sosialisasi Penerapan GCG

PTK secara berkesinambungan terus melakukan sosialisasi penerapan GCG, kepada seluruh pekerja, pejabat Perusahaan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, serta para pemangku kepentingan lain.

Selama tahun 2021 ada beberapa program/kegiatan sosialisasi GCG yang telah dilaksanakan, antara lain melalui media buletin, *wallpaper desktop* komputer Pekerja, *banner*, *broadcast*, serta acara Vendor Day.

Other Stakeholders

Keeping Balance of Interest from other Stakeholders

Pertamina Trans Kontinental should maintain the balance of interest from various other stakeholders. This is carried out by complying with the prevailing regulations and sound management practices.

Environment Management Authority

Environment-Related Business Activities

As a service company with business activities in shipping, maritime, and logistic, Pertamina Trans Kontinental should perform its business activities with extreme awareness in managing the impacts from the implemented business activities to environment.

Socialization on GCG Implementation

PTK continuously performs socialization of the GCG implementation to all employees, company executives including the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as other stakeholders.

Throughout, several GCG socialization programs/activities that has been implemented, such as via newsletter media, computer desktop wallpaper Workers, banners, broadcasts and Vendor Day events.

Roadmap dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Roadmap and Enforcement

Persiapan Penerapan GCG Persiapan Penerapan GCG

Mempersiapkan pelaksanaan GCG yang sistematis dan terstruktur sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan mulus, efisien dan efektif.

Prepare a systematic and structured GCG implementation so that its implementation can run smoothly, efficiently and effectively.



Good Corporate Governance

Memenuhi ketentuan dan peraturan (*mandatory*) maupun *Voluntary*) dalam tata kelola perusahaan.

Comply with the provisions and regulations (*mandatory* and *voluntary*) in corporate governance.



Good Governance Company

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada semua proses bisnis dengan di dukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional.

Implementation of GCG principles in all business processes supported by the availability of company guidelines from the top management level to the operational level.



Good Corporate Citizen

Menjadikan prinsip-prinsip GCG menjadi bagian dari budaya perusahaan dan menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang beretika dan bertanggung jawab.

Make GCG principles part of the corporate culture and become ethical and responsible citizens of the industry and social community.



Saat ini PTK berada pada fase *Good Governed company*. Hal-hal yang dilakukan untuk mendukung tahapan tersebut adalah :

1. Penguatan Budaya Perusahaan.
2. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
3. Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan asesmen GCG.
4. Penyebarluasan informasi WBS.

Currently, PTK is in the *Good Governed company* phase. The steps taken to support these stages are:

1. Strengthening Corporate Culture.
2. Gratification Control Unit (UPG).
3. Improved compliance with LHKPN reporting, Gratification and GCG assessment.
4. WBS information dissemination.



Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

PTK melakukan *assessment* penerapan GCG secara berkala yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Indikator/ parameter penilaian merujuk pada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, seperti yang digunakan PT Pertamina (Persero) sebagai induk Perusahaan dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Secara berkala PTK melakukan pengukuran kinerja (*assessment*) penerapan GCG. *Assessment* terakhir PTK dilakukan pada tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Prosedur Penilaian

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG pada prinsipnya bisa dilakukan sendiri oleh Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, penilaian sendiri dapat meminta bantuan (asistensi) dari penilai independen.

Penilaian juga dapat dilaksanakan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk Dewan Komisaris, melalui proses sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada

GCG Implementation Assessment

PTK regularly carries out assessment on GCG implementation. The assessment is held in accordance with Minister of SOE Regulation Number PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise. Indicators/parameters of assessment refers to Secretary of Ministry of SOE Decree Number SK16/S.MBU/2012 of 1 October 2012 on Indicators/ Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprise, as administered by PT Pertamina (Persero) as Parent Company and a State-Owned Enterprise (SOE).

The assessment is carried out to obtain an overview regarding the conditions for implementing GCG in the PTK best practices of GCG as well as identifying areas that require more continuous improvement continue. In 2020, PTK will conduct an Independent GCG assessment (Self Assessment).

Assessment Procedure

In principle, the assessment on GCG implementation is could be self-conducted by the Company. Selfassessment could use of assistance from an independent assessor.

The assessment could also be accomplished by an independent assessor appointed by the Board of Commissioners through a process, in accordance with the provisions in goods and services procurement. In a more effective and efficient point of view, the assessment could be performed by using Government institutions' service with competence in GCG, directly appointed by the Board of Directors. Results of the assessment and evaluation are then reported to GMS along with Annual

RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

Kriteria Penilaian

Ruang lingkup penilaian GCG meliputi pengujian atas semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG, yaitu:

- Komitmen terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan;
- Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
- Dewan Komisaris;
- Direksi;
- Pengungkapan informasi dan transparansi;
- Aspek lainnya.

Hasil Penilaian

Untuk tahun buku 2021, *assessment* GCG dilakukan oleh BPKP dengan hasil skor GCG yaitu 79,504 (kategori "Baik"). Hasil ini mengalami peningkatan dibandingkan skor GCG tahun buku 2019 yang dilakukan juga oleh BPKP, di mana saat itu PTK mendapatkan skor 77,730.

Penilaian *assessment* GCG Perusahaan berdasarkan beberapa aspek pengujian/ indikator/ parameter yang memiliki bobot masing-masing sesuai indikatornya dan menghasilkan nilai atau skor penilaian tersebut. Berikut ringkasan hasil penilaian/ evaluasi atas penerapan GCG pada Perusahaan:

Report submission.

Assessment Criteria

The scope of GCG assessment includes examining all aspects supporting the GCG, which are:

- Commitment on sustainable GCG implementation;
- Shareholders and GMS/Capital Owners;
- Board of Commissioners;
- Board of Directors;
- Information disclosure and transparency;
- Other aspects.

Assessment Results

For the 2020 fiscal year, the GCG assessment in CAR is carried out by self assessment with the GCG score result achieved 81.944 (classified in the "Good" category). This result experienced a significant improvement compared to the GCG score for the 2019 fiscal year, which was carried out by BPKP, where PTK achieved a score of 77.730.

The GCG assessment is based on several assessment/indicators/parameters aspects, which have their respective weights according to the indicators and produce the value or score of the assessment. The following is summary of the GCG assessment evaluation results on GCG implementation in the Company:



Komparasi Hasil Penilaian Assessment GCG Perusahaan 2019–2021

Comparison of 2018–2020 Company GCG Assessment Results

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Capaian Tahun Achievement 2021 (BPKP)		Capaian Tahun Achievement 2020 (Self Assessment)		Capaian Tahun Achievement 2019 (BPKP)	
		Skor	Capaian (%)	Skor	Capaian (%)	Skor	Capaian (%)
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Komitmen terhadap Penerapan Tata Commitment to Implementation of Sustainable Good Corporate Governance	7,000	6,512	93,03	6,924	98,91	6,671	95,30
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,000	5.915	65,72	7,190	79,89	7,060	78,44
Dewan Komisaris Board of Commissioner	35,000	29.256	83,59	28,850	82,43	26,652	76,15
Direksi Board of Director	35,000	30.726	87,79	31,587	90,25	29,971	85,63
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information disclosure and Transparency	9,000	7.095	78,83	7,394	82,16	7,376	81,96
Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	0.000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00
Nilai rata-rata Average Score	100,00	79,504		81,944		77,730	
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification of GCG Implementation Quality		"Baik"		"Baik"		"Baik"	

Beberapa hal yang menjadi area of improvement berdasarkan hasil GCG Assessment tahun buku 2021 antara lain adalah :

- Pemutakhiran/evaluasi atas Anggaran Dasar/Code of Corporate Governance, Board Manual, Code of Conduct sebagai konsekuensi reorganisasi PT PTK dan PT Pertamina (Persero) Grup;
- Aspek Pemegang Saham/RUPS: Belum diatur dalam Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan, antara lain RUPS: Tahunan, RJPP, RKA, Persetujuan Divestasi,

Some of the areas of improvement based on the results of the 2021 GCG Assessment include:

- Updating/evaluating the Articles of Association/Code of Corporate Governance, Board Manual, Code of Conduct as a consequence of the reorganization of PT PTK and PT Pertamina (Persero) Group;
- Shareholders/GMS Aspects: Not yet regulated in the Guidelines for the Management of Subsidiaries, including:

Penghapusan Aset, Pemilihan Auditor Eksternal dst.;

- Aspek Direksi : melaksanakan penanganan kendala atas jadwal delivery kapal yang tidak tepat waktu, investasi BD yang carry over, melakukan evaluasi jabatan yang vacant, kompetensi yang prioritas untuk memitigasi risiko atas kegiatan utama PT PTK.

Annual GMS, RJPP, RKA, Divestment Approval, Asset Disposal, Selection of External Auditor and so on;

- Aspects of the Board of Directors: carrying out the handling of obstacles to the delivery schedule of ships that are not on time, carry over BD investments, evaluating vacant positions, priority competencies to mitigate risks in PT PTK's main activities.

Realisasi GCG Compliance

Realisasi GCG Compliance sampai dengan Desember 2021 - 100% dari target 98%.

Agar selaras dengan metode yang digunakan oleh Pertamina, maka sejak tahun 2016 dilakukan penyesuaian metode perhitungan. Pada metode perhitungan lama pembobotan dilakukan pada hasil akhir perhitungan, sehingga pembobotan dapat terinci dalam pelaporan. Sedangkan pada metode baru, perhitungan atas kelima aspek GCG Compliance tersebut dihitung berdasarkan pembobotan yang dibebankan kepada masing-masing Pekerja dengan rincian sebagai berikut:

GCG Compliance	Bobot / Weight	
	Pekerja Wajib LHKPN LHKPN Mandatory Workers	Pekerja Non LHKPN Non LHKPN Workers
Gratifikasi/ Gratification	30%	30%
Code of Conduct	15%	20%
Col	15%	20%
LHKPN	20%	N/A
Sosialisasi/ Socialization	20%	30%
Total	100%	100%

Penerapan GCG Tahun 2021 terlaksana sebesar 100%. Penerapan praktik GCG yang dijalankan oleh PTK dilakukan melalui pendekatan *comply or explain* yaitu PTK mengungkapkan Informasi mengenai pelaksanaan rekomendasi yang tercantum dalam Pedoman atau memberikan

GCG Compliance Realization

Realization of GCG Compliance until December 2021 - 100% of the 98% target.

To be in line with the method used by Pertamina, since 2016 the calculation method has been adjusted. In the old calculation method, the weighting is carried out on the final result of the calculation, so that the weighting can be detailed in the reporting. Meanwhile, in the new method, the calculation of the five aspects of GCG Compliance is calculated based on the weight assigned to each employee with the following details:

GCG implementation in 2021 is 100% implemented. The implementation of GCG practices carried out by PTK is carried out through a comply or explain approach, namely the PTK discloses information regarding the implementation of the recommendations



penjelasan jika PTK belum atau tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Di mana dalam rekomendasi tersebut terdapat lima aspek tata kelola perusahaan yang meliputi:

1. Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham;
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris;
3. Fungsi dan Peran Direksi;
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan, dan
5. Keterbukaan informasi.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perusahaan tergambar pada organ utama tata kelola Pertamina Trans Kontinental terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk komite dan fungsi berikut ini:

- Komite Audit
- Komite Investasi dan Risiko Usaha
- Fungsi Corporate Secretary
- Fungsi Internal Audit

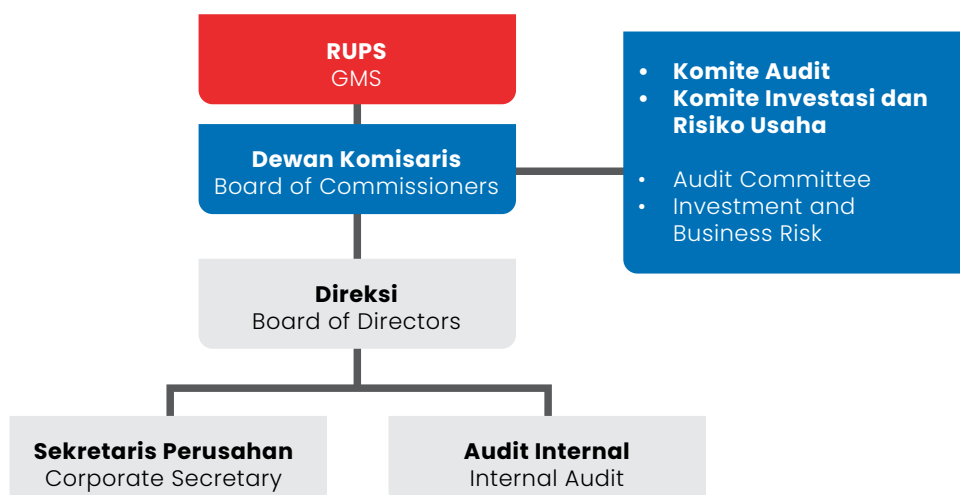
contained in the Guidelines or provides an explanation if PTK has not or has not implemented the recommendations. Where in the recommendation there are five aspects of corporate governance which include:

1. Company Relations with Shareholders in guaranteeing the rights of shareholders;
2. Functions and Roles of the Board of Commissioners;
3. Functions and Roles of the Board of Directors;
4. Stakeholder Participation, and
5. Information disclosure.

Structure and Infrastructure of Corporate Governance

According to the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the corporate governance structure is reflected in the main governance structure of Pertamina Trans Kontinental including the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors. In carrying out their duties, the Board of Commissioners and Board of Directors have established the following committees and functions:

- Audit Committee
- Investment and Business Risk Committee
- Corporate Secretary Function
- Internal Audit Function



Organ Utama Tata Kelola Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan. Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan yang penting terkait dengan pengelolaan PTK, baik untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terkait pelaksanaan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Dewan Komisaris bertugas memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam menentukan arah dan tujuan pencapaian kinerja Perusahaan. Segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Pertamina Trans Kontinental serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki *Board Manual* yang mengatur tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Direksi

Direksi memiliki fungsi utama dalam pengelolaan Perusahaan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja setiap tahunnya. Pelaksanaan tugas Direksi mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Main Corporate Governance Structure

General Meeting of Shareholders

According to the Limited Liability Companies Law and the Company's Articles of Association, General Meeting of Shareholders (GMS) assumes the highest position in the corporate governance structure and undertakes authorities that are not granted to Board of Directors or Board of Commissioners under the set limit. Shareholders perform important decision-making related to PTK management, both for short- and long- term interests in the GMS, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Board of Commissioners

Board of Commissioners has supervisory function related to Company management by the Board of Directors. The Board of Commissioners has the duty of directing and advising the Board of Directors in determining the Company's objectives and performance target. In performing the duties and responsibilities, the Board of Commissioners adheres the Articles of Association of Pertamina Trans Kontinental, as well as the prevailing laws and regulations. Moreover, the Board of Commissioners has Board Manual that regulates the work procedure of Board of Commissioners and Board of Directors. The Commissioners also should implement corporate governance principles in every activity performed.

Board of Directors

Board of Directors hold key function in Company management to achieve the determined targets and increase performance every year. The implementation of duties by the Board of Directors refers to the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, and adheres the Board



berpedoman pada tata tertib kerja (*Board Manual*) yang mengatur tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Organ Pendukung Tata Kelola

Komite-Komite

PTK memiliki Komite Audit yang mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengendalian internal dan Komite Investasi & Risiko Usaha yang mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengendalian risiko khususnya. Dalam meningkatkan kesesuaian struktur organ pendukung Dewan Komisaris sesuai Permen BUMN No.PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021, pada tanggal 30 Desember 2021, Komite Investasi & Risiko Usaha dibagi menjadi Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko.

Corporate Secretary

Corporate Secretary diangkat oleh Direksi dan bertugas membantu Direksi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya utamanya, yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan juga memiliki peran mengelola dan menjaga komunikasi antara pihak internal dengan pihak eksternal termasuk pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Audit Internal

Audit Internal berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama yang bertugas untuk memberikan masukan yang independen dan obyektif terkait pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan.

Manual which regulates the work procedure of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Board of Directors also should implement corporate governance principles in every activity performed.

Corporate Governance Supporting Structure Committees

PTK has Audit Committee that supports the Board of Commissioners in realizing internal control function, as well as Investment & Business Risk Committee that backs the Board of Commissioners in performing risk control function, especially in business investment. In improving the suitability of the supporting organ structure of the Board of Commissioners in accordance with SOE Ministerial Regulation No.PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021, on December 30, 2021, the Investment & Business Risk Committee is divided into the Investment Committee and the Risk Management Committee.

Corporate Secretary

Corporate Secretary is appointed by and in charge of assisting the Board of Directors in performing its main duties and responsibilities, related to information disclosure implementation. The Corporate Secretary also actively manages and maintain communication between internal and external parties, including shareholders and stakeholders.

Internal Audit

Internal Audit operates under the direct supervision of President Director which in charge of giving independent and objective inputs related to internal control and corporate governance process of the Company.

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

Infrastruktur tata kelola perusahaan PTK terdiri dari berbagai pedoman dan kebijakan tata kelola perusahaan atau yang disebut sebagai *soft structure* GCG.

Kebijakan tersebut meliputi *Code of Good Corporate Governance*, *Board Manual*, *Code of Conduct*, Piagam Komite, Pedoman *Conflict of Interest*, Pedoman Fungsi Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Gratifikasi, dan Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pedoman dan Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh manajemen dan pekerja yang secara berkala dilakukan sosialisasi dan evaluasi.

Corporate Governance Infrastructure

Pertamina Trans Kontinental has corporate governance infrastructure, comprising various guidelines and policies of corporate governance, or known as GCG soft structure.

Corporate governance policies cover Code of Good Corporate Governance, Board Manual, Code of Conduct, Committee Charter, Conflict of Interest Guidelines, Gratification Control Function Guidelines, Gratification Guidelines, and Submission Obligation of State Official Assets Report (LHKPN) Guidelines. The Corporate Governance Guidelines and Policies prevail for all management and employees, on which periodical socialization and evaluation are performed.

Kebijakan Tata Kelola PTK

PTK's Corporate Governance Policies

PARAMETER PENILAIAN / Assessment Parameter

Code of Corporate Governance ditetapkan berdasarkan No. A-003/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00. Pedoman mengatur mengenai:

- Referensi penerapan tata kelola perusahaan;
- Struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari organ utama (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dan organ pendukung (*Corporate Secretary*, Internal Audit, Biro Sekretariat Komisaris dan Komite Audit);
- Proses tata kelola perusahaan yang terdiri dari pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, RJPP dan RKAP, mekanisme rapat, benturan kepentingan, pengelolaan operasional, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya;
- Hubungan antara Pertamina Trans Kontinental dengan Induk dan Anak Perusahaan;
- Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan.

The Code of Corporate Governance is stipulated based on Board of Directors Decree No. A-003/F1000/2019S0 Revision-00. The guidelines regulates:

- References of corporate governance implementation.
- Corporate governance structure, consisting of the main structures (GMS, Board of Commissioners and Board of Directors), and supporting structures (Corporate Secretary, Internal Audit, Commissioner Secretariat Bureau, and Audit Committee).
- Corporate governance process, consisting of appointing and dismissing the Board of Commissioners and Board of Directors, RJPP and RKAP, meeting mechanism, conflict of interest, operational management, financial management, and others.
- Relationship between Pertamina Trans Kontinental the Parent Company, as well as the Subsidiaries.
- Relationship with stakeholders.

BOARD MANUAL / BOARD MANUAL

Mengatur mengenai tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Regulate the procedures for working relationships between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

**PEDOMAN KOMITE/ Committee Guidelines**

Kebijakan mengenai tata cara kerja Komite, meliputi:

- Piagam Komite Audit
- Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha

Policies on the Committee's work procedure include:

- Audit Committee Charter
- Investment and Business Risk Committee Charter

PEDOMAN ETIKA USAHA & TATA PERILAKU/ Code of Conduct

Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ditetapkan berdasarkan No. A-002/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00, dan menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Pertamina Trans Kontinental dalam mengelola Perusahaan.

The Code of Conduct is stipulated based on Board of Directors Decree No. A-002/F1000/2019-S0 Revision-00, and became a reference of conduct to the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees of Pertamina Trans Kontinental in managing the company.

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN / Conflict of Interest

Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ditetapkan berdasarkan No. Pdm-004/F0000/2016-S0 Revisi-01. Pedoman mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam benturan kepentingan dan mekanisme pelaporan benturan kepentingan.

The Conflict of Interest Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree No. Pdm-004/F0000/2016-S0 Revision-01. The Guidelines regulate issues related to ethics in conflict of interest and reporting mechanism on conflict of interest.

PEDOMAN FUNGSI PENGENDALIAN GRATIFIKASI / Gratification Control Function Guidelines

Pedoman Fungsi Pengendali Gratifikasi ditetapkan berdasarkan No. Pdm-005/F0000/2016-S0 Revisi-1. Pedoman mengatur prinsip dasar pengendalian gratifikasi, parameter tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi, serta mekanisme pelaporan gratifikasi.

The Gratification Control Function Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree No. Pdm-005/F0000/2016-S0 Revision-1. The Guidelines regulated basic principles of gratification control, follow-up parameter on gratification reporting management, as well as gratification reporting mechanism.

PEDOMAN GRATIFIKASI / Gratification Guidelines

Pedoman Gratifikasi, Penolakan & Penerimaan Hadiah/ Cenderamata, Hiburan (*Entertainment*) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. Pdm-003/ F0000/2016-S0 (Revisi-1). Pedoman mengatur mengenai gratifikasi. Pedoman tersebut mengatur prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan pihak ketiga.

The Gratification, Rejection & Receiving Reward/Souvenir, Entertainment Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree No. Pdm-003/F0000/2016-S0 (Revision-1). The Guidelines regulate basic principles, provisions in laws and regulations that organize gratification classification, as well as boundaries of receivment, provision of gift, and gift upon request from a third party.

PROSEDUR WHISTLEBLOWING SYSTEM / Whistleblowing System Procedure

Prosedur Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. B-008/ F1000/2019-S0 Revisi Ke-00 yang mengatur mengenai pengelolaan penanganan pengaduan dan penyingkapan *whistleblowing system*.

The Whistleblowing System (WBS) Management Procedure is stipulated based on Board of Directors Decree No. B-008/F1000/2019-S0 Revision-00 that regulates complaint management and whistleblowing system disclosure.

Memperkuat Implementasi GCG PTK

Dalam memaknai tata kelola perusahaan yang baik, PTK memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu mendorong GCG sebagai bagian dari pengelolaan Perusahaan melalui penerapan suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, kesetaraan dan tanggung jawab.

PTK telah melakukan berbagai inisiatif implementasi GCG, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen dalam mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable governance*).

Dalam rangka memperkuat implementasi GCG tahun 2021, PTK telah melakukan beberapa program yang meliputi:

- 1. Penguatan Komitmen Implementasi GCG.**
Kegiatan yang dilakukan adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Insan PTK.
- 2. Sosialisasi dan Internalisasi GCG.**
Kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan GCG bagi pekerja baru, penyegaran GCG bagi seluruh pekerja, pemberian materi GCG dan sosialisasi GCG dalam berbagai media Perusahaan.
- 3. Implementasi Pengendalian Gratifikasi.**
PTK melaksanakan implementasi pengendalian Gratifikasi serta melakukan sosialisasi Gratifikasi.
- 4. Pengelolaan Whistleblowing System.**
Pengelolaan Whistleblowing System dilakukan oleh Fungsi Legal & Compliance dan dipantau langsung oleh Chief Compliance Officer dan dapat pula bekerja sama dengan Fungsi Internal Audit untuk menindaklanjuti laporan. Tim Pengelolaan Whistleblowing System melakukan evaluasi atas pengelolaan Whistleblowing

Strengthening GCG Implementation in PTK

In interpreting good corporate governance, PTK has basic principles, including to encourage GCG as part of the management of the Company through the implementation of a system that reflects the principles of information disclosure, accountability, equality and responsibility.

PTK has carried out various GCG implementation initiatives, either independently or assisted by independent parties in achieving sustainable corporate governance.

In order to strengthen the implementation of GCG in 2021, PTK has carried out several programs including:

- 1. Strengthening Commitment to GCG Implementation.** The activities carried out were the signing of the Integrity Pact by all PTK personnel.
- 2. Socialization and Internalization of GCG.** Activities carried out include the introduction of GCG for new employees, refreshing GCG for all employees, providing GCG materials and socializing GCG in various Company media.
- 3. Implementation of Gratification Control.** PTK carries out the implementation of Gratification control and conducts Gratification socialization
- 4. Management of the Whistleblowing System.** Management of the Whistleblowing System is carried out by the Legal & Compliance Function and directly monitored by the Chief Compliance Officer and can also work together with the Internal Audit Function to follow up on reports. The Whistleblowing System Management Team evaluates the management of the



System di Perusahaan.

5. Partisipasi Aktif dalam Berbagai Perlombaan/ Award Terkait GCG.

Keikutsertaan dalam ajang APSA dan ARA.

6. Pengukuran Implementasi GCG.

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan *assessment* GCG tahun 2020, dengan pencapaian *score* pada tahun 2020 berdasarkan penilaian parameter Kementerian BUMN meningkat menjadi 81,944 atau BAIK.

7. Penerapan ISO dan SMK3

Dalam rangka melindungi pekerjaannya, PTK menerapkan OHSAS 18001:2007, sedangkan untuk menjaga mutu kepada para pelanggan, Perusahaan menerapkan ISO 9001:2008.

8. Pengukuran Kinerja

Untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan meningkatkan kinerja bisnis, PTK mengikuti Quality Management Assessment (QMA) berdasarkan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP). *Assessment* dilakukan secara menyeluruh meliputi proses dan hasil kinerja operasional dan manajerial, dan akan diberikan umpan balik berupa feedback report agar Perusahaan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus-menerus dan berkesinambungan. KKEP dilaksanakan berdasarkan Keputusan Keputusan Direktur Utama No. Kpts-62/C0000/2017-S0, tanggal 3 November 2017 tentang Penilaian dan Pencapaian Kinerja Ekselen Perusahaan Berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) dan Surat Perintah Direktur Utama No. Kpts-61/C0000/2015-S0 tanggal 3 November 2017 tentang Tim Pelaksana Quality Management Assessment (QMA) Berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP).

9. ISO 37001:2016, Pedoman sistem Manajemen Anti Suap.

Whistleblowing System in the Company.

5. Active participation in various competitions/awards related to GCG.

Participation in the APSA and ARA events.

6. Measurement of GCG Implementation.

The activity carried out was to carry out a GCG assessment in 2020, with the achievement of the score in 2020 based on the assessment of the parameters of the Ministry of SOEs increasing to 81,944 or GOOD.

7. ISO and SMK Implementation

In order to protect its employees, PTK applies OHSAS 18001:2007, while to maintain quality for customers, the Company implements ISO 9001:2008.

8. Performance Measurement

To make improvements on an ongoing basis and improve business performance, PTK follows Quality Management Assessment (QMA) based on Pertamina's Excellent Performance Criteria (KKEP). The assessment is carried out thoroughly includes processes and operational performance results and managerial, and will be given feedback in the form of a feedback report for the company to make improvements and performance improvements continuously and continuously. KKEP is implemented based on Decree President Director Decree No. Kpts-62/C0000/2017-S0, dated November 3, 2017 regarding Appraisal and Achievement of Performance Performance Criteria-Based Pertamina's Excellent Criteria (KKEP) and a Letter of Order President Director No. Kpts-61/C0000/2015-S0 November 3, 2017 concerning the Implementation Team Quality Management Assessment (QMA) Based on Pertamina's Excellent Performance Criteria (KKEP).

9. ISO 37001:2016, Anti-Bribery Management System Guidelines.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan tertinggi sekaligus memiliki wewenang tertinggi dalam tata kelola perusahaan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi seperti mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan, menunjuk Auditor Eksternal, serta menentukan jumlah kompensasi/remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun dalam batasan yang ditetapkan Anggaran Dasar.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest corporate organ as well as having the highest authority in corporate governance that is not owned by the Board of Commissioners and Directors such as appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Directors, approving amendments to the Articles of Association, approving annual reports, appointing External Auditors, and determine the amount of compensation/remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as within the limits set by the Articles of Association.

RUPS merupakan forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. RUPS berwenang mengambil seluruh keputusan yang berkaitan dengan kepentingan usaha PTK dan Anak Perusahaan dan memiliki kekuatan hukum yang sah serta mengikat dalam mengambil keputusan.

GMS acts as company structure assuming the highest power in the corporate governance structure. GMS has the authority to make all decisions related to the business interest of PTK and Subsidiaries. As the highest authority in PTK corporate governance structure, GMS has the rightful and binding power in making decisions.

Sesuai dengan *Code of Corporate Governance* (CoCG), RUPS terdiri atas:

In accordance with the *Code of Corporate Governance* (CoCG), the GMS consists of:

RUPS Tahunan, untuk mengesahkan:

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), diselenggarakan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah periode akuntansi yang baru dimulai.
- Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan, selambat-lambatnya dalam enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Annual GMS, to ratify:

- Company Work Plan and Budget (RKAP), which is held at the latest thirty days after the commencement of new accounting period.
- Annual Report and Annual Calculation, which are started at the latest six months after the last fiscal year.

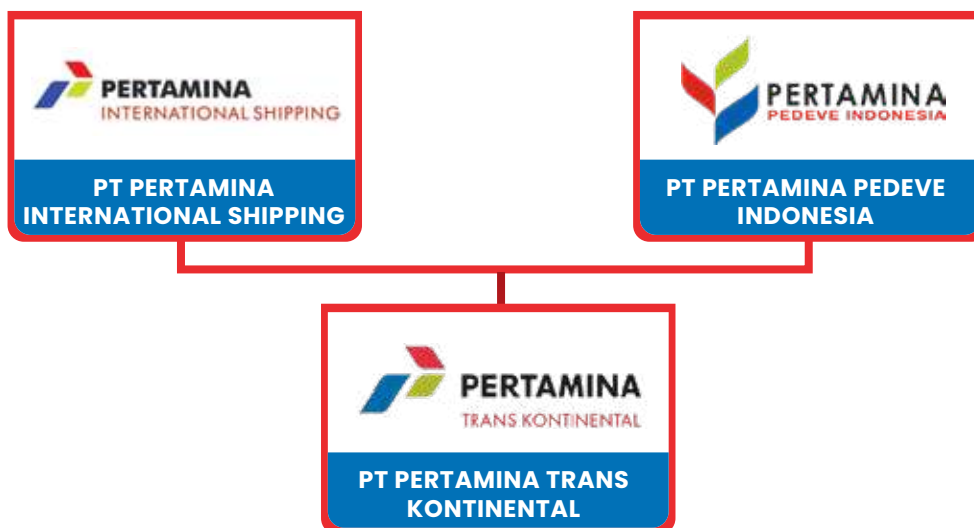
RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Komisaris dan/atau Direksi.

Extraordinary GMS which could be held anytime if it is deemed necessary by Shareholders or based on the proposal of Board of Commissioners and/or Board of Directors.

Selain itu Pemegang Saham juga dapat menyelenggarakan pengambilan Keputusan Sirkuler (RUPS Sirkuler), yakni pengambilan keputusan di luar RUPS (tanpa kehadiran fisik). Ketentuan tentang Keputusan Sirkuler diatur dalam Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai Pasal 91 UU Perseroan Terbatas, Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik, dengan syarat seluruh Pemegang Saham dengan hak suara memberikan persetujuan tertulis atas usul RUPS yang akan diputuskan.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Berikut adalah informasi mengenai struktur dan komposisi pemegang saham, serta persentase kepemilikan saham PTK per 31 Desember 2021.



Hak Pemegang Saham

Berdasarkan CoCG, hak pemegang saham antara lain:

- Menghadiri dan memberikan suara dalam pada RUPS;
- Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik kepada Komisaris

In addition, Shareholders also could organize a Circular Decision-Making (Circular GMS), which is a decision making outside the GMS (without physical attendance). Stipulation on Circular Resolutions is regulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. As per Article 91 of Limited Liability Companies Law, Shareholders are allowed to make binding decisions outside the GMS with the same legal force as when GMS Resolution is made physically, provided all Shareholders with voting rights gives a written approval to GMS proposal that will be decided.

Majority and Controlling Shareholders

The following information illustrated the structure and composition of shareholders, as well as PTK shares ownership per December 31, 2021.

Shareholders' Rights

In accordance with the CoCG, Shareholders have the rights in:

- Attending and voting in GMS;
- Obtaining material information (including the right to ask) from the Board of

maupun Direksi mengenai keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat waktu dan teratur agar memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yang diterimanya;

- Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/ atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktunya RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan;
- Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG.

Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang RUPS

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan jangka panjang Perusahaan dan dilakukan secara wajar dan transparan. Wewenang RUPS adalah sebagai berikut:

- RUPS dapat mendelegasikan Kuasa RUPS sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga independensi antar-organ Perusahaan. Kuasa RUPS bukan Komisaris Perusahaan;
- Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;

Commissioners and Board of Directors on financial and other issues relating to the Company in a thorough, prompt, and orderly manner, so that it allows the Shareholders to make capital investment decision based on the information received;

- Holding GMS in case the Board of Directors and/or Board of Commissioners are negligent to hold Annual GMS and incidentally Extraordinary GMS if deemed necessary, for example if the Company encounters significant performance;
- Acquiring explanation on GCG implementation.

The Shareholders do not perform intervention to the duties, functions, and authorities of Board of Commissioners and Board of Directors by not eliminating the authority of GMS in exercising its rights in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

The Shareholders through GMS holds the authority to perform its rights as per the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

GMS Authority

Decisions made by the GMS are based on longterm interest of the Company. The GMS and/or GMS decision-making are fairly and transparently conducted. It holds authority, such as follows:

- Having the capacity to delegate to GMS attorney in accordance with the provisions stated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. Maintaining independence among Company structures. The GMS Attorney is not the Company's Commissioner.
- Appointing and dismissing Directors and Commissioners.



- Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Direksi dan Komisaris;
- Menetapkan Auditor Eksternal untuk melakukan Audit keuangan atas laporan keuangan berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris;
- Menetapkan Remunerasi bagi Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja;
- Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik yang terkait dengan Komisaris;
- Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Komisaris dan Direksi;
- Mendelegasikan kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
- Menetapkan maksimum masa jabatan Pemangku Jabatan (PJ) bagi Komisaris dan Direksi;
- Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan untuk Laba yang Ditahan dan Cadangan; Dividen kepada Pemegang Saham; Bonus Direksi, Komisaris dan Pekerja.
- Ratifying Company Long-Term Plan (RJPP) and Company Work Plan and Budget (RKAP).
- Performing performance assessment collectively and individually on the Directors and Commissioners.
- Appointing External Auditor to perform financial Audit on the financial statement based on proposals received from the Board of Commissioners.
- Stipulating remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors by considering performance achievement.
- Stipulating policies on the possibilities of conflict related to the Board of Commissioners.
- Determining maximum number of concurrent positions allowed for a Commissioner and a Director.
- Delegating duties and authority of the Board of Directors to the Board of Commissioners.
- Stipulating maximum tenure for the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Formulating allocation of Profit for Retained Earnings and Reserves; Dividend to Shareholders; Bonus for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees.

Mekanisme Pelaksanaan RUPS

Ketentuan pelaksanaan RUPS PTK, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun sedangkan RUPS Luar Biasa diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat-tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan harus terletak di wilayah

Mechanism of GMS Implementation

The provisions of the PTK GMS, both the Annual GMS and the Extraordinary GMS are as follows:

- Annual GMS is held annually while Extraordinary GMS is organized incidentally based on an as-needed basis, with provisions as follows:
 - GMS is held at the Company's domicile or locations where the Company performs its business activities, and must be within the territory of the Republic of Indonesia.

negara Republik Indonesia;

- RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham, menggunakan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar dengan peredaran nasional;
- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
- Dalam pemanggilan harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS;
- Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat;
- RUPS dipimpin Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Rapat;
- Dalam hal semua Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir dalam Rapat RUPS.
- GMS is organized by firstly inviting the shareholders through an official letter and/or advertisement placed in national newspapers.
- The invitation should be disseminated at the latest 14 (fourteen) days prior to the GMS by excluding the invitation and GMS date.
- The invitation should state the event, date, time, and venue of where the GMS is going to be held.
- The GMS invitation is deemed unnecessary if all shareholders approve the meeting agenda and resolutions are agreed to unanimously.
- GMS is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is not present or absent due to any reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by one of the members of Board of Commissioners who is present and appointed by the GMS. In a case where all members of the Board of Commissioners are not present or absent due to reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by the President Director. If the President Director is not present or absent due to reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by one of the other members of Board of Directors who are present and appointed by the GMS.
- In the event that all of the Board of Directors are not present or absent due to any reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by one of the selected by and those who attend the GMS.



Ketentuan Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Dalam penentuan kuorum serta pengambilan keputusan pada RUPS Tahunan, Perusahaan mengacu pada Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007. Sesuai ketentuan tersebut, RUPS Tahunan (RUPST) dinyatakan kuorum apabila RUPST lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sesuai peraturan yang berlaku melalui prosedur yang transparan dan adil. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang berlaku mensyaratkan jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan.

Hasil RUPS didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan, dan Notaris membuat Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS. Penandatanganan Risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2021

RUPS tahun buku 2020 dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021. Adapun keputusan dan

Provisions on Quorum and Decision Making

Provisions on quorum in regards to attendance in Annual GMS is regulated in the Act No. PT. 40 of 2007. In accordance with the provisions, the Annual GMS (AGMS) has constituted a quorum if the AGM is more than $\frac{1}{2}$ (half) part of the total shares with voting rights present or represented, except the Law and/or articles of association determine a larger quorum.

Decision making in the GMS is carried out based on negotiation for consensus, as per the prevailing regulations through transparent and fair procedures. In the event of failed to reach decisions based on negotiation for consensus, the accepted decision making is based on the most votes, requiring a larger number of agreed votes.

Shareholders could also make legitimate decisions without holding a GMS physically, provided that all Shareholders have been notified in written and they are in agreement toward the proposed recommendation.

Results of GMS are documented by the Corporate Secretary, and Notary develops GMS Minutes of Meeting in each GMS. The signing of GMS Minutes of Meeting is not necessary if the minutes of meeting is included in the Notary Minutes of Meeting. The GMS Minutes of Meeting should be documented and kept by the Corporate Secretary

Implementation of the 2021 Annual GMS

2020 GMS held on June 2, 2021. The resolutions and realization of the 2020 Annual GMS are as

realisasi RUPS Tahunan tahun buku 2020 follows:
adalah sebagai berikut:

Realisasi Keputusan RUPST 2021 untuk Tahun Buku 2020 PT Pertamina Trans Kontinental

Realization of Resolution of the 2021 AGMS for the 2020 Fiscal Year of PT Pertamina Trans Kontinental

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi dan Tindak Lanjut Realization and Follow Up
Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 Presentation of 2020 Annual Report	Menerima Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2020 Accepting the Company's Annual Report for 2020 Fiscal Year	Telah direalisasikan Realized
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Approval on Annual Report, including Report Ratification Company finance accompanied by Full Payment and Liability Release (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2020 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor 00063/2.1025/AU.1/06/11303/1/II/2021 tanggal 19-02-2021 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material". Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan kepengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020, sepanjang: 1. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk laporan keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2020 2. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum. Approved the Company's Annual Report for the 2020 Fiscal Year and Ratified the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending 31-12-2020 along with its explanation which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as contained in Report Number 00063/ 2.1025/AU.1/06/11303/1/II/2021 dated 19-02-2021 with the opinion "fair in all material respects". Provide full discharge and release from responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners for supervisory actions carried out in the financial year ending on 31-12-2020, as long as: 1. These actions are reflected in the Company's Annual Report (including financial statements) for the Fiscal Year ending 31-12-2020 2. These actions are not criminal acts and/or unlawful acts.	Telah direalisasikan Realized
Pengusulan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2020. Stipulation of the Use of the Company's Profit for 2020 Fiscal Year	Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2020 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. The determination of the use of the Company's Profits for the Fiscal Year 2020 will be determined later and will be held in a separate GMS in a circular manner	Pertamina Trans Kontinental telah menyalurkan Dividen sebesar Rp423.28 miliar atas laba Perusahaan tahun 2020.



Realisasi Keputusan RUPST 2021 untuk Tahun Buku 2020 PT Pertamina Trans Kontinental

Realization of Resolution of the 2021 AGMS for the 2020 Fiscal Year of PT Pertamina Trans Kontinental

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi dan Tindak Lanjut Realization and Follow Up
		Pertamina Trans Kontinental has distributed dividends amounting to Rp423.28 billion for the Company's profit in 2020.
Pengusulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2021. Stipulation of the Public Accountant Office as the Auditor for 2021 Fiscal Year	Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perseroan dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT Pertamina International Shipping. Delegated Attorney and authority to the Board of Commissioners to determine the Public Accounting Firm (KAP) in conducting an examination of the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on 31-12-2021 along with the amount of the service value, in accordance with applicable rules and regulations, provided that The KAP appointed by the Company was consulted/coordinated in advance with PT Pertamina International Shipping	Telah direalisasikan Realized
Pengusulan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020. Proposal and Determination Board of Directors and Board of Commissioners of Performance Reward (Incentive) for the 2020 fiscal year	Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. Rewards for Performance (Tantiem) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2020 will be determined later and will be held in a separate circular GMS	Telah direalisasikan Realized
Pengusulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021. Proposal of the Board of Directors and the Board of Commissioners Remuneration for the 2021 Fiscal Year	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2020 will be determined later and will be held in a separate circular GMS	Telah direalisasikan Realized

Pelaksanaan RUPS Secara Sirkuler Tahun 2021

Selama tahun 2021, PTK telah menyelenggarakan RUPS Secara Sirkuler sebanyak 12 (dua belas) kali.

Implementation of Circular GMS in 2021

During 2021, PTK has held 12 (twelve) Circular GMS.

Pelaksanaan RUPS Secara Sirkuler Tahun 2021

Summary of Circular GMS in 2021

Tanggal RUPS Date of GMS	Ringkasan Hasil Keputusan RUPS / RUPS-LB Summary of GMS/EGMS Resolutions	Akta Notaris Notarial Deed
27 Januari 2021 January 27, 2021	Penghapusan Sebagian Ketentuan Terkait Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Elimination of Parts of Provisions Regarding the Salary of the Board of Directors and the Honorarium of the Board of Commissioners	Akta No.03 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penghapusan Sebagian Ketentuan Terkait Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn. Deed No. 03 dated February 11, 2021 concerning the Elimination of Part of Provisions Regarding the Salary of the Board of Directors and the Honorarium of the Board of Commissioners by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn
-	Pengalihan Asset Saham PT Pertamina (Persero) ke PT Pertamina International Shipping (PIS) Transfer of PT Pertamina (Persero) Share Assets to PT Pertamina International Shipping (PIS)	Akta No.69 tanggal 28 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PTK, Pengalihan Asset Saham PT Pertamina (Persero) ke PT Pertamina International Shipping (PIS) oleh Notaris Aulia Taufani, SH. Deed No. 69 dated April 28, 2021 regarding PTK Shareholders' Decision Statement, Transfer of PT Pertamina (Persero) Share Assets to PT Pertamina International Shipping (PIS) by Notary Aulia Taufani, SH
-	Perubahan Anggaran Dasar PTK Amendment to PTK's Articles of Association	Akta No.104 tanggal 29 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina Trans Kontinental oleh Notaris Aulia Taufani, SH Deed No. 104 dated April 29, 2021 concerning Statement of Shareholders' Decision on Amendment to the Articles of Association of PT Pertamina Trans Kontinental by Notary Aulia Taufani, SH
19 Mei 2021 May 19, 2021	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 Company Work and Budget Plan (RKAP) 2021	Akta No.21 tanggal 31 Mei 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn Deed No. 21 dated May 31, 2021 concerning the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021 by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn
28 Mei 2021 May 28, 2021	Pengangkatan Komisaris Utama Appointment of President Commissioner	Akta No.22 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengangkatan Komisaris Utama oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn Deed No. 22 dated May 31, 2021 concerning the Appointment of the President Commissioner by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn
-	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PTK Tahun Buku 2020 Minutes of PTK Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2020	Akta No.01 tanggal 02 Juni 2021 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PTK Tahun Buku 2020 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn Deed No. 01 dated June 2, 2021 concerning Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PTK for Financial Year 2020 by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn

**Pelaksanaan RUPS Secara Sirkuler Tahun 2021**

Summary of Circular GMS in 2021

Tanggal RUPS Date of GMS	Ringkasan Hasil Keputusan RUPS / RUPS-LB Summary of GMS/EGMS Resolutions	Akta Notaris Notarial Deed
-	Perjanjian Fasilitas Term Loan PTK oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PTK Term Loan Facility Agreement by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Akta No.03 tanggal 03 Juni 2021 tentang Perjanjian Fasilitas Term Loan PTK No.WCO.KP/225/TLN/2021 oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn Deed No. 03 dated June 03, 2021 concerning PTK Term Loan Facility Agreement No. WCO.KP/225/TLN/2021 by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn
01 September 2021 September 01, 2021	Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Keuangan & SDM PT Pertamina Trans Kontinental Dismissal and Appointment of Director of Finance & HR of PT Pertamina Trans Kontinental	Akta No.05 tanggal 17 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Keuangan & SDM PTK oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn Deed No. 05 dated September 17, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Director of Finance & HR of PTK by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn
12 November 2021 November 12, 2021	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Pertamina Trans Kontinental Dismissal and Appointment of Members of the Pertamina Trans Kontinental Board of Commissioners	Akta No.16 tanggal 23 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PTK oleh Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn Deed No. 16 dated November 23, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PTK by Notary Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.Kn
9 Desember 2021 December 9, 2021	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pertamina Trans Kontinental	Akta No.41 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PTK oleh Notaris Dewantari Handayani, SH., MPA Deed No. 41 dated December 24, 2021 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PTK by Notary Dewantari Handayani, SH., MPA
10 Desember 2021 December 10, 2021	Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Komisaris di Anak Perusahaan/Joint Venture PT Pertamina Trans Kontinental Placement of Company Representatives as Commissioners in the Subsidiary/Joint Venture PT Pertamina Trans Kontinental	Akta No.42 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Komisaris di Anak Perusahaan/Joint Venture PTK oleh Notaris Dewantari Handayani, SH., MPA Deed No.42 dated December 24, 2021 concerning Placement of Company Representatives as Commissioners in PTK Subsidiaries/Joint Ventures by Notary Dewantari Handayani, SH., MPA
10 Desember 2021 December 10, 2021	Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 Determination of Awards for the Annual Performance of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020	Akta No.43 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 oleh Notaris Dewantari Handayani, SH., MPA Deed No.43 dated December 24, 2021 concerning Determination of Awards for the Annual Performance of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2020 by Notary Dewantari Handayani, SH., MPA

Dewan Komisaris

Board of Commissioner

Dewan Komisaris merupakan bagian dari organ GCG yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan.

Kriteria Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang saham dan memenuhi kualifikasi pedoman serta kebijakan *Corporate Governance Policy* dan *Board Manual*. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, dedikasi dan itikad baik serta rasa tanggung jawab;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
3. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
4. Memiliki kemampuan melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
5. Memiliki hubungan yang luas dan bermanfaat bagi Perusahaan;
6. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

The Board of Commissioners is part of the GCG organ that has the obligation to carry out general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the company.

Board of Commissioners Criteria

The Board of Commissioners appointment is carried out by the shareholders and fulfils the qualifications of the guidelines as well as Corporate Governance Policy and the Board Manual. All of the Board of Commissioners members have fulfilled the criteria or requirements, as follows:

1. Have integrity, dedication and good faith as well as a sense of responsibility;
2. Have adequate knowledge in the company business field;
3. Have sufficient time to carry out their duties;
4. Have the ability to perform legal actions and have never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or Commissioner who was found guilty, caused a company to go bankrupt or been convicted of a criminal offense that harmed state finances within five years before the appointment;
5. Has a broad and beneficial relationship for the Company;
6. Do not represent the interests of certain political parties.



Uji Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PTK saat ini telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh PT Pertamina (Persero) sebagai induk Perusahaan dan Pemegang Saham Utama. Dengan demikian, seluruh Dewan Komisaris Perseroan merupakan anggota yang memiliki integritas (kepatutan) dan kompetensi (kelayakan) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban terkait fungsi pengawasan Direksi.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

RUPS memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan aspek integritas serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

Sedangkan dalam proses pemberhentian, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS. Hal tersebut terjadi jika terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi memberikan kerugian bagi Perusahaan atau melalaikan kewajibannya. RUPS juga memiliki wewenang untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang terbukti melanggar.

Komposisi dan Masa Jabatan

Sepanjang tahun 2021, terdapat 5 (lima) kali perubahan susunan Dewan Komisaris PTK melalui RUPS Sirkuler yang memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Achmad Fachruddin selaku Komisaris, Ivan

Fit and Proper Test for The Board of Commissioners

The board of commissioners of ptk currently has met the requirements and declared pass the fit and proper test by PT Pertamina (Persero), as the parent company and controlling shareholder. As such, all members of the company's Board of Commissioners are members with integrity (proper) and competence (fit) in performing the duties and responsibilities related to the supervisory function on the Board of Directors.

Board of Commissioners Appointment and Dismissal

The GMS holds the authority to appoint and dismiss the Board of Commissioners members. The Board of Commissioners appointment and dismissal have considered aspects of integrity and competence that are in line with the company's business needs.

Meanwhile, in the dismissal process, the Board of Commissioners members may be temporarily dismissed by the GMS. This will happen if the member is proven committing action against the Articles of Association or there is any indication of causing loss to the Company or neglecting its obligations. The GMS also holds the authority to dismiss the Board of Commissioners members who are proven guilty.

Composition and Terms of Office

Throughout 2020, there were 2 (two) changes in the PTK Board of Commissioners members through the Circular RUPS which decided to honorably dismiss Dharmawan H. Samsu as President Commissioner. The Sirkular GMS also

Airlangga EP. selaku Komisaris, mengangkat Amir Hamzah sebagai Komisaris Utama dan Khalid Zabidi serta Agustinus Bensik Lomboan sebagai Komisaris.

appointed and stipulated Ignatius Tallulembang as President Commissioner. The reason for the change in composition of the Board of Commissioners was due to another assignment.

Berikut adalah komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2021:

Board of Commissioners composition and terms of office are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office
1	Amir Hamzah	Komisaris Utama President Commissioners	Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental sejak 31 Mei 2021, berdasarkan Akta No.22 tanggal 31 Mei 2021. Served as President Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since May 31, 2021, based on Deed No. 22 dated May 31, 2021.
2	Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 11 September 2020, berdasarkan Akta No.23 tanggal 23 September 2020. Served as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since September 11, 2020, based on Deed No. 23 dated September 23, 2020.
3	Khalid Zabidi	Komisaris Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 12 November 2021, berdasarkan Akta No.16 tanggal 24 November 2021 Served as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since November 12, 2021, based on Deed No. 16th November 24, 2021
4	Agustinus Bensik Lomboan	Komisaris Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 12 November 2021, berdasarkan Akta No. 40 tanggal 29 Desember 2021 Served as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since November 12, 2021, based on Deed No. 40 December 29, 2021

Program Pengenalan Dewan Komisaris

Perseroan melaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dengan tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Perusahaan ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Pelaksanaan Program Pengenalan bagi Dewan Komiaris yang baru menjabat diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Program Pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris Baru Perseroan.

Board of Commissioners Introduction Program

The Company implements an introduction program for new members of the Board of Commissioners with the aim of providing an overview of business activities, future company plans, work guidelines and other matters that are the responsibility of the Board of Commissioners. The implementation of the Introductory Program for the new Board of Commissioners is regulated in the Decree of the Board of Directors concerning Guidelines for the Introduction Program for the New Directors and Board of Commissioners of the Company.



Materi pengenalan diberikan oleh *Corporate Secretary* kepada anggota Dewan Komisaris. Selain pemaparan atas Perusahaan, dalam program pengenalan Perusahaan juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang, diantaranya Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perseroan, *Board Manual*, Pedoman GCG, Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, *Charter* Dewan Komisaris, *Charter* Direksi dan *Charter* Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain itu, guna memahami secara langsung proses bisnis Perusahaan, program pengenalan Perusahaan juga meliputi kunjungan langsung ke Unit/Unit Bisnis Perusahaan.

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan. *Code of Corporate Governance* telah mengatur ketentuan mengenai Komisaris Independen PTK yaitu sekurang-kurangnya 20% dari Anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan. Syarat-syarat untuk jabatan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi;
2. Tidak bekerja pada departemen/lembaga atau badan lainnya di lingkungan Pemerintahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;

Introductory material is given by the Corporate Secretary to members of the Board of Commissioners. In addition to the presentation of the Company, the Company introduction program also provides supporting documents, including the Annual Report, the Company Work Plan and Budget (RKAP), the Company Long Term Plan (RJPP), the Company's Articles of Association, the Board Manual, GCG Guidelines, Company Ethical Standards, Work Program for the Board of Commissioners and the Supporting Committee for the Board of Commissioners, Charter for the Board of Commissioners, Charter for the Board of Directors and Charter for the Supporting Committee for the Board of Commissioners, as well as regulations related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners. In addition, in order to understand firsthand the Company's business processes, the Company introduction program also includes direct visits to the Company's Business Units/Units.

Independent Commissioner

An independent commissioner is a member of a Commissioner who is not affiliated with the Board of Directors, other members and controlling shareholders, and is free from business relationships or other relationships that can affect his ability to act independently or act solely in the interests of the company. Provisions on Independent Commissioner is regulated in the Code of Corporate Governance, stating at least 20% of the Board of Commissioners' Members should be appointed from outside the Company's circles with below requirements:

1. Not serving as a Director in an affiliated company;
2. Not working in a governmental department/ institution or other agencies in the last three years;

3. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
4. Tidak mempunyai keterikatan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produksi kepada Perusahaan dan afiliasinya;
5. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

Pada tahun 2021, seluruh Komisaris PTK merupakan Komisaris Independen dari total 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

PTK telah memenuhi ketentuan yang diatur regulator pasar modal terkait kriteria Komisaris Independen. Untuk menjadi Komisaris Independen, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

3. Not working at the Company or its affiliations in the last three years;
4. Not having any financial affiliation, directly and indirectly with the Company and other Companies providing services and production for the Company and its affiliations;
5. Free from conflict of interest and business activities or other relationships which could constaint or reduce capability of the concerned Commissioners to act or think independently in the Company.

In 2021, all PTK commissioners were Independent Commissioners from a total of 4 (four) members of the Board of Commissioners.

Stipulation of Independent Commissioners Criteria

PTK has fulfilled the regulations stipulated by the capital market regulators in relation to the Independent Commissioners criteria. The provisions are as follows:

- Having good character, morals, and integrity;
- Competent in carrying out legal actions;
- Within 5 (five) years before appointment and during his tenure
 - Never declared bankrupt;
 - Never been a member of the Board of Directors and/or a Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt;
 - Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector; and
 - Never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who during his tenure:



- a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
- b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memegang prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam memberikan keputusan strategis terkait Perusahaan yang bebas dari tekanan atau kepentingan pihak tertentu. Dewan Komisaris juga senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang saham pengendali maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan.

Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan pada Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

- a. Never held an annual GMS;
- b. Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or did not provide accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and
- c. Has caused any company that obtained licenses, approvals, or registrations from the Financial Services Authority not to fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority.
- d. Having a commitment to comply with the laws and regulations; and
- e. Having knowledge and/or expertise in the fields required by Issuers or Public Companies.

Independency of The Board of Commissioners

The Board of Commissioners upholds the independency principle in carrying out its duties including in providing strategic decisions related to companies that are free from pressure or interests of certain parties. The Board of Commissioners also always avoids conflicts of interest in form of financial and family affiliations with other members of the Board of Commissioners, Board Directors, controlling shareholders as well as external parties who have business affiliation with the Company.

This complies with the regulations in the copy of the Minister of State Owned Enterprises Regulation No. Per-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation

Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai Pasal 13 ayat 3 Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011, Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan yang mengatur kriteria indepedensi sebagai berikut:

- Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali;
- Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan Perusahaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
- Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali;
- Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Hubungan keuangan hanya sebatas status sebagai Anggota Dewan Komisaris yang mewakili Pemegang Saham dan anggota Direksi, merupakan pekerja PT Pertamina (Persero) yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk ditempatkan di Perusahaan sesuai penugasan dari PT Pertamina (Persero).

in State-Owned Enterprises.

In accordance with Article 13 paragraph 3, a copy of the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011, Members of the Board of Commissioners must meet the provisions governing the following criteria for independence:

- Not having any financial affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholder.
- Board of Commissioners does not have any managerial affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder;
- Board of Commissioners does not have any ownership affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder;
- Board of Commissioners does not have any family affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder.

Financial relations are only limited to the status of members of the Board of Commissioners representing Shareholders and members of the Board of Directors, who are employees of PT Pertamina (Persero) who have passed the fit and proper test to be placed in the Company as assigned by PT Pertamina (Persero).



Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan pada umumnya yang dilaksanakan Direksi; memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap Anggota Dewan Komisaris harus:

- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada Persero dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil kepentingan Perseroan selain honorarium dan fasilitas yang ditentukan oleh RUPS.

Board of Commissioners Duties, Responsibilities, Authority, and Obligations

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Articles of Association and the Board Manual, which is to supervise the management policies, generally the management of the Company carried out by the Directors; provide advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of The Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, provisions of the Articles of Association and GMS, and decree, as well as the prevailing law and regulations, on behalf of the Company's interest and in accordance with the aims and objectives of the Company.

In performing its duties, each Member of the Board of Commissioners should:

- Abide by the Articles of Association, laws, regulations, as well as principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, as well as fairness;
- Demonstrates goodwill, prudence, and responsibility toward the Company by being represented by GMS in performing the supervisory duties and giving advice to the Board of Directors for the interest and objectives of the Company;
- Prohibited from performing transactions with conflict of interest and take interest of the Company aside from honorarium and facilities established by the GMS.

Kewenangan

Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris;
- Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas;
- Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
- Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Authority

The authority of the Board of Commissioners is as follows:

- To access to books, correspondences, as well as other documents, inspect cash for verification and other needs, and audit the Company's assets;
- To enter properties, buildings, and offices used by the Company;
- To request explanation from the Board of Directors and/ or other officials on issues relating to the Company's management;
- To acknowledge all policies and actions that have and will be conducted by the Board of Directors;
- To request the Board of Directors and/ or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners' meeting;
- To appoint Secretary of the Board of Commissioners;
- To temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with provisions of the Limited Liability Companies Law;
- To establish other Committees aside from Audit Committee if deemed necessary by taking account the Company's capability;
- To hire experts for specific issues and within a certain period of time at the expense of the Company, when necessary;
- To perform managerial affairs of the Company in specific circumstances for a specific period of time in accordance with the Articles of Association;
- To attend the Board of Directors meeting and provide insights toward the discussed issues;
- To perform other supervisory authority as long as it is not conflicted with the laws and regulations, Articles of Association, and/ or GMS Resolution.



Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki kewajiban antara lain:

- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapatan dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;
- Mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Induk Perusahaan Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau ketentuanketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

Kunjungan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja guna mendapatkan masukan-masukan di lapangan terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kunjungan kerja yang telah dilakukan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Obligations

Board of Commissioners has obligations, among others:

- Giving inputs and advice to the GMS on The Company's Long-Term Plan and Company Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors;
- Following the Company's activities development, giving inputs and advice to the GMS on each important issue for the Company's management;
- Reporting immediately to the GMS if there is an indication of the Company's decreasing performance;
- Investigation and analyzing periodical and annual reports prepared by the Board of Directors, as well as signing annual report;
- Carrying out other obligations for supervisory duties and advice provision as long as it is not conflicted to the legislations, Articles of Association, and/or GMS Resolution;
- Complying with other prevailing provisions at the Company's Parent Company and those which are prevailed at the Company and/or other provisions stipulated and approved by the GMS.

Board of Commissioners' Official

Throughout 2021, the Board of Commissioners has conducted work visits to obtain input in the field related to the implementation of supervisory duties and providing advice to the Board of Directors. The work visits conducted by the Board of Commissioners are as follows:

No	Tanggal Date	Kunjungan Visits
1	30 Juni 2021 June 30, 2021	MWT Virtual di Subholding Shipping 30-Jun-21 MWT Virtual di Subholding Shipping 30-Jun-21
2	12 Agustus 2021 August 12	Virtual Management Walkthrough di Kapal SPOB (Kapuas & Mahakam) Virtual Management Walkthrough on SPOB Ship (Kapuas & Mahakam)
3	16 Agustus 2021 August 16	Virtual Management Walkthrough ke PTK Shorebase Tanjung Batu Virtual Management Walkthrough to PTK Shorebase Tanjung Batu
4	3 September 2021 September 3, 2021	Virtual Management Walkthrough ke PTK Cabang Batam Virtual Management Walkthrough to PTK Batam Branch
5	23-25 September 2021 September 23-25, 2021	Kantor Region - 2 Surabaya Regional Office - 2 Surabaya
6	13-14 Oktober 2021 October 13 - 14, 2021	Kantor Region - 3 Balikpapan Regional Office - 3 Balikpapan
7	23-24 Oktober 2021 October 23 - 24, 2021	Sorong
8	04-09 November 2021 November 4-9, 2021	Galangan kapal DBN dan DRU DBN and DRU shipyards

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan pedoman kerja (*Board Manual*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Komisaris yang dapat menjadi acuan bagi Komisaris dalam melaksanakan tugas untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. *Board Manual* disusun berdasarkan POJK 33/2014 serta GCG Assessment Report No.0061-01 (IA) yang dilakukan oleh unit Audit Internal pada tanggal 29 Mei 2015.

Berikut adalah isi pedoman Dewan Komisaris dalam *Board Manual*:

Board Manual For Board Of Commissioners

The Board of Commissioners has been equipped with work guidelines (*Board Manual*) in carrying out its duties and responsibilities. The *Board Manual* contains instructions on the work procedures of the Commissioners that can become a reference for Commissioners in carrying out their duties to achieve the Company's vision and mission, so that standards are expected to be achieved in accordance with GCG principles. The *Board Manual* is based on POJK 33/2014 and GCG Assessment Report No. 0061-01 (IA) conducted by the Internal Audit unit on May 29, 2015.

Contents of the *Board Manual* for Board of Commissioners' are as follows:

Pedoman Dewan Komisaris Board Manual for Board of Commissioners	
Pendahuluan Introduction	Mencakup maksud dan tujuan, ruang lingkup dan referensi yang menjadi acuan. Covers objectives, scope and references which serve as a direction.



Pedoman Dewan Komisaris Board Manual for Board of Commissioners	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris, pengaturan Rapat Dewan Komisaris dan organ pendukung Dewan Komisaris. Covers duties, authority, and obligations of the Board of Commissioners, organization of Meeting of the Board of Commissioners, and supporting organs of the Board of Commissioners.
Direksi Board of Directors	Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, pengaturan Rapat Direksi dan organ pendukung Direksi. Covers duties, authority, and obligations of the Board of Directors, organization of Meeting of the Board of Directors, and supporting organs of the Board of Directors.
Struktur Organisasi dan Prinsip Dasar Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Organizational Structure and Basic Principle of Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup struktur organisasi, benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Dewan Komisaris dan Direksi. Covers organizational structure, conflicts of interest and office ethics, as well as basic principles of the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Relationship Governance of the Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris, kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan. Includes attendance of the Board of Directors at Board of Commissioners Meetings, attendance of the Board of Commissioners at Board of Directors Meetings and holding of Joint Board Meetings.
<i>Management of Work</i>	Komisaris – Direksi dan program pengenalan Perseroan kepada pejabat baru pada organ Perseroan serta komunikasi formal. Commissioners – Directors and the Company's orientation program to new officials in the Company's organs as well as formal communication.
Kegiatan Antar-organ Perseroan Activities of the Company's Inter-Organs	Mencakup mengenai penyelenggaraan RUPS, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan RKAP, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan, penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan perbuatan Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris. Covers the implementation of GMS for ratifying RKAP and Annual Report; Annual GMS for ratifying Company Long-Term Plan (RJPP), and the Board of Directors' action requiring a Written Approval from the Board of Commissioners.
Lain-lain Others	Mencakup penggunaan waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup penggunaan waktu Direksi dan Dewan Komisaris; sarana dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris; perjalanan dinas dan cuti. Covers allocation of time, facilities and infrastructure, including allocation of the Board of Directors and Board of Commissioners' time; allocation of time of the Board of Directors and Board of Commissioners; business trips and leaves.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai rapat Dewan Komisaris PTK adalah sebagai berikut:

1. Rapat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Rapat Dewan Komisaris yang bersifat rutin/ terjadwal terdiri dari:
 - Rapat internal Dewan Komisaris, dilaksanakan setiap bulan;
 - Rapat gabungan dengan Direksi dilaksanakan sekali dalam satu bulan dengan agenda tetap konsultasi;
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, dan/atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;
3. Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis;
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang tertua masa jabatannya.
6. Keputusan rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa. Apabila melalui jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pimpinan rapat, kecuali mengenai diri orang pengambilan keputusan dilakukan

Board of Commissioners Meeting Policy

Board of Commissioners meeting policy in PTK are as follows:

1. Meetings are held at least once a month. Board of Commissioners meetings regular/ scheduled consist of:
 - Board of Commissioners Internal meetings, held every month;
 - Joint meetings with the Directors are held once a month with a fixed agenda of consultations;
2. The Board of Commissioners meetings can be held outside the regular schedule, if deemed necessary by one or more Members of the Board of Commissioners, and/or written requests from one or more Members of the Board of Commissioners;
3. This Board of Commissioners Meeting is an immediate and strategic meeting;
4. Meetings of the Board of Commissioners can be held through teleconferencing media, video conferences, or other electronic facilities that allow all participants of the Board of Commissioners' meeting to see and hear each other directly and participate in meetings;
5. The Board of Commissioners meeting is chaired by President Commissioner. In this case where the President Commissioner is not attending, the meeting will be chaired by the oldest Board of Commissioners members with the longest serving period.
6. The Board of Commissioners' meeting Resolutions shall be determined by collective consensus, if no agreement is reached then the decision will be taken by voting. If the number of agree and not agree votes are equal, the meeting resolutions will be taken the same as the Chairman of the meeting, except in the event where the decisionmaking is taken



- dengan pemilihan secara tertutup;
7. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara dan ditambah satu suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakili dengan disertai surat kuasa. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat. Lembar keputusan rapat harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat yang hadir;
 8. Dewan Komisaris mengakui bentuk rapat tanpa melalui kehadiran fisik, atau disebut rapat sirkuler, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam bentuk rapat sirkuler bukanlah keputusan yang bersifat strategis, bukan merupakan sebuah keputusan atas sebuah tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS, permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas, dan keputusan yang diambil disetujui secara tertulis oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Rapat Dewan Komisaris sepanjang 2021:

- through closed voting;
7. Each of the Board of Commissioners member is entitled the to cast one vote and another additional vote for the Board of Commissioners member who are represented with a power of attorney. A blank vote (abstained) is considered to approve the proposal submitted at the meeting and is responsible for the results of the meeting's decision. The meeting decision sheet must be signed by the meeting Chairman and all attending participants;
 8. The Board of Commissioners acknowledges a meeting without physical presence, or known as circular meeting, provided the decision taken in the form of a circular meeting is not a strategic decision, it is not a decision on the actions of the Board of Directors that requires the approval of the Board of Commissioners/GMS, the problem has been known before/discussed, and decision taken were agreed in writing by all members of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Internal Meeting

In carrying out the duties, the Board of Commissioners held 12 meetings. The frequency and attendance of the Board of Commissioners meetings throughout 2021 are as follows:

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2021

Board of Commissioners Attendance in the Board of Commissioners Internal Meeting in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran/ Jumlah Rapat Total Attendance/Total Meetings	% Kehadiran % Attendance
Amir Hamzah	Komisaris Utama President Commissioner	9/9	100%
Ivan Airlangga EP	Komisaris Commissioner	10/10	100%
Achmad Fachrudin	Komisaris Commissioner	1/1	100%
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	12/12	100%
Khalid Zabidi	Komisaris Commissioner	2/2	100%
Agustinus Bensik Lomboan	Komisaris Commissioner	1/1	100%

Agenda rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners meeting agenda are as follows:

No	Tanggal Date	Agenda
1	26 Januari 2021 January 26, 2021	• Realisasi Kinerja Ytd. Desember 2020 • Usulan RJPP 2021 – 2026 • Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2021 • Performance Realization Ytd. December 2020 • RJPP 2021 – 2026 Proposal • Board of Commissioners 2021 Work Plan
2	02 Maret 2021 March 02, 2021	Kinerja Keuangan dan Operasional PTK PTK Financial and Operational Performance
3	07 April 2021 April 07, 2021	• Pembahasan Perbaikan Kinerja Dewan Komisaris TB 2021 berdasarkan Rekomendasi BPKP atas Hasil Audit GCG • Diskusi Telaah atas Laporan Tahunan PTK Tahun Buku 2020 • Diskusi terkait adanya Fatality PTK • Discussion on Improvements to the Performance of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2021 based on BPKP's Recommendation on GCG Audit Results • Review Discussion on PTK Annual Report for Fiscal Year 2020 • Discussion related to PTK Fatality Occurrence
4	07 Juni 2021 June 07, 2021	Strategy Recovery Guna Peningkatan Kinerja PTK Recovery Strategy to Improve PTK Performance
5	21 Juni 2021 June 21, 2021	Efisiensi Biaya Cost Efficiency
6	27 Juli 2021 July 27, 2021	Cost Efficiency PTK dan Corporate Action PTK PTK Cost Efficiency and PTK Corporate Action



No	Tanggal Date	Agenda
7	05 Agustus 2021 August 05, 2021	Pembahasan GCG GCG discussion
8	19 Agustus 2021 August 19, 2021	Pembahasan Bisnis Shorebase di Kabil dan Tanjung Batu Shorebase Business Discussion in Kabil and Tanjung Batu
9	30 Agustus 2021 August 30, 2021	Aktivitas Agustus dan Ytd. Juli 2021 August activity and Ytd. July 2021
10	21 Oktober 2021 October 21, 2021	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dekom Tahun 2022 Preparation of the 2022 Dekom Work Plan and Budget
11	30 November 2021 November 30, 2021	Koordinasi Internal Dekom Internal Coordination of the Board of Commissioners
12	17 Desember 2021 December 17, 2021	Koordinasi dan Pembagian Tugas Dekom Coordination and Division of Duties of the Board of Commissioners

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris

Sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, maka pada setiap rapat dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Begitu pula dengan risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir.

Risalah rapat-rapat tersebut dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris di tempat kedudukan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut. Salinan risalah rapat gabungan diberikan juga kepada Direksi.

Board of Commissioners Meeting Resolutions Monitoring and Follow-Up Evaluation

As a form of monitoring and evaluation of the resolutions of the Board of Commissioners' meetings, each meeting minutes are signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Commissioners present. Likewise with the minutes of the joint meeting of the Board of Commissioners and Directors, signed by the Chair of the Meeting and all members of the Board of Commissioners and Directors present.

Minutes of internal and joint meeting is developed and administered by Secretary of the Board of Commissioners at the Company's domicile. Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive a copy of the minutes meeting, regardless members of the Board of Commissioners present or not present in the meeting. The copy of joint minutes meeting is also provided to the Board of Directors.

Program Pengenalan untuk Anggota Dewan Komisaris Baru

PTK melaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dengan tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, panduan kerja dan lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

Program pengenalan tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh perusahaan
2. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
5. Pada tahun 2021, materi pengenalan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris PTK yang baru yaitu kepada Amir Hamzah dan Khalid Zabidi. Program pengenalan perusahaan dilakukan pada tanggal: 02 Juni 2021 dan 06 Desember 2021.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi, antara lain pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya.

Introductory Program for the Board of Commissioners New Members

PTK carries out an introduction program for new members of the Board of Commissioners with the aim of providing an overview of business activities, future company plans, work guidelines and others that are the responsibility of the Board of Commissioners.

The introduction program includes:

1. Implementation of GCG principles by the company
2. Description of the company in terms of objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues.
3. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies including the Audit Committee.
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as things that are not allowed.
5. In 2021, introduction materials were given to the new members of the PTK Board of Commissioners, namely Amir Hamzah and Khalid Zabidi. The company introduction program will be held on: 02 June 2021 and 06 December 2021.

Board of Commissioners Competency Development and Training

The Board of Commissioners continues to increase its knowledge and competence through competency development programs, including training, seminars, and other activities. However,



Pada tahun 2021, Dewan Komisaris mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

this can be adjusted to the needs and priorities of the Company. In 2021, there was no training attended by the Board of Commissioners:

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2021

Board of Commissioners Competency Development and Training

Pelatihan Position	Peserta Participant	Tanggal Date
Prime Program Bagi Dewan Komisaris Prime Program for the Board of Commissioners	- Ivan Airlangga EP - Andi Saiful Haq	5 – 10 Februari 2021 February 5 – 10, 2021
Enhancing Internal Audit Capability	Ivan Airlangga EP	10 Maret 2021 March 10, 2021
Extracting Value From Successful Holding Implementation	Andi Saiful Haq	15 – 18 Juni 2021 June 15 – 18, 2021
Building The Future Ready Organization	Amir Hamzah	22 – 25 Juni 2021 June 22 – 25, 2021
Proses Unlock Value dan IPO	- Andi Saiful Haq - Amir Hamzah	9 Agustus 2021 August 9, 2021
Tanggungjawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan Responsibilities of the Audit Committee When the Company Is Involved in Legal Issues Related to Financial Statements	- Amir Hamzah - Ivan Airlangga EP - Edward Situmorang	23 September 2021 September 23, 2021
Executive Insight	- Ivan Airlangga EP - Andi Saiful Haq - Harry Mulia	02 – 04 November 2021 November 02 – 04, 2021

Penilaian Atas Kinerja Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Investasi & Risiko Usaha.

Penilaian kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris meliputi Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite, Tingkat Kehadiran dalam Rapat Internal Dewan Komisaris, Tingkat Kontribusi Tertulis bagi Komite, Akurasi Rekomendasi Tertulis, Akurasi Rekomendasi Lisan, Peran Aktif

Assessment on Performance of Committees Under Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Board of commissioners is assisted by committees that are directly responsible to the Board of Commissioners, such as the Audit Committee, the Investment & Business Risk Committee.

Performance assessment is conducted by the Board of Commissioners with performance appraisal indicators as determined by the Board of Commissioners including Attendance Level at Committee Meetings, Attendance Level at Internal Meetings of the Board of Commissioners, Level of Written Contribution to the Committee, Accuracy of Written Recommendations,

(Inisiatif) dan Inovasi. Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan setiap Triwulan. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja Komite Audit selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu.

Penilaian kinerja Komite Audit tahun 2021 dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang audit, kecukupan proses pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Penilaian Kinerja Komite Investasi & Risiko Usaha Tahun 2021

Penilaian kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris meliputi Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite, Tingkat Kehadiran dalam Rapat Internal Dewan Komisaris, Tingkat Kontribusi Tertulis bagi Komite, Akurasi Rekomendasi Tertulis, Akurasi Rekomendasi Lisan, Peran Aktif (Inisiatif) dan Inovasi. Penilaian kinerja Komite Investasi & Risiko Usaha dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja Komite Investasi & Risiko Usaha selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu.

Selain itu, penilaian kinerja Komite Investasi & Risiko Usaha tahun 2021 dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam

Accuracy of Verbal Recommendations, Active Role (Initiative) and Innovation. The Audit Committee performance assessment is carried out every quarter. Performance appraisal is carried out to assess the performance of the Audit Committee as a group and its members as individuals.

Assessment on performance of Audit Committee in 2021 is carried out based on the realization and completion of the work programs listed in the Audit Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report which includes the implementation of committee duties in the audit sector, the adequacy of the internal control process and the preparation of financial reports. The results of the assessment become a consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Audit Committee for the next term of office.

Assessment on Performance of Investment & Business Risk Committee in 2021

Performance appraisal is carried out by the Board of Commissioners with performance appraisal indicators as determined by the Board of Commissioners including Attendance Level in the Committee Meetings, Attendance Level in Board of Commissioners Internal Meetings, Level of Written Contribution to the Committee, Accuracy of Written Recommendations, Accuracy of Oral Recommendations, Active Role (Initiative) and Innovation. Performance assessment of the Investment & Business Risk Committee is carried out every 3 (three) months. Performance appraisal is carried out to assess the performance of the Investment & Business Risk Committee as a group and its members as individuals.

In addition, the assessment of the performance of the Investment & Business Risk Committee in 2021 is carried out based on the realization and completion of the work programs listed



Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Investasi & Risiko Usaha yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang manajemen risiko. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Investasi & Risiko Usaha untuk periode jabatan berikutnya.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* untuk kemajuan dan kesehatan Persahaan. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Hal yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga dapat dicapai kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

- Terlaksananya dengan baik *internal control* dan manajemen risiko;
- Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
- Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
- Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengadakan rapat gabungan sebagai

in the Risk Management Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Investment & Business Risk Committee report which covers implementation of committee duties in risk management. The results of the assessment become material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Investment & Business Risk Committee for the next term of office.

Working Relationship Between Board of Commissioners and Board of Directors

The working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is a check and balance relationship for the progress and health of the Company. The Board of Commissioners and Directors in accordance with their respective functions are responsible for the long-term sustainability of the Company's business. What must be done by the Board of Commissioners and Board of Directors together in accordance with their respective functions, so that the long-term sustainability of the company's business can be achieved reflected in:

- Proper implementation of internal control and risk management;
- Achieve a reasonable return for Shareholders;
- Properly protected interests of stakeholders;
- Implementation of leadership and management succession in all lines of the organization;
- The fulfillment of GCG implementation.

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

The Board of Commissioners and Board of Directors regularly hold joint meetings as

bentuk kerjasama dan koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat gabungan diselenggarakan dalam rangka pembahasan terkait rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

a form of cooperation and coordination between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The joint meeting was held in the context of discussion related to work plans, operations, business opportunities, and strategic issues that require the approval of the Board of Commissioners.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 36 kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2021, the Board of Commissioners and Board of Directors held 36 joint meetings with attendance level as follows:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Jumlah Rapat per orang Total Meeting per Person	%
Ivan Airlangga*	27	27	100%
A. Fachruddin**	1	1	100%
Andi Saiful Haq	35	36	97%
Amir Hamzah***	27	27	100%
Agustinus Bensik Lomboan****	3	3	100%
Khalid Zabidi*****	7	7	100%
Nepos MT. Pakpahan	35	36	97%
Hadi Purnomo	36	36	100%
Arsono Kuswardanu	36	36	100%
Azwani*****	27	28	96%
Afan Aftory*****	13	13	100%

* menjabat hingga 12 November 2021
 ** menjabat hingga 30 Januari 2021
 *** menjabat sejak 28 Mei 2021
 **** menjabat mulai 09 Desember 2021
 ***** menjabat mulai 12 November 2021
 ***** menjabat hingga 1 September 2021
 ***** menjabat sejak 1 September 2021

* served until November 12, 2021
 ** served until January 30, 2021
 *** served since May 28, 2021
 **** served since December 9, 2021
 ***** served since November 12, 2021
 ***** served until 1 September 2021
 ***** served since September 1, 2021

Adapun agenda rapat gabungan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

Board of Directors and Board of Commissioners joint meeting agenda are as follows:

No	Tanggal Date	Agenda
1	28 Januari 2021 January 28, 2021	Kinerja Bulanan Ytd. Desember 2020 Monthly Performance Ytd. December 2020 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD-BOC tanggal 21 Desember 2020 2. Kinerja Ytd. Desember 2020 3. Pencapaian KPI Desember 2020 1. Follow-up to the Results of the BOD-BOC Meeting on December 21, 2020 2. Performance Ytd. December 2020 3. December 2020 KPI Achievements
2	02 Februari 2021 February 02, 2021	Penyelarasan Pemahaman dan Penelaahan Draft RJPP PTK Tahun 2021 - 2026. Alignment of Understanding and Studying the Draft RJPP CAR 2021 - 2026.



No	Tanggal Date	Agenda	
3	11 Februari 2021 February 11, 2021	Pembahasan Hasil Selft Assessment GCG TB 2020	Discussion of the 2020 GCG TB Selft Assessment Results
4	02 Maret 2021 March 02, 2021	Kinerja Bulanan Ytd. Januari 2021 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD-BOC tanggal 28 Januari 2021 2. Kinerja Ytd. Januari 2021 3. Draft KPI Direksi Tahun 2021 4. Pengisian LHKPN 2021 5. Pembahasan Rencana Agenda BOD-BOC Tahun 2021	Monthly Performance Ytd. January 2021 1. Follow-up to the Results of the BOD-BOC Meeting on January 28, 2021 2. Performance Ytd. January 2021 3. Draft Board of Directors KPI 2021 4. LHKPN 2021 Filling 5. Discussion on BOD-BOC 2021 Agenda Plan
5	19 Maret 2021 March 19, 2021	Pembahasan Restruktur Organisasi	Discussion on Organizational Restructuring
6	19 Maret 2021 March 19, 2021	Management Risiko PTK Tahun 2021	PTK Risk Management in 2021
7	12 April 2021 April 12, 2021	Kinerja Bulanan Ytd. Februari 2021 1. Tindak Lanjut Notulen Rapat BOD-BOC tanggal 02-Maret-2021 2. Kinerja Ytd. Februari 2021 3. Raoadmap Teknologi Informasi	Monthly Performance Ytd. February 2021 1. Follow-up to the Minutes of the BOD-BOC Meeting on 02-March-2021 2. Performance Ytd. February 2021 3. Information Technology Raoadmap
8	22 April 2021 April 22, 2021	People Development	People Development
9	04 Mei 2021 May 04, 2021	Kinerja Bulanan Ytd. Maret 2021 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD-BOC tanggal 12 April 2021 2. Kinerja Ytd. Maret 2021 3. Tindak Lanjut Hasil Rapat Preliminary Discussion Tentang Kebijakan dan Implementasi People Development	Monthly Performance Ytd. March 2021 1. Follow-up to the Results of the BOD-BOC Meeting on April 12, 2021 2. Performance Ytd. March 2021 3. Follow-up to the Results of the Preliminary Discussion Meeting on People Development Policy and Implementation
10	04 Juni 2021 June 04, 2021	Kinerja Bulanan Ytd. April 2021 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD-BOC tanggal 04 Mei 2021 2. Kinerja Ytd. April 2021 3. Tindak Lanjut tentang Manajemen Risiko	Monthly Performance Ytd. April 2021 1. Follow-up to the Results of the BOD-BOC Meeting on 04 May 2021 2. Performance Ytd. April 2021 3. Follow-up on Risk Management
11	09 Juni 2021 June 09, 2021	Presentasi Insiden Fatality Transko Ranau.	Presentation of the Ranau Transko Fatality Incident.
12	15 Juni 2021 June 15, 2021	Strategy Recovery Plan RKAP PTK 2021 1. GAP Identification dari Revenue atau Profit RKAP 2021 2. Potential Efficiency Cost 3. Kontrol & Evaluasi Kinerja Anak Perusahaan (AP) PTK 4. Benchmarking PTK dengan perusahaan sejenis 5. Kesiapan SDM terkait dengan endstate organisasi 6. SOP sistem komunikasi dengan PIS	Strategy Recovery Plan RKAP PTK 2021 1. GAP Identification of Revenue or Profit RKAP 2021 2. Potential Efficiency Cost 3. Performance Control & Evaluation of PTK Subsidiary 4. PTK benchmarking with similar companies 5. HR readiness is related to the end state of the organization 6. SOP communication system with PIS

No	Tanggal Date	Agenda	
13	16 Juni 2021 June 16, 2021	Diskusi Arahan dan Info Hasil Pertemuan Komut dengan Dirut PIS	Discussion of Directions and Information on the Results of the Komut Meeting with the President Director of PIS
14	25 Juni 2021 June 25, 2021	Pembahasan Progress dan Kendala Perkembangan Digitalisasi dan Penggabungan Marine ke PTK	Discussion of Progress and Obstacles to the Development of Digitization and Marine Merger to PTK
15	28 Juni 2021 June 28, 2021	Pembahasan Revisi RKAP 2021	Discussion on Revised RKAP 2021
16	30 Juni 2021 June 30, 2021	Kinerja Bulanan Ytd. Mei 2021	Monthly Performance Ytd. May 2021
17	07 Juli 2021 July 07, 2021	Detail Business Plan Oil spill Response (OSR), Kesiapan PKS Menjalankan OSR Sejak Mei 2021 dan Simulasi KPI Direksi PTK	Details of Business Plan Oil spill Response (OSR), PKS Readiness to Run OSR Since May 2021 and KPI Simulation of PTK Directors
18	09 Juli 2021 July 09, 2021	Rapat Koordinasi Lanjutan 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD-BOC tanggal 15 Juni 2021 2. Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD-BOC tanggal 15 Juni 2021	Advanced Coordination Meeting 1. Follow-up to the Results of the BOD-BOC Meeting on 15 June 2021 2. Follow-up to the Results of the BOD-BOC Meeting on 15 June 2021
19	29 Juli 2021 July 29, 2021	Kinerja Bulanan Ytd. Juni 2021 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD-BOC tanggal 30 Juni 2021 2. Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD-BOC tanggal 09 Juli 2021 3. Kinerja Operasi dan Keuangan Ytd. Juni 2021 4. Self Assessment GCG Semester I - 2021	Monthly Performance Ytd. June 2021 1. Follow-up to the Results of the BOD-BOC Meeting on June 30, 2021 2. Follow-up to the Results of the BOD-BOC Meeting on 09 July 2021 3. Operational and Financial Performance Ytd. June 2021 4. GCG Self-Assessment Semester I - 2021
20	30 Juli 2021 July 30, 2021	Business Strategy Recovery Mapping	Business Strategy Recovery Mapping
21	16 Agustus 2021 August 16, 2021	Management Walkthrough PTK Shorebase Tanjung Batu (PSTB) 1. Video Profile PTK Shore Base Tanjung Batu 2. Kegiatan Operasional PTK Shorebase Tanjung Batu 3. Pencapaian Kinerja PTK Shorebase Tanjung Batu	Management Walkthrough PTK Shorebase Tanjung Batu (PSTB) 1. Video Profile of PTK Shore Base Tanjung Batu 2. PTK Shorebase Tanjung Batu Operational Activities 3. Tanjung Batu Shorebase PTK Performance Achievement
22	27 Agustus 2021 August 27, 2021	1. Pembahasan Manajemen Risiko dengan Tindak Lanjut NR-056/DEKOM.PTK/2021 2. Update Strategi Recovery Plan Sesuai surat Dewan Komisaris No. 091/DEKOM.PTK/2021 tanggal 20 Agustus 2021	1. Risk Management Discussion with Follow-up NR-056/DEKOM.PTK/2021 2. Recovery Plan Strategy Update In accordance with the letter of the Board of Commissioners No. 091/DEKOM.PTK/2021 dated August 20, 2021



No	Tanggal Date	Agenda	
23	31 Agustus 2021 August 31, 2021	1. Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD-BOC tanggal 29 Juli 2021 2. Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK, Realisasi Ytd. Juli 2021 terhadap RKAP 2021 dan Tanggapan Dewan Komisaris sesuai Surat No. 095/DEKOM.PTK/2021.	1. BOD-BOC Meeting Follow-up Report on July 29, 2021 2. PTK Operational, Financial and Investment Performance Report, Realization Ytd. July 2021 on the 2021 RKAP and the Board of Commissioners' response according to Letter No. 095/DEKOM.PTK/2021.
24	17 September 2021 September 17, 2021	1. Progress Realisasi Strategy Recovery Plan dan Update Prognosanya 2. Update Perkembangan Gasifikasi LNG sesuai Implementasi Kepmen ESDM No. 13 3. Update Progress Kerjasama PTK dengan Pelindo I 4. Informasi terkait Kunjungan SKK Migas ke PSTB	1. Progress of Realization of Recovery Plan Strategy and Update Prognosis 2. Update on the Development of LNG Gasification in accordance with the Implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 13 3. Update on the Progress of PTK Cooperation with Pelindo I 4. Information regarding SKK Migas Visit to PSTB
25	30 September 2021 September 30, 2021	Kinerja Bulanan Ytd. Agustus-2021 1. Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD-BOC tanggal 31 Agustus 2021 2. Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK, Realisasi Ytd. Agustus 2021 terhadap RKAP 2021 3. Update Perkembangan Sistem Teknologi Informasi PTK sesuai dengan Notulen Rapat BOD-BOC No. NR-071/DEKOM.PTK/2021, Surat Dekom No. 068/DEKOM.PTK/2021 tanggal 03 Juli 2021, dan Surat Direktur Utama PTK No. 943/PTK0000/2021 tanggal 06 September 2021.	Monthly Performance Ytd. August-2021 1. Follow-up to the Results of the BOD-BOC Meeting on August 31, 2021 2. PTK Operational, Financial and Investment Performance Report, Realization Ytd. August 2021 against RKAP 2021 3. Update on the development of the PTK Information Technology System in accordance with the Minutes of the BOD-BOC Meeting No. NR-071/DEKOM.PTK/2021, Dekom Letter No. 068/DEKOM.PTK/2021 dated July 03, 2021, and PTK Main Director's Letter No. 943/PTK0000/2021 dated September 06, 2021.
26	04 Oktober 2021 October 04, 2021	Penggabungan Marine-PTK 1. Implementasi SDM dan Organisasi 2. Realisasi Kebijakan Transfer Pricing Bundling dan Unbundling serta Issue Outstanding 3. Kesiapan Kantor Baru	Marine-PTK Merger 1. HR and Organizational Implementation 2. Realization of Transfer Pricing Bundling and Unbundling Policy and Outstanding Issues 3. New Office Readiness
27	22 Oktober 2021	Update progress Realisasi dan Prognosa Strategy Recovery Plan	Update on the progress of the Realization and Prognosis of the Recovery Plan Strategy
28	05 November 2021 November 05, 2021	1. Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD-BOC tanggal 30 September 2021 2. Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK, Realisasi TW 3 tahun 2021 terhadap RKAP 2021 3. People Development	1. Follow-up Report of the BOD-BOC Meeting on September 30, 2021 2. PTK Operational, Financial, and Investment Performance Report, Realization of Q 3 in 2021 against RKAP 2021 3. People Development

No	Tanggal Date	Agenda	
29	08 November 2021 November 08, 2021	Pembahasan RKAP Tahun 2022 PTK	Discussion on PTK RKAP 2022
30	25 November 2021 November 25, 2021	Strategy Recovery Plan 1. Progress Realisasi Strategy Recovery Plan dan Update Prognosanya 2. HSSE Plan Tahun 2022	Strategy Recovery Plan 1. Progress of Realization of Recovery Plan Strategy and Update Prognosis 2. HSSE Plan 2022
31	30 November 2021 November 30, 2021	1. Laporan Tindak Lanjut Hasil Rapat BOD BOC tanggal 05 November 2021 2. Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi hingga Oktober 2021 terhadap RKAP 2021 3. Manajemen Risiko di PTK	1. Follow-up Report on the Results of the BOD BOC Meeting on November 5, 2021 2. Report on the Operational, Financial, and Investment Performance of PTK realization until October 2021 against the 2021 RKAP 3. Risk Management at PTK
32	02 Desember 2021 December 02, 2021	1. Evaluasi Tingkat Mutu dan Layanan Pelanggan 2. Pemaparan Program Kerja Direktorat Marketing Tahun 2022	1. Evaluation of Quality Level and Customer Service 2. Presentation of the 2022 Marketing Directorate's Work Program
33	06 Desember 2021 December 06, 2021	Program Pengenalan Perusahaan untuk Anggota Komisaris	Company Introduction Program for Commissioners
34	13 Desember 2021 December 13, 2021	Pemaparan Program Kerja RKAP Tahun 2022	Presentation of the 2022 AP/JV Work Program
35	22 Desember 2021 December 22, 2021	Pemaparan Program Kerja AP/JV Tahun 2022	Presentation of the 2022 AP/JV Work Program
36	31 Desember 2021 December 31, 2021	Pemaparan Program Kerja AP/JV Tahun 2022 (Lanjutan)	Presentation of the 2022 AP/JV Work Program (Continued)



Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Board of Commissioner and Board of Directors Concurrent Position

In 2021, Board of Commissioners and Board of Directors served in concurrent position at other companies as explained in table below:

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioner and Board of Directors Concurrent Position

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan di Perusahaan Lain Position in Other Company	Nama Perusahaan Name of the Company
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Amir Hamzah	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak menjabat di perusahaan lain Not serving in another company	
Ivan Airlangga EP	Komisaris Commissioner	Pensiun/Pension	-
Achmad Fachrudin	Komisaris Commissioner	Tidak menjabat di perusahaan lain Not serving in another company	-
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	Komisaris/Commissioner	Institute for Transformation Studies (INTRANS)
Khalid Zabidi	Komisaris Commissioner	Komisaris/Commissioner	PT Sejabat
		Direktur Utama/President Director	PT Tamaca
Agustinus Bensik Lomboan	Komisaris Commissioner	Komisaris/Commissioner	PT Glory Kasih Indonesia
		Direktur/Director	PT Tiga Kawa Mitra
Direksi / Board of Directors			
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	Tidak menjabat di perusahaan lain Not serving in another company	-
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Director of Operation	Tidak menjabat di perusahaan lain Not serving in another company	-
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Tidak menjabat di perusahaan lain Not serving in another company	-
Afan Aftory	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HR	Tidak menjabat di perusahaan lain Not serving in another company	-

Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Dewan Komisaris dan Direksi PTK tidak memiliki hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham secara langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi telah disajikan di bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Affiliation Among Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders

PTK Board of Commissioners and Directors do not have any direct or indirect affiliation among the Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders.

Board of Commissioners and Directors Share Ownership

Information on Board of Commissioners and Board of Directors share ownership is presented in the Company Profile chapter of this Annual Report



Direksi

Board of Directors

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Direksi memiliki tanggung jawab dalam pengawasan internal secara efektif dan efisien, memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola pekerja dan melaporkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

Kriteria Direksi

Anggota Direksi PTK wajib memenuhi seluruh persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, *Board Manual* dan CoCG Perusahaan, yaitu:

- Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur dan perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit serta tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan

In carrying out their duties, the Board of Directors is responsible to the GMS. The accountability of the Board of Directors to the GMS is a manifestation of the accountability of the company's management in accordance with the principles of GCG.

Board of Directors is a corporate organ with responsibility upon management of the Company. In carrying out its duties, the Board of Directors is responsible to the GMS. The responsibility of the Board of Directors to the GMS is a manifestation of the accountability of the Company's management in accordance with the principles of GCG.

The Board of Directors has the responsibility for internal control effectively and efficiently, monitoring risks and managing them, maintaining a conducive working climate so that productivity and professionalism are better, managing employees and reporting the overall performance of the Company to Shareholders at the GMS.

Board of Directors Criteria

PTK Board of Directors members are required to meet all the requirements of suitability and compliance, which have been regulated in the Company's Board Manual and CoCG, namely:

- Having expertise, integrity, leadership, experience, honesty, goodwill, and high dedication to advance and develop the Company.
- Capable to perform legal actions and have never been declared bankruptcy, as well as have never been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was guilty of causing the Company

bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;

- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
- Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga antara Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris;
- Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengacu pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan Perusahaan. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian tersebut meliputi:

- Tahap pertama adalah pengajuan usulan calon Direksi Anak Perusahaan oleh Direksi PT Pertamina International Shipping selaku Pemegang Saham dengan meminta persetujuan tertulis dari Direksi PT Pertamina International Shipping dan disetujui oleh RUPS PT Pertamina International Shipping sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan;
- Prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Perusahaan melalui tahap evaluasi, proses penjangkaran, proses penilaian melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) serta dan ketentuan-ketentuan perihal formulasi penilaian, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau pedoman yang berlaku di PT Pertamina International Shipping;
- Sebelum meminta Persetujuan RUPS, Direksi PT Pertamina International Shipping akan meminta persetujuan dan pendapat Direksi PT Pertamina International Shipping terkait rekomendasi calon Direksi Anak

bankruptcy.

- Have never been punished due to criminal action that brings loss to the state finance in five years prior to the appointment.
- Not allowed having familial relationship among Members of the Board of Directors and between Members of the Board of Directors with Members of the Board of Commissioners.
- Not representing the interest of a political party.

Board of Directors Appointment and Dismissal

The terms of appointment and dismissal of the Directors refer to the Articles of Association and the provisions of the company's laws and regulations. The appointment and dismissal procedures include:

- First stage is to propose candidates for Subsidiaries' Board of Directors by PT Pertamina (Persero) Board of Directors as Shareholder by requesting a written approval from the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) and approved by PT Pertamina (Persero) GMS prior to being stipulated in the Subsidiaries' GMS.
- The appointment procedure for candidates of the Company's Board of Directors undergoes evaluation, election process, assessment process through fit and proper test as well as provisions on assessment formulation by continuously referring to the prevailing laws and regulations and/or guidelines at PT Pertamina (Persero).
- Prior to requesting GMS Approval, the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) will request an approval and recommendation of the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) regarding the recommendation of candidates for Subsidiaries' Board of Directors. The procedure of approval request includes:

Perusahaan. Prosedur permintaan persetujuan tersebut, meliputi:

- Direksi Pertamina menyampaikan calon Direksi Anak Perusahaan kepada Menteri BUMN setelah memperoleh persetujuan Direksi.
- RUPS Pertamina memberikan penetapan tertulis.
- Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak Manajemen.

RUPS memiliki kewenangan dalam pemberhentian Direksi yang disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemberhentian tersebut dapat disebabkan antara lain:

Masa jabatannya berakhir;

- Mengundurkan diri;
- Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- Meninggal dunia;
- Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Direksi

Sebelum diangkat menjadi anggota Direksi PTK, calon anggota Direksi harus mengikuti mekanisme nominasi yaitu lulus *fit and proper test* serta memperoleh persetujuan dari pemegang saham. Pada tahun 2020, Direksi PTK telah memenuhi persyaratan dan lulus *fit and proper test* yang diselenggarakan PT Pertamina International Shipping. Dengan demikian, seluruh Direksi Perseroan telah terbukti merupakan anggota yang memiliki integritas (kepatutan), kompetensi (kelayakan), reputasi, dan pengalaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

- The Board of Directors of Pertamina to submit the candidates for Subsidiaries' Board of Directors to Minister of SOE after acquiring the Board of Directors' approval.
- Pertamina GMS to provide written stipulation.
- The selected Board of Directors to sign Management contract.

The authority of dismissing the Board of Directors belongs to GMS, in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association. The discharge of Members of the Board of Directors may occur due to:

Masa jabatannya berakhir;

- End of term of office;
- Resignation;
- Losing the Indonesian citizenship;
- Passed away;
- Discharge based on GMS Resolution

Board of Directors Fit and Proper Test

Prior appointed as a member of the PTK Board of Directors, prospective members of the Board of Directors must follow the nomination mechanism, namely passing the fit and proper test and obtaining approval from shareholders. In 2019, the Directors of PTK have fulfilled their requirements and passed the fit and proper test conducted by PT Pertamina (Persero). As such, all the Directors of the Company have been proven to be members who have integrity (propriety), competence (worthiness), reputation, and experience in carrying out their duties and responsibilities.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Komposisi Direksi PTK hingga 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi PTK hingga 31 Desember 2021

Board of Directors Composition up to 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Decree	Periode Masa Jabatan Term of Office
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	Akta No. 5 tanggal 17 Juli 2019 Deed No. 5 dated July 17, 2019	15 Juli/ July 2019 – 31 Desember/ December 2021
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	Akta No. 4 tanggal 12 Juli 2019 Deed No. 4 dated July 12, 2019	20 Juni/ June 2019 – 31 Desember/ December 2021
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operational Director	Akta No. 9 tanggal 24 April 2019 Deed No. 9 dated April 24, 2019	2 April 2019 – 31 Desember/ December 2021
Azwani	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Akta No. 6 tanggal 9 Juni 2020 Deed No. 6 dated June 9, 2020	1 Juni/ June 2020 – 1 September 2021
Afan Aftory	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Akta No. 5 tanggal 17 September 2021 Deed No. 5 dated September 17, 2021	1 September/ September 2021–31 Desember/ December 2021

Pedoman dan Tata Tertib Direksi

Board Manual merupakan bagian dari *soft structure* GCG sekaligus merupakan perwujudan komitmen Direksi terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Selain itu, *Board Manual* juga merupakan wujud komitmen Direksi terhadap pemenuhan ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, serta standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Penyusunan dan penerapan *Board Manual* diharapkan dapat mendorong terwujudnya hal-hal terkait fungsi Direksi, sebagai berikut:

Board of Directors Composition And Terms of Office

The composition of the PTK Board of Directors as of December 31, 2020 is as follows:

Board of Directors Charter

Board Manual is part of the GCG soft structure as well as a manifestation of the Board of Directors' commitment to the implementation of GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. In addition, the Board Manual is also a manifestation of the Board of Directors' commitment to compliance with the provisions of the prevailing laws/regulations, the Company's Articles of Association, and the ethical standards applicable in the Company.

Preparation and implementation of the Board Manual are expected to encourage realization of any conditions related to the functions of the Board of Directors, as follows:



- Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta organ-organ lain Perusahaan.

Board Manual PTK bersifat dinamis, yaitu disesuaikan dengan perkembangan industri dan usaha yang dijalankan Perusahaan. Selain itu penyempurnaan terhadap *Board Manual* juga dilaksanakan sesuai kebutuhan Direksi. *Board Manual* akan dievaluasi secara berkala untuk kemudian direvisi.

Perincian isi *Board Manual* adalah sebagai berikut:

- **Pendahuluan**
Mencakup maksud dan tujuan, ruang lingkup dan referensi yang menjadi acuan.
- **Dewan Komisaris**
Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris, pengaturan Rapat Dewan Komisaris dan organ pendukung Dewan Komisaris.
- **Direksi**
Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, pengaturan Rapat Direksi dan organ pendukung Direksi.
- **Struktur Organisasi dan Prinsip Dasar Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi**
Mencakup struktur organisasi, benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- **Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi**
Mencakup kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris, kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi

- Clearer duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors;
- Ease organs under the Board of Directors to understand their duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as other Company's organs.

PTK Board Manual is dynamic, which is adjusted to the industry development and the business the Company is running. In addition, improvements to the Board Manual were also carried out according to the needs of the Board of Directors. The Board Manual will be evaluated periodically for later revision.

Details of the contents of the Board Manual are as follows:

- **Introduction**
Covers objectives, scope and references which serve as a direction.
- **Board of Commissioners**
Covers duties, authority, and obligations of the Board of Commissioners, organization of Meeting of the Board of Commissioners, and supporting organs of the Board of Commissioners.
- **Board of Directors**
Covers duties, authority, and obligations of the Board of Directors, organization of Meeting of the Board of Directors, and supporting organs of the Board of Directors.
- **Organizational Structure and Basic Principle of Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors**
Covers organizational structure, conflict of interest, and position ethics, as well as basic principles of relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.
- **Management of Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors**
Covers attendance of the Board of Directors in the Meeting of Board of

dan penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi dan program pengenalan Perseroan kepada pejabat baru pada organ Perseroan serta komunikasi formal.

- **Kegiatan antar organ Perseroan**

Mencakup mengenai penyelenggaraan RUPS, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan RKAP, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan, penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan pembuatan Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris.

- **Lain-lain**

Mencakup penggunaan waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup penggunaan waktu Direksi dan Dewan Komisaris; sarana dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris; perjalanan dinas dan cuti.

Commissioners, attendance of the Board of Commissioners in the Meeting of Board of Directors, and Joint Meeting of the Board of Commissioners – Board of Directors, as well as the Company's orientation program to new officials in the Company's organ, including formal communication.

- **Inter-Organs Activities of the Company**

Covers the implementation of GMS for ratifying RKAP and Annual Report; Annual GMS for ratifying Company Long-Term Plan (RJPP), and the Board of Directors' action requiring a Written Approval from the Board of Commissioners.

- **Others**

Covers allocation of time, facilities and infrastructure, including allocation of the Board of Directors and Board of Commissioners' time; allocation of time of the Board of Directors and Board of Commissioners; business trips and leaves.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* antara lain sebagai berikut:

- Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan;
- Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
- Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non-keuangan;
- Memenuhi ukuran kinerja yang jelas lengkap dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan;
- Menyelenggarakan sistem pengendalian *intern* yang efektif dan memberikan asersi mengenai pengendalian *intern*;

Board of Directors Duty and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Directors are set out in the Articles of Association and the Board Manual, as follows:

- Leading and managing the Company in accordance with the interest and objectives of the Company;
- Controlling, maintaining, and managing the Company's assets.
- Implementing RJPP and RKAP, including financial and non-financial target achievement;
- Fulfilling clear, complete, and balanced performance indicators, either from financial or non-financial aspects to determine the Company's mission and objectives achievement;
- Implementing effective internal control system and providing assertion on internal control;



- Melaksanakan manajemen risiko;
 - Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi;
 - Menindaklanjuti temuan-temuan audit Internal Audit dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris;
 - Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/ mutasi/ promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, penanganan HSSE dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
 - Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS;
 - Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Performing risk management;
 - Establishing and utilizing information technology;
 - Following up audit findings of Internal Audit and External Audit, as well as reporting to the Board of Commissioners;
 - Reporting relevant information to the Board of Commissioners, among which on keymanager succession/mutation/ promotion, HR development program, risk management accountability, HSSE management, and information technology utilization performance;
 - Organizing GMS and preparing GMS Minutes Meeting;
 - Taking into account the interest of stakeholders in accordance with ethical values and the prevailing laws and regulations.

Pembagian Tugas Direksi

Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan membagi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Direktur Utama

Bertindak atas nama Direksi dalam menentukan, memutuskan dan menetapkan penyusunan strategi, perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan pengoperasian kapal-kapal milik Perusahaan pelayaran dan pihak-pihak pengguna jasa yang membutuhkan/ mempergunakan jasa Perusahaan, baik yang bergerak di bidang pencarian minyak lepas pantai maupun sektor lain yang bersifat khusus dalam bidang angkutan laut maupun jasa kepelabuhan, agar memperoleh profit optimal dan mengembangkan pangsa pasar dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan.

Board of Directors Division of Duty

In carrying out its activities, members of the Company's Board of Directors divide their duties and responsibilities as follows:

President Director

Acting on behalf of the Board of Directors in determining, deciding, and stipulating the strategies, planning, as well as implementation of all operating activities of ships owned by the Shipping Company and other service users, requiring/utilizing services of the Company, either offshore oil exploration as well as other sectors specialized in marine transportation or port service in order to gain optimal profit and expand market share by taking into account business ethics and upholding the policies established by the Company's Board of Commissioners.

Direktur Operasi

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan penyusunan strategi serta pengembangan usaha terkait pelaksanaan operasional Perusahaan khususnya meningkatkan keandalan operasi kapal sehingga *commission days* dapat tercapai. Melalui penguatan operasional, diharapkan pelaksanaan Bisnis Perusahaan dapat memperoleh profit optimal dengan tetap memperhatikan etika Bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan.

Direktur Pemasaran

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan dalam penyusunan strategi dan pengembangan usaha serta mengidentifikasi kegiatan komersial baru (*new venture*) yang mendorong pertumbuhan bisnis PTK melalui pemasaran dan penjualan (*marketing & sales*) jasa sewa kapal dan jasa maritim kepada pelanggan dari segmen perusahaan oil & gas dan perusahaan non oil & gas, untuk tujuan peningkatan pendapatan dan memperoleh profit optimal bagi perusahaan melalui kegiatan komunikasi pemasaran yang profesional, dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Perusahaan

Direktur Keuangan & SDM

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan kelancaran dalam pengelolaan dana Perusahaan sehingga dapat menjamin likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam menetapkan kebijakan dengan management akuntansi dan perbendaharaan serta penyiapan laporan/data keuangan yang akurat dan tepat waktu serta kegiatan *Human Resources & General Affair* untuk seluruh pekerja Perusahaan untuk menjadikan pekerja PT Pertamina Trans Kontinental sebagai sumber daya unggul, strategis yang mampu mengelola Perusahaan secara profesional.

Operation Director

Deciding, controlling, and directing the preparation of strategies as well as business development related to the Company's operational, specifically in increasing the reliability of ship operation up to the achievement of commission days. Through operational enforcement, the Company's Business is expected to gain optimal profit by continuously considering Business ethics and upholding the policies established by the Company's Board of Commissioners.

Marketing Director

Deciding, controlling, and directing the preparation of strategies and business development, as well as identifying new commercial activities (*new venture*) which promote business growth in PTK through marketing and sales in ships rental and maritime services to the customers from oil and gas and non- oil and gas segments, aiming to increase revenue and gain optimal profit for the company through professional marketing communication activities, by continuously considering business ethics and upholding the policies established by the company.

Finance and HR Director

Deciding, controlling, and directing the simplicity in managing the Company's funds in order to guarantee liquidity, solvency, and rentability in stipulating policies with accounting and treasure management, accurate and prompt financial report/data preparation, as well as Human Resources & General Affair activities for all employees of the Company to shape the employees of PT Pertamina Trans Kontinental into excellent and strategic resources with the capability to manage the Company professionally



Hak, Kewajiban, dan Wewenang Direksi

Dalam melakukan tindakan pengurusan Perusahaan, Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
- Mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan aturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengatur masalah pendelegasian wewenang/ pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Mengidentifikasi peluang bisnis;
- Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Menyelenggarakan program pengenalan bagi Direksi baru yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/ mutasi/ promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban Manajemen Risiko, pelaksanaan L2K3, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS
- Memperhatikan kepentingan *Stakeholders* sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun dan menyelenggarakan program pembelajaran (*knowledge skill*) bagi Direksi;
- Memberikan pertanggungjawaban dan

Board of Directors' Rights, Obligations and Authorities

In carrying out the Company management actions, the Board of Directors has the following authority:

- Stipulating policies relate to the Company's management, including manpower policies.
- Appointing and discharging employees based on the Company's internal regulations and the prevailing laws and regulations;
- Managing delegation of authority/power of attorney of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court. Preparing Company Long-Term Plan and Company Work Plan and Budget;
- Identifying business opportunities
- Composing and implementing proper accounting system with the Financial Accounting Standards
- Holding an orientation program for new relevant Directors to the Board of Commissioners, among which on the succession/mutation/promotion of key manager (senior), HR development program, Risk Management accountability, L2K3 implementation, and information technology utilization performance;
- Organizing General Meeting of Shareholders (GMS) and preparing GMS minutes of meeting
- Taking into account the interest of Stakeholders in accordance with ethical values and the prevailing laws and regulations;
- Preparing and organizing learning program (*knowledge skill*) for the Board of Directors;
- Demonstrating accountability and providing all information on the Company's state of condition and operation;

segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan;

- Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan;
- Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab dan wewenang Manajemen serta ukuran kinerja pada setiap tingkatan/ level;
- Menandatangani kontrak Manajemen setiap tahun yang memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang telah ditetapkan;
- Menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan Perusahaan;
- Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perusahaan lain, dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

- Signing a Conflict of Interest Integrity Pact;
- Determining the duties, responsibilities, and authority of the Management, as well as performance indicators in a clear manner to each level;
- Signing a Management contract every year that states the Board of Directors' statement/commitment to meet all stipulated targets;
- Preparing and publishing the Company's Annual Report;
- Disclosing the Company's shares ownership and/or families in other Companies in the Company's Annual Report.

Program Pengenalan untuk Direksi yang Baru Ditunjuk/ Menjabat

Sejalan dengan kebijakan di Dewan Komisaris, PTK juga telah memiliki kebijakan dan mekanisme bagi anggota Direksi yang baru ditunjuk/menjabat diberikan informasi terkait Perusahaan secara komprehensif dan representatif. Informasi yang diberikan ini merupakan bentuk pengenalan dari Perusahaan kepada anggota Direksi terpilih. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Sekretaris Dewan Komisaris bila ada anggota Dewan Komisaris yang terpilih juga baru dilantik.

Program pengenalan bagi Anggota Direksi baru, mencakup beberapa hal:

- Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi dan Misi, nilai dan budaya Perusahaan, tujuan dan strategi Perusahaan, unit usaha dan anak perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, Manajemen Risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah strategis lainnya;

Orientation Program for New Board of Directors

In line with the policies in the Board of Commissioners, the PTK also has policies and mechanisms for newly appointed/serving members of the Board of Directors to be provided with comprehensive and representative information related to the Company. The information provided is a form of introduction from the Company to selected members of the Board of Directors. This activity is carried out in coordination with the Corporate Secretary in collaboration with the Secretary of the Board of Commissioners if a newly elected member of the Board of Commissioners is also appointed.

The introduction program for new members of the Board of Directors includes:

- An overview of the Company in relation to the Vision and Mission, corporate values and culture, corporate objectives and strategies, business units and subsidiaries, financial and operating performance, short and long-term business plans, information technology applications, risk management, business competition conditions, and other strategic issues;



- Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta pendelegasian wewenang;
- Penjelasan mengenai *stakeholders* utama Perseroan dan tanggung jawab sosial Perusahaan;
- Pengenalan operasi Perusahaan;
- Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- Aspek *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan

Pada pelaksanaannya, program pengenalan Direksi PTK dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/ Anak Perusahaan, pengkajian dokumen, atau kegiatan lain yang dianggap sesuai. Pada tahun 2021 terjadi pergantian susunan Direksi, yakni pada komposisi Direktur Keuangan & SDM.

- Description of the duties and responsibilities of the Board of Directors as well as delegation of authority;
- Description of the main stakeholders of the Company and corporate social responsibility;
- Introduction to the Company's operations;
- Legislation related to the Company's business activities;
- Aspects of Good Corporate Governance within the Company

In practice, the PTK Board of Directors introduction program may take the form of presentations, meetings, visits to the Company/Subsidiaries, document review, or other activities deemed appropriate. In 2021, there was a change in the composition of the Board of Directors, namely the composition of the Finance & HR Director.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Sepanjang tahun 2021 anggota Direksi PTK telah mengikuti pelatihan, seminar ataupun *workshop*, seperti yang tertera di bawah ini:

Board of Directors Competency Development and Training

Throughout 2021 PTK Directors have participated in training, seminars or workshops, as follows:

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Board of Directors Competency Development and Training

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place and Time of Implementation
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	<i>Building The Future Ready Organization</i>	PT Pertamina Training & Consulting	22-25 Juni 2021 June 22 -25, 2021
		<i>Great LeaderSHIP - Transformational Leader Create Next Leader</i>	SH IML - PT Pertamina International Shipping	29 Juli 2021 July 29, 2021
		<i>Awareness SUPREME</i>	HSE Training Center PT Pertamina (Persero)	13 Agustus 2021 August 13, 2021
		<i>Webinar Risk Management</i>	PT IRBA Group Indonesia	13 September 2021 September 13, 2021
		<i>Business Judgment Rule Corporate Action or Corruption?</i>	PT Pertamina Training & Consulting	26-28 Oktober 2021 October 26 - 28, 2021

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Board of Directors Competency Development and Training

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place and Time of Implementation
		<i>Executive Insight Leadership Series</i>	PT Pertamina Training & Consulting	2-4 November 2021 November 2-4, 2021
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operation Director	<i>Leaders Forum/Leaders Insight</i>	PT Pertamina (Persero)	24 Februari 2021 February 24, 2021
		<i>Extracting Value From Successful Holding Implementation</i>	PT Pertamina Training & Consulting	15-18 Juni 2021 June 15 - 18, 2021
		<i>Awareness SUPREME</i>	HSE Training Center PT Pertamina (Persero)	13 Agustus 2021 August 13, 2021
		<i>Webinar Risk Management</i>	PT IRBA Group Indonesia	13 September 2021 September 13, 2021
		<i>Business Judgment Rule Corporate Action or Corruption?</i>	PT Pertamina Training & Consulting	26-28 Oktober 2021 October 26 - 28, 2021
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	<i>Building The Future Ready Organization</i>	PT Pertamina Training & Consulting	22-25 Juni 2021 June 22 - 25, 2021
		<i>Extracting Value From Successful Holding Implementation</i>	PT Pertamina Training & Consulting	15-18 Juni 2021 June 15 - 18, 2021
		<i>Executive Insight Leadership Series</i>	PT Pertamina Training & Consulting	2-4 November 2021 November 2-4, 2021
Afan Aftory	Direktur Keuangan & SDM Direktur Keuangan & SDM	<i>Leaders Forum/Leaders Insight</i>	PT Pertamina (Persero)	26 Agustus 2021 August 26, 2021
		<i>Webinar Risk Management</i>	PT IRBA Group Indonesia	13 September 2021 September 13, 2021
		<i>LeaderSHIP Series - Global Shipping Business</i>	SH IML - PT Pertamina International Shipping	24 September 2021 September 24, 2021
		<i>LeaderSHIP Series - Effective Coaching for Aligning Performance</i>	SH IML - PT Pertamina International Shipping	08 Oktober 2021 October 08, 2021

Realisasi Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2021

Perusahaan sebagai berikut:

1. Menyusun Program Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
2. Menyusun Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2022.
3. Memaksimalkan pencapaian Kinerja Perusahaan tahun 2021 dari sisi penjualan

Realization of the Implementation of the Duties of the Board of Directors in 2021

Companies as follows:

1. Develop the Company's Long-Term Program (RJPP).
2. Prepare the Company's 2022 Budget Plan.
3. Maximizing the achievement of the Company's Performance in 2021 in terms of sales to reach Rp3.8 trillion with an



sehingga mencapai Rp3,8 triliun dengan peningkatan 24%.

4. Memaksimalkan pencapaian Kinerja Perusahaan tahun 2021 dari sisi laba bersih sehingga mencapai Rp654 miliar meningkat 17%.
5. Memaksimalkan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2021 mendapat skor 88,50
6. Memaksimalkan Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) after reward & consequences memperoleh nilai 98,78 dari total nilai 100%.
7. Pemenuhan target kinerja Perusahaan.

Keputusan-Keputusan Strategis

Keputusan-keputusan strategis yang diberlakukan Direksi pada tahun 2021 antara lain terkait RJPP, RKAP, KPI, kebijakan keuangan, rencana investasi, pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.

Kriteria Penunjukan dan Independensi Direksi

Penunjukan anggota Direksi Perusahaan harus memenuhi kriteria antara lain: tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; tidak pernah melakukan tindakan tercela, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan sejenis, dan atau lembaga lain; dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

increase of 24%.

4. Maximizing the achievement of the Company's Performance in 2021 in terms of net profit to reach Rp654 billion, an increase of 17%.
5. Maximizing the Company's Health Level Assessment in 2021 got a score of 88.50
6. Maximizing the Achievement of Key Performance Indicators (KPI) after reward & consequences obtained a score of 98.78 out of a total score of 100%.
7. Fulfillment of the Company's performance targets.

Strategic Decisions

Strategic decisions adopted by the Board of Directors in 2021 include among others RJPP, RKAP, KPI, financial policies, investment plans, appointment of Commissioners in subsidiaries, sub-branches opening

Board of Directors Appointment and Independency Criteria

Appointment of the Company's Board of Directors member shall fulfill the following criteria: have never been declared bankrupt or were guilty of causing a company to go bankrupt; have never committed a disgraceful act, have never been convicted of a criminal act, have never held concurrent positions as Commissioner, Director or Executive Officer at similar companies and/or other institutions; and has no financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or the Company's Shareholders.

Hubungan Afiliasi Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Direksi Perusahaan menjalankan tanggung jawabnya secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak manapun lainnya. Direksi dalam menyelesaikan masalah dalam Perusahaan selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.

Terkait hal tersebut, hubungan keluarga dan/atau keuangan antara anggota Direksi dan sesama anggota Direksi, dengan anggota Dewan Komisaris, dan dengan Pemegang Saham PTK; serta hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Direksi PTK di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Affiliation Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Major/Controlling Shareholders

The Board of Directors of the Company carries out its responsibilities independently and does not receive intervention from shareholders or any other party. In resolving problems within the Company, the Board of Directors always puts personal interests aside and avoids conflicts of interest.

In this regard, family and/or financial relationships between members of the Board of Directors and fellow members of the Board of Directors, with members of the Board of Commissioners, and with PTK shareholders; as well as management relationships and share ownership in other companies by the PTK Board of Directors in 2021 can be seen in the following table:

Hubungan Afiliasi Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama/ Pengendali
Affiliation Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Major/Controlling Shareholders

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Familial Affiliation with			Hubungan Keuangan Dengan Financial Affiliation with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Nepos MT Pakpahan	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Arsono Kuswardanu	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Hadi Purnomo	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Afan Aftory	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No



Rangkap Jabatan dan Kepemilikan Saham

Concurrent Position and Shares Ownership

Nama Name	Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain Management and Share Ownership in Other Companies		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Nepos MT Pakpahan	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Arsono Kuswardanu	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Hadi Purnomo	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No
Afan Aftory	Tidak/ No	Tidak/ No	Tidak/ No

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi untuk membahas permasalahan operasional atau untuk mengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan Perseroan. Berdasarkan *Board Manual* Perusahaan, Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri seluruh anggota Direksi secara fisik.

Ketentuan pelaksanaan Rapat Direksi berdasarkan *Board Manual*:

1. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala minimum satu kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila:
 - a. Dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. Pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan;

Board of Directors Meeting Policy And Implementation

Meetings Policy

Policies of Meeting Meeting of the Board of Directors is a meeting conducted by the Board of Directors to exchange views on operational issues or to make decisions on the Company's policies. According to the Company's Board Manual, Meeting of the Board of Directors should be held periodically and attended by all members of the Board of Directors physically.

Provisions on the implementation of Meeting of the Board of Directors are based on the Board Manual:

1. Board of Directors meetings are held regularly at least once in 1 (one) month.
2. Directors' meetings can be held at any time if:
 - a. Considered necessary by one or more members of the Board of Directors.
 - b. By written request of one or more members of the Board of Commissioners.
 - c. Shareholders who have the largest number of shares by mentioning the matters that will be discussed.
3. Notice to Board of Directors meetings are conducted in writing by members of the Board of Directors who are entitled to represent the Company and submitted within a period of no later than 3 (three) days before the meeting is held.

4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi;
 6. Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat;
 7. Rapat Direksi dapat diadakan dengan cara konferensi antara para Anggota Direksi yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap Anggota Direksi dapat saling mendengar/ berkomunikasi dan berpartisipasi dalam Rapat;
 8. Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Perseroan. Materi rapat dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.
4. The meeting call must include the event, date, time and place of the meeting.
 5. Directors' meetings are held at the Company's place of domicile or at the place of business activities of the Company or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.
 6. Prior meeting notice are not required if all members of the Board of Directors are present at the meeting.
 7. Board of Directors meetings can be held by conference between Directors who are in different places, through conference calls, video conferences or other communication equipment that enable each member of the Board of Directors to listen/communicate with each other and participate in the Meeting.
 8. Meeting materials are prepared by the Corporate Secretary. Meeting material can be delivered together with the invitation.

Rapat Direksi

Dalam Melaksanakan tugasnya, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 24 kali. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Rapat Direksi sepanjang 2021:

Bord of Directors Meeting

In implementing the duties, the Board of Directors held 24 meetings. The Board of Directors frequency and attendance in 2021 are as follows:

Kehadiran pada Rapat Direksi 2021

Board of Directors Meeting Attendance in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	24	24	100%
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operation Director	24	24	100%
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	24	24	100%
Azwani*	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	13	13	100%
Afan Aftory	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	11	11	100%

*menjabat hingga 17 september 2021

*served until 17 September 2021



Agenda rapat Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Directors meeting agenda are as follows:

Tanggal Date	Agenda	
27 Januari 2021 January 27, 2021	1. Tindak lanjut Notulen Rapat BOD BOC tanggal 21 Desember 2020 2. Diskusi Fungsi Keuangan dan Marketing 3. Dry Run materi Rapat BOD BOC tgl 28 Januari 2021	1. Follow up on Minutes of the BOD BOC Meeting on December 21, 2020 2. Discussion on Finance and Marketing Functions 3. Dry Run material for the BOD BOC Meeting on January 28, 2021
01 Maret 2021 March 01, 2021	1. Laporan Tindak Lanjut Rapat BOC BOD tanggal 28 Januari 2021 2. Dry run materi BOC BOD tanggal 02 Maret 2021	1. Follow-up Report of the BOC BOD Meeting on January 28, 2021 2. Dry run of BOC BOD material on March 2, 2021
17 Maret 2021 March 17, 2021	Dry Run Manajemen Risiko untuk BOD BOC tanggal 19 Mei 2021	Risk Management Dry Run for BOD BOC on May 19, 2021
05 April 2021 April 05, 2021	1. Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 02 Maret 2021 2. Dry Run materi BOD BOC tanggal 7 April 2021 3. Izin Prinsip Penawaran calon penyewa lahan PTK di Utan Kayu	1. Follow-up Report of the BOD BOC Meeting on March 02, 2021 2. Dry Run for BOD BOC material on April 7, 2021 3. Principle Licensing Offer of prospective PTK land tenants in Utan Kayu
27 April 2021 April 27, 2021	1. Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 12 April 2021 2. Dry Run materi Rapat BOD BOC tanggal 29 April 2021	1. Follow-up to the BOD BOC Meeting on April 12, 2021 2. Dry Run material for the BOD BOC Meeting on April 29, 2021
11 Mei 2021 May 11, 2021	Persiapan menjalankan Bisnis Marine	Preparation for running a Marine Business
25 Mei 2021 May 25, 2021	Update Kegiatan Operasional PTK	PTK Operational Activity Update
31 Mei 2021 May 31, 2021	1. Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 04 Mei 2021 2. Dry Run materi Rapat BOD BOC tanggal 04 Juni 2021	1. Follow-up to the BOD BOC Meeting on May 04, 2021 2. Dry Run material for the BOD BOC Meeting on June 04, 2021
28 Juni 2021 June 28, 2021	1. Laporan Tindak Lanjut Rapat BOC BOD tanggal 04 Juni 2021 sesuai dengan Notulen Rapat No.053/DEKOM. PTK/2021. 2. Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD Mei 2021 terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2021. 3. Update perkembangan materi Strategy Recovery Plan RKAP 2021 sesuai hasil rapat 15 Juni 2021.	1. Follow-up Report of the BOC BOD Meeting on June 04, 2021 in accordance with the Minutes of the Meeting No. 053/DEKOM. PTK/2021. 2. Operational, Financial, and Investment Performance Report for YTD May 2021 realization of the Company's 2021 Work Plan and Budget. 3. Update on the development of the Strategy Recovery Plan RKAP 2021 according to the meeting results on June 15, 2021.
27 Juli 2021 July 27, 2021	1. Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 30 Juni 2021 2. Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 09 Juli 2021 3. Dry Run materi Rapat BOD BOC tanggal 29 Juli 2021	1. Follow-up Report of the BOD BOC Meeting on June 30, 2021 2. Follow-up Report of the BOD BOC Meeting on July 09, 2021 3. Dry Run material for the BOD BOC Meeting on July 29, 2021
16 Agustus 2021 August 16, 2021	1. Progress piutang konsolidasi PTK YTD Juli 2021 2. Pembahasan potensi kurang bayar denda keterlambatan delivery kapal PT Dok Bahari Nusantara (DBN)	1. Progress of PTK YTD consolidated receivables July 2021 2. Discussion on potential underpayment of fines for late delivery of PT Dok Bahari Nusantara (DBN) ships

Tanggal Date	Agenda	
25 Agustus 2021 August 25, 2021	1. Progress Penyelesaian Piutang 2. Realisasi RKAP Tahun 2021 3. Realisasi dan Prognosa Strategy Recovery Plan Tahun 2021	1. Receivable Settlement Progress 2. Realization of RKAP in 2021 3. Realization and Prognosis of Strategy Recovery Plan for 2021
30 Agustus 2021 August 30, 2021	1. Laporan Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 29 Juli 2021 2. Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD Juli 2021 terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2021 3. Klarifikasi dan Konfirmasi Data Laporan Manajemen Periode Juli 2021	1. Follow-up Report of the BOD BOC Meeting on July 29, 2021 2. Operational, Financial, and Investment Performance Report of PTK realization YTD July 2021 against the Company's 2021 Work Plan and Budget 3. Clarification and Confirmation of Management Report Data for the Period of July 2021
08 September 2021 September 08, 2021	Update Kegiatan Operasional PTK	PTK Operational Activity Update
15 September 2021 September 15, 2021	1. Progress Strategy Recovery Plan YTD Agustus 2021 2. Progress Pekerjaan Regasifikasi 3. Progress Kerjasama PTK – PELINDO I	1. Progress Strategy Recovery Plan YTD August 2021 2. Progress of Regasification Work 3. Progress of PTK – PELINDO I Cooperation
22 September 2021 September 22, 2021	1. SDM & Organisasi 2. Realisasi kegiatan Bundling – Unbundling 3. Fasilitas Kantor	1. HR & Organization 2. Realization of Bundling – Unbundling activities 3. Office Facilities
29 September 2021 September 29, 2021	1. Tindak Lanjut rapat BOD BOC Meeting yang dilaksanakan pada Selasa, 31 Agustus 2021. 2. Laporan Kinerja Operasi, Keuangan, dan Investasi PTK realisasi YTD Agustus 2021 terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2021. 3. Update perkembangan sistem Teknologi Informasi PTK sesuai dengan Notulen Rapat BOD BOC No. NR-71/DEKOM.PTK/2021, Surat Dewan Komisaris No.068/DEKOM.PTK/2021 tanggal 03 Juli 2021, dan Surat Direktur Utama PTK No. 943/PTK0000/2021/2021 tanggal 06 September 2021.	1. Follow-up to the BOD BOC Meeting which will be held on Tuesday, August 31, 2021. 2. Operational, Financial, and Investment Performance Report of YTD realization in August 2021 against the Company's 2021 Work Plan and Budget. 3. Update on the development of the PTK Information Technology system in accordance with the Minutes of the BOD-BOC Meeting No. NR-71/DEKOM.PTK/2021, Letter of the Board of Commissioners No. 068/DEKOM.PTK/2021 dated July 3, 2021, and Letter of the President Director of PTK No. 943/PTK0000/2021/2021 dated September 06, 2021
04 Oktober 2021 October 04, 2021	Progress Penggabungan Marine ke PTK dengan pembahasan utama terkait : a. Implementasi SDM dan Organisasi. b. Realisasi kebijakan transfer pricing bundling dan unbundling serta isu outstanding (apabila ada). c. Kesiapan kantor baru PTK.	Progress of Merging Marine to PTK with main discussion related : a. Implementation of HR and Organization. b. Realization of transfer pricing bundling and unbundling policies and issues outstanding (if any). c. Readiness of PTK's new office.
21 Oktober 2021 October 21, 2021	Progress Strategy Recovery Plan YTD September 2021 dan Prognosa	Progress Strategy Recovery Plan YTD September 2021 and Prognosis
03 November 2021 November 03, 2021	1. Kinerja YTD September 2021 2. Tindak Lanjut NR BOD BOC tanggal 30 September 2021 3. Tindak Lanjut Proses People Development di PTK	1. YTD Performance September 2021 2. Follow up on NR BOD BOC on September 30, 2021 3. Follow-up on the People Development Process at PTK
15 November 2021 November 15, 2021	1. Progress Strategy Recovery Plan YTD Oktober 2021 2. HSSE Plan Tahun 2022	1. Progress Strategy Recovery Plan YTD October 2021 2. HSSE Plan for 2022



Tanggal Date	Agenda	
29 November 2021 29 November 2021	1. Kinerja YTD Oktober 2021 2. Tindak Lanjut NR BOD BOC tanggal 5 November 2021 3. Manajemen Risiko PTK	1. YTD Performance October 2021 2. Follow-up NR BOD BOC on November 5, 2021 3. PTK Risk Management
06 Desember 2021 December 06, 2021	Pembahasan Tindak Lanjut Pembangunan Kapai-Kapal Milik PTK	Discussion on the Follow-up to the Construction of PTK's Vessels
16-18 Desember 2021 December 16-18, 2021	Retreat Dieksi dan Manajemen	Board of Directors and Management Retreat

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi kepemimpinan PTK mengacu pada kebijakan induk Perusahaan yaitu PT Pertamina International Shipping. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suksesi kepemimpinan Perusahaan berasal dari internal PTK dan eksternal PTK baik dari PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina (Persero) maupun anak Perusahaan Pertamina yang lainnya.

Dalam mekanisme suksesi Direksi, PTK mengadakan pelatihan baik internal maupun eksternal serta pengembangan kompetensi khususnya kompetensi *leadership* dan kompetensi pejabat perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Hal tersebut guna mempersiapkan bakal calon anggota Direksi yang selanjutnya akan diajukan kepada pemegang saham dalam RUPS serta mengikuti *fit and proper test*.

Penilaian Atas Kinerja Masing-Masing Komite yang Berada di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Per 31 Desember 2021, PTK tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. Dengan demikian PTK tidak menyajikan informasi tentang penilaian atas kinerja masing-

Board of Directors Succession Policy

The PTK leadership succession policy refers to the policy of the parent company, PT Pertamina (Persero). Based on these provisions, the succession of company leadership comes from internal PTK and external PTK namely PT Pertamina (Persero) and other Pertamina subsidiaries.

In the Board of Directors succession mechanism, PTK conducts training both internally and externally as well as developing competencies, especially leadership competencies and competencies of company officials who meet the requirements to be promoted. This is in order to prepare prospective members of the Board of Directors which will further be submitted to shareholders at the GMS as well as following the fit and proper test.

Assessment of the Performance of Each Committee Under the Board of Directors and the Basis of Assessment

As of December 31, 2021, PTK has not yet established any Committee under the Board of Directors. Therefore, PTK does not provide information about the assessment of the

masing komite yang berada di bawah Direksi dan dasar penilainya.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Komisaris, Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual Dewan Komisaris, anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif dikarenakan keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang.

performance of each committee under the Board of Directors and the basis for the assessment.

Board of Commissioners and Board of Directors Diversity

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is the desired combination of characteristics, both in terms of the organs of the Commissioners, Directors and members of the Board of Directors individually, according to the needs of the Company. This combination is determined by taking into account the expertise, knowledge and experience appropriate to the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the Company's goals. However, consideration on combination of characteristics referred to will have an impact on the accuracy of the nomination process and the appointment of individual members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the Board of Directors collegially.

The diverse composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors will encourage more objective and comprehensive decision making because decisions are taken by taking into account various points of view.



Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan perusahaan sehingga assessment atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perusahaan merupakan anak usaha dari BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Kriteria Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Kriteria/parameter dan pencapaian penilaian atas kinerja anggota Dewan Komisaris berdasarkan parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan keputusan Sekretaris Menteri BUMN nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penenerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Asesmen Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pencapaian kinerjanya untuk periode 2021 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Untuk menentukan kinerja Dewan Komisaris, Perseroan menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris yang tertuang dalam rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. Adapun KPI Dewan Komisaris mencakup:

The Board of Commissioners and the Board of Directors have a central role in the movement of the company's growth so that an assessment of these two organs is a must, especially because the Company is a subsidiary of a BUMN that is directed to apply GCG principles to BUMN standards as well as an assessment of the implementation.

Performance Criteria for the Board of Commissioners and Directors Performance Assessment

Criteria/parameters and achievement of the assessment of the performance of the Komisrais Council members based on the parameters developed by the Ministry of BUMN in accordance with the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Governance Implementation Good company.

Assessment of the Board of Commissioners

The assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out by the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Commissioners is accountable for its performance achievements for the 2021 period in the GMS which will be held in 2022.

To determine the performance of the Board of Commissioners, the Company establishes Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners which are contained in the Work plan and Budget of the Board of Commissioners. The KPI for the Board of Commissioners includes:

Kriteria Penilaian

Berdasarkan *Board Charter* Dewan Komisaris, penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat berdasarkan kriteria umum, antara lain:

- Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan pemegang saham;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris atau Komite dengan unit kerja lainnya.

Selain itu, kinerja Dewan Komisaris dapat dinilai menurut faktor lainnya baik secara individual maupun kolektif sebagai berikut:

- Integritas (misalnya benturan kepentingan yang muncul);
- Pengetahuan dan pemahaman Dewan Komisaris atas nilai-nilai misi, rencana jangka panjang Perusahaan, dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun;
- Partisipasi Dewan Komisaris dalam rapat-rapat, termasuk kemampuan mereka untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perusahaan;
- Kemampuan Dewan Komisaris dalam mengikuti isu-isu dan tren yang berpengaruh terhadap Perusahaan dan menggunakan informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja Perusahaan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang;
- Hubungan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Komisaris, dengan Direksi, dan pihak-pihak lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.

Assessment Criteria

Based on the Board Charter of the Board of Commissioners, the performance assessment of the Board of Commissioners can be based on general criteria, including:

- Attendance at Board of Commissioners internal meetings;
- Attendance at Board of Commissioners' and Board of Directors Joint Meetings;
- Attendance at the Board of Commissioners' meeting with shareholders;
- Attendance at Board of Commissioners or Committee meetings with other work units.

In addition, the performance of the Board of Commissioners can be assessed according to other factors both individually and collectively as follows:

- Integrity (e.g. conflicts of interest that arise);
- The Board of Commissioners' knowledge and understanding of the mission values, the company's long-term plans, and reflects this understanding on important issues throughout the year;
- Participation of the Board of Commissioners in meetings, including their ability to present, provide arguments and provide solutions on corporate strategic issues;
- The ability of the Board of Commissioners to follow issues and trends affecting the company and use this information to assess and direct the company's performance, not only from year to year, but also in the long term;
- Relationships between members of the Board of Commissioners and fellow members of the Board of Commissioners, with the Board of Directors, and other parties as stipulated in the Articles of Association and laws and regulations



Hasil Penilaian

Perihal penilaian kinerja Dewan Komisaris Umum diatur dalam *Board Manual Perusahaan*. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keberhasilan memenuhi target pencapaian *Key Performance Indicators (KPI)* yang telah ditetapkan Pemegang Saham. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris telah dapat memenuhi target pencapaian KPI kinerja selama tahun 2021.

Assessment Result

Considering the Board of Commissioners performance assessment as regulated in the Company's Board Manual. Performance assessment of the Board of Commissioners is carried out based on Key Performance Indicators (KPI) target achievement set by Shareholders. Overall, the Board of Commissioners has been able to meet the KPI achievement target for 2021.

Parameter Parameter		Target 2021 2021 Target	Real YTD TW IV Real YTD TW IV
Rutinitas Kegiatan Dewan Komisaris Routine Activities of the Board of Commissioners (BoC)			
Pelaksanaan Rapat	Meeting Implementation	12x	48
Pelatihan Dekom/Komite	BoC/Committee Training	6x	13
Kunjungan Dekom/Komite	BoC/Committee Visit	2x	8
Service Level Agreement			
Pendapatan/Saran RKAP	RKAP Revenue/Suggestion	20 hari kerja / work days	11
Pendapatan/Saran RJPP	RJPP Revenue/Suggestion	40 hari kerja / work days	18
Persetujuan/Rekomendasi Atas Permintaan Direksi	Approval/Recommendation at the request of the Board of Directors	15 hari kerja / work days	7
Administrasi & Pelaporan Administration & Reporting			
Kehadiran Dekom dalam RUPS/RUPSLB	Attendance of the BoC at the GMS/EGMS	100%	100%
Pelaporan Pengawasan Dekom kepada Pemegang Saham	BoC Supervisory Report to Shareholders	4 laporan / reports	6x
Pelaporan Kinerja Direksi kepada Pemegang Saham	Board of Directors Performance Reporting to Shareholders	2 laporan / reports	6x

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Dewan Komisaris mengacu pada Indikator KPI Direksi. Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya selama periode tahun 2021 didalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Board of Directors Performance Assessment

Assessment on Board of Directors performance is carried out by the Board of Commissioners and the GMS. The Board of Commissioners refers to the Board of Directors KPI Indicators. The Board of Directors is accountable for its performance during the 2021 period in the GMS which will be held in 2022.

Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Perusahaan menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2020.
3. Penilaian tingkat kesehatan Perseroan yang mencakup 3 Aspek utama yaitu:
 - a. Aspek Keuangan
 - b. Aspek Operasional
 - c. Aspek Administrasi
4. Indikator Kinerja Pendukung Lainnya.

In assessing the performance of the Board of Directors, the Company sets the Board of Directors Key Performance Indicator (KPI) which consists of:

1. Implementation of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association of the Company.
2. Implementation of the resolutions of the 2020 Annual GMS
3. Assessment of the Company's health level which includes 3 main aspects, namely:
 - a. Financial aspect
 - b. Operational Aspects
 - c. Administrative Aspects
4. Other Supporting Performance Indicators.

<i>Key Performance Indicator</i>		Realisasi Realisasi
Economic and Social Value		49,40
1	EBITDA SH Integrated Marine Logistics	5,50
2	EBITDA PTK	6,62
3	Net Profit Margin	6,60
4	Gross Profit (Operating Profit)	4,76
5	Integrated Logistic Cost – Shipping & Marine Cost per Unit	4,55
6	% Revenue from external customer	4,40
7	Pemenuhan ALD/ADD	3,21
8	Customer Satisfaction Index	4,00
9	Transportation Losses (R2)	6,60
10	Vendors' Satisfactory Index (Fuel Transports)	3,15
Business Model Inovation		19,42
1	Total Recordable Incident Rate (TRIR)	5,50
2	Commission Days	5,25
3	Integrated Port Time	4,40
4	New Marine Market Capture	4,27
Technology Leadership		3,30
1	Digitalisasi Proses Bisnis PTK/ PTK Business Process Digitization	3,30
Energize Investment		24,04
1	Realisasi Investasi (ABI)/ Investment Realization (ABI)	4,78



<i>Key Performance Indicator</i>		Realisasi Realisasi
2	Realisasi Investasi (Fisik)/ Investment Realization (Physical)	4,26
3	Program Strategic Initiatives/ Strategic Initiatives Program	5,50
4	Pencapaian Unlock Value Pertamina Group – SH IML/ Achievement of Unlock Value Pertamina Group – SH IML	4,00
5	Average Utilization of TKDN	5,50
Unleash Talent		6,60
1	Learning Hours	6,60
Boundary KPI		-4,00
1	Number of Accident (NoA)	-5,00
2	Pelaporan e-LHKPN	0,00
3	Risk Management Implementation	0,00
4	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal & Eksternal/ Follow-up on Internal & External Audit Results Recommendations	0,00
5	Utilisasi Teknologi/ Technology Utilization	0,00
Total		98,76

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

Dalam menetapkan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi, Perusahaan menjadikan indikator pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, kemampuan keuangan Perusahaan juga dijadikan pertimbangan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan.

Kebijakan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pencapaian kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi. Pertimbangan lain adalah ketentuan yang berlaku baik di internal PT Pertamina International Shipping maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- Undang-Undang PT Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 113;
- Peraturan Menteri No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Anggaran Dasar Perusahaan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS secara sirkuler dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan dan pemegang saham. Mekanisme penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PTK tergambar dalam skema sebagai berikut:

In stipulating the Board of Commissioners and the Board of Directors remuneration, the Company applies the Key Performance Indicator (KPI) achievement indicators and the soundness level according to the management contract as the consideration. Moreover, the Company's financial capacity is considered, as well as other relevant factors.

The remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors refers to the achievement of the performance of the Board of Commissioners and Directors. Another consideration is the provisions that apply both internally at PT Pertamina (Persero) and the laws and regulations in Indonesia

- PT Law Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 113;
- Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/06/2016 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 Determination of the Income of Directors, Board of Commissioners, and Board of Trustees of State-Owned Enterprises;
- Articles of association.

The Board of Commissioners and the Board of Directors Remuneration Procedure

Amount of the Board of Commissioners and the Board of Directors amount is determined by a circular GMS with due observance of the results of studies conducted by the Company and shareholders. PTK's Board of Commissioners and Board of Directors



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan indikator Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PTK mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Direksi untuk Penetapan Remunerasi

Dalam menetapkan penghasilan Direksi PTK, Perusahaan menjadikan indikator pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, kemampuan keuangan Perusahaan juga dijadikan pertimbangan, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan.

remuneration mechanism is illustrated in the following:

Indicators of Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Stipulation

In determining the Remuneration indicator for the Board of Commissioners and Board of Directors in PTK, it refers to the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 Determination of the remuneration of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises; as follows:

1. Business scale factor
2. Business complexity factors
3. Inflation rate
4. The Company's financial condition and capability
5. Other factors that are relevant, and should not conflict with statutory regulations.

Board of Directors Performance Indicators for Remuneration Stipulation

In determining the salary for the Directors of PTK, the Company takes the Key Performance Indicator (KPI) achievement indicators and the company health level according to the management contract as a consideration. Apart from that, the company's financial capacity is also considered, as well as other relevant factors.

Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PTK

1. Manajemen mengajukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan industri, pencapaian kinerja Perusahaan yang signifikan, tantangan dan/ atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan. Pengajuan tersebut diberikan kepada pemegang saham melalui *Vice President Subsidiary Joint Venture* (SJV) PT Pertamina International Shipping.
2. VP SJV PT Pertamina International Shipping melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kepada *Human Resource* (HR) PT Pertamina International Shipping untuk menentukan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. (HR) PT Pertamina International Shipping melakukan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada Direksi PT Pertamina International Shipping dalam bentuk risalah rapat Direksi secara sirkuler.
4. Setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Pertamina International Shipping, HR PT Pertamina Persero) menyampaikan kepada SJV Pertamina (Persero) untuk menyelenggarakan RUPS secara sirkuler guna menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTK.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan besaran remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, mengingat PTK adalah

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Mechanism

1. The management proposes remuneration for the Board of Commissioners and Directors by considering the complexity of the business and industry, the achievement of significant corporate performance, challenges and/or specific assignments given. The submission was given to shareholders through PT Pertamina (Persero) Vice President Subsidiary Joint Venture (SJV).
2. VP SJV PT Pertamina (Persero) conducted a study and prepared recommendations to PT Pertamina (Persero) Human Resources (HR) to determine the amount of remuneration for the members of the Board of Commissioners and Directors.
3. (HR) PT Pertamina (Persero) conducts studies and prepares recommendations to the Directors of PT Pertamina (Persero) in the form of minutes of the Board of Directors' circular meeting.
4. After obtaining approval from the Directors of PT Pertamina (Persero), HR PT Pertamina Persero) conveyed to SJV Pertamina (Persero) to hold a RUPS in a circular manner to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors of PTK.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

Determination of remuneration amount refers to Minister of SOEs Regulation Number: PER-04/ MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners of State-



Anak Perusahaan PT Pertamina International Shipping yang merupakan BUMN. Dalam penetapan tersebut, remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi antara lain gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Owned Enterprises, since PTK is a subsidiary of PT Pertamina (Persero) which is a SOE. In the stipulation process, the remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors includes salaries or honorariums, allowances and facilities that are fixed, considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, conditions and financial capabilities of the Company, and other factors which is relevant.

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The structure and components of the remuneration received by the BoC and Directors in 2021 are as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure 2021

No	Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration	Remunerasi Direksi Board of Directors' Remuneration
1	HONORARIUM	GAJI / SALARY
2	TUNJANGAN/ ALLOWANCE - Tunjangan Transportasi/ Transportation Allowance - Tunjangan Hari Raya Keagamaan/ Religious Holiday Allowance - Asuransi Purna Jabatan/ Post-Service Allowance	TUNJANGAN/ ALLOWANCE - Tunjangan Transportasi/ Transportation Allowance - Tunjangan Hari Raya Keagamaan/ Religious Holiday Allowance - Asuransi Purna Jabatan/ Post-Service Allowance
3	FASILITAS/ FACILITIES - Fasilitas Kesehatan/ Health Facilities - Fasilitas Bantuan Hukum/ Legal Assistance Facilities	FASILITAS/ FACILITIES - Fasilitas Kendaraan Ringan/ Light Vehicle Facilities - Fasilitas Kesehatan/ Health Facilities - Fasilitas Bantuan Hukum/ Legal Assistance Facilities - Fasilitas komunikasi dan sarana teknologi informasi/ Communication and information technology facilities and infrastructure
4	TANTIEM / INCENTIVE	TANTIEM / INCENTIVE

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The structure and components of the remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021 are as follows:

Tabel Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1	Gaji/ Honorarium	Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama Honorarium for the President Director amounted to 45% of President Director's Honorarium Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama. Honorarium for Commissioner amounted to 90% of President Commissioner's	Gaji Direktur Utama: 100% Salary for President Director: 100% Gaji Direktur sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama. Salary for Director amounted to 85% of President Director's Salary
2	Tunjangan Allowance	Tunjangan Transportasi Dewan Komisaris sebesar 20% Honorarium Komisaris Utama/Komisaris Transportation Allowance for the Board of Commissioners amounted to 20% of President Commissioner/Commissioner's Honorarium Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali Honorarium. 1 (one) time Honorarium allowance Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat dengan premi yang ditanggung oleh Perseroan paling banyak (maksimum) 25% dari Honorarium dalam satu tahun.	- Tunjangan Perumahan (termasuk didalamnya Tunjangan Utilities) - Direktur Utama: 100% - Direksi: 85% dari Tunjangan Perumahan Direktur Utama - Housing Allowance (in which includes Utilities Allowance) - President Director: 100% - Board of Directors: 85% of Housing Facilities of President Director Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali Gaji (terdapat pengalihan THRK menjadi CSR). Religious Holiday Allowance equivalent to 1 (one) time Salary (there was a THRK transfer to CSR) Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat dengan premi yang ditanggung oleh Perseroan paling banyak (maksimum) 25% dari Gaji dalam satu tahun.

**Tabel Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
		Post-Service Insurance is provided during the term of office with a premium that is borne by the Company at most (maximum) 25% of the Honorarium in one year	Post-Service Insurance is provided throughout the term of office with premium borne by the Company at 25% maximum of one-year Salary
3	Fasilitas Kesehatan Health Facilities	-	Fasilitas kesehatan Direksi dan keluarga dengan biaya pengobatan sesuai kemampuan Perusahaan. Health facilities provided for the Board of Directors and the family with medical treatment adjusted to the Company's capability
4	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	-	- Direktur Utama : 1 (satu) unit kendaraan Sedan Kap 2400 cc, A/T Gasoline - Direktur : kendaraan SUV Kap. 2500 cc A/T Diesel, Kap 2700 cc A/T Gasoline atau Sedan Kap. 2000 cc A/T Gasoline - President Director: 1 (one) Sedan, 2400 cc Capacity, A/T Gasoline - Director: SUV with the Capacity of 2500 cc A/T Diesel, Capacity of 2700 cc A/T Gasoline or Sedan with Capacity of 2000 cc A/T Gasoline
5	Fasilitas komunikasi dan sarana teknologi informasi Communication and Information technology facilities and infrastructure	Fasilitas komunikasi yang terdiri dari Data dan Voice dibayarkan oleh Perusahaan dengan batasan maksimum: - Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama; - Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama Diberikan alat komunikasi/alat kerja satu kali selama masa jabatan berupa: - Notebook + Modem (dan simcard data) - Tablet PC - Handphone	Fasilitas komunikasi yang terdiri dari Data dan Voice dibayarkan oleh Perusahaan dengan batasan maksimum: - Direktur Utama 100%; - Direktur sebesar 90% dari Direktur Utama. Diberikan alat komunikasi/alat kerja satu kali selama masa jabatan berupa: - Notebook + Modem (dan simcard data) - Tablet PC - Handphone

Tabel Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
		Communication facilities, consisting of Data and Voice are paid by the Company with maximum limit as follows: • President Commissioner received 45% of President Director • Commissioner received 90% of President Commissioner Communication/work instruments were provided one time throughout the term of office in the of: • Notebook + Modem (including simcard data) • Tablet PC • Handphone	Communication facilities, consisting of Data and Voice are paid by the Company with maximum limit as follows: • President Director: 100% • Director received 90% of President Director Communication/work instruments were provided one time throughout the term of office in the form of: • Notebook + Modem (including simcard data) • PC Tablet • Handphone

Tantiem

Ketentuan mengenai pemberian tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, mengacu pada Keputusan RUPS.

Penetapan penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan. Faktor-faktor lain yang relevan termasuk di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Incentive

The provisions regarding tantiem for the Board of Commissioners and Directors of the Company refer to the Resolution of the GMS.

Establishment of remuneration in the form of Bonus/ Work Incentive/Special Incentive which are variable (merit rating) by nature is performed by considering the Company's financial performance and capability as well as other relevant factors. Another relevant factor is the general income level in similar industries.

**Struktur Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**
Structure of Bonus/Work Incentive/Special Incentive for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

No	Direksi Board of Directors	Board of Commissioners Board of Commissioners
1	Insentif Direktur Utama 100% dari Insentif Direktur Utama President Director & CEO's incentive 100% of the President Director & CEO incentive	Insentif Komisaris Utama 45% dari insentif Direktur Utama. President Commissioner's incentive 45% of the President Director & CEO incentive
2	Insentif Anggota Direksi Lain 85% dari Insentif Direktur Utama Other Members of the Board of Director's incentive 85% of the President Director & CEO incentive	Insentif Anggota Komisaris Lain 90% dari insentif Komisaris Utama Other Members of the Board of Commissioners' incentive of the President Commissioner incentive

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of The Board of Commissioners

Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Komite Investasi dan Risiko Usaha dalam menjalankan tugas dan pengawasannya.

The Board of Commissioners is assisted by supporting organs, namely the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Investment and Business Risk Committee in carrying out their duties and supervision.



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS Secretary To Board Of Commissioners

Dewan Komisaris PTK membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang bertugas membantu dan mendukung kelancaran kegiatan dan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam melakukan pengurusan Perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Sekretaris Dewan Komisaris berperan membantu Dewan Komisaris dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi serta mengkoordinasikan penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Board of Commissioners in PTK has established Secretariat of the Board of Commissioners which is in charge to assist and support smooth running of the activities and duties of the Board of Commissioners in supervising and providing advice to the Board of Directors in managing the company. This is in accordance with the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Role of Secretary to Board of Commissioners is to assist the Board of Commissioners in carrying out administrative activities and coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of the Secretary of the Board of Commissioners is carried out by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Secretary to Board of Commissioners



DIAN VITA ALPHA SUANDI

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 September 1982. Saat ini berusia 39 tahun. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan SK-123/DEKOM. PTK/2021 tanggal 07 Oktober 2021.

Indonesian citizen domiciled in Jakarta. Born in Yogyakarta on September 04, 1982. Currently 39 years. She serves as Secretary to the Board of Commissioners according to SK-123/DEKOM. PTK/2021 dated October 07, 2021.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Advisor I Project Management Office - Upstream PT Pertamina (Persero) sejak Oktober 2020 sampai saat ini.

Earned a Bachelor's degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung in 2004. Currently also serves as Advisor I Project Management Office - Upstream PT Pertamina (Persero) since October 2020 until now.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Secretary to Board of Commissioners

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The Duties and Responsibilities of the Secretary to Board of Commissioners are as follows:

1. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
 - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;

1. The Secretary of the Board of Commissioners conducts activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties in the form of:
 - Preparing meetings including materials for the Board of Commissioners' briefing sheet;
 - Prepare minutes of meetings of the BoC in accordance with the provisions of the Company's articles of association;

- Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
 - Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
 - Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
 - Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
 - Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
 4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
- Administer the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
 - Arranging the Board of Commissioners' Work Plan and Budget
 - Drafting the Reports of the Board of Commissioners;
 - Carry out other duties of the Board of Commissioners.
2. In addition to carrying out the duties referred to above, the Secretary of the Board of Commissioners as the leader of the Secretariat, carries out other tasks in the form of:
 - Ensuring that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and applies GCG principles;
 - Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested;
 3. Coordinate Committee members, if needed in order to expedite the duties of the Board of Commissioners;
 4. As liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2021

Selama tahun 2021 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui pemberian informasi, *review*, kajian, dan laporan kepada Dewan Komisaris agar fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan efektif, yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

Implementation of the Duties of the Secretary of the Board of Commissioners in 2021

In 2021, Secretary to the Board of Commissioners has carried out his functions and duties to assist and support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in carrying out supervision of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors through providing information, reviews, studies and reports to the Board of Commissioners so that the supervisory function of the Board of Commissioners runs effectively, which generally includes the following:



1. Membantu menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022 dan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris 2021.
2. Memantau, *mereview* dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaharuan/penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris serta piagam komite-komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
4. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain: Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi dokumen/surat menyurat Komisaris termasuk mempersiapkan surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.
1. Assist in compiling the 2020 Board of Commissioners Work Plan and the 2019 Board of Commissioners Work Plan Realization.
2. Monitor, review and inform developments of the latest laws and regulations to be submitted to the Board of Commissioners, including the preparation, renewal/adjustment of the Decree of the Board of Commissioners and the charters of the committees under the Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.
3. Coordinating and holding Board of Commissioners meetings including preparing meeting schedules, meeting materials, compiling and administering the minutes of the Board of Commissioners 'meetings, submitting suggestions and opinions of the Board of Commissioners based on the results of the Board of Commissioners meeting to the Board of Directors and monitoring the follow-up of the Board of Commissioners' suggestions and opinions.
4. Assisting and supporting the implementation of the duties of the Committees under the Board of Commissioners as part of the duties of the Board of Commissioners based on applicable regulations, including: Carrying out administrative duties related to the smoothness of the Commissioners 'duties, namely managing, storing and administering the Commissioners' documents/correspondence, including preparing approval letters as well as strategic input/suggestions from the Board of Commissioners to be submitted to the Board of Directors.



KOMITE AUDIT

Audit Committee

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, terutama dalam masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tata kelola perseroan yang baik (GCG), kebijakan akuntansi perseroan, pengawasan internal, pemeriksaan oleh akuntan publik serta sistem pelaporan keuangan dan informasi lainnya.

Komite audit dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan tugas Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris harus memenuhi asas profesionalisme, objektivitas dan independen.

Komite audit dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris selaku ketua merangkap anggota Komite Audit. Ketua komite audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) anggota ahli yang bukan pekerja PTK serta diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.

Audit Committee was established to assist the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function of the company's management, especially in matters related to Good Corporate Governance (GCG) implementation, corporate accounting policies, internal supervision, audits by public accountants and financial reporting systems and other information.

In carrying out its duties, the Audit Committee is under and reports to the Board of Commissioners. The Audit Committee duty implementation report submitted to the Board of Commissioners shall comply with professionalism, objectivity and independency principles.

The audit committee is formed by the decision of the Board of Commissioners. Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The audit committee is chaired by one of the members of the Board of Commissioners as chairman and concurrently a member of the Audit Committee. The Audit Committee Chairman has the right to propose and placement for the members of the audit committee if one of the members of the audit committee ends, resigns or is dismissed.

Audit Committee Membership

The Audit Committee membership consists of at least 1 (one) Commissioner and 2 (two) expert members who are not PTK workers and are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Chairman is a Member of the Board of Commissioners who is an Independent Commissioner or Member of the Board of Commissioners who can act independently.

Penentuan anggota Komite Audit mengacu pada ketentuan Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan sebagai anggota Komite Audit, yaitu:

- Memiliki integritas yang baik, pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/ pemeriksaan;
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup.

Anggota Komite Audit terpilih yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan sewaktu-waktu meskipun jabatannya belum berakhir, dengan syarat antara lain:

- Mengundurkan diri;
- Kehilangan kewarganegaraan;
- Meninggal dunia;
- Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan;
- Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit;
- Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.

The appointment of members of the Audit Committee refers to the provisions of Per-12/MBU/2012 dated August 24, 2012. These provisions stipulate the requirements for membership of the Audit Committee, namely:

- Having good integrity, insights as well as sufficient work experience in the field of supervision/inspection;
- Not having personal interest/involvement that may cause negative impacts and conflict of interest toward the Company;
- Having adequate insights to study and comprehend financial statements;
- Capable to communicate effectively and provide sufficient time.

The elected members of the Audit Committee who are not Members of the Board of Commissioners have a maximum term of office of three years and can be extended once for two years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Dismissal of members of the Audit Committee can be done at any time even though his position has not ended, with the following conditions:

- Resigns;
- Lost of the citizenship;
- Passed-away;
- Performs any actions that cause loss to the Company;
- Violates or unable to fulfil the requirements as a member of the Audit Committee, as regulated in the Audit Committee Charter;
- Is unable to perform its duties and responsibilities based on the statement given by the Board of Commissioner.

Komposisi Anggota Komite Audit

Pada tahun 2021, keanggotaan Komite Audit PTK sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari pihak profesional yang independen. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada POJK 55 dan sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Audit. Komposisi keanggotaan Komite Audit, PTK periode tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Composition of Audit Committee Members

In 2021, the membership of the Audit Committee in PTK consists of 3 (three) members including 1 (one) chairman who also an Independent Commissioner and 2 (two) members from independent professionals. This is in accordance with the applicable laws and regulations, including but not limited to POJK55 and in accordance with the provisions of the Audit Committee Charter. The composition of the membership of the Audit Committee in PTK for the 2021 period is as follows:

Komposisi Keanggotaan Komite Audit PTK Periode Tahun 2021

Composition of PTK Audit Committee Members in 2021

	1 – 31 Jan 2021	15 Feb–13 Mei 2021	14 Mei–30 Okt 2021	1 – 12 Nov 2021	25 Nov–31 Des 2021
Ketua Chairman	Achmad Fachruddin (a)	Ivan Airlangga EP. (d)	Ivan Airlangga EP.	Ivan Airlangga EP.	Khalid Zabidi (f)
Anggota Member	Budiarto (b)	Budiarto	Edward Situmorang	Edward Situmorang	Edward Situmorang
	Edward Situmorang (c)	Edward Situmorang		Harry Mulia (e)	Harry Mulia
Dasar Pengangkatan Basic Information of Appointment	(a) 015/DEKOM.PTK/2018 tanggal 08 Maret 2018/ dated March 8, 2018 (b) SK-009/DEKOM.PTK/2020 tanggal 11 Mei 2020/ dated May 11, 2020 (c) SK-147/DEKOM.PTK/2021 tgl. 31 Oktober 2021/ dated October 31, 2021 (d) 011/DEKOM.PTK/2021 tanggal 15 Februari 2021/ dated February 15, 2021 (e) SK-142/DEKOM.PTK/2021 tgl. 27 Oktober 2021/ dated October 27, 2021 (f) 162/DEKOM.PTK/2021 tanggal 25 November 2021/ dated November 25, 2021				

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile



KHALID ZABIDI

Ketua Komite Audit/ Audit Committee Chairman
(25 November 2021 – 31 Desember 2021)

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Bogor pada tanggal 20 September 1974. Beliau meraih gelar Sarjana di Institut

Indonesian citizen domiciled in Jakarta. Born in Bogor on September 20, 1974. Obtained Bachelor's Degree from Bandung Institute of

Teknologi Bandung pada tahun 1999, pernah belajar di Communication Studies di Nanyang Technological University Singapore pada tahun 1999 dan meraih gelar Magister di Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2003. Dalam perjalanan karirnya, beliau mengajar di Universitas Paramadina sejak 2007 hingga 2020.

Technology in 1999, studied Communication Studies at Nanyang Technological University Singapore in 1999 and earned his Master's Degree at Bandung Institute of Technology in 2003. In the course of his career, he taught at Paramadina University from 2007 to 2020.

**IVAN AIRLANGGA EP**

Ketua Komite Audit / Audit Committee Chairman
(15 Februari 2021 – 12 November 2021)

Warga negara Indonesia berdomisili di Cirebon. Lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1963. Beliau menyelesaikan Pendidikan Teknik Kimia di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya pada tahun 1988. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai VP Process & Facility PT Pertamina (Persero) periode 2017-2018, dan juga pernah menjabat SVP Business Development & Perform Excellence PT Pertamina (Persero) periode 2018 – 2019 dan telah memasuki masa pensiun.

Indonesian citizen domiciled in Cirebon. Born in Surabaya on December 31, 1963. He completed his Chemical Engineering Education at Sepuluh November Institute of Technology, Surabaya in 1988. During his career, he served as VP Process & Facility of PT Pertamina (Persero) for the 2017-2018 period, and has also served as SVP Business Development & Performance Excellence of PT Pertamina (Persero) for the period 2018 – 2019 and has entered retirement.

**ACHMAD FACHRUDDIN**

Ketua Komite Audit / Audit Committee Chairman
(01 Januari 2021 – 31 Januari 2021)

Warga Negara Indonesia berdomisili di Bogor. Lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1975. Beliau meraih gelar Sarjana pada tahun 2002. Dalam

Indonesian citizen domiciled in Bogor. Born in Jakarta on May 10, 1975. He earned his Bachelor's Degree in 2002. During his career,

perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai komisaris PT Washtex Indonesia periode 2009 - 2017, sebagai analis PT Media Track periode 2010 - 2015, serta Direktur PT Media Fakta Nusantara periode 2014 - 2017. Beliau menjabat Komisaris PTK sejak 2018 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PTK tanggal 31 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2021.

he served as a Commissioner for PT Washtex Indonesia for the period 2009 - 2017, analyst for PT Media Track for the period 2010 - 2015, as well as Director for PT Media Fact Nusantara. period 2014 - 2017. He has served as Commissioner of PTK since 2018 based on the Circular Decision of the Shareholders of PTK on January 31, 2018 and ends on January 31, 2021.



HARRY MULIA

Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
(01 November 2021 - 31 Desember 2021)

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Palembang pada tanggal 20 Mei 1964. Saat ini berusia 58 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil di Universitas Sriwijaya pada tahun 1988. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Manager Internal Audit JBB PT Pertamina (Persero) mencakup RU-VI Balongan & MOR III Jakarta periode 2017 - 2018, pernah menjabat Chief of Internal Audit PT Pertamina Gas periode 2018-2020 dan saat telah memasuki masa pensiun.

Indonesian citizen domiciled in Jakarta. Born in Palembang on May 20, 1964. Currently 58 years old. He earned a Bachelor's Degree in Civil Engineering from Sriwijaya University in 1988. In the course of his career, he served as Manager of Internal Audit at JBB PT Pertamina (Persero) including RU-VI Balongan & MOR III Jakarta for the period 2017 - 2018, served as Chief of Internal Audit PT Pertamina Gas for the 2018-2020 period and when it has entered retirement.



EDWARD SITUMORANG

Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
(01 Januari 2021 - 31 Desember 2021)

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Bandung pada tanggal 12 April 1979. Saat ini berusia 43 tahun. Beliau meraih gelar S1 dari Universitas Indonesia pada tahun 2001. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai West Area 1 Audit Asisten Manager di PHE ONWJ periode 2018. Saat ini beliau menjabat sebagai Manager Group Finance & ICoFR Internal Audit PT Pertamina (Persero).

Indonesian citizen domiciled in Jakarta. Born in Bandung on April 12, 1979. Currently 43 years old. He earned his Bachelor's Degree from University of Indonesia in 2001. During his career, he served as West Area 1 Audit Assistant Manager at PHE ONWJ for the 2018 period. He currently serves as Manager of Group Finance & ICoFR Internal Audit of PT Pertamina (Persero).

**BUDIARTO**

Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
(01 Januari 2021 -13 Mei 2021)

Warga negara Indonesia berdomisili di Bekasi. Lahir di Medan pada tanggal 04 Maret 1951. Beliau meraih gelar Sarjana pada tahun 1980. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Manager Internal Audit PT Pertamina (Persero) Daerah III Jawa Barat & DKI periode 2005 - 2006 dan telah memasuki masa pensiun.

Indonesian citizen domiciled in Bekasi. Born in Medan on March 04, 1951. He earned his Bachelor's degree in 1980. During his career, he served as Manager of Internal Audit at PT Pertamina (Persero) Region III West Java & DKI for the period 2005 - 2006 and has retired.

Independensi Anggota Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit bersifat independen. Adapun seluruh anggota tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen Perseroan termasuk menjabat salah satu jabatan dalam struktur organisasi Perseroan maupun Anak Perusahaan.

Independency of Audit Committee Members

Audit Committee membership is independent. All members are not affiliated with the Company's management, including serving at any position in the organizational structure of the Company and its subsidiaries.

Kriteria Independensi Komite Audit

Independency Criteria Audit Committee

Kriteria Independensi Independency Criteria	Achmad Fachruddin	Ivan Airlangga EP.	Khalid Zabidi	Budiarto	Edward Situmorang	Harry Mulia
Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Upholding integrity, professionalism and professional standards in carrying out their duties and responsibilities	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Maintain the confidentiality of company documents, data and information obtained, both from internal and external parties.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan, serta jabatannya untuk kepentingan Pribadi diluar ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku. Not using important assets and information relating to the Company, as well as their position for personal interests outside the provisions of the Laws and Regulations and applicable Company policies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mengambil keuntungan Pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah. Do not take personal gain either directly or indirectly from the Company's activities other than legal income.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta kebijakan-kebijakan Perseroan. Comply with applicable laws and regulations, Articles of Association, Code of Conduct, Guidelines for Corporate Governance and Company policies	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Piagam Komite

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit PTK ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 013/DEKOM. PTK/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Piagam Komite Audit tersebut mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait fungsi pengawasan, meliputi:

1. Menjaga kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, Undang-Undang, dan ketentuan hukum serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;
2. Menegakkan disiplin organisasi dan pengendalian internal untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan (*abuse*);
3. Meningkatkan kualitas pengungkapan hal-hal yang bersifat pelaporan keuangan, sistem akuntansi dan kebijakan manajemen risiko;
4. Mempelajari ruang lingkup, keakuratan, kemandirian dan objektivitas Auditor Eksternal dan Audit Internal serta efektivitas biaya Audit Eksternal;
5. Komite Audit menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan seperti laporan keuangan, proyeksi dan

Committee Charter

The Audit Committee has an Audit Committee Charter as a work guideline in carrying out its duties and responsibilities in supervising and providing advice to the Board of Commissioners. PTK Audit Committee Charter was established based on the Decree of the Board of Commissioners No. 013/DEKOM. PTK/2020 dated August 28, 2020. The Audit Committee Charter regulates various matters related to the implementation of the duties, responsibilities and obligations of the Chair and Members of the Audit Committee.

Audit Committee Duty and Responsibility and Authority

Duties

Duties of the Audit Committee include to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities related to the supervisory function, including:

1. Maintain compliance with the Articles of Association, laws and applicable legal provisions and Company policies;
2. Uphold organizational discipline and internal control to prevent fraud and abuse;
3. Improve the quality of disclosure on matters of financial reporting, accounting systems and risk management policies;
4. Examine the scope, accuracy, independence and objectivity of the External Auditor and Internal Audit as well as the cost effectiveness of the External Audit;
5. The Audit Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations;
6. Reviewing financial information that will be published such as financial statements, projections and other financial information;

informasi keuangan lainnya;

7. Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non-audit yang ditugaskan kepada Auditor Independen;
8. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan;
9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris perihal risiko yang dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menerima, menelaah dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
12. Melakukan *self-evaluation* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Audit;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit juga berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang

Wewenang Komite Audit yaitu:

1. Komite Audit, jika diperlukan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, pekerja, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Audit Internal;
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

7. Conduct an evaluation to provide preapproval for non-audit services assigned to the Independent Auditor;
8. Reviewing the effectiveness of the Company's internal controls;
9. Reporting to the Board of Commissioners regarding the risks faced by the Company and the implementation of Risk Management by the Directors;
10. Examining any violation of errors in the decisions of the Board of Directors meetings or irregularities in the results of the decisions of the Board of Directors meetings;
11. Receive, examine and forward to interested parties and monitor the follow up of complaints relating to the Company;
12. Conduct self-evaluation of the effectiveness of the implementation of tasks and periodically update the Audit Committee Work Guidelines;
13. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners based on the provisions of the applicable laws and regulations;
14. In carrying out its duties, the Audit Committee is also guided by the applicable laws and regulations.

Authority

The Audit Committee's authority are:

1. When necessary, the Audit Committee has the authority to have full, free, and unlimited access to records, employees, funds, assets, as well as other company resources related to the implementation of its duties.
2. Upon implementing its authority, the Audit Committee commits to cooperate with Internal Audit.
3. When necessary, with a written approval from the Board of Commissioners, the Audit Committee has the capability to employ experts and/or consultants in assisting the Audit Committee.



Tanggung Jawab

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan pelaksanaan tugas kegiatan Komite Audit;
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain berisi fakta lapangan, analisa kesimpulan dan saran.

Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan piagam Komite Audit, ini bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain meliputi:

1. Penelaahan atas informasi keuangan dilakukan mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan menjadi akurat, andal dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan melalui:
 - a. *Review* atas hasil pemeriksaan Auditor Independen atau Auditor Internal;
 - b. *Review* dalam atau selama proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.
2. Seleksi, penunjukan dan pengawasan pekerjaan Auditor Independen. Dalam rangka audit umum atas keuangan Perusahaan, Komite Audit berperan melaksanakan:
 - a. Seleksi dan penunjukkan Auditor Independen.
 - Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan calon Auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
 - Dalam proses seleksi Auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik.

Accountability

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners. The accountability of Audit Committee is conveyed to the Board of Commissioners in the form of reports as follows:

1. Annual Report, detailing the implementation of duties of the Audit Committee activities.
2. Report, containing each implementation of duties of the Audit Committee, such as facts from the field, conclusion and recommendation analysis.

Scope of Work

In order to perform its duties and responsibilities, scope of work of the Audit Committee covers the following:

1. Analysis on financial information is carried out in order to be published by the Company in an accurate, reliable, and trusted manner. The analysis may be performed by:
 - a. Reviewing the Independent Auditor or Internal Auditor findings;
 - b. Reviewing the preparation process of financial information that will be published.
2. Selection, appointment, and supervision of the Independent Auditor work. To carry out a general audit on the Company's finance, the Audit Committee has the role of:
 - a. Selecting and appointing an Independent Auditor.
 - Selecting and recommending candidates for Independent Auditor who will audit the Company's Financial Statements to the Board of Commissioners
 - Throughout the selection process, referring to the provisions on legality, competency, and independency of an public accountant.

-
b. Pengawasan pekerjaan Auditor independen. Dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan oleh Auditor Independen, Komite Audit harus memastikan bahwa Auditor Independen memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-prinsip Akutansi yang berlaku umum: • Melakukan tinjauan Audit <i>Planning</i> dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan; • Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh Auditor dengan Manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat Auditor dengan manajemen dan hal lainnya yang perlu mendapat perhatian, maka harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis.	b. Supervising the Independent Auditor Work In the implementation general audit on the financial statements by an Independent Auditor, the Audit Committee should ensure the Independent Auditor has the competence and experience in administering the generally accepted Public Accountant Professional Standards and Accounting Principles: • Reviewing the Audit Planning and audit program adequacy as well as monitoring implementation of field audit activity. • Monitoring the discussion of audit findings carried out by the Auditor and management. If there is any dissenting opinion between the Auditor and management, and other issues requiring attention, it is mandatory to report to the Board of Commissioners in written.
-
3. Memastikan agar Auditor Independen mengkomunikasikan hal-hal berikut ini sesuai standar audit: a. Tingkat tanggung jawab Auditor dalam mengevaluasi pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan; b. Pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi berikut pelaksanaannya; c. Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern; d. Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan; e. Salah saji yang tidak dikoreksi oleh Manajemen dalam Laporan Keuangan dengan alasan yang tidak material; f. <i>Fraud</i> dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan manajemen atau pekerja yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan; g. Pertimbangan manajemen yang dipakai sebagai dasar estimasi akuntansi;	3. Ensuring the Independent Auditor to communicate the following as per the audit standards: a. Level of responsibility of an Auditor in evaluating internal control and presentation of financial statements. b. Selection and changes in accounting policies along with its implementation. c. Significant shortcoming in the design and implementation of internal control. d. Method of recording, reporting and significant impact from extraordinary transactions to the financial statements. e. Uncorrected misstatement by the Management in Financial Statements with immaterial reasons. f. Frauds toward the laws and regulations conducted by the management or employees causing uncorrected misstatement in the financial statements. g. Management consideration used as an estimation basis of accounting.

-
h. Koreksi Audit yang signifikan; i. Tanggung jawab Auditor dalam mengevaluasi informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, prosedur yang telah dilaksanakan untuk itu dan hasilnya; j. Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip-prinsip akuntansi, lingkup audit dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan Auditor dalam laporan auditnya; k. Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut serta hambatan dalam pelaksanaan audit. 4. Memastikan konsep laporan keuangan audit diterima 10 hari sebelum diterbitkan oleh Perusahaan untuk dibicarakan dengan Auditor dan manajemen untuk menilai apakah Auditor sesuai dengan temuan Audit dan pengungkapannya telah memadai; 5. Memastikan bahwa Auditor menyampaikan representasi tertulis yang menyatakan penilaiannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan dan Manajemen terhadap peraturan perundangan dan efektivitas pengendalian internal; 6. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan Auditor Independen kepada Dewan Komisaris, jika terbukti kuat bahwa independensi Auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa Auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar akuntan publik.	h. Significant Audit Correction. i. Responsibilities of an Auditor in evaluating other information in documents containing audited financial statements, procedures conducted based on the audited information, and the results. j. Disagreement with the management on the implementation of accounting principles, scope of audit, disclosure in the financial statements and words used by the Auditor in its audit report. k. Consultation established by the management with other Public Accountant Firm and opinion of the Auditor toward the consulted issues, as well as obstacles in the audit implementation. 4. Ensuring the concept of an audited financial statements to be received in 10 days prior to the publication by the Company in order to be discussed by the Auditor and management to evaluate whether the Auditor is in accordance with the findings and its disclosure is adequate. 5. Ensuring the Auditor submits a written representation, stating its evaluation on issues related to the Company and Management compliance to the laws and regulations, as well as the effectivity of internal control. 6. Having the capability to recommend termination of employment with the Independent Auditor to the Board of Commissioners, if strongly proven that the Auditor's independency could be disrupted or proven that the examination conducted by the Auditor is not in line with the public accountant standards.

Pelaksanaan Tugas Khusus

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis;
2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
3. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
 - a. Dilakukan melalui tinjauan (*review*) terhadap semua pencatatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani pihak terkait;
 - c. Jika dianggap perlu, melakukan Audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Auditor Internal.
4. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada Anggota Komite Audit dan Anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Rapat Komite Audit dipimpin Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

Implementation of Specific Assignment

1. Distribution of special duties to the Audit Committee by the Board of Commissioners is conducted through a written order.
2. Special duties may include but not limited to investigation to the allegation of errors in the Board of Directors' meeting resolution or fraud in the implementation of the Board of Directors' meeting resolution.
3. Implementation of special duties of the Audit Committee, among which could be performed by:
 - a. Reviewing all records, documents, and other necessary information, including Minutes of Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners' Meeting.
 - b. Proposing questions to the Board of Directors and its staff, to which the results to be included in Question & Answer Minutes of Meeting, signed by related parties.
 - c. If deemed necessary, performing investigative Audit which is conducted by cooperating with Internal Auditor.
4. The Audit Committee is obligated to submit special duties implementation report with maximum confidentiality level, limited to Members of the Audit Committee and Members of the Board of Commissioners.

Audit Committee Meeting Implementation Policy

In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee's Meeting is held at least once a month. The Meeting of Audit Committee has the capability to make decisions if the attendance amounts to 2/3 of the total members. The meeting is chaired by Chairman of Audit Committee or the most senior of the Members of Audit Committee if the Chairman is unable to attend. If deemed necessary, the Audit Committee is allowed to invite other parties related to the meeting material.



Setiap pelaksanaan Rapat dituangkan dalam risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Description of the Meeting implementation is stated in minutes of meeting. The minutes of meeting is signed by the meeting chairman and distributed to all attending and non-attending members of the Audit Committee. Dissenting opinion that occurs in the meeting to be included in the minutes of meeting along with the underlying reasons.

Rapat Kerja Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 5 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Audit Committee Meeting

In 2021, the Audit Committee held 5 meetings with attendance level, as follows:

Kehadiran Rapat Komite Audit 2021

Audit Committee Meeting Attendance 2021

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Total	Total Total	% Kehadiran % Attendance
Achmad Fachruddin	Ketua/Chairman	-	-	-
Ivan Airlangga EP.	Ketua/Chairman	5	5	100%
Khalid Zabidi	Ketua/Chairman	-	-	-
Budiarto	Anggota/Member	1	1	100%
Edward Situmorang	Anggota/Member	5	5	100%
Harry Mulia	Anggota/Member	1	1	100%

Adapun agenda rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

The agenda for the Audit Committee meeting is as follows:

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2021

Audit Committee Meeting Agenda in 2021

Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting participants	
13 April 2021 April 13, 2021	Pembahasan Efektifitas Pelaksanaan Audit Tahun 2020 (eksternal dan Internal) Discussion on the effectiveness of the 2020 audit (external & internal)	Ketua Komite Audit, Anggota Komite Audit, Internal Audit, Set. Dekom.	Chairman of the Audit Committee, Member of the Audit Committee, Internal Audit, Secretary of the BoC
24 Juni 2021 June 24, 2021	Pembahasan Annual Audit Plan Annual Audit Plan discussion	Ketua Komite Audit, Anggota Komite Audit, Anggota Komite Investasi & Risk Usaha, Internal Audit, Set. Dekom.	Chairman of the Audit Committee, Member of the Audit Committee, Member of the Investment & Business Risk Committee, Internal Audit, Secretary of the BoC
13 Juli 2021 July 13, 2021	Pembahasan Annual Audit Plan Annual Audit Plan discussion	Ketua Komite Audit, Anggota Komite Audit, Internal Audit, Set. Dekom.	Chairman of the Audit Committee, Member of the Audit Committee, Internal Audit, Secretary of the BoC

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2021

Audit Committee Meeting Agenda in 2021

Tanggal Date	Agenda	Peserta Rapat Meeting participants	
11 Oktober 2021 October 11, 2021	Pembahasan Audit TW-III Tahun 2021 Discussion on the 2021 Q-III Audit	Komut, Ketua Komite Audit, Anggota Komite Audit, Internal Audit, Set. Dekom.	President Commissioner, Chairman of the Audit Committee, Member of the Audit Committee, Internal Audit, Secretary of the BoC
12 November 2021 November 12, 2021	Perkenalan dan Orientasi (Induction) Anggota Baru Komite Audit. Introduction and Orientation (Induction) of New Members of the Audit Committee.	Ketua Komite Audit, Anggota Komite Audit, Internal Audit.	Chairman of the Audit Committee, Member of the Audit Committee, Internal Audit.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menjalankan tugas dan berbagai kegiatan, meliputi:

1. Rapat Kerja dengan Fungsi Internal Audit.
2. Melakukan Penelaahan dan membahas Laporan Keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan yang akan dipublikasikan.
3. Turut serta dalam proses pemilihan Auditor Independen Tahun Buku 2021.
4. Membuat Tanggapan Laporan Kegiatan Perusahaan.
5. Melakukan evaluasi atas Rencana Kerja Fungsi Internal Audit, Efektivitas fungsi Audit dan membahas Hasil Audit Fungsi Internal Audit.
6. Memantau Tindak Lanjut Manajemen atas rekomendasi dari hasil Audit Internal dan Eksternal.
7. Melakukan Audit Khusus atas permintaan Dewan Komisaris, jika diperlukan.

Penelaahan Informasi Keuangan dan Kinerja Keuangan

Untuk mendorong agar informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh Perseroan secara akurat, andal dan dapat dipercaya, Komite Audit telah melakukan

Audit Committee's Brief Activity Implementation Report

Throughout 2021, the Audit Committee has carried out its duties and various activities, including:

1. Working Meeting with the Internal Audit Function.
2. Reviewing and discussing quarterly, semester and annual financial reports that will be published.
3. Participate in the process of selecting an Independent Auditor for the 2021 Fiscal Year.
4. Making Responses to Company Activity Reports.
5. Conduct an evaluation of the Internal Audit Division Work Plan, the effectiveness of the Audit function and discuss the Audit Results of the Internal Audit Division.
6. Monitor Management's follow-up on recommendations from the Internal and External Audit results.
7. Conducted a Special Audit at the request of the Board of Commissioners.

Financial Information and Financial Performance Reviewing

To encourage financial information that is presented and published by the Company accurately, reliably and reliably, the Audit Committee has reviewed the Monthly,

penelaahan terhadap Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Tahunan dan berdiskusi dengan manajemen dan Internal Audit mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian antara lain Laporan Rugi/Laba dan Pendanaan untuk investasi kapal.

Pengawasan atas Pekerjaan Auditor Eksternal

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pekerjaan Auditor Eksternal, Komite Audit melakukan beberapa aktivitas yaitu:

- Menelaah dan berdiskusi dengan auditor independen Perseroan mengenai rencana audit dan implementasinya.
- Melakukan monitoring terhadap proses pelaporan keuangan dengan mendiskusikan hasil audit atas Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan.
- Menelaah temuan-temuan penting dari auditor eksternal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi internal auditor melalui aktivitas sebagai berikut:

- Menelaah dan berdiskusi dengan Auditor Internal Perusahaan mengenai aktivitas audit selama tahun 2021 dan rencana Audit Internal tahun 2022.
- Mengevaluasi pelaksanaan Audit Internal dan menelaah temuan-temuan penting dari auditor internal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.
- Komite Audit bersama dengan Internal Auditor telah melakukan diskusi dan rapat terkait dengan hal temuan hasil

Quarterly and Annual Financial Statements and discussed with management and Internal Audit regarding matters that require attention including the Loss Report/Profit and Funding for ship investment.

Supervision of The Work of The External Auditor

In carrying out the oversight function of the work of the External Auditor, the Audit Committee carries out several activities, namely:

- Review and discuss with the Company's independent auditors the audit plan and its implementation;
- Monitor the financial reporting process by discussing the audit results of the Company's consolidated financial statements;
- Review important findings from external auditors and monitor the implementation of audit recommendations.

Evaluate The Effectiveness of Internal Control and The Implementation of the Internal Audit Function

The Audit Committee evaluates the effectiveness of internal control and the implementation of the main duties and functions of the internal auditor through the following activities:

- Review and discuss with the Company's Internal Auditors the audit activities during 2021 and the 2022 Internal Audit plan;
- Evaluate the implementation of Internal Audit and review important findings from internal auditors and monitor the implementation of audit recommendations;
- The Audit Committee together with the Internal Auditor has conducted discussions and meetings related to the findings of the Audit results and the follow-up;

Pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

- d. Internal Auditor telah menerbitkan 8 (delapan) Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan yang direncanakan dan menyampaikan 91 Rekomendasi

- d. The Internal Auditor has issued 8 (eight) Audit Results Reports (LHA) as planned and submitted 91 Recommendations

Selama tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan 5 (lima) kali pertemuan dengan Auditor Internal untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan serta hal-hal yang menjadi perhatian Perusahaan.

During 2021, the Audit Committee has held 5 (five) meetings with the Internal Auditor to discuss the Report of the Audit Results carried out as well as matters of concern to the Company.

Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

Komite Audit telah melakukan penelaahan dan pengawasan atas kepatuhan Perseroan pada hukum dan peraturan, termasuk melakukan pemantauan peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang usaha Perseroan serta perkara/sengketa yang terkait dengan Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan.

Compliance with Regulations and Legislation

The Audit Committee has reviewed and supervised the Company's compliance with laws and regulations, including monitoring the regulations and laws related to the Company's business fields and cases/disputes related to the Company and the Company's business activities.

Melakukan Identifikasi Hal-hal yang Memerlukan Perhatian Dewan Komisaris

Komite Audit menyampaikan masukan dalam bentuk Rekomendasi terkait dengan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil analisa dan telaah atas Laporan *Management* maupun Laporan Keuangan yang diterbitkan setiap bulan.

Identify Issues That Require the Attention of The Board of Commissioners

The Audit Committee submits input in the form of Recommendations related to matters that require the attention of the Board of Commissioners based on the results of the analysis and review of Management Reports and Financial Reports that are published every month

Program Pengembangan

Sepanjang tahun 2021, program pengembangan kompetensi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Development Program

The Audit Committee competency development program throughout 2021 is as follows:

**Pelatihan Komite Audit**

Audit Committee Training

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Provider	Tempat & Waktu Pelaksanaan Time and Place of Implementation
Ivan Airlangga EP.	Ketua Chairman	Enhancing Internal Audit Capability	BPKP	Virtual, 10 Maret 2021
Ivan Airlangga EP.	Ketua Chairman	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Responsibilities of the Audit Committee When the Company Is Involved in Litigation Related to Financial Statements	IKAI	Virtual, 23 September 2021
Edward Situmorang	Anggota Member		IKAI	Virtual, 23 September 2021
Ivan Airlangga EP.	Ketua Member	Executive Insight	PTC	Virtual, 02-04 November 2021
Harry Mulia	Anggota Member	Executive Insight	PTC	Virtual, 02-04 November 2021

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit dan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit menyampaikan laporan kinerja kepada Dewan Komisaris, yang antara lain berisi fakta lapangan, analisa kesimpulan dan saran secara berkala.

Hasil penilaian menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris Perusahaan untuk mengangkat kembali dan/ atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya. Secara umum Dewan Komisaris menilai, Komite Audit telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dengan baik dalam membantu Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan.

Audit Committee Performance Assessment

The Audit Committee's performance evaluation is based on the realization and completion of the work program listed in the Audit Committee's Work Plan and Budget and conducted by the Board of Commissioners. The Audit Committee submits performance reports to the Board of Commissioners, which include field facts, periodic analysis of conclusions and suggestions.

The assessment results become consideration of the Board of Commissioners of the Company to reappoint and/or dismiss members of the Audit Committee for the next term. In general, the Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has carried out its duties, responsibilities and authority properly in assisting the Board of Commissioners in relation to the supervisory function.



KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Investment and Business Risk Committee

Komite Investasi dan Risiko Usaha (KIRU) berfungsi sebagai organ yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan risiko dan investasi di Perusahaan. KIRU bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Investasi dan Risiko Usaha (KIRU) dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.024/DEKOM.PTK/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Ketua Komite Investasi & Risiko Usaha dengan keanggotaan Komite diperbaharui dengan keputusan Dekom No. 021/DEKOM.PTK/2020 tanggal 09 Oktober 2020 perihal Penetapan Ketua Komite IRU, Surat Dekom No. SK-002/DEKOM.PTK/2021 tanggal 07 Januari 2021 perihal pengangkatan Anggota KIRU serta penambahan anggota melalui surat Surat Dekom No. SK-126/DEKOM.PTK/2021 tanggal 07 Oktober 2021.

Dalam meningkatkan kesesuaian struktur organ pendukung Dewan Komisaris sesuai Permen BUMN No.PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 dan kelengkapan struktur Dewan Komisaris, maka pada akhir tahun 2021 dilakukan penyesuaian Komite menjadi Komite Audit, Komite Investasi, dan Komite Manajemen Risiko yang kemudian dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No.Kpts-186/DEKOM.PTK/2022 30 Desember 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan dan Komite Manajemen Risiko dan No.Kpts-187/DEKOM.PTK/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan dan Komite Investasi. Atas hal tersebut maka KIRU menjadi Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko.

The Investment and Business Risk Committee (KIRU) functions as an organ that assists the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties over the planning and implementation of risks and investments in the Company. The Investment and Business Risk Committee reports directly to the Board of Commissioners.

The Investment and Business Risk Committee (KIRU) was established in 2011 pursuant to the Board of Commissioners Letter No. 024/DEKOM.PTK/2011 dated December 19, 2011 on the Appointment of the Chairman of the Investment & Business Risk Committee with the Committee membership renewed by the Decree of the Board of Commissioners No. 021/DEKOM.PTK/2020 dated October 9, 2020 regarding the Appointment of the Chair of the IRU Committee, Dekom Letter No. SK-002/DEKOM.PTK/2021 dated January 7, 2021 regarding the appointment of KIRU Members and additional members through the Dekom Letter No. SK-126/DEKOM.PTK/2021 dated 07 October 2021.

In improving the suitability of the Board of Commissioners' supporting organ structure pursuant to Minister of SOEs Regulation No. PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021 and the completeness of the structure of the Board of Commissioners, at the end of 2021 the Committee will be adjusted to be the Audit Committee, Investment Committee, and Management Committee. The risks are then stated in the Decree of the Board of Commissioners No. Kpts-186/DEKOM.PTK/2022 December 30, 2021 concerning the Establishment and Appointment of the Risk Management Committee and No. Kpts-187/DEKOM.PTK/2021 dated December 30, 2021 concerning the Establishment and Appointment



Keanggotaan Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris sebagai Ketua dan 1 (satu) anggota ahli yang bukan pekerja PTK serta diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham. Terkait keanggotaan Komite Investasi, maka persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi adalah:

- Memiliki integritas, objektivitas, dedikasi, dan standar etika yang tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi;
- Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai antara lain pelaksanaan pengawasan investasi;
- Mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
- Mampu menyediakan waktu untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya.

Anggota Komite Investasi terpilih yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pemberhentian Anggota Komite Investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu meskipun jabatannya belum berakhir, apabila:

- Mengundurkan diri;
- Kehilangan kewarganegaraan;
- Meninggal dunia;

and the Investment Committee. For this reason, KIRU became the Investment Committee and the Risk Management Committee.

Membership of The Investment Committee

Membership of the Investment Committee consists of at least one Commissioner as Chairman and one expert who is not an employee of PTK and appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the Shareholders. Regarding the membership of the Investment Committee, the requirements and qualifications that must be met are:

- Having integrity, objectivity, dedication, and high ethical standards as well as able to communicate well;
- In-depth insights and understanding to the duties and responsibilities of the Investment Committee;
- Comprehensive understanding on the implementation of supervision in investment;
- Capable in performing its service professionally and independently, for the interest of the Company without any influence from various parties with interest that may conflict with the interest of the Company;
- Able to provide time to perform and complete its duties.

The appointed Investment Committee members who are not Members of the Board of Commissioners have a maximum term of office of three years and can be extended once for two years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time. Dismissal of members of the Investment Committee can be done at any time even though their position has not ended, under following conditions:

- Resignation;
- Losing the citizenship;
- Passing away;

- Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan;
- Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Investasi sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi;
- Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.

Komposisi Anggota Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris sebagai Ketua dan maksimal 2 (dua) anggota ahli independen serta diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham. Terkait dengan keanggotaan Komite Manajemen Risiko, maka persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi adalah:

- Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip dan proses manajemen risiko serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris.
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan operasi Perusahaan di bidang manajemen risiko
- Memiliki pengetahuan mengenai Perusahaan atau industri/bisnis Perusahaan sejenis dan/atau memahami kegiatan Perusahaan secara cepat dalam kaitannya dengan pelaksanaan manajemen risiko.

Anggota Komite Manajemen Risiko terpilih yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama adalah

- Any actions that bring loss to the Company;
- Violating or not fulfilling the requirements as a member of the Audit Committee as regulated in the Audit Committee Charter; and
- Unable to perform its duties and responsibilities stipulated by the Board of Commissioners.

Members Composition of Risk Management Committee

The Risk Management Committee consists of at least 1 (one) Commissioner as Chairman and a maximum of 2 (two) independent expert members and is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the Shareholders. Regarding the membership of the Risk Management Committee, the requirements and qualifications that must be met are:

- Having integrity, dedication, ability, education, independence, and experience in accordance with their field of work, and are able to communicate verbally and in writing all the results of their duties to the Board of Commissioners in accordance with applicable procedures.
- Posses sufficient knowledge to be able to understand the principles and processes of risk management and be able to communicate the implementation of its duties and functions to the Board of Commissioners.
- Have adequate knowledge of the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations relating to the Company's operations in the field of risk management
- Have knowledge about the Company or the industry/business of similar companies and/or understand the Company's activities quickly in relation to the implementation of risk management.

The appointed members of the Risk Management Committee who are not members of the Board of Commissioners have maximum

tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pemberhentian Anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilakukan sewaktu-waktu meskipun jabatannya belum berakhir, apabila:

- Mengundurkan diri;
- Kehilangan kewarganegaraan;
- Meninggal dunia;
- Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan;
- Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Investasi sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko;
- Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris

term of office of three years and can be extended once for two years without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time Dismissal of members of the Risk Management Committee can be done at any time even though their position has not ended, under following conditions:

- Resignation;
- Losing the citizenship;
- Passing away;
- Any actions that bring loss to the Company;
- Violating or not fulfilling the requirements as a member of the Audit Committee as regulated in the Audit Committee Charter;
- Unable to perform duties and responsibilities stipulated by the Board of Commissioners.
- Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris

Komposisi Anggota Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko

Susunan KIRU periode 01 Januari 2021 s.d. 29 Desember 2021 dan Komite Investasi periode 30 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Composition of Investment Committee and Risk Management Committee

The composition of KIRU for January 1, 2021 to December 29, 2021 period and the Investment Committee for the period December 30, 2021 to December 31, 2021 are as follows:

KOMITE INVESTASI & RISIKO USAHA (KIRU) / Investment and Business Risk Committee Member (KIRU)

01 Januari – 08 Oktober 2021 January 01, 2021 – October 08, 2021	09 Oktober – 29 Desember 2021 October 09, 2021 – December 29, 2021	Dasar Pengangkatan Basic of Appointment
Andi Saiful Haq Ketua / Chairman	Andi Saiful Haq Ketua KIRU / Chairman	SK-021/DEKOM. PTK/2020 tanggal 09 Oktober 2020
Muhammad Irfan Zainul Fikri Anggota/ Member	Muhammad Irfan Zainul Fikri Anggota/ Member	SK-002/DEKOM.PTK/2021 tanggal 07 Januari 2021
	Aldo Maudy Gantirta Anggota/ Member	SK-126/DEKOM.PTK/2021 tanggal 07 Oktober 2021

KOMITE INVESTASI / Investment Committee

30 Desember 2021 – 31 Desember 2021 30 Desember 2021 – 31 Desember 2021	Dasar Pengangkatan Basic of Appointment
Andi Saiful Haq – Ketua / Chairman	SK-187/DEKOM.PTK/2021 tanggal 30 Desember 2021
Aldo Maudy Gantirta – Anggota/ Member	

KOMITE MANAJEMEN RISIKO / Risk Management Committee

30 Desember 2021 – 31 Desember 2021 30 Desember 2021 – 31 Desember 2021	Dasar Pengangkatan Basic of Appointment
Agustinus Bensik Lomboan – Ketua / Chairman	SK-186/DEKOM.PTK/2021 tanggal 30 Desember 2021
Muhammad Irfan Zainul Fikri – Anggota/ Member	

Profil Komite Investasi

Profile of the Investment Committee



ANDI SAIFUL HAQ

Ketua Komite Investasi/ Chairman of The Investment Committee
(30 – 31 Desember 2021)

Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha /
Member of the Investment and Business Risk Committee
(01 Januari 2021 – 29 Desember 2021)

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Soppeng – Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Mei 1975. Saat ini berusia 45 tahun. Beliau meraih gelar S2 pada tahun 2008. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta periode 2011 – 2013. Saat ini, selain sebagai Komisaris di PT Pertamina Trans Kontinental, beliau menjabat sebagai Direktur di Institute for Transformation Studies (INTRANS) sejak 2013.

Indonesian citizen, lives in Jakarta. Born in Soppeng – South Sulawesi on May 12, 1975. Currently 45 years old. He earned his Master's degree in 2008. During his career, he served as a Lecturer at the Department of International Relations, Paramadina University, Jakarta for the period 2011 – 2013. Currently, apart from being a Commissioner at PT Pertamina Trans Kontinental, he also serves as a Director at the Institute for Transformation Studies (INTRANS) since 2013.



ALDO MAUDY GANTIRTA

Anggota Komite Investasi/Member of Investment Committee
(30 – 31 Desember 2021)

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha/
Member of the Investment and Business Risk Committee
(09 Oktober 2021 – 29 Desember 2021)

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1985. Saat ini berusia 37 tahun. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan SK-126/DEKOM.PTK/2021 tanggal 07 Oktober 2021. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Atma Jaya pada tahun 2006. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Advisor I Upstream, Gas, dan NRE Government Assignment PT Pertamina (Persero) sejak Oktober 2020 sampai saat ini.

Indonesian citizen domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on May 25, 1985. Currently 37 years old. He serves as Secretary to the Board of Commissioners pursuant to SK-126/DEKOM.PTK/2021 dated October 07, 2021. He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Atma Jaya University in 2006. Currently he also serves as Advisor I for Upstream, Gas, and NRE Government. Assignment of PT Pertamina (Persero) since October 2020 until now.

Profil Komite Manajemen Risiko**Risk Management Committee Profile****AGUSTINUS BENSIK LOMBOAN**

Ketua Komite Manajemen Risiko/
Chairman of the Risk Management Committee
(30 Desember 2021 – 31 Desember 2021)

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta Selatan. Lahir di Balikpapan pada 07 Agustus 1964. Saat ini berusia 57 tahun. Beliau meraih gelar S1 Teknik Mesin Universitas Trisakti pada tahun 1988, dan menyelesaikan tugas Belajar S2 Magister Manajemen Keuangan di Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta tahun 1995. Dalam perjalanan kariernya beliau pernah menjabat sebagai Chief Financial Officer dan Chief Business Development Officer dalam periode tahun 2001 – 2010.

Indonesian citizen domiciled in South Jakarta. Born in Balikpapan on August 7, 1964. Currently 57 years old. He earned Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Trisakti University in 1988, and completed the assignment of Studying Masters in Financial Management at Indonusa Esa Unggul University, Jakarta in 1995. During his career he served as Chief Financial Officer and Chief Business Development Officer in the period 2001 – 2010 .

**MUHAMMAD IRFAN ZAINUL FIKRI**

Anggota Komite Manajemen Risiko/
Member of Risk Management Committee
(30 Desember – 31 Desember 2021)

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha/
Member of the Investment and Business Risk Committee
(periode 01 Januari 2021 s.d. 29 Desember 2021)

Warga negara Indonesia berdomisili di Bekasi. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1977. Saat ini berusia 43 tahun. Beliau meraih gelar S1 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000, dan menyelesaikan tugas belajar S2 Master Logistik & Transportasi di Universitas Indonesia pada tahun 2011. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Site Manager Project Pembangunan Kapal periode 2014 – 2018. Pada tahun 2020, beliau menjabat sebagai Technical Service

Indonesian citizen domiciled in Bekasi. Born in Yogyakarta on September 22, 1977. Currently 43 years old. He earned a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Gadjah Mada University in 2000, and completed his master's study in Logistics & Transportation at the University of Indonesia in 2011. During his career, he served as Site Manager for Shipbuilding Projects for the period 2014-2018. has served as Technical Service Coordinator of PT Pertamina International Shipping since June 1, 2019 based

Coordinator PT Pertamina International Shipping yang merupakan jabatan yang diemban sejak 1 Juni 2019 berdasarkan SKMJ-00040/K20000/2019-S8 tanggal 27 Mei 2019 dan memiliki tugas sebagai penanggung jawab Proyek Investasi Pembangunan dua (2) kapal baru VLCC (*Very Large Crude Carrier*) di galangan JMU-Jepang. Dengan sertifikasi kompetensi internasional CCP (*Certified Cost Professional* dari AACE) dan PMP (*Project Management Professional* dari PMI) dan networking yang dimiliki berhasil melakukan delivery kapal baru VLCC pada awal tahun 2021.

Independensi Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko

Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko berperan secara profesional dan independen dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil kerjanya. Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko harus memenuhi kriteria independensi, integritas, objektivitas, antara lain:

1. Tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi independensi;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.

Kode Etik Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko

Anggota komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati kode etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

1. Anggota komite yang masih aktif atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota komite, wajib menjaga

on SKMJ-00040/K20000/2019-S8 dated May 27, 2019 and has the task of being in charge of the Development Investment Project for two (2) new VLCC (*Very Large Crude Carrier*) vessels at the JMU-Japan shipyard. With international competency certifications CCP (*Certified Cost Professional* from AACE) and PMP (*Project Management Professional* from PMI) and the networking he have successfully delivered the new VLCC ship in early 2021.

Independence of the Investment Committee and Risk Management Committee

The Investment and Risk Management Committee has a professional and independent role in carrying out its duties and reporting on its work. The Investment and Risk Management Committee must meet the criteria of independence, integrity, objectivity, including:

1. Has no management, share ownership and/or family affiliations with the Board of Commissioners, Directors, Controlling Shareholders, which can affect independence;
2. Do not have personal interests/affiliation that can cause negative impacts and conflicts of interest on the Company.

Code of Ethics for the Investment Committee and Risk Management Committee

In carrying out their duties and responsibilities, committee members are required to comply with the Company's code of ethics and are prohibited from taking personal gain either directly from the Company's activities other than honorarium and other benefits and benefits.

1. Committee members who are still active or who no longer serve as committee members, are obliged to maintain the



kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

2. Anggota komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Piagam Komite

KIRU memiliki Piagam KIRU sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawabnya, dan kewajiban Ketua serta Anggota Komite. Piagam KIRU ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.139/DEKOM. PTK/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tentang Piagam Komite Investasi & Risiko Usaha.

Piagam mengatur tentang pedoman agar Komite dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya jawabnya secara profesional, transparan, independen, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan dalam Piagam KIRU antara lain: Definisi; visi dan misi; tujuan penyusunan piagam; pembentukan dan keanggotaan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang; tata cara kerja; kode etik, remunerasi, dan anggaran; serta pelaporan, evaluasi kinerja, pemberlakuan, dan penyempurnaan.

Piagam Komite Investasi dan Piagam Manajemen Risiko ditetapkan Dewan Komisaris pada tahun 2022.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang KIRU

KIRU memiliki tugas dan tanggung jawab utama yaitu membantu melakukan pengawasan pelaksanaan investasi dan manajemen risiko serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas

confidentiality of company documents, data and information obtained while serving as committee members, both from internal and external parties and only used for the purposes of carrying out their duties.

2. Committee members are prohibited from misusing important information relating to the Company for personal gain.

Committee's Charter

The IRU Committee has an IRU Committee Charter as a work guideline in carrying out the duties, responsibilities and obligations of the Chairman and Committee Members. The IRU Committee Charter was established based on the Decision of the Board of Commissioners No. 139/DEKOM. PTK/2021 dated October 23, 2021 regarding the Investment & Business Risk Committee Charter.

The Charter regulates guidelines so that the Committee can carry out its duties, responsibilities and authorities in a professional, transparent, independent, efficient, effective and accountable manner. The provisions in the IRU Committee Charter include: Definition; vision and mission; the purpose of the preparation of the charter; committee formation and membership; duties, responsibilities and authorities; working procedures; code of ethics, remuneration and budget; and reporting, performance evaluation, enforcement, and improvement.

The Investment Committee Charter and Risk Management Charter were stipulated by the Board of Commissioners in 2022.

Duties, Responsibilities, and Authority of The KIRU

KIRU has main duties and responsibilities, namely assisting in supervising the implementation of investment and risk management as well as providing recommendations to the Board of Commissioners on the investment

pengelolaan investasi Perusahaan termasuk Anak Perusahaan, termasuk realisasi dan implementasi RKAP dan RJPP. Selain itu KIRU juga membidangi tugas terkait dengan kegiatan di marketing dan SPBD.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab KIRU adalah:

1. Melakukan evaluasi atas perencanaan investasi dan tingkat risiko PTK termasuk anak perusahaannya yang oleh Direksi dimintakan persetujuan atau tanggapan tertulis dari Komisaris.
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan investasi dan analisa paska investasi.
3. Melakukan *review* atas permohonan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana Perusahaan, antara lain :
 - a. Investasi
 - b. Pembentukan Anak Perusahaan
 - c. Rencana Jangka Panjang Perusahaan
 - d. Kontrak kerja sama operasi
 - e. Pengelolaan Aset
 - f. Penjaminan Aset
4. Melakukan evaluasi kebijakan investasi dan strategi manajemen risiko baik operasional dan pengembangan Perusahaan.
5. Memantau dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perusahaan.
6. Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris termasuk anak perusahaan dalam seluruh aktifitas Perusahaan.
7. Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris terkait pengelolaan Investasi dan Risiko Usaha apabila diminta.
8. Membuat rencana kerja tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan atas kebijakan investasi Perseroan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan

management of the Company including its Subsidiaries, including the realization and implementation of RKAP and RJPP. In addition, KIRU is also in charge of tasks related to activities in marketing and SPBD.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the KIRU are as follows:

1. Evaluating the investment planning and risk level of PTK including its subsidiaries for which the board of directors is asked for approval or written response from the Commissioner.
2. Monitor investment implementation and post investment analysis
3. Reviewing requests from the Board of Directors to the Board of Commissioners regarding the Company's plans, including:
 - a. Investation
 - b. Establishment of Subsidiaries
 - c. Long Term Company Plan
 - d. Joint operation contract
 - e. Asset Management
 - f. Asset Guarantee
4. Evaluating investment policies and risk management strategies for both the operations and development of the Company
5. Monitor and evaluate the implementation of risk management and mitigation on the Company's business and investment plans
6. Report and provide recommendations to the Board of Commissioners including subsidiaries in all company activities.
7. Provide reference material and information for the Board of Commissioners' needs related to Investment and Business Risk management when Requested
8. Creating an annual work plan that is aligned with the annual work plan on the Company's investment policies
9. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners related to Investment

Investasi dan Risiko Usaha serta bidang marketing dan SPBD.

Wewenang

KIRU memiliki wewenang antara lain:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang investasi, penggunaan dana terkait investasi, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
2. Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari rekan kerja antara lain Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite lain, Tim Investasi, Panitia Lelang Investasi dan atau fungsi-fungsi operasional Perseroan, termasuk Anak Perusahaan;
3. Melakukan komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Tim Investasi;
4. Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Piagam (Charter) termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite Investasi & Risiko Usaha, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
5. Mendapatkan saran dari narasumber, konsultan ataupun tenaga yang profesional apabila diperlukan, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Rapat Kerja Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2021, komite memenuhi tugasnya mendampingi BOC dengan hadir penuh pada rapat bulanan BOD-BOC, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

and Business Risks as well as in the field of marketing and SPBD.

Authority

KIRU has authorities, as follows:

1. Access records or information regarding investments, use of investment-related funds, assets and other Company resources related to the implementation of duties;
2. Request and or obtain cooperation from colleagues, including the Secretariat of the Board of Commissioners and other Committees, the Investment Team, the Investment Auction Committee and/or the operational functions of the Company, including Subsidiaries;
3. Communicating directly with the Board of Commissioners and the Investment Team;
4. Compiling, evaluating, amending and implementing the Charter, including determining the procedures and scope of work for the Investment & Business Risk Committee, with the approval of the BoC;
5. Obtain advice from resource persons, consultants or professional staff if necessary, by obtaining written approval from the Board of Commissioners.

Business Risk and Investment Committee Meeting

In 2021, the committee has fulfilled the duty to assist the BoC by attending the BoD-BoC monthly meeting, with attendance level, as follows:

Kehadiran Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha 2021

2021 Investment and Business Risk Committee Meeting Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Perorangan Individual Total Meetings	Hadir Rapat Attend Meeting	% Kehadiran % Attendance
Andi Saiful Haq	Ketua / Chairman	35	36	97%
M. Irfan Zainul Fikri	Anggota / Member	29	35	86%
Aldo Maudy Gantirta	Anggota / Member	10	10	100%

Selain rapat rutin bulanan BoD BoC, Komite Investasi dan Risiko Usaha juga menyelenggarakan rapat dengan manajemen PTK sebanyak 3 (tiga) kali dengan Agenda sebagai berikut:

In addition to the BoD BoC monthly regular meetings, the Investment and Business Risk Committee also held 3 (three) meetings with PTK management with agenda as follows:

Agenda Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha Tahun 2021

Investment and Business Risk Committee Meeting Agenda in 2021

Tanggal Tanggal	Agenda		Peserta Rapat
01 April 2021	1. Pemaparan Demo Live Program Digitalisasi di PTK 2. Roadmap Program Digitalisasi PTK dalam rangka menuju "Fleksibilitas Dalam Solusi ICT" sesuai dengan Draft RJPP PTK 2021-2026 dalam cakupan termasuk namun tidak terbatas pada program digitalisasi dan kebutuhan anggaran Investasi	1. Presentation of the Live Demo of the Digitalization Program at PTK 2. Roadmap for the PTK Digitization Program towards "Flexibility in ICT Solutions" in accordance with the RJPP PTK 2021-2026 in scope including but not limited to the digitization program and investment budget needs	1. Ketua Komite IRU 2. Dir. Marketing 3. Anggota KIRU 4. Anggota Komite Audit 5. VP HR & GA 6. Manager IT 7. Set. Dekom
05 Mei 2021	Diskusi dan Progres Pendanaan	Discussion and financing progress	1. Ketua Komite IRU 2. Dir. Keuangan & SDM 3. Anggota KIRU 4. VP Finance 5. Manager Treasury 6. Legal 7. SPBD 8. Set. Dekom
11 November 2021	1. Prognosa Investasi RKAP 2021/ RKAP 2021 Revisi 2. Rencana Investasi RKAP 2022 3. Skema Kerjasama Bisnis 2022	1. Investment Prognosis RKAP 2021/RKAP 2021 Revised 2. Investment Plan RKAP 2022 3. 2022 Business Cooperation Scheme	1. Ketua Komite IRU 2. Anggota KIRU 3. SPBD

Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2021, KIRU telah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi atas draft Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021 – 2026 untuk proyek Business Development (BD) kapal & non-kapal, dan proyek non-business development baik korporat PTK maupun grup anak Perusahaan;
2. Evaluasi dan memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Investasi 2021 termasuk rencana draft rencana investasi pada tahun 2022;
3. Pembahasan dan evaluasi atas revisi

Duty Implementation

Throughout 2021, KIRU has reported the implementation of its duties to the Board of Commissioners as follows:

1. Evaluation of the draft of the Company's Long Term Plan (RJPP) 2021 – 2026 for ship & non-ship Business Development (BD) projects, and non-business development projects for both PTK corporate and subsidiary groups;
2. Evaluation and approval of the 2021 Investment Work and Budget Plan (RKAP) including a draft investment plan for 2022;
3. Discussion and evaluation of the 2021 Investment RKAP revision due to changes



- RKAP Investasi 2020 yang diakibatkan berubahnya asumsi dan realisasi sampai dengan pertengahan tahun 2020;
4. KIRU memberi masukan kepada Dewan Komisaris untuk dijadikan rekomendasi ke Dewan Direksi PTK perihal pelaksanaan investasi;

in assumptions and realization until mid 2021;

4. KIRU provides input to the BoC to be used as a recommendation to the PTK Board of Directors regarding investment implementation;

Program Pengembangan

Sepanjang tahun 2021, program pengembangan kompetensi Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah sebagai berikut:

Development Program

Throughout 2021, Investment and Business Risk Committee development program is as follows:

Pelatihan Komite Investasi dan Risiko Usaha

Investment and Business Risk Committee Training

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Provider	Tempat & Waktu Pelaksanaan Time and Place of Implementation
Andi Saiful Haq	Ketua Chairman	<i>Extracting Value From Successful Holding Implementation</i>	PTC	Virtual, 15-18 Juni 2021
Andi Saiful Haq	Ketua Chairman	Proses Unlock Value dan IPO	PT Jasa Armada Indonesia	Virtual, 09 Agustus 2021
Andi Saiful Haq	Ketua Chairman	<i>Executive Insight</i>	PTC	Virtual, 02-04 November 2021

Penilaian Kinerja KIRU Tahun 2021

Penilaian kinerja KIRU tahun 2021 dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja KIRU dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite IRU yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang manajemen risiko dan Investasi. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/ atau memberhentikan anggota KIRU untuk periode jabatan berikutnya.

KIRU Performance Assessment in 2021

The KIRU 2021 performance assessment is carried out based on the realization and completion of the work programs listed in the IRU Committee's Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the IRU Committee's report which includes the implementation of committee duties in the field of risk management and investment. The results of the assessment become material for consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss IRU Committee members for the next term of office.



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINAS

Remuneration And Nomination Committee

Sampai dengan akhir periode pelaporan, pada 30 Desember 2021 Dewan Komisaris menetapkan peran dari Komite Remunerasi dan Nominasi akan dilakukan oleh Komite Audit yang akan mengikuti fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dijalankan oleh PT Pertamina (Persero).

Terkait dengan fungsi remunerasi yang mencakup struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, ditentukan Subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina International Shipping yang ditetapkan berdasarkan RUPS secara sirkuler.

Terkait dengan fungsi nominasi yang mencakup kebijakan dan kriteria nominasi calon Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan dalam mekanisme Sidang Dewan Pertimbangan Karir Pekerja PT Pertamina International Shipping dan kemudian ditetapkan Dewan Komisaris serta persetujuan Direksi PT Pertamina International Shipping untuk disahkan berdasarkan RUPS secara sirkuler.

Until the end of the reporting period, on December 30, 2021, the Board of Commissioners stipulated that the role of the Remuneration and Nomination Committee will be carried out by the Audit Committee which will follow the functions of the Remuneration and Nomination Committee run by PT Pertamina (Persero).

Referring to the remuneration function covering the structure, policy, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as performance evaluation on the Board of Commissioners and Board of Directors are determined by determined by Subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina International Shipping, which was determined based on the GMS in a circular manner.

Meanwhile, the nomination function covering policy and criteria of nomination of candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors are determined in the trial mechanism held by Employee Career Advisory Council of PT Pertamina (Persero), and to be stipulated by the Board of Commissioners as well as PT Pertamina (Persero) Board of Directors' approval for ratification in circular GMS.



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berada serta bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama. Hal ini merupakan bentuk keseriusan Perusahaan dalam menciptakan implementasi terbaik GCG

The Corporate Secretary is positioned and responsible directly under the President Director. This is a form of the Company's seriousness in creating the best implementation of GCG.

Kewajiban membentuk Sekretaris Perusahaan berlaku bagi Perusahaan sebagai anak perusahaan BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN berikut perubahannya. Fungsi tersebut adalah untuk menjamin bahwa penyelenggaraan administrasi dan tindakan korporasi yang dilakukan Perusahaan telah mematuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip GCG, melindungi Perusahaan dari sisi hukum, membina relasi dengan lembaga pemerintahan terkait serta memastikan pengelolaan dokumen perusahaan. Peranan dan tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi BUMN tetapi juga bagi seluruh entitas anaknya.

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemegang Saham, bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen dan notulen rapat, penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat serta menangani hubungan dengan para Pemangku Kepentingan, masyarakat, serta pihak-pihak internal.

Obligation to appoint a Corporate Secretary applies to the Company as a SOEs subsidiary as stipulated in the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN and its amendments. This function is to ensure that the administration and corporate actions carried out by the Company comply with prevailing laws and regulations and are in accordance with the principles of GCG, protect the Company from the legal side, maintain relationships with relevant government agencies and ensure the management of company documents. These roles and responsibilities do not only apply to SOEs but also to all of their subsidiary entities.

The Corporate Secretary acts as a representative of the Company in dealing with Shareholders, is responsible for document administration and meeting minutes, formulating policies, planning and controlling corporate communications as well as handling relationships with Stakeholders, the public, and internal parties.

Fungsi Jabatan

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Vice President (VP) Legal & Relation yang memiliki posisi strategis untuk:

1. Mengelola hubungan perusahaan dengan media, investor, community, dan stakeholders;
2. Memastikan dan menetapkan kegiatan protokoler direksi di PTK;
3. Mengelola perencanaan dan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, serta taat aturan melalui perencanaan dan pelaksanaan program komunikasi dan public relations yang komprehensif, dilakukan untuk membangun dan memelihara citra positif korporasi PT Pertamina Trans Kontinental dimata masyarakat dan stakeholders sebagai perusahaan yang kompetitif dan peduli;
4. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum (baik litigasi maupun non- litigasi) dan kehumasan perusahaan;
5. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan regulasi pemerintah, yang semuanya itu memiliki komitmen kepatuhan/compliance.

Selain itu pelaksanaan fungsi jabatan tersebut juga termasuk menjalankan fungsi Legal Counsel dan fungsi sebagai Relations, sebagai berikut:

Fungsi Legal Counsel

1. Memberikan layanan legal terkait kegiatan operasional perusahaan, dengan mengacu kepada Key Business Issues dan Key Legal Issues yang sudah ditetapkan sebelumnya
2. Mengidentifikasi dan perumusan aspek-aspek hukum, penyusunan rekomendasi pertimbangan hukum, penanganan

Position Function

Vice President (VP) Legal & Relations as Corporate Secretary has a strategic position to:

1. Managing the company's relationship with the media, investors, community, and stakeholders;
2. Ensure and determine the protocol activities of the directors in PTK;
3. Managing the planning and implementation of Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and complying with regulations through planning and implementing a comprehensive communication and public relations program, carried out to build and maintain a positive corporate image of PT Pertamina Trans Kontinental in the eyes of the public and stakeholders as a competitive company. and care;
4. Provide legal considerations and assistance (both litigation and non-litigation) and corporate public relations;
5. Ensure the company's compliance with the implementation of government regulations, all of which have a commitment to compliance.

In addition, the implementation of the function of the office is also included in the Legal Counsel function and functions as a Relations, as follows:

Legal Counsel Function

1. Provide legal services related to the company's operational activities, with reference to Key Business Issues and Key Legal Issues that have been previously determined
2. Identify and formulate legal aspects, compiling recommendations for legal considerations, handling cases (civil,

- perkara (perdata, pidana, & publik)
3. Melakukan drafting/reviewing perjanjian/dokumentasi legal, negosiasi perjanjian, standarisasi perjanjian/dokumentasi legal yang bersifat rutin, rencana, usulan, dan implementasi proses pengadaan jasa hukum eksternal yang ditujukan bagi user.
 4. Memberi masukan/usulan Pertamina terhadap rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang telah ada terkait kegiatan bisnis perusahaan sesuai ruang lingkup PTK berdasarkan kebijakan pembagian kewenangan dengan Fungsi Legal Pertamina (Holding) serta intepretasi atas suatu ketentuan peraturan internal perusahaan.

Fungsi Relations

1. Mengelola relasi dan komunikasi perusahaan, baik dengan investor/komunitas keuangan, regulator, stakeholder, mitra kerjasama, media dan pelanggan eksternal perusahaan
2. Mengelola kegiatan Program Kemitraan, Bina Lingkungan, dan Corporate Social Responsibility
3. Menyusun Sistem & Tata Kerja dan Compliance
4. Memastikan terlaksananya corporate activity (kegiatan pekerja, RUPS, aktifitas BoD/BoC, dan corporate event lainnya), untuk mendukung terbentuknya persepsi positif dan reputasi korporasi
5. Memastikan terbinanya hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait.

Kriteria

Kriteria Sekretaris Perusahaan antara lain wajib memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan, hubungan masyarakat dan keterampilan administratif. Sekretaris Perusahaan juga harus memiliki pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

- criminal, & public)
3. Drafting/reviewing legal agreements/documentation, negotiation agreements, standardizing regular legal agreements/documentation, planning, proposing, and implementing the external legal service procurement process aimed at users.
 4. Provide feedback/suggestions for Pertamina on the existing draft laws and regulations related to the company's business activities in accordance with the scope of the PTK based on the policy of division of authority with Pertamina's Legal Function (Holding) and interpretation of a provision of the company's internal regulations.

Relations Function

1. Manage company relations and communications, both with investors/financial community, regulators, stakeholders, cooperation partners, media and external customers of the company
2. Manage the activities of the Partnership Program, Community Development, and Corporate Social Responsibility
3. Develop System & Work Procedures and Compliance
4. Ensure the implementation of corporate activities (employee activities, GMS, BoD/BoC activities, and other corporate events), to support the formation of positive perceptions and corporate reputation
5. Ensure the establishment of good relations with related parties.

Criteria

Criteria for the Corporate Secretary must include knowledge of regulations relating to the Company, public relations and administrative skills. The Corporate Secretary must also have experience that supports the implementation of his duties.

Persyaratan

Sebagai kualifikasi Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki pendidikan dan pengalaman yang mendukung.
- Memiliki kompetensi teknis.
Meliputi regulasi pelayaran, pengetahuan dan keterampilan hukum, pengelolaan risiko, perencanaan strategis dan kemampuan komunikasi.
- Memiliki kompetensi generik.
Meliputi pengetahuan bisnis, anggaran, perencanaan tenaga kerja, pengelolaan kinerja, teknik pelatihan dan konseling.
- Memiliki kompetensi perilaku.
Mencakup membangun kepercayaan, aksi inisiasi, membuat keputusan, standar kerja, fokus pelanggan, membangun kerja positif, membangun relasi, pelatihan, pendelegasian tanggung jawab, *entrepreneurial insight*, serta perencanaan dan organisasi.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan PTK bertanggung jawab kepada Direksi atas pelaksanaan tugasnya. Adapun struktur organisasi struktur unit *Corporate Secretary* adalah sebagai berikut:

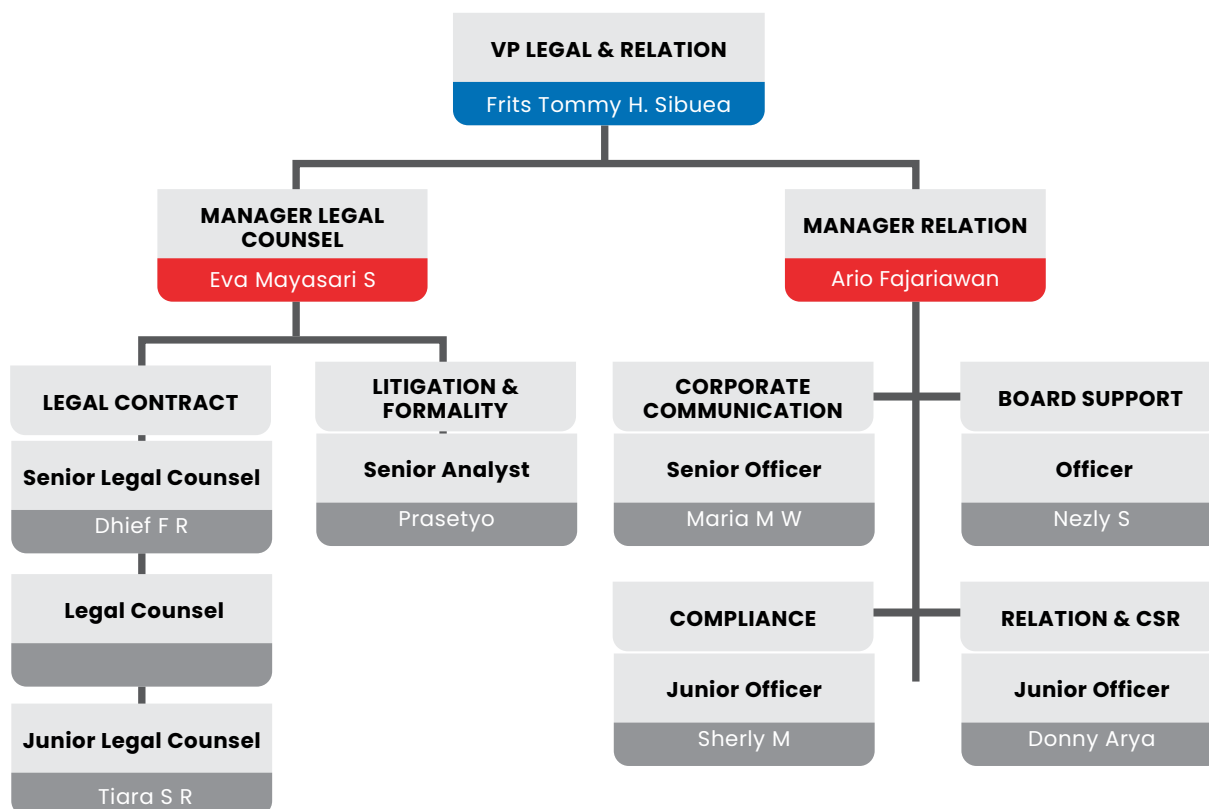
Requirements

As a qualification for the Corporate Secretary, the Corporate Secretary must meet the following requirements:

- Having supporting education and experience.
- Having technical competency.
Covering shipping regulations, knowledge and skills in law, risk management, strategic planning, and communication capability.
- Having generic competency.
Inclusive of knowledge on business, budget, manpower planning, performance management, training and counselling techniques.
- Having behavior competence.
Inclusive of trust building, initiative action, decisionmaking, work standards, customer-focused, positive work behavior, relations development, trainings, responsibility delegation, entrepreneurial insight, as well as planning and organization.

Corporate Secretary Organizational Structure

The PTK Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors for carrying out his duties. The organizational structure of the Corporate Secretary unit is as follows:



Pejabat Sekretaris Perusahaan

Pejabat Sekretaris Perusahaan selama tahun 2021 dijabat oleh Frits Tommy H. Sibuea dari 1 Desember 2020 hingga saat ini berdasarkan Keputusan No. SKMJ-0003/K20500/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan dari Manager Relations PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur menjadi Corporate Secretary PT Pertamina Trans Kontinental. Berikut Profil Sekretaris Perusahaan PTK periode 2021.

Corporate Secretary Executives

During 2021, Frits Tommy H. Sibuea held the position of the Corporate secretary from December 1, 2020 until now based on Decree No. SKMJ-0003/K20500/2020-S8 regarding Position Transfer from Manager Relations of PT Pertamina Hulu East Kalimantan to Corporate Secretary of PT Pertamina Trans Kontinental. Following is the Profile of the Corporate Secretary of PTK for the period 2021.



FRITS TOMMY H. SIBUEA

Sekretaris Perusahaan (1 Desember 2020 – Sekarang)
Corporate Secretary (1 December 2020 – now)

Berusia 53 tahun, Warga negara Indonesia dan berdomisili di Tangerang. Beliau lahir di Pekanbaru pada tanggal 2 Juni 1968. Beliau efektif diangkat menjadi *Corporate Secretary* pada 1 Desember 2020. Beliau memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 1993 dan Pasca Sarjana dari Bond University Australia tahun 1999. Sebelum menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina Trans Kontinental, pernah menjabat sebagai Manager Relations - PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

53 years old, Indonesian citizen and domiciled in Tangerang. He was born in Pekanbaru on June 2, 1968. He was effectively appointed as Corporate Secretary on December 1, 2020. He obtained a Bachelor of Communication degree from Padjajaran University Bandung in 1993 and a Postgraduate degree from Bond University Australia in 1999. Prior to serving as Corporate Secretary of Pertamina Trans Kontinental, previously served as Manager Relations - PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Pedoman kerja Sekretaris Perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaannya, antara lain:

- *Code of Corporate Governance* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. Pdm-002/ F0000/2016-SO.
- Board Manual.
- Uraian jabatan *Corporate Secretary* yang telah ditetapkan manajemen.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi dan merekomendasi sistem

Corporate Secretary Work Guideline

In performing its work, the Corporate Secretary refers to a number of work procedures, among which are:

- *Code of Corporate Governance* which was established based on the President Director Decision No. Pdm-002/F0000/2016-SO.
- Board Manual.
- Job description of Corporate Secretary determined by the management.

Duties, Responsibilities, and Authority of Corporate Secretary

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

- tata kerja Legal & Relation kepada direksi berdasarkan pedoman yang berlaku
- Menyusun rencana kerja & anggaran jangka pendek dan jangka panjang corporate secretary serta memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaannya
 - Memastikan pengesahan dokumen RJPP dan RKAP dalam RUPS sesuai dengan target yang ditentukan
 - Mengkoordinir agenda rapat direksi dan rapat manajemen
 - Membangun, memelihara, dan meningkatkan citra positif perusahaan dimata masyarakat dan stakeholders, serta meminimalisir dan mengindarkan perusahaan dari timbulnya citra negatif, permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi serta kehumasan yang berdampak pada perusahaan
 - Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program- program CSR secara efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, sebagai bagian dari kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan citra positif perusahaan dimata masyarakat
 - Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
 - Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan pemerintah baik secara internal maupun eksternal perusahaan
 - Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan perusahaan, termasuk agenda Direksi, pemeliharaan database, dokumen asli, dan laporan-laporan perusahaan
 - Menyetujui dan memastikan kegiatan protokoler direksi PTK
 - Mengendalikan data dan informasi manajemen yang akurat dan valid bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham secara periodik dan tahunan
 - Memastikan ter-updatenya peraturan-
- Evaluate and recommend Legal & Relations work system to the board of directors based on the prevailing guidelines
 - Prepare short-term and long-term work plans & budgets for the corporate secretary as well as monitor, and evaluate their implementation
 - Ensure the ratification of the RJPP and RKAP documents at the GMS in accordance with the specified targets
 - Coordinate the agenda of the board of directors meetings and management meetings
 - Build, maintain, and enhance the company's positive image in the eyes of the public and stakeholders, as well as minimize and prevent the company from creating a negative image, litigation and non-litigation legal issues and public relations that have an impact on the company.
 - Evaluate and monitor the implementation of CSR programs effectively, in accordance with predetermined plans and on target, as part of corporate compliance while enhancing the company's positive image in the eyes of the public.
 - Ensure reports on activities of development, guidance, implementation and enforcement of the principles of Good Corporate Governance
 - Communicate company's and government's policies both internally and externally to the company
 - Organize corporate secretarial administration activities, including the agenda of the Board of Directors, database maintenance, original documents, and company reports
 - Approve and ensure the protocol activities of the PTK directors
 - Controll accurate and valid management data and information for the benefit of the company and shareholders periodically and annually

peraturan perundangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan proses bisnis dan produk (compliance issue), serta perijinan dan aspek hukum lain bagi perusahaan dan anak perusahaan secara tepat waktu

- Menyetujui laporan bulanan/periodik

Wewenang Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki kewenangan yaitu:

- Atas sepengetahuan Direksi mengadakan dan membina hubungan dengan para pihak sebagai upaya meningkatkan loyalitas para stakeholder;
- Memberikan keterangan pers (press release) mengenai kebijakan perusahaan;
- Memberikan pertimbangan hukum kepada Direksi dalam merumuskan suatu peraturan atas kebijakan;
- Merekomendasikan konsep perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh Direksi;
- Mengkoordinasikan penyusunan Annual Report;
- Atas persetujuan Direksi mewakili perusahaan dalam rangka menyelesaikan perselisihan hukum dengan pihak lain di dalam maupun di luar pengadilan.
- Menunjuk lawyer/penasehat hukum, notaris untuk sebagai mitra penyelesaian perkara hukum dan formalitas dokumen perusahaan.

Pedoman Kerja dan Laporan Berkala Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memberikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta tugas lainnya dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi. Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

- Merencanakan, mengarahkan, memonitor

- Ensure the updating of laws and regulations and other regulations related to business processes and products (compliance issue), as well as permits and other legal aspects for the company and its subsidiaries in a timely manner
- Approve monthly/periodic reports

Corporate Secretary Authority

The Corporate Secretary holds the authority, as follows:

- At the knowledge of the Board of Directors establishes and fosters relationships with parties in an effort to increase the loyalty of stakeholders.
- Provide a press statement (press release) regarding company policy.
- Provide legal considerations to the Board of Directors in formulating a regulation on policy.
- Recommend the concept of a cooperation agreement that will be signed by the Board of Directors
- Coordinate the preparation of company quarterly reports, Management Reports, Annual Reports and RJPP
- With the approval of the Board of Directors representing the company in order to resolve legal disputes with other parties inside and outside the court.
- Appoint lawyers/legal advisors, notaries to be partners in solving legal cases and corporate document formalities.

Work Guidelines and Periodic Reports of The Corporate Secretary

The Corporate Secretary provides periodic reports on the implementation of his duties and responsibilities as well as other duties in assisting the implementation of the duties of the Board of Directors. Throughout 2021, the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities with the following details:

- dan mengevaluasi rencana kerja dan sistem tata kerja *Corporate Secretary*;
- Membangun, memelihara dan meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan, serta meminimalisir dan menghindarkan Perusahaan dari timbulnya citra negatif, permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi serta kehumasan yang berdampak pada Perusahaan;
 - Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan Perusahaan, pengelolaan arsip, dokumen asli, dan laporan-laporan Perusahaan;
 - Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) serta membuat risalah rapat Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
 - Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan Pemerintah, baik secara internal maupun eksternal Perusahaan;
 - Mengendalikan data dan informasi manajemen yang akurat dan valid bagi kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham secara periodik dan tahunan;
 - Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program-program CSR secara efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, sebagai bagian dari kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat;
 - Memastikan ter-updatenya peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan proses bisnis dan produk (*compliance issue*), serta perizinan dan aspek hukum lain bagi Perusahaan dan Anak Perusahaan secara tepat waktu;
 - Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG.
- Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan
- Planning, directing, monitoring and evaluating the work plan and work system of the Corporate Secretary;
 - Building, maintaining and enhancing the Company's positive image in the eyes of the public and stakeholders, as well as minimizing and avoiding the Company from the emergence of negative images, litigation and non-litigation legal issues and public relations that have an impact on the Company;
 - Carrying out corporate secretarial administration activities, managing archives, original documents, and company reports;
 - Prepare meetings including meeting materials (*briefing sheets*) and prepare minutes of meetings of the Directors in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
 - Communicating Company and Government policies, both internally and externally of the Company;
 - Control data and management information that is accurate and valid for the interests of the Company and the Shareholders periodically and annually;
 - Evaluate and monitor the implementation of CSR programs effectively, in accordance with pre determined plans and on target, as part of corporate compliance while enhancing the Company's positive image in the eyes of the public;
 - Ensuring the updating of laws and regulations relating to business processes and products (*compliance issues*), as well as licensing and other legal aspects for the Company and its subsidiaries in a timely manner;
 - Ensuring reports on the activities of developing, guiding, implementing and enforcing GCG principles.

telah melakukan program kerja yang terdiri dari berbagai kegiatan dan penyampaian laporan. Realisasi program kerja Sekretaris Perusahaan tersebut antara lain:

1. Training/Pelatihan:

Mengikuti berbagai pelatihan/training dalam rangka Pengembangan Kompetensi Pelatihan/ training Sekretaris Perusahaan tahun 2021.

2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):

Selama tahun 2021, PTK telah melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan 6 (enam) keputusan RUPS secara sirkuler yang telah dijelaskan pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bagian Rapat Umum Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini. .

3. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris:

Selama tahun 2021, Direksi telah mengadakan rapat internal Direksi sebanyak 24 kali rapat dan 36 kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. Adapun rincian penyelenggaraan Rapat Direksi telah diuraikan pada Bab Direksi Laporan Tahunan ini. Sedangkan Rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris telah diuraikan pada Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

4. Penyampaian laporan berkala:

Sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap tahunnya kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

In 2021, the Corporate Secretary has carried out a work program consisting of various activities and submission of reports. The realization of the work program for the Corporate Secretary includes:

1. Training:

Participating in various trainings in the context of Competency Development for Corporate Secretary Training in 2021.

2. The General Meeting of Shareholders (GMS):

During 2021, the PTK has held the Annual GMS for 1 (one) time and issued 6 (six) resolutions of the GMS in a circular manner which has been described in the Chapter of Corporate Governance, Sub Division of General Meeting of Shareholders in this Annual Report.

3. Organizing and documenting the Board of Directors Meeting and Board of Directors Meeting with the Board of Commissioners:

During 2021, the Board of Directors held 24 meetings and 36 joint meetings with the Board of Commissioners. The details of the implementation of the Board of Directors Meeting are described in the Board of Directors Chapter of this Annual Report. Meanwhile, the meeting with the Board of Directors and the Board of Commissioners is described in the Board of Commissioners Chapter in this Annual Report.

4. Submission of periodic reports:

As an accountability for the implementation of his duties, the Corporate Secretary has prepared and submitted a Periodic Report annually to the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders.

Penyampaian Laporan Berkala

Submission of Periodic Reports



Jenis Laporan Type of Report	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Pemegang Saham Shareholders
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2021 Management Report Quarter I 2021	✓	✓	✓
Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2021 Management Report Quarter II 2021	✓	✓	✓
Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2021 Management Report Quarter III 2021	✓	✓	✓
Laporan Manajemen tahun 2021 Management Report 2021	✓	✓	✓
Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 Annual Report 2021	✓	✓	✓
Laporan Sekretaris Perusahaan Semester I tahun 2021 / Report of the Corporate Secretary Semester I of 2021	✓	✓	✓
Laporan Sekretaris Perusahaan Semester II tahun 2021 / Report of the Corporate Secretary Semester II of 2021	✓	✓	✓

5. Menyusun dan me-review pedoman

Tata Laksana Surat dan Kearsipan PTK, serta mensosialisasikan dan memantau implementasinya.

6. Pelaksanaan Program CSR:

Selama tahun 2021 PTK telah melaksanakan berbagai program CSR sebagaimana disampaikan pada Bab Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

7. Menerbitkan Siaran Pers:

Sekretaris Perusahaan selalu berupaya membangun komunikasi positif dan persepsi publik di antaranya melalui siaran pers.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

SDM Sekretaris Perusahaan senantiasa melakukan *upgrade* pengetahuan maupun kemampuan pada setiap tahunnya, guna meningkatkan kualitas perannya dalam membantu Direksi untuk mengembangkan roda bisnis Perusahaan.

5. **Compile and review the guidelines for the Procedure for Letters and Archives of PTK, as well as to socialize and monitor their implementation.**

6. Implementation of CSR Programs

During 2021 PTK has implemented various CSR programs as stated in the Chapter of the Corporate Social Responsibility Report in this annual report.

7. Publish a Press Release:

The Corporate Secretary always strives to build positive communication and public perception, among others, through press releases.

Corporate Secretary Training

The Corporate Secretary personnel always upgrade their knowledge and abilities every year, in order to improve the quality of his role in helping the Board of Directors to develop

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Program Kompetensi Sekretaris Perusahaan 2021
2021 Corporate Secretary Competency Program

No	Materi Pelatihan Training Material	Peserta Participant	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation
1	Mencegah Fraud	Frits Tommy H Sibuea	23 Februari 2021
2	Leaders Forum/Leaders Insight	Frits Tommy H Sibuea	29 April 2021
3	Revitalisasi Manajemen Keselamatan Kerja Terpadu	Frits Tommy H Sibuea	18 Mei 2021
4	Building The Future Ready Organization	Frits Tommy H Sibuea	22 – 25 Juni 2021
5	Transformational Leader Create Next Leader	Frits Tommy H Sibuea	29 Juli 2021
6	Membangun Culture HSSE Sejalan dengan Supreme	Frits Tommy H Sibuea	3 Agustus 2021
7	Awareness SUPREME	Frits Tommy H Sibuea	13 Agustus 2021
8	Implikasi Perjanjian Baku bagi Para Pihak dan pada Proses Bisnis Perusahaan	Frits Tommy H Sibuea	1 September 2021
9	Leaders Forum/Leaders Insight	Frits Tommy H Sibuea	13 September 2021
10	Tantangan Industrial Peace, Menjaga Productivitas di Masa Pandemi	Frits Tommy H Sibuea	29 September 2021
11	Global Shipping Business	Frits Tommy H Sibuea	8 Oktober 2021
12	Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices – Executive Insight Leadership Series	Frits Tommy H Sibuea	2 – 4 November 2021
13	Innovation & Creativity	Frits Tommy H Sibuea	12 November 2021

the Company's business operations.

Throughout 2021, the Corporate Secretary participated in the competency development programs, as follows:

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan strategi maupun rencana kerja terkait penyampaian informasi kepada publik. Dalam pelaksanaan internalisasi GCG, sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan secara berkesinambungan dalam upaya membudayakan penerapan GCG di seluruh lingkungan Pertamina Trans Kontinental. Evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan diukur dengan KPI Sekretaris Perusahaan.

Corporate Secretary Performance Assessment

The Corporate Secretary has implemented a strategy and work plan related to the public information disclosure. In the GCG internalization activity, the Corporate Secretary has carried out various activities on an ongoing basis in an effort to civilize the implementation of GCG throughout the Pertamina Trans Kontinental circumstances. Evaluation of the performance of the Corporate Secretary is measured by the KPI for the Corporate Secretary.

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk memastikan/assurance bahwa seluruh unit kerja telah melakukan aktivitas secara efektif dan efisien serta melakukan konsultasi guna memberikan nilai tambah (added value) dalam pencapaian tujuan organisasi/perusahaan secara menyeluruh.

Internal Audit adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* dan *consulting* secara independen dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan

Dasar Penerapan Pengawasan Internal

Fungsi Internal Audit PTK dibentuk berdasarkan:

1. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Bab VI pasal 67, 68 dan 69 dengan sebutan fungsi Internal Audit
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN.
3. Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN No S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan Good Corporate Governance yang diperbaharui

The Internal Audit Unit is responsible for ensuring/assurance that all work units have carried out activities effectively and efficiently as well as conducting consultations to provide added value in achieving the overall goals of the organization/company.

Internal Audit is a function that provides assurance and consulting services independently and objectively by doing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve governance, risk management and internal control to provide added value to the Company.

Basic Implementation of Internal Control

PTK Internal Audit function is formed based on:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises Chapter VI articles 67, 68 and 69 with the title Internal Audit function.
2. Regulation of the Minister of State for SOEs Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, as last amended by Regulation of the Minister of BUMN Number: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Amendment to the Minister of BUMN Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN.
3. Letter of the Secretary of the State Ministry for SOEs No. S-168/MBU/2008 dated June 27, 2008 concerning indicators/parameters of assessment and evaluation of the implementation of Good Corporate

dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012.

4. Anggaran Dasar Perusahaan

Governance which was updated by the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: SK-16/S.MBU 2012.

4. Company Articles of Association

Visi dan Misi Fungsi Audit Internal

Visi

Menjadi Internal Audit yang profesional dan terpercaya dengan menerapkan standar internasional profesi Internal Audit untuk mendukung visi dan misi Perusahaan.

Misi

Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pemberian jasa assurance, advice dan insight yang berbasis risiko secara independen dan objektif.

Tujuan

1. Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
2. Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan advice, insight dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.

Value

1. *Powerful* (keberadaan Internal Audit secara tegas diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN).
2. *United* (Satu kesatuan dan berinteraksi dalam wadah Internal Audit yang solid).
3. *Respected* (Bermartabat serta diakui hasil kinerjanya).
4. *Energized* (Auditor yang energik dan tersertifikasi dengan kualifikasi yang membanggakan).

Vision and Mission of The Internal Audit Function

Vision

To become a strategic partner for management in accordance with superior values in achieving the target of integrated maritime service companies on a global scale by 2026.

Mission

Provide added value to the Company by providing independent and objective risk-based assurance, advice and insight services.

Purpose

1. Assist the Company to achieve its objectives effectively and efficiently by evaluating and recommending improvements in the effectiveness of corporate governance, risk management and internal control;
2. Assist the management of the Company and other stakeholders by providing advice, considerations and recommendations that are useful for increasing the effectiveness and efficiency of the Company.

Value

1. *Powerful* (the existence of Internal Audit is expressly regulated in Law No. 19 of 2003 on BUMN).
2. *United* (One unit and interacting in a solid Internal Audit).
3. *Respected* (Dignified and recognized for its performance results).
4. *Energized* (energetic and certified auditor with proud qualifications).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan Internal Audit meliputi, namun tidak terbatas pada, pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan. Ruang lingkup tersebut dilaksanakan terhadap seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan (PT Pertamina Trans Kontinental dan Anak Perusahaan) untuk meyakinkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Regulasi yang berpengaruh signifikan pada Perusahaan telah dipatuhi.
- b. Pekerja melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku.
- c. Interaksi antar unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
- d. Risiko diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik.
- e. Program, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
- f. Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
- g. Informasi finansial, manajerial, dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.
- h. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
- i. Aspek bisnis telah dikelola dengan baik dan optimum.

Lingkungan Perusahaan yang menjadi lingkup kerja Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Operasi
2. Direktorat Keuangan
3. Direktorat Pemasaran
4. *Corporate Secretary*
5. Fungsi-fungsi yang secara struktural

Scope

The scope of the Internal Audit assignment includes, but is not limited to, testing and evaluating the adequacy and effectiveness of internal control, risk management, and governance processes in achieving the Company's goals and objectives. The scope is implemented in all areas of the Company's operational and business activities (PT Pertamina Trans Kontinental and Subsidiaries) to ensure the following:

- a. Regulations that have a significant impact on the Company have been complied with.
- b. Workers carry out their activities in accordance with applicable policies, standards, procedures and laws.
- c. Interaction between internal and external work units is carried out in an accountable manner and is within the corridor of applicable governance.
- d. Risks are identified and mitigated properly.
- e. Programs, work plans, and objectives have been achieved effectively.
- f. The quality of internal control is continuously improved.
- g. Significant financial, managerial and operational information is available in an accurate, reliable and timely manner.
- h. Resources are obtained economically, used efficiently, and adequately protected.
- i. The business aspect has been managed properly and optimally.

The Company's environment as scope of work of Internal Audit is as follows:

1. Directorate of Operations;
2. Directorate of Finance;
3. Directorate of Marketing;
4. Corporate Secretary;
5. Structural functions under the President

berada dibawah Direktur Utama

6. Wilayah Kerja Region I, II dan III
7. Anak Perusahaan serta badan Usaha yang dibentuk

Director;

6. Working Areas Region I, II and III
7. Branch Offices, Subsidiaries and Business Entities formed.

Kode Etik Internal Audit

1. Integritas (*Integrity*)

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental menghasilkan kepercayaan dan menyediakan dasar kehandalan penilaian yaitu: bersikap jujur, obyektif, cermat, loyalitas, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wajib menghormati, mendukung nama baik perusahaan dari sisi hukum maupun etika.

2. Obyektivitas (*Objectivity*)

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental harus dapat menjalankan obyektivitas yang profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Auditor membuat penilaian dengan kondisi yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau oleh pihak lain dalam membuat penilaian.

3. Konfidensial (*Confidentiality*)

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi pemberi informasi kecuali ada kewajiban hukum atau profesi yang mengharuskan dilakukan hal tersebut dan auditor wajib berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang dibutuhkan pada saat menjalankan tugas.

Internal Audit Code of Ethics

1. *Integrity*

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental earns trust and provides a basis for the reliability of the assessment, namely: being honest, objective, careful, loyal, as well as being responsible for carrying out duties and being obliged to respect, support the company's reputation from the legal and ethical sides

2. *Objectivity*

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental shall be able to carry out professional objectivity in gathering, evaluating and communicating information about the audited activity or process. The auditors make prepare an audit with relevant conditions without being influenced by personal interests or by other parties in making judgments;

3. *Confidentiality*

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental respects the value and ownership of information obtained and does not disclose information without the authorization of the information provider unless there is a legal or professional obligation that requires it to be done and the auditor must be careful in using and maintaining the required information when performing the duties;



4. Kompetensi (*Competency*)

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental harus menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman secara profesional dalam melaksanakan tugas. Untuk itu auditor internal wajib secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas layanan sesuai dengan standar profesi auditor internal serta kebijakan dan peraturan perusahaan.

5. Berwawasan Luas dan Jauh Kedepan (*Visionary*)

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental harus mampu mengantisipasi potensi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan dan membangun komunikasi yang efektif antar auditor Perusahaan.

6. Sanksi

Terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik di atas, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan.

4. *Competency*

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental shall address professional knowledge, expertise and experience in carrying out its duties. Therefore, the internal auditors are required to continuously improve the ability, effectiveness and quality of services in accordance with the professional standards of internal auditors and company policies and regulations;

5. *Visionary*

PT Pertamina Trans Kontinental Internal Audit must be able to anticipate the potential for various problems that can affect the achievement of Company's goals and build effective communication between the Company's auditors.

6. *Sanctions*

Workers who violate the above code of conduct will be sanctioned according to company regulations.

Independensi

- Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit dilarang terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
- Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit wajib menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, objektif dalam menjalankan penugasan dan mengungkapkan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap independensi.
- Auditor yang direkrut dari Fungsi Bisnis PT Pertamina International Shipping, Subholding, Anggota Subholding, dan Anak

Independence

- The Chief Audit Executive and all Internal Audit staff are prohibited from being involved in the Company's operational activities that may influence with the independence of carrying out their duties.
- The Chief Audit Executive and all Internal Audit staff are required to maintain an impartial attitude, avoid conflicts of interest, be objective in carrying out assignments and disclose if there is a potential conflict of interest and interference with independence.
- Auditors recruited from the Business Function of PT Pertamina International Shipping, Subholding, Subholding

Perusahaan Services dapat melakukan audit di fungsi bisnis sebelumnya minimal 1 (satu) tahun sejak kepindahannya ke Fungsi Internal Audit dengan tetap mengedepankan aspek independensi dan objektivitas.

- d. Chief Audit Executive menyampaikan kepada Direktur Utama/Komisaris Utama/Komite Audit jika terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.
- e. Chief Audit Executive dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, tanpa kehadiran Manajemen.

Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki kewenangan untuk:

- a. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Internal Audit.
- b. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
- c. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
- e. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- f. Mengadakan rapat secara berkala dan pada saat diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- g. Menentukan arah kebijakan, struktur organisasi, pengelolaan pembinaan

Members, and Services Subsidiaries can audit the previous business function at least 1 (one) year after moving to the Internal Audit Function while still prioritizing the aspects of independence and objectivity.

- d. The Chief Audit Executive conveys to the President Director/President Commissioner/Audit Committee if there are interventions in determining the scope of the audit, conducting audits and reporting audit results.
- e. The Chief Audit Executive can communicate and interact directly with the Board of Commissioners and the Audit Committee, without the presence of Management.

Authority

The following is the authority of the Internal Audit Function:

- a. Have unrestricted access to all data, documents, functions, activities, and other company resources including requesting information or explanations from all officials/workers in the context of carrying out Internal Audit duties.
- b. Determine the scope, methods, methods, techniques, strategies and audit approaches.
- c. Carry out direct communication with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
- d. Carry out coordination with external auditors and other supervisory institutions.
- e. Request or obtain assistance from internal employees of the Company as well as from parties outside the Company, in the context of carrying out their duties.
- f. Hold meetings regularly and when necessary with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
- g. Determine policy direction, organizational structure, management of employee

karir pekerja (mutasi dan/atau promosi), pengelolaan manpower, pelaksanaan penugasan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan terbatas dalam lingkup Internal Audit Perusahaan dan Anak Perusahaan setelah berkonsultasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina International Shipping.

- h. Melaksanakan kegiatan assurance & consulting dan dapat menjadi bagian dari tim audit investigasi di Perusahaan dan Anak Perusahaan melalui mekanisme yang ditetapkan Chief Audit Executive PT Pertamina International Shipping.
- i. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan Internal Audit di Holding, Subholding Integrated Marine Logistics dan Anak Perusahaan PT Pertamina Trans Kontinental sesuai dengan pola koordinasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama

career development (transfers and/or promotions), management of manpower, implementation of assignments, as well as coordinating and supervising limited activities within the scope of Internal Audit of the Company and its Subsidiaries after consulting the Chief Audit Executive of PT Pertamina International Shipping .

- h. Carry out assurance & consulting activities and can be part of the investigative audit team in the Company and its Subsidiaries through the mechanism established by the Chief Audit Executive of PT Pertamina International Shipping.
- i. Coordinate the management of Internal Audit activities in Holding, Subholding Integrated Marine Logistics and Subsidiary PT Pertamina Trans Kontinental in accordance with the coordination pattern that has been approved by the President Director

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan assurance dan consulting di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
- b. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai.
- c. Menyusun dan mengusulkan Annual Audit Plan (AAP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, dan resources yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, dan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
- d. Melakukan review AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
- e. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan

Duties and Responsibilities

- a. Carry out supervisory activities through assurance and consulting activities in all areas of the Company's operational and business activities.
- b. Ensuring the aspects of integrity, objectivity, confidentiality and competence are applied adequately.
- c. Prepare and propose an Annual Audit Plan (AAP) which includes, among others, the assignment object, assignment schedule, and resources needed to obtain approval from the President Director, and the Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee.
- d. Conduct ongoing AAP reviews, to ensure compliance with the Company's business processes and risks, as well as the scope and objectives of the assignment.
- e. Communicating limited resources for the implementation of assignments, changes in AAP, and changes in policy direction to

kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

- f. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervisi dan didukung dengan kertas kerja yang memadai, serta rekomendasi, advice, dan insight yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh Auditee.
- g. Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
- h. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan assurance dan consulting dengan Internal Audit Subholding, Anggota Subholding, dan Anak Perusahaan Services.
- i. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko.
- j. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
- k. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional Perusahaan.
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit.
- m. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya yang relevan.
- n. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- o. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/pemeriksaan oleh auditor eksternal.
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyingkapan melalui Whistleblowing System (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Membantu pelaksanaan audit investigasi

the President Director, and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

- f. Ensure that each assignment is carried out under supervision and supported by adequate working papers, and the recommendations, advice, and insights submitted can be implemented by the Auditee.
- g. Ensure that the Internal Audit Function collectively has/acquires adequate knowledge, skills and competencies.
- h. Coordinate the management of Internal Audit activities which are not limited to assurance and consulting activities with the Internal Audit Subholding, Subholding Members, and Services Subsidiaries.
- i. Test and evaluate the effectiveness of control and risk management.
- j. Carry out compliance checks with related laws and regulations.
- k. Identify alternative improvements and increase the Company's operational efficiency.
- l. Carry out coordination with the Audit Committee.
- m. Report the results of supervision to the President Director and other relevant Directors.
- n. Monitor the implementation of follow-up on the results of internal, external and other supervisory institutions and report periodically to the President Director and the Audit Committee.
- o. Carry out coordination of audit/examination activities by external auditors.
- p. Coordinate with the Company's Supervisory Function in carrying out follow-up on complaints/disclosures through the Whistleblowing System (WBS) and complaints from the public or other parties in accordance with applicable regulations.
- q. Assist in carrying out investigative audits on issues that may cause losses to the Company at PT Pertamina Trans



terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan di PT Pertamina Trans Kontinental dan Anak Perusahaan.

- r. Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (improvement program) kegiatan Internal Audit.
- s. Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- t. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- u. Berkoordinasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina International Shipping dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit yang dikelola secara tersentralisasi di Holding sesuai dengan Tabel RASCI yang telah disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Standar Pelaksanaan

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit harus menaati Sistem Tata Kerja Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit yang mengacu kepada International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di Perusahaan.
- b. Jika dalam pengelolaan Fungsi Internal Audit harus dilakukan tidak sesuai dengan Standards, maka Chief Audit Executive harus mengungkapkan hal tersebut dan menyampaikannya kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Kedudukan dan Kualifikasi

- a. Internal Audit dipimpin oleh seorang Chief Audit Executive yang di dalam struktur organisasi PT Pertamina Trans Kontinental kedudukannya berada langsung di bawah

Kontinental and the Subsidiaries.

- r. Carry out evaluation and quality improvement (improvement program) of Internal Audit activities.
- s. Reporting the results of Internal Audit activities to the President Director, and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- t. Carry out other assignments as mandated by the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.
- u. Coordinate with the Chief Audit Executive of PT Pertamina International Shipping in the implementation of Internal Audit activities which are managed centrally in Holding in accordance with the RASCI Table which has been approved by the President Director of PT Pertamina International Shipping

Implementation Standards

- a. In carrying out their duties, the Chief Audit Executive and all Internal Audit staff must comply with the Internal Audit Work Procedure System and the Internal Audit Code of Ethics which refers to the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) set by The Institute of Internal Auditors as well as other policies, relevant and applicable in the Company.
- b. If the management of the Internal Audit Function must be carried out not in accordance with the Standards, the Chief Audit Executive must disclose this matter and submit it to the President Director, and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Position and Qualification

- a. Internal Audit is led by a Chief Audit Executive whose position is directly under the organizational structure of PT Pertamina Trans Kontinental

Direktur Utama.

- b. Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Chief Audit Executive PT Pertamina International Shipping dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
- c. Secara struktural, Chief Audit Executive menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama.
- d. Secara fungsional, Chief Audit Executive menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Komite Audit.
- e. Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif dalam diskusi terkait remunerasi Chief Audit Executive untuk memutuskan persetujuannya.
- f. Dewan Komisaris melalui Komite Audit dapat melakukan komunikasi dengan Chief Audit Executive untuk memastikan ketepatan ruang lingkup penugasan, kecukupan sumber daya, dan tidak ada pembatasan akses data serta informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam menjalankan kegiatannya.
- g. Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif dalam memberikan persetujuan Piagam Internal Audit.

President Director.

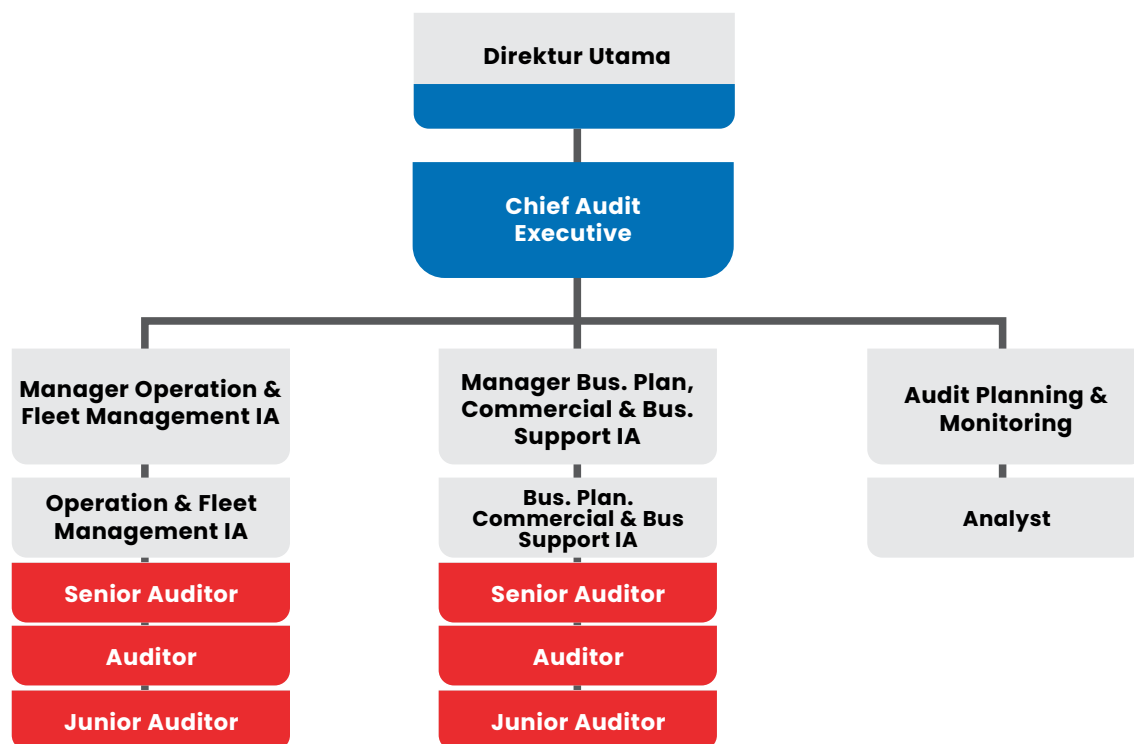
- b. The Chief Audit Executive is appointed and dismissed by the President Director after first obtaining a recommendation from the Chief Audit Executive of PT Pertamina International Shipping and obtaining the approval of the Board of Commissioners
- c. Structurally, the Chief Audit Executive establishes communication, coordination and reports on its activities to the President Director.
- d. Functionally, the Chief Audit Executive establishes communication, coordination and reports on its activities to the Audit Committee.
- e. The Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee plays an active role in discussions regarding the remuneration of the Chief Audit Executive to decide on its approval.
- f. The Board of Commissioners through the Audit Committee can communicate with the Chief Audit Executive to ensure the accuracy of the scope of assignments, adequacy of resources, and no restrictions on access to data and information needed by Internal Audit in carrying out its activities.
- g. The Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee plays an active role in approving the Internal Audit Charter.

Struktur Organisasi Unit Audit Internal

Berikut adalah struktur organisasi Unit Internal Audit PTK:

Internal Audit Unit Organization Structure

Organization structure of Internal Audit Unit in PTK is as follows:



Independensi Audit Internal

- Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit dilarang terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
- Chief Audit Executive dan seluruh staf Internal Audit wajib menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, objektif dalam menjalankan penugasan dan mengungkapkan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap independensi.
- Auditor yang direkrut dari Fungsi Bisnis PT Pertamina International Shipping, Subholding, Anggota Subholding, dan Anak Perusahaan Services dapat melakukan audit di fungsi bisnis sebelumnya minimal 1 (satu) tahun sejak kepindahannya ke Fungsi Internal Audit dengan tetap mengedepankan aspek independensi dan objektivitas.

Independency of Internal Audit

- The Chief Audit Executive and all Internal Audit staff are prohibited from being involved in the Company's operational activities that may influence independency of carrying out their duties.
- The Chief Audit Executive and all Internal Audit staff are required to maintain an impartial attitude, avoid conflicts of interest, be objective in carrying out assignments and disclose if there is a potential conflict of interest and interference with the independency.
- Auditors recruited from the Business Function of PT Pertamina International Shipping, Subholding, Subholding Members, and Services Subsidiaries can audit the previous business function at least 1 (one) year after moving to the Internal Audit Function while still prioritizing independency and objectivity aspects.

- d. Chief Audit Executive menyampaikan kepada Direktur Utama/Komisaris Utama/Komite Audit jika terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.
- e. Chief Audit Executive dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, tanpa kehadiran Manajemen.

- d. The Chief Audit Executive conveys to the President Director/President Commissioner/Audit Committee if there are interventions in determining the scope of the audit, conducting audits and reporting audit results.
- e. The Chief Audit Executive can communicate and interact directly with the Board of Commissioners and the Audit Committee, without the presence of Management.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Audit Internal dipimpin oleh Chief Audit Executive yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Chief Audit Executive PT Pertamina International Shipping dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris

Appointment and Dismission

Internal Audit is led by Chief Audit Executive who is appointed and dismissed by the President Director after first obtaining a recommendation from the Chief Audit Executive of PT Pertamina International Shipping and obtained approval from the Board of Commissioners.

Profil Chief Audit Executive

Perusahaan mengangkat Triana Aria Rini sebagai Chief Audit Executive berdasarkan KptsP-049/ C0000/2017-S22 yang menjabat hingga 01 Desember 2017 – sekarang

Head of Internal Audit Unit Profile

The Company appointed Triana Aria Rini as Head of Internal Audit according to Decree KptsP-049/C0000/2017-S22 which has been serving since December 01, 2017 – now.



TRIANA ARIA RINI
Chief Audit Executive

Berusia 53 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, Indonesia, Lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1968.

53 years old, Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, Indonesia, Born in Jakarta on January 23, 1968. She earned Bachelor



Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof Dr Mustopo pada tahun 1996. Menjabat sebagai *Head of Internal Audit* sejak tanggal 1 Desember 2017 berdasarkan keputusan Direksi No. KptsP-049/C0000/2017-S2 tanggal 27 November 2017.

Memulai karir di Pertamina Trans Kontinental sejak tahun 1990 dengan jabatan penting yang pernah diemban adalah *Manager Region Tanjung Priok* periode 2011- 2013, pernah ditunjuk sebagai Direktur PT Peteka Karya Gapura periode 2013-2016 dan VP Operation periode 2016-2017.

Jumlah dan Kualifikasi Auditor Internal

Hingga akhir Desember 2021, jumlah personil Internal audit sebanyak 6 orang. Unit Internal audit dipimpin seorang Head of Internal Audit yang bertanggung jawab atas akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Internal audit.

of Economics in Management from the Universitas Prof. Dr. Mustopo in 1996. Served as Head of Internal Audit since December 1, 2017 based on Directors' decision No. KptsP-049/C0000/2017-S2 on November 27, 2017.

She started her career at Pertamina Trans Kontinental since 1990 and assigned in several key positions, such as an Tanjung Priok Branch Manager in the 2011-2013 period, appointed as Director of PT Peteka Karya Gapura for 2013-2016 period and VP Operation for the 2016 – 2017 period.

Total and Qualification of Internal Auditor

As end of December 2021, there were 11 Internal Audit personnel. The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit who is responsible for the accountability of carrying out the duties and authority of the Internal Audit.

Komposisi Fungsi Internal Audit Per 31 Desember 2021

Composition of the Internal Audit Function as of December 31, 2021

Jabatan Jabatan	Jumlah Personel Jumlah Personel
Chief Audit Executive	1 Orang
Manager Operation & Fleet Management IA	1 Orang
Manager Bus. Plan, Commercial & Bus. Support IA	1 Orang
Senior Auditor	1 Orang
Auditor	2 Orang
Analyst Audit Planning & Monitoring	1 Orang
Junior Auditor	1 Orang
Jumlah	8 Orang

Kualifikasi Audit Internal

Jumlah personel Internal Audit per 31 Desember 2021 adalah 8 (delapan) orang Auditor ditambah 1 (satu) orang sekretaris. Internal Audit dipimpin seorang Chief

Internal Audit Qualifications

The Internal Audit personnel as of December 31, 2021 consisted of 8 (eight) Auditors and 1 (one) secretary. Internal Audit and led by a Head of Internal Audit who was responsible

Audit Executive yang bertanggung jawab atas akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Internal audit. Setiap Auditor Internal wajib memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan Perusahaan.

Internal auditor membutuhkan kemampuan yang spesifik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu parameter yang menjadi tolak ukur kemampuan dan keahlian auditor adalah pengalaman baik dari segi operasional, bisnis, dan pendukung lainnya. Selain pengalaman dan strata pendidikan, sertifikasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keahlian auditor internal. Berikut adalah sertifikasi profesi yang telah diperoleh oleh internal auditor kami:

for accountability in carrying out the duties and authority of the Internal Audit. Every Internal Auditor must fulfill the qualification requirements set by the Company.

Internal auditors require specific abilities to carryout their duties and responsibilities. One parameter that measures the ability and expertise of auditors is experience from operational, business and others supporting aspects. In addition to experience and education strata, certification also becomes an important factor in increasing the expertise of internal auditors. The professional certifications that have been obtained by our internal auditors are as follows:

Sertifikasi Profesi Internal Auditor

Internal Auditor Professional Certification

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Triana Aria Rini	Chief Audit Executive	QIA, CRA, CRP
Dandy Damba Satria	Manager Operation & Fleet Management IA	QIA, CFE
Ginik Windaryati	Manager Bus. Plan, Commercial & Bus. Support IA	QIA, CRMP
Arip Maulana	Senior Auditor	QIA
Fajar Nugroho	Auditor	QIA
Arlidyasari	Auditor	QIA
Almira Mahsa	Junior Auditor	Audit Tingkat Dasar
Arini Putri Setoaty	Analyst Audit Planning & Monitoring	QIA

Pengembangan Kompetensi

Selain sertifikasi, keikutsertaan dalam seminar/*training*/konferensi profesi baik di dalam dan luar negeri, magang dan pembekalan terhadap perkembangan organisasi dan bisnis PTK maupun pembekalan terhadap pemahaman industri, juga diberikan secara rutin setiap tahun kepada pekerja AI melalui program *refreshing* auditor. Selama tahun 2021 telah dilakukan program peningkatan pendidikan berkelanjutan, sebagai berikut:

Competency Development

In addition to certification, participation in seminars/*training*/professional conferences both at home and abroad, internships and briefings on the development of the PTK organization and business as well as briefing on industry understanding, are also given regularly every year to AI employees through an auditor *refreshing* program. During 2021 a continuous education improvement program was carried out, as follows:



Pelatihan Auditor Internal

Internal Auditor Training

Peserta Participant	Nama Pelatihan Name of Training	Waktu / Tanggal Time/Date	Penyelenggara Organizer
VP dan Manager di Fungsi Internal Audit/ VP and Manager in Internal Audit Function	Peningkatan Kompetensi Satuan Pengendalian Internal Auditor Dalam Mencegah Penyalahgunaan Aset dan Rekayasa Laporan Keuangan/ Improving the Competence of the Internal Auditor Control Unit in Meghan Misuse of Assets and Financial Statement Engineering	2 September 2021 September 2, 2021	Lembaga Pusat Studi Informasi (LPSI)

Piagam Audit Internal

Piagam internal audit (Audit Charter) yang mengatur struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik serta hubungan kerja dengan pihak terkait. Piagam internal audit telah disahkan yang tertuang dalam piagam internal audit antara Direksi dan Komisaris tanggal 31 Desember 2021.

Mekanisme & Prosedur Internal Audit

Mekanisme dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu sarana untuk memastikan pengelolaan Perusahaan telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip GCG dan prinsip korporasi yang sehat serta taat kepada peraturan perundang-undangan.

Selain Piagam Internal Audit, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Fungsi Internal Audit juga berpedoman pada Pedoman Internal Audit, Pedoman Investigasi dan Prosedur yang terdiri dari:

- No. Pdm-001/G0000/2013-S0 revisi ke 01 Perihal Pedoman Audit Khusus Mengenai Audit Kecurangan (Investigasi)
- No. Pdm-01/G00000/2017-S0 revisi ke 01 Perihal Pedoman Umum Internal Audit
- No. Psd-001/G0000/2017-S0 revisi ke 02 Perihal Prosedur Penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) & Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Internal Audit Charter

Internal audit charter (Audit Charter), which regulates structure and position, duties and responsibilities, authority, code of ethics and working relationships with related parties. The internal audit charter has been ratified as stated in the internal audit charter between the Board of Directors and the Board of Commissioners on December 31, 2021.

Internal Audit Mechanisms & Procedures

Internal control mechanisms and systems are one of the means to ensure that the Company's management is carried out in accordance with GCG principles and corporate principles that are sound and comply with laws and regulations.

Apart from the Internal Audit Charter, the Internal Audit Function is guided by the Internal Audit Guidelines, Investigation Guidelines and Procedures which consist of:

- No. Pdm-001/G0000/2013-S0 revision 01 Regarding Special Audit Guidelines concerning Fraud Audits (Investigation)
- No. Pdm-01/G000000/2017-S0 revision 01 concerning General Guidelines for Internal Audit
- Psd-001/G0000/2017-S0 (2nd Revision) Regarding the Preparation of an annual audit work program (PKAT) & Budget Work Plan

- d. No. Psd-002/G0000/2016-S0 revisi ke 01 Perihal Prosedur Penyusunan Surat Perintah (SP) dan Rencana Penugasan Audit (RPA)
- e. No. Psd-003/G0000/2018-S0 revisi ke 01 Perihal Prosedur Pelaksanaan dan Pelaporan Audit Operasional
- f. No. Psd-004/G0000/2016-S0 revisi ke 01 Perihal Prosedur Audit Khusus Mengenai Audit Kecurangan (Investigasi)
- g. No. Psd-005/G0000/2016-S0 revisi ke 01 Perihal Prosedur Pemberian Jasa Konsultasi
- h. No. Psd-006/G0000/2016-S0 revisi ke 01 Perihal Prosedur Pembinaan Kompetensi Profesi Internal Audit
- i. No. Psd-007/G0000/2018-S0 revisi ke 0 Perihal Prosedur Monitoring Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA)
- j. No. Psd-008/G0000/2018-S0 revisi ke 0 Perihal Prosedur Pemberian Data dan Peminjaman Dokumen Kepada Auditor Eksternal (KAP)
- k. No. Psd-009/G0000/2018-S0 revisi ke 0 Perihal Prosedur Cash Opname
- l. No. IK-001/G0000/2016-S0 revisi ke 01 Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Audit
- b. Psd-002/G0000/2016-S0 (Revision 0) Concerning the Preparation of Warrants (SP) and Plans
- e. Psd-003/G0000/2018-S0 (2nd Revision) Regarding Operational Audit Implementation & Reporting
- f. Psd-004/G0000/2016-S0 (Revision 0) Regarding Special Audit Regarding Fraud Audits (Investigation)
- g. Psd-005/G0000/2016-S0 (Revision 0) Concerning Providing Consulting Services
- h. Psd-006/G0000/2016-S0 (Revision 0) Regarding Internal Audit Professional Competency Development
- i. Psd-007/G0000/2018-S0 (Revision 0) regarding Monitoring Follow-up on Audit Reports (LHA)
- j. Psd-008/G0000/2018-S0 (Revision 0) regarding Providing Data and Lending Documents to External Auditors (KAP)
- k. Psd-009/G0000/2018-S0 (Revision 0) regarding Cash Opname
- l. No. IK-001/G0000/2016-S0 revision 01 Follow-up Report concerning Audit Findings Settlement

Realisasi Audit

Fungsi Internal Audit telah melaksanakan seluruh Annual Audit Plan (AAP) yang direncanakan di tahun 2021 sesuai proses bisnis perusahaan sebagai berikut:

Pelaksanaan Tugas Internal Audit Tahun 2021 Implementation of Internal Audit Duties in 2021

Annual Audit Plan (AAP)	Rencana Plan	Realisasi Realization
Audit atas kegiatan repair & docking kapal milik PTK	Januari-April 2021	Januari-April 2021
Audit atas pengelolaan piutang PTK	Januari-April 2021	Januari-April 2021
Audit atas PSTB (PTK Shorebase Tanjung Batu)	April-Juni 2021	April-Juni 2021
Audit atas bunker kapal milik PTK	Juni-Sept 2021	Juni-Oktober 2021
Audit atas proses pengadaan spare part kapal	Juni-Agustus 2021	Juni-Oktober 2021
Audit atas proses kontrak bisnis	Oktober-November 2021	Oktober 2021-Januari 2022
Audit atas PT Peteka Karya Samudera (PKS)	Oktober-November 2021	Oktober 2021-Desember 2021

Audit Realization

The Internal Audit function has implemented the entire Annual Audit Plan (AAP) planned for 2021 according to the company's business processes as follows:



Hasil Temuan Audit Internal 2021

Posisi tindak lanjut temuan per 31 Desember 2021, baik temuan Internal Auditor maupun Eksternal Auditor, dengan posisi sebagai berikut:

Hasil dan Tindak Lanjut Temuan

Results and Follow-up on Findings

Annual Audit Plan (AAP)		Jumlah Rekomendasi Total Recommendation	Selesai Completed	Proses Process
Keagenan <i>Charter</i> Milik Pertamina	Pertamina's Chartered Agency	1	1	0
Kegiatan Investasi Periode 2019	Investment Activities for the 2019 Period	7	7	0
Kegiatan Investasi Periode 2020	Investment Activities for the 2020 Period	9	9	0
Pengelolaan Piutang PTK	PTK Receivable Management	10	10	0
Kegiatan Repair & Docking Kapal Milik	Owned Ship Repair & Docking Activities	10	10	0
Project PSTB	PSTB Project	5	5	0
Pengadaan Spare Part kapal	Procurement of ship spare parts	17	8	9
Bunker	Bunker	10	5	5
Kegiatan Operasional Bisnis PKS	MCC Business Operational Activities	22	0	22
Jumlah	Amount	91	55	36

Audit Khusus di Luar Rencana Kerja

Sepanjang Tahun 2021, Internal Audit tidak melaksanakan audit khusus sebagai penugasan yang diberikan di luar Program Kerja Audit Tahunan 2021.

Penyimpangan Internal

Tidak ada penyimpangan internal di tahun 2021

Rencana Kerja Tahun 2022

Unit Audit Internal telah menyusun rencana kerja kedepan. Berikut adalah rencana tugas objek audit yang akan dilakukan oleh Unit Internal Audit pada tahun 2022:

2021 Internal Audit Findings

Position of follow-up on findings as of December 31, 2021, both findings of the Internal Auditor and External Auditor, with the following positions:

Special Audit Outside the Work Plan

Throughout 2021, Internal Audit did not carry out a special audit as an assignment that was given outside the 2021 Annual Audit Work Program.

Internal Deviations

No internal deviation in 2021.

Work Plan for 2022

The Internal Audit Unit has prepared a future work plan. The following is the audit object task plan that will be carried out by the Internal Audit Unit in 2022:

Rencana Kerja Tahun 2022

Internal Audit Task Plan for 2022

Annual Audit Plan (AAP)		Rencana Plann
Audit atas Pengadaan/ Pembangunan Kapal Baru	Audit on New Ship Procurement/ Construction	Feb – Juni 2022
Konsultasi Formal – Pendampingan Pembangunan Kapal Baru (Harbour Tug)	Formal Consultation – New Ship Development Assistance (Harbour Tug)	Feb – Juni 2022
Audit atas Pengelolaan Keagenan Kapal	Audit on Ship Agency Management	Juni – Sept 2022
Audit atas Charter Kapal Milik	Audit of Owned Vessel Charter	Juni – Sept 2022
Audit atas Proses Bisnis PKG	Audit of PKG Business Process	Sept – Nov 2022

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal

IA menjalankan fungsinya sebagai pendamping auditor eksternal dengan memberikan dukungan kepada auditor eksternal, menjembatani antara auditor dengan *auditee* dan melakukan pembahasan temuan auditor dengan *auditee*.

Monitoring of Follow-up to External Audit Results

IA performs its function as a companion to the external auditor by providing support to the external auditor, bridging the auditor and the auditee and discussing the auditor's findings with the auditee.

Pemantauan Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan RUPS

IA juga memantau tindak lanjut atas Keputusan dan Arahan RUPS 2021 secara berkala dan dilaporkan kepada Pemegang Saham. Berikut rincian tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2021:

Monitoring of the Follow-up of Resolutions and Direction of the GMS

IA also monitors the follow-up to the 2020 GMS Resolutions and Direction on a regular basis and reports it to the Shareholders. The following is the progress of completing the follow-up to as of December 31, 2021:

Pemantauan Tindak Lanjut Keputusan dan Arahan RUPS

Monitoring of the Follow-up of Resolutions and Direction of the GMS

RUPS GMS	Jumlah Keputusan dan Arahan Total Resolution and Directives	Persentase Selesai Ditindaklanjuti Percentage of Completed Followed Up
RUPS RKAP 2021	6 Keputusan/ Resolutions	100%
RUPS RKAP 2020	6 Keputusan/ Resolutions	100%
RUPS RKAP 2019	6 Keputusan/ Resolutions	100%
RUPS RKAP 2018	6 Keputusan/ Resolutions	100%
RUPS RKAP 2017	4 Keputusan/ Resolutions	100%



Audit Eksternal

External Audit

Akuntan publik adalah organ eksternal perusahaan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Public accountant is an external organ of the company whose function is to provide opinions regarding the suitability of the presentation of the company's financial statements to the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.

Auditor eksternal merupakan badan independen yang telah memenuhi persyaratan dalam melakukan audit umum dan memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

External auditor is an independent body that has fulfilled the requirements in conducting general audits and provides opinions related to the suitability of the presentation of the company's financial statements with the prevailing Financial Accounting Standards (SAK).

Audit eksternal dilakukan sebagai fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan perusahaan. Untuk menjamin independensi hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat perusahaan. Sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina International Shipping yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN), audit eksternal melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu ada Kantor Akuntan Publik (KAP).

External audit is carried out as an independent supervisory function of the company's financial aspects. To guarantee the independence of the audit results, the appointed external auditor may not have a conflict of interest with every executive level. As a subsidiary of PT Pertamina (Persero), a state-owned enterprise (BUMN), the external audit also involves the Supreme Audit Board (BPK). In addition, the audit is also conducted by the Public Accounting Firm (KAP).

Audit Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Tidak terdapat audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2021

External Audit by The Audit Board

There is no audit conducted by the Supreme Audit Board in 2021

Penunjukan Akuntan Publik

Sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik

Appointment of Public Accountant

In accordance with the prevailing laws and regulations, the Company through Public Accounting Firm (KAP) performs an audit to the

(KAP) untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan yang terkait kewajaran, semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mekanisme dan proses pemilihan KAP dilaksanakan Perusahaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers).

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan, yang diaudit terhadap Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar. Dari hasil audit yang dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, Kantor Akuntan Publik memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 khususnya pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut.

financial statements related to fairness in all material aspects, financial position, business results, changes in equity and cash flows, as per the generally accepted accounting principles in Indonesia. Mechanism and selection process of Public Accounting Firm (KAP) are carried out by the Company in accordance with the prevailing provisions and regulations.

Public Accounting Firm Appointment Mechanism

Public Accounting Firm Appointment Mechanism refers the Resolutions of Annual GMS for Fiscal Year 2019, the Shareholders delegated authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers).

The Public Accounting Firm is responsible for conveying an opinion to the Company's compliance on the Financial Statements, which is audited based on the generally accepted Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the prepared reports present financial position and fair business results. Of the audit findings on the Financial Statements of Fiscal Year 2021, Public Accounting Firm (KAP) declared opinion "Unqualified in all material aspects, financial position, as per the Statement of Financial Accounting Standards in Indonesia".

Stipulation of Public Accounting Firm (KAP) as an External Auditor has aligned with Minister of Finance Regulation Number 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 especially Article 3 verse 1, stating that the provision of general audit service to the financial statements of an entity is performed by Public Accounting Firm (KAP) at the most six fiscal years consecutively.



Berikut adalah informasi pihak yang melakukan audit keuangan Perusahaan dalam enam tahun terakhir:

Information about the party who performed the Company's financial audit within the last six years is as follows:

Akuntan Publik PTK 2015–2021
PTK Public Accountant 2015–2021

Tahun year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Nama Akuntan Name of Accountant	Opini Opinion	Profesional Fee Professional Fee
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)	Daniel Kohar	Wajar Fair	
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)	Daniel Kohar	Wajar Fair	Rp606 juta/ million
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)	Daniel Kohar	Wajar Fair	Rp598 juta/ million
2018	Purwantono, Sungkono & Surja (Ernst & Young)	Said Amru	Wajar Fair	Rp566 juta/ million
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)	Daniel Kohar	Wajar Fair	Rp570 juta/ million
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)	Tanudiredja, Wibisana, Yusron	Wajar Fair	Rp591 juta/ million
2015	Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo dan Rekan (Crowe Horwath)	Nunu Nurdyaman	Wajar Fair	Rp475 juta/ million

Biaya Audit dan Jasa Lain yang Dilakukan Kantor Akuntan Publik

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PTK tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah Rp606 juta yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, dan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan. Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Selama tahun 2021 KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)

Audit Fee and Other Services Provided by Public Accounting Firm

Total fee for General Audit of PTK's Financial Statements for fiscal year ended on December 31, 2021 amounted to Rp606 million which include audit on the Balance Sheet, Statement of Profit/Loss, Statement of Changes in Equity, as well as Statement of Cash Flows for fiscal year ended on that date, and to state an opinion on the fairness in presenting the financial position, business results, changes in equity, and cash flows of the Company. The audit was conducted based on the auditing standards stipulated by Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and Public Accountant Professional Standards (SPAP).

In 2021, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) did not

tidak memberikan jasa lain kepada PTK selain jasa audit. Dengan demikian pelaksanaan proses audit berjalan independen dan tidak terdapat benturan kepentingan.

Tindak Lanjut Temuan Audit KAP

Tidak lanjut temuan audit KAP senantiasa dimonitoring untuk memastikan bahwa seluruh temuan tersebut telah terealisasi seluruhnya dan memberikan nilai tambah bagi PTK. Pada tahun 2021 tidak terdapat temuan atas audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021

Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

Komite Audit berkoordinasi dengan Internal Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan bahwa seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja, baik dari segi keuangan maupun operasional. PTK berupaya menindaklanjuti setiap temuan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga secara efektif mampu menekan temuan-temuan ditahun berikutnya.

Efektivitas dan Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik Eksternal dan Direksi

Efektivitas dan Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik Eksternal dan Direksi Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan regular dalam bentuk: rapat koordinasi pada saat *opening meeting* dan *exit meeting* penyampaian hasil audit serta pola komunikasi pada saat proses audit berlangsung.

perform other services to PTK aside from audit service. Thus, the implementation of audit was accomplished independently and did not have conflict of interest.

PAF Finding's Follow Up

Furthermore, PAF audit findings are constantly monitored to ensure that all of these findings have been fully realized and provide added value for the PTK. In 2021, there were no findings on the audit of the 2021 Fiscal Year Financial Statements

Effectiveness Audit Activity by the Public Accountant

The Audit Committee coordinates with Internal Audit to review effectiveness of the external audits implementation to ensure that all findings can be followed up according to the assigned authority and improve performance, both from financial and operational perspective. PTK strives to follow up any audit findings by the Public Accounting Firm, so that they can effectively suppress the findings in the coming year.

Effectiveness & Frequency by External Public Accountants and Board of Directors

Effectiveness and Frequency of Communication of External Public Accountants and Board of Directors During the audit activity conducted by the Public Accountant, communication and cooperation between the Public Accountant and the Board of Directors is carried out intensively and regularly in form of: coordination meetings during the kick-off and exit meetings, submission of audit results and communication activity at during the audit process.



Manajemen Risiko

Risk Management

Perusahaan menyadari bahwa tuntutan dalam menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh dan efektif semakin meningkat, seiring tantangan Perusahaan yang semakin tinggi dalam menghadapi ketidakpastian yang timbul untuk pencapaian tujuan Perusahaan.

The Company realizes that the demands for implementing risk management in a comprehensive and effective manner are increasing, in line with the Company's increasing challenges in facing the uncertainties that arise for the achievement of the Company's objectives.

Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis/mengevaluasi, mengelola dan mengkaji ulang risiko perusahaan secara efektif agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dampak risiko seminimal mungkin. Penerapan manajemen risiko pada perusahaan guna menghindari atau meminimalkan potensi kerugian (*potential loss*); mengoptimalkan peluang (*opportunity*); mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif; meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham; meningkatkan tata kelola yang sehat; mengantisipasi perubahan lingkungan yang pesat; serta mengintegrasikan korporat.

Manajemen risiko yang diterapkan mencakup pada risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas usaha. Risiko utama yang dihadapi timbul dari instrumen operasional, seperti kegiatan tertundanya penyelesaian pembangunan kapal, tidak tercapainya target penjualan (*commercial days*) kapal milik, kecelakaan kerja, kebakaran, dan ledakan pada kapal milik dan tidak tercapainya target *commission days*. Sedangkan risiko lainnya adalah risiko keuangan yang terdiri dari tingginya angka piutang.

Risk management is an initiative to identify, analyze/evaluate, manage, and review the Company's risks effectively so that the established company goals can be achieved with minimal risk impact. Implementation of risk management in companies to avoid or minimize potential losses; optimize opportunities; maintain a conducive work environment; increase shareholder value; improve healthy governance; anticipating rapid environmental changes; and integrating corporates.

The risk management implemented includes risks faced in performing the business activities. The main risks faced arise from operational instruments, such as delayed completion of vessels construction activities, non-achievement of sales targets (commercial days) of owned vessels, work accidents, fires, and explosions on owned vessels and non-achievement of commission days targets. Meanwhile, the other risk is financial risk which consists of high number of receivables.

Fungsi utama dari manajemen risiko yang dijalankan Perusahaan adalah mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan tata cara Perseroan. Secara rutin, Perusahaan menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan dinamika bisnis Perseroan dan praktik pasar terbaik.

Kebijakan Manajemen Risiko

Dasar pelaksanaan atau pengelolaan risiko perusahaan tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko PT Pertamina International Shipping No.A4-001/H30000/2021-S9 revisi ke-0 tanggal 26 Juli 2021 yang telah diratifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental No. Kpts-1343/PTK0000/2021-S0 tentang Ratifikasi Pedoman Manajemen Risiko PT Pertamina International Shipping dan Tata Kerja Organisasi Manajemen Risiko *Ongoing Business* No. B-008/10000/2020-S0 revisi ke-0 tanggal 19 Maret 2020. Pedoman manajemen risiko senantiasa ditinjau dan diperbaharui secara berkala.

Pedoman berlaku untuk aktivitas atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dan menjadi acuan Anak Perusahaan. Pedoman ini mencakup antara lain:

1. Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Tugas & Tanggung Jawab Fungsi terkait;
3. Prinsip Manajemen Risiko;
4. Kerangka Manajemen Risiko;
5. Proses Manajemen Risiko;
6. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko

PTK memiliki Traktat Manajemen Risiko yang ditandatangani Direksi tanggal 30 Maret 2022. Traktat Manajemen Risiko merupakan

The main functions of risk management performed by the Company are to identify all key risks, measure these risks and manage the risks position as per the Company's policies and procedures. The Company routinely analyzes the risk management policy and system to align with the Company's business dynamics and best market practices.

Risk Management Policy

The basis for implementing or managing company risk is stated in the PT Pertamina (Persero) Risk Management Guidelines No. A4-001/H30000/21-S9 0th revision dated 26 July 2021 which has been ratified in accordance with the Decree of the President Director of PT Pertamina Trans Kontinental No. Kpts-1343/PTK0000/2021-S0 concerning Ratification of PT Pertamina (Persero) Risk Management Guidelines and Ongoing Business Risk Management Organization Work Procedures No. B-008/10000/2020-S0 revision-0 dated March 19, 2020. Risk management guidelines are reviewed and updated regularly.

The guidelines apply to activities or business activities related to the interests of the Company and become a reference for Subsidiaries. These guidelines include, among others:

1. Risk Management Policy;
2. Duties & Responsibilities of related Functions;
3. Principles of Risk Management;
4. Risk Management Framework;
5. Risk Management Process;
6. Implementation of Risk Management Policy

PTK has Risk Management Tract signed by the Board of Directors on November 5, 2019. This Risk Management Tract constitutes a



pengembangan prinsip-prinsip manajemen risiko yang tertera dalam Pedoman Manajemen Risiko. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Direksi PTK terhadap penerapan sistem manajemen risiko berbasis integrasi korporasi yang juga dikenal dengan *Enterprise Risk Management* (ERM) di PTK, serta sebagai landasan bagi seluruh jajaran Perusahaan.

Struktur dan Sistem Pengelolaan Risiko

Struktur manajemen risiko PTK berawal dari pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan Risiko Usaha (IRU) serta Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Selain itu, perusahaan juga memiliki fungsi pendukung untuk menerapkan pengelolaan risiko antara lain fungsi Budgeting & Management Analysis, manajemen risiko fungsi, serta manajemen risiko Anak Perusahaan.

development of Risk Management principles stated in the Risk Management Manual, a form of commitment of PTK's Board of Directors toward the implementation of risk management system based on corporation integration (*Enterprise-wide Risk Management/ERM*) at PTK, as well as a foundation for all levels in the Company.

Risk Management Structure and System

Risk management structure in PTK is started from the active supervision of the Board of Commissioners through the Investment and Business Risk Committee (IRU) and the Board of Directors through the Risk Management Committee. In addition, the company also has supporting functions to implement risk management, including the Strategic Planning Business Development (SPBD) function, Risk Management Function, and Risk Management of Subsidiaries.

Struktur Manajemen Risiko Risk Management Structure

Nama Name	Keterangan Description
Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Committee	Komite Investasi dan Risiko Usaha merupakan komite dibawah Dewan Komisaris yang bertujuan untuk mendukung fungsi pengawasan serta memberikan nasihat dan rekomendasi terhadap risiko usaha. The Business Risk and Investment Committee is a committee under the Board of Commissioners that aims to support the supervisory function and provide advice and recommendations on business risks.
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Dewan Direksi (BoD) dalam rangka menangani hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko di Perusahaan. The Risk Management Committee is a committee consisting of a Board of Directors (BoD) in order to handle matters relating to Risk Management in the Company.
Chief Risk Officer (CRO)	Merupakan pejabat setingkat Direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko Korporat/Subholding/Anak Perusahaan He is a Director-level official in charge of the Corporate/Subholding/Subsidiary Risk Management Function

Struktur Manajemen Risiko

Risk Management Structure

Nama Name	Keterangan Description
Budgeting & Management Analysis	Merupakan unit yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi Perseroan sebagai manajemen risiko Perusahaan, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing Direktorat dan fungsi leher. It is a unit that is given the authority and responsibility by the Company's Board of Directors as the Company's risk management unit, to coordinate the implementation of risk management in each Directorate and neck function.
Manajemen Risiko Fungsi Risk Management Function	Merupakan PIC Manajemen Risiko Fungsi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi melalui pejabat tertinggi pada satu fungsi (satuan kerja) terkait untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing fungsi. A PIC for Risk Management Function that is delegated the authority and responsibility by the Board of Directors through the highest official in a function (work unit) related to coordinating implementation of risk management in each function.
Manajemen Risiko Anak Perusahaan Subsidiary Risk Management	Merupakan fungsi manajemen risiko anak perusahaan PT Pertamina Trans Kontinental yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direktur Anak Perusahaan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing Anak Perusahaan PT Pertamina Trans Kontinental. A risk management function in Pertamina Trans Kontinental's subsidiary that is delegated authority and the responsibility by the Director of subsidiaries to coordinate the implementation of risk management in each of Pertamina Trans Kontinental's subsidiary.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara terintegrasi dikelola oleh Fungsi Budgeting & Management Analysis yang disupervisi Direktur Keuangan dan SDM. Secara spesifik pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab dari *Assistant Manager Risk Management*.

Pengelola Manajemen Risiko

Fungsi Budgeting & Management Analysis dikelola oleh pimpinan tertinggi fungsi dengan jabatan Manager dan terbagi atas 2 sub-fungsi yang terdiri dari *Budgeting & Reporting* dan *Risk Management*.

Risk Management Work Unit

The integrated risk management function is managed by the Strategic Planning Business Development (SPBD) supervised by the President Director and HR. Specifically risk management is the responsibility of Assistant Manager Risk & Subsidiary Management.

Risk Management Manager

The Budgeting & Management Analysis function is managed by the highest leadership function with the position of Manager and is divided into 2 sub-functions consisting of Budgeting & Reporting and Risk Management.



Strategi Penerapan Manajemen Risiko

Strategi penerapan manajemen risiko yang diterapkan perusahaan mencakup:

1. Penetapan Batas Toleransi Risiko,
2. Penyusunan *Risk Profile* termasuk di dalamnya pembuatan skala prioritas dan penetapan rencana *Risk Treatment* (Penanganan Risiko),
3. Pemantauan dan pelaporan pengelolaan risiko.
4. Pengembangan budaya risiko,
5. Penyediaan infrastruktur Manajemen Risiko.

Mekanisme Manajemen Risiko

Dalam rangka membangun kapabilitas pengelolaan risiko pada proses bisnis, Perusahaan menggunakan pendekatan 3LOD (*Three lines of defence*), dengan menerapkan mekanisme pertahanan secara berlapis dalam mengelola risiko.

Lini pertahanan yang pertama terletak pada setiap fungsi sebagai *Risk Owner*. Lini pertahanan kedua adalah pada unit manajemen risiko dan lini pertahanan ketiga berada pada fungsi Internal Audit. Berikut merupakan gambar penerapan konsep 3LOD :

Risk Management Implementation Strategies

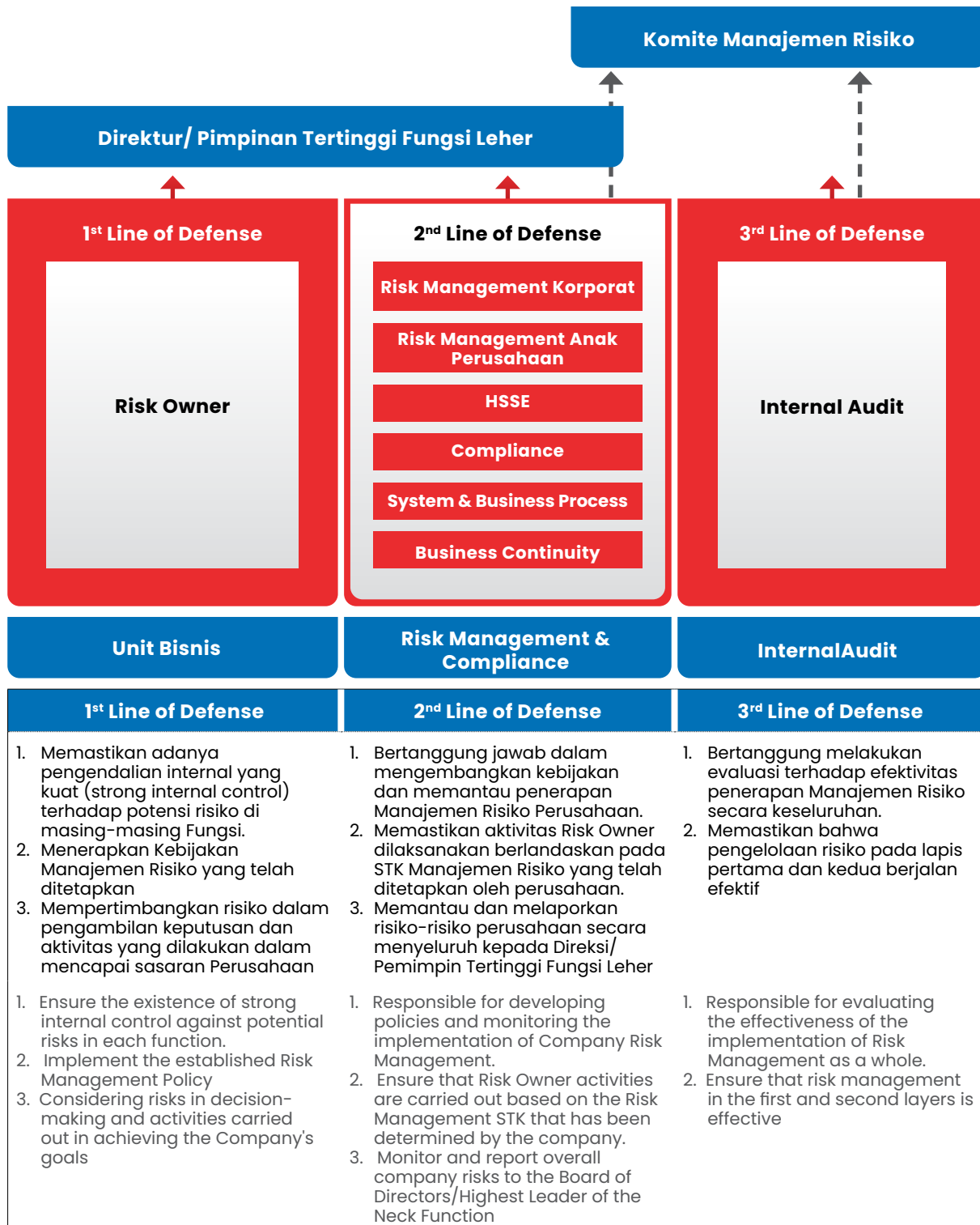
Strategies of the risk management implementation cover:

1. Stipulation of Risk Tolerance Limits,
2. The preparation of the Risk Profile includes the creation of a priority scale and the establishment of a Risk Treatment plan.
3. Risk management monitoring and reporting,
4. Risk culture development,
5. Provision of Risk Management infrastructure.

Risk Management Mechanism

In order to build risk management capabilities in business processes, the Company uses a 3LOD (*Three lines of defence*) approach, by implementing defense mechanisms in layers to manage risk.

The first line of defense lies in every function as a Risk Owner. The second line of defense is the risk management unit and the third line of defense is the Internal Audit function. The following is a picture of the application of the 3LOD concept:



Proses manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Perusahaan pada setiap kegiatan dan atau transaksi usaha, baik itu aktivitas *ongoing business* ataupun aktivitas investasi. Aktivitas *ongoing business* merupakan serangkaian kegiatan PTK yang telah berjalan secara rutin sesuai dengan proses bisnis Perusahaan berdasarkan prinsip kelangsungan usaha. Sedangkan aktivitas investasi adalah serangkaian kegiatan penggunaan sumber daya dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan. Proses manajemen risiko *Ongoing Business* maupun Investasi sesuai aktifitas usaha PTK yaitu :

1. *Scope, Context & Criteria* (Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria)
2. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko)
3. *Risk Treatment* (Penanganan Risiko)
4. *Communication & Consultation* (Komunikasi dan Konsultasi)
5. *Monitoring & Review* (Pemantauan dan Tinjauan)
6. *Recording & Reporting* (Pencatatan dan Pelaporan)

Hubungan Kerja dengan Komite Investasi dan Risiko Usaha

Secara aktif, Fungsi BMA melakukan komunikasi dan pertemuan (rapat) dengan Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Perusahaan berupaya meningkatkan kompetensi serta sertifikasi profesional di bidang Manajemen Risiko guna meningkatkan pengembangan budaya sadar risiko (*risk consciousness*) dan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*). Kegiatan pelatihan terkait manajemen risiko yang dilaksanakan tahun 2022 diantaranya:

Proses manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Perusahaan pada setiap kegiatan dan atau transaksi usaha, baik itu aktivitas *ongoing business* ataupun aktivitas investasi. Aktivitas *ongoing business* merupakan serangkaian kegiatan PTK yang telah berjalan secara rutin sesuai dengan proses bisnis Perusahaan berdasarkan prinsip kelangsungan usaha. Sedangkan aktivitas investasi adalah serangkaian kegiatan penggunaan sumber daya dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan. Proses manajemen risiko *Ongoing Business* maupun Investasi sesuai aktifitas usaha PTK yaitu :

1. *Scope, Context & Criteria*
2. *Risk Assessment*
3. *Risk Treatment*
- d. *Communication & Consultation*
5. *Monitoring & Review*
6. *Recording & Reporting*

Work Relationship with Investment and Business Risk Committee

The SPBD Function actively performs communication and meetings with Investment and Business Risk Committee.

Risk Management Competency Development

The Company strives to develop improve and professional certification in the field of Risk Management in order to improve the development of a risk awareness culture and knowledge sharing. Training activities related to risk management carried out in 2022 are as follows:

Pelatihan Terkait Manajemen Risiko tahun 2022

Training activities related to risk management realized in 2022

Peserta Participant	Tema Pelatihan Theme of Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
PIC Risk Management PTK Group dan Fungsi ERM Pertamina (Persero) PIC of Risk Management PTK Group and Pertamina (Persero) ERM Function	<i>Executive Briefing & Upskilling Enterprise Risk Management 2022</i> <i>Executive Briefing & Upskilling Enterprise Risk Management 2022</i>	12 Januari/ January 2022	Risk Management PTK
PIC Risk Management PTK Group PIC of Risk Management PTK Group	<i>Implementasi Risk Management pada Pengembangan Usaha dan Bisnis, Case Study PT Jasa Marga (Persero) Tbk</i> <i>Implementation of Risk Management in Business and Business Development, Case Study of PT Jasa Marga (Persero) Tbk</i>	24 Februari/ February 2022	Fungsi ERM PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero) ERM Function
PIC Risk Management PTK Group PIC of Risk Management PTK Group	<i>Marine War Risk Insurance Coverage & The Impact Of Ukraine Situation</i>	07 Februari/ February 2022	Fungsi ERM PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero) ERM Function
PIC Risk Korporat	<i>Key In Risk Register Tahun 2022 ke ERMS 2.0</i>	28-29 Maret 2022	Fungsi ERM PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero) ERM Function
PIC Risk Korporat	<i>Training Awareness ISO BCMS Tahap II</i>	21 April 2022	Fungsi ERM PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero) ERM Function

Pada tahun 2022, direncanakan sebanyak 51 (lima puluh satu) PIC *Risk Management PTK Group* yang terdiri dari level manager dan pekerja PTK akan melakukan sertifikasi manajemen risiko CRP (*Certified Risk Professional*).

In 2022, it is planned that 51 (fifty one) PIC Risk Management PTK Group consisting of manager level and PTK workers will carry out risk management certification CRP (*Certified Risk Professional*).

Profil Risiko Perusahaan dan Mitigasi Risiko

Perusahaan melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang diklasifikasikan menjadi lima risiko: *Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk*, serta *Reporting Risk*. Berikut uraian terkait jenis dan mitigasi risiko:

Company Risk Profile and Risk Mitigation

The company manages risks which are classified into five risks: *Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk*, and *Reporting Risk*. The following is a description of the types and risk mitigation:



Mitigasi Risiko Perusahaan

Company Risk Mitigation

Jenis Risiko Type of Risk	OPERATIONAL RISK	
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu Tertundanya Penyelesaian Pembangunan Kapal, akibat: 1. Galangan tidak memiliki komitmen dalam memenuhi pembayaran equipment utama kapal 2. Kondisi financial (cashflow) galangan yang kurang baik; 3. Faktor status kredit DSCR (debt service coverage ratio) mencapai maksimum 4. Keterlambatan pengiriman equipment kapal sebagai dampak pandemik Covid-19; 5. Adanya pembatasan aktivitas jumlah pekerja di galangan. 6. Kondisi pandemik Covid-19 yang masih berlangsung	This risk is related to the risks that arise from the operational process, namely the Delayed Completion of Ship building, due to: 1. The shipyard does not have a commitment to fulfill the payment for the ship's main equipment 2. The financial condition (cashflow) of shipyards is not good; 3. The credit status factor DSCR (debt service coverage ratio) reaches the maximum 4. Delay in the delivery of ship equipment as a result of the Covid-19 pandemic; 5. There is a limitation on the number of workers in the shipyard. 6. Conditions of the ongoing Covid-19 pandemic
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 & 6.1 Usulan pengakhiran kontrak lebih awal; 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 & 6.2 Memenuhi kelengkapan administrasi pengakhiran sesuai kontrak dan pedoman investasi PTK	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 & 6.1 Proposal for early contract termination; 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 & 6.2 Fulfilling the completeness of termination administration according to the contract and PTK investment guidelines
Jenis Risiko Type of Risk	OPERATIONAL RISK	
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Risiko ini berkaitan dengan optimalisasi keuangan perusahaan yaitu Tidak tercapainya target penjualan (<i>commercial days</i>) kapal milik, akibat: Faktor Internal : 1. Harga yang belum fleksibel dan kompetitif karena perhitungan HPP menggunakan data historis 3 tahun terakhir, belum memperhatikan rencana biaya operasi tahun berjalan dan harga pasar yang berlaku 2. Gap Kompetensi SDM terkait Marketing dan Sales 3. SDM kurang memiliki akses ke informasi pasar karena terbatasnya data market intelligence yang dikelola oleh PTK 4. Masih minimnya chanel pemasaran dan belum maksimalnya pemasaran produk karena keterbatasan data market intelligence yang dikelola oleh PTK 5. Resource kapal masih terpusat di Sumatera, Jawa, Kalimantan sehingga memerlukan mobilisasi 6. Jumlah kuantitas kapal masih belum dapat mencukupi permintaan pasar 7. Kapal underperformed Faktor eksternal : 8. Fluktuasi pasar 9. Produk yang ditawarkan sangat sensitif terhadap perubahan pasar	This risk is related to the optimization of the company's finances, namely the failure to achieve the sales target (<i>commercial days</i>) of owned vessels, due to: Internal factors : 1. Prices are not yet flexible and competitive because HPP calculations use historical data for the last 3 years, not paying attention to the current year's operating cost plan and prevailing market prices 2. HR Competency Gap related to Marketing and Sales 3. HR lacks access to market information due to limited market intelligence data managed by PTK 4. There is still a lack of marketing channels and not optimal product marketing due to limited market intelligence data managed by PTK 5. Ship resources are still concentrated in Sumatera, Java, Kalimantan so they require mobilization 6. The number of ships still cannot meet market demand 7. Underperformed ship External factors: 8. Market fluctuation 9. The products offered are very sensitive to market changes

Mitigasi Risiko Perusahaan

Company Risk Mitigation

Mitigasi Risiko Risk Mitigation	1. a. Melakukan pricing strategy dan harga jual mengacu pada pergerakan harga komoditi yang terkait langsung dengan produk 1b. Melakukan evaluasi komponen biaya HPP bersama dengan Fungsi terkait 2. Melakukan identifikasi atas pemenuhan kompetensi pekerja dengan melakukan pelatihan/sharing knowledge dll sesuai dengan kebutuhan 3. a & 4.a Lebih aktif dalam melakukan marketing approach seperti courtesy visit untuk mendapatkan peluang pasar 3b & 4.b Pembuatan profiling customer 3c & 4.c Mengumpulkan dan memilah data terkait dengan potensi pekerjaan (e.g forum sinergi) untuk kemudian dipetakan pekerjaan yang bisa diambil oleh PTK Grup 4.d Penggunaan social media sebagai media promosi 5,6a, & 7b Berkoordinasi dengan Fungsi Fleet & Ship Management dan RCOS untuk melakukan repositioning kapal sesuai dengan spek dan performa kapal sehingga akses pasar lebih optimal 6.b inventarisir potential partner (Ship owner) beserta armadanya 7. Penanganan keluhan customer untuk penyelesaian dan tindak lanjut (penerimaan keluhan dan tindak lanjut keluhan) sesuai SLA 2 (dua) Hari Kalender 8. a & 9.a melakukan mekanisme forecasting harga komoditas yg terkait langsung dengan produk (AHTS à KKKS à crude) 8.b pengusulan hedging harga penawaran dan kontrak jangka Panjang 9.b melakukan studi/portofolio bisnis pemasaran kapal	1.a Conduct a pricing strategy and the selling price refers to commodity price movements that are directly related to the product 1.b Evaluating HPP cost components together with related Functions 2. Identify the fulfillment of worker competencies by conducting training/sharing knowledge, etc. according to needs 3.a & 4.a More active in conducting marketing approaches such as courtesy visits to get market opportunities 3b & 4.b Customer profiling 3c & 4.c Collecting and sorting data related to potential jobs (e.g. synergy forum) to then map the jobs that can be taken by the Group PTK 4.d Use of social media as promotional media 5,6a, & 7b Coordinate with the Fleet & Ship Management Function and RCOS to reposition ships according to ship specifications and performance so that market access is more optimal 6.b inventory of potential partners (Ship owner) and their fleet 7. Handling customer complaints for settlement and follow-up (receipt of complaints and follow-up on complaints) according to SLA 2 (two) Calendar Days 8.a & 9.a perform a commodity price forecasting mechanism that is directly related to the product (AHTS KKKS crude) 8.b proposal for bid price hedging and long-term contracts 9.b conduct a study/portfolio of ship marketing business
Jenis Risiko Type of Risk	OPERATIONAL RISK	
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu Kecelakaan kerja, kebakaran, dan ledakan pada kapal milik, akibat: Penyebab Langsung : 1. Terdapat <i>Substandard Act</i> dan <i>Substandard Condition</i> Penyebab dasar : 2. Adanya <i>Personal Factors</i> (<i>Safety Culture</i> belum baik) 3. Adanya <i>Job/System Factors</i> : a. Adanya <i>knowledge & skill</i> pekerja belum memenuhi GAP requirement b. <i>Inadequate Work Standard</i>	This risk relates to risks arising from operational processes, namely work accidents, fires, and explosions on owned ships, due to: Direct Cause: 1. There are Substandard Act and Substandard Condition Basic cause: 2. Adanya <i>Personal Factors</i> (<i>Safety Culture</i> belum baik) 3. The existence of Job/System Factors: a. The knowledge & skills of workers do not meet the GAP requirement b. Inadequate Work Standard



Mitigasi Risiko Perusahaan

Company Risk Mitigation

	Faktor Internal : 4. <i>Unsafe act : human error, at risk behaviour</i> 5. <i>Unsafe Condition :</i> a. kondisi sarfas / peralatan kerja rusak b. Perlengkapan <i>safety</i> tidak memenuhi standard (jumlah, <i>quality</i>, dll) Faktor Eksternal : 6. Faktor Lingkungan (Kondisi cuaca atau bencana alam lainnya) 7. Ketidakpatuhan terhadap Regulasi 8. Kinerja dan ketidakpatuhan HSSE di Pihak ketiga 9. Gangguan keamanan (huru hara dan terorisme) Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pelayaran dan galangan dalam negeri, dimana terdapat kebijakan PSBB dan <i>social distancing</i> *)	Internal factors : 4. <i>Unsafe act : human error, at risk behavior</i> 5. <i>Unsafe Conditions:</i> a. the condition of the infrastructure/work equipment is damaged b. Safety equipment does not meet standards (quantity, quality, etc.) External Factors: 6. Environmental Factors (Weather conditions or other natural disasters) 2. Non-compliance with Regulations 3. HSSE performance and non-compliance in third parties 4. Security disturbances (riots and terrorism) The impact of the COVID-19 pandemic on the shipping industry and domestic shipyards, where there are PSBB policies and <i>social distancing</i> *)
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	1.1 & 3.1 Memperbaiki substandard condition salah satunya dengan pengadaan APD yang memadai di kapal, diantaranya FRC (Fire retardant cloth) 1.2, 2 & 4 Mendorong perubahan budaya safety di PTK yang salah satunya dengan pengelolaan OBIT, mulai dari kampanye, pemantauan, analisa, dan evaluasi program 3.3. Pengisian jabatan vacant Manager dan usulan staff Officer dan TKJP 5. Fleet Owner dalam memenuhi rekomendasi hasil vetting perlu melakukan pengadaan perlengkapan safety di kapal 6. Tetap melanjutkan penyampaian laporan BMKG secara berkala (rutin) kepada crew kapal 7. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap regulasi dan monitoring atas tindak lanjutnya 8.1 & 9. Familiarisasi HSSE kepada pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan operasional di PTK 8.2 Implementasi program CSMS dalam siklus pengadaan barang/jasa	1.1 & 3.1 Improving substandard conditions, one of which is the procurement of adequate PPE on ships, including FRC (Fire retardant cloth) 1.2, 2 & 4 Encouraging changes in safety culture in PTK, one of which is the management of OBIT, starting from campaigns, monitoring, analysis, and program evaluation 3.3. Filling in the vacant manager position and suggestions of staff officers and TKJP 5. Fleet Owner in fulfilling the recommendation of vetting results, it is necessary to procure safety equipment on the ship 6. Continue to submit periodic (routine) BMKG reports to ship crews 7. Monitoring compliance with regulations and monitoring follow-ups 8.1 & 9. Familiarization of HSSE to third parties involved in operational activities in PTK 8.2 Implementation of the CSMS program in the goods/services procurement cycle
Jenis Risiko Type of Risk	FINANCIAL RISK	
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu Tingginya Angka Piutang, akibat: 1. Proses administrasi penyelesaian kontrak/ addendum kontrak dikarenakan faktor eksternal (kelengkapan dokumen kontrak dari <i>customer</i> maupun <i>owner</i> kapal) dan faktor internal (proses <i>review</i> dan <i>routing</i> kontrak lama) 2. Kurangnya koordinasi dengan customer baik <i>ICT group</i> maupun <i>3rd party</i> terkait penyelesaian <i>outstanding</i> piutang	This risk is related to the risks arising from the operational process, namely the High Accounts Receivable, due to: 1. The administrative process of contract settlement/contract addendum due to external factors (completeness of contract documents from customers and ship owners) and internal factors (review process and routing of old contracts) 2. Lack of coordination with customers, both <i>ICT group</i> and <i>3rd party</i> regarding the settlement of outstanding receivables

Mitigasi Risiko Perusahaan

Company Risk Mitigation

Mitigasi Risiko Risk Mitigation	1.1 Usulan advance payment untuk transaksi ICT 1.2 Revisi SLA di internal PTK sesuai dengan STO yang baru tentang batas waktu pengumpulan kelengkapan dokumen pendukung penagihan; 1.3 Penyederhanaan syarat-syarat penagihan di dalam kontrak yang ada 1.4 & 2.2 Melakukan konfirmasi angka piutang, <i>monitoring progress dunning letter</i> dan rekonsiliasi rutin saldo piutang 1.5, 2.3 Melakukan meeting koordinasi terkait dengan progres piutang dengan menetapkan target penyelesaian piutang di setiap wilayah 1.6 Melakukan upskilling PIC yang melakukan system penagihan 1.7 Penghapusan syarat dalam kontrak untuk coklit dilakukan 3 bulan, dan agar ada penggunaan <i>general term contract</i> yang baku 1.8 Pengembangan sistem ICONS (v2) dimana terdapat <i>early warning</i> / notifikasi kepada <i>user</i> dan fungsi Legal Counsel ketika kontrak akan berakhir; 1.9 & 2.4 Mengaktifkan tim PMO	1.1 Proposed advance payment for ICT transactions 1.2 Revision of the SLA in the internal PTK in accordance with the new STO regarding the deadline for collecting the complete collection of supporting documents for billing; 1.3 Simplification of billing terms in existing contracts 1.4 & 2.2 Confirming accounts receivable figures, monitoring progress of dunning letters and routine reconciliation of accounts receivable balances 1.5, 2.3 Conduct coordination meetings related to the progress of receivables by setting targets for settlement of receivables in each region 1.6 Upskilling the PIC that performs the billing system 1.7 Elimination of conditions in the contract for coklit is carried out for 3 months, and so that there is the use of a standard general term contract 1.8 Development of the ICONS system (v2) where there is an early warning/notification to users and the Legal Counsel function when the contract is about to expire; 1.9 & 2.4 Enabling PMO team
Jenis Risiko Type of Risk	OPERATIONAL RISK	
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu Tidak tercapainya target <i>commission days</i> , akibat: 1. <i>Maintenance planning & strategy</i> belum baik; 2. Kepatuhan untuk melakukan maintenance belum baik; 3. Terjadinya <i>emergency breakdown/unplanned maintenance</i>	This risk relates to risks arising from the operational process, namely the failure to achieve the target commission days, due to: 1. Maintenance planning & strategy is not good; 2. Compliance for maintenance is not good; 3. The occurrence of emergency breakdown/unplanned maintenance
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	1.1 Pengembangan lanjutan untuk system pemeliharaan yang terintegrasi dengan menggunakan <i>platform</i> mySAP modul <i>Plant Maintenance</i> di kapal milik PTK; 1.2 Pelaksanaan daily monitoring terhadap kondisi operasi peralatan kapal melalui aplikasi TCMS (<i>Transko Conditioned Monitoring System</i>); 1.3 Pengembangan kontrak payung untuk pengadaan barang & jasa lainnya diatas kapal (<i>mekanisme</i> pengadaan barang & jasa kapal dengan dockyard / kontrak payung otomatisasi sistem untuk pengadaan barang dan jasa kapal);	1.1 Further development of an integrated maintenance system using the mySAP platform, the Plant Maintenance module on PTK's vessels; 1.2 Implementation of daily monitoring of the operating conditions of ship equipment through the application of TCMS (Transko Conditioned Monitoring System); 1.3 Development of an umbrella contract for the procurement of other goods & services on board (a mechanism for the procurement of goods & services for ships with a dockyard/ system automation umbrella contract for the procurement of goods and services for ships);



Monitoring Realisasi Mitigasi Risiko Perusahaan Tahun 2022

Dari realisasi atas mitigasi risiko (tindak lanjut) terhadap 5 (lima) risiko korporat berbasis RKAP di tahun 2022, Perusahaan telah melakukan penanganan risiko dengan langkah-langkah sebagaimana yang terdapat dalam mitigasi tersebut diatas, yang dapat disimpulkan bahwa realisasi atas mitigasi risiko tersebut telah dilakukan dengan baik.

Monitoring risiko di tahun 2022 disusun dan dilakukan secara menyeluruh pada proses bisnis di setiap unit kerja melalui tahapan proses pemantauan (*monitoring*) risiko yang diikuti dengan proses komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan di tahun 2022, untuk memastikan efektifitas pelaksanaan atas mitigasi risiko (tindak lanjut) yang telah di susun oleh unit kerja telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan potensi risiko dapat diminimalisir dan dikendalikan.

Monitoring realisasi mitigasi risiko dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Direksi dan Dekom PTK melalui laporan manajemen serta dilaporkan kepada PT Pertamina International Shipping selaku Subholding Shipping dan PT Pertamina (Persero) melalui sistem ERMS.

PTK telah mempunyai kriteria mengenai batas tingkat risiko yang dapat diterima. Dengan adanya pembaruan daftar risiko perusahaan, maka dilakukan analisis/pengukuran ulang untuk menentukan prioritas pengelolaannya berdasarkan tingkat atau nilai risikonya. Daftar risiko yang teridentifikasi tersebut seluruhnya akan dikelola Perusahaan dengan mempertimbangkan rencana perlakuan

Monitoring on Enterprise Risk Mitigation Realization in 2022

Based on realization of risk mitigation (follow-up) for 5 (file) RKAP-based corporate risks in 2022, the Company has carried out risk management with steps as contained in the mitigation mentioned above, which can be concluded that the realization of the risk mitigation has been carried out properly.

Risk monitoring in 2022 is compiled and carried out comprehensively in business processes in each work unit through the stages of the risk monitoring process followed by continuous communication and coordination processes in 2022, to ensure the effectiveness of the implementation of risk mitigation (follow-up) that has been arranged by the work unit has been done well and in accordance with the predetermined plan, so it is expected that the potential risk can be minimized and controlled.

Monitoring of risk mitigation realization is carried out every month and reported to the Board of Directors and the PTK Board of Directors through management reports and reported to PT Pertamina International Shipping as Subholding Shipping and PT Pertamina (Persero) through the ERMS system.

PTK already has criteria regarding acceptable risk level limits. With the updating of the company's risk list, analysis/re-measurement is carried out to determine the priorities for management based on the level or value of risk. The list of identified risks will all be managed by the Company by considering the appropriate treatment plan. After implementing the treatment plan, it is

yang sesuai. Setelah diterapkannya rencana perlakuan diharapkan risiko Perusahaan akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelum dilakukan perlakuan tersebut.

Hasil analisis/pengukuran terhadap risiko yang teridentifikasi menunjukkan tingkat risiko setelah dilakukan pengendalian/pengelolaan adalah menurun. Untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima diperlukan upaya peningkatan pengendalian yang ada atau alternatif perlakuan risiko yang lain.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas sistem manajemen risiko dilakukan di tahun 2018 yaitu dengan melakukan pengukuran maturitas risiko. Berdasarkan pengukuran tersebut, tingkat maturitas pelaksanaan manajemen risiko PTK berdasarkan kerangka kerja ISO 31000:2018 adalah 3,73 (*mature growth*).

Dengan perincian untuk aspek *principles* berada pada tahap *advance*, aspek framework dalam aspek growth dan aspek process dalam tahap mature growth. Dengan rincian:

- Aspek Principles berada dalam tahap *Advance*;
- Aspek Framework dalam tahap *Mature Growth*;
- Aspek Process dalam tahap *Mature Growth*.

Pencapaian ini menandakan bahwa ERM telah terdokumentasi dan terkoordinasi, serta dijalankan secara terukur pada tiap fungsi organisasi. ERM terimplementasi secara komprehensif serta terdapat perangkat formal kendali ERM pada tingkat eksekutif. Integrasi ERM dengan perencanaan strategis

expected that the Company's risk will be lower than before the treatment was carried out.

The results of the analysis/measurement of the identified risks show that the level of risk after controlling/management is decreasing. To reduce risk to an acceptable level, it is necessary to improve existing controls or alternative risk treatments.

The Risk Management System Effectiveness Overview

An evaluation on the risk management system is carried out in 2018 by measuring risk maturity. Based on these measurements, the level of maturity of risk management in PTK according to the ISO 31000: 2018 framework is (*mature growth*).

Detail aspects of the principles are including the advance, framework, growth and process aspects in the mature growth stage, with detail, as follows:

- Principles Aspect in Advance stage;
- Framework Aspect in Mature Growth stage;
- Process Aspect in Mature Growth stage.

This achievement indicates that Enterprise Risk Management (ERM) has been documented and coordinated, and carried out in a measurable manner at each organizational function. ERM is implemented comprehensively and formal tools for ERM control at the executive level are in place.



dan penilaian kinerja perusahaan belum sempurna, namun telah terdapat tahap evaluasi framework ERM yang sistematis.

Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pengelolaan risiko perusahaan, berbagai upaya telah dilaksanakan PTK diantaranya melakukan integrasi manajemen risiko serta pengembangan dan pengintegrasian aplikasi manajemen risiko. Integrasi manajemen risiko dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan *three lines of defense* yaitu pendekatan yang sistematis dan efektif karena dapat meningkatkan komunikasi dan kontrol dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab (*accountability and segregation of duties*) sehingga dapat mendukung terciptanya budaya risiko, pemahaman dan kesadaran risiko yang lebih baik,
- *Risk based audit*, dan
- *Risk based budgeting* (RBB) yaitu menyelaraskan perumusan RKAP dengan pengelolaan risiko untuk memastikan pencapaian target perusahaan.

Disisi lain, pengelolaan risiko akan lebih mudah dan cepat dengan adanya digitalisasi. Untuk itu PTK menerapkan aplikasi *Enterprise Risk Management System* (ERMS) Pertamina untuk mengintegrasikan *top risk* seluruh anak perusahaan PT Pertamina International Shipping.

ERM integration with strategic planning and evaluation of company performance is not perfect, but there has been a systematic evaluation phase of the ERM framework.

Risk Management Improvement and Enhancement

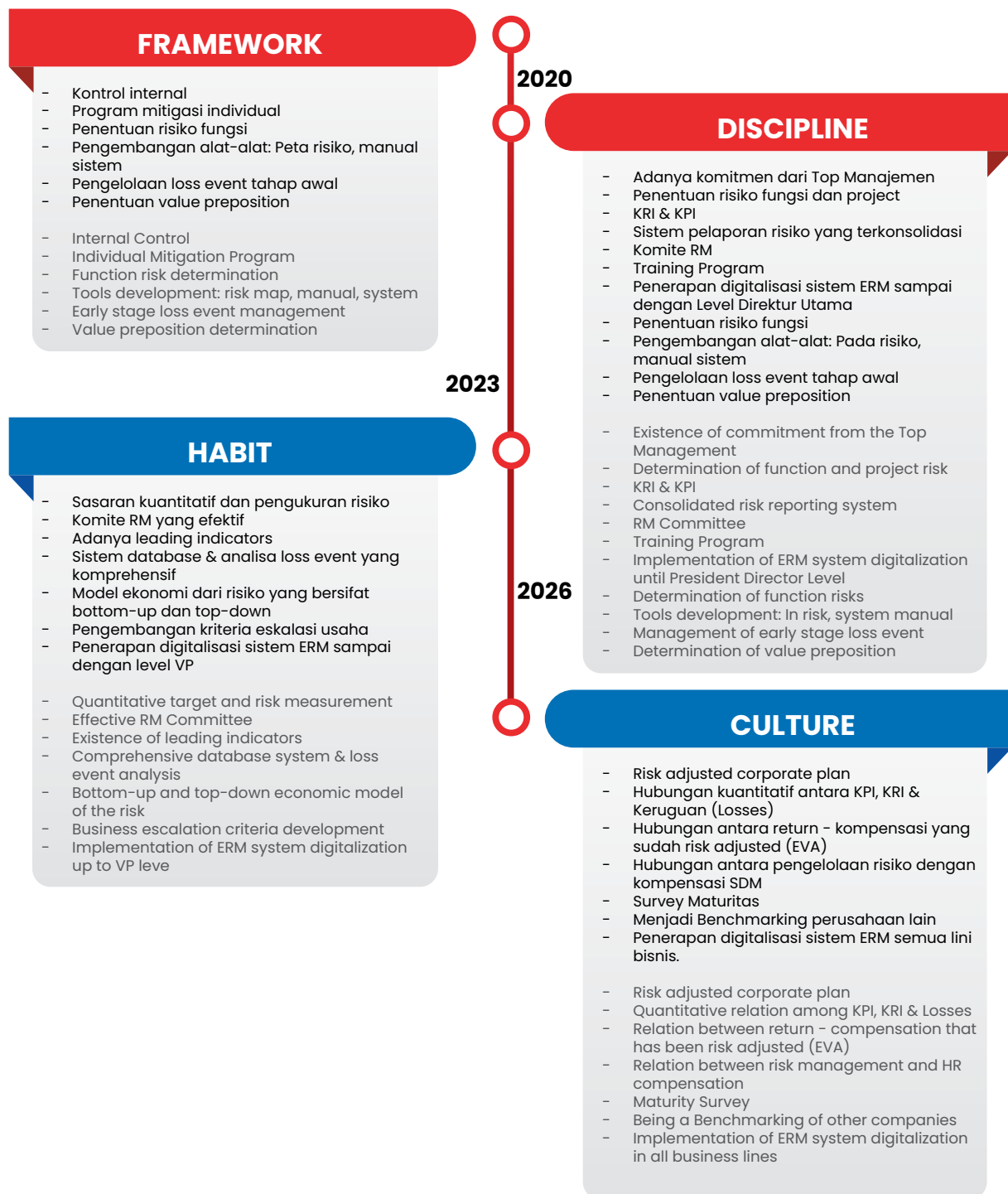
In order to improve and enhance the company's risk management, PTK has carried out various efforts, including integrating risk management and developing and integrating risk management applications. Risk management integration is carried out through the following activities:

- Implementation of three lines of defense, namely a systematic and effective approach because it can improve communication and control by clarifying duties and responsibilities (*accountability and segregation of duties*) so as to support the creation of a risk culture, better understanding and risk awareness.
- Risk based audit, and
- Risk based budgeting (RBB), namely aligning the RKAP formulation with risk management to ensure the achievement of company targets.

On the other hand, risk management will be easier and faster with digitization. For this reason, PTK applies Pertamina's Enterprise Risk Management System (ERMS) application to integrate the top risks of all subsidiaries of PT Pertamina (Persero).

Roadmap Implementasi Enterprise Risk Management PTK

PTK Enterprise Risk Management Implementation Roadmap



Sesuai *roadmap* implementasi ERM, pada tahun 2022 PTK berada pada posisi transisi menuju Stage 3: DISCIPLINE dimana pada tahap ini PTK sudah memiliki/menjalankan seluruh kegiatan berikut:

1. Stage 2: FRAMEWORK

- Kontrol internal
- Program mitigasi individual
- Penentuan risiko fungsi
- Pengembangan alat-alat: Peta risiko, manual sistem
- Pengelolaan *loss event* tahap awal
- Penentuan *value preposition*

2. Stage 2: DISCIPLINE

- Adanya komitmen dari *top manajemen*
- Penentuan risiko fungsi dan *project*
- KRI & KPI
- Sistem pelaporan risiko yang terkonsolidasi
- Komite RM
- Training program
- Penerapan digitalisasi sistem ERM sampai dengan level Direktur Utama
- Penentuan risiko fungsi
- Pengembangan alat-alat: Peta risiko, manual sistem

Untuk mencapai Stage 3: DISCIPLINE secara penuh, PTK harus menyelesaikan beberapa tahapan akhir yang sepenuhnya terkait dengan pengelolaan *loss event* tahap awal dan penentuan *value preposition*. Kedua kegiatan tersebut saat ini baru dilaksanakan untuk *top risk* Perusahaan, sedangkan risiko fungsi atau region masih belum optimal dilaksanakan. Kegiatan tersebut rencananya secara bertahap akan dilakukan pada tahun selanjutnya.

In accordance with the ERM implementation roadmap, in 2022 PTK is in a transition position to Stage 3: DISCIPLINE where at this stage PTK already has/carries out all of the following activities:

1. Stage 2: FRAMEWORK

- Internal controls
- Individual mitigation programs
- Determination of functional risk
- Development tools: Risk maps, system manuals
- Early stage loss event management
- Determination of value prepositions

2. Stage 2: DISCIPLINE

- There is commitment from top management
- Determination of function and project risks
- KRI & KPI
- Consolidated risk reporting system
- RM Committee
- Training program
- Digitalization of the ERM system up to the level of the President Director
- Determination of functional risk
- Development tools: Risk maps, system Manuals

To reach Stage 3: fully DISCIPLINE, PTK must complete several final stages which are fully related to the initial loss event management and determination of value prepositions. These two activities are currently only being carried out for the Company's top risk, while the function or region risks have not yet been implemented. The activity is planned to be carried out in stages in the upcoming years.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Pengendalian internal adalah suatu proses yang melibatkan seluruh personil yang ada dalam organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, sampai dengan karyawan tingkat bawah. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN, Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk menunjang organ Komite Audit, Internal Audit dan Audit Eksternal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan aktivitas dan pengelolaan Perusahaan.

Pembentukan Sistem Pengendalian Internal juga dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Perusahaan untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip penerapan GCG. Upaya pengendalian internal ini secara khusus diterapkan dalam aspek-aspek penting seperti aspek operasional, keuangan, SDM, dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan. Selain itu, sistem pengendalian internal juga dimaksudkan untuk menekan potensi risiko usaha maupun praktik penyimpangan etika bisnis yang berdampak negatif pada kinerja Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan PTK merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh pekerja, baik pada jajaran pimpinan sampai dengan staf. Hal tersebut dilakukan untuk membangun komitmen yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sistem

Internal control is a process that involves all personnel in the organization from the Board of Commissioners, Directors, management, to lower-level employees. Internal control is designed to provide reasonable assurance in order to achieve the company's objectives. In the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in BUMN, the Internal Control System is designed to support the organs of the Audit Committee, Internal Audit and External Audit in the implementation of the function of monitoring activities and Company management.

The establishment of Internal Control System is also intended to realize the Company's commitment to comply with and comply with the principles of GCG implementation. This internal control effort is specifically applied to important aspects such as operational, financial, HR aspects, as well as compliance with laws and regulations. In addition, the internal control system is also intended to reduce potential business risks and business ethics deviation practices that have negative impact on the Company's performance.

The Internal Control System implemented by PTK is an integral process for actions and activities that are carried out continuously by all employees, from the leadership to the staff. This is done to build a complete commitment in order to achieve organizational goals. The PTK Internal Control System has referred to the Internal Control Integrated Framework



Pengendalian Internal PTK telah mengacu pada prinsip-prinsip *Internal Control Integrated Framework yang ditetapkan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)*.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

Proses perancangan sistem pengendalian internal PTK telah mengacu kepada kerangka Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions (COSO) dengan memperhatikan 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan ditujukan untuk:

- Mengamankan aset;
- Mengupayakan efisiensi dan efektivitas operasi Perusahaan;
- Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi/finansial dan manajemen;
- Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku.

Three Lines of Defense

Sesuai COSO, PTK telah menerapkan mekanisme Three Line of Defense, sebagai aktivitas penerapan pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara terpadu.

First Line of Defense

Dikelola oleh masing-masing unit atau satuan kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing:

- Pengetahuan dan pemahaman atas proses bisnis, proses kerja utama.
- Identifikasi potensi risiko pada tugas yang menjadi wewenang dari setiap unit.

principles set by COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

Internal Control System Conformity With COSO Framework

In PTK, the internal control system designing process has complied to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO) framework by considering 5 components, such as control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and supervision. The implementation of internal control system is aimed to:

- Secure assets;
- Encourage efficiency and effectivity in the Company's operation;
- Develop reliability and comprehensiveness in accounting/financial information and management;
- Guarantee compliance to policy and procedure as well as the prevailing laws and regulations.

Three Lines of Defense

In accordance with COSO, PTK has implemented third line of defense mechanism as part of the internal control implementation and integrated corporate governance.

First Line of Defense

Managed by each unit or task force in accordance with respective functions and duties:

- Knowledge and insight on business process, and main work process.
- Potential risks identification on the duties that have been authorized to each unit.

- Pengendalian dan pelaksanaan mitigasi potensi risiko.

Second Line of Defense

Dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang berada pada unit *strategic & planning* dan fungsi *compliance* yang berada pada unit *Corporate Secretary*

- Peningkatan fungsi *check & balance* mendukung operasi Perusahaan.
- Sosialisasi kesadaran terhadap penerapan tata kelola Perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko pada semua unit kerja dan tingkatan organisasi.
- Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi.
- Penyempurnaan pedoman dan kebijakan operasional dan non-operasional.

Third Line of Defense

Dikelola oleh Unit Audit Intern

- Pelaksanaan audit internal sesuai program kerja audit tahunan.
- Pelaksanaan audit surprise untuk mengukur kesadaran akan penerapan tata kelola perusahaan.
- Kepatuhan dan manajemen risiko.
- Database temuan audit internal dan eksternal sebagai masukan untuk peningkatan
- kualitas setiap unit/fungsi.

Penerapan Elemen Pengendalian Internal

PTK menerapkan elemen-elemen pengendalian internal dengan merujuk kepada COSO – *Internal Control Framework*.

Lingkungan Pengendalian

PTK berkomitmen membangun lingkungan pengendalian yang baik melalui penerapan serangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam

- Control and implementation of potential risks mitigation.

Second Line of Defense

Managed by risk management function under the strategic & planning unit and compliance function under the Corporate Secretary unit

- Increasing check & balance function in support of the Company's operation.
- Socializing awareness to the implementation of corporate governance, compliance and risk management in all work units and organizational levels
- Implementing integrated risk management.
- Improving operational and non-operational manuals and policies.

Third Line of Defense

Managed by the Internal Audit Unit

- Implementation of internal audits in accordance with the annual audit work program.
- Implementation of a surprise audit to measure awareness of the implementation of governance company.
- Compliance and risk management.
- Database of internal and external audit findings as input for improvement the quality of each unit/function.

Implementation of Internal Control Elements

PTK implements elements of internal control by referring to COSO – *Internal Control Framework*.

Control Environment

PTK is committed to build a good control environment through a series of standards, processes, and structures which serve as basis for internal control implementation



pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi.

- **Penilaian Risiko**

PTK menerapkan sistem manajemen risiko dan melakukan pemetaan serta mitigasi risiko atas risikorisiko yang teregritasi: *governance risk, strategy and planning risk, finance risk, operational/ infrastructure risk, compliance risk, reporting risk.*

- **Aktivitas Pengendalian**

PTK memiliki pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan non-operasional. Mekanisme pengendalian terhadap risiko diterapkan dalam bentuk *Three Line of Defense*.

- **Komunikasi dan Informasi**

PTK memiliki sistem manajemen informasi yang baik dan terus mendorong komunikasi yang terbuka dengan seluruh pihak untuk memperoleh informasi yang memadai untuk proses pengambilan keputusan.

- **Aktivitas Pemantauan**

PTK memiliki mekanisme pemantauan dalam bentuk Rapat Kerja, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris – Direksi, Rapat Direksi dan berbagai aktivitas pengendalian lainnya.

across the organization.

- **Risk Assessment**

PTK implements risk management system and performs risk mapping and mitigations over the integrated risks: governance risk, strategy and planning risk, finance risk, operational/infrastructure risk, compliance risk, and reporting risk.

- **Control Activities**

PTK has a manual and policies for operational and non-operational activities. The control mechanism to risks is applied in the form of Third Line of Defense.

- **Monitoring Activity**

PTK has good information management system and strives to promote open communication with all parties to acquire sufficient information for decision making.

- **Monitoring Activity**

PTK has a monitoring mechanism in form of Coordination Meeting, Board of Commissioners Meeting, Management Meeting, Board of Directors Meeting, and other various control activities.

Pengendalian Keuangan

Sejalan dengan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, PTK melakukan pengendalian atau pengelolaan terkait keuangan sebab hal tersebut menjadi faktor penting dalam kelancaran aktivitas operasional dan bisnis perusahaan. Pengendalian/ pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sehat sehingga perusahaan dapat meminimalisir pemborosan, penyimpangan, serta mengoptimalkan arus keuangan perusahaan.

Financial Control

In line with the implementation of effective internal control system, CAR carries out financial control or management because it is an important factor in the smooth running of the company's operational and business activities. Financial control/management is carried out with sound principles thereby the company can minimize waste, fraud, and optimize financial flow of the Company.

Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan

Tujuan pengelolaan keuangan adalah memaksimalkan laba serta mengejar tingkat pertumbuhan Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (*cost consciousness*). Perusahaan menganalisa dan mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menangani risiko yang terjadi.

Pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Terkait prosedur, kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik, serta sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai guna menjauhkan perusahaan dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terkait proses pencatatan, kesalahan penyajian, hingga pelaporan keuangan perusahaan.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan dalam bentuk rencana jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dasar penyusunan anggaran adalah program kerja dan dikoordinasikan antar fungsi/kantor region untuk menyinergikan usulan anggaran setiap fungsi/kantor region dengan menganut prinsip *bottom-up* dan *top-down*. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis setiap fungsi kantor region dengan mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya, dan analisis terhadap peluang pasar yang kemungkinan besar bisa dicapai. Anggaran Perusahaan terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran biaya dan anggaran

Financial Management Basic Principles

Financial management holds the purpose of maximizing profit as well as pursuing growth level of the Company through an implementation of work program based on cost consciousness principle. The Company analyzes and anticipated all possible risks and performs necessary measures to address the risks.

The Company's financial management is carried out professionally, transparently, and based on the principle of prudence. Related to procedures, policies and regulations relating to financial management, it is prepared and evaluated periodically, and in accordance with Financial Accounting Standards and prevailing laws and regulations. Companies must create an adequate internal control system to keep the company away from various high-risk issues related to the recording process, misrepresentation, to the company's financial reporting.

Financial Management Planning

The company's financial management is carried out in the form of short-term, medium-term and long-term plans. The basis for preparing a budget is a work program and is coordinated between functions/branch offices to synergize the proposed budget of each function/branch office by adopting the bottom-up and top-down principles. The Board of Directors has set realistic revenue and cost targets for each branch office function by taking into account the needs, resources, and analysis of market opportunities that are likely to be achieved. The Company's budget consists of an income budget, a cost budget and an investment budget. The Company

investasi. Perusahaan telah melakukan pemisahan tugas (segregation of duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi dalam pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada RKAP dan mempertimbangkan azas manfaat. Direksi dan Dewan Komisaris menyusun kebijakan mengenai transaksi-transaksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, selain yang diatur dalam Anggaran Dasar. Setiap keputusan Dewan Komisaris terkait dengan transaksi-transaksi yang melalui persetujuan Komisaris, wajib ditaati Direksi.

Direksi menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan mengenai pendelegasian dan batas kewenangan untuk mempercepat proses aktivitas dengan tetap memperhatikan risiko. Pengeluaran-pengeluaran yang belum dicantumkan dalam RKAP dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Direksi.

Perubahan revisi rencana kerja dan anggaran harus melalui prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan Direksi dan dilakukan dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan memberikan apresiasi terhadap fungsi/kantor region yang dapat mencapai target kinerjanya.

Pengendalian Pengelolaan Keuangan

Setiap fungsi/kantor region harus mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan kepada Direksi. Manajer fungsi/kepala region bertanggung jawab untuk memonitor, mengevaluasi dan mengefektifkan realisasi RKAP pada fungsi/kantor regionnya.

has segregated duties between the functions of verification, recording and reporting, depositing and depositing funds as well as authorization in financial management.

Financial Management Implementation

Activities of the Company are carried out by referring to RKAP and considering benefits principle. The Board of Directors and Board of Commissioners prepare policies on transactions requiring approval from the Board of Commissioners, aside from the regulations in the Articles of Association. Each decision made by the Board of Commissioners related to transactions that require approval from the Board of Commissioners must be obeyed by the Board of Directors.

The Board of Directors stipulates a financial management policy on the delegation and limit of authority to accelerate activity process by consistently considering the risks. Expenditures that have yet to be stated in RKAP could be made possible after obtaining an approval from the Board of Directors.

Changes in the revision of work plan and budget should undergo procedures/provisions stipulated by the Board of Directors and be based on justifications that can be held accountable for. The Company gives appreciation to functions/branch offices that could achieve its performance target.

Financial Management Control

Each function/branch office should be account for financial management to the Board of Directors. The manager of function/branch office is responsible for monitoring, evaluating, and making the realization of RKAP effective in its function/branch office.

Perusahaan melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP dan analisis terhadap penyimpangan (*variance*) yang dilakukan oleh fungsi kantor region secara keseluruhan. Adapun pemantauan pengelolaan keuangan kantor region menjadi tanggung jawab Fungsi *Financial Accounting*.

Perusahaan menetapkan kebijakan yang jelas mengenai pelimpahan wewenang pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang. Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Direksi.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan

Setiap fungsi/kantor region/anak perusahaan wajib mengirimkan laporan keuangan ke Direktur Keuangan. Perusahaan melakukan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh fungsi/kantor region serta anak perusahaan. Direktur Keuangan harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur akuntansi diterapkan secara konsisten dan dilaksanakan oleh seluruh fungsi/ kantor region. Direksi bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Penyampaian laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan tepat waktu, untuk dikonsolidasikan oleh induk perusahaan.

Pengendalian Operasional

Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan pengiriman jasa. Proses bisnis kunci PTK terdiri dari kegiatan pemasaran dan operasi kapal (*Marketing and Operation*), keagenan kapal, *port operation* and *service* untuk pelabuhan khusus migas.

The Company carries out an evaluation over the RKAP implementation and analysis on the variance performed by the branch office function as a whole. The monitoring of financial management at a branch office became the responsibility of Financial Accounting Function.

The Company stipulates a clear policy on the delegation of authority on giving authorization for cash expenditure. The Board of Commissioners monitors the financial management accomplished by the Board of Directors.

Financial Management Reporting

Each function/branch office/subsidiary is obligated to submit financial statements to Finance Director. The Company performs the consolidated financial statements from all functions/branch offices as well as subsidiaries. Finance Director should ensure the accounting policies and procedures are implemented consistently and by all functions/branch offices. The Board of Directors is responsible in preparing the financial statements, in accordance with the prevailing financial accounting standards in Indonesia. The submission of audited financial statements should be handled in a timely manner in order to be consolidated by the parent company.

Operational Control

The Company administers the business activities starting by identifying the needs and ended with service delivery. The key business process of PTK consists of Marketing and Operation, ship agencies, port operation and service for oil and gas special port



Prinsip Dasar Pengelolaan Operasional

- Tujuan bisnis perusahaan adalah terus melakukan, menguntungkan, dan ditujukan untuk kelangsungan hidup (*going concern*) Perusahaan.
- Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan jasa yang profesional dan penuh integritas.

Perencanaan Pengelolaan Operasional

- Direktur utama memastikan bahwa tujuan manajemen didefinisikan dalam semua proses kunci.
- Rencana dan pengembangan proses yang diperlukan untuk merealisasikan jasa perusahaan tertuang dalam Rencana Kerja Pendapatan dan Laba Tahunan (RKPL).
- *Management Representative* (MR) dan *Designated Person Ashore* (DPA) berwenang untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memelihara sistem manajemen.

Pelaksanaan Pengelolaan Operasional

- Melaksanakan operasional perusahaan sesuai RKAP dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas biaya.
- Pemilik proses kunci dan proses owner memimpin pelaksanaan kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Utama.
- Jasa diberikan kepada pelanggan mengacu pada TOR (*Term of Reference*) untuk pekerjaan dalam dokumen kontrak yang telah disepakati.

Pengendalian dan Pelaporan

- Pelaporan realisasi kegiatan operasional perusahaan dilakukan oleh unit/ fungsi yang terkait secara berkala kepada Direksi.

Basic Principles of Operational Management

- The business objective of the Company continuously performs, benefits, and is aimed for the Company's going concern.
- Fulfilling the customers' needs with professional service and integrity.

Operational Management Planning

- President Director to ensure the management objectives are defined in all key processes.
- Required process planning and development for company services realization are regulated in Annual Revenues and Profit Budget Plan (RKPL).
- Management Representative (MR) and Designated Person Ashore (DPA) hold the authority to develop, implement, and maintain the management system.

Operational Management Implementation

- Performing company operational in accordance with RKAP by considering cost efficiency and effectivity.
- Owner of key process and owner process are in charge of implementing operational activities to achieve the objectives stipulated and agreed by the President Director.
- Services provided for the customers refer to TOR (*Term of Reference*) designed for the jobs in the agreed contract.

Control And Reporting

- Reporting of the realization of company's operational activities is conducted by related units/functions periodically to the Board of Directors.

- Semua jasa yang diberikan kepada pelanggan dikaji dan ditinjau. Bila mana ada perubahan persyaratan dalam perjanjian maka perubahan diberitahukan kepada pelanggan dan fungsi yang bersangkutan.

- All of the services provided to the customers to be analyzed and reviewed. If there is any change of requirements in the agreement, notification should be made to the customers and functions concerned.

Evaluasi dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal menjaga keamanan harta milik Perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut dilakukan oleh fungsi audit internal untuk memonitoring kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Perusahaan melakukan evaluasi melalui pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan operasional dan menyampaikan hasilnya kepada Direksi dan Kantor Region, untuk segera ditindaklanjuti.

Pengendalian internal dalam hal keuangan perusahaan dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal atas pelaporan keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR*). Pelaksanaan ICOFR sebagai tinjauan (*review*) dalam hal keuangan Perusahaan, telah dilaksanakan Internal Audit selama kurun waktu periode pelaporan. Kesimpulan hasil sertifikasi yang dilaksanakan oleh *Control Group*, memperlihatkan tingkat kecukupan dan efektivitas ICOFR berada pada tingkat efektif.

Pengendalian internal atas operasional Perusahaan dilaksanakan melalui mekanisme *Internal Control Review (ICR)* oleh Internal Audit melalui mekanisme audit operasional. Hasil tinjauan yang dilakukan selama tahun 2020 memperlihatkan perusahaan telah

Internal Control System Evaluation And Effectivity

Evaluate the effectiveness of the internal control system to safeguard the security of Company property, examine the accuracy and accuracy of accounting data, encourage efficiency, and help encourage compliance with established management policies. The evaluation is carried out by the internal audit function to monitor the adequacy and effectiveness of internal control. The company evaluates through monitoring of the follow-up results of operational checks and submits the results to the Directors and Branch Offices, for immediate action.

The internal control in finance is realized through an internal supervision mechanism over the financial statements (*Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR*). The implementation of ICOFR as a review in the Company's finance has been conducted by the Internal Audit throughout the reporting period. The conclusion of certification results, developed by *Control Group*, depicts the ICOFR level of adequacy and effectivity at effective level.

Internal control over the Company's operations is carried out through the Internal Control Review (ICR) mechanism by the Internal Audit through the operational audit mechanism. The results of the review conducted during 2020 indicated that the Company had



melaksanakan standar prosedur operasi sesuai praktik-praktik terbaik pengelolaan jasa maritim.

implemented standard operating procedures in accordance with maritime services management best practices.

Pembaruan Terkait Pengendalian Internal

Guna mengefektifkan pelaksanaan sistem pengendalian internal, Perusahaan melakukan pembaruan terkait pengendalian internal yang akan mulai diterapkan pada tahun 2019. Pembaruan tersebut meliputi:

1. Sinergi Internal Audit PT Pertamina International Shipping dengan Anak Perusahaan.
2. *Continuous Audit Management System (CAMS)* audit berbasis teknologi.
3. Audit Internal dilakukan berdasarkan Bisnis Proses dan Risk Management, sesuai Audit Annual Program.

Updates Related to Internal Control

In order to have an effective internal control system, the Company carried out updating activities related to the internal control, to which the implementation will commence in 2019. The updates include:

1. Internal Audit Synergy of PT Pertamina (Persero) and Subsidiaries.
2. Technology based audit cams (continuous Audit Management).
3. Internal Audit to be based on Business Process and Risk Management, as per Audit Annual Program.

Permasalahan Hukum

Litigation

Permasalahan Hukum Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2021, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina Trans Kontinental yang sedang menjabat.

Legal Issues Involving the Board of Commissioners and Board of Directors

In 2021, there was no litigation involving the currently serving members of the Board of Commissioners and Directors of Pertamina Trans Kontinental.

Sanksi Regulator

Selama tahun 2021, PTK tidak menerima sanksi dalam bentuk apapun dari lembaga maupun regulator.

Regulatory Sanctions

In 2021, PTK did not receive any form of sanctions from institutions or regulators.

Kepatuhan Terhadap Pajak

Selama tahun 2021, PTK telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pembayaran pajak tepat waktu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Tax Compliance

During 2021, PTK has carried out the obligation to deposit and pay taxes on time in accordance with the applicable tax regulations.

Penyimpangan Internal

Selama tahun 2021, tidak terdapat penyimpangan yang bersifat kecurangan yang dilakukan oleh Pekerja PTK.

Internal Fraud

In 2021, there was no internal fraud committed by PTK employees.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham.

Transactions With Conflict of Interest

Conflict of interest refers to a situation containing a conflicting economic interest between the Company and the personal economic interests of the Board of Directors, Commissioners and Shareholders.



Selama tahun 2021, tidak ada transaksi yang memiliki benturan kepentingan di PTK, setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Dampak Terhadap Perusahaan

Permasalahan hukum perdata dan pidana selama tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum, pengaruhnya terhadap Perusahaan tidak signifikan karena telah melalui proses mitigasi.

Upaya Meminimalisir Risiko Hukum

PTK berupaya secara berkesinambungan untuk terus meminimalisir risiko hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Secara konsisten melaksanakan program *Legal Risk Awareness* termasuk namun tidak terbatas pada sosialisasi format kontrak baku dan sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan bisnis perusahaan, sebagai salah satu upaya pencegahan risiko hukum dan peningkatan kualitas pemahaman aspek hukum bagi seluruh pekerja maupun calon pekerja secara berjenjang dan sesuai dengan kebutuhan bisnis PTK.
2. Memperkuat budaya Perusahaan dan integritas melalui sosialisasi dan pengukuran pemahaman pekerja terhadap integritas.
3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
4. Penegakan disiplin pekerja

Throughout 2021, there was no transactions with a conflict of interest in PTK, each transaction was carried out in accordance with prevailing regulations and always concerning the GCG principles.

Impact to the Company

Civil and criminal legal issues during the reporting year and have been claimed through a legal process, impact on the Company is less significant as been processed through a mitigation process.

Efforts to Minimize Legal Risks

PTK continuously strives to minimize legal risks against the company in carrying out business activities which are reflected in the following activities:

1. Consistently implement the Legal Risk Awareness program including but not limited to socialization of standard contract formats and socialization of regulations related to the company's business, as an effort to prevent legal risks and improve the quality of understanding of legal aspects for all workers and prospective workers in stages and in accordance with PTK's business needs.
2. Strengthening corporate culture and integrity through socialization and measurement of employees' understanding of integrity.
3. Establishment of Gratification Control Unit
4. Employee discipline enforcement

Akses Informasi Perusahaan

Access To Company Information

PTK menerapkan budaya Perusahaan dalam setiap kegiatan bisnisnya untuk mencapai visi dan misi Perusahaan dengan menerapkan GCG melalui Pedoman Kode Etik Perusahaan. Pedoman Kode Etik Perusahaan digunakan oleh seluruh Insan PTK sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di dalam Perusahaan maupun di luar Perusahaan.

PTK menjamin tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada publik melalui berbagai media. PTK mempertimbangkan kemudahan akses setiap *stakeholder* termasuk masyarakat agar informasi dan data perusahaan dapat tersampaikan dengan baik, cepat dan aktual dengan perantara media online seperti website dan PTK portal serta media cetak seperti Annual Report dan Sustainability Report yang sebagian diantaranya disediakan juga dalam bentuk yang bisa diakses secara online. Namun PTK juga menyediakan media informasi secara langsung melalui siaran pers dan Forum Komunikasi Internal untuk insan PTK.

Alamat Kantor Korespondensi
Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450
Telp: (+6221) 31923005
Fax: (+6221) 3106804
E-mail: ptkpusat@ptk-shipping.com
Website: www.ptk-shipping.com

PTK implements corporate culture in all of its business activities to achieve the Company's vision and mission by implementing GCG through the Company's Code of Ethics Guidelines. The Company's Code of Ethics guidelines are used by all PTK Personnel as a basis for carrying out their duties and making decisions in accordance with prevailing regulations both within the Company and outside the Company.

PTK guarantees availability of corporate information and data access to public through various media. PTK considers accessibility for each stakeholder, including the community so that company information and data can be conveyed properly, quickly, and accurately with online media intermediaries such as websites and PTK portals as well as print media such as Annual Reports and Sustainability Reports, some of which are also provided online to be accessed easily. However, PTK also provides direct media information via press releases and Internal Communication Forum for PTK personnels.

Correspondence Office Address
Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450
Phone: (+6221) 31923005
Fax: (+6221) 3106804
E-mail: ptkpusat@ptk-shipping.com
Website: www.ptk-shipping.com



Keterbukaan dalam Komunikasi Internal

Komunikasi internal merupakan sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan terbentuknya hubungan timbal balik antar pihak internal dalam organisasi. Oleh karena itu, PTK senantiasa menciptakan komunikasi dua arah kepada pekerja melalui berbagai media komunikasi.

PTK memiliki media internal berupa aplikasi PRIDE. Aplikasi tersebut merupakan sarana penyampaian berita perusahaan hingga pengumuman terkait perusahaan. Selain itu, komunikasi internal di perusahaan juga dibangun dalam aktivitas-aktivitas operasional seperti meeting internal, townhall meeting, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi internal dalam bentuk selain aktivitas operasional melalui kegiatan employee gathering/ family gathering.

Keterbukaan dalam Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal merupakan bentuk transparansi kepada pihak eksternal. Komunikasi eksternal dengan para pemangku kepentingan senantiasa dijaga agar tercipta hubungan timbal balik antara Perusahaan dan pemangku kepentingan. Selain itu komunikasi eksternal juga sebagai bentuk kewajiban pemenuhan keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulator.

Rapat Umum Pemegang Saham & Paparan Publik

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum bagi pemegang saham dalam memutuskan arah Perusahaan serta forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk

Disclosure in Internal Communication

Internal communication is a means of communication carried out to disseminate information, both conveying and receiving, and the establishment of reciprocal relationships between internal parties in the organization. Therefore, PTK always creates two-way communication to employees through various communication media.

PTK has an internal media in form of a PRIDE application. The application is a channel to disseminate corporate news to until other announcement related to the Company. In addition, internal communication in the company is also built in operational activities such as internal meetings, townhall meetings, and others. Whereas internal communication in the form of other than operational activities through employee gathering/family gathering.

Disclosure in External Communication

External communication is a means of transparency to external parties. External communication with stakeholders is always maintained in order to create a reciprocal relationship between the Company and stakeholders. In addition, external communication is also a form of obligation to fulfill the disclosure of information as stipulated by the regulator.

General Meeting of Shareholders & Public Expose

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a forum where the shareholders decide the direction of the Company and a forum for the Board of Commissioners and Board of

melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada para pemegang saham.

Laporan Tahunan

PTK rutin menerbitkan laporan tahunan yang menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan pada tahun buku tersebut. Laporan tahunan didistribusikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sustainability Report

PTK juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan Perusahaan secara menyeluruh melalui Sustainability Report. Sustainability Report akan disampaikan kepada pemegang saham, regulator, organisasi massa, media massa dan masyarakat.

Siaran Pers

Sebagai bentuk informasi kepada pemangku kepentingan dalam bentuk berita. Sepanjang tahun 2020, PTK telah melakukan siaran pers untuk beberapa berita mengenai informasi positif perusahaan.

Situs Web

PTK menyediakan layanan akses informasi dan data perusahaan melalui situs web perusahaan di alamat www.ptk-shipping.com. Informasi terkait perusahaan yang dimuat pada situs web perusahaan.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

PTK berupaya menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan guna menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Sebab pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik secara

Directors to report and being responsible upon their duty implementation and performance to shareholders.

Annual Report

PTK regularly publishes annual report that presents information about the company's performance during the fiscal year. The annual report is distributed to shareholders and stakeholders.

Sustainability Report

PTK also provides comprehensive information regarding the Company's activities through the Sustainability Report. Sustainability Report will be submitted to our shareholders, regulators, mass organizations, mass media and public.

Press Release

As a manifestation of information to stakeholders in form of news. Throughout 2020, PTK has distributed press releases regarding some news about positive Company's information.

Website

PTK provides corporate information and data access through the official website at www.ptk-shipping.com. Information related to the Company are also presented on the official website.

Relationships with Stakeholders

PTK strives to maintain good relations and communication with stakeholders to maintain the sustainability of the company's business. Because stakeholders are parties who have interests both directly and indirectly to the Company.

langsung maupun tidak langsung kepada (perusahaan).

PTK melakukan hubungan dan komunikasi dengan seluruh stakeholdernya melalui kegiatan CSR, vendor day, publikasi berita melalui website, publikasi melalui sosial media, penerbitan bulletin cetak dan e-buletin dan siaran pers di media online serta publikasi berita melalui media cetak. yang memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan antara kepatuhan aturan yang berlaku dengan kinerja Perusahaan.

Dalam upaya menjaga komunikasi yang baik kepada pihak stakeholder, selama tahun 2021 telah melakukan berbagai rangkaian aktivitas yang dijelaskan dibawah ini:

PTK engages and communicates with all of stakeholders through CSR activities, vendor days, news publications through websites, publications through social media, publishing bulletins and e-bulletins and press releases in online media and news publications through print media who has the responsibility to integrate compliance with applicable rules and company performance.

In an effort to maintain good communication with stakeholders, during 2021, various series of activities have been carried out which are described as follows:

Aktivitas Investor Relations

Investor Relations Activities

Aktivitas Activities	Frekuensi Frequency
CSR	23 rencana kegiatan tahun 2021, terealisasi 18 kegiatan 23 planned activities in 2021, 18 activities realized
Vendor Day	1 kali pertahun / Once per Year
Publikasi Berita News Publication	1 kali Setiap bulan / Once Per Month

Berbagai media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, siklus bisnis, dan pencapaian kinerja Perusahaan dapat juga dilihat pada tabel di bawah ini:

The various communication media used by the Company to convey data and information related to the operational activities, business cycle and achievement of the Company's performance can also be seen in the table below:

Kepada Kepada	Bentuk Komunikasi Form of Comunciation
Regulator	Surat dan Laporan Letter and Report
Pemegang Saham Shareholders	RUPS Sirkuler. Media Massa. Circular GMS, Mass Media
Lembaga Publik Public Institution	Notaris, Konsultan Hukum Notary, Legal Consultant

Kepada Kepada	Bentuk Komunikasi Form of Comunciation	
Konsumen Consumer	Media cetak dan media online, Indeks Kepuasan Pelanggan	Print and online media, Customer Satisfaction Index
Pekerja Employees	Manajemen Review, Pelatihan, Media Komunikasi Internal	Management Reviews, Training, Internal Communication Media
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	Media Cetak dan Media online nasional, Website, Annual Report, Sosial Media (Instagram)	Print and national online media, websites, annual reports, social media (Instagram)
Mitra Kerja dan Rekanan Partners and Partners	<i>Vendor day, Vendor Rating</i>	Vendor day, Vendor Rating
Organisasi Profesi Professional Organizations	INSA	INSA
Masyarakat/Umun General public General public	Website, Sosial Media, Media cetak dan media online	Website, social media, print media and online media



Kode Etik

Code of Conduct

Pedoman Perilaku merupakan salah satu bentuk komitmen dalam rangka penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan merupakan sekumpulan komitmen yang berisi tentang kewajiban, larangan dan hubungan dengan stakeholders lainnya. *Code of Conduct* mengatur kewajiban yang harus ditaati setiap insan Perusahaan.

Perusahaan senantiasa menjalankan bisnis operasional secara jujur, beretika, berintegritas, dan berupaya melakukan yang terbaik. Untuk mendukung komitmen tersebut, PTK menerapkan kode etik dan etika bisnis yang harus dipatuhi semua pihak perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan, serta menciptakan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Kode etik merupakan pedoman perilaku profesional seluruh insan perusahaan. Termasuk jajaran manajemen yaitu Dewan Komisaris dan Direksi.

Pokok-Pokok dalam Pedoman Perilaku & Etika Bisnis (CoC)

Pedoman Perilaku PTK termaktub dalam Pedoman COC No. A-002/F1000/2019-S0 Revisi ke-00. Pedoman Kode Etik tersebut dimutakhirkan secara berkala sebagai komitmen perusahaan untuk menjaga etika bisnis perusahaan yang berkesinambungan. Pedoman tersebut berlaku bagi:

1. Insan PTK
2. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama PTK.
3. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya, yaitu badan hukum/usaha

The Code of Conduct is a form of commitment in the context of implementing and enforcing Good Corporate governance and is a set of commitments containing obligations, prohibitions and relationships with other stakeholders. The Code of Conduct regulates the obligations that shall be complied by every employee of the Company.

The company always runs the operational business honestly, ethically, with integrity, and strives to do the best. To support this commitment, PTK has prevailed a code of ethics and business ethics (Code of Conduct) that shall be complied to by all parties in the Company. This was done to maintain the trust of stakeholders, and create sustainable performance growth. The code of conduct refers to a code of professional behavior for all employees of the Company, also the management, including the Board of Commissioners and Directors.

Principles of the Code of Business Conduct & Ethics (CoC)

The CAR Code of Conduct is contained in the COC Guidelines No. A-002/F1000/2019-S0 Revision-0. The Code of Ethics is updated regularly as a commitment of the company to maintain sustainable corporate business ethics. These guidelines apply to:

1. PTK personnel
2. External parties acting for and on behalf of PTK.
3. Subsidiaries and corporate structures under them, namely legal entities/other

lain yang dikendalikan oleh PTK, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Mitra Kerja yang bekerjasama dengan PTK. Secara umum, muatan Kode Etik Perusahaan yang dimiliki PTK adalah sebagai berikut:

businesses controlled by PTK, either directly or indirectly.

4. Partners who cooperate with PTK. In general, the contents of the Company's Code of Ethics owned by PTK are as follows:

Pokok-pokok Pedoman Perilaku

Code of Conducts Contents

Bab Chapter	Uraian Description	
Umum General	• Pendahuluan • Tujuan • Ruang Lingkup • Pengertian • Referensi	• Introduction • Objectives • Scope • Definition • Reference
Visi, Misi dan Tata Nilai Unggulan Perusahaan Vision, Mission and Core Values of the Company	• Visi dan Misi • Tata Nilai Unggulan Perusahaan	• Vision and mission • Core Corporate Values
Prinsip-prinsip GCG, Perilaku Integritas Insan PTK GCG Principles, Integrity Behavior of PTK Personnel	• Integritas • Persaingan Usaha Yang Sehat • Sikap Kerja Profesional	• Integrity • Healthy competition • Professionalism
Persaingan Sehat Fair Competition	• Persaingan Usaha yang Sehat • Proses Pengadaan Penyedia Barang/Jasa • Informasi Penting	• Data and Information Confidentiality • Accounting and Financial Reporting • Archival Management
Kerahasiaan Data dan Transparansi Data Confidentiality and Transparency	• Kerahasiaan Data dan Informasi • Pelaporan Akuntansi dan Keuangan • Pengelolaan Arsip	• Kerahasiaan Data dan Informasi • Pelaporan Akuntansi dan Keuangan • Pengelolaan Arsip
Sikap Profesional Professional Attitude	• Sikap Kerja Profesional • Berani Mengungkapkan Masalah • Pengambilan Keputusan • Hak Kekayaan Intelektual • Menghindari Diskriminasi • Kesempatan Karir yang Sama • Standar Ketenagakerjaan • Bebas Narkoba dan Minuman Keras • Aktivitas Politik • Media Massa • Organisasi Profesi	• Organisasi Profesi • Professional Work Attitude • Courage in Disclosing Any Issues • Decision Making • Intellectual Property Rights • Avoiding Discrimination • Equal Career Opportunity • Free from Drugs and Alcohol Beverages • Political Activity • Mass Media • Organizational Profession
Komitmen Terhadap Pemangku Kepentingan Lainnya. Commitment to Other Stakeholders	• Komitmen Terhadap Pemegang Saham • Komitmen Terhadap Pekerja • Komitmen Terhadap Serikat Pekerja • Komitmen Terhadap Anak Perusahaan	• Commitment to Shareholders • Commitment to Employees • Commitment to Labor Union • Commitment to Subsidiaries

Pokok-pokok Pedoman Perilaku

Code of Conducts Contents

Bab Chapter	Uraian Description
	- Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa - Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator - Komitmen Terhadap Legislatif - Komitmen Terhadap Investor, Kreditur dan Bank - Komitmen Terhadap Mitra Usaha, - Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi - Komitmen Terhadap Kesehatan, - Keselamatan, Keamanan (K3) dan - Lindungan Lingkungan - Komitmen Terhadap Masyarakat - Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial
Whistleblowing System	- Ruang Lingkup - Struktur - Fungsi Pengelola - Saluran Penyampaian Pelaporan

Pengungkapan Pedoman Perilaku

Setiap insan PTK harus memiliki komitmen untuk dapat menyelaraskan diri dengan sistem nilai dan budaya kerja di Perusahaan. Oleh karena itu, seluruh insan PTK wajib menempatkan diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya kerja yang dianut Perusahaan, yang dikodifikasikan dalam *Code of Conduct*. Keberhasilan penerapan *code of conduct* merupakan tanggung jawab dari setiap insan PTK di lingkungan unit kerja masing-masing.

Code of Conduct PTK wajib dilaksanakan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pimpinan Unit sampai dengan pekerja. *Code of Conduct* PTK dilaksanakan secara konsisten sebagai

Code of Conduct Disclosures

Every employee of PTK shall be committed to align with the value system and work culture in the Company. Therefore, all PTK personnel are obliged to adapt to align and unite their beliefs and determination to adopt work attitudes and behaviors in accordance with the value system and work culture adopted by the Company, which are codified in the Code of Conduct. The successful application of the code of conduct is the responsibility of every PTK personnel in each work units.

PTK Code of Conduct shall be implemented starting from the Board of Commissioners, Board of Directors, Unit Heads up to the employees. PTK Code of Conduct is

budaya kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Sosialisasi dan Penegakan Pedoman Perilaku

Perusahaan memastikan bahwa setiap insan PTK mengetahui, memahami, dan menerapkan kode etik baik di lingkungan dalam maupun di lingkungan luar perusahaan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi pedoman CoC bagi seluruh insan Perusahaan. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan internal event kepada seluruh pekerja pada segala tingkatan termasuk tenaga *outsourcing*.

Pada tahun 2021 PTK telah melaksanakan program komunikasi *compliance* diantaranya:

implemented consistently as a work culture in daily operational activities.

Code of Conduct Socialization and Enforcement

The Company ensures that every PTK employee has acknowledged, understood and applied the Code of Conducts inside and outside the company. An initiative to achieve this purpose is through the CoC guidelines socialization for all people of the company. The socialization was carried out by using various media and internal event opportunities to all employees at all levels including the outsourcing personnel.

In 2021 PTK has implemented compliance communication programs including:

No	Program / Kegiatan Program/Activity	Pihak Terkait Relate Parties	Saluran Komunikasi Communication Channel
1	Sosialisasi Ketentuan Gratifikasi dan WBS di PTK pada acara Vendor Day Socialization of Gratuity and WBS Provisions at PTK at the Vendor Day event	Mitra Kerja PTK PTK Partners	Zoom
2	Sosialisasi melalui media tertulis Socialization through printed media	Pekerja & Mitra Kerja PTK Pekerja & Mitra Kerja PTK	Email Broadcast, Poster, Townhall
3	Pengenalan Dewan Komisaris baru Introduction of the new Board of Commissioners	BOC	Slide Presentation Presentation Slide
4	Sosialisasi GCG di Kantor Pusat & Region GCG Socialization at Head Office & Branches	Seluruh Pekerja PTK All PTK Employees	Email/Event Broadcast, Spanduk, Slide Presentasi Email/Event Broadcast, Spanduk, Slide Presentation
5	Sosialisasi GCG di Kapal GCG Socialization on Ship	Seluruh Crew Kapal All Ship Crew	Email/Event Broadcast, Spanduk, Slide Presentasi Email/Event Broadcast, Spanduk, Slide Presentation
6	Sosialisasi Cara Penyampaian LHKPN Socialization of how to submit LHKPN	Wajib Lapor LHKPN Baru Required to Report New LHKPN	Slide Presentasi Presentation Slide
7	Refreshing Cara Penyampaian LHPKN Refreshing How to Submit LHPKN	Wajib Lapor LHKPN Existing Required to Report Existing LHKPN	Slide Presentasi Presentation Slide



No	Program / Kegiatan Program/Activity	Pihak Terkait Relate Parties	Saluran Komunikasi Communication Channel
8	Pemantauan progress pengisian LHKPN Monitoring progress on filling out LHKPN	Wajib Lapo LHKPN Mandatory Report LHKPN	Email/Event Broadcast, wa /telp
9	Persiapan Assessment GCG Tahun Buku 2021 Preparation for the 2021 Fiscal Year GCG Assessment	Fungsi Terkait di PTK Related Functions in PTK	Memo VP Legal & Relation, rapat tatap muka atau melalui rapat online Memo VP Legal & Relations, face-to-face meeting or via online meeting
10	Review/Pembaharuan Pedoman-Pedoman GCG Review/Update of GCG Guidelines	Fungsi Relation Relation Function	Email, Memo

Perilaku Integritas Insan PTK

Selain pedoman CoC, PTK juga memiliki pedoman perilaku integritas. Berikut adalah muatan pedoman perilaku integritas insan PTK:

- Insan PTK mematuhi hukum, peraturan dan undang-undang, baik yang berlaku pada wilayah setempatnya berada/ditugaskan, maupun pada tingkat nasional dan internasional termasuk peraturan internal Perusahaan;
- Insan PTK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu kewajibannya terhadap Perusahaan. Insan PTK menghindari situasi di mana kepentingan pribadi (langsung maupun tidak langsung), aktivitas di luar, atau kepentingan keuangan, bertentangan, tampak bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan kepentingan PTK;
- Insan PTK tidak akan terlibat dalam tindakan suap dan/ atau korupsi, baik sebagai pihak yang memberi maupun sebagai pihak yang menerima dan tidak menawarkan atau menerimanya bila menurut pertimbangan Insan PTK, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan;

Integrity Conduct of PTK Personnel

In addition to the CoC guidelines, CAR also has a code of integrity behavior. The following is the content of the PTK employees' integrity behavior guidelines:

- Personnel of PTK comply with the prevailing laws and regulations in areas they are located/assigned in, or on national and international levels, including the Company's internal regulations.
- Personnel of PTK uphold the responsibility in ensuring personal interest outside work does not interfere with its obligations to the Company. The personnel avoid any situations in which the personal interest (direct and indirect), outside activities, or financial interest, conflict or seem to be conflicted with or have the potentials of conflicting with the interest of PTK.
- Personnel of PTK will not be involved in any bribery and/or corruption, either as provider or recipient, and will not offer or receive it if according to the personnel of PTK the action could impact or gives the impression of impacting decision making.

- Insan PTK tidak mendukung pemberian uang/ fasilitas/ hadiah atau janji kepada petugas pemerintahan atau lembaga pemerintah dengan tujuan memperoleh atau memperpanjang perizinan dan lain sebagainya;
- Setiap peristiwa penipuan, penggelapan dan pencurian yang terjadi di PTK atau yang berkaitan dengan PTK akan segera diselidiki, dilaporkan, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup akan dikenakan hukuman yang pantas;
- PTK memiliki hubungan baik dengan Pusat Pelaporan untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di PTK. Untuk itu, insan PTK tidak mentolerir tindakan pencucian uang yang dilakukan di lingkungan PTK.
- Personnel of PTK provide no support to provision of money/facilities/reward or promises to government officials or government institutions with the aim of obtaining or extending licenses and others.
- Every fraud, embezzlement, and robbery occurred at PTK or has relations to PTK will be investigated, reported, and after completing sufficient investigation appropriate punishment will be charged.
- Personnel of PTK has good relationship with Center of Financial Transaction Reporting and Analysis to jointly prevent and eradicate money laundering at PTK. Therefore, Personnel of PTK does not tolerate any money laundering in PTK environment.

Persaingan Usaha yang Sehat

Dalam menjalankan komitmen sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai GCG, PTK senantiasa menjaga persaingan usaha yang sehat kepada pemangku kepentingan. PTK berkomitmen untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan patuh pada undang-undang antimonopoli dan persaingan sehat di Indonesia dan peraturan setempat dimana PTK menjalankan kegiatan bisnis/ operasionalnya.

Terkait dengan kegiatan bisnis dan persaingan usaha tersebut, seluruh insan PTK harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat, dan hanya melakukan bentuk praktik bisnis yang adil dan etis. Sehingga apabila dalam kegiatan operasionalnya, insan PTK menghadapi tindakan yang mengarah pada pertentangan prinsip persaingan usaha yang sehat diwajibkan melakukan konsultasi dengan fungsi legal atau hukum perusahaan.

Fair Business Competition

In carrying out its commitment as a company that upholds the values of GCG, PTK always maintains fair business competition to stakeholders. PTK is committed to ensuring that the Company's business activities are compliant with antitrust and fair competition laws in Indonesia and local regulations where PTK operates its business/operations.

With regard to business activities and business competition, all PTK employees must be aware of efforts that lead to unfair business competition, and only engage in fair and ethical business practices. So if in its operational activities, PTK people face actions that lead to a conflict of principles of fair business competition, they are required to consult with the legal or legal functions in the company.



Sikap Kerja Profesional

Selain menerapkan pedoman CoC serta pedoman perilaku integritas, insan PTK juga harus membangun sikap profesional yang ditandai dengan sikap-sikap sebagai berikut:

- Dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja, Insan PTK dituntut untuk bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi masukan, solid dan bersinergi untuk mencapai visi dan misi PTK;
- Insan PTK melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan tanggung jawab;
- Sesama Insan PTK tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat;
- Insan PTK berperilaku disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja;
- Insan PTK menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.

Standar Etika Usaha

Standar Etika Usaha mengatur etika Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan, termasuk diantaranya kepada para pekerja, pelanggan, penyedia barang dan jasa (pemasok), kreditur, masyarakat, pesaing, pemerintah, media massa. Penerapan standar etika usaha bertujuan untuk memastikan Perusahaan memenuhi komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Pemenuhan komitmen tersebut tetap dilaksanakan dalam kaidah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Professional Work Attitude

In addition to applying CoC guidelines and integrated behavior guidelines, PTK people shall also develop professional attitudes which are characterized by the following attitudes:

- In interacting with co-workers, Personnel of PTK are required to present mutual trust, sincerity, honesty; and warn each other as well as provide inputs, show strength, able to perform synergy for the achievement of vision and mission of PTK.
- Personnel of PTK performs each work with good intention and full of responsibility.
- Among Personnel of PTK should not pressure or intimidate, humiliate, abuse or provoke, and not cause unfair competition.
- A PTK People shall present discipline behavior, not neglecting any work activities prior to receiving permission from the supervisor, and/or not performing other activities for personal interest or interest of parties outside the Company without permission during the working hours.
- Personnel of PTK keep the confidentiality of documents and information on the Company.

Business Ethic Standard

Business Ethics Standards regulate the Company's ethics toward Stakeholders, including to the employees, customers, goods and services provider (suppliers), creditors, community, competitors, government, and mass media. The implementation of business ethics standards aim to ensure the Company fulfilling its commitments to the stakeholders. The fulfillment of commitment is consistently performed based on the prevailing laws and regulations.

Standar Etika Usaha Terhadap Pemangku Kepentingan

Business Ethics Standards for Stakeholders

	Uraian Description	
Komitmen Terhadap Pemegang Saham Commitment to Shareholders	PTK berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (<i>shareholder value</i>) seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan, dan kepentingan lain dari pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	PTK strives to optimally and continuously increase shareholder value, such as level of profit, growth rate, and other interests of the shareholders as per the prevailing laws and regulations
Komitmen Terhadap Pekerja Commitment to Employees	PTK menghargai pekerja sebagai aset Perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, suku, hambatan fisik, gender, dan usia, yang kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten. PTK memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan Perusahaan	PTK respects employees as assets of the Company without discriminating race, skin color, religion, ethnicity, physical challenges, gender, and age, as well as those which capacity should be honed through education and training consistently. PTK gives rewards to outstanding employees, and imposes strict sanctions to individuals who are negligent about their duties, or violate the Company's provisions
Komitmen Terhadap Serikat Pekerja Commitment to Labor Union	PTK menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dalam usaha mencapai tujuan Perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.	PTK places Labor Union as the Company's partner in its endeavors to achieve the Company's objectives for dynamic and harmonious industrial relationship.
Komitmen Terhadap Anak Perusahaan Commitment to Subsidiaries	Hubungan kerjasama dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan (perusahaan afiliasi) ditujukan untuk membangun sinergi dan citra yang lebih baik juga agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.	Cooperative relationship with subsidiaries and joint ventures (affiliations) is aimed to build better synergy and image as well as to increase the Company's performance.
Komitmen Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Commitment to Goods and Services Provider	PTK memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang/jasa atau rekanan sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi Perusahaan. PTK melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. PTK menghindari bisnis dengan penyedia barang/jasa atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan atau Perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme	PTK maintains good communication with goods/services provider or partners as strategic partners with a role of guaranteeing the availability of goods and services supply required for the Company's operation continuity. PTK performs transparent goods and services procurement as per the prevailing provisions. Moreover, the Company avoids business with goods/services provider or partners which may have conflict of interest with officials and/or the Company that may have an indication of causing corruption, collusion, and nepotism



Standar Etika Usaha Terhadap Pemangku Kepentingan

Business Ethics Standards for Stakeholders

	Uraian Description	
Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator Commitment to Government as Regulator	PTK mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. PTK mendukung program nasional maupun regional khususnya dibidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.	PTK complies with and support laws and regulations related to the Company's operation, including adherence to tax payment, retribution, employment and environment issues. The Company supports national and regional programs, especially in technology, education, social, economy, and culture
Komitmen Terhadap Legislatif Commitment to Legislative	PTK menyediakan informasi yang relevan tentang Perusahaan bagi legislatif dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. PTK memperhatikan dan memberikan respon terhadap masukan dari legislatif yang membawa kepentingan masyarakat luas sesuai kepentingan dan kemampuan Perusahaan	PTK provides relevant information on the Company for legislative by continuously referring to the prevailing provisions. The Company observes and provides response to any inputs from the legislative that may aspire the community interest in accordance with the Company's interest and capability
Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Commitment to Business Partners, Research Facilities, and Universities	PTK melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha strategis yang resmi dan memiliki reputasi yang baik. Menjamin akurasi informasi layanan dan produk yang akan dipasarkan oleh mitra usaha strategis	PTK exerts its efforts in security toward investments conducted by investors through optimal investment return. The Company is also committed to provide transparent information on the Company's condition to the creditors and bank
Komitmen terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lingkungan Commitment to Health, Safety, Security and Environment (HSSE)	Merupakan tanggung jawab PTK untuk menciptakan tempat bekerja yang aman dan sehat serta menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja yang sesuai bagi semua Insan PTK dan kontraktor untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera dan wabah penyakit di tempat kerja. PTK akan melakukan kegiatannya dengan memperhatikan lingkungan. PTK menggunakan sumber daya energi dan sumber daya alam secara efisien serta berusaha mencegah terjadinya polusi terhadap lingkungan.	A form of responsibility for PTK in creating a safe and healthy work environment, as well as providing appropriate work equipment and protection for all Personnel of PTK and contractors to prevent accidents, injuries, and infectious diseases in the workplace. PTK will perform its activities by paying Attention to environmental protection. Moreover, the Company uses energy and natural resources efficiently as well as strives to prevent pollution toward the environment

Standar Etika Usaha Terhadap Pemangku Kepentingan

Business Ethics Standards for Stakeholders

	Uraian Description	
Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial	PTK menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/ operasionalnya.	PTK expects its presence could contribute the utmost benefits to the community residing around the locations in which it performs its business/operational

Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik

Seluruh insan PTK wajib mematuhi Kode Etik. Pelanggaran terhadap Kode Etik, etika bisnis yang berlaku atau undang-undang, akan dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat ditolerir dan akan dikenai tindakan pendisiplinan. Hal ini juga bisa mengakibatkan pemberian hukuman atau sanksi bagi setiap pelanggarnya.

Terkait kepatuhan terhadap kode etik, etika bisnis, dan peraturan yang berlaku, PTK memiliki Chief Compliance Officer (CCO) yang melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan praktek-praktek GCG. Sehingga apabila terdapat pelanggaran terhadap pedoman perilaku perusahaan akan ditindaklanjuti oleh CCO, yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan. Manajemen puncak (Direksi atau Dewan Komisaris) akan memutuskan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung Insan PTK yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan diberikan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan lainnya yang

Punishment For Code Of Conduct Violation

All of PTK People shall comply with the Code of Ethics. Violations against the Code of Ethics, prevailing business ethics or the law, will be considered as intolerable behavior and will result in disciplinary punishment. This may also result in the imposition of penalties or sanctions for each violator.

In terms of compliance with the code of ethics, business ethics, and applicable regulations, CAR has a compliance monitoring function, the Chief Compliance Officer (CCO). Therefore, in the case of violation against the company's code of conduct, it will be followed up by the CCO, which will provide the results of its study to the top management of the Company. The top management (the Board of Directors or the Board of Commissioners) will decide on corrective actions or preventive actions that must be carried out by the direct supervisor of PTK's employees who are proven to have committed violations.

Sanctions to the performed violations are aligned with the provisions in Joint Working Agreement (PKB) and other prevailing



berlaku di Perusahaan. Namun, PTK juga menghormati hak membela diri dari Insan PTK yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Pedoman Perilaku sebagai Kode Etik, mulai dari teguran tertulis, pemberian surat peringatan, penurunan golongan upah sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Evaluasi Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

PTK terus berupaya untuk membenahi dan memperbaiki agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berbagai metode sosialisasi terus digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap individu. Upaya ini dilakukan dengan menyempurnakan code of conduct agar berlaku efektif dan implementatif.

Pada tahun 2021, Keberadaan *code of conduct* di PTK semakin baik dengan terus didorong oleh peningkatan kesadaran baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan. Hal tersebut seiring dengan dilakukannya upaya-upaya yang konsisten dan berkesinambungan sosialisasi terhadap *code of conduct* tersebut melalui berbagai media di antaranya dengan pemasangan banner ditempat-tempat umum dan sosialisasi lainnya. Selain itu adanya peningkatan laporan juga dapat berarti bahwa pihak eksternal dan internal Perusahaan semakin mempercayai kredibilitas dan independensi pengelolaan *code of conduct*.

provisions at the Company. PTK respects self-defense rights displayed by Personnel of PTK who allegedly perform violations and accept the explanation to be taken as a consideration in determining the form of disciplinary consequences. The sanctions imposed in the violation of Behavior Manual as Code of Conduct starting from written warning, warning letter, salary grade demotion up to work termination.

Evaluation on the Whistleblowing System Management

PTK continues to strive to prepare and improve so that it can run effectively and efficiently. Various methods of socialization are continuously used to increase understanding and awareness of each individual. This effort was made by improving the code of conduct to make it effective and can be implemented.

In 2021, the existence of the code of conduct in PTK will be getting better and is continuously driven by increased awareness from both internal and external parties of the Company. This is in line with the consistent and continuous efforts to socialize the code of conduct through various media, including the installation of banners in public places and other socializations. In addition, an increase in reports may also mean that external and internal parties of the Company are increasingly trusting in the credibility and independence of managing the code of conduct.

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen PTK berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan Code of Conduct dan budaya kerja. Oleh karena itu, PTK telah membangun kebijakan *Whistleblowing System* (WBS).

In order to increase the effectiveness of GCG implementation, PTK management is committed to run the company professionally based on company behavior in accordance with the Code of Conduct and work culture. Therefore, PTK has developed a Whistleblowing System (WBS) policy.

Whistleblowing System menjadi bagian dalam implementasi GCG yang cukup penting dalam menekan pelanggaran yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, inisiatif penerapan WBS di lingkungan PTK telah dimulai oleh manajemen puncak Perusahaan dan untuk menunjukkan komitmen Perusahaan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PTK senantiasa melakukan pemutakhiran pedoman maupun mekanisme penerapannya.

Whistleblowing System is an important part of GCG implementation to minimize any violations potential. Therefore, the initiative to implement WBS within the PTK environment has been initiated by the top management of the Company and to demonstrate the Company's commitment to Good Corporate Governance, PTK is constantly updating the WBS guidelines and implementation mechanisms.

Dasar Kebijakan dan Ruang Lingkup WBS

Sebagai bagian dalam membangun *Fraud Control System* (FCS), PTK telah menyusun pedoman pelaporan pelanggaran dan penanganannya, yakni berdasarkan Keputusan Direksi No. B-001/PTK0320/2021-S0 (Revisi ke 0). Kebijakan ini melengkapi landasan-landasan FCS lain yang ada saat ini. Landasan tersebut berupa Pedoman Perilaku PTK dan menjadi landasan utama sistem pelaporan pelanggaran yang diterapkan oleh PTK yang merupakan sistem dalam mengelola pengaduan/ penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia,

WBS Policy Framework and Scope

As part of building the Fraud Control System (FCS), PTK has prepared guidelines for reporting violations and their handling, such as according to Board of Directors Decree No. Psd 015/F1000/2016-S0 (Revision 00). This policy complements the foundations of other current FCSs. The basis is formulated as PTK Code of Conduct and is the main basis for the violation reporting system implemented by the PTK which is a system for managing complaints/ disclosures regarding unlawful behavior, unethical/improper actions in a confidential, anonymous and independent manner which is used to optimize the participation of PTK



anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan PTK dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PTK.

personnel. and partners in exposing violations that occur within the PTK environment.

Lingkup kebijakan WBS PTK mencakup pelaporan terhadap perbuatan pelanggaran diantaranya:

The scope of the PTK WBS policy includes reporting of violations including:

Bentuk Pelanggaran Forms of Legal Violation	Keterangan Description
Korupsi Corruption	Adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PTK, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan perusahaan. Actions that are committed fraudulently or against the law by the Board of Commissioners, Directors, Management, and Employees who work for and on behalf of PTK, against the interest of the Company or abuse of authority/trust entrusted to the individual with the purpose of enriching one self, or other people, or corporate that may bring loss to the company.
Suap Bribery	Adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi. Any actions committed by an individual in the form of bribe money/bribery/giving money or promises that are given or received in any form to someone who has influence or has relations with its position, aiming to satisfy personal or corporate interest.
Pencurian Theft	Adalah mengambil barang atau sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau perusahaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Actions of taking something, as a whole or partially that belongs to other people or the company with the intention of owning it by violating the law.
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Adalah sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadinya A situation in which an individual is confronted with different interests, between personal or the company's interest causing the individual to choose and prioritize the company's interest over his or her personal interest.
Kecurangan Fraud	Adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain Dishonest or deceitful actions, including fraud, extortion, forgery, concealment or destruction of documents/reports or use false documents, conducted by an individual/a group of people that may cause potential loss or any real losses toward the company or other people.

Struktur Pengelola

Pihak yang mengelola Laporan pelanggaran di PTK adalah Fungsi Penerima Laporan yang merupakan pihak Internal Perusahaan. Fungsi Penerima Laporan melakukan analisis laporan untuk pengumpulan bukti dan informasi. Hasil analisis tersebut disampaikan kepada pihak atau fungsi yang berwenang sesuai dengan peraturan Perusahaan untuk penetapan dan pemberian sanksi.

- Direktur Utama dan Direksi lainnya
- *Chief Compliance Officer* (CCO)
- Pejabat Berwenang Terkait
- Dewan Komisaris
- Pelapor
- Terlapor
- Tim WBS
- Tim Investigasi

Fungsi Pengelola Whistleblowing System

Fungsi atau tugas pengelola WBS perusahaan adalah sebagai berikut:

- Memfasilitasi mekanisme penyampaian laporan dugaan pelanggaran untuk segera ditangani;
- Memfasilitasi mekanisme deteksi dini untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran;
- Mendorong seluruh pekerja berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran tanpa takut diketahui identitasnya;
- Meminimalkan risiko keuangan dan risiko non keuangan dalam menangani tindak pelanggaran;
- Mengidentifikasi kelemahan sistem kontrol internal untuk dilakukan perbaikan.

Management Structure

The party that manages the violation report in the PTK is the Report Recipient Function which is an Internal Company of the Company. The Report Recipient function performs report analysis for gathering evidence and information. The results of the analysis are submitted to the authorized party or function in accordance with Company regulations for the determination and imposition of sanctions.

- President Director and other Directors
- Chief Compliance Officer (CCO)
- Related Authorities
- Board of Commissioners
- Reporters
- Reported Party
- WBS Team
- Investigation team

WBS Manager Function

The functions or tasks of a company WBS manager are as follows:

- Facilitating the mechanism for submitting reports of alleged violations to be addressed immediately;
- Facilitating early detection mechanisms to minimize the occurrence of violations;
- Encouraging all employees to report violations without fear of being identified;
- Minimizing financial risks and non-financial risks in handling violations;
- Identify weaknesses in the internal control system for improvement.



Prinsip Pelaporan Pelanggaran

WBS Reporting Principles

Prinsip Pelaporan WBS

WBS Reporting Principles

Prinsip Principles	Uraian Description	
Rahasia Confidential	Prinsip ini mencakup: 1. Perlindungan terhadap identitas pelapor; 2. Perlindungan terhadap pelaksana investigasi dan pelapor; 3. Hanya pihak-pihak terbatas/ tertentu yang mengetahui; 4. Penerapan azas praduga tidak bersalah.	This principle includes: 1. Protection against the identity of the reporter; 2. Protection against executor and investigator reporter; 3. Only limited parties/certain who knows; 4. Application of the principle of presumption not guilty.
Anonim Anonymous	1. Prinsip ini mencakup menjamin adanya kemungkinan untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor. 2. Hal tersebut memberikan jaminan rasa aman kepada pelapor.	1. This principle includes guaranteeing the possibility for not reveal identity reporter. 2. That gives guarantee of security to reporter.
Independen Independent	1. WBS PT Pertamina Trans Kontinental dikelola secara profesional; 2. Pengaduan yang ditindaklanjuti hanya yang memenuhi kriteria; 3. Tidak dimungkinkan untuk terjadinya intervensi terhadap laporan.	1. WBS PT Pertamina Trans Kontinental is managed professionally; 2. Complaints that are followed up are only those that meet the criteria; 3. It is not possible to intervene in the report.

Penyampaian Pelaporan Whistleblowing System

PTK menyediakan beberapa saluran untuk penyampaian pelaporan pelanggaran.

TELEPON	+62 21 31923005
FAKSIMILI	+62 21 3106804
EMAIL	ptkpusat@ptk-shipping.com
SMS	+62 812 1989 1000
WEB	www.ptk-shipping.com

Submission of Whistleblowing System Reporting

PTK provides a channel for the delivery of reporting.

PHONE	+62 21 31923005
FAX	+62 21 3106804
EMAIL	ptkpusat@ptk-shipping.com
SMS	+62 812 1989 1000
WEB	www.ptk-shipping.com

Mekanisme Whistleblowing System

Mekanisme penyaluran pengaduan/penyingkapan oleh pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung, direktorat dan fungsi terkait. Bila Pelapor memandang sarana pengaduan/penyingkapan tidak efektif atau ada keraguan, Pelapor dapat menyalurkan pengaduan/penyingkapan melalui WBS.

Prosedur WBS adalah sebagai berikut:

- Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada pengelola WBS melalui sarana/media yang telah ditentukan.
- Tim WBS menerima pengaduan/penyingkapan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan:
 - Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan.
 - Laporan penyingkapan (*disclosure report*).
- Memasukkan Laporan penyingkapan ke dalam e-Room yang hanya dapat diakses oleh Tim WBS dan *Chief Compliance Officer*.
- Tim WBS menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) kepada *Chief Compliance Officer*/Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai kategori Terlapor).
- Tim WBS melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan tersebut dan membuat resuménya. Kemudian mempresentasikan kepada *Chief Executive Officer*. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, *Chief Compliance Officer* memutuskan tindak lanjut:
 - Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
 - Bekerja sama dengan eksternal Investigator jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/

Whistleblowing System Mechanism

The mechanism of report/disclosure flow by the whistleblower is basically conducted through formal channel, namely direct supervisor, directorate and related functions. If the Whistleblower views the report/disclosure facility is ineffective or causes doubts, the Whistleblower could submit the report/disclosure through WBS.

The WBS procedure is as follows:

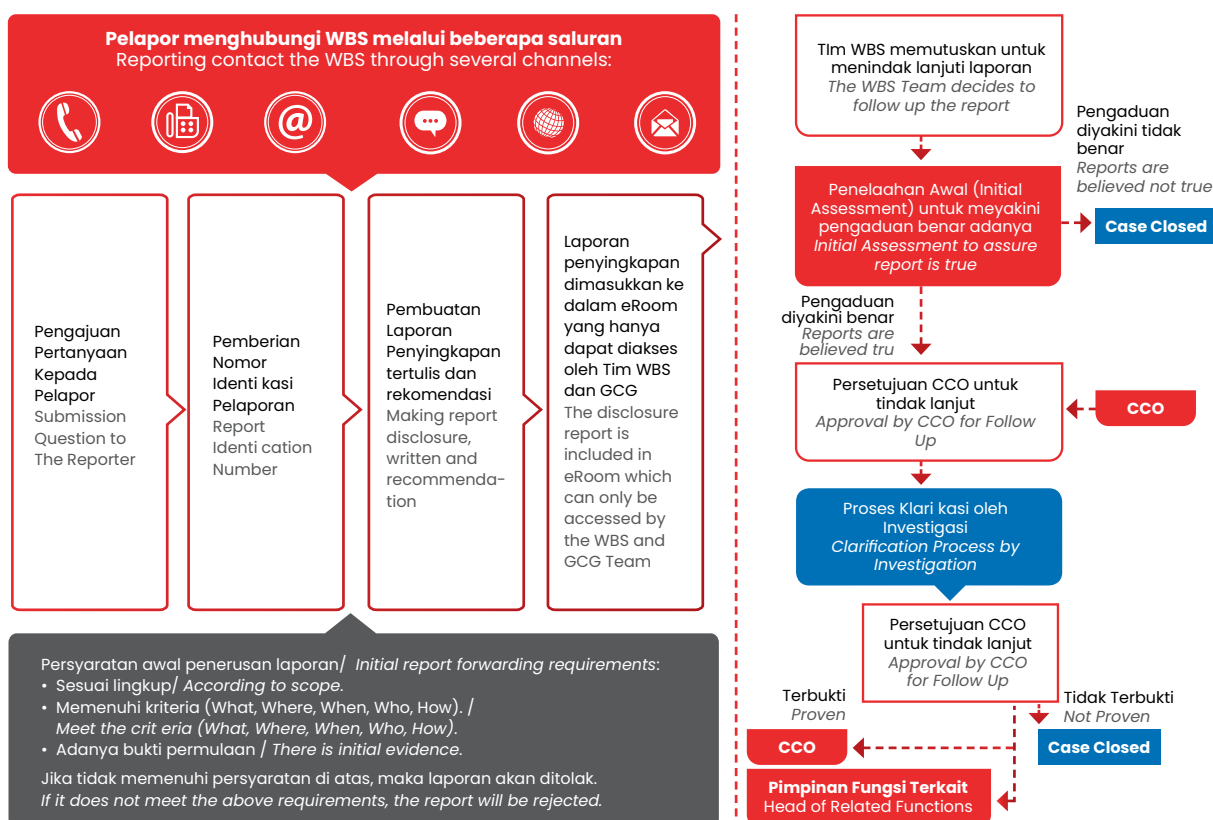
- Whistleblower establishes a report/disclosure and submits it to WBS manager through the determined means/media.
- WBS Team receives the report/disclosure, records, and prepares it in a standard format, generating:
 - Contact acceptance report in accordance with the scope of report category.
 - Disclosure report.
- Transferring the disclosure report into e-Room that could only be accessed by WBS Team and Chief Compliance Officer.
- WBS Team submits the disclosure report to Chief Compliance Officer/Board of Commissioners/President Director (in accordance with the Offender category).
- WBS Team performs initial analysis/clarification on the report and develops si resumé. Afterward it is to be presented to Chief Executive Officer. Based on the presentation results, Chief Compliance Officer decides the follow up:
 - Suspended, if it does not meet the requirements of initial indication
 - Cooperating with an external investigator if the substance of report/disclosure is related to PTK image/

reputasi PTK dan/atau menimbulkan kerugian besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti Internal Audit.

- Bekerja sama dengan Internal Audit dan/ atau Sekuriti sesuai substansi.
- Pengaduan/penyingkapan dilakukan Tim WBS atas justifikasi dan penunjukan dari *Chief Compliance Officer*.
- Tim investigasi melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada *Chief Compliance Officer*.
- Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Chief Compliance Officer memutuskan.

reputation and/or may cause huge loss and/or has never been followed up by Internal Audit.

- Cooperating with Internal Audit and/ or Security in accordance with the substance.
- Report/disclosure is conducted by WBS Team on the justifications and appointment from Chief Compliance Officer.
- The Investment Team conducts an investigation and presents the results to the Chief Compliance Officer.
- Based on the results of the presentation, the Chief Compliance Officer decided.



Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Apabila ada laporan yang masuk ke dalam *Whistleblowing System* akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi yang tegas dan

Violation Report Processing

If there is any report submitted through the *Whistleblowing System*, the report will be followed up with the strict and consistent

konsisten jika terbukti bersalah, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran maupun pihak lain yang memiliki niat melakukan pelanggaran. Terkait penanganan pelaporan pelanggaran telah tertuang dalam mekanisme *Whistleblowing System*.

Perlindungan Bagi Pelapor

Setiap Pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak wajar, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan *Personal File Record*.

Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum jika diperlukan, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 UU No. 15 tahun 2002 jo. UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengelola WBS dilarang mengungkapkan identitas Pelapor. Apabila dalam faktanya bahwa identitas pelapor perlu diungkapkan atau tidak disembunyikan sebagaimana diperlukan oleh undang-undang dan proses peradilan atau dalam rangka diperlukannya pengambilan tindakan yang sesuai, maka Pengelola WBS wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Pelapor secara tertulis. Perlindungan terhadap Pelapor dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran yang disampaikan memenuhi kriteria, yaitu informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan telah terjadi dan dapat dipercaya/ valid (setelah dilakukan verifikasi

punishment if proven guilty, thereby will give a deterrent effect for violators or other parties who have the intention to commit violations. With regards to the violation report processing, the procedure has been disclosed in the Whistleblowing System mechanism.

Protection for Whistleblower

Every whistleblower will receive protection from the Company against any adverse treatment such as improper dismissal, demotion or rank, harassment or discrimination in all its forms, and records which is detrimental to the Personal File Record.

The Company will also provide legal protection if necessary, in line with what is regulated in article 43 of Law No. 15 of 2002 jo. UU No. 25 of 2003 concerning the Money Laundering Crime and Article 13 of Law No. 13 of 2006 on Witness and Victim Protection, and Article 5 PP No. 57 of 2003 concerning Protection Procedures Especially for Reporters and Witnesses in Criminal Acts Money laundering.

WBS managers are prohibited from disclosing identity of the Whistleblowers. If, factually, identity of the whistleblowers need to be disclosed or not withheld as required by law and judicial process or in the context of its need taking appropriate action, the WBS Manager shall further ask for approval in advance to the Whistleblower through written letter. Protection to the Whistleblower is carried out when reporting the violations submitted meet the criteria, namely information and/or violations submitted has occurred and can be trusted/valid (after verification by the Manager WBS). Protection criteria for whistleblowers are mandatory to be fulfilled, in order to avoid

oleh Pengelola WBS). Kriteria perlindungan terhadap Pelapor wajib dipenuhi, dalam rangka menghindarkan adanya laporan palsu, fitnah, bersifat mengada-ada atau tidak beritikad baik.

Selain itu, PTK juga memberikan perlindungan kepada terlapor, sebab Perusahaan juga mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme dalam rangka melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan.

fake reports, slander, fabricated or not in good faith.

In addition, PTK also provides protection to reported, because the Company also uphold confidentiality, the presumption of innocence and professionalism policies in order to carry out the report follow-up process.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pelaporan pelanggaran dari eksternal maupun internal melalui WBS.

Total Violation Report

In 2021, there was no violation report submitted by external and internal parties through the WBS.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran
Number of Complaints of Violation

Status Laporan Report Status	2021	2020	2019	2018
Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti Complaints that can be followed up	0	0	1	0
Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti Complaints that cannot be followed up	0	0	0	0
Jumlah pengaduan/pelaporan Number of complaints/reports	0	0	1	0

Sosialisasi dan Evaluasi

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan sosialisasi WBS melalui media wallpaper yang ada di dalam desktop seluruh pekerja dan seluruh pekerja dapat menyalurkan pengaduan melalui WBS. Sosialisasi WBS akan terus dilakukan secara berjenjang dan bertahap kepada seluruh *stakeholder* dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan WBS.

Socialization and Evaluation

In 2021, the Company will socialize the WBS through the media wallpaper on the desktops of all workers and all workers can channel complaints through the WBS. WBS socialization will continue to be carried out in stages and gradually to all stakeholders in order to increase the effectiveness of WBS implementation.

Sanksi Terhadap Pelanggaran

Perusahaan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif. Hal tersebut tercantum pada Tata Kerja Organisasi Pengelolaan WBS No. B-008/F1000/2019-SO Juni 2019.

Praktik Bad Governance

Sepanjang tahun 2021, tidak ditemukan adanya kegiatan atau indikasi yang mengarah pada praktik *bad corporate governance* di lingkungan Perusahaan yang dinilai dapat mengganggu sistem penerapan GCG dan menimbulkan risiko reputasi ataupun risiko lainnya di kemudian hari, sebagaimana tabel di bawah ini:

Praktik Bad Governance

Bad Governance Practice

Keterangan Description		Praktik Practices
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	There are reports of companies that pollute the environment	Nihil None
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Important cases currently faced by the company, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently serving are not disclosed in the Annual Report.	Nihil None
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Non-compliance in fulfilling tax obligations	Nihil None
Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	The inconsistency in the presentation of annual reports and financial reports with the applicable regulations and Indonesian GAAP	Nihil None
Kasus terkait Buruh dan Pekerja	Cases related to Labor and Employees	Nihil None
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan	There is no disclosure of operating segments at the company	Nihil None
Terdapat Ketidak sesuaian antara LT Hardcopy dengan LT Softcopy	Inconformity between Hardcopy and Softcopy Annual Report	Nihil None

Sanctions Against Violations

The company provides sanctions in accordance with applicable regulations, if proven and related to administrative actions. This is stated in the WBS Management Organization Work Procedure No. B-008/F1000/2019-SO June 2019.

Bad Governance Practices

Throughout 2021, there were no activities or indications that led to bad corporate governance practices in the Company's environment which were deemed to disrupt the GCG implementation system and cause reputational or other risks in the future, as in the table below:



Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Inventory Management for Goods and Services Procurement

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PTK mengacu pada:

The implementation of the goods and services procurement in the PTK refers to:

No	Subject Subject	Judul Title	No. Agenda	Berlaku Validity
1	Pedoman Guidelines	Pengadaan Barang / Jasa PTK Procurement of PTK goods/ services	A-001/PTK3300/2021-S9	24 Nov 2021
2	Pedoman Guidelines	Pengadaan Jasa Sewa Kapal Procurement of Boat Rental Services	A-002/PTK3300/2021-S9	15 Des 2021
3	Pedoman Guidelines	Pengelolaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Management of the Use of Domestic Products (P3DN)	A5-001/R0000/2020-S9 (Ratifikasi)	23 Des 2021
4	Tata Kerja Organisasi (TKO) Organizational Work Procedure	Pengadaan Barang / Jasa Dalam Keadaan Darurat Procurement of Goods/Services in an Emergency	B-001/PTK3320/2021-S9	17 Des 2021
5	Tata Kerja Organisasi (TKO) Organizational Work Procedure	Pelaksanaan Registrasi dan Update Data Penyedia Barang / Jasa Implementation of Registration and Data Update of Goods/ Services Providers	B-002/PTK3320/2021-S9	17 Des 2021
6	Tata Kerja Organisasi (TKO) Organizational Work Procedure	Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Goods/Services Procurement Planning	B-003/PTK3320/2021-S9	17 Des 2021
7	Tata Kerja Organisasi (TKO) Organizational Work Procedure	Pelaksanaan Pemilihan Penyediaan Barang / Jasa Implementation of the Selection of the Provision of Goods/ Services	B-004/PTK3320/2021-S9	17 Des 2021
8	Tata Kerja Organisasi (TKO) Organizational Work Procedure	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang / Jasa Implementation of Performance Assessment and Correction of Sanctions to Goods/Services Providers	B-005/PTK3320/2021-S9	17 Des 2021
9	Tata Kerja Organisasi (TKO) Organizational Work Procedure	Pemeriksaan dan Penerimaan Barang / Material Inspection and Receipt of Goods/Materials	B-006/PTK3320/2021-S9	17 Des 2021
10	Tata Kerja Individu (TKI) Individual Work Procedure	Pelaksanaan Negosiasi Secara Manual Implementation of Negotiations Manually	C-001/PTK3320/2021-S9	17 Des 2021

No	Subject Subject	Judul Title	No. Agenda	Berlaku Validity
11	Tata Kerja Individu (TKI) Individual Work Procedure	Pembuatan Owner Estimate / Harga Perhitungan Sendiri Making Owner Estimate/Self Calculation Price	C-002/PTK3320/2021-S9	17 Des 2021
12	Tata Kerja Organisasi (TKO) Organizational Work Procedure	Pelaksanaan Penerbitan Kontrak Dan Amandemen Kontrak Execution of Contract Issuance and Contract Amendment	B-001/PTK3320/2022-S9	06 Jan 2022
13	QHSSE-MS(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) dan ISO 37001:2016			

Prinsip Pengadaan barang/jasa

Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan 12 (dua belas) prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Adil

Berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

2. Akuntabel

Berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;

3. Bertanggung jawab

Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;

4. Berwawasan HSE

Berarti memenuhi dan memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan;

5. Efektif

Berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat

Principles of Procurement of Goods/Services

In the process of implementing the procurement of goods/services, 12 (twelve) principles are used, as follows:

1. Fair

Means that it is not discriminatory in giving treatment to all potential providers of goods/services and does not lead to providing benefits to certain parties, in any way and or for any reason;

2. Accountable

Means that it must achieve the target and be accountable so that it keeps away from potential abuse and irregularities;

3. Responsible

Means achieving physical, financial and beneficial goals for the smooth running of the business in accordance with the principles and policies as well as the applicable provisions in the procurement of goods/services;

4. Having HSE insight

Means fulfilling and paying attention to occupational health and safety aspects as well as environmental protection;

5. Effective

Means that it must be in accordance with the needs that have been determined

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan;

6. Efisien

Berarti diusahakan dengan menggunakan dana, daya, fasilitas yang sekecil-kecilnya, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

7. Integritas

Berarti pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan;

8. Kehati-hatian

berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi atau tindakan atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan immaterial terhadap Perusahaan selama proses pengadaan, proses pelaksanaan/pekerjaan, dan paska pelaksanaan pekerjaan;

9. Kemandirian

Berarti suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Kompetitif

Berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

11. Penerapan GCG

Berarti menjalankan prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha, sehingga perusahaan dapat dijalankan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan;

and can provide the maximum benefit in accordance with the objectives set by the Company;

6. Efficient

Means that it is managed by using the smallest amount of funds, power, facilities to achieve the targets set in the shortest time and can be accounted for;

7. Integrity

Means that the implementation of the procurement of goods/services must be fully committed to meeting procurement ethics;

8. Prudence

Means always paying attention to or should suspect any information or action or form as a precautionary measure to avoid material and immaterial losses to the Company during the procurement process, execution/work process, and post-work implementation;

9. Independency

Means a condition in which the procurement of goods/services is professionally managed without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the prevailing laws and regulations;

10. Competitive

Means that it must be carried out through healthy selection and competition among providers of equal goods/services and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures;

11. Implementation of GCG

Means implementing the principles that underlie a company management process and mechanism based on laws and regulations and business ethics, so that the company can run properly and be accountable to all stakeholders;

12. Transparan

Berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administrasi termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan penyedia barang/jasa harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa.

Kriteria Utama & Ukuran Kinerja Excellent

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menjadi kriteria Utama dan ukuran kinerja selaku Pelaku Pengadaan barang/jasa, antara lain:

1. Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan SLA.
2. Pengiriman barang & Penyelesaian Pekerjaan Tepat waktu dan kualitas terjamin atau sesuai dengan apa yang diinginkan Fungsi Peminta Pengadaan.
3. Pekerja di Fungsi Pengadaan melaksanakan Prinsip Pengadaan Barang/jasa dengan baik Plus ditambah dengan nilai AKHLAK.
4. Saving Cost dari pengadaan barang & jasa.

Struktur Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di PTK dikelola oleh Fungsi Procurement berada dibawah Direktorat Keuangan dan SDM yang diuraikan dalam bagan di bawah ini;

12. Transparant

Means that all provisions and information, both technical and administrative, including procedures for evaluation, results of evaluation and determination of providers of goods/services must be open to providers of goods/services.

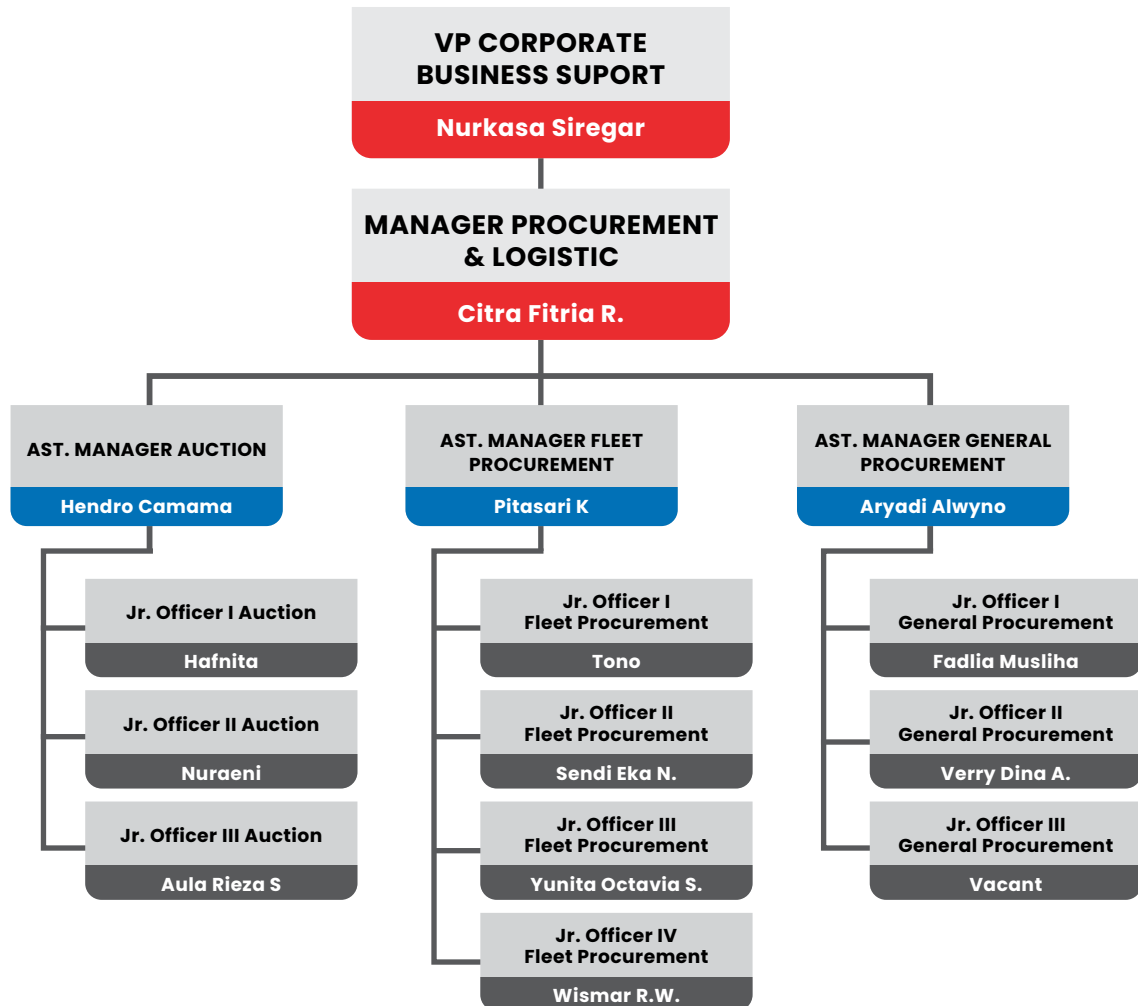
Main Criteria & Measures for Excellent Performance

In the implementation of the procurement of goods/services, the main criteria and performance measures as actors in the procurement of goods/services are, among others:

1. Carry out work in accordance with SLA
2. Delivery of goods & Completion of Work On time and guaranteed quality or in accordance with what is desired Procurement Request Function
3. Workers in the Procurement Function carry out the Principles of Procurement of Goods/ Services well plus the value of AKHLAK
4. Saving Cost from procurement of goods & services

Structure of Goods and Services Procurement Management

The goods and services procurement in PTK is managed by the Procurement Function under the Directorate of Finance and Human Resources which is described in the chart below.



Adapun Job desk Fungsi Procurement adalah sebagai berikut:

The main duties and responsibilities of the Procurement Function are as follows:

Auction	Fleet Procurement	General Procurement
Melaksanakan proses Pendaftaran Rekanan (SKT) serta mengevaluasi dokumen administrasi rekanan dan menentukan atau memilih penyedia barang/jasa sesuai pedoman barang/jasa Carry out the Partner Registration process (SKT) and evaluate the administrative documents of partners and determine or choose a provider of goods/services according to the guidelines for goods/services	Melaksanakan proses pengadaan manual /Auction serta memilih penyedia barang/jasa melalui proses tender untuk seluruh permintaan pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan kapal milik (kapal) dan Kapal-kapal Ringan Milik Pertamina (kapal) Carry out manual procurement process/Auction and select goods/services providers through a tender process for all requests for procurement of goods/services related to owned vessels (ships) and Pertamina's Light Vessels (ships)	Melaksanakan proses pengadaan manual /Auction serta memilih penyedia barang/jasa melalui proses tender untuk seluruh permintaan pengadaan barang/jasa oleh fungsi pengguna (diluar kebutuhan fleet/kapal) Carry out manual/auction procurement processes as well as select providers of goods/services through a tender process for all requests for procurement of goods/services by user functions (excluding fleet/ship needs)

Auction	Fleet Procurement	General Procurement
Melaksanakan Monitoring dan Pemberitahuan Informasi ke Penyedia barang/jasa melalui surat atau email untuk melaksanakan perpanjangan SKT & CSMS yang telah berakhir Jangka Waktunya. Carry out Monitoring and Notification of Information to providers of goods/services by letter or email to carry out the extension of SKT & CSMS which has expired	Mengevaluasi, mengusulkan dan menginput proses pengadaan di sistem E-Proc untuk seluruh permintaan pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan kapal milik (kapal) dan Kapal-kapal Ringan Milik Pertamina (kapal) Evaluate, propose and input the procurement process in the E-Proc system for all requests for procurement of goods/services related to owned vessels (ships) and Pertamina's Light Vessels (ships)	Mengevaluasi, mengusulkan dan menginput proses pengadaan di sistem E-Proc untuk seluruh permintaan pengadaan barang/jasa oleh fungsi pengguna (diluar kebutuhan fleet/kapal) Evaluate, propose and input the procurement process in the E-Proc system for all requests for procurement of goods/services by user functions (excluding fleet/ship needs)
Mengevaluasi penyedia barang/jasa atas pengadaan/ pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu dan pembuatan laporan kinerja penyedia barang/jasa Evaluating goods/service providers for procurement/ work that has been carried out for a certain period and making reports on the performance of goods/services providers	Melaksanakan proses pengadaan manual /Auction serta memilih penyedia barang/jasa melalui proses tender untuk permintaan pengadaan Jasa Sewa Kapal Carry out manual/Auction procurement processes and choose goods/services providers through a tender process for requests for procurement of Vessel Rental Services	Merencanakan terhadap kebutuhan dari fungsi pengguna untuk dilaksanakan kontrak payung dan melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak yang telah dilaksanakan Planning for the needs of user functions to carry out umbrella contracts and evaluating the contracts that have been implemented
Melaksanakan Monitoring dan Pemberitahuan Informasi Teguran/Sanksi kepada penyedia barang/jasa yang tidak mematuhi aturan/pedoman barang/jasa. Carry out Monitoring and Notification of Information on Reprimand/Sanctions to providers of goods/services who do not comply with the rules/guidelines for goods/services	Mengadakan koordinasi & monitoring dengan Fungsi Pengguna atas penyerahan barang/jasa yang dikirim/ dikerjakan oleh penyedia barang/jasa guna memastikan barang/jasa dapat diterima sesuai dengan kebutuhan (spesifikasi, kualitas, kuantitas dan tepat waktu). Coordinate & monitor with the User Function on the delivery of goods/ services sent/done by the provider of goods/services to ensure goods/ services can be received according to needs (specifications, quality, quantity and on time)	Mengadakan koordinasi & monitoring dengan Fungsi Pengguna atas penyerahan barang/jasa yang dikirim/ dikerjakan oleh penyedia barang/jasa guna memastikan barang/jasa dapat diterima sesuai dengan kebutuhan (spesifikasi, kualitas, kuantitas dan tepat waktu). Coordinate & monitor with the User Function on the delivery of goods/ services sent/done by the provider of goods/services to ensure goods/ services can be received according to needs (specifications, quality, quantity and on time)
Mengadakan koordinasi dengan fungsi-fungsi terkait dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Sosialisasi Vendor, Pelatihan CSMS dan Vendor Day Coordinate with related functions and providers of goods/services in the implementation of Vendor Outreach, CSMS Training and Vendor Day	Merencanakan terhadap kebutuhan dari fungsi pengguna untuk dilaksanakan kontrak payung dan melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak yang telah dilaksanakan Planning for the needs of user functions to carry out umbrella contracts and evaluating the contracts that have been implemented	Melakukan evaluasi dan perencanaan terhadap sumber-sumber pengadaan baru. Evaluate and plan for new procurement sources



Auction	Fleet Procurement	General Procurement
Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan sistem tata kerja (TKO) / Pedoman / KPI / Risk Register / Ofi to Afi / Action Plan / RKAP Fungsi Procurement Planning, monitoring and evaluating the preparation of the work system (TKO)/Guidelines/ KPI/Risk Register/Ofi to Afi/Action Plan/RKAP Procurement Function	Memastikan kualitas dan kuantitas dari barang/jasa yang tersedia di pasar Ensuring the quality and quantity of goods/services available in the market	Memastikan kualitas dan kuantitas dari barang/jasa yang tersedia di pasar Ensuring the quality and quantity of goods/services available in the market
	Melakukan evaluasi dan perencanaan terhadap sumber-sumber pengadaan baru. Evaluate and plan for new procurement sources	

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa PT Pertamina Trans Kontinental No. A-001/PTK3300/2021-S9 tertanggal 24 November 2021, terdapat 3 Metode Pengadaan Barang & Jasa yang digunakan, antara lain:

- Metode Penunjukan Langsung**
Adalah pengadaan dimana Fungsi Pengadaan atau FPP menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tanpa terlebih dahulu melalui proses Tender atau Beauty Contest.
- Metode Tender Terbatas**
Adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa, yang diikuti oleh penyedia barang/jasa dalam OPT dan memenuhi persyaratan kualifikasi umum sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Metode Tender Terbuka**
Adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa atau papan pengumuman resmi perusahaan atau website perusahaan sehingga masyarakat

Procurement of Goods and Services Methods

In accordance with the Guidelines for the Procurement of Goods/Services PT Pertamina Trans Kontinental No. A-001/PTK3300/2021-S9 dated November 24, 2021, there are 3 Goods & Services Procurement Methods used, including:

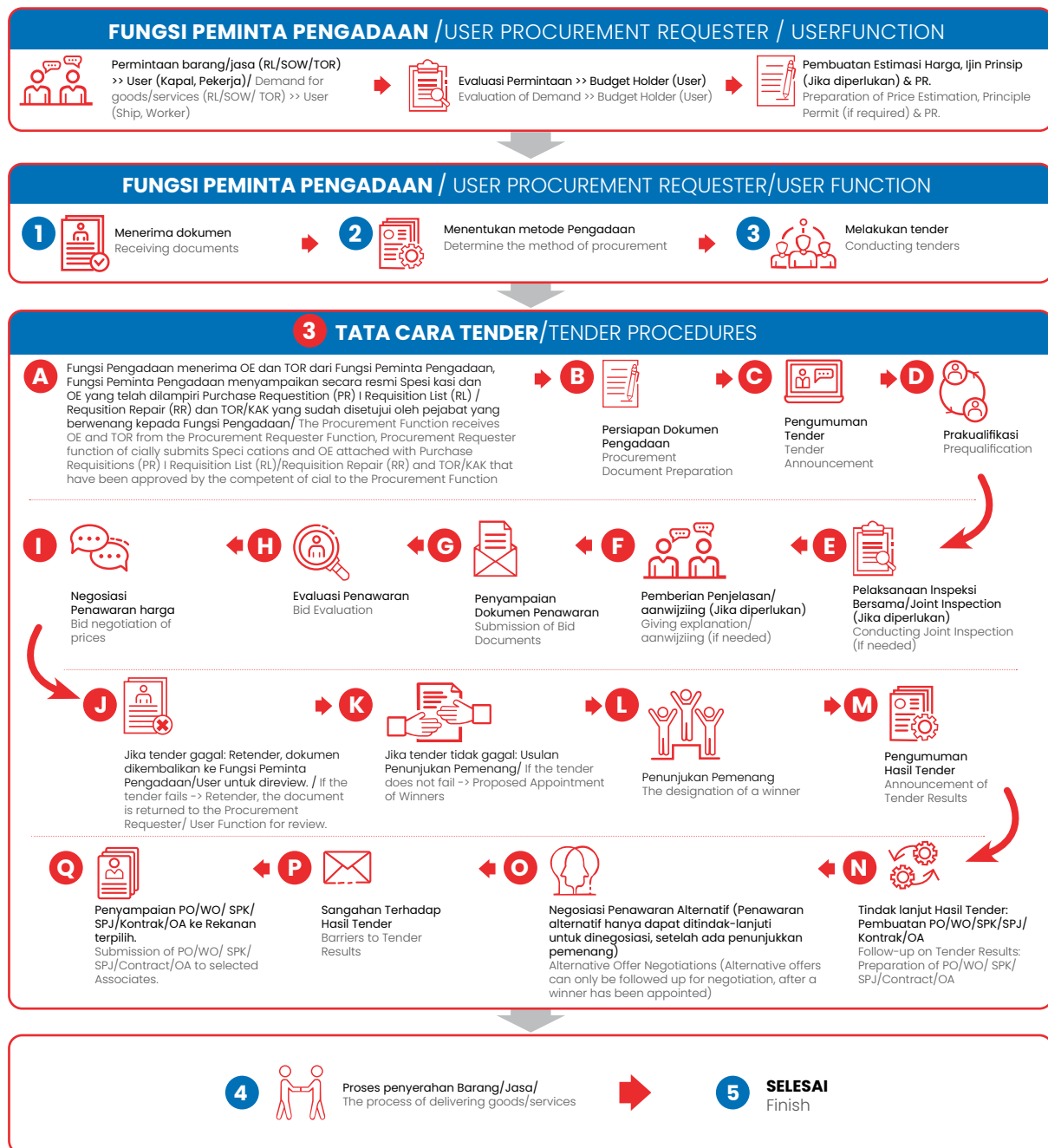
- Direct Appointment Method**
Is a procurement where the Procurement Function or FPP appoints 1 (one) supplier of goods/services to carry out a job, without first going through the Tender or Beauty Contest process
- Limited Tender Method**
Is a method of selecting a provider of goods/ services, which is followed by a provider of goods/services in OMO and fulfills the general qualification requirements in accordance with the work to be carried out.
- Open Tender Method**
Is a method of selecting a provider of goods/services which is carried out openly with a wide announcement through the mass media or the company's official bulletin board or company website so that the wider community and the business

luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

world who are interested and meet the qualifications can follow it.

Alur Proses Pengadaan Barang & Jasa

Process Flow of Procurement of Goods and Services





Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 Fungsi Procurement melaksanakan 2.206 kegiatan pengadaan dan beberapa diantaranya pencapaian lainnya sebagai berikut:

1. *Cost Optimization* melalui Negosiasi sebesar 14% dari *Owner Estimate* (OE) atau $\pm$ Rp 40,9 M
2. Adanya Penghematan Biaya Procurement sendiri sebesar 95% atau $\pm$ Rp 1,2 M
3. Dapat menyelesaikan proses pengadaan lebih cepat dari SLA, sebagai berikut:

Metode Pengadaan Procurement Method		SLA (hari kerja) SLA (work days)	Realisasi (hari kerja) Realization (work days)
Penunjukan Langsung	Direct Appointment	9	7
Tender Terbatas	Limited Tender	23	10
Tender Terbuka	Open Tender	23	10

4. Implementasi Digitalisasi System yaitu *Aplikasi Extra dan Promise*
5. Mendapatkan 2 penghargaan CIP, yaitu:
 - a. *Best System dan Procedure Awareness (Gold)*
 - b. *PC Prove Promise (Silver)*
6. Pelaksanan 2 (dua) kali Vendor Day, antara lain:
 - a. Tanggal 27 Mei 2021, Tema "*Integrated Management System to Provide New PTK*"
 - b. Tanggal 29 September 2021, Tema "*Safety Awareness & TKDN Compliance to be Strong Partnership*"
7. Membantu Fungsi *Fleet* untuk memudahkan dalam pengadaan dan juga operasional dengan cara kebutuhan rutin dibuatkan kontrak payung, dimana terdapat 10 (sepuluh) Kontrak Payung yang telah diselesaikan oleh Fungsi Procurement dalam tahun 2021, antara lain:

Implementation of Activities and Achievements in 2021

Throughout 2021 the Procurement Function carried out 2,206 procurement activities and several other achievements were as follows:

1. Cost Optimization through Negotiation of 14% of Owner Estimate (OE) or $\pm$ Rp. 40.9 M
2. There is a 95% Procurement Cost Savings or $\pm$ Rp 1.2 M
3. Can complete the procurement process faster than SLA, as follows:

4. Implementation of System Digitization, namely Extra and Promise Applications
5. Received 2 CIP awards, namely:
 - a. Best System and Procedure Awareness (Gold)
 - b. PC Prove Promise (Silver)
6. Implementation of 2 (two) Vendor Days, including:
 - a. May 27, 2021, Theme "*Integrated Management System to Provide New PTK*"
 - b. September 29, 2021, Theme "*Safety Awareness & TKDN Compliance to be Strong Partnership*"
7. Assisting the Fleet Function to facilitate procurement and operations by way of routine requirements for making umbrella contracts, of which there are 10 (ten) Umbrella Contracts that have been completed by the Procurement Function in 2021, including:

- a. Kontrak Payung Pengadaan Cat
 - b. Kontrak Payung Pengadaan Spare Parts Caterpillar Engine
 - c. Kontrak Payung Pengadaan Spare Parts Yanmar Engine
 - d. Kontrak Payung Pengadaan Barang/ jasa Purifier & Pompa
 - e. Kontrak Pengadaan Jasa Maintenance & Service HVAC
 - f. Kontrak Payung Pengadaan Jasa Maintenance alat Navigasi untuk kapal milik PTK
 - g. Kontrak Payung Pengadaan Alluminium Anode
 - h. Kontrak Payung pengadaan Jasa Service dan Resertifikasi Alat Keselamatan
 - i. Kontrak Payung Pengadaan Tali Temali
 - j. Kontrak Payung Pengadaan BBM dengan PT Pertamina Patra Niaga
8. Telah Go Live SSC *Procurement* (khusus *Vendor Management*)
9. Pelaksanaan awal program Integrated Procurement PTK dan AP PTK, antara lain:
- a. Mapping awal proses bisnis AP PTK (khususnya proses pengadaan barang & jasa)
 - b. Memberikan *training* ke AP PTK terkait dengan STK Pengadaan barang & jasa serta prosesnya
 - c. Membantu pembuatan STK terkait dengan STK Pengadaan barang & jasa
- a. Paint Procurement Umbrella Contract
 - b. Caterpillar Engine Spare Parts Supply Umbrella Contract
 - c. Yanmar Engine Spare Parts Procurement Umbrella Contract
 - d. Umbrella Contract for Procurement of Goods/Services Purifier & Pump
 - e. HVAC Maintenance & Service Procurement Contract
 - f. Umbrella Contract for Procurement of Navigational Equipment Maintenance Services for PTK's vessels
 - g. Aluminum Anode Procurement Umbrella Contract
 - h. Umbrella Contract for the procurement of Safety Equipment Service and Recertification Services
 - i. Umbrella Contract for Rope Procurement
 - j. BBM Procurement Umbrella Contract with PT Pertamina Patra Niaga
8. Go Live SSC Procurement (only for Vendor Management)
9. Initial implementation of the PTK and AP PTK Integrated Procurement programs, including:
- a. Capable of early PTK AP business processes (especially the process of procurement of goods & services)
 - b. Provide training to AP PTK related to STK Procurement of goods & services and the process
 - c. Assist in making STK related to STK Procurement of goods & services

Perencanaan Kegiatan Fungsi Procurement Tahun 2022

Untuk Program kerja tahun 2022 berfokus pada percepatan proses bisnis (*Accelerating*) dengan 3 (tiga) agenda kegiatan utama rencana kerja sebagaimana diuraikan dalam kegiatan di bawah ini:

1. Penerapan Kontrak Payung
Hal ini merupakan kelanjutan program

Planning for Procurement Function Activities in 2022

2022 work program focuses on accelerating business processes (*Accelerating*) with 3 (three) main work plan activities as outlined in the activities below:

1. Implementation of the Umbrella Contract
This is a continuation of the program from



dari tahun 2021, dimana masih banyaknya kebutuhan yang bersifat rutin sehingga perlunya dibuatkan Kontrak Payung guna untuk mempercepat proses efisiensi waktu dan value pengadaan yang berjalan (target tahun 2022 adalah 20 kontrak payung).

2. Go Live Aplikasi Smart GEP

Aplikasi ini sangat membantu FPP dan Fungsi Procurement dimana seluruh tahapan dari awal hingga akhir proses pengadaan sudah terintegrasi dalam satu sistem sehingga mempercepat proses, lebih transparansi dan auditable (target Go Live adalah di TW III atau TW IV tahun 2022).

3. Integrated Procurement PTK dan AP PTK (program lanjutan)

Hal ini merupakan kelanjutan dari tahun 2021, dimana dibutuhkan sistem MySap terlebih dahulu masuk ke AP-AP PTK, agar sistem pengadaan yang telah berjalan di PTK dapat digunakan di AP PTK sehingga Proses dari vendor management s.d pengadaan barang & jasa dapat terintegrasi antara PTK dengan AP PTK (target penyelesaian integrated di TW IV tahun 2022).

Selain itu terdapat Program kerja yang rutin harus dilaksanakan oleh Fungsi Procurement di tahun 2022, antara lain:

1. Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa yang terdapat dalam *Procurement Plan List* (PPL) tahun 2022, dimana rencana pengadaan di tahun 2022, terdapat 919 Pengadaan yang tercantum dalam PPL.
2. *Cost Optimization* (rencana) melalui Negosiasi sebesar 10% dari OE atau $\pm$ Rp30 M
3. Penghematan biaya Procurement sendiri dengan realiasi cost saving sebesar 85% dari RKAP.
4. Pelaksanaan 2 (dua) kali vendor day.

2021, where there are still many routine needs so it is necessary to make an Umbrella Contract in order to accelerate the process of time efficiency and ongoing procurement value (the target for 2022 is 20 umbrella contracts).

2. Go Live Smart GEP App

This application is very helpful for FPP and the Procurement Function where all stages from the beginning to the end of the procurement process are integrated in one system so that it speeds up the process, is more transparent and auditable (the target for Go Live is in Q3 or Q4 2022).

3. Integrated Procurement PTK and AP PTK (advanced program)

This is a continuation of 2021, where MySap system is needed first to enter PTK AP-AP, so that the procurement system that has been running in PTK can be used in PTK APs so that the process from vendor management to procurement of goods & services can be integrated between PTK and AP PTK (integrated completion target in Q IV 2022).

In addition, there are routine work programs that must be carried out by the Procurement Function in 2022, including:

1. Completion of the procurement of goods/ services contained in the Procurement Plan list (PPL) in 2022, where the procurement plan in 2022, there are 919 Procurement listed in the PPL
2. *Cost Optimization* (plan) through Negotiation of 10% of OE or $\pm$ Rp30 M
3. Savings in Procurement costs themselves with the realization of cost savings of 85% from RKAP
4. Implementation of 2 (two) vendor days.





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa keberlanjutan usaha sangat bergantung pada terciptanya hubungan saling menguntungkan antara seluruh pemangku kepentingan, baik eksternal termasuk masyarakat

The Company is fully aware that business sustainability is highly dependent on the creation of mutually beneficial relationships between all stakeholders, both external and internal, including communities

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Sebagai korporasi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan, PTK mendukung penuh konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah dengan menjalankan berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat sekitar dan juga mengajak pekerja untuk dapat secara aktif bersama-sama menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

As a responsible and sustainability-oriented corporation, PTK fully supports the concept of sustainable development. One manifestation of the Company's commitment to support sustainable development is to carry out various Corporate Social Responsibility (CSR) activities which aim to provide sustainable benefits for the surrounding community and also invite workers to be able to actively create added value for the local community, welfare of society and the environment.

Dalam menjalankan program CSR, Perseroan mengacu pada konsep Pembangunan Berkelanjutan, yaitu tentang keseimbangan antara pelaku usaha, pemangku kepentingan, serta regulator. Harmonisasi ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

In carrying out its CSR program, the Company refers to the concept of Sustainable Development, which is about the balance between business actors, stakeholders, and regulators. This harmonization can only be realized through a strong commitment from all parties, especially business entities which are surely relying on a profit orientation and tend to ignore the long-term impact of our activities.

Metode dan Lingkup Due Diligence Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Perseroan sangat menyadari, aktivitas operasionalnya dapat memberikan dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk

Methods and Scope of Due Diligence on Social, Economic and Environmental Impacts of Company Activities

The Company is fully aware that its operational activities can have an impact, either directly or indirectly, on the community and the environment. To that end, PTK



itu, PTK senantiasa menelaah dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dalam kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, Perseroan telah memiliki *due diligence* dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya antara lain:

always examines the social, economic, and environmental impacts. It aims to have a positive impact and reduce the negative impact in its business activities. Therefore, the Company has conducted due diligence on its corporate social responsibility activities, including:

Hak Asasi Manusia

Kebijakan dan Penerapannya

Perseroan memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Perseroan memiliki kebijakan dalam penegakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan karyawan maupun para pemangku kepentingan lainnya. Perseroan memberikan kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan dalam tanggung

Human Rights

Policy and Implementation

The Company pays great attention to the fulfillment of human rights. The Company has policy in upholding human rights related to employees and other stakeholders. The Company provides equality and equal employment opportunities for all employees in corporate social responsibility related to human rights.

jawab sosial perusahaan terkait hak asasi manusia.

Mekanisme Pemantauan

Terkait dengan ketenagakerjaan, PTK melakukan survei opini karyawan dalam pemantauan efektivitas penerapan tanggung jawabnya kepada karyawan. Perseroan juga melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Perseroan senantiasa menjaga hubungan baik dengan para stakeholder. Perseroan memberikan suatu media untuk menangani keluhan pada *stakeholder* yaitu melalui surat elektronik di alamat ptkpusat@ptk-shipping.com atau berupa laporan daring melalui *platform* situs Perseroan.

Operasi Yang Adil

Kebijakan dan Penerapannya

Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur operasi yang adil diantaranya kebijakan *whistleblowing system* (WBS) serta kebijakan anti korupsi dan gratifikasi. Dalam *whistleblowing system*, terdapat mekanisme perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor. Perseroan giat melakukan gerakan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Mekanisme Pemantauan

PTK melakukan pemantauan terhadap tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil melalui *self assessment* yang dilakukan pada semester I dan II di 2020. Hal ini dilakukan dalam upaya Perseroan untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG di Perseroan.

Monitoring Mechanism

Regarding employment, PTK conducts employee opinion surveys in monitoring the effectiveness of implementing their responsibilities to employees. The Company also conducts a customer satisfaction survey to measure the level of customer satisfaction.

Complaints Handling Mechanism

The Company always maintains good relations with stakeholders. The Company provides a medium for handling complaints to stakeholders, including through electronic mail at the address ptkcenter@ptk-shipping.com or in the form of online reports through the Company's website platform.

Fair Operation

Policy and Implementation

The Company has policies that regulate fair operations, including whistleblowing system (WBS) policy as well as an anti-corruption and gratification policy. In the whistleblowing system, there is protection mechanism for the confidentiality of the reporter's identity. The Company is actively engaged in eradicating the practice of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

Monitoring Mechanism

PTK monitors social responsibility related to fair operations through self-assessment conducted in semesters I and II in 2020. This is done in the Company's efforts to improve the implementation of GCG in the Company.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Perseroan menyediakan saluran penyampaian laporan indikasi adanya pelanggaran. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui email di alamat ptkpusat@ptk-shipping.com

Complaints Handling Mechanism

The Company provides a channel for submitting reports on indications of violations. The report can be submitted via email at the address ptkcenter@ptk-shipping.com

Lingkungan Hidup

Kebijakan dan Penerapannya

PTK memiliki kebijakan di bidang K3 dan Lingkungan Hidup. PTK memberikan perhatian yang sangat besar terkait upaya-upaya pelestarian lingkungan yaitu dengan menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Environment

Policy and Implementation

PTK has policies in HSE and the Environmental aspect. PTK has a major concern to environmental conservation initiatives, namely by implementing compliance with applicable rules and regulations.

Mekanisme Pemantauan

Perseroan secara rutin melakukan analisis risiko terhadap aspek lingkungan yang berkaitan dengan produk dan pengiriman atau transportasi. Penilaian terhadap risiko dan dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan operasional akan membantu PTK dalam mengelola setiap aktivitas sehingga memiliki langkah mitigasi yang tepat dan meminimalisir eksternalitas negatif yang berpotensi terjadi bagi lingkungan.

Monitoring Mechanism

The Company routinely conducts risk analysis on environmental aspects related to products and delivery or transportation. Assessment of the risks and impacts that will be caused by operational activities will help PTK in managing each activity so that it has the right mitigation steps and minimizes negative externalities that have the potential to occur to the environment.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, PTK memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran atau keluhan secara lisan maupun tertulis. Keluhan secara lisan dapat disampaikan melalui telepon maupun datang langsung ke petugas yang bersangkutan. Untuk keluhan secara tertulis, masyarakat dapat mengirimkan surat atau email ke ptkpusat@ptk-shipping.com.

Complaints Handling Mechanism

As a form of corporate social responsibility related to the environment, PTK makes it easy for the public to submit suggestions or complaints orally or in writing. Verbal complaints can be submitted by telephone or come directly to the officer concerned. For written complaints, the public can send a letter or email to ptkcenter@ptk-shipping.com.

Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Kebijakan dan Penerapannya

Dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, PTK memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pekerja, sistem imbal jasa yang sepadan hingga kesehatan serta keselamatan kerja bagi seluruh pekerja. Pengelolaan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) di PTK mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Mekanisme Pemantauan

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, setiap tahunnya Perseroan melakukan survei opini karyawan. Hasil survei ini dapat dijadikan acuan bagi PTK untuk meningkatkan komitmen pekerja secara berkesinambungan.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Terkait dengan hubungan kerja, PTK menyediakan sarana untuk penanganan keluhan kesah karyawan melalui melalui unit kerja SDM.

Konsumen

Kebijakan Dan Penerapannya

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada pelanggan, PTK memiliki kebijakan terkait jasa yang diberika. PTK menyadari

Occupational Healh, Safety and Employment

Policy and Implementation

In implementing social responsibilities related to employment, PTK pays high attention and commitment in terms of gender equality and job opportunities, job training to improve worker professionalism, a commensurate remuneration system to occupational health and safety for all workers. Management of aspects of Human Resources (HR) in PTK refers to the applicable laws and regulations, namely Law No. 13 of 2013 concerning Manpower, Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Law No. 23 of 1992 concerning Health.

Monitoring Mechanism

In implementing social responsibility related to employment, every year the Company conducts employee opinion surveys. The results of this survey can be used as a reference for CAR to increase employee commitment on an ongoing basis.

Complaints Handling Mechanism

In terms of working relationships, PTK provides a means for handling employee complaints through the HR work unit.

Consumer

Policy and Implementation

As a form of social responsibility to customers, PTK has a policy related to the services provided. PTK realizes that customers are

bahwa pelanggan adalah pemangku kepentingan yang memegang peranan penting bagi keberlanjutan usaha. Untuk itu, PTK senantiasa memperhatikan kualitas jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan.

Mekanisme Pemantauan

PTK menerapkan sistem manajemen mutu terpadu yang merupakan hasil dari serangkaian kegiatan proses yang sesuai dengan standar internasional yang dilakukan pada setiap kegiatan. Prosedur ini secara konsisten diimplementasikan untuk menjaga kualitas layanan.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Pengaduan keluhan pelanggan dapat disampaikan melalui surat elektronik di alamat ptkpusat@ptk-shipping.com

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Kebijakan dan Penerapannya

PTK mengimplementasikan program CSR dimana dalam Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek sosial kemasyarakatan diarahkan pada program-program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu.

Mekanisme Pemantauan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial kemasyarakatan dituangkan dalam laporan CSR PTK. Dalam laporan tersebut, terdapat penyusunan dan penyajian program CSR yang dapat

stakeholders who play an important role for business sustainability. For this reason, PTK always pays attention to the quality of services produced in order to achieve customer satisfaction.

Monitoring Mechanism

PTK implements an integrated quality management system which is the result of a series of process activities in accordance with international standards carried out for each activity. This procedure is consistently implemented to maintain service quality.

Complaints Handling Mechanism

Customer complaints can be submitted via electronic mail at the address ptkcenter@ptk-shipping.com

Social and Community Development

Policy and Implementation

PTK implements CSR programs in which the implementation of corporate social responsibility in social aspects is directed at programs that are empowering and provide benefits to the community. Especially the perpetrators of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as people who are included in the economically disadvantaged category.

Monitoring Mechanism

The implementation of social responsibility related to community social development is stated in the PTK CSR report. In the report, there is the preparation and presentation of CSR programs that can be used to monitor

digunakan untuk memantau program yang telah dijalankan.

Mekanisme Penanganan Keluhan

Sebagai tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial kemasyarakatan, PTK senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Namun apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan kemasyarakatan, dapat mengirimkan surat elektronik di alamat ptkpusat@ptk-shipping.com.

Isu-Isu Penting Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Terkait Dampak Kegiatan Perseroan

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, PTK telah menetapkan isu-isu penting yang terkait dampak dari kegiatan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan diatribusikan Perseroan.
2. Kenyamanan bekerja dan pemenuhan hak-hak karyawan.
3. Anti korupsi dan tindakan yang diambil jika ada korupsi.
4. Informasi produk, tanggung jawab kualitas layanan dan survei kepuasan pelanggan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam proses usaha, dampak usaha terhadap masyarakat, program pemberdayaan masyarakat.
6. Dampak ekonomi tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat (CSR)

the programs that have been implemented.

Complaints Handling Mechanism

As a social responsibility related to community social development, PTK always harmonizes its presence and business activities in the community. However, if there are problems or complaints in community activities, you can send an e-mail to the address ptkcenter@ptk-shipping.com.

Important Social, Economic and Environmental Issues Related to The Impact of The Company's Activities

Based on the results of the Focus Group Discussion (FGD) conducted by involving stakeholders, PTK has determined important issues related to the impact of the Company's activities as follows:

1. The direct economic value generated and attributed to the Company.
2. Work convenient and fulfillment of employee rights.
3. Anti-corruption and actions taken if there is corruption.
4. Product information, service quality responsibility and customer satisfaction survey.
5. Community involvement in the business process, the impact of the business on the community, community empowerment programs.
6. Indirect economic impact felt by the community (CSR)



Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perseroan Baik Yang Merupakan Kewajiban Maupun Yang Melebihi Kewajiban

Sebagai perusahaan yang berada dalam lingkup Kementerian BUMN, PTK diharapkan juga dapat menjadi *agent of development*, dalam hal ini adalah untuk mendukung program pembangunan nasional yang dijalankan oleh Pemerintah. Karena itu, PTK juga menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial sebagai mana yang diatur dalam Bab V, Pasal 74 ayat (1) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terkait dengan pelaksanaan program tanggung jawab sosial tersebut, International Organization for Standardization (ISO), sebagai induk organisasi standarisasi internasional di bidang industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance Standard on Social Responsibility*).

Oleh karena itu, PTK dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaannya mengacu pada ISO 26000 yang lingkup tanggung jawabnya meliputi:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
2. Hak Asasi Manusia
3. Ketenagakerjaan
4. Lingkungan Hidup
5. Operasi Yang Adil
6. Pemenuhan Kepentingan Pelanggan
7. Kemasyarakatan

Scope of The Company's Social Responsibility Whether That is an Liability or Exceeds The Liability

As a company within the scope of the Ministry of SOEs, PTK is also expected to become an agent of development, in this case to support the national development program run by the Government. Therefore, PTK also carries out various social responsibility programs as regulated in Chapter V, Article 74 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

In relation to the implementation of the social responsibility program, the International Organization for Standardization (ISO), as the parent organization of international standardization in the industrial and commercial sector in the world, has released ISO 26000 on Guidelines for Social Responsibility (*Guidance Standard on Social Responsibility*).

Therefore, PTK in implementing its corporate social responsibility refers to ISO 26000 whose scope of responsibility includes:

1. Social Responsibility Governance
2. Human Rights
3. Employment
4. Environment
5. Fair Operation
6. Fulfillment of Customer Interests
7. Society

Jumlah Anggaran Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pertamina Trans Kontinental memandang CSR sebagai sebuah investasi dalam jangka panjang, sehingga perencanaan harus diperhitungkan secara matang guna kelancaran realisasi semua program CSR dan pencapaian targetnya. Salah satu faktor penting dari pelaksanaan program CSR adalah tersedianya dana atau anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan CSR. Dana yang telah dikeluarkan oleh PTK dengan total realisasi sebesar Rp1.588.195.000 terdiri dari anggaran CSR Persero sebesar Rp532.250.000 dan anggaran PTK sebesar Rp1.055.945.000.

Total Corporate Social Responsibility Budget

Pertamina Trans Kontinental views CSR as an investment in the long term, so planning must be carefully considered for the smooth realization of all CSR programs and the achievement of targets. One of the important factors in implementing CSR programs is the availability of funds or budgets allocated specifically for CSR activities. The funds that have been issued by PTK with a total realization of Rp1,588,195,000 consist of the CSR budget of the Company of Rp532,250,000 and the PTK budget of Rp1,055,945,000.



Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil

Social Responsibility Related To Fair Operations

Komitmen dan Kebijakan

PTK berkomitmen untuk menerapkan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip operasi yang adil. PTK tunduk dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Antikorupsi

Sejalan dengan semangat pemerintah Indonesia memberantas korupsi, PTK memiliki komitmen serupa. Komitmen itu tak terpisahkan dengan implemementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang tujuannya antara lain meningkatkan kepercayaan pelanggan, vendor dan Pemegang Saham.

Untuk itu, berupaya untuk menutup pintu-pintu yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan, termasuk kemungkinan terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan. Komitmen menutup peluang terjadinya korupsi berlaku bagi seluruh pekerja PTK tanpa terkecuali.

Kebijakan PTK tentang anti korupsi mengharuskan semua pekerja untuk mengisi form gratifikasi setiap bulannya. Form ini juga mengharuskan semua pekerja untuk bertindak jujur dan menghindari memberi maupun menerima hadiah atau penyuapan.

Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

PTK memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menjadi mitra dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, PTK menetapkan persyaratan tertentu untuk menjadi mitra/vendor.

Commitment and Policy

PTK is committed to implement business development by promoting fair operating principle. PTK is a subject and comply to every prevailing law and regulation.

Anticorruption

In line with the spirit of the Indonesian government in eradicating corruption, PTK has a similar commitment. This commitment is inseparable from the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG), the aim of which is to increase the trust of customers, vendors and Shareholders.

Therefore, it seeks to close the doors that bring opportunities for abuse of office, including the possibility of the practice of gratuity and bribery. Commitment to close the opportunity for corruption applies to all PTK employees without exception.

PTK's anti-corruption policy requires all employees to submit gratification forms every month. This form also requires all employees to act honestly and avoid giving or receiving gifts or bribes.

Transparent Goods and Services Procurement

PTK provides equal opportunities for all parties to become partners in the process of procurement of goods and services. However, PTK has implemented certain requirements to become a partner/vendor.

Setiap perusahaan yang ingin menjadi mitra/vendor PTK harus terlebih dahulu mendaftar sebagai vendor PTK. Hal ini dimaksudkan agar PTK dapat memastikan keberadaan dan legalitas persyaratan administratif vendor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kegiatan

Kami mencanangkan program antikorupsi yang dilaksanakan melalui dua kegiatan yang mendukung terciptanya kondusifitas iklim bisnis. Pertama adalah kegiatan sosialisasi gratifikasi kepada seluruh pekerja. Berikutnya kegiatan pengisian form gratifikasi yang dilakukan oleh semua pekerja setiap bulan.

Guna mencegah praktik korupsi, Pertamina Trans Kontinental juga melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang transparan. Hal ini ditempuh dengan pengadaan barang dan jasa melalui tender. Sejalan dengan hal tersebut kami melakukan penilaian kinerja terhadap vendor.

Every company that wants to become a TOD partner/vendor must first register as a PTK's vendor. This is intended thereby PTK can ensure the existence and legality of vendor administrative requirements in accordance with prevailing law and regulations.

Activity Plan

We have launched an anticorruption program which has been carried out through two activities that support the creation of a conducive business climate. The first is gratification socialization activities for all workers. Next is the activity of filling out the gratification form which is done by all workers every month.

To prevent corrupt practices, Pertamina Trans Kontinental also implements transparent procurement of goods and services mechanisms. This is done by procuring goods and services through tenders. In line with this we have conducted a vendor performance assessment.



Tanggung Jawab Sosial Terkait Penerapan HAM

Social Responsibility In The Implementation of Human Rights

Komitmen dan Kebijakan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Komitmen perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi bagian dalam penerapan nilai-nilai dan budaya Perusahaan serta termaktub dalam Pedoman Perilaku Perusahaan.

Commitment and Policy

Human rights are basic rights for every human being. The company's commitment to human rights is part of the implementation of the corporate values and culture and is included in the Code of Conduct.

Rumusan dan Rencana Kegiatan

Rumusan praktik hak asasi manusia telah dituangkan dalam dokumen Kode Etik Perseroan (*Code of Conduct*) yang memuat etika individu dan etika bisnis. Dokumen ini telah mengatur tata hubungan antar individu untuk saling menjaga, menghormati, serta menghargai hak-hak sesama insan PTK. Diantaranya adalah bahwa Perseroan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat untuk bisa bekerja sesuai kapasitas dan kemampuan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, ras, agama, dan gender.

Formulation and Activity Plan

The formulation of human rights practices has been stated in the Code of Conduct, which contains individual ethics and business ethics. This document has regulated the relationship between individuals to look after each other, respect and respect the rights of other PTK people. Among them is that the Company provides equal opportunities to the entire community to be able to work according to their capacity and ability without being limited by ethnic, racial, religious, and gender differences.

Kode etik ini telah disosialisasikan kepada seluruh insan Perseoran baik melalui penyebaran dokumen via website maupun pertemuan-pertemuan dan *sharing session*.

This code of conduct has been disseminated to all employees through the distribution of documents via the website as well as meetings and sharing sessions.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

Social Responsibility for The Environment

PTK berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusi dalam kegiatan pelestarian lingkungan, Komitmen ini diwujudkan dengan melaksanakan program pengelolaan lingkungan baik dalam aktivitas operasional yang ramah lingkungan maupun program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar (masyarakat).

PTK is committed to continue to increase its contribution to environmental conservation activities. This commitment is realized by implementing environmental management programs both in environmentally friendly operational activities and social responsibility programs for the surrounding environment (community).

Komitmen dan Kebijakan

PTK menyadari bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tugas dan tanggung jawab bersama warga dunia, termasuk bagi PTK. Sekecil apapun tindakan dan kebijakan yang berdampak positif bagi lingkungan, hal itu harus diwujudkan. Kepedulian serupa itu harus ditumbuhkan karena kerusakan lingkungan bumi kian memburuk dari waktu ke waktu.

Sebagai korporasi yang bertanggung jawab, PTK memberikan dukungan dan komitmen untuk menjaga kelestarian bumi melalui berbagai kebijakan dan dalam melakukan kegiatan usahanya PTK berkomitmen untuk mendukung program pelestarian lingkungan. Dengan upaya itu, maka PTK ikut berperan untuk mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan bumi bagi manusia, sekaligus bermanfaat bagi generasi mendatang agar bisa menikmati kehidupan yang lebih baik di bumi. Keberlanjutan kehidupan di bumi akan menjadi berkah pula bagi keberlanjutan perusahaan.

Commitment and Policy

PTK realizes that environment protection becomes a shared obligation and responsibility among the global citizens, including PTK. No matter how small the actions and policies that have a positive impact on the environment, it must be realized. Such concern must be fostered because the damage to the earth's environment is getting worse over time.

As a responsible corporation, PTK provides support and commitment to preserve the earth through various policies and in conducting its business activities PTK is committed to supporting environmental conservation programs. With this effort, PTK will play a role in reducing the negative impact of damage to the earth's environment for humans, while at the same time benefiting future generations to enjoy a better life on earth. Sustainability of life on earth will also be a blessing for corporate sustainability.



Rumusan dan Rencana Kegiatan

Pertamina Trans Kontinental memiliki rencana mitigasi dalam mengendalikan limbah buang baik cair, padat, dan emisi yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Perusahaan menggandeng lembaga independen untuk bekerjasama dalam melakukan monitoring limbah buang. Proses monitoring dilakukan setiap bulan dan terbagi atas dua periode dalam laporan tahunan yakni laporan tiap semester. Adapun uji yang dilakukan monitoring adalah 7 jenis uji, yakni uji udara ambien, udara lingkungan kerja, kebisingan luar, kebisingan dalam, cahaya, kualitas emisi genset, dan air limbah domestik.

Formulation and Action Plan

Pertamina Trans Kontinental has a mitigation plan in controlling waste water, and air that has the potential to pollute the surrounding environment. For the company, collaborating with an independent institution to cooperate in monitoring waste disposal. The monitoring process is carried out every month and is divided into two periods in the annual report which is the report every semester. The monitoring tests are 7 types of tests, including the ambient air, work environment air, external noise, internal noise, light, air emission generator, and domestic waste water.

Kegiatan yang Dilaksanakan dan Capaiannya

Efisiensi Penggunaan Material, Energi dan Air

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Energi Perusahaan menggunakan empat jenis sumber energi dalam menunjang kegiatan operasional, yaitu gas, biosolar (B30), bensin dan listrik.

Upaya penghematan pun tetap dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan efisiensi energi, seperti kebijakan efisiensi pencahayaan gedung pada area kurang produktif dan lain-lain. Inisiatif sederhana ini merupakan bentuk dukungan terhadap target SDG nomor ke-13 dalam penanganan perubahan iklim dengan terus berupaya menerapkan kebijakan pengurangan pemanfaatan energi untuk mengurangi produksi gas rumah kaca yang dapat mempengaruhi iklim.

Pemanfaatan limbah material dari kapal dengan berbagai langkah, yakni:

1. Mengelompokkan limbah kapal sesuai jenisnya (segregasi);
2. Membuang kelaut untuk limbah makanan setelah dihancurkan sebagai bahan makanan ikan laut;
3. Membuang atau mengirimkan ke fasilitas darat pada katagori limbah minyak atau limbah besi untuk dikelola atau di daur ulang;
4. Adapun jenis limbah B3 yang dihasilkan dikelola lebih lanjut dengan bekerja sama perusahaan berizin.

Kapal-kapal juga melaksanakan program penghematan penggunaan energi di kapal, antara lain:

Activities and Achievements

Material, Energy and Water Efficiency Use

Efficiency of Energy Source Utilization The Company uses four types of energy sources to support its operational activities, namely gas, biodiesel (B30), gasoline and electricity.

The efficiency plan are conducted by implementing energy efficiency policies, such as building lighting efficiency policies in less productive areas and so on. This simple initiative is a form of support for the 13th SDGs target in tackling climate change by continuing to strive to implement policies to reduce energy use to reduce the production of greenhouse gases that may affect the climate.

Utilization of material waste from the vessels through various initiatives, as follows:

1. Classify vessels waste based on type;
2. Disposal to the ocean for food waste after being crushed as food material for marine fish;
3. Dispose of or deliver to onshore facilities in the category of waste or iron waste to be managed or recycled;
4. The types of B3 waste produced are further managed in collaboration with licensed companies.

The vessels also implement energy-saving programs on board, including:

1. Kampanye hemat energi melalui pelatihan dan penggunaan listrik dan air oleh setiap crew khususnya pada jam istirahat dan penerapan *energy conservation* di atas kapal dengan melakukan kecepatan ekonomis (optimal);
2. Dimasa pandemic Covid-19 crew tidak diperbolehkan pesiar pada saat kapal sandar di pelabuhan untuk menghindari terpaparnya Covid-19;
3. Penerapan sistem manajemen lingkungan hidup ISO 14001 dan system keselamatan dan pencegahan pencemaran laut (ISM Code) dan telah tersertifikasi;
4. Kapal melakukan penghematan penggunaan BBM dengan cara menggunakan mesin kapal sesuai dengan kebutuhan operasional secara ekonomis dan *safety*.

1. Energy saving campaign through training and the use of electricity and water by each crew, especially during rest hours and the application of energy conservation on board at an economical speed;
2. During the Covid-19 pandemic the crew was not allowed to cruise when the ship docked at the port to avoid exposure to the Covid-19;
3. The implementation of the ISO 14001 environmental management system and the safety and prevention of marine pollution (ISM Code) and has been certified;
4. Ships save fuel by using ship engines in accordance with operational needs economically and safely.

Pengelolaan Limbah

Selama 2021, PTK melakukan pengelolaan limbah sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap lingkungan. Total limbah yang dihasilkan mencapai 24,98 ton. berikut merupakan pengelolaan limbah B3 PTK selama 2021:

Waste Treatment

Throughout 2021, PTK/the vessels have carried out waste management as a means of corporate social responsibility to the environment. The total waste generated reached 24.98 tons, the following is B3 waste treatment in PTK in 2021 are as follows:

Pengelolaan Limbah B3 PTK selama 2021

Pengelolaan Limbah B3 PTK selama 2021

Kategori Limbah Waste Category	Jenis Type	Upaya Pengelolaan Treatment Plan
Cair Liquid	Oli Bekas Used oil	Reuse Diserahkan kepada fasilitas darat/ pelabuhan pemanfaat berizin Handed to the licensed utilizing land/port facility
PADAT/ SOLID		
Kapal Ship	Plastik (A) Plastic (A)	Dibuang ke fasilitas darat/ terminal yang kemudian akan didaur ulang. Disposed to land facilities/terminals which will then be recycled.

Pengelolaan Limbah B3 PTK selama 2021

Pengelolaan Limbah B3 PTK selama 2021

Kategori Limbah Waste Category	Jenis Type	Upaya Pengelolaan Treatment Plan
	<i>Food Wastes (B)</i>	Dibuang kelaut setelah dipotong-potong kecil kurang dari 1cm ² pembuangan ke laut dengan jarak lebih dari 12 NM dari daratan terdekat. Dumped to sea after being cut into pieces less than 1cm ² then dumped into the sea more than 12 NM from the nearest land.
	<i>Domestic Wastes (C) Sampah yang dihasilkan dari operasional harian kapal. Waste generated from the daily operations of ships.</i>	Dikumpulkan didalam kantung plastik besar kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat / terminal yang kemudian akan diolah kembali. Collected in large plastic bags then altogether with plastic waste is disposed of to landfill facilities/terminals which will then be processed again.
	<i>Cooking Oil (D)</i>	Dikumpulkan didalam drum kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat/ terminal yang kemudian akan di olah kembali. Collected in the drum then together with plastic waste disposed of to landfill facilities/terminals which will then be processed again.
	<i>Incinerator Ashes (E)</i>	Dikumpulkan di dalam <i>cylinder</i> kemudian dikumpulkan di dalam kantung plastik besar kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat / terminal yang kemudian akan di olah kembali. Collected in the cylinder then Collected in a large plastic bag then together with the plastic waste is disposed of to a landfill/terminal garbage disposal facility which will then be processed again.
	<i>Electronic Wastes (I)</i>	Dikumpulkan didalam kantung Plastik besar kemudian bersamaan dengan sampah plastik dibuang ke fasilitas pembuangan sampah di darat / terminal yang kemudian akan diolah kembali. Collected in a large Plastic bag then together with the plastic waste it is disposed of to a landfill facility/terminal which will then be processed again.
KANTOR/ OFFICE		
Gedung Building	Lampu Lamp	Diserahkan kepada Pengelola Gedung untuk dikelola lebih lanjut/ Handed to the Building Manager
	Cartridge Fotocopy	Diserahkan kembali kepada vendor untuk proses daur ulang/ Sent back to the vendor

Sertifikasi di Bidang Lingkungan
Environmental Certification

Sertifikasi Certification	Variabel Pengukuran Measurement Variables	Target yang Dihasilkan Resulting Target
ISO 14001	Sertifikasi Certification	Ramah lingkungan dan mematuhi peraturan dan perundangan. Eco-friendly and comply with the laws and regulations.

Emisi Karbon Operasional Langsung

Jumlah emisi karbon dari operasional langsung PTK (Scope 1) total mencapai 39.876,63 ton CO₂e. Detail hasil perhitungan emisi berdasarkan parameternya sebagaimana tabel di bawah.

Direct Operational Carbon Emissions

Total carbon emissions from direct PTK operations (Scope 1) totaled 39,876.63 tons of CO₂e. Details of the emission calculation results based on the parameters as shown in the table below.

Parameter	Ton/tahun/ year	Ton CO ₂ eq/tahun/ year
CO ₂	39.746,29	39.746,29
CH ₄	1,61	45,05
N ₂ O	0,32	85,29
SO _x	77,99	-
NO _x	1.185,97	-
PM	83,37	-

Lingkup Pengaruh Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup

Pertamina Trans Kontinental menjalankan usaha di bidang perkapalan, kepelabuhanan, dan logistik, yang mana seluruh rangkaian kegiatan operasional tidak memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup. Produk dan jasa kami bukanlah industri yang mengeluarkan limbah secara signifikan sehingga tidak berpotensi terhadap pencemaran lingkungan.

Scope of The Company's Impact to The Environment

Pertamina Trans Kontinental operates business in the shipping, port and logistics sectors, where the entire operational activities do not generate any negative impact to the environment. Our products and services are not industries generating waste thereby not causing any potential environmental pollution.

Mekanisme Penanganan Konflik Terkait Lingkungan Hidup

Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi konflik terkait lingkungan hidup sebagai akibat dari operasi bisnis Pertamina Trans Kontinental. Karena itu manajemen tidak melaksanakan penanganan konflik lingkungan dengan pihak-pihak mana pun yang merasa dirugikan atau terkena dampak.

Due Diligence Terhadap Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

Kegiatan due diligence dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga independent yang tertuang dalam laporan monitoring hasil uji emisi, kebisingan, cahaya, emisi genset, dan air limbah domestik yang masih sesuai dengan kategori NAB (Nilai Ambang Batas). PTK juga berkomitmen untuk terlibat langsung dalam program CSR yang terkait dengan isu lingkungan yaitu bencana alam, dan bank sampah.

Biaya Tanggung Jawab Sosial Terkait Lingkungan Hidup

Sepanjang tahun 2021, PTK telah mengeluarkan dana untuk melakukan program pemeliharaan lingkungan hidup sebesar lebih dari Rp337 juta. Biaya pengelolaan tersebut diperuntukkan untuk pengelolaan limbah B3, pemantauan lingkungan, dan pengolahan limbah cair.

Sertifikasi

Pertamina Trans Kontinental telah memperoleh sertifikasi ISO 14001 dengan akreditasi Lembaga RINA No. EMS-5663/AN dan nomor registrasi IT-95918 yang berlaku hingga 6 November 2023.

Conflict Management Mechanisms Regarding The Environment

Throughout 2021, there is no conflicts related to the environment as a result of Pertamina Trans Kontinental business operations. Therefore management does not carry out handling environmental conflicts with any parties who feel disadvantaged or affected.

Due Diligence on Social Responsibility Regarding The Environment

The due diligence activity was carried out in collaboration with independent institutions and universities (Universitas Indonesia) as contained in the monitoring report on the results of tests on air, noise, light, air emissions of generators, and domestic wastewater that still fit the NaB category (threshold value). PTK is also committed to be directly involved in CSR programs related to environmental issues, namely natural disasters and waste banks.

Budget of Social Responsibility Related to The Environment

Throughout 2021, PTK has spent more than Rp337 million in funds to carry out environmental maintenance programs. The management fee is allocated for B3 waste management, environmental monitoring, and liquid waste treatment.

Certification

Pertamina Trans Kontinental has obtained ISO 14001 certification with RINA No. Institution accreditation. EMS-5663/AN and registration number IT-95918 which is valid until November 6, 2023.

Pengaduan Terkait Pengelolaan Lingkungan

Sepanjang tahun 2021 Pertamina Trans Kontinental tidak memperoleh pengaduan terkait lingkungan hidup dari pihak-pihak yang merasakan dirugikan sebagai akibat dari operasi bisnis kami. Meskipun demikian, praktik usaha Pertamina Trans Kontinental senantiasa tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku baik terkait operasi bisnis maupun yang mengatur masalah lingkungan hidup.

Dampak Kualitatif Kegiatan

Berbagai kegiatan dan program pengelolaan lingkungan yang telah dijalankan selama ini telah ikut memberikan pengaruh terhadap terjaganya kelestarian.

Dampak Keuangan

PTK mengalokasikan biaya untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui berbagai program tanggung jawab sosial yang diselenggarakan sesuai dengan strategi dan bisnis perusahaan dengan mengedepankan hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat dan lingkungan. Pada tahun 2021, secara umum penyaluran dana kegiatan dalam bidang Lingkungan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

Complaints Regarding Environmental Management

Throughout 2021 Pertamina Trans Kontinental did not receive environmental complaints from parties who felt disadvantaged as a result of our business operations. Nevertheless, the Pertamina Trans Kontinental business practices have complied to the prevailing laws both in business operations and provisions that regulate environmental issues.

Qualitative Impacts from the Activities

Various activities and environmental management programs that have been carried out currently have contributed to maintain sustainability.

Financial Impact

PTK has allocated a budget to provide sustainable benefits for the community through various social responsibility programs that were organized in accordance with the company's strategy and business by promoting sustainable relationships with the society and the environment. In 2021, in general, the disbursement of funds for activities in the environmental sector did not cause significant impact to the Company's financial performance.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat

Social Responsibility to The Community

Pengembangan sosial dan kemasyarakatan merupakan bagian terpadu dan tidak terpisahkan dalam proses bisnis Perusahaan. Kegiatan ini merupakan salah satu dari program CSR yang dijalankan oleh PTK.

Social and community development is an integral and inseparable part of the Company's business processes. This activity is one of the CSR programs run by PTK.

Komitmen dan Kebijakan

PTK berkomitmen memberikan manfaat positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Komitmen tersebut direalisasikan dengan menyelenggarakan program-program yang berdampak baik dan positif terhadap masyarakat. Program dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Commitment and Policy

PTK is committed to contribute positive and sustainable benefits for all stakeholders, especially the communities around the company's operational areas. This commitment is realized by arranging several programs that have a positive and positive impact on society. The program is carried out continuously to realize participation and support from the community while also improving the quality of life of the community.

Rumusan dan Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan disusun sebagaimana tertuang dalam program sosial kemasyarakatan adalah meliputi beberapa bidang antara lain: Pendidikan, Lingkungan, Pemberdayaan, Kesehatan, Infrastruktur dan Sosial Masyarakat.

Formulation and Plan of Activities

The planned activities as stated in the social program cover several areas, including: Education, Environment, Empowerment, Health, Infrastructure and Community Social.

Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Isu Sosial & Kemasyarakatan

Kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang ditujukan untuk meningkatkan kegiatan

The Company's Scope of Influence on Social and Community Issues

Community social development activities are carried out through the Partnership and Community Development Program (PKBL) aimed at increasing small business

ekonomi usaha kecil dan pemberdayaan sosial masyarakat. Program telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan.

economic activities and community social empowerment. The program has had a positive impact on improving the community's economy and improving the quality of life through health and education.

Mekanisme Pelibatan Stakeholders

Mekanisme pelibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang kemasyarakatan diuraikan dalam skema sebagai berikut:

Stakeholder Involvement Mechanism

The mechanism for involving stakeholders in the implementation of social responsibility in the community sector is described in the following scheme:

Aktivitas Activity	Keterlibatan Stakeholder Stakeholder Engagement		Keterangan Description	
Pendidikan Education	- Kantor Pusat - Kantor Region - Perguruan tinggi - Masyarakat di lokasi - Instansi Pemerintah	- Head Office - Branch office - University Communities on site - Government agencies	- Kebijakan - Koordinasi dan pelaksanaan - Mitra pelaksana - Fasilitator - Penerima manfaat - Koordinasi	- Policy Coordination and implementation - Implementing partner - Facilitator - Benefit recipients - Coordination
Kesehatan Health	- Kantor Pusat - Kantor Region - Rumah Sakit Setempat - Masyarakat - Instansi Pemerintah	- Head Office - Branch office - Local Hospital - Community - Government Institutions	- Kebijakan - Koordinasi dan pelaksanaan - Mitra pelaksana - Fasilitator - Penerima manfaat - Koordinasi	- Policy Coordination and implementation - Implementing partner - Facilitator - Benefit recipients - Coordination
Pemberdayaan Empowerment	- Kantor Pusat - Kantor Region - Anak Perusahaan - Masyarakat - Instansi Pemerintah	- Head Office - Branch office - Subsidiary - Community Government Institutions	- Kebijakan - Koordinasi dan pelaksanaan - Mitra pelaksana - Penerima manfaat - Koordinasi	- Policy Coordination and implementation - Implementing partner - Facilitator - Benefit recipients - Coordination
Fasilitas Umum dan Bencana Alam Public Facilities and Natural Disasters	- Kantor Pusat - Kantor Region - Masyarakat - Instansi Pemerintah	- Head Office - Branch office - Community - Government Institutions	- Kebijakan - Koordinasi dan pelaksanaan - Mitra pelaksana - Penerima manfaat - Koordinasi	- Policy Coordination and implementation - Implementing partner - Facilitator - Benefit recipients - Coordination

Mekanisme Penanganan Konflik

Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi konflik antara Pertamina Trans Kontinental dengan masyarakat sebagai akibat dari operasi bisnis Pertamina Trans Kontinental. Karena itu manajemen tidak melaksanakan penanganan konflik sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak mana pun yang merasa dirugikan atau terkena dampak.

Metoda dan Ruang Lingkup *Due Diligent* Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Dalam rangka mendukung keberlanjutan bisnis Perusahaan, yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Perusahaan melaporkan aspek aktivitas Tanggung Jawab Sosial. Perusahaan juga telah memiliki *due diligent* dari kegiatan tanggung jawab perusahaannya yang berupa pertemuan berkala, pertemuan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, *multi-stakeholder forum*, *one-on-one meeting*, seminar, pameran, survei kepuasan, ataupun *Focus Group Discussion* (FGD) yang dapat disesuaikan dengan topik/isu yang ingin dikelola.

Stakeholder Penting yang Terdampak oleh Perusahaan

Penting bagi Perusahaan melakukan pelibatan pemangku kepentingan. Pelibatan pemangku kepentingan secara langsung oleh masing-masing divisi/unit bisnis yang terkait dilaksanakan secara rutin, terbuka, dan jujur. Hal tersebut membantu Perusahaan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan isu yang paling penting bagi pemangku kepentingan dan operasional Perusahaan. Dalam melakukan identifikasi dan interaksi dengan para pemangku kepentingan di seluruh area operasional,

Conflict Handling Mechanism

Throughout 2021, there was no conflict occurred between Pertamina Trans Kontinental and the community due to Pertamina Trans Kontinental's business operations. Therefore, management does not carry out the handling of social conflicts with any parties who feel aggrieved or affected.

Due Diligent Methods and Scope of Social, Economic and Environmental Impacts of Company Activities

In order to support the Company's business sustainability, which is oriented towards economic, social and environmental aspects, the Company reports on aspects of its Social Responsibility activities. The company also has due diligence from its corporate responsibility activities in the form of periodic meetings, meetings held as needed, multi-stakeholder forums, one-on-one meetings, seminars, exhibitions, satisfaction surveys, or Focus Group Discussions (FGD). can be adjusted to the topic/issue you want to manage.

Important Stakeholders Affected by the Company

It is important for the Company to engage stakeholders. Direct stakeholder involvement by each related division/business unit is carried out routinely, openly, and honestly. This helps the Company to identify, understand, and resolve issues that are most important to stakeholders and the Company's operations. In identifying and interacting with stakeholders in all operational areas, the Company refers to primary data from field research conducted in accordance with the stakeholder identification methodology. The results of the identification

Perusahaan mengacu pada data primer penelitian lapangan yang dilakukan sesuai dengan metodologi identifikasi pemangku kepentingan. Hasil proses identifikasi tersebut menjadi dasar bagi Perusahaan dalam melakukan pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), pengelolaan isu, dan merumuskan program pengembangan masyarakat yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing masyarakat setempat.

Perusahaan menggunakan berbagai metode dalam pelibatan pemangku kepentingan. Keragaman metode ini dilakukan demi memastikan aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan Perusahaan yang tersebar dapat ditangkap dengan efektif dan efisien sehingga Perusahaan dapat bertindak dan mengambil langkah aksi yang terbaik bagi semua pihak. Perusahaan senantiasa memastikan di setiap pelibatan, khususnya yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*), wakil dari setiap kelompok pemangku kepentingan hadir dan terwakili dengan baik.

Oleh karena itu, Perusahaan mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan dan mengelompokkannya ke dalam kelompok pemangku kepentingan, yakni:

1. Pemegang Saham.
2. Kreditur.
3. Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, termasuk instansi yang ada di dalamnya
4. Pekerja.
5. Pelanggan.
6. Pesaing.
7. Mitra usaha/pemasok/supplier/distributor.
8. Komunitas masyarakat dan lembaga.
9. Media Massa.

Dari berbagai kegiatan interaksi dengan para pemangku kepentingan, Perusahaan

process become the basis for the Company to carry out stakeholder engagement, issue management, and formulate community development programs that are in accordance with the context and needs of each local community.

The company uses various methods of stakeholder engagement. This diversity of methods is carried out to ensure that the aspirations and inputs of the Company's scattered stakeholders can be captured effectively and efficiently so that the Company can act and take the best action steps for all parties. The company always ensures that in every engagement, especially those involving multiple stakeholders (*multi-stakeholder*), representatives from each stakeholder group are present and well represented.

Therefore, the Company identifies various stakeholders and groups them into stakeholder groups as follows:

1. Shareholders.
2. Creditors.
3. The government, both Central and Regional, including the agencies in it.
4. Workers.
5. Customers.
6. Competitors.
7. Business partners/ suppliers/ suppliers/ distributors.
8. The community and its institutions.
9. Mass Media

From various interaction activities with stakeholders, the Company adapts to the

menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing pemangku kepentingan. Suara pemangku kepentingan tersebut menjadi salah satu masukan penting bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan maupun dalam menyelaraskan arah strategi perusahaan baik saat ini, maupun di masa yang akan datang. Masing-masing divisi dan unit kerja menyusun program kerja, target, dan rencana aksi berdasarkan pelibatan pemangku kepentingan, arah prospek bisnis, dan target-target operasional Perusahaan.

Isu-Isu Penting Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Perusahaan memberikan imbal balik dengan manfaat yang saling menguntungkan untuk pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, Perusahaan mengidentifikasi isu-isu penting dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Isu-isu penting sosial, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

characteristics of each stakeholder. The voice of these stakeholders is one of the important inputs for the Company in making decisions and in aligning the direction of the company's strategy both now and in the future. Each division and work unit prepares work programs, targets, and action plans based on stakeholder involvement, direction of business prospects, and the Company's operational targets.

Important Social, Economic and Environmental Issues Related to the Impact of Company Activities

The company provides returns with mutually beneficial benefits for community empowerment. Therefore, the Company identifies important issues by conducting Focus Group Discussions (FGDs with internal and external stakeholders. Important social, economic and environmental issues are as follows:

Aspek Aspect	Isu Penting Issue	Keterangan Description	
Sosial Social	Penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberian kesempatan bagi masyarakat menjadi pemasok lokal. Absorption of local labor, and providing opportunities for people to become local suppliers.	Mereka berpendapat bahwa pemberian pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat saat ini sudah optimal. Program pelatihan yang dimaksud, diantaranya berupa kegiatan peningkatan keterampilan berwirausaha. Masyarakat berharap, penerima manfaat yang telah menyelesaikan rangkaian program pelatihan mendapat prioritas penyerapan tenaga kerja oleh Perusahaan maupun kontraktor, selain diarahkan untuk berwirausaha. Atas kebutuhan ini, Perusahaan menyatakan bahwa dalam menerima tenaga kerja yang memang diutamakan berasal dari masyarakat sekitar, sejauh semua persyaratan kemampuan, keterampilan dan kebutuhan terpenuhi.	They assumed that current training and skills development opportunity for the community has been optimal. The training program includes activities to improve entrepreneurial skills. The community hopes that beneficiaries who have completed a series of training programs will receive priority for employment by companies and contractors, in addition to being directed towards entrepreneurship. In response to this need, the Company stated that in recruiting workers that were prioritized from the local community, as long as all fulfilment of abilities, skills and position requirements.

Aspek Aspect	Isu Penting Issue	Keterangan Description	
		Namun demikian, Perusahaan juga meminta pengertian masyarakat agar memahami bahwa Perusahaan belum memerlukan tambahan tenaga kerja maupun pemasok lokal selama tahun 2021. Perusahaan masih terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari sumber daya manusia dan pemasok lokal yang selama ini sudah ada.	However, the Company also requested the public's understanding to understand that the Company does not need additional manpower or local suppliers during 2021. The company continues to improve the efficiency and effectiveness of its existing local workers and suppliers.
Ekonomi Economy	Pencapaian Kinerja Ekonomi dan Alokasi dana CSR. Achievement of Economic Performance and CSR Budget Allocation	Masyarakat berharap Perusahaan lebih transparan dalam menyampaikan pencapaian kinerja ekonomi dan alokasi dana CSR. Masyarakat berharap adanya peningkatan alokasi dana untuk CSR agar program yang diberikan semakin berkualitas dan menyentuh lebih banyak masyarakat. Atas kebutuhan ini, Perusahaan menanggapi bahwa biaya CSR telah disampaikan dalam laporan tahunan dan dapat dibaca oleh publik. Lebih jauh, Perusahaan juga menyatakan bahwa kegiatan CSR lebih mengutamakan pemberdayaan dan membangun kemandirian masyarakat.	Public has an expectation that the Company will be more transparent in delivering economic performance achievements and the allocation of CSR funds. The community hopes that there will be an increase in the allocation of funds for CSR so that the programs provided will be of higher quality and reach more people. In response to this need, the Company responded that CSR costs have been submitted in the annual report and can be read by the public. Furthermore, the Company also explained that CSR activities prioritize empowerment and building community independence.
Lingkungan Environment	Penghijauan untuk pelestarian lingkungan. Greening for environment conservation	Masyarakat berharap Perusahaan lebih meningkatkan kegiatan penghijauan baik di internal maupun eksternal	Public has an expectation that the Company will intensify both internal and external greening activities.

Kegiatan yang Dilaksanakan dan Capaiannya

Dalam pelaksanaannya, PTK menerapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam beberapa aspek program, yaitu pendidikan, lingkungan, sosial masyarakat, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan dana langsung (donasi), kegiatan, pembangunan infrastruktur, dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Activities Implementation and Achievement

In its implementation, PTK has implemented social and environmental responsibility programs in several aspects, such as education, environment, social society, health, infrastructure, and empowerment. The form of assistance provided in form of direct funds (donations), activities, infrastructure development, and adjusted based on needs.

Bidang Bidang	Kegiatan Kegiatan	
Pendidikan Education	Bantuan dana kegiatan maupun program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun tidak terbatas pada lembaga pendidikan formal, non-formal, serta kepada tenaga pendidik, dan lain-lain.	Donation for activities and programs with purpose to improve the quality of education in Indonesia, but are not limited to formal, non-formal educational institutions, as well as to teaching staff, and others.
Sosial masyarakat Social Community	Kegiatan kepemudaan, keagamaan, bantuan anak yatim, dan lain-lain.	Youth, religious activities, charity for orphans, and others.
Kesehatan Health	Bantuan penanggulangan Covid-19 dalam bentuk Alat Pelindung Diri (APD) & dana tunai.	Covid-19 response assistance in the form of PPE & cash.
Infrastruktur Infrastructure	Pembangunan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan infrastruktur fasilitas umum.	Construction, maintenance, maintenance and improvement of public facilities infrastructure
Pemberdayaan Empowerment	Pelatihan dan kemitraan kewirausahaan.	Entrepreneurship training and partnership

BIDANG PENDIDIKAN

- Memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di masa pandemi.
- Mendukung program pemerintah pada masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

EDUCATIONAL SECTOR

- Provide assistance with educational facilities and infrastructure to support teaching and learning activities during the pandemic.
- Support government programs during the Distance Learning (PJJ) period.

LINGKUNGAN DAN KESEHATAN

- Membantu pemerintah dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan pengelolaan limbah sampah.
- Mendukung program pemerintah Kampung Iklim dan Ketahanan Pangan.
- Mendukung program pemerintah dalam peningkatan kesehatan Ibu dan Anak.
- Membantu meningkatkan kapasitas (*skill*) kader posyandu dalam upaya peningkatan layanan Kesehatan.

ENVIRONMENT AND HEALTH

- Assist the government in preventing pollution and environmental damage by managing waste.
- Support the government program of Climate Village and Food Security.
- Support government programs in improving maternal and child health.
- Help increase the capacity (*skills*) of posyandu cadres in an effort to improve health services.

PEMBERDAYAAN

- Mendorong terciptanya wirausahawan yang mampu bersaing dan mandiri dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga.
- Meningkatkan produktifitas kelompok usaha berbasis potensi lokal.

Evaluasi Regulasi Terkait Sosial Kemasyarakatan

Evaluasi atas kebijakan perusahaan di bidang CSR dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan kegiatan CSR yang disampaikan kepada induk perusahaan dan Direksi Perusahaan. Selain itu monitoring pelaksanaan CSR dilakukan setiap tiga bulan sampai enam bulan untuk memantau efektifitas pelaksanaan di lapangan.

Anggaran Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Hingga akhir Desember 2021, Penyaluran dana program tanggung jawab sosial kemasyarakatan PTK dengan total biaya Rp1.588.195.000,00. Berikut adalah rincian kegiatan dan anggaran biaya tanggung jawab sosial kemasyarakatan PTK:

Biaya CSR Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2021

CSR Budget in the Social Community Aspect in 2021

Program/ Kegiatan Program/Activities		Triwulan Quarter	Realisasi Dana CSR (Rp) Realization of CSR Funds
Terminal Wifi di Jakarta	Wifi Terminals in Jakarta	IV	102.500.000
Bank Sampah di Makassar, Medan, Jambi	Waste Banks in Makassar, Medan, Jambi	IV	220.950.000
Pelatihan Penyiapan Asupan Tambahan Gizi di Jakarta	Nutritional Supplementary Intake Preparation Training in Jakarta	IV	48.450.000
Makanan Tambahan Asupan Gizi di Jakarta	Nutritional Supplementary Food in Jakarta	IV	55.600.000

EMPOWERMENT

- Encouraging the creation of entrepreneurs who are able to compete and be independent in an effort to improve the family economy.
- Increase the productivity of business groups based on local potential.

Evaluation of Regulations Related to Social Affairs

Evaluation of the company's policies in the field of CSR is carried out in the form of compiling CSR activity reports which is submitted to the parent company and the Company's Directors. In addition, monitoring of CSR implementation is carried out every three months to six months to monitor the effectiveness of implementation in the field.

Community Social Responsibility Activity Budget

As end of December 2021, PTK social responsibility program budget disbursement achieved total cost of Rp1,588,195,000.00. Details activities and PTK social responsibility budget realization are as follows:

Biaya CSR Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2021

CSR Budget in the Social Community Aspect in 2021

Program/ Kegiatan Program/Activities		Triwulan Quarter	Realisasi Dana CSR (Rp) Realization of CSR Funds
Peningkatan Kesehatan Balita dan Lansia di Tanggamus	Improving the Health of Toddlers and Elderly in Tanggamus	IV	77.800.000
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu di Tanggamus	Capacity Building for Posyandu Cadres in Tanggamus	IV	75.200.000
Penyuluhan Kesehatan Perilaku Hidup Sehat di Tanggamus	Health Counseling on Healthy Lifestyle at Tanggamus	IV	75.500.000
Pemberdayaan Perempuan di Balikpapan, Makassar, Medan, Jambi	Women Empowerment in Balikpapan, Makassar, Medan, Jambi	IV	297.750.000
Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Budidaya Keramba Jaring Apung di Tanggamus	Knowledge Improvement and Development of Floating Net Cage Cultivation in Tanggamus	IV	102.000.000
Peningkatan Pengetahuan dan Keahlian Petani di Tanggamus	Increasing Knowledge and Expertise of Farmers in Tanggamus	IV	103.250.000
Perkembangbiakan hewan ternak dan pengelolaannya di Tanggamus	Breeding of livestock and their management in Tanggamus	IV	98.500.000
Pembangunan Masjid Raudhatul Jannah dan Musholla KSOP Tembilahan	Construction of Raudhatul Jannah Mosque and Tembilahan KSOP Musholla	IV	14.000.000
Bantuan CSR pada HUT PTK	CSR Assistance on PTK Anniversary	III	131.695.000
Skill Up Apprentice Program	Skill Up Apprentice Program	III	10.000.000
TJSL Award	TJSL Award	III	15.000.000
Qurban	Qurban	III	50.000.000
Santunan Anak Yatim di Yayasan Mansyaul Huda ²	Donations to Orphans at the Mansyaul Huda Foundation ²	II	15.000.000
Santunan Anak Yatim di Buka Bersama PTK & PIS	Donations for Orphans at Breaking with PTK & PIS	I	15.000.000
Bantuan Perbaikan Jalan Menuju SD di Desa Pakpahan	Assistance for Road Repair to Elementary School in Pakpahan Village	I	80.000.000
TOTAL	TOTAL		1.588.195.000

Dampak Kualitatif Kegiatan

Terciptakan hubungan yang baik antara masyarakat yang berada di lingkungan bisnis Perusahaan dengan Pertamina Trans Kontinental, serta citra yang positif bahwa Perseroan memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Qualitative Impacts of Activities

A harmonious relationship is created among people in the Company's business environment and Pertamina Trans Kontinental, as well as a positive reputation that the Company has a care and concern to interests of the society and the environment.

Tanggung Jawab Sosial Terkait K3

Social Responsibility Related to HSSE

Dalam aspek ketenagakerjaan, PTK melaksanakan pengelolaan SDM dengan menerapkan sistem kesetaraan kesempatan dalam pelaksanaan program rekrutmen, kesempatan kerja dan program-program pengembangan pegawai serta implementasi hubungan industrial.

In employment aspect, PTK implements HR management by implementing an equal opportunity system in the implementation of recruitment programs, job opportunities and employee development programs as well as the implementation of industrial relations.

Komitmen

Perusahaan berupaya untuk dapat memenuhi hak-hak para pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar bagi Perusahaan dalam menjalankan hubungan industrial dengan tenaga kerja. Perusahaan berupaya untuk menjadi perusahaan yang taat asas dan taat aturan termasuk di bidang ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perusahaan berupaya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja untuk meningkatkan profesionalisme pekerja, sistem imbal jasa yang sepadan hingga kesehatan serta keselamatan kerja bagi seluruh pekerja.

Kesehatan dan keselamatan bukan hanya diprioritaskan ke dalam Perusahaan, namun juga diperluas ke semua mitra, kontraktor, dan vendor bisnis pihak ketiga. Untuk memastikan bahwa peraturan, kebijakan, dan prosedur keselamatan telah diterapkan dengan benar

Commitment

The Company strives to fulfill rights of employees as regulated in Law No. 13 of 2003 on Employment. The law is also the basis for the Company in implementing industrial relations with workers. The Company strives to be a company with legal and law compliance, including in employment, occupational health and safety. The Company strives to comply with all prevailing laws and regulations. The Company pays high attention and commitment in terms of gender equality and job opportunities, job training to develop employee professionalism, as well equivalent remuneration system up to occupational health and safety for all employees.

Health and safety are not only prioritized internally within the Company but also extended to all partners, contractors and third-party business vendors. To ensure that the safety regulations, policies and procedures have been implemented



dan konsisten, Perusahaan terus melibatkan setiap divisi, unit kerja, dan pihak ketiga melalui serangkaian pelatihan keselamatan, lokakarya, serta pesan-pesan komunikasi lainnya. Perusahaan mendukung inisiatif-inisiatif edukatif dengan menanamkan rasa disiplin yang kuat serta memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan keselamatan akan mendapatkan sanksi yang tegas. Standar dan persyaratan keselamatan adalah bagian dari perjanjian kontrak antara Perusahaan dan pihak ketiga. Perusahaan memiliki tujuan agar standar ini sepenuhnya dipenuhi saat melakukan semua kegiatan bisnis. Pelanggaran terhadap standar yang telah disepakati akan mendapatkan konsekuensi hukum.

correctly and consistently, the Company continues to involve every division, work unit and third parties through a series of safety trainings, workshops and other communication messages. The company supports educational initiatives by instilling a strong sense of discipline and ensuring that any violation of safety regulations will be subject to strict sanctions. Safety standards and requirements are part of the contractual agreement between the Company and third parties. It is the aim of the company that these standards are fully met when conducting all business activities. Violation of the agreed standards will have legal consequences.

Kebijakan dan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan K3

Aspek Keselamatan Kerja merupakan salah satu hal yang jadi perhatian manajemen Perusahaan. PTK berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang selamat, aman dan nyaman untuk mendukung terciptanya kinerja Perusahaan yang optimal. Kebijakan terkait keselamatan dan kesehatan kerja PTK tercantum dalam Keputusan Direksi tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kebijakan lainnya, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- b. Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- d. PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan SMK3

Due Diligence Terkait Permasalahan Ketenagakerjaan

Topik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) penting disajikan dalam laporan ini mengingat kegiatan operasional Perusahaan memiliki potensi risiko K3 dan dapat mempengaruhi keberlanjutan operasi. Perusahaan menjalankan pengelolaan K3 dalam rangka pencapaian *zero accident* dan *zero fatality* menuju *World Class Safety Culture*. Pengelolaan K3 mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan SMK3. Perusahaan juga bekerja sama dengan pihak eksternal menyelenggarakan pelatihan teknis yaitu ISO14001, OHSAS 18001 dan SMK3.

Due Diligence Related to Labor Issues

The Occupational Safety aspect is one of the things that the Company's management pays attention to. PTK strives to create a safe, secure and comfortable work environment to support the creation of optimal Company performance. Policies related to occupational safety and health of PTK are listed in the Board of Directors' Decree on Occupational Safety and Health (K3) Policies. Other policies, namely:

- a. Law No. 01 of 1970 concerning Occupational Safety
- b. Law No. 13 of 2013 concerning Manpower.
- c. Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes.
- d. PP Number 50 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of SMK3

Due Diligence Related to Labor Issues

The Occupational Safety and Health (HSE) topic is important to be presented in this report considering that the Company's operational activities have potential HSE risks and may affect operational sustainability. The Company implements the HSE management in order to achieve zero accidents and zero fatality towards a World Class Safety Culture. K3 management refers to PP Number 50 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of SMK3. The company also works with external parties to organize technical training, including ISO14001, OHSAS 18001 and SMK3.

Komitmen Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara aman dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) yang dituangkan dalam Kebijakan Perusahaan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan.

Target, Realisasi dan Dampak Kegiatan CSR Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Rencana kegiatan pelaksanaan CSR yang terkait dengan ketenagakerjaan telah tertuang di dalam RKAP PTK yang telah diturunkan dalam Program Kerja SDM yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan SDM dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, penetapan remunerasi sampai dengan *retirement* pekerja. PTK menargetkan untuk dapat melaksanakan praktik-praktik ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang maupun regulasi yang berlaku.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan kesehatan pekerja adalah berupa jaminan pemeliharaan kesehatan serta keikutsertaan pekerja pada program BPJS Kesehatan. Dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai, diharapkan produktivitas pekerja akan terus terjaga dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

PTK juga memiliki komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko K3 dalam kegiatan Perusahaan dikendalikan dengan tujuan untuk mencegah dan melindungi setiap orang, aset Perusahaan

The Company's commitment to carrying out its operational activities safely by applying high standards to the Health and Safety and Environmental (K3LH) aspects as outlined in a written Company Policy signed by the President Director.

Targets, Realizations and Impacts of CSR Activities on Employment, Health and Safety (HSE)

CSR implementation activity plan related to employment has been disclosed in PTK RKAP which has been descended in HR Work Program related to the implementation of HR management starting from recruitment process, competency development, determining remuneration to employee retirement. PTK has set targets to carry out labor practices in accordance with prevailing laws and regulations.

Meanwhile, related to employee health management, is provided in form of health care insurance and employee participation in BPJS Kesehatan program. Adequate health facilities provision is expected to continuously maintain employee productivity and experience continuous improvement.

PTK is also committed to occupational safety and health by ensuring that the potential hazards and risks to K3 in the Company's activities are controlled with the aim of preventing and protecting every person, company assets and the

dan lingkungan sekitar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. PTK merencanakan untuk melakukan pembinaan, penerapan, dan pemeliharaan K3 di lingkungan Perseroan secara berkesinambungan.

- Memberikan prioritas pertama untuk aspek HSSE;
- Mengidentifikasi potensi bahaya dan mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden;
- Menekankan kepada seluruh pekerja untuk mematuhi semua peraturan perundangan dan ketentuan HSSE;
- Meningkatkan secara berkelanjutan sistem pengelolaan HSSE;
- Mensyaratkan kontraktor untuk menerapkan CSMS dalam menjalankan kegiatan di lingkungan perusahaan;
- Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja agar melakukan pekerjaannya dengan benar dan aman;
- Membina hubungan baik, penuh pengertian antara kegiatan operasional perusahaan dengan masyarakat sekitarnya;
- Mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan melalui upaya pembinaan dan pengintegrasian aspek K3LL dalam bisnis

Dalam menjalankan bisnisnya PTK mengedepankan aspek HSSE sebagai salah satu persyaratan utama dalam mengikuti tender, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat suatu pekerjaan serta meminimalisasi kerugian yang timbul akibat dari terjadinya kecelakaan pada manusia, aset dan lingkungan.

surrounding environment from the possibility of occupational accidents and occupational diseases. PTK plans to carry out HSE guidance, implementation and maintenance within the Company on an ongoing basis.

- Give first priority to HSSE aspects;
- Identify potential hazards and reduce risks as low as possible to prevent incidents from occurring;
- Emphasize all employees to comply with all HSSE laws and regulations;
- Continuously improve HSSE management system;
- Require contractors to apply CSMS in carrying out activities within the Company;
- Increase awareness and competence of workers to do their jobs properly and safely;
- Fostering good, understanding relationships between the company's operational activities and the surrounding community;
- Preventing and overcoming accidents, occupational diseases and environmental pollution through efforts to develop and integrate K3LL aspects into business

In running its business, PTK prioritizes the HSSE aspect as one of the main requirements in participating in tenders, preventing work accidents, environmental pollution and occupational diseases and minimizing losses arising from accidents to humans, assets and the environment.



Lingkup Pengaruh Perusahaan Dalam Bidang Ketenagakerjaan

Kehadiran Pertamina Trans Kontinental telah memberikan pengaruh dan dampak positif di bidang ketenagakerjaan dengan turut serta memberikan kesempatan bagi masyarakat seluas-luasnya untuk bekerja sesuai kapasitas dan persyaratan yang kerja yang berlaku. Sepanjang sejarahnya, perusahaan ini telah ikut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menikmati manfaat ekonomi melalui remunerasi yang mereka terima sebagai pekerja. Saat ini Pertamina Trans Kontinental mempekerjakan pekerja sebanyak 898 orang.

Mekanisme Penanganan Konflik Terkait Ketenagakerjaan

Pada tahun 2021 tidak terjadi konflik ketenagakerjaan atau masalah hubungan industrial. Namun demikian, kami memiliki mekanisme penanganan dan mitigasi apabila terjadi konflik. Kepentingan pekerja dalam hubungan industrial terwakili oleh organisasi Serikat Pekerja PTK. Melalui organisasi ini, maka semua permasalahan ketenagakerjaan dimusyawarkan dengan mengacu kepada Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB).

Penghargaan di Bidang Ketenagakerjaan

Program Penghargaan merupakan pengakuan dan ungkapan terima kasih kepada pekerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atas pengabdian dan prestasi yang telah dicapai. Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) dengan beberapa jenjang waktu pengabdian sebagai berikut:

Scope of Company Influence in the Employment Sector

Existence of Pertamina Trans Kontinental has contributed a positive influence and impact in the employment sector by participating in providing opportunities for the widest possible community to work in accordance with the capacities and working conditions that apply. Throughout its history, this company has provided opportunities for people to enjoy economic benefits through the remuneration they receive as employees. Currently Pertamina Trans Kontinental is supported by 898 workers.

Industrial Dispute Settlement Mechanism

In 2021, there was no labor conflicts or industrial relations problems. However, we conflict handling and mitigation mechanism for any case of conflict. The interests of workers in industrial relations are represented by the PTK Workers Union organization. Through this organization, all labor issues are discussed with reference to the Collective Labor Agreement (CLA).

Awards in Employment Sector

The Award Program is an acknowledgment and an expression of gratitude to employees in accordance with established criteria for their dedication and achievements. The company provides a Service Anniversary (UTD) award with several levels of service as follows:

Program Penghargaan Pekerja tahun 2021

Awards in Employment Sector in 2021

Masa Kerja Term of service	Penghargaan yang Diterima Awards Received		Jumlah Pekerja Penerima Penghargaan Number of Workers Recipient of Badges/ Pins
	Badge/Pin Badge/Pin	Uang Penghargaan Award Money	
20 Tahun/ years	25 gram	-	13

Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan

PTK berkomitmen senantiasa memperhatikan kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja sebagai aset yang paling berharga. Komitmen tersebut diwujudkan dalam penerapan sistem manajemen terpadu dan praktik Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan (*Health, Safety, Security, Environment/HSSE*) secara konsisten. Tahun 2021, Perusahaan mempertahankan *zero fatality* dengan jumlah jam kerja yang terus meningkat.

Kebijakan

PTK menjawai dan melaksanakan secara sungguh-sungguh nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) untuk setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan strategis Perusahaan, kami berkomitmen untuk mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja, Pengamanan, dan Lindungan Lingkungan yang meliputi:

1. Mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku di semua wilayah dimana Perusahaan beroperasi;

Occupational Health, Safety, Security and Environment

PTK is committed to always concern health, safety and security of workers as the our most valuable assets. This commitment is manifested in the implementation of an integrated Occupational health, safety, security and (HSSE) program consistently. In 2021, the Company maintains zero fatality with the number of working hours that continues to increase. Support

Policy

PTK has whole-heartedly implemented the AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) excellent values for every taken decision and action. To achieve objectives of the Company's vision and mission objectives, we are committed to develop, implement, evaluate and drive continuous improvements on Quality Management, Occupational Health & Safety, Security and Environmental Protection System continuously which includes:

1. Comply with all prevailing laws and regulations in all areas in the Company's operational area;

2. Mengidentifikasi semua potensi bahaya dan kerugian serta mengkaji risiko untuk menetapkan prioritas dan menyusun langkah pencegahan dan mitigasi yang diperlukan;
 3. Menetapkan tujuan, target dan program kerja untuk mencapai kinerja unggul dalam menghasilkan produk dan jasa, mencegah cedera dan sakit akibat kerja, memproteksi keamanan personil dan aset, mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi, keandalan dan keutuhan aset;
 4. Membangun dan memelihara sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk menjalankan program kerja yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan target;
 5. Mengkaji dan menerapkan pilihan teknologi terkini sebagai penunjang pelaksanaan proses bisnis Perusahaan;
 6. Mengembangkan dan memelihara sistem tata kerja yang terstandardisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar dan kode internasional serta praktik-praktik industri terbaik yang telah diakui dan relevan;
 7. Mengembangkan dan memelihara rencana dan prosedur tanggap darurat, manajemen krisis dan pemulihan keberlangsungan bisnis yang diuji secara berkala untuk menjamin kesiapsiagaan dan efektivitasnya melalui program pelatihan dan latihan dengan skenario yang kredibel untuk meminimalkan potensi kerugian yang ditimbulkan;
 8. Memastikan semua insiden dan ketidaksesuaian dilaporkan, diinvestigasi, dianalisis, dan dilakukan tindakan perbaikan untuk ditindaklanjuti secara efektif serta dikomunikasikan sebagai pembelajaran;
 9. Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem manajemen Perusahaan melalui
2. Identify all potential hazards and losses as well as assessing risks to set priorities and develop necessary prevention and mitigation measures;
 3. Set goals, targets and work programs to achieve superior performance in producing products and services, prevent work injuries and illness, protect the security of personnel and assets, prevent environmental pollution and improve the efficiency, reliability and integrity of assets;
 4. Build and maintain competent human resources and have a high concern to carry out the work program that is set to achieve goals & targets;
 5. Review and implement the latest means of technology to support the implementation of the Company's business processes;
 6. Develop and maintain a standardized work system that refers to the prevailing laws and regulations, international standards and codes as well as industry practices that are recognized and relevant;
 7. Develop and maintain plans and procedures for emergency response, crisis management & business continuity recovery that are periodically tested to ensure their preparedness and effectiveness through training and training programs with credible scenarios to minimize potential losses incurred;
 8. Ensure that all incidents and non-conformities are reported, investigated, analyzed and corrective actions taken to be followed up effectively and communicated as learning;
 9. Evaluate the effectiveness of the implementation of the Company's management system through a structured, independent and credible audit process for consideration in management reviews for continuous improvement.

proses audit yang terstruktur, independen dan kredibel sebagai bahan pertimbangan dalam tinjauan ulang manajemen untuk perbaikan yang berkesinambungan.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Kebijakan QHSSE di atas, dalam menjalankan bisnisnya PTK mengedepankan aspek HSSE sebagai salah satu persyaratan utama dalam setiap fase pelaksanaan pekerjaan guna mencegah terjadinya insiden serta meminimalisasi kerugian yang timbul terhadap manusia, lingkungan dan aset serta reputasi Perusahaan.

Strategi HSSE

Sesuai dengan Visi, Misi, Tata Nilai dan Kebijakan QHSSE yang dimiliki, PTK melakukan pengelolaan QHSSE dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencegah semua potensi insiden dan melakukan mitigasi terhadap dampak dari insiden tersebut. Adapun strategi yang dibangun dan dikembangkan serta dilaksanakan adalah sebagaimana berikut ini:

- Mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen terpadu QHSSE yang kuat, ringkas, komprehensif dan efektif dengan turunan program dan sistem tata kelola (STK) sebagai pedoman dalam pelaksanaan di lapangan;
- Mengembangkan sistem digitalisasi (aplikasi komputer) untuk pengelolaan data HSSE untuk mendukung dalam pengambilan keputusan-keputusan penting Perusahaan dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen terpadu QHSSE;
- Membangun budaya kerja HSSE yang terbuka dengan memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap keterlibatan aktif setiap insan PTK dalam upaya-upaya pencegahan dan pelaporan insiden di tempat kerja;

In accordance with the Vision, Mission and QHSSE Policy above, in conducting its business, PTK prioritizes the HSSE aspect as one of the main requirements in each phase of work implementation to prevent incidents and minimize losses arising from people, the environment and assets and the Company's reputation.

HSSE Strategy

In accordance with its Vision, Mission, Values and QHSSE Policies, PTK has implemented QHSSE management with a risk management approach to prevent all potential incidents and mitigate the impact of such incidents. The strategies developed and developed and implemented are as follows:

- Developing and implementing a strong, concise, comprehensive and effective QHSSE integrated management system with derivative programs and governance systems (STK) as a guide for implementation in the field;
- Develop a digitization system (computer application) for HSSE data management to support the decision making of important Company decisions and increase the effectiveness of the implementation of the QHSSE integrated management system;
- Build a transparent HSSE work culture by giving appreciation and appreciation for the active involvement of every CAR person in efforts to prevent and report incidents in the workplace;



- Membangun kepemimpinan dalam QHSSE yang kuat dengan komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen terpadu dan program QHSSE dengan peran aktif setiap Pimpinan menjadi teladan (*role model*) dalam penerapan aspek HSSE di tempat kerja.

- Build strong QHSSE leadership with a high commitment to support the implementation of an integrated management system and the QHSSE program with the active role of each leader being a role model in the HSSE implementation at the workplace.

Empat strategi tersebut menjadi landasan utama setiap insan PTK dalam bertindak untuk mencapai nihil insiden dan kinerja unggul dalam bidang QHSSE.

The four strategies have become main foundation for every PTK's employee in behaving to achieve zero incidents and superior performance in the QHSSE aspect.

Kegiatan dan Capaiannya

Dalam kegiatan operasionalnya, PTK memegang prinsip kehati-hatian dan pentingnya keselamatan serta kesehatan pekerja. Berikut adalah realisasi kinerja HSSE dalam kurun waktu 3 tahun:

Activities and Achievements

In its operations, PTK upholds the prudent principle and the priority of employee safety and health. The HSSE performance realization in 3 years is as follows:

Kinerja HSE

HSE Performance

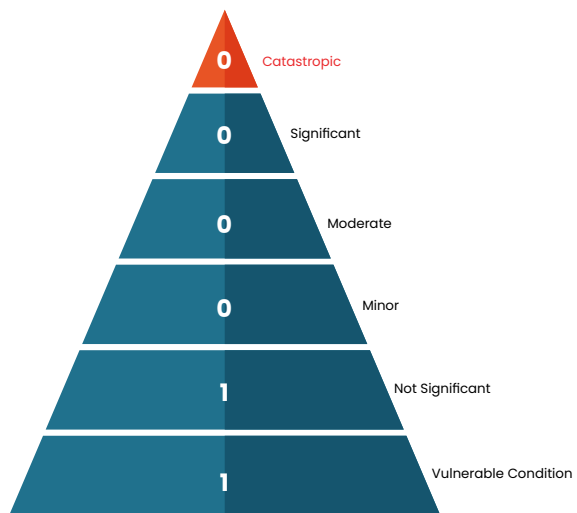
Keterangan Description	2019	2020	2021
<i>Fatalites</i>	0	0	1
<i>Lost Time Incident</i>	0	0	0
<i>Restricted Work Days Cases</i>	0	0	0
<i>Medical Treatment Cases</i>	1	1	0
<i>Environmental Damage > 15 barrel</i>	-	0	0
<i>First Aid Cases</i>	0	2	1
<i>Property Damage</i>	-	0	0
<i>Near Misses/ HIPO</i>	59	54	14
<i>Unsafe Act & Condition</i>	560	1298	1377
<i>Safe Man Hours</i>	6.271.064	7.178.840	6.326.040
TRIR	0	0,14	0,12

Incident Pyramid PTK

SAFETY



SECURITY



$$\begin{aligned}
 \text{LTIR} &= \frac{\text{Jumlah kasus fatality} + \text{Days Away From Work/ Lost Time Incident}}{\text{Jumlah Jam Kerja}} \times 1.000.000 \\
 &= \frac{1 + 0}{8.075.496} \times 1.000.000 = 0,123
 \end{aligned}$$

Untuk meningkatkan kinerja menyeluruh HSSE, untuk tahun 2021 PTK telah melaksanakan program sebagai berikut:

1. *Management Meeting Kantor & Meeting Kapal* terkait HSSE
2. *Management Walkthrough*
3. Audit SMT, Audit ISM-Code & Audit ISPS-Code
4. Inspection
5. Pelatihan
6. HIRA
7. Tanggap Darurat (Kantor/Region/Region dan Kapal)
8. BJST (*Before Joining Ship Training*)
9. HSSE Campaign

Berbagai program kerja QHSSE tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem manajemen terpadu QHSSE yang telah dikembangkan oleh PTK dan sejalan dengan

To improve the overall performance of HSSE, for 2021 PTK has implemented the following programs:

1. Management Meeting Office & Ship Meeting related to HSSE
2. Management Walkthrough
3. SMT Audit, ISM-Code Audit & ISPS-Code Audit
4. Inspection
5. Training
6. HIRA
7. Emergency Response (Office/Branch/Region and Ship)
8. BJST (*Before Joining Ship Training*)
9. HSSE Campaign

The various QHSSE work programs are a form of implementation of the integrated QHSSE management system that has been developed by PTK and is in line with applicable national



standar nasional dan internasional yang berlaku antara lain SMK3, ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ISM-Code dan ISPS-Code serta standar internasional lainnya.

Melalui penerapan berbagai program QHSSE, PTK dapat memaksimalkan upaya-upaya pencegahan kecelakaan dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan sehingga tercipta lingkungan kerja yang nihil cedera dan insiden.

Program Kesehatan dan Sarana Keselamatan

Selama tahun 2021, PTK melakukan berbagai kegiatan guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kondusif, serta menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja. Program terkait kesehatan dan sarana keselamatan kerja PTK antara lain:

- Klinik Kesehatan di lokasi PTK Shore base Tanjung Batu (PSTB)
- Kampanye HSSE
- Health Talk

Anggaran Biaya Program HSSE

PTK menetapkan anggaran terkait pelaksanaan program HSSE sebesar Rp1.610.026.563 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Biaya Program HSSE tahun 2021 HSSE Program Budget in 2021

Kegiatan Activity	BIAYA (RP) Cost (RP)
Safety & Health Expense	1.554.147.563
Security Expense	55.879.000

and international standards, including SMK3, ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environmental Management System, ISO 45001 Health and Safety Management System. Work, ISM-Code and ISPS-Code and other international standards.

Through the implementation of various QHSSE programs, PTK can maximize accident prevention efforts and minimize the impact so as to create a work environment that is zero injuries and incidents.

Health Program and Safety Equipment

Throughout 2021, PTK has conducted several activities to create a healthy, conducive working environment as well as ensure effectiveness of the occupational safety implementation. The program related to occupational health and safety in PTK are as follows:

- Health Clinic at the PTK Shore base Tanjung Batu (PSTB)
- HSSE Campaign
- Health Talk

HSSE Program Budget

PTK has stipulated the budget related HSSE program amounting to Rp1.610.026.563 with the budget breakdown as follows:

Sertifikasi HSSE

Selama periode tahun 2021, perusahaan meraih sertifikat sistem manajemen keselamatan baik untuk di kantor maupun di kapal yaitu:

1. Certificate ISO 9001:2015 yang berlaku s/d 18 Desember 2022;
2. Certificate ISO 14001:2015 yang berlaku s/d 06 November 2023;
3. Certificate ISO 45001:2018 yang berlaku s/d 12 November 2023;
4. Document of Compliance yang berlaku s/d 18 September 2022;
5. Sertifikat SMHSE Kontraktor yang berlaku s/d 28 Maret 2023;
6. Surat Keterangan Lulus Prakuualifikasi CSMS yang berlaku s/d 24 maret 2023.

HSSE Certification

Throughout the 2021 period, the company won a safety management system certificate for both the office and on board, as follows:

1. Certificate ISO 9001:2015 valid until December 18, 2022;
2. Certificate ISO 14001:2015 valid until November 6, 2023;
3. Certificate ISO 45001:2018 valid until November 12, 2023;
4. Document of Compliance valid until 18 September 2022;
5. Contractor SMHSE Certificate valid until 28 March 2023;
6. Certificate of Passing CSMS Prequalification valid until March 24, 2023.

Penghargaan Dalam Pengelolaan HSSE 2020 dan 2021

HSSE Management Award

Penghargaan Award		Tahun Year
Penyelamatan KRI Surik 645 di Perairan Tanjung Jambo Aye	Rescue of KRI Surik 645 in the waters of Tanjung Jambo Aye	2020
Partisipasi membantu Lanal Lhokseumawe dalam pelaksanaan Evakuasi Kapal Akibat Cuaca Buruk	Participation in assisting Lanal Lhokseumawe in carrying out the Ship Evacuation Due to Bad Weather	2020

Dampak Kuantitatif Terkait Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PTK berkomitmen senantiasa memperhatikan kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja sebagai aset yang paling berharga. Komitmen tersebut diwujudkan dalam penerapan praktek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan (*Health, Safety, Security, Environment*) secara konsisten.

Program kesehatan dan keselamatan kerja yang dijalankan secara konsisten telah memberikan dampak positif yaitu kondusifitas

Quantitative Impact Related to Occupational Health and Safety Practice

PTK is committed always concern the health, safety and security of workers as the most valuable assets. This commitment is manifested in the consistent application of Occupational Health, Safety and Environmental practices.

Occupational health and safety programs that have been carried out consistently have had a positive impact, namely the conduciveness

dan kelangsungan operasi perusahaan yang terjaga dengan baik. Hingga akhir tahun 2021, tidak terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja Pertamina Trans Kontinental. Hal tersebut sebagai bukti komitmen perusahaan yang berupaya melakukan tindak preventif melalui berbagai kegiatan seperti edukasi, hingga kelengkapan atribut dan alat baik yang digunakan maupun yang ada di lingkungan kerja para pekerja.

and continuity of company operations that are well maintained. Until the end of 2021, there were no work accidents at Pertamina Trans Kontinental employees. This is evidence of the company's commitment to preventive actions through various activities such as education, to the completeness of attributes and tools both used and those in the work environment of employees.

Dampak Kualitatif Terhadap Turnover Pekerja

Tingkat Turnover Pekerja

Turnover adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pengelolaan SDM dan petunjuk kestabilan pekerja. Sepanjang tahun 2021 terkait dengan tingkat perputaran pekerja (*turnover*), secara keseluruhan terdapat 0 pekerja turnover atau 0% dari keseluruhan jumlah pekerja PTK, dimana angka ini masih berada di bawah rata-rata *turnover rate* industri.

Qualitative Impact on Employee Turnover

Employee Turnover Rate

Turnover is a measure of the success of HR management and an indicator of employee stability. Throughout 2021 related to employee turnover rates, in total there were 0 employee turnover or around 0% of the total number of PTK employees, where this figure is still below the industry average turnover rate.

Jumlah Turnover Pekerja Employee Turnover Rate

Keterangan Description		2019	2020	2021
Jumlah Pekerja	Total Employee	668	898	1.213
Pekerja Mengundurkan Diri	Employee Resigns	3	5	0
Turnover Pekerja (%)	Employee Turnover (%)	0,45%	0,56%	0%

Biaya yang Dikeluarkan

Dalam upaya untuk melaksanakan praktik ketenagakerjaan ini sepanjang tahun 2021, total biaya untuk meningkatkan kompetensi pekerja yang telah dikeluarkan Perusahaan sebesar Rp1.596.931.287.

Budget Allocation

The Company continuously implements sufficient labor practices to retain employees as our main asset. As the effort to implement this labor practice throughout 2021, the total budget for of and benefits that have been allocated by the Company: Rp1.596.931.287.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan

Social Responsibility To Customers

Pelanggan memiliki arti yang sangat besar bagi PTK. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan tanggung jawab kepada pelanggan, PTK selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bersifat proaktif dalam menanggapi segala keluhan atau permasalahan pelanggan. PTK memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur untuk menjaga kepuasan pelanggan dan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan.

Customers have a very significant meaning for PTK. In performing the corporate social responsibility related to responsibility to the customers, PTK strives to deliver excellent service and being proactive in responding to every customer complaint or issue. PTK applies various policies and procedures to maintain customer satisfaction level and as manifestation of responsibility to customers.

Komitmen dan Kebijakan

Pemangku kepentingan yang terkait dengan pemenuhan tanggung jawab produk/jasa adalah pelanggan dan pemasok. Komitmen pada penerapan tanggung jawab produk/jasa kepada pelanggan, dilaksanakan dengan upaya untuk memberikan pelayanan terbaik, baik dalam segmen usaha perkapalan, pengelolaan pelabuhan dan jasa maritim, serta pengelolaan *shore base* dan industri maritim dengan menjamin kualitas jasa yang diberikan melalui pengelolaan manajemen mutu. Sementara komitmen pada penerapan tanggung jawab produk/ jasa kepada pemasok, dilaksanakan dengan penerapan proses tender/lelang yang terbuka dan pemenuhan kewajiban sesuai kontrak pemberian pekerjaan.

Secara berkala PTK melakukan survei kepuasan kepada pelanggan dan pemasok, untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan jasa yang

Commitment and Policy

Stakeholders who are related to product/service responsibility fulfillment are customers and suppliers. Commitment to the implementation of product/ service responsibilities to customers, carried out with efforts to provide the best service, both in the shipping business segment, port management and maritime services, as well as shore base management and maritime industry by ensuring the quality of services provided through quality management. While the commitment to the implementation of product/service responsibilities to suppliers, is carried out through the adoption of an open tender process and fulfillment of obligations in accordance with the employment contract.

PTK regularly conducts customer and supplier satisfaction surveys, to determine the level of satisfaction with the products and services provided by the Company. In addition, PTK

diberikan Perusahaan. Selain itu PTK juga menyediakan saluran pengaduan yang bisa dimanfaatkan pelanggan maupun pemasok untuk menyampaikan keluhan terkait produk dan layanan jasa yang diberikan Perusahaan.

Rumusan dan Rencana Kegiatan

PTK berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, salah satunya dengan mewujudkan 4 pilar *Quality Management* (QM) Pertamina, yaitu QMA (*Quality Management Assessment*), SM (*System Management*), KOMET (*Knowledge Management*), dan CIP (*Continuous Improvement Program*).

Manajemen mutu yang diterapkan berpedoman pada Kebijakan Manajemen Mutu Perusahaan yang ditetapkan tanggal 13 April 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Pokok-pokok manajemen mutu Perusahaan antara lain:

- Memastikan peran manajemen puncak sebagai *role model* dalam setiap kegiatan yang berbasis perbaikan berkelanjutan;
- Melaksanakan penyelesaian masalah pekerjaan dan ide inovasi dengan metode *continuous improvement* program yang berorientasi pada *value creation*;
- Menerapkan sistem manajemen terintegrasi (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, dan ISM Code), yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dan tuntutan *stakeholder*;
- Mengembangkan budaya berbagi pengetahuan yang mampu memastikan hasil keluaran berupa barang dan jasa berbasis pada pengetahuan;
- Mengelola bisnis Perusahaan berbasis kinerja ekselen secara menyeluruh dan berkelanjutan;

also provides complaints channels that can be used by customers and suppliers to submit complaints related to products and services provided by the Company.

Formulation and Activity Plan

PTK is committed to provide the best service to customers, one of which is by realizing the 4 pillars of Pertamina's *Quality Management* (QM), namely QMA (*Quality Management Assessment*), SM (*System Management*), KOMET (*Knowledge Management*), and CIP (*Continuous Improvement Program*).

The applied quality management is guided by the Company's *Quality Management Policy* which was established on April 13, 2017 and signed by the President Director. The Company's quality management principles include:

- Ensuring the role of top management as a role model in every activity based on continuous improvement;
- Carrying out work problem solving and innovation ideas with a continuous improvement program oriented to value creation;
- Implement an integrated management system (ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, and ISM Code), which is in accordance with business process needs and stakeholder demands;
- Developing a culture of sharing knowledge that is able to ensure outputs in the form of goods and services based on knowledge;
- Manage the Company's business based on excellent and comprehensive performance in a sustainable manner;

- Menciptakan dan memelihara kompetensi sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi persyaratan sistem manajemen mutu dan diakui secara internasional.

Kegiatan yang Dilaksanakan dan Capaiannya

- Pada Tahun 2021 untuk meningkatkan layanan keluhan pelanggan, Perusahaan menerapkan Aplikasi Penanganan Keluhan Pelanggan "We Care", aplikasi berbasis web terintegrasi yang memudahkan penyampaian keluhan dan monitoring penanganan keluhan bagi pelanggan / petugas dengan mudah dapat diakses via HP dan pada WEB.
- Penandatanganan *Service Level Agreement* (SLA) antar fungsi terkait untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan dengan target maksimal 2 (dua) hari kerja.
- Saluran Penyampaian Keluhan:

TELEPON: +62 21 31923005

FAKSIMILI: +62 21 3106804

EMAIL: ptkpusat@ptk-shipping.com

WEB: <https://complain.ptk-shipping.com>

- Upaya perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja operasi dan layanan diluncurkan Perusahaan dengan melaksanakan *Program Strategic Initiative*:

Pembuatan Aplikasi Monitoring Kapal (*Bunker, Speed, Pumping Rate*)

Background

Mempermudah proses *monitoring*, *me-record* dan mengevaluasi seluruh data operasional kapal-kapal PTK yang semakin banyak dan akan terus bertambah banyak. Guna mencegah klaim-klaim dari Pencharter mengenai *Over Bunker*, *Slow Speed*, *Slow Pumping Rate* dan *Cargo Losses*, serta

- Create and maintain human resource competencies that meet the quality management system qualification requirements & recognized internationally.

Activities Carried Out and Their Achievements

- In 2021, to improve customer complaint services, the "We Care" Customer Complaint Handling Application was launched, an integrated webbased application that makes it easy to submit complaints and monitor complaint handling for customers/officers, which can easily be accessed via cellphone and on the WEB.
- Signing Service Level Agreement (SLA) between related functions to follow up customer complaints with a maximum target of 2 (two) working days.
- Complaints Channel:

TELEPON: +62 21 31923005

FAKSIMILI: +62 21 3106804

EMAIL: ptkpusat@ptk-shipping.com

WEB: <https://complain.ptk-shipping.com>

- Continuous improvement efforts to improve operating and service performance were launched by the Company by implementing the Strategic Initiative Program, as follows:

Ship Monitoring Application Development (*Bunker, Speed, Pumping Rate*)

Background

Simplify the process of monitoring, recording and evaluating all operational data of PTK vessels which are increasing and will continue to increase. In order to prevent claims from Pen-charterers regarding *Over Bunkers*, *Slow Speeds*, *Slow Pumping Rates* and *Cargo Losses*, as well as avoiding indications of

menghindari indikasi *Fraud Bunker* dan Cargo.

Goals

- Menciptakan Budaya ANTI FRAUD dalam Perusahaan.
- Meminimalisir klaim yang dapat merugikan Perusahaan.
- Mewujudkan VISI & MISI Perusahaan.
- Memudahkan dalam mereview dan pengarsipan digital.

Optimalisasi Sistem *Crew Change* untuk Memenuhi kebutuhan *Crew* di Fungsi *Manning*

Background

Terus bertambahnya kapal-kapal milik PT Pertamina Trans Kontinental sangat berpengaruh terhadap permintaan jumlah *crew* yang terus meningkat, sehingga dibutuhkan kecepatan, ketepatan dalam proses *recruitmen* & *crew change* (penempatan *crew*) guna menunjang kegiatan operasional kapal.

Goals

- Efektifitas dalam pelaksanaan *recruitmen* & *Crew Change*
- Tidak menimbulkan diskriminasi/kecemburuan diantara *crew* kapal.

Pengoptimalan Penggunaan Aplikasi Sertifikat *Handling* Terhadap *Monitoring* Permohonan Sertifikat di Portal PRIDE

Background

- Jumlah kapal PTK yang semakin bertambah dan tersebar di seluruh Indonesia.
- Adanya wabah Covid-19 yang melanda Indonesia.
- Pemberlakuan *lock down* di daerah Jakarta dan sekitarnya sehingga banyaknya

Fraud Bunkers and Cargo.

Goals

- Creating an ANTI FRAUD Culture within the Company.
- Minimizing claims that can harm the Company.
- Realizing the Company's VISION & MISSION.
- Facilitate the review and digital archiving.

Optimization of the *Crew Change* System to meet *Crew* needs in the *Manning* Function

Background

The increasing number of ships owned by PT Pertamina Trans Kontinental greatly affects the demand for the number of *crew* that continues to increase, so speed and accuracy are needed in the recruitment process & *crew change* (*crew placement*) to support ship operational activities.

Goals

- Effectiveness in the implementation of recruitment & *Crew Change*
- Does not cause discrimination/grudge among ship's *crew*.

Optimize The Use of Certificate *Handling* Applications for *Monitoring* Certificate Applications on the PRIDE Portal

Background

- The number of PTK ships is increasing and scattered throughout Indonesia.
- The Covid-19 outbreak that hit Indonesia.
- Enforcement of Lock Down in Jakarta and its surrounding areas institutions that encourage employees to work fromhome.

lembaga yang menganjurkan pekerjaanya bekerja dari rumah.

Goals

- Memudahkan monitoring permohonan sertifikat
- Pengurusan sertifikat sesuai SOP Dirkapel.
- Menghindari Keterlambatan pengurusan Sertifikat.
- *Memback-up* / mengingatkan staf yang lain selama sistem *shift* bekerja dari rumah

Pembangunan dan Implementasi Vendor Management System

Background

- Banyaknya pendaftar rekanan PTK dalam setiap setiap harinya.
- Belum ada aplikasi yang dapat membantu proses sertifikasi rekanan, keseluruhan proses masih dijalankan secara manual.

Goals

- Mempercepat proses sertifikasi rekanan di PTK.
- Mengurangi penggunaan kertas secara berlebih/ *paperless culture*.
- Meningkatkan akurasi dan kelengkapan data calon rekanan PTK.
- Memanfaatkan teknologi untuk menunjang kinerja fungsi/perusahaan.

Aplikasi Safety Online System (SOS)

Background

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas aspek *Health Safety Security Environment* (HSSE).

Goals

- Menunjukkan kepatuhan dengan persyaratan peraturan yang berlaku

Goals

- Facilitate monitoring of certificate applications
- Management of certificates according to SOP Dirkapel.
- Avoiding delays in certificate management.
- Backing up/reminding other staff during the shift system working from home

Vendor Management System Development and Implementation

Background

- The number of PTK partner registrants every day.
- There is no application that can help the partner certification process, the whole process is still run manually.

Goals

- Expedite the partner certification process at PTK.
- Reducing the use of excessive paper/ *paperless culture*.
- Improve the accuracy and completeness of prospective PTK partner data.
- Utilizing technology to support function/ company performance.

Safety Online System (SOS) Application

Background

In order to improve the quality of the Health Safety Security Environment (HSSE) aspects.

Goals

- Demonstrate compliance with applicable regulatory requirements

- Meningkatkan kepedulian pekerja terhadap aspek *safety*
- Meningkatkan reputasi dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan
- Meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dengan mengintegrasikan masalah lingkungan dalam strategi bisnis
- Meningkatkan *environmental performance*
- Mempercepat proses pelaporan *obit, incident, inspection*, dll

Pembuatan Cradle Khusus Guna Pencegahan Property Lost dan Property Damage pada Kapal-kapal ringan di Pelabuhan Terbuka

Background

Pada saat ini PTK memiliki banyak kapal – kapal ringan seperti RIB, *Mooring Boat* dan *Small Craft* yang tidak memiliki tempat berlindung ketika berada di pelabuhan yang terbuka. Hal tersebut memunculkan risiko property lost dan property damage bagi PTK yang dibuktikan dengan adanya kejadian tenggelamnya kapal RIB 4 di Tanjung Manggis, Bali.

Goals

Mencegah risiko – risiko pada kapal – kapal ringan di pelabuhan terbuka, antara lain:

1. *Property lost*,
2. *Property damage*.

Publikasi Berita Melalui Platform PTK Flash

Background

- Perkembangan teknologi saat ini makin pesat, terutama pada era Digital 4.0 semua sudah mulai melakukan digitalisasi pada proses bisnis tiap usaha.
- Sejalan dengan arahan Dewan Komisaris dan juga komitmen Direksi untuk memaksimalkan teknologi IT dalam setiap

- Increase workers' awareness of safety aspects
- Improve reputation and trust among stakeholders
- Increase efficiency and reduce costs by integrating environmental concerns in business strategy
- Improve environmental performance
- Speeding up the process of reporting *obit, incident, inspection*, etc

Construction of a Special Cradle to Prevent Property Loss and Property Damage on Light Ships at Open Ports

Background

Currently, PTK has many light vessels such as RIB, Mooring Boat and Small Craft which do not have shelter when they are in an open port. This raises the risk of property loss and property damage for PTK as evidenced by the sinking of the RIB 4 ship in Tanjung Manggis, Bali.

Goals

Preventing risks to light ships in open ports, including:

1. Property lost,
2. Property damage

News Publication Through PTK Flash Platform

Background

- The development of technology is currently increasing rapidly, especially in the Digital 4.0 era, all have started to digitize the business processes of each business.
- In line with the direction of the Board of Commissioners and also the commitment of the Board of Directors to maximize IT

bisnis dilingkungan PTK.

- Komitmen Direksi yang mencanangkan "Digitalisasi Proses Bisnis dan
- Penguatan SDM", pada tahun 2021 akan diterapkan di PTK guna mendukung usaha Perusahaan untuk meraih target yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Isu Konsumen

Penanganan serta perhatian yang diberikan oleh Perseroan terkait isu-isu yang dibutuhkan oleh konsumen sejauh ini telah berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan hubungan bisnis. Hal ini disebabkan karena Pertamina Trans Kontinental mengedepankan kepuasan pelanggan.

Evaluasi Regulasi Terkait Konsumen

Sebagai Perusahaan pelayaran dan jasa maritime terkait kegiatan migas, *Health, Safety* dan *Environment* sangat diutamakan oleh Perusahaan, dimana Perusahaan comply dengan regulasi Pemerintah, *Class, International Maritim Organization*, termasuk comply dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Customer untuk *speed, pumprate, bunker consumption* dan audit teknis.

Keselamatan menjadi hal mutlak bagi PTK dalam menjalankan segmen bisnis perkapalan. Perusahaan berkomitmen memenuhi aspek-aspek keselamatan dan mematuhi setiap regulasi yang mengatur keselamatan, baik keselamatan di kapal maupun selama melaksanakan pelayaran. Sesuai regulasi yang ditentukan pihak

technology in every business in the PTK environment.

- Commitment of the Board of Directors which proclaimed the "Digitalization of Business Processes and
- Strengthening Human Resources", in 2021 will be implemented in PTK to support the Company's efforts to achieve the targets set by the Shareholders.

Scope of Company's Impact Related To Consumer Issue

The process and concern of the Company to the several issues required by the customers so far have been implemented properly thereby not causing significant impact on business relation going concern. This is due to the Pertamina Trans Kontinental always prioritizes customer satisfaction.

Regulatory Evaluation Related to Customers

As a Company providing shipping and maritime services related to oil and gas activities, *Health, Safety* and *Environment* become a primary priority of the Company, where the Company complies with Government, *Class, International Maritime Organization* regulations, including compliance with the requirements stipulated by Customer in term of *speed, pumprate, bunker consumption* and technical audit.

Safety becomes a very essential for aspect for PTK in running the shipping business segment. The company is committed to fulfilling safety aspects and complying with every regulation governing safety, both safety on board and during shipping. In accordance with regulations determined by the authorities, PTK provides each vessel with standard safety



berwenang, PTK melengkapi setiap unit kapal dengan peralatan keselamatan standar.

equipment.

Dampak Kualitatif Terkait Tanggung Jawab Produk

PTK memperoleh berbagai penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional atas perbaikan berkelanjutan yang dilakukan.

Survei Kepuasan Pelanggan

Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan setidaknya 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan menunjuk Konsultan PT IPSOS Market & Research meliputi segmen bisnis yakni Sewa Pengelolaan Pelabuhan, Sewa Kapal (khususnya kapal milik), Pertamina Shorebase Tanjung Batu, Keagenan Tanker, Kapal-Kapal Ringan, Pilotage, Ship To Ship, Port Preventive Maintenance, Port Operation, OSR dan Underwater Services dimana dilayani oleh Region, Kantor Pusat dan Project Shorebase Tanjung Batu dengan *scoring* 4,0 dari target 4,0.

Qualitative Impact Related To Product Responsibility

PTK has received various awards at both national and international levels for the continuous improvement activity done.

Customer Satisfaction Survey

The company conducts a customer satisfaction survey at least 1 (one) time a year by appointing a PT IPSOS Market & Research Consultant covering the business segment namely Port Management Lease, Vessel Rentals (especially owned vessels), Pertamina Shorebase Tanjung Batu, Tanker Agency, Light Vessels, Pilotage, Ship to Ship, Port Preventive Maintenance, Port Operation, OSR and Underwater Services which are served by Region, Head Office and Tanjung Batu Shorebase Project with a score of 4.0 from a target of 4.0.

Hasil Survei Kepuasan Terhadap Seluruh Aspek Layanan

Result of Satisfaction Survey on All Service Aspects

Aspek Aspect		Kepuasan Satisfaction	Harapan Expectation
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sewa Kapal Milik	Satisfaction Index of Owned Vessel Charter Service	4,2	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pengelolaan Pelabuhan	Satisfaction Index of Port Management Services	4,0	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pertamina Shorebase Tanjung Batu	Satisfaction Index of Pertamina Shorebase Tanjung Batu Services	4,4	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Keagenan Tanker	Satisfaction Index of Tanker Agency Services	3,9	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kapal – Kapal Ringan	Satisfaction Index of Ship Services – Light Boats	4,3	4,0

Hasil Survei Kepuasan Terhadap Seluruh Aspek Layanan

Result of Satisfaction Survey on All Service Aspects

Aspek Aspect		Kepuasan Satisfaction	Harapan Expectation
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pilotage	Satisfaction Index with Pilotage Service	3,3	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan STS	Satisfaction Index of STS Services	4,0	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Port Preventive Maintenance	Satisfaction Index of Port Preventive Maintenance Services	3,9	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Port Operation	Satisfaction Index of Port Operation Services	3,7	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Oil Spill Response	Satisfaction Index of Oil Spill Response Service	3,7	4,0
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Underwater Services	Satisfaction Index of Underwater Services	4,0	4,0



Laporan Keuangan Audit

Audited Financial Report

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2021/
*31 DECEMBER 2021***



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries as at 31 December 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
16 Maret/March 2022

Daniel Kohar, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1130

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TANGGAL
31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama : Nepos MT Pakpahan
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telepon : 021 – 3192 3005
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Afan Aftory
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telepon : 021 – 3192 3005
Jabatan : Direktur Keuangan & SDM

1. Name : Nepos MT Pakpahan
Address : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telephone : 021 – 3192 3005
Position : President Director
2. Name : Afan Aftory
Address : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telephone : 021 – 3192 3005
Position : Finance & HR Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*
- b. *The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or facts; and*
4. *We are responsible for the Group's internal control systems.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah
except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4, 24	1,263,166	652,483	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya		592	588	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak berelasi	5, 24	1,009,051	516,040	Related parties -
- Pihak ketiga	5	122,257	109,718	Third parties -
Aset kontrak				Contract assets
- Pihak berelasi	6, 24	711,387	625,121	Related parties -
- Pihak ketiga	6	141,933	177,323	Third parties -
Piutang sewa pembiayaan	8	20,876	20,624	Finance lease receivables
Persediaan		65	675	Inventories
Piutang lain-lain		6,159	86	Other receivables
Pajak dibayar di muka - pajak lain-lain	15a	17,752	15,808	Prepaid taxes - other taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	7	80,141	41,569	Advances and prepayments
Jumlah aset lancar		<u>3,373,379</u>	<u>2,160,035</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	10	4,035,264	3,520,066	Fixed assets
Aset hak-guna	14a	182,009	56,332	Right-of-use assets
Aset pajak tangguhan	15e	55,327	43,115	Deferred tax assets
Piutang sewa pembiayaan	8	41,753	61,871	Finance lease receivables
Penyertaan saham	24	5,999	8,098	Investment in shares
Investasi pada ventura bersama	9	84,643	74,425	Investment in a joint venture
Taksiran pengembalian pajak				Estimated tax refund
- Pajak penghasilan	15b	2,179	2,866	Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain	15b	-	65,924	Other taxes -
Pajak dibayar di muka - pajak lain-lain	15a	15,810	-	Prepaid taxes - other taxes
Aset lain-lain		<u>5,498</u>	<u>3,618</u>	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		<u>4,428,482</u>	<u>3,836,315</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET		<u>7,801,861</u>	<u>5,996,350</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2021**
(Expressed in millions of Rupiah
except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
- Pihak berelasi	11, 24	639,972	456,758	Related parties -
- Pihak ketiga	11	230,515	189,211	Third parties -
Biaya masih harus dibayar	12	1,566,119	1,147,039	Accrued expenses
Liabilitas kontrak				Contract liabilities
- Pihak berelasi	13, 24	53,814	105	Related parties -
- Pihak ketiga	13	87,639	115,066	Third parties -
Utang pajak				Taxes payable
- Pajak penghasilan	15c	35,199	6,320	Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain	15c	47,875	14,115	Other taxes -
Utang dividen		9,937	-	Dividend payables
Bagian jangka pendek atas liabilitas sewa	14b	225,166	27,123	Current portion of long-term lease liabilities
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	16	236,777	364,928	Current portion of long-term borrowings
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>3,133,013</u>	<u>2,320,665</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa	14b	48,815	33,794	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	16	1,000,607	883,886	Long-term borrowings
Liabilitas imbalan pascakerja	17	170,312	178,402	Post-employment benefits obligation
Liabilitas pajak tangguhan	15e	-	4	Deferred tax liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>1,219,734</u>	<u>1,096,086</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>4,352,747</u>	<u>3,416,751</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - modal dasar dan disetor penuh 1.106.146 lembar (2020: 693.708 lembar) saham A dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan 819 saham B dengan nilai nominal Rp1.000	18	1,106,146	693,709	Share capital - authorised and fully paid 1,106,146 shares (2020: 693,708 shares) A at par value of Rp1,000,000 per share and 819 shares B at par value of Rp1,000 per share
Tambahan modal disetor		(76,051)	3,000	Additional paid in capital
Rugi komprehensif lain		(101,555)	(117,082)	Other comprehensive loss
Saldo laba				Retained earnings
- Ditentukan penggunaannya	25	75,943	75,943	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		2,444,631	1,924,029	Unappropriated -
JUMLAH EKUITAS		<u>3,449,114</u>	<u>2,579,599</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>7,801,861</u>	<u>5,996,350</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2/1 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
Pendapatan usaha	19	3,800,987	3,058,197	Revenue
Beban pokok pendapatan	20	(2,688,852)	(2,181,550)	Cost of revenue
Laba bruto		1,112,135	876,647	Gross profit
Beban umum dan administrasi	21	(458,185)	(318,096)	General and administrative expenses
Keuntungan/(beban) lain-lain, bersih	22	25,543	(26,955)	Other income/(expenses), net
Pendapatan keuangan		6,597	15,075	Finance income
Beban keuangan	23	(54,172)	(58,860)	Finance costs
Bagian atas laba bersih ventura bersama	9	28,045	22,283	Share in profit of a joint venture
Beban pajak final		(17,723)	(26,164)	Final tax expenses
Laba sebelum pajak penghasilan		642,240	483,930	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	15d	(111,701)	(60,553)	Income tax expenses
Laba tahun berjalan		530,539	423,377	Profit for the year
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain				Other comprehensive income/(loss)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to the profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	17	24,790	(10,746)	Remeasurement of liabilities defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait		(840)	1,109	Related income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to the profit or loss:
Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain		(8,423)	(7)	Changes in the fair value of equity instruments at fair value through other comprehensive income
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif lain		15,527	(9,644)	Total other comprehensive income/(loss)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		546,066	413,733	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss	Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity
				Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	
Saldo 1 Januari 2020	693,709	3,000	(107,438)	75,943	1,677,650	2,342,864
Rugi komprehensif lain	-	-	(9,644)	-	-	(9,644)
Dividen	-	-	-	-	(176,998)	(176,998)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	423,377	423,377
Saldo per 31 Desember 2020	693,709	3,000	(117,082)	75,943	1,924,029	2,579,599
Modal ditempatkan dan disetor penuh	412,437	-	-	-	-	412,437
Penghasilan komprehensif lain	-	-	15,527	-	-	15,527
Dividen	-	-	-	-	(9,937)	(9,937)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	530,539	530,539
Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali	-	(79,051)	-	-	-	(79,051)
Saldo per 31 Desember 2021	1,106,146	(76,051)	(101,555)	75,943	2,444,631	3,449,114

Balance 1 January 2020

Other comprehensive loss

Dividend

Profit for the year

Balance as at 31 December 2020

Issued and fully paid share capital

Other comprehensive income

Dividend

Profit for the year

Restructuring transaction between entities under common control

Balance as at 31 December 2021

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan		3,239,063	2,472,407	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok untuk beban operasi		(1,549,391)	(1,506,978)	Cash paid to suppliers for operating expenses
Pembayaran beban keuangan		(46,548)	(52,840)	Cash payments for finance cost
Pembayaran pajak final		(17,723)	(26,164)	Cash payments of final tax expense
Penerimaan kas dari pendapatan keuangan		6,597	15,075	Cash receipts from finance income
Pembayaran kepada karyawan		(236,337)	(225,633)	Cash payments to employees
Pembayaran atas beban pajak penghasilan badan		(96,421)	(71,198)	Payment of corporate income tax
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		1,299,240	604,669	Net cash flows provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penerimaan dividen dari ventura bersama	9	17,827	20,941	Dividends received from joint venture
Penerimaan piutang pembiayaan		19,866	19,131	Received from lease receivables
Perolehan aset tetap		(806,486)	(773,228)	Acquisition of fixed assets
Penyertaan saham		(4,814)	-	Investment in shares
Arus kas keluar bersih dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali	30	(11,531)	-	Net cash outflow from restructuring transaction between entities under common control
Kompensasi atas pembatalan aset dalam penyelesaian	10	124,800	-	Compensation of cancellation construction in progress
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(660,338)	(733,156)	Net cash flows used for investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan pinjaman		461,875	384,514	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman		(476,998)	(248,520)	Repayments of borrowings
Pembayaran dividen		-	(2)	Dividend paid
Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa	14b	(7,624)	(6,021)	Payments for interest expense of lease liabilities
Pembayaran liabilitas sewa	14b	(8,149)	(74,437)	Repayments of lease liabilities
Arus kas bersih (digunakan)/diperoleh dari aktivitas pendanaan		(30,896)	55,534	Net cash flows (used)/provided from financing activities
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		2,677	10,938	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas		610,683	(62,015)	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	4	652,483	714,498	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas akhir tahun	4	1,263,166	652,483	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pertamina Trans Kontinental ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 9 September 1969 oleh Tan Thong Kie yang diubah dengan notaris yang sama dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Januari 1975 dengan nama PT Pertamina Tongkang. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.Ya.5/5/4 tanggal 21 Januari 1975 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 10 tanggal 4 Februari 1975. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 26 Oktober 2011 oleh Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 104 tanggal 29 April 2021 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan peningkatan modal dasar Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0026793.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 April 2021.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Kramat Raya No. 29.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Maksud Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik baik di dalam negeri maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik tersebut.
- Tujuan Perusahaan adalah untuk:
 - a. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan secara efektif dan efisien.
 - b. Memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Pertamina Trans Kontinental (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 3 dated 9 September 1969, as amended by Notarial Deed No. 1 of the same notary dated 3 January 1975, by Tan Thong Kie under the name of PT Pertamina Tongkang. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No.Ya.5/5/4 dated 21 January 1975 and was published in State Gazette No. 10 dated 4 February 1975. The Company's name was changed to PT Pertamina Trans Kontinental based on Notarial Deed No. 12 dated 26 October 2011, of Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-58581.AH.01.02. Year 2011 dated 29 November 2011.

The Company's Articles of Association have been amended several times, with the latest amendment made by Notarial Deed No. 104 of Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, dated 29 April 2021, regarding the increase in the authorised share capital of the Company. The change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0026793.AH.01.02. Year 2021 dated 30 April 2021.

The Company is domiciled in Jakarta and its head office is located in Jl. Kramat Raya No. 29.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities are as follows:

- The Company's objective is to conduct business in shipping, maritime and logistics services both domestically and abroad, as well as other related or supporting business activities in shipping, maritime and logistics services.
- The Company's objectives are to:
 - a. Make profits based on the principles of effective and efficient management; and
 - b. Contribute to economic activities for the welfare and prosperity of the people.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Struktur Grup

i. Entitas anak

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup".

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, struktur Grup adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiaries	Aktivitas bisnis/ Business activities	Domisili/ Domicile	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Jumlah aset/ Total assets	
				2021	2020	2021	2020
1. PT Peteka Karya Samudera ("PKS") (Berdiri tanggal 10 Februari 1986)/ (Established on 10 February 1986)	Jasa bongkar muat/ Cargo handling	Jakarta	1996	99.99%	99.99%	373,487	224,792
2. PT Peteka Karya Gapura ("PKG") (Berdiri tanggal 5 Juni 1987)/ (Established on 5 June 1987)	Jasa angkutan, penyediaan tenaga kerja dan perdagangan umum/ Transportation service, labor supply and general trade	Jakarta	1998	99.99%	99.99%	300,958	179,639
3. PT Peteka Karya Tirta ("PKT") (Berdiri tanggal 21 Januari 1988)/ (Established on 21 January 1988)	Pengelolaan dan jasa pengadaan air/ Management and water supply services	Jakarta	1998	-*	99.99%	-*	91,351
4. PT Peteka Karya Jala ("PKJ") (Berdiri tanggal 6 November 1991)/ (Established on 6 November 1991)	Perawatan dan pengadaan barang dan jasa/ Maintenance and procurement of goods	Jakarta	1991	99.99%	99.99%	213,794	232,465

Catatan:

*) Pada tanggal 27 Agustus 2021, Grup telah menyelesaikan proses restrukturisasi yang menyebabkan Perusahaan kehilangan pengendalian atas PKT (Catatan 30).

ii. Ventura bersama

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 September 2014 yang risalah rapatnya di dokumentasikan dalam Akta Notaris No. 41 oleh Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA, Perusahaan dan Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT"), mendirikan ventura bersama bernama PT Trans Yeong Maritime ("TYM") sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha dibidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut. Kepemilikan saham Perusahaan di TYM adalah sebesar 51%.

Perusahaan induk langsung dan utama Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero), badan usaha milik negara.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. The Group structure

i. Subsidiaries

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

As at 31 December 2021 and 2020, the structure of the Group was as follows:

Note:

*) On 27 August 2021, the Group has completed a restructuring transaction resulting in the Company losing control of PKT (Note 30).

ii. Joint venture

Based on the Annual Shareholder's meeting dated 16 September 2014, which was documented in Notarial Deed No. 41 by Dewantari Handayani S.H., MPA, the Company and Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT") established a joint venture named PT Trans Yeong Maritime ("TYM"), a company located in Central Jakarta. The joint venture's purpose and objective are related to shipping and harbour services. The Company's share of ownership in TYM is 51%.

The Company's immediate and ultimate parent company is PT Pertamina (Persero), a state-owned enterprise.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Amir Hamzah
Komisaris	Khalid Zabidi
Komisaris	Agustinus Lomboan
Komisaris	Andi Saiful Haq
Direksi	
Direktur Utama	Nepos MT Pakpahan
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Afan Aftory
Direktur Operasi	Hadi Purnomo
Direktur Pemasaran	Arsono Kuswardanu

d. Penyelesaian atas laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan pada tanggal 16 Maret 2022.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Boards of Commissioners, Board of Directors and Employees

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2021 and 2020 were as follows:

	2020	
	-	Board of Commissioners
Ivan Airlangga EP		President Commissioner
Achmad Fachruddin		Commissioner
Andi Saiful Haq		Commissioner
		Board of Directors
Nepos MT Pakpahan		President Director
		Finance and Human Resources Director
Azwani		Operation Director
Hadi Purnomo		Commercial Director
Arsono Kuswardanu		

d. Completion of the consolidated financial statements

These consolidated financial statements were authorised for issuance in accordance with a resolution of the Board of Directors of the Company on 16 March 2022.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The accounting policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention and using the accrual basis except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK")**

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 dibawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis (Definisi Bisnis)";
- Amendemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2;
- Amendemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2;
- Amendemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2;
- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2;
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2;
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19.
- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 110 "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 111 "Akuntansi Wa'd"
- Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK 13 "Properti Investasi", PSAK 48 "Penurunan Nilai Aset", PSAK 66 "Pengaturan Bersama", ISAK 16 "Pengaturan Jasa Konsesi".

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards ("SFAS") and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards ("IFAS")**

The implementation of the following new standards, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2021 did not result in changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for current or prior financial years:

- The amendments to SFAS 22 "Business Combination (Definition of a Business)";
- The amendments to SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" about interest rate benchmark reform batch 2;
- The amendments of SFAS 60 "Financial Instruments Disclosure" about interest rate benchmark reform batch 2;
- The amendments of SFAS 62 "Insurance Contracts" about interest rate benchmark reform batch 2;
- The amendments of SFAS 71 "Financial Instruments" about interest rate benchmark reform batch 2;
- The amendments to SFAS 73 "Lease" about interest rate benchmark reform batch 2;
- The amendments of SFAS 73 "Lease" about rent concessions related to COVID-19.
- SFAS 112 "Accounting for Endowments"
- Annual improvements on SFAS 110 "Sukuk Accounting"
- Annual improvements on SFAS 111 "Wa'd Accounting"
- 2021 Annual improvements on SFAS 1 "Presentation of Financial Statements", SFAS 13 "Investment Property", SFAS 48 "Impairment of Assets", SFAS 66 "Joint Arrangements", IFAS 16 "Service Concession Arrangements".

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar yang akan berlaku efektif pada tahun 2022 - 2025

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Grup, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis (Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan)";
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa".
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 69 "Agrikultur"

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Grup, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan antara lancar dan tidak lancar
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal
- Amendemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah" tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad ijarah.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS") (continued)

Standards which will be effective in 2022 - 2025

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Group's operation, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 are as follows:

- The amendments to SFAS 22 "Business Combination (References to the Conceptual Framework of Financial Reporting)";
- The amendments to SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts";
- Annual improvement on SFAS 71 "Financial Instruments";
- Annual improvement on SFAS 73 "Lease".
- Annual improvements on SFAS 69 "Agriculture"

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Group's operation, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2023 are as follows:

- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities between current and non-current
- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies
- The amendments to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment" about proceeds before intended use
- The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimates
- The amendments to SFAS 46 "Income Tax" about deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction
- The amendments to SFAS 107 "Ijarah Accounting" about recognition, measurement, and disclosure of ijarah contracts.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar yang akan berlaku efektif pada tahun 2022 - 2025 (lanjutan)

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Grup, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi" tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 – informasi komparatif.

b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan ekuitas

(i) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS") (continued)

Standards which will be effective in 2022 - 2025 (continued)

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Group's operation, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2025 are as follows:

- SFAS 74 "Contract Insurance"
- The amendments to SFAS 74 "Insurance Contract" about initial application of SFAS 74 and SFAS 71 - comparative information

b. Principles of consolidation and equity accounting

(i) Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan ekuitas

b. Principles of consolidation and equity accounting

(ii) Entitas asosiasi

(ii) Associates

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost.

(iii) Pengaturan bersama

(iii) Joint arrangements

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor bukan struktur hukum dari pengaturan bersama. Grup telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama. Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui sebagai biaya pada laporan posisi keuangan.

Under SFAS 66 investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor rather than the legal structure of the joint arrangement. The Group has assessed the nature of its joint arrangement and determined them to be joint venture. Joint venture is accounted for using the equity method, after initially being recognised at cost in the statement of financial position.

(iv) Metode ekuitas

(iv) Equity method

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari investee pada laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lain dari investee atas pendapatan komprehensif lain.

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the investor's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in the profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in the other comprehensive income.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

When the Group's share of losses in an associate or joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan ekuitas (lanjutan)

(iv) Metode ekuitas (lanjutan)

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas-entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi dan ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai.

(v) Perubahan kepemilikan

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

b. Principles of consolidation and equity accounting (continued)

(iv) Equity method (continued)

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates and joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in these entities. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the associates and joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividends received or receivable from associates or joint ventures are recognised as a reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investments is tested for impairment.

(v) Changes in ownership interests

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Penjabaran mata uang asing

c. Foreign currency transactions

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

(i) Functional and presentation currency

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional of the Company.

(ii) Transaksi dan saldo

(ii) Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into functional currency using the closing exchange rate. The exchange rate used as a benchmark is the rate that is issued by the Bank of Indonesia. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut (dalam satuan penuh):

The rates of exchange used are as follows (in full amounts):

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Rupiah/1 Dolar Amerika Serikat	14,278	14,105	Rupiah/1 United States

d. Kas dan setara kas

d. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or restricted.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

e. Transactions with related parties

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

The Group have transactions with related parties. The definition of related parties is in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Significant transactions and balances of the Group with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Group elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

f. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha. Bila pembayaran diharapkan akan diterima dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Bila tidak, disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai.

g. Kontrak aset

Kontrak aset merupakan jumlah pendapatan yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan keuangan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan.

h. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Transactions with related parties (continued)

Transactions with related parties are based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

f. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate ("EIR") method, less provision for impairment.

g. Contract Assets

Contract assets represent the unbilled amounts at the end of financial reporting period in respect of services performed.

h. Prepayments

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

i. Fixed assets

Fixed assets are initially stated at the cost of acquisition, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost of acquisition includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Aset tetap (lanjutan)

i. Fixed assets (continued)

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi ketika terjadi.

All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are charged to the profit or loss as incurred.

Kapal milik Grup mengalami pengedokan secara berkala secara umum setiap 2 - 2,5 tahun dan biaya pengedokan tersebut dikapitalisasi sepanjang pengeluarannya dapat menunjukkan peningkatan manfaat ekonomis mendatang kapal. Kapitalisasi biaya tersebut dicatat sebagai penambahan ke harga perolehan kapal untuk kapal yang dimiliki sendiri dan kapal yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, atau dicatat sebagai biaya ditangguhkan untuk kapal yang disewa melalui sewa operasi, dan disusutkan selama periode hingga jadwal pengedokan berikutnya. Total biaya pengedokan terdahulu yang tersisa, jika ada, dihentikan pengakuannya dan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

The Group's vessels generally dock every 2 – 2.5 years and the docking costs are capitalised to the extent that the expenditure results in an increase in the future economic benefit of the vessels. The capitalised costs are recorded as an additional cost of the owned vessels and leased vessels under finance lease arrangements, or are recorded as deferred docking costs of leased vessels under operating lease arrangements, and the costs are amortised over the period up to the next scheduled dry-docking. Any remaining carrying amount of the cost of the previous docking is derecognised, and charged to current year profit or loss.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

Tahun/Years

Bangunan	20	<i>Buildings</i>
Kendaraan dan alat berat	5 - 15	<i>Vehicles and heavy equipment</i>
Peralatan kantor	5	<i>Office equipment</i>
Kapal	25	<i>Vessels</i>
Peralatan kapal	5	<i>Vessel equipment</i>

Masa manfaat aset, nilai sisa, dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The assets' useful lives, residual values and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the financial period-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss and in the period which the asset is derecognised.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

i. Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Biaya konstruksi kapal dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

j. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika aset kualifikasian telah selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

i. Fixed assets (continued)

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

The costs of the construction of vessels are capitalised as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

j. Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised as part of the cost of those assets. Capitalisation of borrowing costs ceases when the qualifying assets are complete and ready for service.

k. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The recoverable amount is the higher of an asset's Fair Value Less Cost to Sell ("FVLCTS") and Value in Use ("VIU"). Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

k. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan dapat untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

l. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**k. Impairment of non-financial assets
(continued)**

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuations or other available fair value indicators.

A previously recognised impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognised in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

l. Leases

The Group as lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

I. Sewa

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluruh kapasitas aset. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Grup memiliki hak ini hanya jika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan telah ditentukan sebelumnya, dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dan mencatat komponen sewa dan non-sewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Leases

The Group as lessee (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assesses whether:

- The contract involves the use of an identified asset - this can be explicitly specified or implicitly, and must be physically distinct or represents substantially all of the total capacity. If the supplier has substantive substitution rights, then there is no identified asset; and
- The Group has the right to obtain substantially all economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right only if it has the rights to make relevant decisions about how and for what purpose the asset is being used is predetermined, and:
 1. The Group has the right to operate the asset; and
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purposes it will be used throughout the period of use

At the inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease component. However, for the leases of improvements whereby the Group is a lessee, the Group has elected not to separate non-lease components and to account for the lease and non-lease components as a single lease component.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Lease liabilities are measured at the present value of any unpaid lease payments at the inception date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that interest rate cannot be determined, then using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses the incremental borrowing rate as the interest rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

Sewa jangka pendek dan yang aset pendasanya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasanya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

I. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities as separate line items in the statement of financial position.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modifications

The Group accounts for a lease modifications as a separate leases if both the:

- modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Sewa (lanjutan)

I. Leases (continued)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Lease modifications (continued)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

For a lease modifications that are not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Group:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right of-use asset for all other lease modifications.*

Grup sebagai pesewa

The Group as lessor

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

l. Sewa (lanjutan)

l. Leases (continued)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

The Group as lessor (continued)

Dalam sewa pembiayaan, dimana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Under a finance lease, where the Group transfers substantially all of the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognised and presents a finance lease receivables in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

The Group recognises lease payments received under operating leases as income on a straight-line basis over the lease term.

Grup sebagai pesewa-antara

The Group as intermediate lessor

Ketika Grup adalah pesewa-antara, Grup memperhitungkan kepentingannya di sewa utama dan subsewa secara terpisah. Grup mengklasifikasikan suatu subsewa dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama, bukan dengan mengacu pada aset pendasar. Jika sewa utama adalah sewa jangka pendek di mana Grup sebagai penyewa telah menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek tersebut, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

When the Group acts as intermediate lessor, it accounts for its interests in the head lease and the sub-lease separately. The Group assesses the lease classification of a sub-lease with reference to the right-of-use asset arising from the head lease, not with reference to the underlying asset. If a head lease is a short-term lease to which the Group applies the exemption for short term lease, then it classifies the sub-lease as an operating lease.

m. Utang usaha dan utang lain-lain

m. Trade and other payables

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha lain-lain berkaitan dengan transaksi pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha normal. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are amounts due to third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (dikurangi biaya transaksi) dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Trade and other payables are recognised initially at fair value (net of transaction cost) and subsequently measured at amortised cost using the EIR method.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

n. Pinjaman

n. Borrowings

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode SBE.

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the year of the borrowing, using the EIR method.

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari fasilitas yang terkait.

Fees paid on the establishment of the loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Biaya pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Borrowing costs either directly or indirectly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalised as part of the cost of that asset until such time as the asset is substantially ready for its intended use or sale. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. All other borrowing costs are recognised in the profit or loss in the period in which they are incurred.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal laporan pelaporan.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

o. Perpajakan

o. Taxation

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

The current income tax charge is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Pendapatan usaha Grup ada yang terkena pajak penghasilan final. Penghasilan Grup atas pendapatan dari jasa perkapalan yang diberikan kepada perusahaan domestik dikenakan pajak final dengan tarif 1,20% sesuai dengan Undang-undang Perpajakan di Indonesia.

Certain revenues are subject to final income tax. The Group's vessel charter income provided to Indonesian companies is subject to a final tax at a rate of 1.20% and under the Taxation Laws of Indonesia.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis dan saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. The deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination and when the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

o. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan berasal dari pajak yang dapat dikompensasi diakui jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan akan saling hapus jika ada hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan jika aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas pajak yang sama pada entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda serta jika ada keinginan untuk melakukan penyelesaian saldo secara neto.

p. Liabilitas imbalan kerja

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau KKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir periode dikurangi nilai wajar aset program.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

o. Taxation (continued)

The deferred tax assets of the tax loss carried forward are recognised when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax losses can be utilised. Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

p. Employee benefits liabilities

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service, or compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labour Law No. 13/2003 or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Labour Law and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the period end date less the fair value of plan assets.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

p. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui dalam laporan laba rugi pada beban imbalan kerja dimana mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke laba komprehensif lainnya yang merupakan bagian dari cadangan lainnya pada tahun dimana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

q. Instrumen keuangan

1. Aset keuangan

Klasifikasi

Secara umum, aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

p. Employee benefits liabilities (continued)

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality Government bonds (considering that currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in the profit or loss in employee benefits expenses reflecting the increase in the defined benefit obligation resulting from employee service in the current year.

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of other reserves in the year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

q. Financial instruments

1. Financial assets

Classification

In general, financial assets are classified in the following two categories:

1. Financial assets at amortised cost; and
2. Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

Pada tanggal pelaporan keuangan, Grup hanya memiliki aset keuangan dengan kategori sebagai biaya diamortisasi dan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dengan kategori biaya diamortisasi terdiri dari "kas dan setara kas", "kas yang dibatasi penggunaannya", "piutang usaha", "kontrak aset" dan "piutang sewa pembiayaan". Aset keuangan dengan kategori nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari "penyertaan saham".

As at the reporting date, the Group only has financial assets which are categorised as amortised cost and fair value through other comprehensive income. The Group's amortised costs comprise "cash and cash equivalents", "restricted cash", "trade receivables", "contract assets" and "finance lease receivables". The Group's fair value through other comprehensive income comprises "investment in shares".

Grup memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

The Group has investments in equity instruments which are classified as financial assets at FVOCI.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

Pengakuan dan pengukuran

Recognition and measurement

Pembelian dan penjualan aset keuangan diakui pada saat tanggal perdagangan dimana, Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah kadaluwarsa atau dialihkan dan Grup telah mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat atas kepemilikan.

Regular purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date, i.e., the date on which the group commits to purchase or sell the asset. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasikan instrumen utang:

- Biaya perolehan diamortisasi:
Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya bersama dengan keuntungan dan kerugian selisih kurs. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

**Recognition and measurement
(continued)**

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

- *Amortised cost:*
Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows solely represent payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses) together with foreign exchange gains and losses. Impairment losses are presented as a separate line item in the profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

**Recognition and measurement
(continued)**

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:
Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lain-lain, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.
- Nilai wajar melalui laba rugi
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

- FVOCI:

Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where payments of principal and interest are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.

- FVTPL

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognised in the profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Investasi pada instrumen ekuitas tidak diuji penurunan nilai.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan tanpa komponen pendanaan yang signifikan diukur dengan jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya. KKE sepanjang umurnya adalah KKE yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

**Recognition and measurement
(continued)**

Equity instruments

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Equity investments are not tested for impairment.

Impairment of financial assets

The Group recognises impairment loss provision for expected credit losses (ECLs) on financial assets measured at amortised cost. Impairment loss provision for trade receivables, contract assets and finance lease receivables without a significant financing component are measured at an amount equal to lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Impairment of financial assets (continued)

Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan. Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan KKE, Grup mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perseroan dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience, credit rating and future information.

KKE adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Grup harapkan untuk diterima). KKE didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

ECLs are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa suatu aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi sebagai berikut:

At each reporting date, the Group assesses whether financial assets carried at amortised cost are credit-impaired. A financial asset is 'credit-impaired' when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari pelanggan;
- pelanggaran kontrak seperti gagal bayar; atau
- ada kemungkinan bahwa pelanggan akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya.

- *significant financial difficulty of the customer;*
- *breach of contract such as default; or*
- *it is probable that the customer will enter bankruptcy or other financial reorganization.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai pada saat pengakuan awal. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi pada awalnya dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Seluruh liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi.

Liabilitas keuangan Grup mencakup utang usaha, utang lain-lain pihak berelasi, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman jangka panjang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortised cost, or derivatives that are designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at their fair values plus directly attributable transaction costs.

All of the Group's financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortised cost.

The Group's financial liabilities include trade payables, other payables to related parties, accrued expenses and long-term borrowings.

Subsequent measurement

After initial recognition, financial liabilities measured at amortised cost are subsequently measured at amortised cost using the EIR method.

Gains and losses are recognised in the statement of profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the amortisation process.

Derecognition

A financial liability is derecognised when, and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

r. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai total kewajiban tersebut dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

q. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another financial liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the profit or loss.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, the entity currently has a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

r. Provision

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

s. Pengakuan pendapatan dan beban

s. Revenue and expense recognition

Pendapatan

Revenue

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

Revenue recognition has to fulfill five steps of assessment:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di yang tertuang dalam nilai kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

1. *Identify contract(s) with customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each the distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin; and*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of said goods or services).*

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. Suatu titik waktu; atau
- b. Suatu periode waktu. Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- a. *A point in time; or*
- b. *Over time. For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

s. Revenue and expense recognition (continued)

Pendapatan (lanjutan)

Revenue (continued)

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognised when the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised when the consideration paid by the customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Jasa pengelolaan kapal dan broker kapal

Ship management and charter broker services

Pendapatan dari jasa pengelolaan kapal dan jasa broker kapal diakui pada waktu tertentu saat pengendalian atas jasa diserahkan kepada pelanggan.

Revenue on ship management and charter broker service is recognised when at a point in time when control over the services is rendered to the customers.

Untuk jasa broker kapal, arus masuk bruto manfaat ekonomi mencakup jumlah yang ditagih untuk kepentingan prinsipal yang tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas Grup. Jumlah yang ditagih atas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan. Pendapatan jasa broker kapal diakui senilai pendapatan bersih atas jasa keagenan kapal atau senilai komisi pada waktu tertentu saat pengendalian atas jasa diserahkan kepada pelanggan.

For charter broker service, the gross inflows of economic benefits include amounts collected on behalf of the principal which do not result in increases of the Group's equity. The amounts collected on behalf of the principle are not revenue. The charter broker revenue is recognised at the net amount of agency services or equal to the commission at a point in time when control over the services is provided to the customers.

Penerapan panduan praktis

Application of practical expedient

Grup memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak menyesuaikan jumlah imbalan atas efek komponen pendanaan signifikan, jika Grup mengharapkan, saat kontrak dimulai, bahwa periode antara saat Grup mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan saat pelanggan melakukan pembayaran atas barang atau jasa adalah satu tahun atau kurang.

The Group applies the practical expedient to not adjust the promised amount of consideration for the effects of a significant financing component if the Group expects, at contract inception, that the period between when the Group transfers a promised good or services to the customer and when the customer pays for the goods or services will be one year or less.

Pendapatan Bunga

Interest revenue

Pendapatan atau biaya bunga untuk semua instrumen keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dicatat menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sebagaimana mestinya, digunakan periode yang lebih singkat, sampai mencapai nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Interest income or expense on all financial instruments measured at amortised cost is recorded using the EIR method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban

Beban dari kontrak dengan pelanggan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak dan menghasilkan meningkatkan atau meningkatkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") dan biaya incremental untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") diakui sebagai aset bila biaya tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diharapkan akan dipulihkan. Aset ini diamortisasi dengan dasar sistematis yang konsisten dengan pengalihan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset tersebut.

Beban lainnya

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Penerapan panduan praktis

Grup memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk mengakui biaya yang terjadi untuk mendapatkan kontrak sebagai beban saat terjadinya jika periode amortisasi aset tersebut adalah satu tahun atau kurang.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Revenue and expense recognition (continued)

Expenses

Expenses from contracts with customers

The costs that directly relate to the contract generate or enhance resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") and incremental costs of obtaining a contract ("cost to obtain") are recognised as assets if they meet the criteria for capitalisation under SFAS 72 and expected to be recovered. These assets are amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the assets relates.

Other expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Application of practical expedient

The Group applies the practical expedient to recognise the incremental cost of obtaining a contracts as an expense when incurred if the amortisation period of the asset that the Group otherwise would have recognised is one year or less.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements:

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2q.

Penentuan kombinasi bisnis atau pembelian kelompok aset atas pengalihan aset tetap dari Pertamina International Shipping

Dalam menentukan apakah transfer aset *marine* non-sarana tambat merupakan kombinasi bisnis atau akuisisi aset, Perusahaan menggunakan pengujian konsentrasi. Jika pengujian konsentrasi terpenuhi, dimana secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi dalam kelompok aset teridentifikasi yang serupa, maka kelompok aset bukan merupakan suatu bisnis.

Manajemen Grup mempertimbangkan bahwa secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi dalam kelompok aset teridentifikasi serupa. Oleh karena itu, manajemen Grup mempertimbangkan bahwa transfer aset *marine* non-sarana tambat adalah akuisisi aset.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun finansial berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Rugi penurunan nilai piutang

Grup menghitung KKE piutang usaha dan piutang lain-lain. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Judgements (continued)

Financial assets and liabilities classifications

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2q.

Determination of business combination or purchase of a group of assets for the transfer of fixed assets from Pertamina International Shipping

In determining whether transfer of non-mooring marine assets are a business combination or assets acquisition, the Company applied the concentration test. If the concentration test is met, whereby substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a group of similar identifiable assets, then the group of assets is determined not to be a business.

The Group management considers that substantially all of the fair value of the gross assets acquired is concentrated in a group of similar identifiable assets. Therefore, the Group's management considers that transfer of non-mooring marine assets are assets acquisition.

Estimation and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that carry a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Impairment loss on receivables

The Group calculates ECL for trade receivables and other receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Rugi penurunan nilai piutang (lanjutan)

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 10 untuk pengungkapan lebih lanjut.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Impairment loss on receivables (continued)

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customers' actual default in the future.

Estimating the useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation, as anchored to business plans and strategies that also consider expected market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The Group estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 and 25 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 10.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya neto imbalan pascakerja mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi- asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pascakerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 2p dan 17.

Pajak penghasilan dan pajak lainnya

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan pengurangan beban tertentu dalam mengestimasi provisi beban pajak penghasilan untuk Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Penghasilan usaha Grup ada yang dikenakan pajak penghasilan final.

Grup mengestimasi bagian final atas biaya umum yang tidak dapat dipisahkan antara bagian pajak penghasilan final dan tidak final dengan alokasi secara proporsional berdasarkan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terhadap penghasilan bruto.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Post-employment benefit

The present value of post-employment liabilities depends on several factors that are determined via an actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amounts of post-employment liabilities.

The appropriate discount rate at the end of the reporting period is the interest rate used in determining the present value of estimated future cash outflows expected to settle other post-employment liabilities. In determining the appropriate level of interest rates, the Group consider the interest rates of Government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which have a time periods similar to those of related employment benefits liability.

The key assumptions used for determining post-employment liabilities include current market conditions. Additional information is disclosed in Notes 2p and 17.

Income taxes and other taxes

Judgements and assumptions are required to determine the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for the Group. In particular, the calculation of the Group's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain, during the ordinary course of business.

Certain revenues of the Group are subject to final income tax.

The Group estimates the final portion of general expenses that cannot be itemised between the final and non-final income tax portion, using an allocation based on proportion of revenue subject to final income tax to the gross revenue.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan dan pajak lainnya (lanjutan)

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Kantor Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2o dan 15.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai penggunaan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Income taxes and other taxes (continued)

All judgements and estimates taken by management, as discussed above, may be challenged by the Tax Office. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognised in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognised in accordance with SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Group conducts an analysis of all tax positions related to income taxes in order to determine if a tax liability for unrecognised tax expense should be recognised.

The Group recognises liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 2o and 15.

Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar dan nilai yang digunakan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi volume transaksi time charter, harga jual time charter (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya operasi, dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK 73, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets (continued)

The determination of the fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected time charter transaction volumes, time charter selling prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserve estimates' above), operating costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in profit or loss.

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased asset are transferred to the lessee based on SFAS 73, which requires the Group to make judgements and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of a leased asset.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management used the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Kas			Cash on hand
Dolar AS	1,285	3,807	US Dollar
Rupiah	<u>3,321</u>	<u>1,430</u>	Rupiah
Jumlah kas	<u>4,606</u>	<u>5,237</u>	Total cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 24)			entities (Note 24)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
("Mandiri")	721,167	105,784	("Mandiri")
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. ("BNI")	179,378	56,143	(Persero) Tbk. ("BNI")
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.			PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
("BSI") (sebelumnya PT Bank			("BSI") (previously PT Bank
Syariah Mandiri ("BSM"))	21,961	52,392	Syariah Mandiri ("BSM"))
BSI	279	-	BSI
BSI (sebelumnya PT Bank			BSI (previously PT Bank
BNI Syariah ("BNIS"))	37	7,034	BNI Syariah ("BNIS"))
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia.
(Persero) Tbk. ("BRI")	<u>37</u>	<u>65</u>	(Persero) Tbk. ("BRI")
	<u>922,859</u>	<u>221,418</u>	
Pihak ketiga	<u>19,232</u>	<u>18,366</u>	Third parties
Dolar AS			US Dollar
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 24)			entities (Note 24)
BNI	257,954	335,221	BNI
Mandiri	10,009	6,232	Mandiri
BRI	<u>66</u>	<u>65</u>	BRI
	<u>268,029</u>	<u>341,518</u>	
Pihak ketiga	<u>34,171</u>	<u>26,426</u>	Third parties
Jumlah kas di bank	<u>1,244,291</u>	<u>607,728</u>	Total cash in banks
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 24)			entities (Note 24)
BNI	<u>-</u>	<u>2,000</u>	BNI
Dolar AS			US Dollar
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 24)			entities (Note 24)
BNI	<u>11,653</u>	<u>14,104</u>	BNI
	<u>11,653</u>	<u>14,104</u>	
Pihak ketiga	<u>2,616</u>	<u>23,414</u>	Third parties
Jumlah deposito berjangka	<u>14,269</u>	<u>39,518</u>	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	<u>1,263,166</u>	<u>652,483</u>	Total cash and cash equivalents

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah	-	3.00%
Dolar AS	0.2%	0.3% - 1.80%

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

The annual interest rates on time deposits during the year were as follows:

Rupiah
US Dollar

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pihak berelasi (Catatan 24)	1,010,334	516,201
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak berelasi	<u>(1,283)</u>	<u>(161)</u>
	<u>1,009,051</u>	<u>516,040</u>
Pihak ketiga	214,410	206,273
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak ketiga	<u>(92,153)</u>	<u>(96,555)</u>
	<u>122,257</u>	<u>109,718</u>
Jumlah	<u>1,131,308</u>	<u>625,758</u>

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pihak berelasi		
0 - 30 hari	940,036	421,249
30 - 90 hari	32,225	68,219
90 - 365 hari	37,794	26,395
Lebih dari 365 hari	<u>279</u>	<u>338</u>
	<u>1,010,334</u>	<u>516,201</u>
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak berelasi	<u>(1,283)</u>	<u>(161)</u>
Jumlah	<u>1,009,051</u>	<u>516,040</u>

Related parties (Note 24)

Less:
Provision for doubtful accounts
of related parties

Third parties

Less:
Provision for doubtful accounts
of third parties

Total

The details of trade receivables based on aging schedule are as follows:

Related parties
0 - 30 days
30 - 90 days
90 - 365 days
More than 365 days

Less:
Provision for doubtful accounts
of related parties

Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
0 - 30 hari	110,612	88,150	<i>0 - 30 days</i>
30 - 90 hari	10,439	19,624	<i>30 - 90 days</i>
90 - 365 hari	4,186	6,212	<i>90 - 365 days</i>
Lebih dari 365 hari	<u>89,173</u>	<u>92,287</u>	<i>More than 365 days</i>
	<u>214,410</u>	<u>206,273</u>	

Dikurangi:			<i>Less:</i>
Provisi penurunan nilai			<i>Provision for doubtful accounts</i>
pihak berelasi	<u>(92,153)</u>	<u>(96,555)</u>	<i>of related parties</i>

Jumlah **Total**

Mutasi saldo provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut: *The movements in the provision for impairment of trade receivables are as follows:*

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	96,716	95,253	<i>Beginning balance</i>
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	-	4,935	<i>Opening balance adjustment upon initial adoption of SFAS 71</i>
Penambahan	2,394	2,111	<i>Additions</i>
Pemulihan	(5,608)	(5,583)	<i>Recovery</i>
Penyesuaian saldo atas transaksi restrukturisasi (Catatan 30)	<u>(66)</u>	<u>-</u>	<i>Adjustment upon restructuring transaction (Note 30)</i>
Jumlah	<u>93,436</u>	<u>96,716</u>	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha.

Management believes that the provision for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables.

6. ASET KONTRAK

6. CONTRACT ASSETS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak berelasi (Catatan 24)	<u>712,243</u>	<u>625,445</u>	<i>Related parties (Note 24)</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Provisi penurunan nilai			<i>Provision for doubtful accounts</i>
pihak berelasi	<u>(856)</u>	<u>(324)</u>	<i>of related parties</i>
	<u>711,387</u>	<u>625,121</u>	

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. ASET KONTRAK (lanjutan)

6. CONTRACT ASSETS (continued)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak ketiga	143,236	178,772	Third parties
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak ketiga	<u>(1,303)</u>	<u>(1,449)</u>	Less: Provision for doubtful accounts third parties
	<u>141,933</u>	<u>177,323</u>	
Jumlah	<u>853,320</u>	<u>802,444</u>	Total
Mutasi saldo provisi penurunan nilai kontrak aset adalah sebagai berikut:			the movements in the provision for impairment of contract assets are as follows:
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	1,773	-	Beginning balance
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	-	1,773	Opening balance adjustment upon initial adoption of SFAS 71
Penambahan	469	-	Additions
Penyesuaian saldo atas transaksi restrukturisasi (Catatan 30)	<u>(83)</u>	<u>-</u>	Adjustment upon restructuring transaction (Note 30)
Jumlah	<u>2,159</u>	<u>1,773</u>	Total

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

7. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Uang muka karyawan	37,550	16,278	Employee advances
Uang muka kerja	25,197	17,752	Operational advances
Biaya dibayar di muka	15,247	5,552	Prepaid expenses
Lain-lain	<u>1,427</u>	<u>1,987</u>	Others
Jumlah	<u>80,141</u>	<u>41,569</u>	Total

Uang muka karyawan merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan untuk kegiatan operasional Grup.

Advances for employee activities represent advances paid to employees for the operational activities of the Group.

Uang muka kerja merupakan uang muka yang digunakan untuk kegiatan jasa kepelabuhanan, jasa pandu tunda dan jasa persediaan kapal.

Advances for operational activities represent advances paid for port services, pilotage and towage services and ship Chandler.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan neto adalah sebagai berikut:

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES

The maturity analysis of gross finance lease receivables and net finance lease receivables is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Piutang sewa pembiayaan bruto:			Gross finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	22,241	22,488	Due within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	<u>42,923</u>	<u>64,377</u>	Due between two and five years
	<u>65,164</u>	<u>86,865</u>	
Dikurangi: pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(2,535)</u>	<u>(4,370)</u>	Less: unearned finance lease income
Piutang sewa pembiayaan neto	<u>62,629</u>	<u>82,495</u>	Net finance lease receivables
Piutang sewa pembiayaan neto:			Net finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	20,876	20,624	Due within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	<u>41,753</u>	<u>61,871</u>	Due between two and five years
Jumlah	<u>62,629</u>	<u>82,495</u>	Total

9. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

9. INVESTMENT IN JOINT VENTURE

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pada awal tahun	74,425	73,083	At the beginning of the year
Bagian atas laba bersih	28,045	22,283	Share of net profit
Dividen yang diterima	<u>(17,827)</u>	<u>(20,941)</u>	Dividends receipt
Saldo akhir	<u>84,643</u>	<u>74,425</u>	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup memiliki ventura bersama sebagai berikut:

As at 31 December 2021 and 2020, the Group had the following joint venture:

<u>Nama entitas/ Name of entity</u>	<u>Lokasi usaha/Place of business</u>	<u>Persentase kepemilikan/ % of ownership interest</u>	<u>Kegiatan usaha/ Business activity</u>	<u>Metode pengukuran/ Measurement method</u>
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Indonesia	51%	Menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut/Conduct activities related to shipping and harbour services	Ekuitas/ Equity

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan TYM pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jumlah aset	328,491	346,311
Jumlah liabilitas	<u>(162,524)</u>	<u>(200,381)</u>
Aset neto	<u>165,967</u>	<u>145,930</u>
Laba bersih tahun berjalan	<u>54,990</u>	<u>43,691</u>
Tidak ada liabilitas kontijensi terkait dengan investasi pada TYM.		

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai investasi, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama.

9. INVESTMENT IN JOINT VENTURE (continued)

Set out below is the summary of financial information for TYM as at 31 December 2021 and 2020, accounted for using the equity method:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Total assets	328,491	346,311	Total assets
Total liabilities	<u>(162,524)</u>	<u>(200,381)</u>	Total liabilities
Net assets	<u>165,967</u>	<u>145,930</u>	Net assets
Net profit for the year	<u>54,990</u>	<u>43,691</u>	Net profit for the year
There is no contingent liability related to the Company investment in TYM.			

Management is of the opinion that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of the investment, therefore, no provision for impairment in the value of investment in a joint venture is necessary.

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	<u>2021</u>						
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deduction</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Dekonsolidasi/ Deconsolidation</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Harga perolehan							Cost
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>							<u>Non-shipping fixed assets</u>
Tanah	38,741	-	-	178	(9,140)	29,779	Land
Bangunan	85,629	89,284	-	13,336	(48,878)	139,371	Buildings
Kendaraan dan alat berat	17,716	975	-	62,576	(5,675)	75,592	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	16,585	345	-	(96)	(2,238)	14,596	Office equipments
	<u>158,671</u>	<u>90,604</u>	<u>-</u>	<u>75,994</u>	<u>(65,931)</u>	<u>259,338</u>	
<u>Aset tetap pelayaran</u>							<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	3,656,142	120,108	-	1,009,529	-	4,785,779	Vessels
Peralatan kapal	104,654	207,033	-	4,305	-	315,992	Vessel equipments
	<u>3,760,796</u>	<u>327,141</u>	<u>-</u>	<u>1,013,834</u>	<u>-</u>	<u>5,101,771</u>	
Aset dalam penyelesaian	821,781	594,931	(130,886)	(1,090,998)	(351)	194,477	Construction in progress
<u>Aset sewa pembiayaan</u>							<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	207	-	-	-	(207)	-	Vehicles
Jumlah	4,741,455	1,012,676	(130,886)	(1,170)	(66,489)	5,555,586	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>							<u>Non-shipping fixed assets</u>
Bangunan	44,117	11,047	-	-	(14,750)	40,414	Buildings
Kendaraan dan alat berat	5,066	5,529	-	(24)	(4,334)	6,237	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	13,552	1,001	-	24	(2,512)	12,065	Office equipments
	<u>62,735</u>	<u>17,577</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(21,596)</u>	<u>58,716</u>	
<u>Aset tetap pelayaran</u>							<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	1,103,299	263,806	-	(181)	-	1,366,924	Vessels
Peralatan kapal	54,898	39,784	-	-	-	94,682	Vessel equipments
	<u>1,158,197</u>	<u>303,590</u>	<u>-</u>	<u>(181)</u>	<u>-</u>	<u>1,461,606</u>	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>							<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	457	-	-	-	(457)	-	Vehicles
Jumlah	1,221,389	321,167	-	(181)	(22,053)	1,520,322	Total
Nilai buku	3,520,066					4,035,264	Net book value

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

	2020				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Cost
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					<u>Non-shipping fixed assets</u>
Tanah	33,058	578	5,105	38,741	Land
Bangunan	81,627	2,102	1,900	85,629	Buildings
Kendaraan dan alat berat	3,740	202	13,774	17,716	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	16,309	276	-	16,585	Office equipments
	134,734	3,158	20,779	158,671	
<u>Aset tetap pelayaran</u>					<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	3,551,628	-	104,514	3,656,142	Vessels
Peralatan kapal	3,817	-	100,837	104,654	Vessel equipments
	3,555,445	-	205,351	3,760,796	
Aset dalam penyelesaian	59,408	988,503	(226,130)	821,781	Construction in progress
<u>Aset sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	207	-	-	207	Vehicles
Jumlah	3,749,794	991,661	-	4,741,455	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					<u>Non-shipping fixed assets</u>
Bangunan	39,737	4,380	-	44,117	Buildings
Kendaraan dan alat berat	3,457	1,609	-	5,066	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	12,781	771	-	13,552	Office equipments
	55,975	6,760	-	62,735	
<u>Aset tetap pelayaran</u>					<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	940,051	163,248	-	1,103,299	Vessels
Peralatan kapal	3,191	51,707	-	54,898	Vessel equipment
	943,242	214,955	-	1,158,197	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	457	-	-	457	Vehicles
Jumlah akumulasi penyusutan	999,674	221,715	-	1,221,389	Total accumulated depreciation
Nilai buku	2,750,120			3,520,066	Net book value

Penyusutan dialokasi sebagai berikut:

Depreciation is allocated as follows:

	2021	2020	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	314,443	218,086	Cost of revenue (Note 20)
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	6,724	3,629	General and administrative expenses (Note 21)
Jumlah	321,167	221,715	Total

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan
atas pinjaman jangka panjang Grup.

Certain fixed assets are pledged as collateral for long-
term loans by the Group.

Aset tetap Grup diasuransikan terhadap risiko
kerugian, kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya
dengan nilai pertanggungan sebesar
AS\$400.590.963 (nilai penuh) pada tahun 2021 dan
(2020: AS\$323.408.982 – nilai penuh). Manajemen
berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut
cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas
risiko tersebut.

Fixed assets of the Group are insured against losses,
accidents, fire and other risks, with the sum insured
amounting to US\$400,590,963 (full amount) in years
2021 (2020: US\$323,408,982 – full amount).
Management believes that the sum insured is
adequate to cover possible losses arising from such
risks.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada tahun 2021, Grup menerima Rp124.800 dari vendor atas pembatalan pembangunan kapal. Uang muka sehubungan dengan kapal tersebut sebesar Rp130.886 dan telah dikurangkan dari aset dalam penyelesaian.

Aset dalam penyelesaian terutama terdiri dari pembuatan kapal yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pembangunan.

10. FIXED ASSETS (continued)

Based on management's assessment, there is no impairment indicator identified to fixed assets as at 31 December 2021.

In 2021, the Group received Rp124,800 from a vendor for the cancellation of construction of a vessel. The advance payment related to this vessel was Rp130,886 and has been deducted from assets under constructions.

Construction in progress mainly consisted of construction of vessels that have not been completed as at the reporting date.

11. UTANG USAHA

	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 24)	639,972	456,758	Related parties (Note 24)
Pihak ketiga	230,515	189,211	Third parties
Jumlah	870,487	645,969	Total

11. TRADE PAYABLES

12. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	2021	2020	
Jasa penunjang operasi dan penyediaan tenaga kerja	435,637	222,777	Marine operations support and labour supply services
Keagenan umum	404,712	187,952	General agencies
Sewa kapal jangka pendek	173,147	97,605	Short-term ship rentals
Pemanduan dan penundaan	136,507	93,496	Towage and pilotage
Provisi bonus karyawan	99,800	68,229	Employee bonus provision
Pembangunan kapal	5,857	222,512	Construction of vessels
Lain-lain	310,459	254,468	Others
Jumlah	1,566,119	1,147,039	Total

12. ACCRUED EXPENSES

13. LIABILITAS KONTRAK

Liabilitas kontrak adalah uang muka pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020	
Pihak ketiga	87,639	115,066	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 24)	53,814	105	Related parties (Note 24)
Jumlah	141,453	115,171	Total

13. CONTRACT LIABILITIES

Contract liabilities are advances from customers with the following details:

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. SEWA

14. LEASES

a. Aset hak-guna

a. Right-of-use assets

2021						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Dekonsolidasi/ Deconsolidation	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan					Costs	
Tanah dan bangunan	74,373	144	1,550	-	76,067	Land and building
Kendaraan dan alat berat	10,216	138	-	(917)	9,437	Vehicles and heavy equipment
Kapal	-	221,334	-	-	221,334	Vessel
Jumlah	84,589	221,616	1,550	(917)	306,838	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation	
Tanah dan bangunan	24,765	24,711	-	-	49,476	Land and building
Kendaraan dan alat berat	3,492	3,398	-	(530)	6,360	Vehicles and heavy equipment
Kapal	-	68,993	-	-	68,993	Vessel
Jumlah	28,257	97,102	-	(530)	124,829	Total
Nilai tercatat	56,332				182,009	Net carrying value

2020					
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification		Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Costs
Tanah dan bangunan	74,263	110	-	74,373	Land and building
Kendaraan dan alat berat	6,650	3,566	-	10,216	Vehicles and heavy
Jumlah	80,913	3,676	-	84,589	Total
Biaya perolehan					Costs
Tanah dan bangunan	-	24,765	-	24,765	Land and building
Kendaraan dan alat berat	-	3,492	-	3,492	Vehicles and heavy
Jumlah	-	28,257	-	28,257	Total
Nilai tercatat	80,913			56,332	Net carrying value

Alokasi beban penyusutan aset hak-guna adalah
sebagai berikut:

The depreciation expenses of right-of-use assets
were allocated as follows:

	2021	2020	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	93,704	24,976	Cost of revenue (Note 20)
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	3,398	3,281	General and administrative expenses (Note 21)
Jumlah	97,102	28,257	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. SEWA (lanjutan)

14. LEASES (continued)

b. Liabilitas sewa

b. Lease liabilities

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	60,917	131,678	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	221,616	3,676	<i>Additions</i>
Beban bunga	7,624	6,021	<i>Interest expense</i>
Pembayaran	(15,773)	(80,458)	<i>Payments</i>
Dekonsolidasi	(403)	-	<i>Deconsolidation</i>
Saldo akhir	<u>273,981</u>	<u>60,917</u>	<i>Ending balance</i>
Bagian lancar	225,166	27,123	<i>Current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>48,815</u>	<u>33,794</u>	<i>Non-current portion</i>
Jumlah	<u>273,981</u>	<u>60,917</u>	<i>Total</i>

Jumlah yang diakui dalam laporan laba/ rugi:

Amounts recognised in the statement of profit or loss:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban bunga	7,624	6,021	<i>Interest expense</i>
Beban terkait sewa jangka pendek	12,717	4,687	<i>Expense related to short-term leases</i>
Beban terkait sewa atas aset bernilai rendah	61	230	<i>Expense related to lease of low value assets</i>

Jumlah yang terkait dengan sewa jangka pendek, sewa atas aset bernilai rendah, dan sewa variabel tidak dimasukkan sebagai liabilitas sewa berdasarkan sifatnya sebagaimana dibahas pada Catatan 21.

Amounts related to short-term leases, leases of low-value assets and variable leases are not required to be included as lease liabilities based on their nature as discussed in Note 21.

Laporan arus kas menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The statement of cash flows shows the following amounts related to leases:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Arus kas dari aktivitas pendanaan			<i>Cash flow from financing activities</i>
Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa	(7,624)	(6,021)	<i>Payments for interest expense of lease liabilities</i>
Pembayaran liabilitas sewa	<u>(8,149)</u>	<u>(74,437)</u>	<i>Repayments of lease liabilities</i>
Jumlah	<u>(15,773)</u>	<u>(80,458)</u>	<i>Total</i>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pajak lain-lain			Other taxes
Entitas anak			Subsidiaries
PPN	33,562	15,808	VAT
Jumlah	<u>33,562</u>	<u>15,808</u>	Total
Bagian lancar	17,752	15,808	Current portion
Bagian tidak lancar	15,810	-	Non-current portion

b. Taksiran pengembalian pajak

b. Estimated tax refund

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pajak penghasilan			Corporate income taxes
Entitas anak			Subsidiaries
- 2019	2,179	2,866	2019 -
	<u>2,179</u>	<u>2,866</u>	
Pajak lain-lain			Other taxes
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Taxes
("PPN") - Perusahaan	-	65,924	("VAT") - the Company
	-	65,924	
Jumlah	<u>2,179</u>	<u>68,790</u>	Total

c. Utang pajak

c. Taxes payable

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pajak penghasilan			Corporate income taxes
Perusahaan			The Company
Kurang bayar pajak			Underpayment of corporate
penghasilan			income taxes
- 2021	16,261	-	2021 -
- 2020	-	1,579	2020 -
- 2016	12,794	-	2016 -
	<u>29,055</u>	<u>1,579</u>	
Entitas anak			Subsidiaries
Kurang bayar pajak			Underpayment of corporate
penghasilan			income taxes
- 2021	6,144	-	2021 -
- 2020	-	4,741	2020 -
	<u>6,144</u>	<u>4,741</u>	
Jumlah	<u>35,199</u>	<u>6,320</u>	

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

c. Utang pajak (lanjutan)

c. Taxes payable (continued)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pajak lain-lain			Other taxes
Perusahaan			The Company
PPN	31,257	-	VAT
Pasal 21	7,032	1,271	Article 21
Pasal 23	1,984	570	Article 23
Pasal 26	-	120	Article 26
Pasal 15	1,334	280	Article 15
Pasal 4(2)	<u>32</u>	<u>-</u>	Article 4(2)
	<u>41,639</u>	<u>2,241</u>	
Entitas anak			Subsidiaries
PPN	5,148	11,000	VAT
Pasal 21	296	-	Article 21
Pasal 22	2	-	Article 22
Pasal 23	739	38	Article 23
Pasal 15	30	-	Article 15
Pasal 4(2)	<u>21</u>	<u>836</u>	Article 4(2)
	<u>6,236</u>	<u>11,874</u>	
	<u>47,875</u>	<u>14,115</u>	
Jumlah	<u>70,280</u>	<u>20,435</u>	Total

d. Beban pajak penghasilan

d. Income tax expense

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Perusahaan			The Company
Kini	83,300	42,611	Current
Tangguhan	(13,445)	(8,705)	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	<u>12,794</u>	<u>1,555</u>	Adjustment in respect of prior years
	<u>82,649</u>	<u>35,461</u>	
Entitas anak			Subsidiaries
Kini	29,145	24,894	Current
Tangguhan	(154)	198	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	<u>61</u>	<u>-</u>	Adjustment in respect of prior years
	<u>29,052</u>	<u>25,092</u>	
Jumlah	<u>111,701</u>	<u>60,553</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between consolidated profit before income tax and the estimated taxable income for the years ended 31 December 2021 and 2020, are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	642,240	483,930	Consolidated profit before income tax expenses
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada tingkat konsolidasian	<u>(33,647)</u>	<u>(24,803)</u>	Profit before tax of subsidiaries after consolidation adjustment
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	<u>608,593</u>	<u>459,127</u>	Profit before income tax - the Company
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Provisi atas liabilitas imbalan pascakerja	757	2,932	Post-employment benefits obligation
Provisi atas bonus karyawan	21,673	15,238	Provision for employee bonus
Provisi atas cadangan penurunan nilai piutang	(2,371)	(2,296)	Provision for impairment of receivables
Penyusutan yang diijinkan untuk aktiva tetap lebih dari biaya penyusutan dalam laporan keuangan	40,209	(10,243)	Allowable tax depreciation of fixed assets in excess than depreciation expense in the financial statements
Provisi atas hak guna aset	5,045	55,114	Provision for right of use assets
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	135,481	115,086	Expense not deductible for tax purposes
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(8,396)	(11,947)	Interest income subject to final tax
Keuntungan dari investasi pada entitas anak	(113,662)	-	Gain on investment in subsidiaries
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(1,663,221)	(1,026,747)	Revenue subject to final tax
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	1,382,572	619,703	Cost of revenue related to revenue subject to final tax
Bagian atas laba bersih ventura bersama	<u>(28,045)</u>	<u>(22,283)</u>	Share in net profit of a joint venture
	<u>(229,958)</u>	<u>(265,443)</u>	
Laba kena pajak Perusahaan	<u>378,635</u>	<u>193,684</u>	Taxable income of the Company
Beban pajak kini:			Current tax expenses:
Perusahaan	83,300	42,611	The Company
Entitas Anak	<u>29,145</u>	<u>24,894</u>	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan kini konsolidasian	<u>112,445</u>	<u>67,505</u>	Consolidated current income tax

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expense (continued)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban pajak kini Perusahaan	83,300	42,611	<i>Current tax expense of the Company</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pajak dibayar di muka			<i>Prepaid income taxes</i>
- Pasal 25	(19,858)	(17,217)	<i>Article 25 -</i>
- Pasal 23	(47,181)	(23,815)	<i>Article 23 -</i>
	<u>(67,039)</u>	<u>(41,032)</u>	
Kurang bayar pajak penghasilan - Perusahaan	<u>16,261</u>	<u>1,579</u>	<i>Underpayment corporate income tax - the Company</i>

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak ("DJP").

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when the Annual Tax Return ("SPT") is submitted to the Directorate General of Taxation ("DGT").

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup berbeda dari nilai teoritis yang muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas konsolidasian sebagai berikut:

The tax on the Group's consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the consolidated entities as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	642,240	483,930	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	141,293	106,464	<i>Income tax calculated at applicable tax rate</i>
Dampak pajak penghasilan atas:			<i>Tax effects of:</i>
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	32,488	50,704	<i>Expenses not deductible for tax purposes</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(387,036)	(269,559)	<i>Revenue subject to final tax</i>
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	317,368	171,263	<i>Cost of revenue related to revenue subject to final tax</i>
Bagian atas laba bersih ventura bersama	(6,170)	(4,902)	<i>Share in profit of a joint venture</i>
Penyesuaian tahun lalu	12,855	1,555	<i>Adjustment in respect of prior years</i>
Penyesuaian pajak tangguhan	<u>903</u>	<u>5,028</u>	<i>Deferred tax adjustment</i>
Beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>111,701</u>	<u>60,553</u>	<i>Consolidated income tax expense</i>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset pajak tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aset pajak tangguhan, neto		
<u>Perusahaan</u>		
Aset atas sewa pembiayaan	(11,325)	(9,228)
Penyertaan saham	(1,320)	(965)
Penyusutan aset tetap	10,979	36
Provisi atas bonus karyawan	10,326	5,559
Sewa	14,006	12,896
Liabilitas imbalan pascakerja	17,645	18,827
Provisi penurunan nilai piutang usaha	<u>13,662</u>	<u>14,184</u>
	<u>53,974</u>	<u>41,309</u>
<u>Entitas anak</u>		
Sewa	(287)	(47)
Penyusutan aset tetap	410	(443)
Liabilitas imbalan pascakerja	230	926
Investasi saham	(85)	-
Provisi penurunan nilai piutang usaha	1,082	1,370
Provisi penurunan nilai persediaan	<u>3</u>	<u>-</u>
	<u>1,353</u>	<u>1,806</u>
	<u>55,327</u>	<u>43,115</u>

Liabilitas pajak tangguhan, neto

<u>Entitas anak</u>		
Penyusutan aset tetap	-	(10)
Provisi penurunan nilai persediaan	-	3
Provisi penurunan nilai piutang usaha	<u>-</u>	<u>3</u>
	<u>-</u>	<u>(4)</u>

Jumlah

55,327 **43,111**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disajikan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Aset pajak tangguhan	55,327	43,115
Liabilitas pajak tangguhan	<u>-</u>	<u>(4)</u>
Jumlah	<u>55,327</u>	<u>43,111</u>

15. TAXATION (continued)

e. Deferred tax assets

The details of deferred tax assets are as follows:

Deferred tax assets, net	
<u>The Company</u>	
Finance lease assets	
Investment in shares	
Fixed assets depreciation	
Provision for employee bonus	
Leases	
Post-employment benefit obligations	
Provision for impairment of trade receivables	
<u>Subsidiaries</u>	
Leases	
Fixed assets depreciation	
Post-employment benefit obligations	
Investment in share	
Provision for impairment of trade receivables	
Provision for impairment of inventories	

Deferred tax liabilities, net

<u>Subsidiaries</u>	
Fixed assets depreciation	
Provision for impairment of inventories	
Provision for impairment of trade receivables	

Total

Deferred tax assets and liabilities presented in the statement of financial position are as follows:

Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

f. Analisis perubahan aset pajak tangguhan

f. Analysis of changes in deferred tax assets

	2021	2020	
Aset pajak tangguhan, neto - awal tahun	43,111	33,564	Deferred tax assets, net - beginning balance
Penyesuaian terkait perubahan tarif pajak penghasilan	(902)	(69)	Adjustment related to changes in income tax rate
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	15,625	8,507	Deferred tax benefit/(expense)
Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	(840)	1,109	Recognised in other comprehensive income
Dekonsolidasi	(1,667)	-	Deconsolidation
Aset pajak tangguhan, neto - akhir tahun	55,327	43,111	Deferred tax assets, net - ending balance

g. Status audit pajak

g. Tax audit status

Pada tanggal 27 Desember 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2016 sebesar Rp12.794. Perusahaan telah membayar kurang bayar pajak penghasilan badan tersebut pada tanggal 7 Januari 2022. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, tidak ada audit pajak yang sedang berlangsung.

On 27 December 2021, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") for Corporate Income Tax fiscal year 2016 amounting to Rp12,794. The Company paid the underpayment on 7 January 2022. As at the date of these consolidated financial statements, there is no ongoing tax audit.

h. Administrasi

h. Administration

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities which are domiciled in Indonesia, calculates and pays taxes on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

16. PINJAMAN

16. BORROWINGS

Pinjaman jangka panjang

Long-term borrowings

	2021	2020	
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24)			Government-related entities (Note 24)
Mandiri	353,807	88,124	Mandiri
BSI (sebelumnya BNIS)	155,084	149,861	BSI (previously BNIS)
BSI (sebelumnya BSM)	164,240	206,910	BSI (previously BSM)
	<u>673,131</u>	<u>444,895</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank BTPN Tbk. ("BTPN") (sebelumnya PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI"))	515,109	705,023	PT Bank BTPN Tbk. ("BTPN") (previously PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI"))
MUFG Bank Ltd. ("MUFG") (sebelumnya The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. ("BOTM"))	49,144	98,896	MUFG Bank Ltd. ("MUFG") (sebelumnya The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. ("BOTM"))
	<u>564,253</u>	<u>803,919</u>	
Jumlah	1,237,384	1,248,814	Total
Jatuh tempo dalam satu tahun	236,777	364,928	Due next year
Bagian jangka panjang	1,000,607	883,886	Non-current portion

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (lanjutan)

PKG

**Notional Pooling PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
("Mandiri")**

Berdasarkan perjanjian *Notional Pooling* No. 050/C0000-PKG/IV/2020 tanggal 20 April 2020, Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Notional Pooling* kepada PT Pertamina (Persero) dan beberapa anak perusahaannya. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah satu tahun dan otomatis diperpanjang sampai dengan lima tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp nil dan Rp14.414.

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")

BSI (sebelumnya BNIS)

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BSI (sebelumnya BNIS) adalah sebagai berikut:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2021/ Balance as at 31 December 2021
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp82.934/Rp82,839	7,58% per tahun/ 7.58% per annum	Juli 2026/ July 2026	Pembiayaan pembelian kapal Transko Taurus/Financing for purchase of Transko Taurus	Rp66.597/ Rp66,597
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp44.720 /Rp44,720	7,50% per tahun/ 7.50% per annum	November 2027/ November 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp44.226/ Rp44,226
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp26.832/Rp26,832	7,50% per tahun/ 7.50% per annum	Desember 2027/ December 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp26.541/ Rp26,541
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp17.888/Rp17,888	7,50% per tahun/ 7.50% per annum	Desember 2027/ December 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp17.720/ Rp17,720

Notional Pooling Mandiri

Berdasarkan perjanjian *Notional Pooling* No. 006/H00000/2016-SO tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian diubah berdasarkan perjanjian No. 008/H00000/2016-SO tanggal 14 Oktober 2016, Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Notional Pooling* kepada PT Pertamina (Persero) dan beberapa anak perusahaannya. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah satu tahun dan otomatis diperpanjang sampai dengan lima tahun.

Berdasarkan surat No. 014/H1810/2016-SO tanggal 18 Agustus 2016, PT Pertamina (Persero) setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp nil dan Rp73,710.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. BORROWINGS (continued)

Long-term borrowings (continued)

PKG

**Notional Pooling PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
("Mandiri")**

Based on *Notional Pooling* agreement No. 050/C0000-PKG/IV/2020 dated 20 April 2020, Mandiri agreed to provide *Notional Pooling* facilities to PT Pertamina (Persero) and its certain subsidiaries. The term of the agreement is one year and will be automatically renewed to five years. The balance of the loan as at 31 December 2021 and 2020 was Rp nil and Rp14,414, respectively.

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")

BSI (previously BNIS)

The details of the long-term bank loans from BSI (previously BNIS) are as follows:

Notional Pooling Mandiri

Based on *Notional Pooling* agreement No. 006/H00000/2016-SO dated 15 August 2016, later amended based on agreement No. 008/H00000/2016-SO dated 14 October 2016, Mandiri agreed to provide *Notional Pooling* facilities to PT Pertamina (Persero) and its several subsidiaries. The term of the agreement was one year and will be automatically renewed to five years.

Based on letter No. 014/H1810/2016-SO dated 18 August 2016, PT Pertamina (Persero) agreed to provide a loan to the Company. The balance of the loan as at 31 December 2021 and 2020 was Rp nil and Rp73,710, respectively.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (lanjutan)

Mandiri

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CBG.CB3/SPPK.035/2021 tanggal 2 Juni 2021, Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Term Loan* kepada Perusahaan dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp442.259.

Jangka waktu pinjaman adalah tujuh tahun dengan *grace period* selama 24 bulan sejak *delivery* kapal terakhir atau 30 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit. Bunga atas pinjaman tersebut adalah JIBOR 1 bulan + 2.05% per tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp353.807 (2020: Rp Nil).

MUFG (sebelumnya BOTM)

Berdasarkan perjanjian kredit No. 17-0320-GC-LN tanggal 13 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dengan nilai fasilitas maksimum sebesar AS\$15.935.000 (nilai penuh).

Jangka waktu pinjaman adalah tahun 2022 dengan *grace period* selama 3 bulan sejak tanggal perjanjian. Bunga atas pinjaman tersebut adalah LIBOR + 1,35% per tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2021 adalah sebesar AS\$3.441.960 (nilai penuh) atau setara dengan Rp49.144 (2020: AS\$7.011.400 (nilai penuh) atau setara dengan Rp98.896).

BTPN (sebelumnya BSMI)

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BTPN adalah sebagai berikut:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp148.548 /Rp148,548	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a rates of JIBOR +1.75% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility AS\$11.326.400 (nilai penuh) /US\$11,326,400 (full amount)	Tingkat bunga LIBOR +1,35% per tahun/Interest at a rates of LIBOR +1.35% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp330.239/Rp330,239	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a rates of JIBOR +1.75% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp148.548/Rp148,548	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at Rates of JIBOR +1.75% per annum
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp93.759/Rp93,759	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a rates of JIBOR +1.75% per annum

16. BORROWINGS (continued)

Long-term borrowings (continued)

Mandiri

Based on the Offering Letter No. CBG.CB3/SPPK.035/2021 dated June 2, 2021, Mandiri agreed to provide a *Term Loan* facility to the Company with a maximum facility value of Rp442,259.

The term of the loan is seven years with a *grace period* of 24 months from the last ship delivery or 30 months from the signing of the Credit Agreement. The interest on the loan is JIBOR 1 month + 2.05% per annum. The loan balance as of December 31, 2021 is Rp353,807 (2020: IDR Nil).

MUFG (previously BOTM)

Based on loan agreement No. 17-0320-GC-LN dated 13 October 2017, the Company obtained financing facility with a maximum amount of US\$15,935,000 (full amount).

The loan period is until 2022 with a *grace period* of three months from the date of the agreement. Interest of the loan is LIBOR + 1.35% per annum. The loan balance as at 31 December 2021 is US\$3,441,960 (full amount) or equivalent to Rp49,144 (2020: US\$7,011,400 (full amount) or equivalent to Rp98,896).

BTPN (previously BSMI)

The details of the long-term bank loans from BTPN are as follows:

Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2021/ Balance as at 31 December 2021
November 2023/ November 2023	Pembiayaan pembelian kapal Transko Antasena/Financing for purchase of Transko Antasena	Rp72.039/ Rp72,039
September 2024/ September 2024	Pembiayaan pembelian kapal Transko Cempala, Sikatan & Gelatik/Financing for purchase of Transko Cempala, Sikatan & Gelatik	US\$6.098.831 (nilai penuh), setara dengan Rp87.079/ US\$6,098,831 (full amount), equivalent to Rp87,079
Agustus 2024/ August 2024	Pembiayaan pembelian kapal HT3200 HP dan Gagak/Financing for purchase of HT3200 HP and Gagak	Rp179.678/ Rp179,678
September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Yudhistira/Financing for purchase of Transko Yudhistira	Rp103.984/ Rp103,984
September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Rajawali/Financing for purchase of Transko Rajawali	Rp72.329/ Rp72,329

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (lanjutan)

BSI (sebelumnya BSM)

Berdasarkan perjanjian kredit No. 22/043/CB2-FOG/VIII/2020/MSYR tanggal 27 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp206.910.

Pada tanggal 23 Maret 2021, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas berdasarkan perjanjian kredit No. 01/034/CB1-FOG/III/2021/MSYR dengan nilai fasilitas maksimum penarikan sebesar Rp90.180.

Jangka waktu pinjaman adalah 66 bulan sejak akad pembiayaan ditandatangani. Bunga atas pinjaman tersebut adalah JIBOR + 2,35% per tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp164.240 dan Rp206.910.

16. BORROWINGS (continued)

Long-term borrowings (continued)

BSI (previously BSM)

Based on loan agreement No. 22/043/CB2-FOG/VIII/2020/MSYR dated 27 August 2020, the Company obtained financing facility with a maximum amount of Rp206,910.

On 23 March 2021, the Company obtained additional facility based on loan agreement No. 01/034/CB1-FOG/III/2021/MSYR with a maximum amount of Rp90,180.

The loan is for 66 months from the date that the financing agreement was signed. Interest on the loan is JIBOR + 2.35% per annum. The balance of the loan as at 31 December 2021 and 2020 was Rp164,240 and Rp206,910, respectively

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Grup memberikan imbalan pascakerja kepada semua karyawan tetapnya. Imbalan yang diberikan adalah imbalan pasti yang berkaitan dengan penghargaan masa kerja yang tergantung pada lamanya masa kerja. Grup mengakui timbulnya biaya pada saat Grup menerima manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan karyawan.

Grup melakukan penyisihan untuk liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang. Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, sesuai laporannya tanggal 14 Januari 2022, menggunakan metode projected unit credit dan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, sesuai laporannya tanggal 8 Januari 2021, menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai yang termasuk dalam laporan posisi keuangan yang berasal dari kewajiban Grup sehubungan dengan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Group provides post-employment benefits to all permanent employees. Benefits provided are defined benefits related to long service appreciation. The Group recognises expenses when the economic benefits of the services provided by the employees have been received.

The Group provide provision for long-term employee benefits liabilities. Long-term employee benefits liabilities as at 31 December 2021 are based on calculation performed by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per its reports dated 14 January 2022, using the projected unit credit method and Long-term employee benefit liabilities as at 31 December 2020 are based on calculation performed by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per its reports dated 8 January 2021, using the projected unit credit method.

The amounts included in the statement of financial position arising from the Group's obligation in respect of these post-employment benefits are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Nilai kini liabilitas	296,979	309,405	Present value of obligation
Nilai wajar aset program	<u>(126.667)</u>	<u>(131.003)</u>	Fair value of plan assets
Liabilitas imbalan kerja	<u>170,312</u>	<u>178,402</u>	Employee benefits liability

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Beban imbalan pascakerja yang dibebankan di
laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Amounts charged in the profit or loss and in respect
of these post-employment benefits are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Biaya jasa kini	35,930	12,567	Current service cost
Biaya jasa lalu	(5,852)	20,169	Past service cost
Biaya bunga	11,228	(8,379)	Interest cost
Pengukuran kembali atas liabilitas yang diakui sebagai imbalan kerja jangka panjang lainnya	(535)	836	Remeasurement on obligation recognised as other long-term employee benefit
Biaya imbalan pascakerja	<u>40,771</u>	<u>25,193</u>	Employee benefits expense

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai selama
tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of unfunded
obligations in the current year were as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pada awal tahun	178,402	161,307	Beginning of the year
Dibebankan pada laporan laba rugi (Dikreditkan)/dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	40,771 (24,790)	25,193 10,746	Charged to profit or loss (Credited)/charged to other comprehensive income
luran oleh Grup	(2,561)	(8,911)	the Group's contribution
Pembayaran imbalan	(11,804)	(9,933)	Benefit payment
Dekonsolidasi	(9,706)	-	Deconsolidation
Nilai kini liabilitas pada akhir tahun	<u>170,312</u>	<u>178,402</u>	Present value of obligation at the end of the year

Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah
sebagai berikut:

The main assumptions used are as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Tingkat diskonto	6.7% - 7.3%	6.5% - 7.4%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9.0% - 10%	9.0% - 10%	Basic salary growth rate
Tabel mortalita	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019	Mortality table
Usia pensiun normal	56	56	Normal retirement age

Dampak akibat dari setiap satu persen (1%)
perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan tingkat
kenaikan gaji pada 31 Desember 2021 adalah
sebagai berikut:

A one percentage (1%) point change in the assumed
discount rate and increase rate at 31 December
2021, would have the following effects:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/Change in assumption	Naik menjadi/ Increase to	Turun menjadi/ Decrease to	
Tingkat diskonto	1.00%	(273,774)	325,947	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	311,209	(285,962)	Salary growth rate

Pada 31 Desember 2021, rata-rata durasi atas
provisi imbalan pascakerja karyawan adalah 12,34
tahun.

As at 31 December 2021, the weighted average
duration of the provision for employee service
entitlements is 12.34 years.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	1 sampai 5 tahun/ <i>Between 1 and 5 years</i>	5 sampai 10 tahun/ <i>Between 5 and 10 years</i>	Lebih dari 10 tahun/ <i>Over 10 years</i>	Jumlah/Total	
Liabilitas imbalan pascakerja	22,502	106,901	161,420	991,812	1,282,635	Post-employment benefit obligation

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

The expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 31 December 2021 is presented below:

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

The structure of shareholders and the percentage of ownerships at 31 December 2021 and 2020 are as follows:

2021				
Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh)/ <i>Number of shares (full amount)</i>	Nilai/ <i>Value</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Shareholders
Saham Seri A				Series A shares
PT Pertamina International Shipping	1,106,135	1,106,135	99.93%	PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Pedeve Indonesia	10	10	0.01%	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Saham Seri B				Series B shares
PT Pertamina International Shipping	819	1	0.06%	PT Pertamina International Shipping
Jumlah	1,106,964	1,106,146	100%	Total
2020				
Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh)/ <i>Number of shares (full amount)</i>	Nilai/ <i>Value</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Shareholders
Saham Seri A				Series A shares
PT Pertamina (Persero)	693,698	693,698	99.88%	PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Pedeve Indonesia	10	10	0.01%	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Saham Seri B				Series B shares
PT Pertamina (Persero)	819	1	0.11%	PT Pertamina (Persero)
Jumlah	694,527	693,709	100%	Total

Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 28 April 2021 oleh Aulia Taufani S.H., pemegang saham sepakat untuk mengalihkan saham Pertamina ke PIS sebesar Rp693.698 saham seri A dan Rp1 saham seri B.

In accordance with Notarial Deed No. 69 dated 28 April 2021 by Aulia Taufani S.H., the the shareholders agreed to transfer Pertamina's shares to PIS in the amount of Rp693,698 series A shares and Rp1 series B shares.

Berdasarkan Akta No. 104 tanggal 29 April 2021 oleh Aulia Taufani S.H., Perusahaan telah meningkatkan modal dengan menerbitkan saham baru yang diambil oleh PIS dengan inbreng aset *marine* non-sarana tambat sebesar Rp412.437. Selain itu Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari semula Rp2.000.001 menjadi Rp4.424.581 dan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp693.709 menjadi Rp1.106.146. Modal dasar yang semula dibagi menjadi 2.000.000 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B menjadi Rp4.424.580 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B.

In accordance with Notarial Deed No. 104 dated 29 April 2021 by Aulia Taufani S.H., The Company increased its capital by issuing new shares which were subscribed by PIS through in-kind capital contribution in the form of non-mooring marine assets of Rp412,437. In addition, the Company decided to increase the authorised capital from Rp2,000,001 to Rp4,424,581 and the issued and paid-up capital from Rp693,709 to Rp1,106,146. The authorised capital was originally divided into 2,000,000 series A shares and 819 series B shares to 4,424,580 series A shares and 819 series B shares.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PENDAPATAN USAHA

19. REVENUE

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan			Revenues from contract with customers
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	1,307,301	924,671	<i>Marine operations support services</i>
Jasa penyediaan tenaga kerja	406,913	364,139	<i>Labour supply services</i>
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	358,237	295,664	<i>Shipping agency and port services</i>
Perdagangan umum	176,393	109,384	<i>General trading</i>
Pengerukan	92,372	220,037	<i>Dredging</i>
Bongkar muat	63,101	47,800	<i>Cargo handling</i>
Air bersih	33,748	57,734	<i>Clean water</i>
Jasa broker kapal - net	13,545	17,136	<i>Charter broker service – net</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	5,545	8,540	<i>Others (each below Rp2,000)</i>
	<u>2,457,155</u>	<u>2,045,105</u>	
Pendapatan lainnya			Other revenues
Sewa kapal	1,340,814	1,009,611	<i>Vessel charter</i>
Sewa gudang	3,018	3,481	<i>Warehouse rental</i>
	<u>1,343,832</u>	<u>1,013,092</u>	
Jumlah	<u>3,800,987</u>	<u>3,058,197</u>	Total

Grup mengakui kontrak aset terkait pendapatan berikut ini:

The Group has recognised contract assets related to the following revenues:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Aset kontrak			Contract assets
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	443,647	299,609	<i>Shipping agency and port services</i>
Sewa kapal	140,989	70,690	<i>Vessel charter</i>
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	119,300	188,621	<i>Marine operations support services</i>
Pengerukan	61,369	160,514	<i>Dredging</i>
Jasa penyediaan tenaga kerja	59,367	41,760	<i>Labour supply services</i>
Jasa broker kapal	28,648	25,981	<i>Ship brokerage services</i>
Air bersih	-	15,269	<i>Clean water</i>
Jumlah, setelah dikurangi provisi penurunan nilai	<u>853,320</u>	<u>802,444</u>	Total, net of expected credit loss
Liabilitas kontrak			Contract liabilities
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	141,543	115,171	<i>Shipping agency and port services</i>
Jumlah	<u>141,453</u>	<u>115,171</u>	Total

Lihat catatan 24 untuk informasi terkait pihak berelasi.

Refer to Note 24 for related party information.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

20. COST OF REVENUE

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Penyediaan tenaga kerja	803,749	555,572	<i>Labour supply services</i>
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	584,882	398,524	<i>Marine operations support services</i>
Sewa kapal	440,115	404,098	<i>Vessel charter</i>
Penyusutan (Catatan 10 & 14)	408,147	243,062	<i>Depreciation (Note 10 & 14)</i>
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	220,049	198,017	<i>Shipping agency and port services</i>
Perdagangan umum	110,598	83,233	<i>General trading</i>
Pengurukan	49,522	223,458	<i>Dredging</i>
Bongkar muat	49,330	33,743	<i>Cargo handling</i>
Air bersih	20,347	38,380	<i>Clean water</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	<u>2,113</u>	<u>3,463</u>	<i>Others (each below Rp2,000)</i>
Jumlah	<u>2,688,852</u>	<u>2,181,550</u>	Total

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Umum			General
Biaya karyawan dan kesejahteraan	284,608	219,551	<i>Employee costs and welfare</i>
Pemeliharaan bangunan dan gedung kantor	94,652	38,855	<i>Maintenance of buildings and office building</i>
Perlengkapan kantor	18,548	24,521	<i>Office supplies</i>
Hubungan masyarakat	18,358	8,819	<i>Public relations</i>
Sewa jangka pendek atau atas aset bernilai rendah	12,778	4,917	<i>Short-term leases and leases of low value assets</i>
Telekomunikasi	2,553	5,283	<i>Telecommunication</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	<u>4,809</u>	<u>3,170</u>	<i>Others (each below Rp2,000)</i>
	<u>436,306</u>	<u>305,116</u>	
Administrasi			Administrative
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 10 & 14)	10,122	6,910	<i>Depreciation and amortisation (Note 10 & 14)</i>
Biaya bank	3,348	4,062	<i>Bank charges</i>
Jasa profesional	8,409	1,430	<i>Professional fees</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	<u>-</u>	<u>578</u>	<i>Others (each below Rp2,000)</i>
	<u>21,879</u>	<u>12,980</u>	
Jumlah	<u>458,185</u>	<u>318,096</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. (BEBAN)/KEUNTUNGAN LAIN-LAIN, NETO

22. OTHER (EXPENSES)/INCOME, NET

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba/(rugi) selisih kurs, neto	1,016	(21,505)	Foreign exchange gain/(loss), net
Beban denda pajak	-	(15,949)	Tax penalties
Penyisihan piutang tak tertagih	(2,863)	(2,111)	Bad debt expense
Pemulihan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	5,608	5,583	Reversal of impairment on trade receivables (Note 5)
Klaim atas denda penyerahan kapal	10,408	1,481	Claim from late delivery of vessels
Lain-lain, neto	<u>11,374</u>	<u>5,546</u>	Others, net
Jumlah	<u>25,543</u>	<u>(26,955)</u>	Total

23. BEBAN KEUANGAN

23. FINANCE COSTS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Beban keuangan atas pinjaman jangka panjang	(46,548)	(52,839)	Finance cost of long-term borrowing
Beban keuangan atas liabilitas sewa	<u>(7,624)</u>	<u>(6,021)</u>	Finance costs of lease liabilities
Jumlah	<u>(54,172)</u>	<u>(58,860)</u>	Total

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH**

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES**

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama ataupun entitas berelasi dengan Pemerintah. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

In the normal course of business, the Group enters into trade and non-trade with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control or Government-related entities. Sales or purchase price among related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between third parties.

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

<u>Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities</u>	<u>Sifat hubungan/ Nature of relationships</u>	<u>Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions</u>
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Perusahaan induk utama/Ultimate parent company	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha, dan modal saham/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables and share capital
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Pemegang saham/Shareholder	Modal saham/Share capital
PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha dan penyertaan saham/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables and investment in shares

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Perta Arun Gas ("PAG")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables
PT Peteka Karya Tirta ("PKT")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables
PT Pertamina International Shipping ("PIS")	Pemegang saham mayoritas/Majority shareholder	Pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/Revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables
PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ("PHE ONWJ")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Retail ("PTPR")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Kilang Pertamina International ("KPI")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. ("TPI")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan dan kontrak aset/Revenue, cost of revenue and contract assets
PT Pertamina Bina Medika ("Pertamedika")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of revenue and trade payables
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Perusahaan ventura bersama/Joint venture	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("PHE WMO")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Nusantara Regas ("Nusantara Regas")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina EP ("PEP")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset/Revenue and contract assets
PT Mitra Tours and Travel ("MTT")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of revenue and trade payables
PT Pertamina Gas ("Pertagas")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan /Revenue
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore ("PHE NSO")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan /Revenue

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang
berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The nature of transactions and relationships with
related parties are as follows: (continued)

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ("PHE JM")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan /Revenue
PT Elnusa Tbk. ("Elnusa")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan /Revenue
PT Surveyor Indonesia (Persero) ("Surveyor Indonesia")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Pertamina Lubricants ("PTPL")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban pokok pendapatan/Cost of revenue,
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ("Pelindo")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Utang usaha/Trade payables
Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd. ("PIMD")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Liabilitas kontrak/Contract liabilities
PT Alor Bahtera Laju Abadi ("Alor")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Ararkula Bahtera Laju Abadi ("Ararkula")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Aru Bahtera Laju Abadi ("Aru")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Bangkit Bahtera Laju Abadi ("Bangkit")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Barung Bahtera Laju Abadi ("Barung")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Liran Bahtera Laju Abadi ("Liran")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Banggai Bahtera Laju Abadi ("Banggai")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Benggala Bahtera Laju Abadi ("Benggala")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Bepondi Bahtera Laju Abadi ("Bepondi")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Brass Bahtera Laju Abadi ("Brass")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Damar Bahtera Laju Abadi ("Damar")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Damanusa Bahtera Laju Abadi ("Damanusa")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows: (continued)

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Miangas Bahtera Laju Abadi ("Miangas")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Patra Logistik ("Patra Logistik")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Kontrak liabilitas/Contract liabilities
Mandiri	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Penempatan kas dan setara kas dan pinjaman jangka panjang/Placement of cash and cash equivalents and long-term borrowings
BSI (sebelumnya/previous BSM)	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Penempatan kas dan setara kas dan pinjaman jangka panjang/Placement of cash and cash equivalents and long-term borrowings
BSI (sebelumnya/previous BNIS)	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Penempatan kas dan setara kas dan pinjaman jangka panjang/Placement of cash and cash equivalents and long-term borrowings
BNI	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Penempatan kas dan setara kas/Placement of cash and cash equivalents
BRI	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Penempatan kas dan setara kas/Placement of cash and cash equivalents
PT PGN LNG Indonesia ("PGN LNG")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Jawa Satu Power ("JSP")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Trans Pasific Petrochemical Indonesia ("TPPI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pratama Mitra Sejati ("PMS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government- related entity	Utang usaha/Trade payables

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows:

Kas dan setara kas (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 15,16% dan 8,67% dari jumlah aset.

Cash and cash equivalents (Note 4)

As at 31 December 2021 and 2020, the balances of cash and cash equivalents placed in Government-related entities represent 15.16% and 8.67%, respectively, of the total assets.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Piutang usaha (Catatan 5)

Trade receivables (Note 5)

	2021	2020
KPI	379,359	-
Patra Niaga	336,761	246
PIS	157,996	37,174
Pertamina	31,031	401,848
PAG	28,592	39,293
PHE OSES	17,875	130
PHE ONWJ	12,129	14,393
PHKT	7,813	7,490
TYM	6,952	7,398
PHM	5,949	-
PKT	4,707	-
PGN LNG	4,450	-
JSP	4,400	-
PTPR	3,739	1,473
TPPI	3,693	-
Nusantara Regas	1,994	2,404
PHE WMO	685	2,139
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	2,209	2,213
Jumlah	1,010,334	516,201
Persentase terhadap jumlah aset	12.74%	8.61%

KPI
Patra Niaga
PIS
Pertamina
PAG
PHE OSES
PHE ONWJ
PHKT
TYM
PHM
PKT
PGN LNG
JSP
PTPR
TPPI
Nusantara Regas
PHE WMO
Others (each
below Rp2,000)

Total

**As a percentage
of total assets**

Kontrak aset (Catatan 6)

Contract assets (Note 6)

	2021	2020
PIS	529,592	106,575
Patra Niaga	65,653	-
PTPR	26,833	16,350
PHE OSES	19,338	6,690
PHKT	13,173	35,757
PKT	11,325	-
PHM	10,538	10,457
PHE ONWJ	10,390	5,231
PEP	7,549	2,657
Pertamina	5,836	423,299
PGN LNG	3,483	-
KPI	3,339	-
PAG	2,299	11,603
TPI	-	2,921
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	2,895	3,905
Jumlah	712,243	625,445
Persentase terhadap Jumlah aset	8.98%	10.43%

PIS
Patra Niaga
PTPR
PHE OSES
PHKT
PKT
PHM
PHE ONWJ
PEP
Pertamina
PGN LNG
KPI
PAG
TPI
Others (each
below Rp2,000)

Total

**As a percentage
of total assets**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Penyertaan saham

Investment in shares

	Kepemilikan/ Ownership (%)	2021	2020	
PKT	0.01%	1,129	-	PKT
Benggala	0.10%	728	-	Benggala
Banggai	0.10%	710	-	Banggai
Barung	0.10%	385	-	Barung
Mianggas	0.10%	370	-	Mianggas
Alor	0.10%	365	-	Alor
Aru	0.10%	379	-	Aru
Bangkit	0.10%	315	-	Bangkit
Ararkula	0.10%	344	-	Ararkula
Liran	0.10%	315	-	Liran
Brass	0.10%	273	-	Brass
Damanusa	0.10%	265	-	Damanusa
Damar	0.10%	265	-	Damar
Bepondi	0.10%	100	-	Bepondi
Patra Niaga	0.01%	56	8,098	Patra Niaga
Jumlah		5,999	8,098	Total

Utang usaha (Catatan 11)

Trade payables (Note 11)

	2021	2020	
Pertamina	576,231	438,648	Pertamina
Patra Niaga	24,932	284	Patra Niaga
PAG	17,685	3,719	PAG
PKT	6,555	-	PKT
PMS	2,724	950	PMS
Pertamedika	2,157	435	Pertamedika
Surveyor Indonesia	1,599	6,211	Surveyor Indonesia
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	8,089	6,511	Others (each below Rp2,000)
Jumlah	639,972	456,758	Total
Persentase terhadap Jumlah liabilitas	14.70%	13.37%	As a percentage of total liabilities

Liabilitas kontrak (Catatan 13)

Contract liabilities (Note 13)

	2021	2020	
PIS	53,659	-	PMS
PIMD	138	105	PIMD
Patra Logistik	17	-	Patra Logistik
Jumlah	53,814	105	Total
Persentase terhadap Jumlah liabilitas	1.20%	0.00%	As a percentage of total liabilities

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**24. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Pinjaman jangka panjang (Catatan 16)

Long-term borrowings (Note 16)

	2021	2020
Mandiri	353,807	88,124
BSI - sebelumnya BMS	164,240	149,861
BSI - sebelumnya BNIS	155,084	206,910

Mandiri
BSI - previously BMS
BSI - previously BNIS

Jumlah	673,131	444,895

Total

Persentase terhadap Jumlah liabilitas	15.04%	13.02%

**As a percentage
of total liabilities**

Pendapatan usaha (Catatan 19)

Revenue (Note 19)

	2021	2020
Pertamina	1,331,000	1,829,994
PIS	590,137	108,769
Patra Niaga	510,323	1,050
KPI	297,125	-
PTPR	181,739	156,243
PAG	118,816	121,569
PHE OSES	89,805	76,064
PHKT	82,090	9,603
PHM	64,129	179,778
PHE ONWJ	40,172	52,629
PKT	15,540	-
Nusantara Regas	12,471	14,085
PGN LNG	10,777	-
PHE WMO	5,667	3,899
PEP	6,616	3,754
PHSS	5,351	-
PHE JM	3,128	5,535
Pertagas	-	70,499
PHE NSO	-	6,619
Elnusa	-	5,520
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	2,572	2,047

Pertamina
PIS
Patra Niaga
KPI
PTPR
PAG
PHE OSES
PHKT
PHM
PHE ONWJ
PKT
Nusantara Regas
PGN LNG
PHE WMO
PEP
PHSS
PHE JM
Pertagas
PHE NSO
Elnusa
Others
(each below Rp2,000)

Jumlah	3,367,458	2,647,657

Total

Persentase dari jumlah pendapatan	88.59%	86.58%

**Percentage from
total revenues**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**24. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-ENTITIES (continued)**

Beban pokok pendapatan (Catatan 20)

Cost of revenues (Note 20)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pertamina	289,378	188,371	Pertamina
Patra Niaga	133,167	4,478	Patra Niaga
PAG	25,471	11,724	PAG
PKT	3,623	-	PKT
PTPL	6,809	9,569	PTPL
ATPI	855	27,759	ATPI
Pertamedika	-	2,143	Pertamedika
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	<u>4,542</u>	<u>1,324</u>	Others (each below Rp2,000)
Jumlah	<u>463,845</u>	<u>245,368</u>	Total
Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan	<u>17.25%</u>	<u>11.25%</u>	Percentage from total cost of revenues

Kompensasi dan imbalan lain

Compensation and other benefits

Kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan
kepada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Compensation provided by the Company to its key
management is as follows:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Gaji dan imbalan lainnya	<u>8,136</u>	<u>8,809</u>	Salaries and other benefits

25. SALDO LABA DICADANGKAN

25. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib dari laba bersih sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 issued in August 2007, requires each company to establish a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of a Company's issued and paid up capital. There is no time limit on the establishment of such reserve.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah membentuk dana cadangan sebesar Rp75.943.

As at 31 December 2021 and 2020, the Company has provided for Rp75,943 as general reserves.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI

26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Perjanjian kerjasama dengan PT Perta Arun Gas

Pada tanggal 30 Januari 2015 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan terminal antara Perusahaan dengan PT Perta Arun Gas. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah untuk jasa rutin sebesar Rp40.990 per tahun, dan untuk jasa non-rutin adalah sebesar pengeluaran nyata ditambah dengan margin yang sudah di atur dalam perjanjian.

Pada tanggal 30 Mei 2017, perjanjian ini diperpanjang selama lima belas tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

b. Perjanjian kerjasama dengan Asosiasi Produsen Biofel Indonesia ("APROBI")

Pada tanggal 30 April 2019 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan *ship-to-ship* antara Perusahaan dengan APROBI. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut untuk jasa rutin adalah sebesar Rp28.968 per bulan, dan untuk jasa non-rutin adalah sebesar pengeluaran nyata ditambah dengan *fee* yang sudah di atur dalam perjanjian.

Pada tanggal 20 Juli 2020, telah ditandatangani perpanjangan dari perjanjian kerjasama tersebut yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

c. Perjanjian sewa berdasarkan waktu

Perusahaan memiliki beberapa perjanjian untuk menyewakan kapal-kapal ke beberapa pelanggan. Perjanjian yang signifikan adalah dengan Pertamina. Periode perjanjian-perjanjian tersebut umumnya 1 - 2 tahun dengan opsi perpanjangan jangka waktu.

a. Cooperation agreement with PT Perta Arun Gas

On 30 January 2015, a cooperation agreement for port terminal management was signed between the Company and PT Perta Arun Gas. The agreement is valid for three years and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement is for a routine services at Rp40,990 per year, and for non-routine services amounting to actual expenditures plus a margin as set out in the agreement.

On 30 May 2017, this agreement was extended for fifteen years and may be extended according to the agreement.

b. Cooperation agreement with Indonesia Biofuel Producer Association ("APROBI")

On 30 April 2019, a cooperation agreement for ship-to-ship management was signed between the Company and APROBI. The agreement is valid for one year and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement is for a routine services at Rp28,968 per month and for non-routine services amounted to real expenditures plus a fee set as part of the agreement.

On 20 July 2020, an extension of this agreement was signed and validated for one year and may be extended according to the agreement.

c. Time charter agreement

The Company has several agreements to lease vessels to various customers. The significant agreements are with Pertamina. The period of these agreements are typically made for 1 - 2 years with options to extend the term.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

**26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

d. Perjanjian pengelolaan Pelabuhan bundling dan unbundling

Pada tanggal 9 Juni 2021, konsorsium grup PTK, yang terdiri dari PTK, PKS, PKG, PKJ, dan PKT, mengadakan perjanjian pengelolaan pelabuhan bundling dan unbundling terkait jasa kepelabuhanan, jasa marine, dan jasa konstruksi untuk Sub Holding Refinery and Petrochemical dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2021. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp908.884 per tahun.

Pada tanggal 11 Juni 2021, konsorsium grup PTK juga mengadakan perjanjian pengelolaan pelabuhan bundling dan unbundling terkait jasa kepelabuhanan, jasa marine, dan jasa konstruksi untuk Sub Holding Commercial and Trading dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2021. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp27,97 per liter dengan jumlah Rp1.736.238 per tahun.

e. Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundangkan berbagai peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus. Salah satu dari peraturan pelaksana ini adalah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan pelaksana ini mengatur, antara lain, jangka waktu kontrak untuk karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah lima tahun maksimum dan karyawan ini berhak atas uang kompensasi yang dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja, termasuk pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Grup melalui anak perusahaannya, PKG, memiliki karyawan perjanjian kerja waktu tertentu. Manajemen Grup berpendapat bahwa paket kompensasi karyawan yang diberikan kepada karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu-nya telah memenuhi ketentuan PP 35/2021.

d. Bundling and unbundling port management agreement

On 9 June 2021, PTK group consortium, which consists of PTK, PKS, PKG, PKJ, and PKT, entered into bundling and unbundling port management agreement related to port, marine and construction for Sub Holding Refinery and Petrochemical with Pertamina. The agreement is valid for 10 (ten) years effective from 1 May 2021. Contract value of this agreement is Rp908,884 per year.

On 11 June 2021, PTK group consortium also entered into bundling and unbundling port management agreement related to port, marine and construction services for Sub Holding Commercial and Trading with Pertamina. The agreement is valid for 10 (ten) years effective from 1 May 2021. Contract value of this agreement is Rp27.97 per liter with total amount of Rp1,736,238 per year.

e. Job Creation Bill

In February 2021, the Government officially enacted various implementing regulations of the Omnibus Law. One of these implementing regulations is Government Regulation No. 35 of 2021 concerning the Limited Time Employment Agreement, Outsourcing, Working Time and Break Time, and Termination of Employment. This implementing regulation regulates, among other things, that the contract period for employees with a limited time employment agreement is five years maximum and these employees are entitled to compensation benefit which is calculated proportionally based on the length of service, including severance pay and service pay.

The Group through its subsidiary, PKG, has employees with limited time employment agreements. The Group's management is of the opinion that the employee compensation package provided to its Temporary Appointment Work Agreement (PKWT) employees has complied with the provision of PP 35/2021.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/71 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

f. Perjanjian Kerja Laut

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7/2000 tentang Kepelautan, Perjanjian Kerja Laut ("PKL") didefinisikan sebagai perjanjian kerja perorangan yang dibuat oleh pelaut Indonesia dengan pemberi kerja. Grup melalui anak perusahaannya, PKG, memiliki pekerja laut yang dipekerjakan melalui PKL.

Pasal 337 Undang-Undang No. 17/2008 ("UU Pelayaran") mengharuskan bahwa hal-hal terkait ketenagakerjaan di bisnis pelayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya. Namun, berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST menyimpulkan bahwa PKL harus tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 7/2000 sebagai persyaratan utama dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya selama ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 7/2000.

g. Undang-Undang No. 2/2020

Pada tanggal 30 April 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perpu") No. 1/2020, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan sistem keuangan mengingat pandemi COVID-19 serta hal lain yang dapat mengancam ekonomi nasional. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diumumkan yaitu 30 April 2020.

Selanjutnya Perpu No. 1/2020 ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 2/2020 setelah disetujui DPR dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Mei 2020. Selanjutnya diundangkan dan mulai berlaku mulai tanggal 18 Mei 2020.

Salah satu dari perubahan tersebut mengatur tentang pengurangan tarif pajak, yang berlaku untuk tahun fiskal 2020 dan seterusnya yang dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 30/2020 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dan diundangkan tanggal 18 Juni 2020. Lihat perkembangan peraturan perpajakan di Catatan 26h.

26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Sea Employment Contract

Under Government Regulation No. 7/2000 on Seamanship, Sea Employment Contract ("SEC") is defined as an individual employment agreement executed by the Indonesian seafarer with the employers. The Group through its subsidiary, PKG, has seafarers that are employed under SEC.

Article 337 of Law No. 17/2008 (the "Shipping Law") requires that manpower matters in the shipping business to comply with the requirements under the Manpower Law and its implementing regulations. However, under the Decision of Industrial Relation Court No. 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST conclude that a SEC must comply with the Indonesian Commercial Code and Government Regulation No. 7/2000 as the main requirements as well as the Manpower Law (and its implementing regulations) as long as the requirements under the Manpower Law are not conflicting with the Indonesian Commercial Code and GR No. 7/2000.

g. Law No. 2/2020

On 30 April 2020, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Law ("Regulation") No. 1/2020, which articulated its policy on maintaining the stability of state finances and the financial system in light of the COVID-19 pandemic and other threats that might endanger the national economy. This regulation was effective immediately when announced on 30 April 2020.

Regulation No. 1/2020 was then enacted as Law No. 2/2020 after the approval of the Indonesian Parliament and received the assent of the President on 16 May 2020 which was effective starting from 18 May 2020.

One of the notable clauses is on the reduction of the tax rate, which is applicable for fiscal year 2020 onward which was further explained in Government Regulation No. 30/2020 regarding lower domestic corporate income tax rate effective from 18 June 2020. It stipulates that the income tax rate for corporations is set at a rate of 22% for fiscal years 2020 and 2021 and further reduced to 20% for fiscal year 2022 onwards. Refer to Note 26h for updates on tax regulations.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/72 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

**26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

h. Undang-Undang No. 7/2021

Pada tanggal 7 Oktober 2021, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU No. 7/2021 ("UU HPP"). UU ini mengatur sejumlah aturan baru perpajakan sebagai salah satu cara Pemerintah mereformasi sistem perpajakan, salah satu implementasinya Nomor Induk Kependudukan ("NIK") sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") untuk wajib pajak orang pribadi

Ketentuan kebijakan lainnya yang menjadi poin penting di dalam UU HPP adalah:

PPN

Kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Adanya sistem multi tarif PPN dengan rentang sekitar 5% - 15% dan tarif PPN 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

Pajak Penghasilan Orang pribadi ("PPh OP")

Adanya perubahan dan penambahan rentang tarif PPh OP menjadi 5 lapisan atau kategori yaitu lapisan kena pajak sampai dengan Rp60 (tarif pajak 5%), diatas Rp60 - Rp250 (tarif pajak 15%), diatas Rp250 - Rp500 (tarif pajak 25%), diatas Rp500 juta - Rp5.000 (tarif pajak 30%), dan lapisan kelima untuk pendapatan diatas Rp5.000 (tarif pajak 35%).

Program Pengungkapan Sukarela

Program ini akan diberlakukan selama enam bulan, yaitu pada kurun waktu 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 dan program ini hanya akan berlaku bagi wajib pajak badan yang sebelumnya berpartisipasi dalam program pengampunan pajak dan wajib pajak orang pribadi.

PPh Badan

Tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sementara wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu diberikan tarif 3% lebih rendah dari 22%.

h. Law No. 7/2021

On 7 October 2021, the Indonesian Parliament approved the Harmonisation of Tax Regulations Bill, which on 29 October 2021, was signed into law by the President as Law No. 7/2021 ("HPP Law"). This law regulates a number of new tax rules as one way for the Government to reform the tax system, one of which is the implementation of the Population Identification Number as Taxpayer Identification Number for individual taxpayers.

Other policy provisions that are important points in the HPP Law are:

VAT

Gradual increase in general VAT rates, increasing from 10% to 11% starting 1 April 2022 and 12% rate starting 1 January 2025. There is a VAT multi-tariff system with a range of around 5% - 15% and a VAT rate of 0% for the export of tangible and intangible taxable goods and the export of taxable services.

Personal Income Tax ("PPh OP")

There are changes and additions to the range of PPh OP rates into 5 layers or categories, namely: taxable layer up to Rp60 (5% tax rate), above Rp60 - Rp250 (15% tax rate), above Rp250 - Rp500 (25% tax rate), above Rp500 - Rp5,000 (30% tax rate) and the fifth layer for income above Rp5,000 (tax rate of 35%).

Voluntary Disclosure Programme

This programme will be implemented for six months, from 1 January 2022 to 30 June 2022 and this will be applicable only for corporate taxpayers who previously participated in the tax amnesty programme and individual taxpayers.

Corporate Income Tax

Domestic corporate income tax rates and permanent establishments are 22% which will come into effect in the 2022 fiscal year. Meanwhile, domestic corporate taxpayers in the form of Perseroan Terbuka, with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange at least 40% and fulfilling certain requirements are given a tariff which is 3% lower than 22%.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/73 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

**26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

h. Undang-Undang No. 7/2021 (lanjutan)

Perubahan UU Cukai

Perubahan berupa penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai, menggunakan prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir terkait pelanggaran cukai yang mencakup pelanggaran perizinan, pengeluaran barang kena cukai, barang kena cukai tidak dikemas, barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup masih mereviu dan mengevaluasi dampak potensial UU HPP terhadap bisnis dan laporan keuangan konsolidasian Grup namun telah menambah aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan sebagai akibat dari kenaikan tarif pajak tersebut.

i. Kasus hukum atas lahan disewakan kepada PT Batubara Mandiri

Pada tanggal 27 April 2021, Grup digugat oleh PT Batubara Mandiri terkait pembatasan penggunaan lahan sewa di Lahan Bagus Kuning, Plaju, Palembang. Menurut PT Batubara Mandiri, mereka hanya dapat menggunakan lahan seluas 15.000m² dari 42.650m² luas lahan yang dinyatakan dalam kontrak.

Pada tanggal 8 April 2014, PT Batubara Mandiri menerima surat peringatan dan denda dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dikarenakan lokasi lahan sewa tidak termasuk di dalam lokasi persediaan batu bara yang telah ditentukan. Dikarenakan pembatasan ini mempengaruhi aktivitas operasional, PT Batubara Mandiri menganggap bahwa Grup bertanggung jawab atas kerugian mereka sebesar Rp298.964.

Pada tanggal 22 September 2021, perkara ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Batam dimana keputusan pengadilan memenangkan tergugat. Namun, berdasarkan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa perkara ini dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan banding dan memutuskan untuk memenangkan penggugat. Namun, Pengadilan Negeri Palembang menunjuk Pengadilan Negeri Batam untuk memutuskan hasil atas perkara ini. Saat ini Grup sedang mengajukan banding ke pengadilan Tinggi.

h. Law No. 7/2021 (continued)

Changes to the Excise Law

The change is the addition or reduction of types of excisable goods, using the principle of punishment as a last resort related to excise violations which include licensing violations, releasing excisable goods, unpackaged excisable goods, excisable goods originating from criminal acts and the sale and purchase of excise stamps.

As at the date of these consolidated financial statements, the Group is still reviewing and evaluating the potential impact of the HPP Law to the Group's business and consolidated financial statements but it has increased the deferred tax assets and deferred tax income as a result of the tax rate increase.

i. Legal case of leased land to PT. Batubara Mandiri

On 27 April 2021, the Group was sued by PT Batubara Mandiri due to leased land use limitation in Lahan Bagus Kuning, Plaju, Palembang. According to PT Batubara Mandiri, they can only use 15,000m² from 42,650m² of total area stated in contract.

On 8 April 2014, PT Batubara Mandiri has received a warning letter and penalty from Ministry of Energy and Mineral Resources of South Sumatera due to leased land location is not included in the location determined as coal stockpile area. Since these limitations are impacting their operational activity, PT Batubara Mandiri believes that the Group is responsible for their losses amounting to Rp298,964.

On 22 September 2021, this legal case is handled by Batam District Court which decided in favor of the defendant. However, based on Regulation of Legal Events for Regions Outside Java and Madura, Batam District court is of the opinion that this legal case should be decided by Palembang District Court.

On 21 December 2021, Palembang District Court granted the appeal request and decided in favor of the plaintiff. However, Palembang District Court appointed Batam District Court to decide this legal case. Currently the Group has appealed to the high court.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/74 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

**i. Kasus hukum atas lahan disewakan kepada
PT Batubara Mandiri (lanjutan)**

Grup berpendapat hasil akhir perkara ini tidak akan memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Grup.

**26. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

**i. Legal case of leased land to PT. Batubara
Mandiri (continued)**

The Group is of the opinion that the result of this legal case will not have material adverse impact to the Group's financial position and cash flows.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

• **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, utang pembiayaan konsumen, liabilitas sewa pembiayaan dan pinjaman bank jangka panjang yang dimiliki Grup.

Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah sebesar 100 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp35.192 terutama sebagai akibat lebih tinggi/lebih rendah biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk. Market prices contain two types of risk: interest rate risk and foreign exchange rate risk.

• **Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's cash and cash equivalents, consumer finance liability, finance lease liabilities, and long-term bank loans

There is no formal hedging policy with respect to the interest rate exposure. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

As at 31 December 2021, had the interest rates of the loans and borrowings been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, income before corporate income tax for the year ended 31 December 2021 would have been Rp35,192 lower/higher, accordingly, mainly as a result of higher/lower interest charges on the loans and borrowings with floating interest rates.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

• **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi oleh Grup sebagai akibat fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan pinjaman bank jangka panjang, utang usaha, utang lain-lain, dan biaya yang masih harus dibayar, dan piutang sewa pembiayaan dalam mata uang Dolar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp5.530.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari debitur atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk debitur individu dan memantau risiko terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha dan kontrak aset telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit gabungan dan waktu jatuh tempo

Tarif kerugian ekspektasian adalah berdasarkan profil pembayaran penjualan masing-masing selama periode 24 bulan sebelum 31 Desember 2020 atau 1 Januari 2020 dan kerugian kredit historis terkait yang dialami dalam periode ini. Tarif historis kerugian disesuaikan dengan informasi pada saat ini dan di masa depan atas faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutangnya. Grup telah mengidentifikasi harga minyak mentah sebagai faktor yang paling relevan dan menyesuaikan tarif kerugian historis berdasarkan perubahan yang diekspektasi pada faktor tersebut.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

• **Foreign exchange rate risk**

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from USD denominated long-term bank loans, trade payables, other payables and accrued expenses and finance lease receivables.

As at 31 December 2021, had the exchange rate of the Rupiah against the foreign currency depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, profit before final and income tax for the year ended 31 December 2021 would have been Rp5,530 higher/lower.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from its debtors or counterparties' failure to fulfill their contractual obligations. The Group manages and controls this credit risk by setting limits on the amount of risk it is willing to accept for individual debtors and by monitoring exposures in relation to such limits.

To measure the ECL, trade receivables and contract assets have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

The expected loss rates are based on the payment profiles of sales over a period of 24 months before 31 December 2020 or 1 January 2020, respectively, and the corresponding historical credit losses experienced within this period. The historical loss rates are adjusted to reflect current and forwardlooking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables. The Group has identified the crude oil prices to be the most relevant factor and accordingly adjusts the historical loss rates based on expected changes in this factor.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/76 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang usaha sebesar Rp1.224.643 (31 Desember 2020: Rp722.474) mengalami penurunan nilai dan telah diprovokasi sebesar Rp93.335 (31 Desember 2020: Rp96.716).

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas kas Grup terutama berasal dari kebutuhan untuk melakukan pembayaran biaya operasional kapal dan pelunasan atas pinjaman bank jangka panjang. Sumber dana pembayaran berasal dari kontrak sewa kapal jangka pendek, menengah dan panjang dan pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman bank jangka panjang.

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual dalam kontrak:

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 year</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 year</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 year</u>	<u>Jumlah/Total</u>
31 Desember 2021					
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	639,972	-	-	-	639,972
- Pihak ketiga	230,515	-	-	-	230,515
Biaya yang masih harus dibayar	1,566,119	-	-	-	1,566,119
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	53,814	-	-	-	53,814
- Pihak ketiga	87,639	-	-	-	87,639
Liabilitas sewa	225,166	48,815	-	-	273,981
Pinjaman jangka panjang	236,777	233,553	317,012	450,042	1,237,384
Jumlah	3,185,592	282,368	317,012	450,042	4,235,014

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

As at 31 December 2021, trade receivables of Rp1,224,643 (31 December 2020: Rp722,474) were impaired and had been provided for with an amount of Rp93,335 (31 December 2020: Rp96,716).

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statement of financial position.

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the cash flow position of the Group indicate that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Group's liquidity requirements mainly come from repayments of bank loans and related interest and vessel operation costs. The source of funds to fulfil the repayment of long-term bank loans is from contractual rental with third parties in the short, medium and long-term and funds obtained from long-term bank loans.

The Group evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintain its payables and receivables days' stability.

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments:

31 December 2021
Financial liabilities
Trade payables
Related parties -
Third parties -
Accrued expenses
Contract liabilities
Related parties -
Third parties -
Lease liabilities
Long-term borrowings

Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/77 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 year</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 year</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 year</u>	<u>Jumlah/Total</u>
31 Desember 2020					
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	456,758	-	-	-	456,758
- Pihak ketiga	189,211	-	-	-	189,211
Biaya yang masih harus dibayar	1,147,039	-	-	-	1,147,039
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	105	-	-	-	105
- Pihak ketiga	115,066	-	-	-	115,066
Liabilitas sewa	27,123	33,794	-	-	60,917
Pinjaman jangka panjang	299,816	517,284	419,443	44,814	1,281,357
Jumlah	2,256,771	544,407	448,493	75,219	3,250,453

31 December 2020
Financial liabilities
Trade payables
Related parties -
Third parties -
Accrued expenses
Contract liabilities
Related parties -
Third parties -
Lease liabilities
Long-term borrowings

Total

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan diharapkan akan dapat direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Perusahaan menganalisis aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Company's current financial assets and liabilities are expected to be realised or settled in the near term, except for financial assets which are measured at fair value. Therefore, their carrying amounts approximate their fair value.

The Company analyses its financial assets which are measured at fair value. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the assets or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable input) (Level 3).*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Hirarki nilai wajar Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation (continued)

The Company's fair value hierarchy as of 31 December 2021 is as follows:

2021				
	Harga pasar yang dikuotasi untuk aset dan liabilitas yang sama (Tingkat 1)/Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)	Input yang signifikan dan dapat diobservasi secara langsung (Tingkat 2)/Significant and observable inputs, direct or indirectly (Level 2)	Input yang signifikan tetapi tidak dapat diobservasi (Tingkat 3)/Significant unobservable inputs (Level 3)	
Penyertaan saham/Investments in shares	5,999	-	-	5,999
Jumlah/Total	5,999	-	-	5,999

28. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp3.311.015 (2020: Rp2.163.768) sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, serta mengklasifikasikan penyertaan saham sebesar Rp5.999 (2020: Rp8.098) sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup mengklasifikasikan utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, kontrak liabilitas, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang sebesar Rp3.815.444 (2020: Rp3.156.993) sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya amortisasi.

28. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2021, the Group classified its cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, contract assets and finance lease receivables amounting to Rp3,311,015 (2020: Rp2,163,768) as loans and receivables, and classified its investment in shares amounting to Rp5,999 (2019: Rp8,098) as financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

As at 31 December 2021, the Group classified its trade payables, accrued expenses, contract liabilities, short-term borrowings and long-term borrowings amounting to Rp3,815,444 (2020: Rp3,156,993) as financial liabilities measured at amortised cost.

29. INFORMASI TAMBAHAN KAS

Transaksi non-kas

	2021	2020
Perolehan aset tetap melalui peningkatan biaya yang masih harus dibayar	(216,655)	216,952
Perolehan aset tetap melalui penerbitan saham	412,437	-
Perolehan aset hak-guna melalui biaya dibayar dimuka	1,550	-
Perolehan aset tetap melalui penerimaan atas denda penyerahan kapal	10,408	1,481
Pembagian dividen melalui transaksi non-kas	9,937	176,996

29. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION

Non-cash transaction

Acquisition of fixed assets through increase in accrued expenses
Acquisition of fixed assets through issuance of share
Acquisition of right-of-use assets through prepaid expenses
Acquisition of fixed assets through settlement from late delivery of vessels
Dividend declared through non-cash transactions

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/79 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. INFORMASI TAMBAHAN KAS (lanjutan)

**29. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION
(continued)**

Transaksi non-kas (lanjutan)

Non-cash transaction (continued)

	2021		2020	
Penurunan piutang usaha akibat dekonsolidasi	(9,786)	-		Decrease in trade receivables as a result of deconsolidation
Penurunan aset kontrak akibat dekonsolidasi	(24,888)	-		Decrease in contract assets as a result of deconsolidation
Penurunan pajak dibayar dimuka akibat dekonsolidasi	(153)	-		Decrease in prepaid taxes as a result of deconsolidation
Penurunan utang pajak akibat dekonsolidasi	217	-		Decrease in tax payables as a result of deconsolidation

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Reconciliation of liabilities from financing activities

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2021 dan 2020 as follows:

	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	Pinjaman jangka pendek/ Short-term bank loan	Pinjaman bank jangka panjang/ Long-term bank loan	Jumlah/ Total	
1 Januari 2020	131,678	25,516	1,078,493	1,235,687	1 January 2020
Arus kas masuk	-	-	384,514	384,514	Cash inflows
Arus kas keluar	(74,437)	(25,516)	(223,004)	(322,957)	Cash outflows
Penambahan liabilitas sewa	3,676	-	-	3,676	Addition of lease liabilities
Efek perubahan lainnya	-	-	8,811	8,811	Other adjustment effect
31 Desember 2020	60,917	-	1,248,814	1,309,731	31 December 2020
Arus kas masuk	-	-	461,875	461,875	Cash inflows
Arus kas keluar	(8,149)	-	(476,998)	(485,147)	Cash outflows
Penambahan liabilitas sewa	221,616	-	-	221,616	Addition of lease liabilities
Efek perubahan lainnya	(403)	-	3,693	3,290	Other adjustment effect
31 Desember 2021	273,981	-	1,237,384	1,511,365	31 December 2021

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/80 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2021

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ANTARA ENTITAS SEPENGENDALI

Grup sebelumnya memiliki 99,9% saham di PT Peteka Karya Tirta ("PKT"). Informasi keuangan komparatif Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencakup hasil keuangan PKT sebagai berikut:

30. RESTRUCTURING TRANSACTION BETWEEN ENTITIES UNDER COMMON CONTROL

The Group previously owned a 99.9% interest in PT Peteka Karya Tirta ("PKT"). The Company's comparative financial information for the year ended 31 December 2020 includes the following financial results of PKT:

	<u>31 Desember/ December 2020</u>	
Aset lancar	44,314	Current assets
Aset tidak lancar	47,037	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	(10,343)	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	<u>(3,615)</u>	Non-current liabilities
Aset bersih yang dikonsolidasikan	<u>77,393</u>	Net assets consolidated
	<u>2020</u>	
Pendapatan	63,038	Revenue
Beban	(52,560)	Expenses
Penghasilan komprehensif lainnya	<u>525</u>	Other comprehensive income
Penghasilan komprehensif yang dikonsolidasikan	<u>11,003</u>	Total comprehensive income being consolidated
	<u>2020</u>	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(1,770)	Net cash flows used in operating activities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(6,542)	Net cash flows used in investing activities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pembiayaan	<u>(481)</u>	Net cash flows used in financing activities
Kontribusi penurunan kas bersih	<u>(8,793)</u>	Net cash decrease contributed

Pada tanggal 27 Agustus 2021 Pertamina, PIS dan PKT menyelesaikan proses restrukturisasi terhadap PKT yang menyebabkan Perusahaan kehilangan pengendalian atas PKT kepada PIS. Dengan demikian, efektif sejak tanggal 27 Agustus 2021 Perusahaan tidak melakukan konsolidasi atas PKT.

On 27 August 2021 Pertamina, PIS dan PKT has completed a restructuring transaction resulting in the Company losing control of PKT to PIS. As a result, the Company no longer consolidated the financial results of PKT effective 27 August 2021.

Selain kehilangan kendali, Perusahaan juga tidak memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut meskipun tetap memiliki 0,017% kepemilikan di PKT. Dimana pengendalian telah hilang dan pengaruh signifikan tidak dipertahankan, kepentingan yang tersisa dicatat sesuai dengan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang diukur pada FVOCI.

In addition to the loss of control, the Company also doesn't retain significant influence over that entity despite continues to own a 0.017% interest in PKT. Where control has been lost and significant influence is not retained, the remaining interest is accounted for in accordance with SFAS 71 "Financial Instrument" which classified as equity instrument measured at FVOCI.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/81 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**30. TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ANTARA
ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)**

**30. RESTRUCTURING TRANSACTION BETWEEN
ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
(continued)**

Pengendalian atas PKT berpindah kepada PIS, induk perusahaan, sehingga transaksi tersebut dicatat sesuai dengan prinsip PSAK 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara nilai buku bersih dari penyertaan yang ditahan dengan nilai historis kepemilikannya sebesar Rp79.051 dicatat sebagai tambahan modal disetor di ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat dalam laba rugi sebagai akibat dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali ini sesuai dengan prinsip PSAK 38.

Control over PKT was transferred to PIS, consequently the transaction was accounted for in accordance with the principles of SFAS 38 "Business Combination of Entities under Common Control". The difference between the net book value of its retained investment with the historical cost of its ownership in PKT amounting to Rp79,051 was recorded as an additional paid in capital in equity. No gain or loss was recorded in profit or loss as a result of this restructuring transaction between entities under common control in accordance with the principles of SFAS 38.

Nilai tercatat aset dan liabilitas yang dihentikan pengakuannya sehubungan dengan dekonsolidasi entitas anak adalah sebagai berikut:

The carrying amounts of the assets and liabilities which were derecognised in connection with the deconsolidation of the subsidiary is as follows:

	27 Agustus/ August 2021	
Aset lancar	48,384	Current assets
Aset tidak lancar	48,418	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	(6,355)	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	(9,705)	Non-current liabilities
Aset bersih yang dilepas	<u>80,742</u>	Net assets deconsolidated
Dikurangi dengan:		Less:
Nilai buku aset bersih yang dimiliki	<u>(1,691)</u>	Net book value of retained interest
Tambahan modal disetor	<u>(79,051)</u>	Additional paid-in-capital

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2021 masih mencakup hasil usaha anak perusahaan terdahulu sampai dengan hilangnya pengendalian pada tanggal 27 Agustus 2021. Perseroan mengkonsolidasikan laba bersih dari usaha PKT sebesar Rp3.036 selama 1 Januari 2021 - 27 Agustus 2021.

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year 2021 still includes the results of operations of the former subsidiary up to the day the control was lost on 27 August 2021. The Company consolidated a net profit from PKT's operations amounted to Rp3,036 during 1 January 2021 - 27 August 2021.

	1 Januari/January 2021 - 27 Agustus/August 2021	
Pendapatan	40,363	Revenue
Beban	(32,830)	Expenses
Penghasilan komprehensif lainnya	<u>(4,497)</u>	Other comprehensive income
Penghasilan komprehensif lainnya bersih yang dikonsolidasikan	<u>3,036</u>	Net comprehensive income consolidated

Laporan arus kas konsolidasian tahun 2021 menyajikan saldo berikut berkaitan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali:

The consolidated statements of cash flows disclose the following amounts related to restructuring transactions between entities under common control:

	2021	
Pembayaran bersih dari transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali	<u>(11,531)</u>	Net cash outflows from restructuring transactions between entities under common control

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES****Lampiran 5/82 Schedule****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. WABAH COVID-19

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, terdapat penurunan kondisi ekonomi sebagai akibat wabah COVID-19, yang sangat mempengaruhi diantaranya permintaan atas barang dan jasa. Manajemen telah menilai dampak dari kejadian ini terhadap kegiatan operasional Grup dan meyakini bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan yang perlu diperhitungkan dalam jangka pendek walaupun dampak jangka panjang sulit untuk diprediksi saat ini. Manajemen akan terus memonitor hal ini dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa depan.

31. COVID-19 OUTBREAK

As at the date of these consolidated financial statements, there has been an economic downturn as a result of the COVID-19 outbreak, severely affecting among others demand for products and services. Management has assessed the effect of the event to the Group's operations and believes that no significant adverse impact should be considered in the short-term although long-term impacts are difficult to predict at this moment. Management will continue to monitor this and take the necessary actions to address related risks and uncertainties going forward.



Enabling Energy Transformation: Repositioning for The Future

Mengaktifkan Transformasi Energi: Repositioning untuk Masa Depan

2021 Laporan Tahunan
Annual Report

PT Pertamina Trans Kontinental

KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE

Jl. Kramat Raya No. 29

Jakarta Pusat 10450

Tlp. : (+6221) 31923005

Fax. : (+6221) 3106804

Email : ptkpusat@ptk-shipping.com

Website : www.ptk-shipping.com